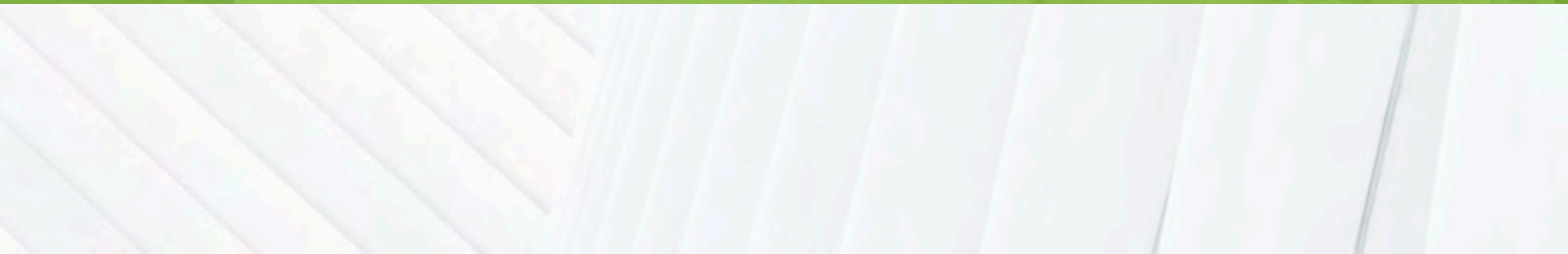


LAPORAN TAHUNAN *ANNUAL REPORT* 2020



***Beyond A New Normal
A New Era of Growth***

**Gigih Berjuang
untuk Tetap Tumbuh Ditengah
Pandemi Covid 19 untuk Sumber
Daya Air Yang Bermanfaat**



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Perum Jasa Tirta II yang menjalankan bisnis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current and future conditions of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", and "Company" which is defined as Perum Jasa Tirta II, which conducts business in the field of Water Resources Management.

Tentang Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II

About Perum Jasa Tirta II Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2020 Perum Jasa Tirta II dengan **Gigih Berjuang Tetap Tumbuh Ditengah Pandemi Covid 19 untuk Sumber Daya Air Yang Bermanfaat** Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Laporan Tahunan 2020 Perum Jasa Tirta II menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip corporate governance.

Laporan Tahunan 2020 Perum Jasa Tirta II disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II, Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, dan Kriteria Annual Report Award (ARA).

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2020.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II 2020 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Perusahaan yaitu www.jasatirta2.co.id.

Welcome to the 2020 Annual Report of Perum Jasa Tirta II which carries **Beyond A New Normal A new Era of Growth**The theme was chosen based on in-depth analysis and review referring to the facts and developments of the Company's business throughout 2020 and the future of the Company's business sustainability.

2020 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is a comprehensive source of documentation containing information on the Company's performance in a year. This information contains complete documentation describing the Company's profile; operational, marketing and financial performance; information about the tasks, roles and structural functions of the Company organization that applies the concepts of best practices and the principles of corporate governance.

2020 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is prepared based on Regulation of The Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 7 of 2010 on Perum Jasa Tirta II, Decree of The Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, Annual Report Award Criteria (ARA).

The main purpose of the preparation of this Annual Report is to increase the disclosure of information of the Company to relevant authorities and to become an annual book that helps build pride and solidarity among employees.

In addition, this Annual Report also aims to build understanding and trust about the Company by providing appropriate, balanced and relevant information. Shareholders and all other stakeholders can obtain adequate information related to policies that have been and will be carried out as well as the Company's achievements throughout 2020.

Perum Jasa Tirta II 2020 Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using types and sizes of fonts that are easy to read and print with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, www.jasatirta2.co.id.

Kesinambungan Tema Theme Continuation

2018



Komitmen Menjaga Sumber Kehidupan
Commitment in Maintaining the Source of Life

2019



Transformasi Menuju Masa Depan
Transformation for the Future

2020



Gigih Berjuang Tetap Tumbuh Ditengah Pandemi Covid 19 untuk Sumber Daya Air Yang Bermanfaat
Beyond A New Normal A new Era of Growth

Perum Jasa Tirta II memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan roda bisnis perum terutama di era pandemi Covid 19 ini. Sumber daya berkualitas, dan pengelolaan yang tertata menumbuhkan kepercayaan konsumen bersama PJT II. / *Perum Jasa Tirta II has a strong basis for running the business of a public company, especially in the era of the Covid 19 pandemic. Quality resources, and organized management foster consumer trust with PJT II.*

Persaingan terus muncul dalam perjalanan bisnis perusahaan, menambah kegigihan sumber daya manusia PJT II yang akan memperkuat pengalaman perusahaan. Mempersiapkan amunisi kekuatan tidak lantas dianggap sebagai rutinitas tanpa peningkatan, tiap periode menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk terus beradaptasi memasuki kancah persaingan. / *Competition continues to emerge in the company business journey, adding to the persistence of PJT II human resources who will strengthen the Company experience. Preparing force ammunition is not necessarily considered a routine without an increase, each period is a lesson for the Company to continue adapting to enter the competition arena.*

Di tengah keunggulan yang terus menjadi tujuan, upaya terarah dan sumber daya berkualitas adalah keharusan. Kami terus berkomitmen melayani dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. / *In the midst of excellence that continues to be the goal, targeted efforts and quality resources are imperative. We continue to be committed to serving and providing the best for Indonesia.*

Daftar Isi

Table of Contents

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer	3	Filosofi Logo Logo Philosophy	70	Sumber Daya Manusia Human Resources	104
Tentang Laporan Tahunan About Annual Report	4	Tujuan Perusahaan Company's Objectives	69	Teknologi Informasi Information Technology	116
Kesinambungan Tema Continuity of Theme	5	Bidang Usaha Perusahaan Company's Line of Business	70	Analisis dan Pembahasan Menejemen Management Discussion and Analysis	
Daftar Isi Table of Contents	6	Struktur Organisasi Organization Structure	76	Tinjauan Makroekonomi dan Industri Macroeconomic and Industrial Review	126
Kilas Kinerja Flashback Performance	9	Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile	78	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Overview per Business Segment	131
Ringkasan Kinerja Performance Summary	10	Profil Direksi Board of Directors Profile	82	Kinerja Anak Perusahaan Subsidiary Performance	152
Kinerja Penugasan Pengelolaan SDA Tahun 2020 Performance of the 2020 Water Resources Management Assignment	12	Daftar Nama Pengurus dan Organ Dewan Pengawas List of Names of Management and Organs of the Supervisory Board	86	Tinjauan Keuangan Financial Overview	153
Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	14	Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi Profile of Officials One Level Below the Board of Directors	87	Kemampuan Memenuhi Kewajiban, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Profitabilitas Perusahaan Ability To Meet Obligations, Receivables Collectibility Level, and Company Profitability	164
Grafik Kinerja Keuangan Financial Performance Graphic	16	Komposisi Kepemilikan Modal Capital Owner Composition	96	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	167
Peristiwa Penting Significant Events	17	Profil Entitas Anak Subsidiaries Profile	96	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment For Capital Goods Investment	167
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	22	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	97	Investasi Barang Modal Tahun 2020 Capital Goods Investment In 2020	168
Laporan Manajemen Management Report		Kronologi Pencatatan Saham & Obligasi Chronology of Share and Bond Listing	97	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Commitment For Capital Goods Investment	168
Laporan Dewan Pengawas Supervisory Board Report	26	Sekilas Tentang Anak Perusahaan Subsidiaries at a Glance	98	Kontribusi Kepada Negara Contribution to the Country	168
Laporan Direksi Board of Directors Report	42	Informasi Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan Information on Company Supporting Institution and/or Professional	99	Prospek Usaha Business Outlook	169
Profil Perusahaan Company Profile		Informasi pada Website Perusahaan Information on Company Website	100		
Identitas Perusahaan Company Identity	60	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern Education and / or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit	101		
Profil Wilayah Sungai Citarum Citarum River Basin Profile	63	Tinjauan Pendukung Bisnis Overview of Business Support			
Sekilas Perusahaan Company at a Glance	64				
Jejak Langkah Milestone	66				
Visi dan Misi Vision and Mission	67				
Nilai-Nilai Utama Core Values	68				
Tata Nilai Perusahaan Corporate Values	69				

Perbandingan Antara Proyeksi dan Realisasi 2020 Comparison Between Projection And Realization 2020	171	Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy of Supervisory Board and Board of Directors	226	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Funding for Social and Political Activities	287
Proyeksi Tahun 2021 Projection For 2021	172	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of Supervisory Board	229	Praktik Bad Corporate Governance Bad Corporate Governance Practice	288
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	174	Komite Audit Audit Committee	231	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility	
Kebijakan Dividen Dividend Policy	176	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	237	Komitmen Pelaksanaan TJSL Commitment to CSR Implementation	293
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan Manajemen (MESOP) Management and Employee Share Ownership Program (MESOP)	177	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	240	Metode Program TJSL CSR Program Method	295
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of The Use of Proceeds From Public Offering	177	Akses dan Keterbukaan Informasi Information Disclosure and Access	244	Tata Kelola TJSL CSR Governance	295
Informasi Kelangsungan Usaha Information On Business Continuity	181	Satuan Pengawas Internal (SPI) Internal Supervisory Unit	245	Tanggung Jawab Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia Corporate Responsibility regarding Human Rights	300
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance		Audit Eksternal External Audit	254	Tanggung Jawab Perusahaan terkait Operasi yang Adil Company Responsibilities regarding Fair Operations	302
Komitmen Penerapan GCG GCG Implementation Commitmen	186	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	256	Tanggung Jawab Perusahaan terkait Lingkungan Hidup Corporate Responsibility related to the Environment	304
Dasar Hukum dan Soft Structure GCG Legal Basis and GCG Soft Structure	187	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	258	Tanggung Jawab Perusahaan terkait Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corporate Responsibility related to Labor and Occupational Safety and Health	310
Tujuan Penerapan GCG Objectives of GCG Implementation	189	Manajemen Risiko Risk Management	260	Tanggung Jawab Perusahaan terkait Sosial Kemasyarakatan Corporate Responsibility related to Social Community	315
Prinsip Penerapan GCG Principles of GCG Implementation	189	Permasalahan Hukum Legal Issues	270	Tanggung Jawab Perusahaan terkait Pelanggan Company Responsibilities related to Customers	321
Road Map GCG GCG Road Map	192	Sanksi Administratif Administrative Sanction	270	Laporan Keuangan Audit Audited Financial Report	325
Penilaian Penerapan GCG (GCG Assessment) GCG Implementation Assessment	194	Pengelolaan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Management	271	Kriteria Penilaian Annual Report Award Criteria Assessment of Report Award	552
Pemilik Modal dan Pengendali Capital Owner and Control	196	Kode Etik Code of Conduct	271		
Rapat Pembahasan Bersama Joint Discussion Meeting	196	Pedoman Pengendalian Gratifikasi Guidelines for Gratification Control	275		
Dewan Pengawas Supervisory Board	198	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	277		
Direksi Board of Directors	212	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Report of State Official Assets	284		
		Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	285		

**KAMI SIAP MENJALANKAN
PROTOKOL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN & PERAWATAN,
PENANGANAN PASCA PERAWATAN SERTA
PELAPORAN & KOMUNIKASI COVID-19
DI WILAYAH KERJA PERUM JASA TIRTA II**



MAKAN MAKANAN
BERGIZI



OLAHRAGA
TERATUR



BAWA ALAT SHOLAT
SENDIRI



PENYEMPROTAN
DISINFECTAN



BAWA ALAT MAKAN
SENDIRI



PHYSICAL DISTANCING



MENGUNAKAN
MASKER



SERING CUCI TANGAN
DENGAN SABUN



ETIKA BATUK



PENGUKURAN
SUHU TUBUH



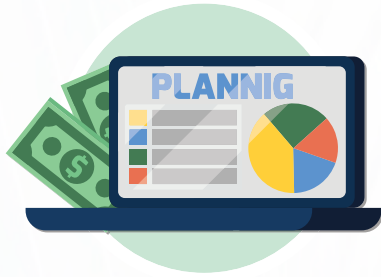
HINDARI
ANGKUTAN UMUM



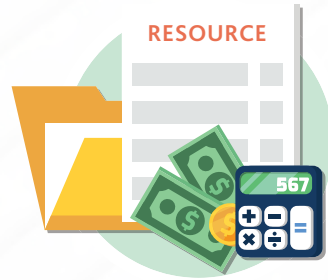
TIDAK BERJABAT TANGAN

Kilas Kinerja

Flashback Performance



Menjaga dan Mengelola Aset Negara
Maintain and Manage State Assets



Memanfaatkan Sumber Daya Untuk Kesejahteraan
Utilizing Resources For Prosperity



Mendukung Program Pariwisata Pemerintah
Supporting Government Tourism Programs



Memberikan Deviden Kepada Pemerintah Daerah dan Pusat
Providing Dividends to Local and Central Government



Menerapkan Prinsip Green Buliding
Applying the Principles of Green Buliding



Melibatkan Tenaga Lokal yang Profesional dalam pengelolaan Bisnis
Involving Local Professionals in business management

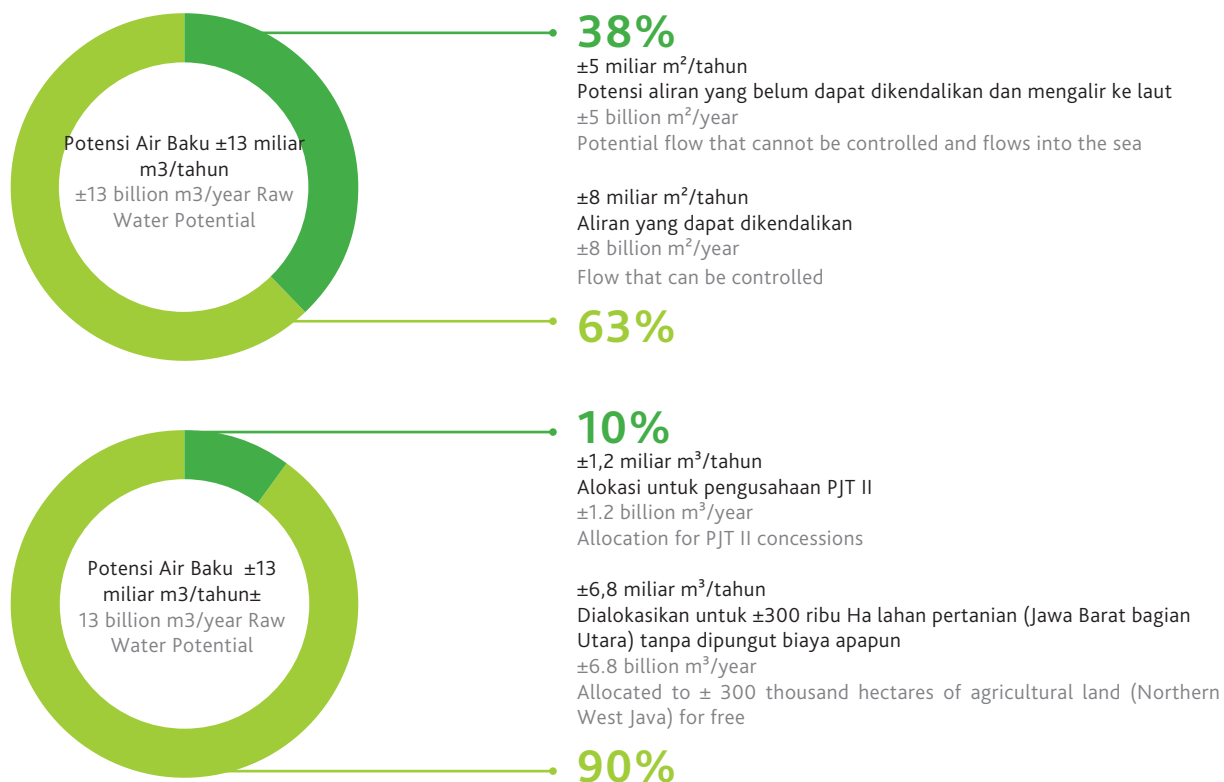


Komitmen menerapkan GCG
Commitment to implementing GCG



Tetap Eksis ditengah Covid 19
Remain in the midst of Covid 19

Ringkasan Kinerja Performance Summary



Peran Strategis PJT II PJT II Strategic Role

KETAHANAN PANGAN NASIONAL National Food Security

30%

Ekuivalen / Equivalent
Menopang produksi padi Jawa Barat atau 8% produksi padi Nasional tanpa memungut biaya apa pun kepada petani.
/ Supporting West Java's rice production or 8% of the national rice production without charging any fees to farmers.

Rp13,96 triliun/tahun
trillion/year

Ekuivalen dalam Rupiah / Equivalent in Rupiah
(asumsi harga padi Rp4.200/kg / assuming the price of rice is Rp4,200/kg)

3,3 juta ton/tahun
Million tons/year

Produksi Padi / Rice Production
PJT II berkontribusi terhadap Ketahanan Pangan Nasional. / PJT II contributes to the National Food Security.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hydroelectric Power Plant (PLTA)

974,27 Juta/kWh
Million/kWh

Produksi listrik hingga akhir tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 15,34% atau setara dengan 129,55 juta kWh dari sebelumnya sebesar 844,72 juta kWh. / Electricity production by the end of 2020 experienced an increase from 2019 of 15.34% or equivalent to 129.55 million kWh from the previous amount of 844.72 million kWh.

Rp631,54 Miliar/tahun
Billion/year

Ekuivalen / Equivalent
Kontribusi PJT II dalam bauran tarif listrik PLN, mendukung Ketahanan Energi Nasional. (Asumsi harga rata-rata listrik PLN Rp1.000/kWh kepada konsumennya) / The contribution of PJT II in the PLN electricity tariff, supports the National Energy Security. (Assuming an average PLN electricity tariff of Rp1,000/kWh to its consumers).

Rencana Strategis ke Depan Future Strategic Plans

- PJT II mengalokasikan investasi lebih dari Rp500 miliar untuk membangun fasilitas air bersih (SPAM) yang telah dimulai sejak tahun 2018.
- PJT II menjalankan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I serta merencanakan pengembangan pengelolaan air bersih melalui proyek SPAM Non-Regional, yang akan memperkuat posisi PDAM bersama Strategic Partner. Hal ini bertujuan untuk mengelola air bersih agar lebih berkualitas, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi stakeholders.
- PJT II juga mengupayakan pemanfaatan perairan Waduk Jatiluhur untuk pembangkitan listrik melalui Floating Photovoltaic Power Generation (pembangkit tenaga surya yang mengapung di atas air). Dengan pemanfaatan luas area 200 Ha, diperkirakan dapat memproduksi listrik 200 MWp. Hingga saat ini, dukungan Pemerintah masih diharapkan untuk memberikan peluang mengenai aturan tarif serta dukungan regulasi teknis pengamanan bendungan.
- PJT II sedang menyelesaikan grand design terhadap konsep digitalisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dari hulu hingga hilir yang memerlukan pengembangan sistem ICT yang intensif.
- PJT II has allocated an investment of more than IDR 500 billion to build clean water facilities (SPAM) which has been started since 2018.
- PJT II runs the Jatiluhur I Regional Water Supply System (SPAM) project and plans to develop clean water management through the Non-Regional SPAM project, which will strengthen the position of the PDAM with the Strategic Partner. It aims to manage clean water to have a better quality, more sustainable and provide benefits to stakeholders.
- PJT II also seeks to utilize Jatiluhur Reservoir waters for electricity generation through Floating Photovoltaic Power Generation (solar power plants that float on water). With the utilization of an area of 200 hectares, it is estimated that it can produce 200 MWp of electricity. To date, Government support is still expected to provide opportunities regarding tariff rules and technical regulatory support for dam security.
- PJT II is completing the grand design of the digitalization concept in the management of water resources from upstream to downstream which requires the development of an intensive ICT system.

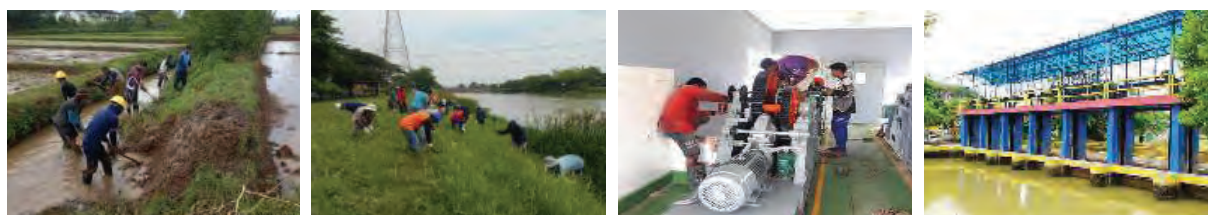
Kinerja Penugasan Pengelolaan SDA Tahun 2020

Performance of the 2020 water Resources Management Assignment



Perum Jasa Tirta II sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II oleh Pemerintah diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II in accordance with Government Regulation (PP) No. 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II by the Government given the duties and responsibilities in the exploitation of River Basin Water Resources and some duties and responsibilities in the field of water resources management in the Company's work area.



Sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan (10 Penugasan) yang meliputi:

Some of the duties and responsibilities in the field of water resources management in the Company's work area (10 Assignments) which include:

1. Mengoperasikan dan memelihara prasarana SDA.
2. Mengoperasikan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur.
3. Mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur.
4. Memelihara sumber air.
5. Melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer pada Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur.
6. Melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.
7. Menyebarkan hasil pemantauan dan evaluasi di atas kepada pengguna SDA, masyarakat dan Pengelola SDA.
8. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
9. Penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai.
10. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

1. Operate and maintain water resource infrastructure.
2. Operate primary irrigation network in Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigation Areas.
3. Operate secondary irrigation network in Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigation Areas.
4. Maintain water sources.
5. Carry out maintenance of primary irrigation canals in Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigations.
6. Monitoring, calibrating discharge measuring instruments, evaluating the quantity and quality of water at water sources which are the responsibility of the Company.
7. Disseminate the results of the above monitoring and evaluation to water resources users, communities and water resource managers.
8. Assisting the Government in carrying out conservation of water resources and controlling the destructive power of water in accordance with the Company's capabilities.
9. Flushing in the context of river maintenance.
10. Provide guidance and counseling to the community in order to improve community empowerment.



Pelaksanaan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air tahun 2020 sebesar 82,07% dari rencananya dengan interpretasi sangat baik, dengan rincian sebagai berikut:

Implementation of Operational Performance and Maintenance of Water Resources in 2020 amounted to 82.07% of the plan with a very good interpretation, with details as follows:

Rekapitulasi Pekerjaan Fisik 10 Penugasan Pemerintah / Recapitulation of Physical Work 10 Government Assignments

No.	Bidang Penugasan	Tahun 2020				
		RKAP	Realisasi	RN	RL	Kinerja
1.	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana SDA / Operation and Maintenance of water Resources Infrastructure	86.190.692.957	78.766.913.761	100%	91,39%	91,39%
2.	Operasi Jaringan Irigasi Primer / Primary Irrigation Network Operation	7.348.421.147	6.735.498.650	100%	91,66%	91,66%
3.	Operasi Jaringan Irigasi Sekunder / Secondary Irrigation Network Operations	3.512.177.449	3.499.713.900	100%	99,65%	99,65%
4.	Memelihara Sumber Air / Maintaining Water Sources	455.444.457	389.719.734	100%	85,57%	85,57%
5.	Memelihara Jaringan Irigasi Primer / Maintaining Primary Irrigation Network	13.225.406.354	13.205.439.760	100%	99,85%	99,85%
6.	Pemantauan, Kalibrasi, Evaluasi Kuantitas dan Kualitas Air / Monitoring, Calibration, Evaluation of Water Quantity and Quality	22.268.792.076	15.726.345.320	100%	70,62%	70,62%
7.	Menyebarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi / Disseminate Monitoring and Evaluation Results	10.483.367.965	6.057.487.650	100%	57,78%	57,78%
8.	Membantu Pemerintah dalam Melaksanakan Konservasi / Assisting the Government in Implementing Conservation	28.232.099.774	16.450.145.442	100%	58,27%	58,27%
9.	Penggelontoran dalam Rangka Pemeliharaan Sungai / Flushing in the Context of River Maintenance					
10.	Pemberdayaan Masyarakat / Community empowerment	560.547.024	549.814.000	100%	98,09%	98,09%
	Jumlah	172.276.949.203	141.381.078.217	100%	82,07%	82,07%

Pelaksanaan 10 penugasan pengelolaan sumber daya air (SDA), diperlukan dukungan berupa pekerjaan Non Fisik baik beban personalia, beban administrasi dan umum, beban pemeliharaan, beban perencanaan dan beban pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat yang biayanya dikelompokkan antara lain :

The implementation of 10 assignments for water resource management (SDA), requires support in the form of non-physical work, both personnel, administrative and general expenses, maintenance costs, planning and monitoring, evaluation and community empowerment costs, the costs of which are grouped as follows :

Biaya Non Fisik / Non-Physical Fee :

1.	Beban Personalia / Personnel Expenses	Rp 154.052.605.384
2.	Beban Administrasi dan Umum / Administrative and General Expenses	Rp 67.211.468.285
3.	Beban Pemeliharaan / Maintenance Expense	Rp 9.953.610.895
4.	Beban Perencanaan / Planning Expenses	Rp 14.143.803.592
5.	Pemantauan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat / Community Monitoring, Evaluation and Empowerment	Rp 6.662.416.307

Sehingga secara garis besar realisasi biaya pengelolaan SDA Tahun 2020 sebesar :

So in general terms, the realization of the cost of managing water resources in 2020 is as follows :

A.	Biaya Fisik 10 Penugasan Pemerintah / Physical Cost of 10 Government Assignments	Rp 141.381.078.217
B.	Biaya Non Fisik / Non-Physical Fee	Rp 252.023.904.463
	Total Biaya	Rp 393.404.982.680

Alokasi anggaran Pengelolaan Sumber Daya Air dari keseluruhan anggaran RKAP Tahun 2020 Semester II adalah Rp 444.531.359.999 telah dilaksanakan sebesar Rp 393.404.982.680 atau 88,50% dengan dengan interpretasi memuaskan.

The budget allocation for Water Resources Management from the entire RKAP 2020 Semester II budget is Rp. 444,531,359,999. It has been implemented at Rp. 393,404,982,680 or 88.50% with a satisfactory interpretation.

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
ASET / ASSETS					
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	518.162	597.052	434.206	512.604	429.575
Piutang Usaha / Trade Receivables	226.214	153.570	297.271	137.510	87.159
Persediaan / Inventories	2.074	2.548	2.147	1.515	1.692
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / Prepaid Expenses and Advances	21.092	9.824	14.838	20.314	7.154
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Assets	2.901	2.194	2.792	1.198	1.044
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	770.443	765.188	751.254	673.141	526.625
Penyertaan pada Perusahaan Asosiasi / Participation in Associated Companies	-	-	-	492	118
Aset Tetap / Fixed Assets	599.693	540.399	476.051	384.505	347.521
Aset Hak Guna / Right-Of-Use Assets	2.374	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	58.441	46.308	41.042	67.144	66.612
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	102.125	79.970	48.442	17.250	220
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	762.633	666.677	565.535	469.391	414.471
Jumlah Aset/ Total Assets	1.533.076	1.431.865	1.316.789	1.142.532	941.096
LIABILITAS / LIABILITIES					
Utang Usaha / Trade Payables	46.542	39.620	76.453	40.468	11.453
Beban Akrua / Accrual Expense	21.378	33.271	34.344	56.042	43.308
Utang Pajak / Tax Payable	25.987	21.411	15.748	14.655	31.399
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / Short-Term Contract Liabilities	356	-	-	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short-Term Financial Liabilities	51.517	47.037	36.385	30.390	30.267
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short-Term Liabilities	145.780	141.339	162.930	141.555	116.427
Utang Sewa Jangka Panjang / Long-Term Lease Liabilities	2.154	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post Retirement Liabilities	150.037	72.762	79.403	140.380	149.377
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Liabilities	14.265	22.130	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	166.456	94.892	79.403	140.380	149.377
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	312.236	236.231	242.334	281.935	265.804
EKUITAS / EQUITY					
Modal Pemerintah / Government Share	164.548	164.548	164.548	164.548	164.548
Cadangan Umum / Reserved	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943
Cadangan Bertujuan / Reserved Appropriated	1.027.001	893.921	760.306	603.209	441.096
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(118.576)	(40.587)	(49.605)	104.324	(114.940)
Laba Tahun Berjalan / Current Year Profit	124.003	153.844	175.264	183.221	170.646
Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling	9.921	9.965	9.999	-	-
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.220.840	1.195.634	1.074.455	860.597	675.292
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	1.533.076	1.431.865	1.316.789	1.142.532	941.086



LAPORAN LABA RUGI

Statement of Profit or Loss

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	815.627	812.881	825.545	828.700	743.805
Beban Usaha / Operating Expenses	(508.854)	(468.555)	(456.753)	(476.092)	(396.008)
Laba Usaha / Profit From Operations	306.773	344.326	368.791	352.608	347.797
Beban Promosi dan Pemasaran / Promotion and Marketing Expenses	(5.371)	(14.424)	(5.398)	4.997	(3.156)
Beban Administrasi dan Umum / General and Administration Expenses	(164.296)	(167.799)	(139.908)	(141.301)	(119.830)
Pendapatan Lain-lain / Other Revenues	28.246	48.881	31.255	36.928	22.602
Beban Lain-lain / Other Expenses	(26.785)	(20.619)	(18.209)	(9.588)	(22.223)
Laba Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	138.567	190.365	236.531	233.650	225.190
Beban Pajak Penghasilan / Income Tax Expense	(14.608)	(36.556)	(69.935)	(59.098)	(54.544)
Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit	123.959	153.809	166.596	174.552	170.646
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	(77.989)	9.018	54.062	10.616	4.713
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income for the Current Year	45.970	162.827	220.658	185.168	175.359

RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

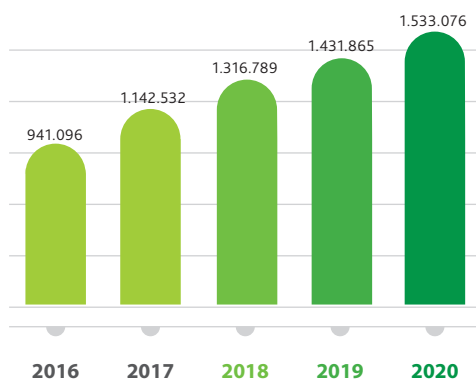
Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / Return on Equity	11,49	15,07	20,33	25,71	33,49
Imbalan Investasi (ROI) / Return on Investment	12,43	16,35	22,13	24,57	28,73
Laba terhadap Aset (ROA) / Return on Assets	9,03	13,29	17,96	20,45	23,93
Rasio Kas / Cash Ratio	355,44	422,43	266,5	362,12	368,96
Rasio Lancar / Current Ratio	528,50	541,39	461,09	470,21	452,32
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset / Own Capital Ratio to Total Assets	70,35	71,18	65,18	59,60	53,62
Perputaran Persediaan (dalam satuan hari) / Inventory Turnover (in units of days)	1	1	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / Billing Period (in units of days)	101	69	81	25	11

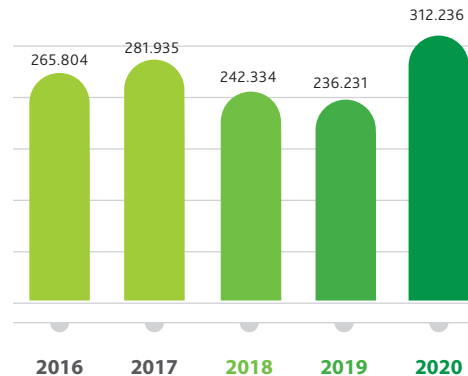
Grafik Kinerja Keuangan

Financial Performance Graphic

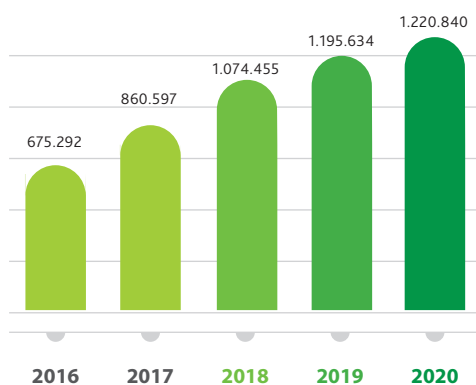
Jumlah Aset
Total Assets
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



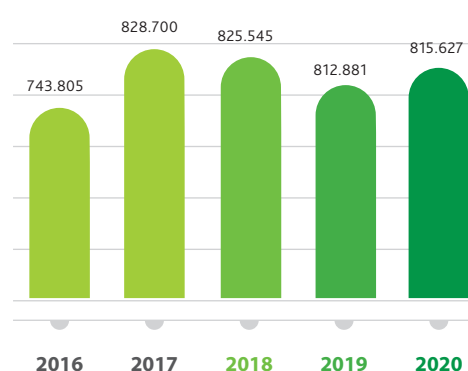
Jumlah Liabilitas
Total Liabilities
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



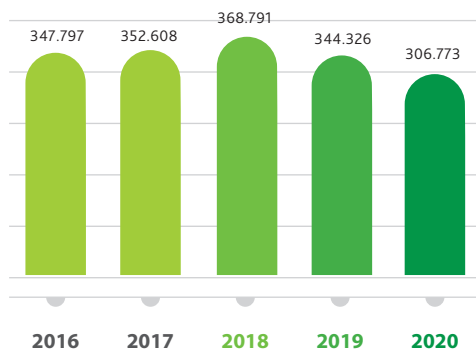
Jumlah Ekuitas
Total Equity
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



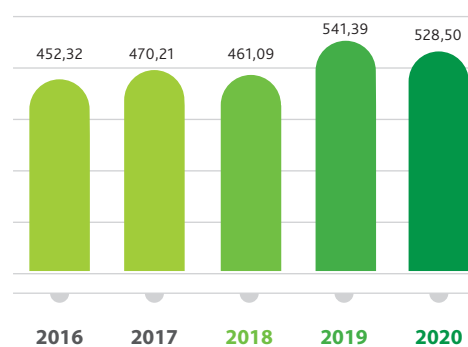
Jumlah Pendapatan Usaha
Total Operating Revenues
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Jumlah Laba Usaha
Total Profit from Operations
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Rasio Lancar
Total Current Year Profit
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Peristiwa Penting 2020

Significant Events in 2020

JANUARI / January



Januari / January

Kunjungan Kerja Perdana Ketua Dewan Pengawas ke Jatiluhur. Dalam Rangka Induction Program / First Working Visit of the Chairman of the Supervisory Board to Jatiluhur. In the framework of the Induction Program

FEBRUARI / February



22 Februari 2020 / February 22, 2020

Bertempat di situ Cisanti PJT II bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen Doni Monardo bersama wakil ketua Komisi VIII DPR RI TB.H Ace Hasan Syadzily meninjau secara langsung kondisi pembibitan dan Situ Cisanti sebagai mata Air Sungai Citarum. / Located there, Cisanti PJT II with the Head of the National Disaster Management Agency (BNPB) Lt. Gen. Doni Monardo together with the deputy chairman of Commission VIII DPR RI TB.H Ace Hasan Syadzily observed directly the conditions of the nursery and Situ Cisanti as the Citarum River springs

MARET / March



3 Maret 2020 / March 3, 2020

Bertempat di gedung graha vidya PJT II meresmikan kawasan wisata tsb menjadi Jatiluhur Valley & Resort dalam rapat kerja Anggaran 2020 dan RJPP 2020-2024. / Located in the graha vidya PJT II building inaugurated the tourist area as Jatiluhur Valley & Resort in the 2020 Budget and RJPP 2020-2024 work meetings.



4 Maret 2020 / March 4, 2020

Bertempat di Jakarta, Jasa Tirta II PJT II meraih penghargaan kategori BUMN dengan predikat Good Performance berdasarkan hasil Assesment KPKU BUMN tahun 2019 pada acara penganugerahan "BUMN Performance Excelent 2020" Yang diterima oleh kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen Andriyanto. / Located in Jakarta, Jasa Tirta II PJT II won the BUMN category award with the title Good Performance based on the results of the 2019 BUMN KPKU Assessment at the awarding ceremony of "BUMN Performance Excelent 2020" which was received by the head of the Performance Control and Management System Division Andriyanto

APRIL



11 April 2020 / April 11, 2020

Bertempat di Perairan waduk Jatiluhur PJT II melakukan gotong royong pembersihan eceng gondok melalui padat karya tunai bersama warga lokal disekitar wil sungai Citarum pada beberapa Titik yg berbeda dan menggunakan 8 unit perahu nelayan., 1 unit Excavator dan 2 unit dump Truk. / Located in the waters of the Jatiluhur reservoir, PJT II carries out mutual cooperation to clean water hyacinth through cash intensive work with local residents around the Citarum river area at several different points and uses 8 units of fishing boats, 1 unit of excavator and 2 units of dump trucks.



27 April 2020 / April 27, 2020

Bertempat di gedung bakorwil PJT II menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dirumah sakit Bayu Asih (RSBA) Purwakarta yang diterima oleh Ketua Gugus Tugas percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika. / Taking place at the PJT II regional bakorwil building, handing over the assistance of personal protective equipment (PPE) for medical personnel at Bayu Asih Hospital (RSBA) Purwakarta which was received by the Chairperson of the Task Force for the Acceleration of the Covid-19 Response of Purwakarta Regency Anne Ratna Mustika



29 April 2020 / April 29, 2020

Bertempat digedung Pakuan Cicendo PJT II bersama 13 BUMN lainnya yg tergabung dalam Satgas Covid 19 Kementerian BUMN Wilayah Jawa Barat menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) yang diterimalangsung oleh gubernur jabar Ridwan Kamil. / Located in the Pakuan Cicendo PJT II building with 13 other BUMNs that are members of the Covid 19 task force, the Ministry of BUMN, the West Java Region, handed over personal protective equipment (PPE) assistance which was carried out directly by the governor of Jabar Ridwan Kamil.

JUNI / June



17 Juni 2020 / June 17, 2020

Bertempat di Waduk Jatiluhur, PJT II melakukan penebaran benih ikan yang diikuti oleh direksi beserta jajaran manajemen sebagai salah satu upaya konservasi untuk memperkaya perikanan alami serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. / Located in the Jatiluhur Reservoir, PJT II conducts fish seed distribution which is attended by the board of directors and management as a conservation effort to enrich water fisheries and improve the economy of the surrounding community.

AGUSTUS / August



18 -26 Agustus 2020 / August 18 - 26, 2020

Ucapan selamat dan terima kasih kepada stakeholder dan pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT PJT II dengan tema. Sharing, Kindness, Collaborate dan Grow Together In New Normal. Rangkaian kegiatan terdiri dari sport, Art Creative, dan Charity. / Congratulations and thanks to the stakeholders and parties who have supported the implementation of a series of activities of the PJT II Anniversary with the theme. Sharing, Kindness, Collaborate and Grow Together In New Normal. The series of activities consisted of sports, Art Creative, and Charity.



19-24 Agustus 2020 / August 19-24, 2020

Bertempat di 53 Lokasi sekitar bendungan , bendung, mata air dan Oxbow Jatiluhur, PJT II melakukan penanaman pohon secara serentak diseluruh unit kerja untuk mendukung konservasi lingkungan disekitar sumber daya air. / Located at 53 locations around the dam, weir, springs and Oxbow Jatiluhur, PJT II implements tree planting simultaneously in all work units to support environmental conservation around water resources.



24 Agustus 2020 / August 24, 2020

PJT II berkolaborasi dengan Dansektor 15 Citarum dalam mendukung Program Nasional Citarum Harum di bidang konservasi serta bertujuan untuk berbagi kebaikan dengan sesama disekitar lingkungan Jatiluhur. / PJT II collaborates with the Dansector of 15 Citarum in supporting the Harum Citarum National Program in the field of conservation and aims to share goodness with others around the Jatiluhur environment.



26 Agustus 2020 / August 26, 2020

Bertempat di Lounge Grha Vidya menandatangani perjanjian dengan Krakatau Tirta Industri dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air. / Located at Lounge Graha Vidya signed an agreement with Krakatau Tirta Industri in the field of water supply and management.



26 Agustus 2020 / August 26, 2020

PJT II menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Krakatau Daya Tirta bidang pengelolaan Air Minum dalam Kemasan / PJT II signed a Cooperation Agreement with PT. Krakatau Daya Tirta in the field of bottled drinking water management



26 Agustus 2020 / August 26, 2020

Bertempat di Jatiluhur Water World, PJT II menggelar acara syukuran HUT ke-53 PJT II dengan tema "Sharing Kindness, Collaborate & Grow Together in New Normal ". / Taking place at Jatiluhur Water World, PJT II held a celebration for the 53rd Anniversary of PJT II with the theme "Sharing Kindness, Collaborate & Grow Together in New Normal".

DESEMBER / December



Desember / December

Dalam rangka meningkatkan daya saing kepariwisataan sebagai salah satu program Nasional Pemerintah di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II, Khususnya di Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya, event pariwisata: "Jatiluhur Green Festival 2020" Tanggal 19 – 20 Desember 2020 yang berlokasi di Kawasan Wisata Waduk Jatiluhur Purwakarta dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, pengembangan sport tourism dan wisata minat khusus lainnya yang berbasis alam, budaya dan rekreasi serta menjadikan destinasi wisata yang bersih, aman dan nyaman serta menumbuhkan ekosistem ekonomi di sector pariwisata yang saat ini terdampak pandemi. event yang akan kami adakan diantaranya adalah: / In order to increase the competitiveness of tourism as one of the Government's National programs in the working area of Perum Jasa Tirta II, especially in Purwakarta and West Java Province in general, the tourism event: "Jatiluhur Green Festival 2020" 19 - 20 December 2020 which is located in the Tourist Area Jatiluhur Purwakarta Reservoir with the aim of fostering public awareness of environmental conservation, developing sport tourism and other special interest tours based on nature, culture and recreation as well as making tourist destinations that are clean, safe and comfortable as well as fostering an economic ecosystem in the tourism sector which is currently affected by the pandemic. The event that we will hold are:

1. Gowes goGreen / GoGreen
2. Festival Kopi Nusantara / Nusantara Coffee Festival
3. Kemah Konservasi bersamaan dengan kegiatan penanaman pohon di area greenbelt danau Jatiluhur / Conservation Camp in conjunction with tree planting activities in the greenbelt area of Lake Jatiluhur





Desember / December

kunjungan kerja Direktur Utama ke Bendung Curug dan Bendung Walahar. / President Director's working visit to the Curug and Walahar Weirs.



1 Desember 2020 / December 1, 2020

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerjasama Penyediaan Air Curah antara Perum Jasa Tirta II dengan Perusahaan Umum Daerah Tirta Wening Kota Bandung. / Signing of a Memorandum of Understanding on the Collaboration Plan for Bulk Water Supply between Perum Jasa Tirta II and the Regional Public Company of Tirta Wening, Bandung City.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Sertifikasi Yang Dimiliki Perum Jasa Tirta II Certification Owned by Perum Jasa Tirta II	Nama Sertifikasi / Certification Name	Nomor Sertifikasi / Certification Number	Lembaga Sertifikasi / Certification Agency
Sertifikasi Kompetensi Laboratorium / Certification for Laboratory Competency	Registrasi Laboratorium Lingkungan / Registration of Environmental Laboratory	00108/LPJ/ LABLING-1/LRK/KLH	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Ministry of Environment and Forestry
	Sertifikat Uji Profisiensi Certificate of Recognition	April 2017	ERA, Canada
	Akreditasi SNI ISO/IEC 17025-2008 / Accredited SNI ISO 17025-2008	LP-174-IDN	Komite Akreditasi Nasional / National Accreditation Committee
	Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Air / Certification of Water Sampling Officer	13.001526.17 13.001531.17 13.001527.17 13.001528.17	PPT Migas
Sertifikasi Kompetensi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Competency Certification of Monitoring Occupational Health and Safety	Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi / Certification of Intermediate HSE Construction Engineer	01561/AMK3.K/XI/2017 01563/AMK3.K/ XI/2017 01566/AMK3.K/ XI/2017	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of the Republic
	Sertifikasi Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik / Certification of HSE Electrical Specialist	02260/AK3- LIST/I/2018 02261/AK3- LIST/I/2018	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of the Republic
Sertifikat Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu / Certificate of Recognition of Implementation and Maintenance of Quality Management System	Sertifikat ISO – 9001:2015 / SNI / ISO – 9001:2008 dengan ruang lingkup kegiatan: Penyediaan Air Baku untuk PAMdan Industri pada Unit Usaha Wilayah I, II, III, IV & Pembangkitan dan Penyaluran Listrik PLTA Ir. H. Djuanda / Certificate of ISO – 9001:2015 / SNI ISO – 9001:2008 with scope of activities: Raw Water Supply for Water Company and Industry in Business Unit Region I, II, III, IV & Power Generation and Distribution of Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant	2701001	Komite Akreditasi Nasional / National Accreditation Committee
Sertifikat Chartered Accountant / Chartered Accountant Certificate	Sertifikat Chartered Accountant (CA Indonesia) / Chartered Accountant Certificate (CA Indonesia)	Sert.CA-0000006391 Sert.CA-0000006481	Ikatan Akuntan Indonesia / Indonesian Institute of Accountants
Sertifikat Air Minim Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Water Certificate	Sertifikat Halal / Halal Certificate	No. 01121081261212	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat / Indonesian Ulemma Council (MUI) of West Java
	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI / SNI Marking Product Certificate	01-3553-2006vnomor 597/LS/IPB/SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	Lembaga Sertifikasi Produk ILPro IPB / Product Certification Institute of ILPro IPB
Sertifikasi anti penyuapan / Anti-bribery certification	Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan ruang lingkup Divisi Keuangan & Akuntansi, Divisi Komersil & Pelayanan Pelanggan & ULP ISO 37001:2016 / Management System Certificate Anti-Bribery with scope Finance & Accounting Division, Commercial Division & Customer Service & ULP	No. SAB. 00043	Sucofindo



**Good Performance Award
Hasil Assesment KPKU BUMN
Tahun 2020**



**BUMN Track Award
Kategori Transformasi Organisasi**



**Penghargaan KAMTIBMAS
Tahun 2020**



**Penghargaan KIP
Anugrah keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2020 menuju
Informatif**



**Penghargaan Mitra CSR di Jawa
Barat dari Pemerintah Provinsi**



**Penghargaan Anugerah BUMN
Kategori Transformasi Organisasi
Terbaik II**

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT





LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Pengawas

Supervisory Board Report



**Kelik Wirawan
Wahyu Widodo**
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilik Modal dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Perum Jasa Tirta II (untuk selanjutnya disebut "Perusahaan" atau PJT II) dapat menjawab tantangan yang dihadapi dengan terus beradaptasi serta tumbuh berkelanjutan sehingga menghasilkan Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan Pendapatan usaha sebesar Rp815,63 miliar, meningkat 0,34% atau setara dengan Rp2,75 miliar bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp812,88 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Pendapatan Listrik, Air Bersih, Laboratorium, dan usaha lainnya.

Dewan Pengawas menilai bahwa pencapaian kinerja Perusahaan tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh Stakeholder. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan Perusahaan terus menjalankan perannya sebagai *agent of development* dengan baik yang dapat memberikan *value added* yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan laporan pengawasan Dewan Pengawas terhadap kebijakan dan kepengurusan usaha Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi selama tahun buku 2020.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Sepanjang tahun 2020, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tercermin dari sejumlah program kerja yang direalisasikan, di antaranya kunjungan kerja untuk melihat proses operasi secara langsung, meninjau kesesuaian prosedur yang diterapkan, dan menyelaraskan proses kerja dengan prinsip-prinsip GCG. Dewan Pengawas berupaya mengawasi dan meninjau seluruh langkah strategi yang diambil Direksi dengan memberikan arahan atau rekomendasi yang disampaikan melalui mekanisme rapat gabungan maupun penerbitan surat/tanggapan baik kepada Direksi maupun Pemilik Modal. Sepanjang tahun 2020, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali dan menerbitkan 15 surat/tanggapan kepada Direksi dan Pemilik Modal. Rangkuman pokok-pokok arahan atau rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Direksi selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- Memberikan arahan dalam usulan revisi RKAP 2020 masa pandemi Covid 19
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan PP nomor 7 tahun 2010 tentang PJT II setelah terbitnya UU nomor 17 tahun 2019 tentang SDA;
- Arahan Dewan Pengawas untuk Antisipasi Skenario *the new normal* dilingkungan PJT II
- Arahan dewan pengawas untuk perubahan nomenklatur dan Struktur organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Dear Capital Owner and stakeholders,

First of all, allow us to express our praise and gratitude to the presence of God Almighty for the abundance of His gifts in facing the challenges of the Covid-19 pandemic in 2020. Perum Jasa Tirta II (hereinafter referred to as the "Company" or PJT II) can answer the challenge faced by continuing to adapt and grow sustainably so as to produce In 2020, the Company recorded operating revenues of Rp815.63 billion, an increase of 0.34% or equivalent to Rp2.75 billion compared to Rp812.88 billion in 2019. This increase was caused by Income from electricity, clean water, laboratories, and other businesses.

The Supervisory Board considers that the achievement of the Company's performance cannot be separated from the support and trust of all Stakeholders. Therefore, the Company continues to strive to improve service quality and provide the best solutions in meeting customer needs. The Company continues to carry out its role as an agent of development properly that can provide optimal value added for all stakeholders. For this reason, allow us to submit a supervisory report from the Supervisory Board on the Company's policies and business management carried out by the Board of Directors during the 2020 financial year.

Supervision of Strategy Implementation

Throughout 2020, the supervisory function carried out by the Supervisory Board was reflected in a number of work programs realized, including working visits to see the operating process directly, reviewing the suitability of the procedures applied, and aligning work processes with GCG principles. The Supervisory Board seeks to supervise and review all strategic steps taken by the Board of Directors by providing directions or recommendations submitted through the mechanism of joint meetings and the issuance of letters/responses to both the Board of Directors and Capital Owners. Throughout 2020, the Supervisory Board has held 13 joint meetings with the Board of Directors and issued 15 letters/responses to the Board of Directors and Capital Owners. The summary of the main directions or recommendations submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors during 2020 are as follows:

- Provide direction in the proposed revision of the 2020 RKAP during the Covid 19 pandemic
- Provide direction in the implementation of PP number 7 of 2010 regarding PJT II after the issuance of Law number 17 of 2019 concerning Water Resources;
- Directions of the Supervisory Board to Anticipate the New Normal Scenario in PJT II
- Directions of the supervisory board for changes to the nomenclature and organizational structure and work procedures of Jasa Tirta II Public Company (Perum)

- Arahan dewas untuk Proses Bisnis Supervisi Teknik di PJT II
- Arahan dewas tentang sosialisasi PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 di lingkungan PJT II
- Arahan Dewas terhadap Laporan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di wilayah kerja PJT II Semester I tahun 2020
- Arahan Dewas dalam Pelaksanaan Investasi PJT II tahun 2020
- Arahan Dewas dalam pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi di PJT II
- Arahan Dewan Pengawas atas upaya peningkatan kinerja perusahaan
- Arahan Dewan Pengawas terhadap Optimalisasi aset kelola dan aset milik di lingkungan PJT II
- Revisi arahan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan investasi PJT II tahun 2020
- Arahan Dewan Pengawas terkait profil resiko perusahaan dan rencana investasi dalam RKAP tahun 2021
- Tindak lanjut Rapat Gabungan Desember 2019
- Permohonan penjelasan atas laporan tindak lanjut rekomendasi Temuan BPK RI tahun 2018
- Permintaan penjelasan pengelolaan SDA tahun 2020 dan 2021 untuk bahan Rapat Koordinasi dengan BBWS Citarum
- Penyelesaian permasalahan pada pembangunan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Leuweung Seureuh
- Persetujuan Rencana Promosi dan Mutasi Pejabat BOD-1
- Penyempurnaan Prosedur 10 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan Perum Jasa Tirta II
- Saran Dewan Pengawas Terkait Rencana Kerja Triwulan (RKT) Tahun 2020 Program Investasi Perum Jasa Tirta II
- Saran Dewan Pengawas tentang Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, BBWS Ciliwung Cisadane dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.
- Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan dengan Penambahan Jumlah Direksi
- Tanggapan atas usulan Bakal Calon Direksi Perum Jasa Tirta II
- Tanggapan atas laporan Tahunan PJT II Tahun Buku tahun 2019
- Rencana Kenaikan Gaji Pokok Karyawan dan Pemberian Uang Cuti Tahunan Tahun 2020
- Tindak lanjut Rapat Gabungan Desember 2019
- Penyelesaian Permasalahan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Leuweung Seureuh
- Kunjungan Kerja Dewan Pengawas ke Kantor Pusat Bulan Maret 2020
- Saran Dewan Pengawas atas Pelaksanaan Rapat Koordinasi BBWS Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020
- Penyelesaian pembayaran BJPSDA dari PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PTIP), dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Kepada PJT II
- Tanggapan Dewan Pengawas atas Perubahan dan
- Guidance for the Technical Supervision Business Process at PJT II
- Guidance from the council regarding the socialization of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 within PJT II
- Guidance from the Council on the Operational Performance and Maintenance of Water Resources in the PJT II working area for the first semester of 2020
- Guidance from the Council in the Implementation of PJT II Investments in 2020
- Guidance by Dewas in the development of Information and Technology Systems at PJT II
- Directions from the Supervisory Board on efforts to improve company performance
- Direction of the Supervisory Board on Optimization of managed assets and owned assets within PJT II
- Revision of the direction of the Supervisory Board in the implementation of PJT II investment in 2020
- Directions from the Supervisory Board regarding the company's risk profile and investment plans in the 2021 RKAP
- Follow-up to the December 2019 Joint Meeting
- Request for an explanation of the follow-up report on the recommendations of the BPK RI Findings in 2018
- Request for an explanation of the management of water resources in 2020 and 2021 for materials for the Coordination Meeting with BBWS Citarum
- Problem solving in the construction of a Micro Hydro Power Plant (PLTMH) in Leuweung Seureuh
- Approval of BOD-1 Officer Promotion and Transfer Plans
- Completion of Procedure 10 concerning Financial Management and Control of Perum Jasa Tirta II
- Suggestions from the Supervisory Board regarding the 2020 Quarterly Work Plan (RKT) Investment Program of Perum Jasa Tirta II
- Suggestions from the Supervisory Board regarding Materials for Coordination Meetings (Rakor) with the Citarum River Basin Center (BBWS), Ciliwung Cisadane BBWS and the West Java Province Water Resources Management Office (PSDA).
- Approval of Changes in the Company's Organizational Structure with Additional Number of Directors
- Responses to the proposed Prospective Directors of Perum Jasa Tirta II
- Responses to PJT II Annual Report for Fiscal Year 2019
- Plan to Increase the Basic Salary of Employees and Provide Annual Leave Allowance for 2020
- Follow-up to the December 2019 Joint Meeting
- Problem Solving in the Construction of a Micro Hydro Power Plant (PLTMH) in Leuweung Seureuh
- Supervisory Board Working Visit to Head Office in March 2020
- Suggestions from the Supervisory Board on the Implementation of the 2020 Water Resources Management BBWS Coordination Meeting
- Completion of BJPSDA payments from PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PTIP), and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to PJT II
- Response of the Supervisory Board on Amendments



- Penerbitan Kembali (*reissued*) Laporan Keuangan
- Langkah Antisipasi Perusahaan dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19
- Tanggapan atas Penerbitan Kembali (*reissued*) Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2019
- Tanggapan atas Usulan Persetujuan Dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
- Tanggapan Dewan Pengawas atas Laporan dan Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Kinerja I (Jasa Produksi) Triwulan IV tahun 2019 Kepada Karyawan dan THR tahun 2020
- Pembahasan Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Periode Triwulan I
- Pengusulan Talenta Perum Jasa Tirta II pada sistem Talent Management BUMN
- Tanggapan atas Laporan Triwulan I Perum Jasa Tirta II Tahun 2020 Arahan Dewan Pengawas dalam usulan Revisi RKAP 2020
- Tanggapan Dewan Pengawas atas Permohonan Kerjasama Bidang Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Rencana Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT Len Industri (Persero)
- Tanggapan Dewan Pengawas atas Permohonan Ijin Pemanfaatan Lahan untuk Mess Atletik dan Pusat Pelatihan Olah Raga Dayung Nasional
- Tanggapan Dewan Pengawas atas Penetapan Jumlah dan Nilai Pengadaan Barang Jasa dengan Metode Penunjukan Langsung
- Arahan agar Pemilik Anggaran adalah Pelaksana Anggaran Perusahaan
- Tanggapan atas Usulan Revisi RKAP 2020
- Tindak Lanjut Kunjungan Lapangan Secara Virtual Dewan Pengawas ke Unit Wilayah I, II, III dan IV PJT II
- Persetujuan Dokumen Pengadaan Jasa Akuntan Publik (KAP) Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian PJT II Tahun Buku 2020
- Arahan Dewan Pengawas tentang Sosialisasi PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 di lingkungan PJT II
- Tanggapan atas Laporan Semester I PJT II Tahun 2020
- Penetapan Batasan Kewenangan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra
- Permintaan Informa Pelaksanaan Sertifikat ISO 37001
- Supervisi dan Monitoring Anak Perusahaan
- Rencana Jangka Panjang (RJP) PJT II Tahun 2020-2024
- MoU di Lingkungan PJT II
- Reviu atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Investasi dan *Profitability* Lini Produksi Tahun 2020
- Persetujuan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II
- Permintaan Penjelasan Klarifikasi atas Usulan Direksi Anak Perusahaan PT Jasa Tirta Luhur
- Tanggapan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2020 PJT II
- Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2021 PJT II
- and Reissued Financial Statements
- Company Anticipation Steps in Facing the Impact of the Covid-19 Pandemic
- Response to the reissued of Perum Jasa Tirta II Annual Report for Fiscal Year 2019
- Responses to the Proposed Approval in the Joint Discussion Meeting (RPB)
- Response of the Supervisory Board to the Report and Application for Approval for the Provision of Performance Allowances I (Production Services) Quarter IV of 2019 to Employees and THR in 2020
- Discussion on Monitoring Reports and Follow-up on Examination Results for Quarter I
- Talent proposal of Perum Jasa Tirta II in the BUMN Talent Management system
- Responses to the Quarter I Report of Perum Jasa Tirta II Year 2020 Directions from the Supervisory Board in the proposed Revised RKAP 2020
- Response of the Supervisory Board to the Application for Cooperation in the Development of New Renewable Energy (EBT) and the Plan to Sign a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Len Industri (Persero)
- Response of the Supervisory Board to Applications for Land Use Permits for Athletes' Mess and National Rowing Sports Training Center
- Response of the Supervisory Board on the Determination of the Amount and Value of Procurement of Goods and Services by Direct Appointment Method
- Directions so that the Budget Owner is the Executor of the Company's Budget
- Responses to the Proposed Revised RKAP 2020
- Follow-up Virtual Field Visits of the Supervisory Board to Regional Units I, II, III and IV of PJT II
- Approval of Public Accountant Services Procurement Documents (KAP) Inspection of PJT II Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020
- Direction of the Supervisory Board regarding the Socialization of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73 within PJT II
- Responses to the 2020 PJT II Semester I Report
- Determination of the Limitation of Authority of Cooperation Agreements with Partners
- Request for Information on Implementation of ISO 37001 Certificate
- Supervision and Monitoring of Subsidiaries
- Long Term Plan (RJP) PJT II Year 2020-2024
- MoU in PJT II Lingkungan
- Review on the Process of Procurement of Goods and Services for Investment Activities and Profitability of Production Lines in 2020
- Approval of Nomenclature, Duties and Functions of Organizational Structure and Work Procedures for Jasa Tirta II General Company Umum
- Request for Clarification of the Proposed Directors of the Subsidiary PT Jasa Tirta Luhur
- Responses to PJT II's 2020 Quarter III Financial Statements
- Response to the Proposed RKAP 2021 PJT II

- Tanggapan atas Usulan Direksi Anak Perusahaan PT. Jasa Tirta Luhur
- Tanggapan atas Revisi Usulan RKAP PJT II Tahun 2021
- Arahan Dewan Pengawas terkait profil Risiko Perusahaan dan Rencana Investasi dalam RKAP Tahun 2021

Selain melalui pemberian arahan dan rekomendasi yang disampaikan melalui rapat gabungan atau melalui media korespondensi, Dewan Pengawas didampingi Komite Audit turut melaksanakan pengawasan secara langsung melalui kunjungan kerja ke unit-unit serta bertemu langsung dengan karyawan yang berada di unit kerja dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi dengan harapan dapat memberikan masukan maupun arahan yang lebih optimal dan tepat sasaran.

Prospek Usaha

Dewan Pengawas telah melakukan peninjauan atas rancangan target usaha yang diajukan oleh Direksi dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020. Meninjau RKAP tersebut, Dewan Pengawas menanggapi secara positif prospek usaha yang telah disusun Direksi yang mana pada prosesnya telah didasarkan pada analisis yang komprehensif mengenai asumsi-asumsi ekonomi makro tahun 2020 dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan membaik namun masih rentan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meyakini bahwa ekonomi nasional juga mampu menunjukkan pemulihan kondusivitas di tahun 2020. Hal tersebut tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Negara (APBN) 2020 yang bertemakan "Mendukung Indonesia Maju". Dalam APBN 2020, Kemenkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi di level 3,1%, dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diproyeksikan sebesar Rp14.400 per dolar AS.

Dari sisi industri pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), prospek pertumbuhan industri listrik didukung oleh proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menargetkan rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun. Pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahun dan adanya potensi demand untuk sektor industri, rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi.

Faktor lain yang mendukung prospek usaha di industri yaitu proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, di mana pertumbuhan populasi maka akan meningkatkan kebutuhan air bersih, air minum dalam kemasan, maupun air untuk pertanian. Selain didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar serta perubahan gaya hidup yang mengutamakan kepraktisan juga turut memengaruhi kebutuhan air masyarakat.

- Responses to the Proposed Directors of the Subsidiary PT. Tirta Luhur Services
- Responses to the Revised Proposed RKAP PJT II in 2021
- Directions from the Supervisory Board regarding the Company's Risk profile and Investment Plan in the 2021 RKAP

In addition to providing directions and recommendations submitted through joint meetings or through correspondence media, the Supervisory Board accompanied by the Audit Committee also carries out direct supervision through working visits to units and directly meeting with employees in the work unit with the aim of knowing firsthand the problems faced with the hope of providing input and direction that is more optimal and on target.

Business prospect

The Supervisory Board has reviewed the draft business targets proposed by the Board of Directors in the Company's 2020 Work Budget Plan (RKAP). Reviewing the RKAP, the Supervisory Board responded positively to the business prospects that have been prepared by the Board of Directors which in the process has relied on a comprehensive analysis of macroeconomic assumptions in 2020 and other factors that affect the Company's performance.

In the midst of global economic growth projections which are expected to improve but are still vulnerable, the Indonesian Ministry of Finance (Kemenkeu) believes that the national economy is also able to show a conducive recovery in 2020. This is reflected in the 2020 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) with the theme "Supporting Advanced Indonesia". In the 2020 State Budget, the Ministry of Finance targets economic growth of 5.3%, inflation at the level of 3.1%, and the exchange rate of the Rupiah against the United States dollar (USD) is projected at Rp. 14,400 per US dollar.

In terms of the water resources management industry (SDA) and hydroelectric power generation (PLTA), the prospect of electricity industry growth is supported by the projection of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) which targets an average growth in electricity demand of around 6.9% per year. This growth is expected to be maintained in line with the projected population growth each year and the potential demand for the industrial, household, business, public, and transportation sectors.

Another factor that supports business prospects in the industry is the projected population growth each year, where population growth will increase the need for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture. Besides being driven by population growth, the level of availability of clean water in the surrounding environment and changes in lifestyle that prioritize practicality also affect the community's water needs.



Meninjau faktor-faktor tersebut, Perum Jasa Tirta II sebagai BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan PLTA akan berupaya untuk meningkatkan perannya dalam menjamin pengelolaan air yang bermanfaat secara sosial dan komersial. Berbekal kapasitas yang dimiliki serta proyeksi usaha yang mendukung, Dewan Pengawas optimis bahwa prospek pertumbuhan usaha Perum Jasa Tirta II masih terjaga di tahun yang akan datang.

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite dibawah Dewan Pengawas. Sepanjang tahun 2020, komite -komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan seluruh rencana kerja masing-masing komite sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

Pelaksanaan rencana kerja komite-komite tersebut dapat dilakukan dilakukan melalui forum rapat komite dengan mengundang Direktorat, Divisi maupun Unit kerja terkait maupun secara tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan secara mendalam oleh masing-masing komite dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.

Selama tahun 2020, Komite Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan melaksanakan rapat selama tahun 2020.

Selain itu Dewan Pengawas dan Komite telah menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib Kerja, yang selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi. Kebijakan dan Tata Tertib Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawaban. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Pengawas dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas pencapaian program maupun rencana kerja dan berharap kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menjaga Perusahaan agar lebih resilient dalam menghadapi segala tantangan dan memperoleh kinerja terbaik dalam industri di Indonesia.

Penilaian Atas Kinerja Manajemen

Penilaian Dewan Pengawas mengenai kinerja Manajemen Perusahaan Tahun 2020 terdiri dari aspek kuantitatif maupun kualitatif atas realisasi dari Rencana Kerja Tahunan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menilai kinerja Perusahaan masih baik terlihat dari Perusahaan tetap dapat membukukan laba dan merealisasikan strategi inisiatif untuk mendukung pencapaian target tahun 2020 meskipun di tengah

Considering these factors, Perum Jasa Tirta II as a BUMN engaged in the management of Water Resources (SDA) and PLTA will seek to increase its role in ensuring socially and commercially beneficial water management. Armed with the existing capacity and supporting business projections, the Supervisory Board is optimistic that the business growth prospects of Perum Jasa Tirta II will still be maintained in the coming year.

Assessment of the Performance of Committees Under the Supervisory Board

The Supervisory Board periodically (annually) evaluates the effectiveness of the performance of the committees under the Supervisory Board. Throughout 2020, the committees formed by the Supervisory Board have carried out their functions, duties and responsibilities well. This is reflected in the implementation of the entire work plan of each committee as set out in early 2020.

The implementation of the work plans of these committees can be carried out through committee meeting forums by inviting the relevant Directorates, Divisions and work units or indirectly by evaluating the reports that have been received and then all of them are thoroughly studied by each committee and then the results submitted in writing to the Supervisory Board.

During 2020, the Supervisory Board Committee has carried out its duties and responsibilities well and held meetings throughout 2020.

In addition, the Supervisory Board and the Committee have prepared various Policies and Work Rules, which are always adjusted to the applicable regulations and the challenges faced. These Policies and Work Rules are used as guidelines in carrying out every action and ensuring accountability. The structure and composition of the membership of the Supervisory Board and the Committee is in accordance with applicable regulations.

The Supervisory Board appreciates the achievement of programs and work plans and hopes that the performance of the Committee can be further improved so that it can make a greater contribution in keeping the Company more resilient in facing all challenges and obtaining the best performance in the industry in Indonesia.

Management Performance Assessment

The Supervisory Board's assessment of the performance of the Company's Management in 2020 consists of both quantitative and qualitative aspects of the realization of the Annual Work Plan which was previously submitted by the Board of Directors and approved by the Supervisory Board. The Supervisory Board assesses that the Company's performance is still good as seen from the Company's ability to record profits and realize strategic initiatives to support the achievement of the

dinamika perekonomian yang cukup menantang dengan Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Telah dilakukan *culture transformation* pada seluruh jajaran staf dan manajemen dengan penerapan *core values* dan acuan budaya kerja yang telah di amanahkan oleh Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-06/MBU.07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Nomor : SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, telah menetapkan: Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : "AKHLAK" yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborasi. Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : 1/DIR/27/PRT/2016 tanggal 24 November 2016 telah ditetapkan: Budaya Perusahaan : Perum Jasa Tirta II berkemampuan tinggi, kreatif dan inovatif untuk memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas bagi kepuasan Pelanggan dengan menjunjung tinggi sikap jujur, terbuka, profesional dan bertanggung jawab. sebagai internalisasi nilai-nilai utama pekerja. Dewan Pengawas yakin bahwa Perusahaan akan selalu dapat memenangkan persaingan, menghadapi segala tantangan, tumbuh secara berkelanjutan.

Kondisi perekonomian global yang cukup menantang dengan masih berlangsungnya US-China *Trade War*, diikuti dengan penyebaran virus Covid-19 di berbagai belahan dunia. Hal ini menyebabkan proyeksi perekonomian dunia mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia juga mengalami kontraksi pada tahun 2020, dengan kondisi terburuk tercatat pada kuartal kedua 2020 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -5,32% (negatif), dan beranjak naik secara gradual ditutup pada angka -2,07% pada akhir tahun 2020. Kondisi perekonomian berlangsung membaik didorong oleh permintaan domestik dan distribusi dan akselerasi vaksinasi oleh pemerintah.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peran dan amanat dalam menjaga dan mengelola Sumber Daya Air bagi kepentingan sosial dan komersial mendorong Perum Jasa Tirta II untuk senantiasa menempatkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan etis sebagai sebuah nilai yang harus terpelihara dengan baik. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pengelolaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan dan pemeliharaan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pemangku kepentingan dalam integrasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Sebagai salah satu aspek prioritas, Dewan Pengawas berupaya memastikan bahwa Perusahaan menaruh komitmen dalam memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai modal

2020 target even though in the midst of challenging economic dynamics, 2020 is a different year compared to the previous periods.

Culture transformation has been carried out on all levels of staff and management by implementing core values and work culture references that have been mandated by the Ministry of SOEs through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-06/MBU.07/2020 dated July 1, 2020 concerning The Code of Ethics and Code of Conduct of the State Civil Apparatus of the Ministry of State-Owned Enterprises and Circular Letter Number: SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises, have stipulated : The Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises consist of: "AKHLAK" namely Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative. Based on the Regulation of the Board of Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II Number: 1/DIR/27/PRT/2016 dated November 24, 2016 it has been determined: Corporate Culture : Perum Jasa Tirta II is highly capable, creative and innovative to provide fast and quality services for customer satisfaction by upholding an honest, open, professional and responsible attitude. as the internalization of the core values of workers. The Supervisory Board believes that the Company will always be able to win the competition, face all challenges, and grow sustainably.

Global economic conditions are quite challenging with the ongoing US-China Trade War, followed by the spread of the Covid-19 virus in various parts of the world. This causes the projection of the world economy to contract. Based on the data released by the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy also contracted in 2020, with the worst conditions recorded in the second quarter of 2020 where economic growth was recorded at -5.32% (negative), and moved up gradually closing at -2. 0.07% at the end of 2020. Economic conditions continued to improve driven by domestic demand and the distribution and acceleration of vaccination by the government.

Implementation of Corporate Social Responsibility

The role and mandate in maintaining and managing Water Resources for social and commercial interests encourages Perum Jasa Tirta II to always place responsible and ethical business practices as a value that must be well maintained. This commitment is then realized through sustainable management of social, economic and environmental impacts and the maintenance of synergistic and harmonious relationships with stakeholders in the integration of Corporate Social Responsibility programs.

As one of the priority aspects, the Supervisory Board strives to ensure that the Company is committed to paying attention to the welfare of the community and environmental sustainability as the basic capital



dasar yang mendukung keberlangsungan usaha secara berkelanjutan. Komitmen tersebut direalisasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana pada tahun 2020 Perusahaan berhasil menyalurkan pinjaman langsung sebesar Rp1.200.000.000 dan pembinaan senilai Rp36.620.000 kepada 67 mitra binaan. Perusahaan juga merealisasikan penyaluran bantuan Bina Lingkungan senilai Rp5.159.558.599 sampai dengan akhir tahun 2020.

Pelaksanaan program ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dan komitmen Perusahaan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap prestasi dan capaian.

Pengawasan Dewan Pengawas Terhadap Strategis Perusahaan

Dewan Pengawas telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan kepada Perusahaan antara lain dengan memberikan nasihat maupun pendapat kepada Direksi dalam menetapkan kebijakan dan dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan selama tahun 2020. Dewan Pengawas juga memfokuskan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Perusahaan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Pengawas selama tahun 2020, yaitu beberapa aspek namun tidak terbatas pada aspek perkreditan, operasional, perkembangan teknologi informasi, tata kelola terintegrasi dan budaya perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dewan Pengawas menyadari bahwa komitmen internal dalam mewujudkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) harus senantiasa dipelihara untuk mendukung budaya sadar GCG yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas sebagai organ manajemen utama memegang peranan penting dalam mengawasi dan menjamin bahwa setiap aktivitas usaha telah menerapkan prinsip GCG dan kepatuhan sebagai fondasinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tujuan GCG dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta menghindari segala praktik kecurangan (*fraud*) yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi reputasi Perusahaan.

Dilatarbelakangi kesadaran akan pentingnya GCG dalam mendukung usaha yang berkelanjutan, Dewan Pengawas mendorong optimalisasi penerapan GCG melalui penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG demi menjamin praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal, serta relevan dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan. Perum Jasa Tirta II telah memiliki Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai acuan pedoman dasar bagi seluruh insan PJT II dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankan.

that supports sustainable business continuity. This commitment is realized through the Partnership and Community Development Program (PKBL), where in 2020 the Company succeeded in distributing direct loans of Rp. 1,200,000,000 and coaching worth Rp. 36,620,000 to 67 fostered partners. The company also realized the distribution of Community Development assistance worth Rp5,159,558,599 until the end of 2020.

The implementation of this program is a form of the Company's contribution and commitment in supporting the achievement of Indonesia's Sustainable Development Goals (SDGs) which is indicated by the recognition and awarding of achievements and achievements.

Oversight of the Supervisory Board of the Company's Strategic

The Supervisory Board has carried out its duties as a supervisory function to the Company, among others, by providing advice and opinions to the Board of Directors in setting policies and in carrying out the management of the Company during 2020. become the attention of the Supervisory Board during 2020, namely several aspects but not limited to aspects of credit, operations, development of information technology, integrated governance and corporate culture.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Supervisory Board realizes that internal commitments in realizing the principles and best practices of Good Corporate Governance must always be maintained to support a comprehensive and sustainable GCG awareness culture. In this case, the Supervisory Board as the main management organ plays an important role in supervising and ensuring that every business activity has implemented GCG principles and compliance as its foundation. This is intended to optimize the role and objectives of GCG in creating a healthy business climate, increasing competitiveness, and avoiding all fraudulent practices that can have a negative impact on the Company's reputation.

Based on the awareness of the importance of GCG in supporting sustainable business, the Supervisory Board encourages the optimization of GCG implementation through strengthening various GCG policies and manuals to ensure best practices, reliable systems and procedures, and are relevant to business developments and Company regulations. Perum Jasa Tirta II already has a Corporate Governance Manual as a basic guideline for all PJT II personnel in implementing GCG principles in every business activity they carry out.

Untuk menggenapkan komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap optimalisasi penerapan GCG, Perusahaan telah membentuk *road map* GCG yang berperan sebagai kerangka acuan arah implementasi dan pengembangan GCG untuk jangka waktu 2015 - 2020. Road map GCG Perum Jasa Tirta II tahun 2015 - 2020 merupakan *grand strategy* dan milestone implementasi GCG berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun sasaran akhir *road map* GCG tahun 2015 - 2020 adalah terciptanya tata kelola yang berkelanjutan pada seluruh proses bisnis oleh seluruh organ perusahaan.

Komitmen Direksi Perum Jasa Tirta II untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal dan berkelanjutan dicerminkan dengan pencapaian skor 85,97% dari bobot aspek Direksi sebesar 35,00. Skor tersebut memperoleh predikat penilaian "Baik".

To fulfill Perum Jasa Tirta II's commitment to optimizing the implementation of GCG, the Company has established a GCG road map which acts as a frame of reference for the direction of GCG implementation and development for the period 2015 - 2020. The Perum Jasa Tirta II GCG road map for 2015 - 2020 is a grand strategy and milestones for sustainable GCG implementation by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The final target of the 2015-2020 GCG road map is the creation of sustainable governance in all business processes by all company organs.

The commitment of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II to implement the principles of GCG in an optimal and sustainable manner is reflected by the achievement of a score of 85.97% of the weight of the Board of Directors' aspect of 35.00. The score received a "Good" assessment predicate.

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR		BOBOT	2020	
			CAPAIAN SKOR	% CAPAIAN
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,8430	97,76%
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,0660	89,62%
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	30,5005	87,14%
IV	Direksi	35,00	30,0885	85,97%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,2014	91,13%
VI	Aspek Lainnya	5,00	0,0000	0,00%
VII	SKOR KESELURUHAN	100,00	83,6994	83,699%
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG			BAIK	

Tingkat pemenuhan dalam tabel di atas menggambarkan kualitas kecukupan infrastruktur dan praktik GCG pada Perum Jasa Tirta II jika dibandingkan dengan praktik yang dianggap terbaik (*best practices*) penerapan GCG sebagaimana terdapat pada indikator/parameter penilaian yang digunakan/ditetapkan Kementerian BUMN selaku pemilik Perusahaan.

The level of fulfillment in the table above illustrates the quality of infrastructure adequacy and GCG practices at Perum Jasa Tirta II when compared to the best practices of GCG implementation as contained in the indicators/assessment parameters used/set by the Ministry of SOEs as the owner of the Company.

Kondisi capaian skor penilaian pelaksanaan GCG di tahun 2020 secara keseluruhan telah melalui pengujian *evidence*, analisa atas isian kuesioner dan analisa Tim terhadap substansi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perum Jasa Tirta II yang berdasarkan indikator/parameter dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 pada umumnya sudah mendekati praktik terbaik, walaupun masih terdapat beberapa infrastruktur atau praktik tata kelola perusahaan yang masih bisa untuk ditingkatkan atau disempurnakan.

The overall condition of the GCG implementation assessment score in 2020 has gone through evidence testing, analysis of the questionnaire contents and the Team's analysis of the substance of the implementation of Good Corporate Governance in the Perum Jasa Tirta II environment based on the indicators/parameters in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 is generally close to best practice, although there are still some infrastructures or corporate governance practices that can still be improved or refined.

Pengendalian Intern

Penguatan sistem pengendalian internal, tata kelola aset dan audit internal. Berikut Ini Arahan Dewan Pengawas Terhadap Penguatan Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola dan Audit Internal:

Internal Control

Strengthening the internal control system, asset management and internal audit. Following are the directions of the Supervisory Board towards Strengthening the Internal Control System, Governance and Internal Audit:



A. Terkait Pengelolaan Piutang Usaha

1. Memperbaiki penyajian piutang di Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Piutang dalam Peraturan Direksi No. 1/DIR/02/PRT/2017, yaitu:

- Melakukan penelitian terhadap kondisi debitur dengan piutang bermasalah, dan melakukan upaya penyelesaian piutang dengan memperhatikan kondisi debitur melalui *rescheduling* atau *reconditioning* piutang.
- Menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang (CKPN) menggunakan *roll rate model* untuk Piutang usaha kepada pihak ketiga dan perhitungan penurunan nilai piutang secara Individual untuk piutang usaha kepada pihak berelasi berdasarkan ketentuan PSAK 55 (saat ini terdapat perubahan metode menurut PSAK 71).
- Melakukan penghapusbukuan piutang terhadap piutang yang telah CKPN 100% yang telah ditetapkan Direktur Utama. Sesuai PP nomor 7 Tahun 2010 pasal 35 ayat 1 huruf d, penghapusbukuan piutang harus melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- Melakukan penghapustagihan piutang terhadap piutang yang telah dihapusbukukan, mengingat sesuai PP 7 tahun 2010 pasal 36 ayat 1 huruf h, penghapustagihan piutang harus melalui persetujuan Menteri.

2. Memperbaiki tingkat kolektibilitas piutang usaha kategori lancar, melalui:

- Penagihan yang lebih intensif/tegas dan efektif, setiap progress penagihan agar dilaporkan kepada Dewan Pengawas secara reguler.
- Penajaman klausul dalam kontrak/perjanjian yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran atas pemberian jasa yang diberikan, dan sanksi yang akan diberikan apabila tidak memenuhi kewajiban, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam mentaati jadwal pembayaran transaksi.

B. Terkait Monitoring Anak Perusahaan, Dewan Pengawas meminta agar:

- Direksi Perum Jasa Tirta II, selaku induk perusahaan lebih intensif lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan guna memastikan pengurusan/pengelolaannya telah dilakukan secara efektif dan efisien serta berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Direksi menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan berikut kinerja operasional dan keuangan PT Jasa Tirta Luhur secara Triwulanan kepada Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II
- Dalam rapat gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II yang dilakukan secara bulanan, agar disampaikan pula secara umum kondisi operasional dan keuangan PT Jasa Tirta Luhur guna dievaluasi.

A. Related to Accounts Receivable Management

1. Improving the presentation of receivables in the Statement of Financial Position (Balance Sheet) in accordance with the Guidelines for Management of Receivables in the Board of Directors Regulation No. 1/DIR/02/PRT/2017, namely:

- Conduct research on the condition of debtors with non-performing receivables, and make efforts to settle accounts receivable by taking into account the condition of the debtor through *rescheduling* or *reconditioning* receivables.
- Determine allowance for impairment losses on receivables (CKPN) using the *roll rate model* for trade receivables to third parties and individual accounts receivable impairment calculations for trade receivables from related parties based on the provisions of PSAK 55 (currently there is a change in the method according to PSAK 71).
- Perform write-off of receivables against receivables that have CKPN 100% which has been determined by the President Director. In accordance with PP number 7 of 2010 article 35 paragraph 1 letter d, write-off of accounts receivable must be approved by the Supervisory Board.
- Performing write-offs of receivables that have been written-off, considering that according to PP 7 of 2010 article 36 paragraph 1 letter h, write-offs of receivables must be approved by the Minister.

2. Improving the collectibility level of trade receivables in the current category, through:

- More intensive/firm and effective billing, every billing progress must be reported to the Supervisory Board on a regular basis.
- Sharpening of clauses in contracts/agreements relating to payment terms for the provision of services provided, and sanctions that will be given if they do not fulfill obligations, so as to improve customer compliance in complying with the transaction payment schedule.

B. Regarding the Monitoring of Subsidiaries, the Supervisory Board requests that:

- The Board of Directors of Perum Jasa Tirta II, as the parent company, is more intensive in providing guidance and supervision to the performance of subsidiaries to ensure that the management has been carried out effectively and efficiently and adheres to the principles of good corporate governance.
- The Board of Directors submits a report on the results of the supervision carried out along with the operational and financial performance of PT Jasa Tirta Luhur on a Quarterly basis to the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II
- In a joint meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II which is conducted on a monthly basis, in order to convey the general operational and financial conditions of PT Jasa Tirta Luhur for evaluation.

C. Terkait Pengembangan IT

- 1) Diagendakan Pembahasan bersama Dewan Pengawas dengan Direksi dan Divisi/Unit terkait atas road map sistem IT yang telah disusun mencakup pengembangan IT, kendala yang dihadapi dan solusinya serta penerapannya dalam proses bisnis Perum Jasa Tirta II.

D. Terkait Peningkatan Kinerja Perusahaan

- 1) Direksi telah menyiapkan bahan rapat Evaluasi Kinerja bulanan meliputi Kinerja Induk PJT II dan Kinerja Anak Perusahaan yang berisikan antara lain :

- a) Asumsi-asumsi (makro dan teknis) yang digunakan dalam menjalankan Perusahaan
- b) Produksi yang dicapai
- c) Perolehan Pendapatan berikut penjelasan rincinya
- d) Pengeluaran Beban berikut usaha-usaha dalam rangka efisiensi
- e) Laporan Laba/Rugi dan Prognosa 2020
- f) Profitability usaha-usaha yang masih minus berikut analisis permasalahan serta solusi penyelesaiannya
- g) Progres Belanja Modal/ Investasi tahun 2020 berikut analisis permasalahan dan solusi penyelesaiannya agar penyerapan tahun 2020 maksimal
- h) Dengan diberlakukannya PSAK 71, 72 dan 73, Direksi dan Divisi/Unit terkait melakukan penyesuaian atas laporan keuangan semester 1 tahun 2020 (dimulai sejak bulan Januari 2020).

- 2) Selanjutnya, sebelum laporan keuangan disampaikan ke Pemilik Modal, Dewan Pengawas bersama Direksi melakukan pembahasan laporan keuangan yang mencakup:

- a. upaya pemenuhan *service level agreement* sesuai dengan standar serta melakukan inovasi penyediaan produk dan layanan yang bermutu,
- b. mengoptimalkan program pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai perusahaan untuk menyiapkan *engine of growth* Perusahaan,
- c. mengimplementasikan *business continuity plan* untuk keberlangsungan layanan dalam situasi *new normal*, dan
- d. komitmen atas pencapaian target-target RKAP dan KPI Tahun 2020 sesuai kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal.

E. Terkait Aset Kelola

Perusahaan harus memiliki *business plan* yang jelas dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset, yang diawali dengan perlunya pengkajian dari aspek legal atas status aset kelola yang telah diserahkan oleh Menteri Teknis kepada Perum Jasa Tirta II, sehingga Perusahaan dapat menarik manfaat dan menghasilkan pendapatan dari aset kelola sesuai dengan amanat dalam PP nomor 7 tahun 2010 pasal 5, dan aset milik Perum Jasa Tirta II yang penggunaannya diutamakan untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan aset tersebut.

C. Related to IT Development

- 1) There is an agenda for discussion with the Supervisory Board with the Board of Directors and related Divisions/Units on the IT system road map that has been prepared covering IT development, obstacles faced and solutions and their implementation in the business processes of Perum Jasa Tirta II.

D. Regarding Company Performance Improvement

- 1) The Board of Directors has prepared monthly Performance Evaluation meeting materials covering the Performance of the Parent PJT II and the Performance of Subsidiaries which contain, among others:

- a) Assumptions (macro and technical) used in running the Company
- b) Achieved production
- c) Earnings of Income along with a detailed explanation
- d) Expenses Expenditures along with efforts in the context of efficiency
- e) Profit/Loss Report and Prognosis 2020
- f) Profitability of businesses that are still minus along with analysis of problems and solutions for their solutions
- g) Progress of Capital Expenditures / Investments in 2020 along with analysis of problems and solutions for their solutions so that absorption in 2020 is maximized
- h) With the enactment of PSAK 71, 72 and 73, the Board of Directors and related Divisions/Units made adjustments to the financial statements for semester 1 of 2020 (starting in January 2020).

- 2) Furthermore, before the financial statements are submitted to the Capital Owners, the Supervisory Board together with the Board of Directors discuss the financial statements which include:

- a. efforts to comply with service level agreements in accordance with the standards and innovate the provision of quality products and services,
- b. optimize the coaching program and increase the competence of company employees to prepare the Company's engine of growth,
- c. implementing a business continuity plan for service continuity in new normal situations, and
- d. commitment to achieving the 2020 RKAP and KPI targets in accordance with the management contract between the Board of Directors and the Supervisory Board and the Capital Owner

E. Regarding Managed Assets

Companies must have a clear business plan in the management and utilization of assets, which begins with the need for an assessment from the legal aspect of the status of managed assets that have been handed over by the Technical Minister to Perum Jasa Tirta II, so that the Company can benefit and generate income from assets under management in accordance with mandated in PP number 7 of 2010 article 5, and assets belonging to Perum Jasa Tirta II whose use is prioritized for operating and maintaining these assets.



F. Terkait Audit Internal

Secara periodik/triwulanan dilaksanakan rapat koordinasi antara Satuan Pengawasan Intern dengan Komite Audit untuk membahas dan mendorong progres tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari auditor eksternal maupun auditor internal, serta pembahasan dalam rangka peningkatan efektivitas pemeriksaan intern oleh SPI.

Dewan Pengawas berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perusahaan telah berjalan dengan baik, berfungsi efektif dan memberikan keyakinan yang memadai. Dewan Pengawas menyarankan agar sistem pengendalian internal tetap ditingkatkan sejalan dengan semakin meningkatnya tantangan serta kompleksitas usaha.

Strategi Anti Fraud

Menindaklanjuti surat sekretaris kementerian BUMN Nomor : S-17S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal setifikasi ISO 37001:2016. Sistem manajemen anti penyuapan, perusahaan telah diaudit oleh pihak eksternal dan pada tanggal 28 Desember 2020. Serta hasilnya PJT II Telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016.

Dewan Pengawas sangat mendukung upaya yang dilakukan Perusahaan dalam pemberantasan KKN Khususnya terkait strategi dan manajemen anti penyuapan.

Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perusahaan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan PJT II dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan PJT II dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi nomor 1/DP/68/KBS/10/2019 – KBS-01/DIR/10/2019 Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Lampiran VII): Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Selama tahun 2020, Perusahaan telah mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi, program-program pengendalian gratifikasi antara lain:

1. Pakta Integritas Seluruh Insan Perusahaan baik Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pekerja melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dan penyuapan yang tertuang dalam GCG *Statement*. Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa dengan rekanan Perusahaan.
2. Terdapat pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-27/DIR/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Tim Pengendalian Gratifikasi dan

F. Related to Internal Audit

Coordination meetings are held periodically/quarterly between the Internal Audit Unit and the Audit Committee to discuss and encourage the progress of follow-up on audit results from both external and internal auditors, as well as discussions in order to increase the effectiveness of internal audits by SPI.

The Supervisory Board is of the opinion that in general the internal control system implemented by the Company has been running well, functioning effectively and providing adequate assurance. The supervisory board recommends that the internal control system remains in line with the increasing challenges and complexity of the business.

Anti-Fraud Strategy

Following up on the letter from the secretary of the Ministry of SOEs No: S-17S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020 regarding ISO 37001:2016 certification. Anti-bribery management system, the company has been audited by an external party and on December 28, 2020. As a result, PJT II has obtained the ISO 37001:2016 certificate.

The Supervisory Board strongly supports the efforts made by the Company in eradicating corruption, collusion and nepotism, especially regarding anti-bribery strategies and management.

Gratuity Control

The company prohibits giving and receiving gratuities in any form and with anyone in accordance with applicable laws. The Company's commitment to the prohibition of gratifications continues to be echoed, among others by issuing policies regarding Anti-Bribery Provisions and Gratification Control which are used as guidelines for all PJT II personnel in preventing gratification and bribery practices that can harm PJT II's interests and conflict with GCG principles so as to create a control environment that is conducive to gratification. conducive environment in accordance with the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors number 1/DP/68/KBS/10/2019 – KBS-01/DIR/10/2019 Perum Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance (Appendix VII): About Control Guidelines Gratification.

During 2020, the Company has implemented Gratification Control programs for gratification control, including:

1. Integrity Pact All employees of the Company, including the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees, signed the commitment to anti-gratification and bribery as stated in the GCG *Statement*. The signing of the integrity pact is also carried out during the process of procuring goods and services with the Company's partners.
2. There is the formation of a Gratification Control Team as stated in the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-27/DIR/12/2020 dated December 2, 2020 regarding the Gratification

Tim Pengelolaan Barang Gratifikasi sesuai dengan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-45/DKS/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Tim Pengelolaan Barang Gratifikasi PJT II.

3. Terdapat Laporan tentang pengendalian gratifikasi di Perusahaan untuk tahun 2020 sebagaimana Nota Dinas Nomor: ND-165/UP.DKS/KB/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 Perihal Laporan Penerimaan Gratifikasi.
4. Telah dilakukan Peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung dengan pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-27/DIR/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Tim Pengendalian Gratifikasi.

Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

Dewan Pengawas memandang WBS memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pelaporan pelanggaran WBS merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perusahaan yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan yang sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi Anti Fraud yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan telah memiliki sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independent dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor. Sarana WBS telah diatur sebagaimana Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi PJT II Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019, KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PJT II pada lampiran VI tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Dewan Pengawas berpendapat bahwa secara umum penerapan WBS di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Dewan Pengawas menyarankan agar sosialisasi dan penerapan WBS dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.

Rencana Kerja 2021

Dewan Pengawas telah memberikan tanggapan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang telah disusun oleh Direksi terkait Kinerja keuangan, Kinerja Operasional, Rencana Investasi, Manajemen Risiko dan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Untuk peningkatan efektivitas anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen serta sebagai media akuntabilitas, Dewan Pengawas menyampaikan beberapa catatan dan/atau saran kepada Direksi, sebagai berikut:

1. Terhadap proyeksi penurunan posisi Kas & Setara Kas di akhir tahun 2021, Dewan Pengawas menyarankan kepada Direksi agar meningkatkan kolektibilitas Piutang Usaha, termasuk tunggakan piutang yang terjadi.

Control Team and the Gratification Goods Management Team in accordance with the President Director's Assignment Letter Number: SPN-45/DKS/05/2020 dated May 13, 2020 regarding the PJT II Gratification Goods Management Team.

3. There is a report on the control of gratification in the Company for 2020 as stated in the Official Memorandum Number: ND-165/UP.DKS/KB/05/2020 dated May 29, 2020 regarding the Gratification Receipt Report.
4. Periodic reviews and improvements have been made to supporting devices by establishing a Gratification Control Team as stated in the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-27/DIR/12/2020 dated December 2, 2020 regarding the Gratification Control Team.

Whistleblowing Management

The Supervisory Board views the Whistleblowing System as having an important role in encouraging the implementation of good corporate governance. The implementation of WBS violation reporting is part of the effort to prevent violations and negative publications against the Company that affect the Company's reputation which is in line with one of the pillars of the Anti Fraud Strategy, namely the detection pillar as stipulated by the regulator. In its implementation, the Company has an independent and confidential means of reporting violations and has a whistleblower protection mechanism. The WBS facility has been regulated according to the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of PJT II No: 1/DP/68/KBS/10/2019, KBS01/DIR/10/2019 dated 30 October 2019 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PJT II in appendix VI regarding Guidelines for Management of Complaints of Violations (*Whistle Blowing System*).

The Supervisory Board is of the opinion that in general the implementation of WBS in the Company has been going well. The Supervisory Board recommends that the socialization and implementation of WBS is carried out on an ongoing basis so as to create a clean, professional and integrity work environment.

2021 Work Plan

The Supervisory Board has responded to the Proposed Work Plan and Corporate Budget (RKAP) for 2021 which has been prepared by the Board of Directors regarding financial performance, operational performance, investment plans, risk management and other matters that need attention. To increase the effectiveness of the budget as a management planning and control tool as well as a medium of accountability, the Supervisory Board submits several notes and/or suggestions to the Board of Directors, as follows:

1. Regarding the projected decline in the position of Cash & Cash Equivalents at the end of 2021, the Supervisory Board suggests to the Board of Directors to increase the collectibility of Accounts Receivable, including the outstanding receivables.



2. Dalam penanganan Piutang Usaha yang diproyeksikan meningkat pada RKAP tahun 2021 sebesar 1,35%, Dewan Pengawas mengingatkan kembali ke Direksi agar melakukan upaya yang lebih sungguh-sungguh dan efektif untuk segera memperoleh penyelesaian yang terbaik bagi perusahaan.
 3. Terhadap penetapan target Produksi listrik PLTA Ir. H. Djuanda sebesar 948,89 Juta kWh, Dewan Pengawas menyarankan kepada Direksi untuk memperhatikan risiko yang mungkin timbul dan kemungkinan akan menghambat produksi listrik yaitu dengan adanya rencana pekerjaan investasi berkaitan dengan peningkatan sarana instalasi PLTA senilai Rp14,048 Miliar pada tahun 2021.
 4. Terhadap penetapan target pemanfaatan air baku oleh PLTA Saguling dan Cirata, agar dilakukan pengelolaan terhadap risiko yang mungkin menjadi hambatan pencapaiannya, dan perlu dicapai kesepakatan antara PJT II dengan PT IP dan PT PJB berkaitan dengan beberapa aspek teknik dalam draft Perjanjian BJPSDA.
 5. Berkaitan dengan penetapan target Penyaluran Air Bersih pada RKAP tahun 2021 sebesar 8,47Juta m3 atau lebih tinggi dari prognosa tahun 2020 sebesar 2,41 juta m3, ada kenaikan sebesar 251,70%. Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Pengawas menyarankan kepada Direksi untuk menerapkan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan peningkatan program tersebut pada tahun 2021 dan memperhatikan risiko yang mungkin timbul.
 6. Terhadap optimisme dalam peningkatan target Sektor Pariwisata dan Hotel untuk tahun 2021 dibandingkan prognosa tahun 2020, Dewan Pengawas menyarankan kepada Direksi perlu adanya dasar kajian tentang perkiraan dan asumsi kenaikan target produksi pada sektor Pariwisata dan Hotel yang cukup tinggi pada tahun 2021. Disamping itu, Perusahaan agar meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor Pariwisata dan Hotel, terutama dalam upaya peningkatan jumlah pengunjung melalui kemitraan dengan Biro Perjalanan dan Pariwisata atau dengan mitra usaha yang profesional serta telah memiliki net working yang luas di bidang pariwisata dan hotel baik lokal maupun internasional.
 7. Terhadap penetapan Rencana Investasi pada RKAP 2021, Dewan Pengawas menyarankan kepada Direksi agar setiap program investasi sudah didukung dengan kajian kelayakan dan analisis risiko yang komprehensif, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu dan mampu mendukung kinerja Perusahaan secara maksimal. Disamping itu, Direksi juga didorong untuk melakukan evaluasi secara periodik pada setiap paket investasi agar efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 8. Terhadap profil risiko yang disusun, Direksi diminta agar memperhatikan beberapa hal berikut:
 - Ketersediaan prosedur yang memuat parameter/kriteria yang memicu dilakukannya Teknik Modifikasi Cuaca dan simulasi operasi alokasi air (*water rationing plan*) Waduk Ir. H. Djuanda serta langkah-langkah yang diambil untuk melakukan hal tersebut sebagai bagian dari rencana mitigasi risiko pencapaian pendapatan PLTA;
2. In handling Accounts Receivable which is projected to increase in the 2021 RKAP by 1.35%, the Supervisory Board reminds the Board of Directors to make more serious and effective efforts to immediately obtain the best solution for the company.
 3. Regarding the target of HEPP electricity production, Ir. H. Djuanda of 948.89 million kWh, the Supervisory Board advises the Board of Directors to pay attention to the risks that may arise and are likely to hamper electricity production, namely the existence of an investment work plan related to increasing hydropower installation facilities worth Rp. 14.048 billion in 2021.
 4. Regarding the determination of the target for the use of raw water by the Saguling and Cirata hydropower plants, it is necessary to manage the risks that may be obstacles to its achievement, and it is necessary to reach an understanding between PJT II and PT IP and PT PJB relating to several technical aspects in the draft BJPSDA Agreement.
 5. In connection with the determination of the target for Clean Water Distribution in the 2021 RKAP of 8.47 million m3 or higher than the 2020 prognosis of 2.41 million m3, there is an increase of 251.70%. In this regard, the Supervisory Board advises the Board of Directors to implement the right strategy in implementing the program improvement in 2021 and pay attention to the risks that may arise.
 6. With regard to optimism in increasing the target of the Tourism and Hotel Sector for 2021 compared to the prognosis for 2020, the Supervisory Board suggests to the Board of Directors that there is a need for a basic study of estimates and assumptions about the increase in production targets in the Tourism and Hotel sector which is quite high in 2021. In addition, Companies to improve the quality of management in the tourism and hotel sectors, especially in an effort to increase the number of visitors through partnerships with travel and tourism bureaus or with professional usana partners and have extensive networking in tourism and hotels, both locally and internationally.
 7. Regarding the determination of the Investment Plan in the 2021 RKAP, the Supervisory Board recommends to the Board of Directors that each investment program is supported by a comprehensive feasibility study and risk analysis, so that it can be completed on time and able to support the Company's performance to the fullest. In addition, the Board of Directors is also encouraged to conduct periodic evaluations of each investment package so that it is effective in accordance with the company's needs.
 8. With respect to the risk profile prepared, the Board of Directors is requested to pay attention to the following:
 - Availability of procedures that contain parameters/criteria that trigger Weather Modification Techniques and simulation of water rationing plan for Ir. H. Djuanda and the steps taken to do so as part of the risk mitigation plan for achieving hydropower revenues;

- Memfokuskan rencana mitigasi yang berbentuk koordinasi dengan instansi lain dengan hasil yang lebih spesifik;
- Rencana pengendalian risiko atas risiko yang akan timbul karena tidak tercapainya pendapatan BPJSDA dan jasa lahan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas rencana penanganan risiko yang telah disusun dengan capaian kinerja Perusahaan guna memastikan pelaksanaan dan hasilnya.

Perubahan Anggota Dewan Pengawas dan Komite

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-92/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-392/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor KEP-79/DEWAS/X/2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, sehingga susunan anggota Dewan Pengawas sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas :

Kelik Wirawan Wahyu Widodo

Anggota Dewan Pengawas :

1. Nuning Sri Rejeki W
2. Romy Marcandi
3. Mohamad Sofwan

Sekretaris : Umi Gita Nugraheni

Dalam rangka penyelenggaraan GCG dan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Perusahaan telah membentuk Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP-83/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PJT II. Adapun susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua :

Nuning Sri Rejeki Wulandari

Anggota :

1. Wawan Saeful Anwar
2. Royza Fauzi

Staf Komite Audit : Bambang Samudra Harimurti

Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas PJT II Nomor KEP-86/

- Focusing on mitigation plans in the form of coordination with other agencies with more specific results;
- Risk control plans for risks that will arise due to the non-achievement of BPJSDA revenues and land services;
- Conduct periodic monitoring and evaluation of the risk management plan that has been prepared with the Company's performance achievements to ensure its implementation and results.

Change of Members of the Supervisory Board and Committee

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the representative of the Government as Capital Owner of Jasa Tirta II Public Company Number: SK-4/MBU/01/2020 dated January 3, 2020 concerning Dismissal, Appointment and Transfer of Duties of Members of the Supervisory Board of Public Companies (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK-92/MBU/03/2020 dated 23 March 2020 concerning Appointment of Members of the Supervisory Board of Jasa Tirta II Public Company, No: SK340/MBU/10/2020 dated 21 October 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Jasa Tirta II Public Company, No: SK-392/MBU/12/2020 dated 15 December 2020, Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number KEP-79/DEWAS/X/2020 regarding the Extension of the Term of Service of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, so that the composition of the members of the Supervisory Board until December 31, 2020 is as follows:

Chairman of the Supervisory Board :

Kelik Wirawan Wahyu Widodo

Supervisory Board Member :

1. Nuning Sri Fortune W
2. Romy Marcandi
3. Mohamad Sofwan

Secretary : Umi Gita Nugraheni

In the context of implementing GCG and in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number 01/MBU/2011 dated August 1, 2011, the Company has established an Audit in accordance with the Decree of the Supervisory Board Number KEP-83/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the Chairman of the Committee PJT II audits. The composition of the Audit Committee is as follows:

Chairman :

Nuning Sri Rejeki Wulandari

Member :

1. Wawan Saeful Anwar
2. Royza Fauzi

Audit Committee Staff : Bambang Samudra Harimurti

The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II has formed a Nomination and Remuneration Committee in accordance with the Decree of the Supervisory Board of PJT II Number



DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang pengangkatan Ketua Komite Pemantauan Manajemen Risiko.

Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Kelik Wirawan Wahyu Widodo
(Ketua merangkap anggota)
Sekretaris : Nuning Sri Rejeki Wulandari
(Sekretaris merangkap anggota)
Anggota : Romy Marcandi

Dan susunan Komite Pemantauan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : Romy Marcandi
Anggota : Kandianawati

Penutup

Atas nama Dewan Pengawas, kami memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola secara konsisten sehingga Perusahaan masih dapat terus berjalan berkesinambungan dan optima.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh stakeholder atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perusahaan. Kepada seluruh pekerja PJT II dan Perusahaan Anak kami memberikan penghargaan disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2020 walau dalam kondisi yang sulit, seluruh pekerja memberikan seluruh daya upayanya dan menjadi tangguh demi memajukan Perusahaan agar tetap tumbuh.

Terus Gigih berjuang ditengah pandemi Covid-19 unuk menjadi Perusahaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030

Keep on fighting in the midst of the Covid-19 pandemic to become the Leading Water Resources Management and Exploitation Company in Southeast Asia in 2030.

Terima Kasih

Thank you.

Jatiluhur, Juni 2021
Jatiluhur, June, 2021

Atas nama Dewan Pengawas
Supervisory Board

Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

KEP-86/ DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Amendment to the Decision Letter (SK) of the Supervisory Board regarding the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee and the Risk Management Monitoring Committee in accordance with the Decision of the Supervisory Board Number KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the appointment of the Chairman of the Committee Risk Management Monitoring.

The composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Chairman : Kelik Wirawan Wahyu Widodo
(Chairman and member)
Secretary : Nuning Sri Rejeki Wulandari
(Secretary concurrently member)
Member : Romy Marcandi

And the composition of the Risk Management Monitoring Committee is as follows:

Chairman: Romy Marcandi
Member : Kandianawati

Closing

On behalf of the Supervisory Board, we would like to express our appreciation to the Board of Directors who are able to carry out their duties well and are able to face challenges during the Covid-19 pandemic by consistently implementing the principles of governance so that the Company can continue to run continuously and optimally.

We also thank all stakeholders for their trust and support to the Company. To all PJT II and Subsidiary employees, we give our appreciation along with expressions of gratitude for the dedication and hard work that has been shown throughout 2020, even though in difficult conditions, all employees gave all their efforts and became strong in order to advance the Company so that it continues to grow.

Laporan Direksi

Board of Directors Report



IMAM SANTOSO
Direktur Utama
President Director



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilik Modal dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, mengawali Laporan Direksi ini, perkenalkan kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perum Jasa Tirta II dapat menutup tahun 2020 dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan ditengah tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya proaktif Perum Jasa Tirta II dalam Pengelolaan akselerasi inisiatif digital serta didukung kebijakan Pemerintah dan Regulator yang akomodatif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Selanjutnya, ijin kami untuk dapat menyampaikan Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Strategi Perusahaan Dalam Menghadapi Pandemi Covid -19

Dalam merespon tantangan dan ketidakpastian akibat Covid-19, Sejak awal penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia, fokus utama Perum Jasa Tirta II tertuju pada keselamatan dan kesehatan pekerja maupun konsumen. Perum Jasa Tirta II telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja maupun konsumen antara lain melalui penerapan protokol kesehatan, implementasi *flexy working* maupun dukungan fasilitas kesehatan kepada karyawan. Selama tahun 2020 perusahaan telah mengeluarkan Anggaran sebesar Rp15.499.515.417 yang bersumber dari beberapa mata Anggaran yang terdiri dari :

- Pengadaan APD
- Pembelian alat *Infra Red*, masker *Handsanitizer* dan perlengkapan lainnya
- Pembelian *Extra fooding*
- Penyemprotan disinfektan
- Pembelian Suplemen dan vitamin C
- Bantuan Individu terkonfirmasi positif dan uang duka keluarga terdampak Covid-19
- Biaya Pemeriksaan Rapid Test

Selain yang tersebut diatas perusahaan juga merealisasikan sumbangan yaitu Donasi penanggulangan Covid-19, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yaitu bantuan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan juga Beban P&P Bangunan Gedung Tempat Kerja yaitu pekerjaan penataan ruang kantor Pusat untuk memenuhi tata ruang SOTK baru dan untuk terpenuhi standar protokol kesehatan (Covid-19).

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUM JASA TIRTA II DALAM PENANGANAN PANDEMI Covid-19

A. Surat Edaran Direksi Perum Jasa Tirta II

1. SED-01/DIR/03/2020 tentang di Langkah Antisipatif Terhadap Penyebaran Novel Coronavirus Covid-19 di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;

Dear Capital Owner and Stakeholders, starting this Board of Directors Report, allow us to express our praise and gratitude to the presence of God Almighty for all His grace and guidance so that Perum Jasa Tirta II can close 2020 with good and sustainable performance in the midst of challenges and challenges. uncertainty due to the COVID-19 pandemic. This achievement is inseparable from the proactive efforts of Perum Jasa Tirta II in managing the acceleration of digital initiatives and supported by accommodative Government and Regulatory policies to accelerate economic recovery. Furthermore, allow us to submit the Perum Jasa Tirta II Annual Report for the financial year ending on December 31, 2020.

Company Strategy In Dealing With The Covid-19 Pandemic

In responding to the challenges and uncertainties caused by Covid-19, since the beginning of the spread of the Covid-19 outbreak in Indonesia, Perum Jasa Tirta II's main focus has been on the safety and health of workers and consumers. Perum Jasa Tirta II has issued various policies and provided health facilities to ensure the safety and health of workers and consumers, among others through the implementation of health protocols, implementation of flexy working as well as support for health facilities such as providing safe houses and vitamins to workers and consumers. During 2020 the company has issued a budget of Rp. 15,499,515,417 sourced from several budget items including Covid 19 hospital costs, office household expenses (Covid 19) which consists of:

- Procurement of PPE
- Purchase of Infra Red tools, Handsanitizer masks and other equipment
- Purchase Extra fooding
- Disinfectant spraying
- Purchase of Supplements and Vitamin C
- Individually confirmed positive assistance and condolence money for families affected by Covid-19
- Rapid Test Examination Fee

In addition to the above, the company has also budgeted for the burden of donations, namely Donations for Covid-19 prevention, Corporate Social Responsibility (CSR), namely assistance for the Prevention of the Spread of Covid-19 and also the P&P Burden of Workplace Buildings, namely the work of structuring the Central office space to meet the new SOTK layout and to meet health protocol standards (Covid-19).

POLICIES ISSUED BY PERUM JASA TIRTA II IN HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC

A. Circular of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II

1. SED-01/DIR/03/2020 regarding Anticipatory Steps Against the Spread of the Novel Coronavirus COVID-19 in the Perum Jasa Tirta II Environment;

2. SED-26/DIR/07/2020 tentang Tata Laksana Koordinasi Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;
3. SED-01/DIR/01/2021 tentang Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) Pada Masa New Normal di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta II;
4. SED-02/DIR/01/2021 tentang Protokol Pencegahan, Penanggulangan, Penanganan Pada Pemantauan, dan Pelaporan Kondisi Covid-19 di Lingkungan Perum Jasa Tirta II;
- B. CEO Letter Nomor : CL-01/DIR/KU/03/2020 tentang Bersatu Melawan Corona
- C. Surat Penugasan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: SPN-26/DIR/11/2020 tentang Tim Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Perum Jasa Tirta II
- D. Saluran resmi *Hotline* bagi individu yang bekerja di Perum Jasa Tirta II melalui tautan atau mengirim pesan di WhatsApp: <https://wa.me/628111521818>

Salah satu dasar penyusunan Protokol, Pencegahan, Penanggulangan, Perawatan, Penanganan Pasca Perawatan & Komunikasi PJT II adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Kinerja Penugasan Pengelolaan SDA Tahun 2020

PJT II sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, oleh Pemerintah diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan SDA di wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan SDA di wilayah kerja Perusahaan.

Sebagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan SDA di wilayah kerja yang dilakukan Perusahaan (10 penugasan) meliputi:

1. Mengoperasikan dan memelihara prasarana SDA
2. Mengoperasikan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur
3. Mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur
4. Memelihara sumber air
5. Melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer pada irigasi Utara Jatiluhur
6. Melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan
7. Menyebarkan hasil pemantauan dan evaluasi di atas kepada pengguna SDA, masyarakat dan Pengelola SDA
8. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan
9. Penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai

2. SED-26/DIR/07/2020 concerning the Coordination of *Corona Virus Disease* (COVID-19) Prevention in Perum Jasa Tirta II;
3. SED-01/DIR/01/2021 concerning the Implementation of Work From Home During the New Normal Period in the Work Area of Perum Jasa Tirta II;
4. SED-02/DIR/01/2021 concerning Protocols for Prevention, Management, Handling in Monitoring, and Reporting of COVID-19 Conditions in Perum Jasa Tirta II;
- B. CEO Letter Number : CL-01/DIR/KU/03/2020 concerning United Against Corona
- C. Assignment Letter of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: SPN-26/DIR/11/2020 concerning the Task Force for Handling *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) in Perum Jasa Tirta II
- D. The official Hotline channel for individuals working at Perum Jasa Tirta II via the link or sending a message on WhatsApp: [https:// wa.me/628111521818](https://wa.me/628111521818)

One of the basis for the preparation of the PJT II Protocol, Prevention, Control, Treatment, Post-Treatment & Communication is the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Performance of Water Resources Management Assignments in 2020

PJT II in accordance with Government Regulation (PP) No. 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the Government was given the task and responsibility in the exploitation of water resources in the river area and some of the duties and responsibilities in the field of water resource management in the Company's work area.

Some of the duties and responsibilities of managing water resources in the work area carried out by the Company (10 assignments) include:

1. Operate and maintain water resource infrastructure
2. Operate primary irrigation network in Jatiluhur North and Jatiluhur South Irrigation Areas
3. Operate secondary irrigation networks in the Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigation Areas
4. Maintaining water sources
5. Perform maintenance of primary irrigation channels on irrigation North Jatiluhur
6. Monitoring, calibrating discharge measuring instruments, evaluating the quantity and quality of water at water sources that are the responsibility of the Company
7. Disseminate the results of the above monitoring and evaluation to water resources users, communities and water resource managers
8. Assisting the Government in carrying out conservation of water resources and controlling the destructive power of water in accordance with the Company's ability
9. Flushing in the context of river maintenance



10. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kinerja Operasi dan Pemeliharaan SDA tahun 2020 sebesar Rp. 393.405.000.000,- atau 88,50 % dari rencananya dengan interpretasi sangat baik. Pencapaian kinerja Operasi dan Pemeliharaan SDA PJT II telah berkontribusi dalam:

- Terjaminnya kontinuitas penyediaan air baku irigasi sehingga tercapainya target areal tanaman padi MT I 2019/2020 dari target 270.484 Ha realisasi 276.612 Ha atau 102,27%, areal tanaman padi MT II 2020 dari target 246.384 Ha realisasi 277.998 Ha atau 112,83%;
- Terjaminnya kontinuitas penyediaan air baku untuk PAM Jaya sebesar 526,70 juta m³, PDAM Kota/Kabupaten sebesar 173,30 juta m³, Industri sebesar 262,06 juta m³ dan PT. Sang Hyang Sri sebesar 39,56 juta m³;
- Kontribusi dalam ketahanan energi melalui produksi listrik PLTA Jatiluhur sebesar 967,85 juta kWh;
- Kontribusi dalam menjaga kualitas air melalui pemantauan kualitas air pada 118 titik lokasi dan 32 lokasi diantaranya telah terintegrasi dalam website Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai data dasar dalam pengambilan keputusan tentang pencemaran;
- Kontribusi dalam Pelaksanaan Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dalam bentuk penanaman pohon, penertiban keramba jaring apung di Waduk Ir. H. Djuanda, pembersihan eceng gondok dan gulma air pada sumber air dan lainnya;
- Pemberdayaan masyarakat melalui program biogas, Padat Karya Tunai untuk masyarakat di sekitar waduk, sungai dan saluran.

Hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SDA ke depannya antara lain:

1. Perlunya koordinasi yang lebih baik dan intensif dengan para pihak antara lain BBWS Citarum, BBWS Cilicis, PJT II dan Dinas PSDA Jawa Barat dalam penyusunan role sharing program Operasi dan Pemeliharaan SDA.
2. Perlunya koordinasi yang lebih baik dan intensif dengan para pengelola waduk kaskade untuk mengikuti Rencana Tahunan Operasi Waduk (RTOW) dan Rapat Tim Koordinasi Pengelolaan Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) yang telah disepakati bersama.
3. Dukungan peran aktif Komisi Irigasi dan Pemerintah Daerah dalam sosialisasi kepada para petani agar menaati jadwal tanam dalam Rencana Tanam Global yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat.
4. Dalam hal pengusahaan SDA, khususnya dalam penerbitan Surat Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) masih memerlukan koordinasi lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Umum

10. Provide guidance and counseling to the community in order to improve community empowerment.

Implementation of the performance of Operation and Maintenance of Water Resources in 2020 amounting to Rp. 393.405.000.000,- or 88.50% of the plan with very good interpretation. PJT II Water Resources Operation and Maintenance performance achievement has contributed to:

- Guaranteed continuity of supply of irrigation raw water so that the target area of MT I rice plants 2019/2020 is achieved from the target of 270,484 Ha of realization of 276,612 Ha or 102.27%, the area of rice plants of MT II 2020 of the target of 246,384 Ha realization of 277,998 Ha or 112.83%;
- Guaranteed continuity of raw water supply for PAM Jaya of 526.70 million m³, City/Regency PDAM of 173.30 million m³, Industry of 262.06 million m³ and PT. Sang Hyang Sri of 39.56 million m³;
- Contribution to energy security through the electricity production of PLTA Jatiluhur of 967.85 million kWh;
- Contribution in maintaining water quality through water quality monitoring at 118 location points and 32 locations of which have been integrated in the website of the Ministry of Forestry and Environment as basic data in making decisions on pollution;
- Contribution in the Implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum Watershed in the form of tree planting, controlling floating net cages in Ir. H. Djuanda, cleaning water hyacinth and water weeds in water sources and others;
- Community empowerment through biogas programs, cash-intensive work for communities around reservoirs, rivers and canals.

Things that still need attention in the implementation of Operation and Maintenance of Water Resources in the future include:

1. The need for better and intensive coordination with the parties including BBWS Citarum, BBWS Cilicis, PJT II and the West Java PSDA Service in the preparation of role sharing programs for Operation and Maintenance of Water Resources.
2. The need for better and intensive coordination with cascade reservoir managers to follow the Annual Reservoir Operation Plan (RTOW) and the Citarum Cascade Dam Management Coordination Team Meeting (TKPBKC) which have been mutually agreed upon.
3. Support the active role of the Irrigation Commission and the Regional Government in socializing to farmers to comply with the planting schedule in the Global Planting Plan that has been set by the Governor of West Java.
4. In terms of the exploitation of Water resources, especially in the issuance of the Water Resources Concession Permit (SIPSDA), further coordination is needed in accordance with the Regulation of the

dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA.

5. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pembiayaan pengelolaan SDA, khususnya kegiatan konservasi di DAS Citarum Hulu. Belum terpungutnya BJPSDA PLTA dari operator PLTA Saguling dan PLTA Cirata yang akan berdampak pada kurangnya pembiayaan untuk kegiatan konservasi SDA di DAS Citarum Hulu, yang merupakan sebagian tugas dan tanggung jawab PJT II di pengelolaan SDA antara lain membantu Pemerintah dalam pelaksanaan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air.
6. Program SIMURP (*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project*) terdiri dari 4 pendekatan, diantaranya *urgent rehabilitation and infrastructure improvement, strategic infrastructure modernization, modernization of management system and institution modernization and empowerment*. Pendekatan tersebut dilakukan melalui modernisasi, perbaikan sarana dan prasarana irigasi, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, penguatan institusi pengelola irigasi dan pemberdayaan manusia pelaku pengelola irigasi.

Tinjauan Makro Ekonomi Dan Industri

Krisis akibat pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini sangat berbeda dengan krisis keuangan yang telah terjadi sebelumnya. Krisis kali ini tidak hanya berdampak secara langsung pada kondisi perekonomian, namun juga pada aspek kesehatan dan sosial seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan di hampir seluruh negara di dunia untuk menahan penyebaran Covid-19 telah merubah tatanan sosial masyarakat dan memberikan tekanan yang luar biasa bagi perekonomian Dunia dan Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlambatan perekonomian global. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan berkontraksi sebesar 3,5% seiring dengan tertekannya aktivitas ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China. Sejalan dengan kondisi global, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Tekanan pandemi Covid-19 mulai ditunjukkan pada Triwulan II-2020 dimana pertumbuhan ekonomi berkontraksi 5,32%. Kekhawatiran dan ketidakpastian akibat pandemi juga menyebabkan tren larinya modal dari pasar saham dan obligasi, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Pada akhir 2020, tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berkontraksi 5,09%.

Kontraksi pertumbuhan perekonomian secara luas dirasakan oleh banyak negara sebagai imbas dari pemberlakuan kebijakan penanganan Covid-19 seperti pembatasan aktivitas sosial yang berujung pada penurunan aktivitas ekonomi. Lebih dalam, penurunan

Minister of Public Affairs and Public Housing Number 01/PRT/M/2016 concerning Procedures for Licensing for Water Resources Concession and Use of Water Resources.

5. In terms of meeting the financing needs for water resource management, especially conservation activities in the Upper Citarum watershed. The PLTA BJPSDA has not yet been collected from the Saguling and Cirata PLTA operators, which will result in a lack of funding for water resource conservation activities in the Upper Citarum Watershed, which is part of the duties and responsibilities of PJT II in water resource management, including assisting the Government in implementing water resource conservation and controlling destructive forces. water.
6. The SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project) program consists of 4 approaches, including urgent rehabilitation and infrastructure improvement, strategic infrastructure modernization, modernization of management system and institution modernization and empowerment. This approach is carried out through modernization, improvement of irrigation facilities and infrastructure, improvement of irrigation management systems, strengthening of irrigation management institutions and human empowerment of irrigation managers.

Macroeconomic and Industrial Overview

The crisis due to the Covid-19 pandemic that we are facing today is different from the financial crisis that has occurred before. The current crisis not only has a direct impact on economic conditions, but also on the health and social aspects of all levels of society, without exception. The social restriction policies imposed in almost all countries in the world to contain the spread of Covid-19 have changed the social fabric of society and put tremendous pressure on the world and Indonesian economies.

The Covid-19 pandemic has caused a slowdown in the global economy. The International Monetary Fund (IMF) estimates that world economic growth in 2020 will contract by 3.5% in line with depressed economic activity in developed countries such as the United States and China. In line with global conditions, the Indonesian economy cannot be separated from the impact of the Covid-19 pandemic. The pressure of the Covid-19 pandemic began to be shown in the second quarter of 2020 where economic growth contracted by 5.32%. Anxiety and uncertainty due to the pandemic also led to a trend of capital flight from the stock and bond markets, which then depressed the rupiah exchange rate against the United States dollar (USD). At the end of 2020, the Composite Stock Price Index (JCI) contracted 5.09%.

The contraction of economic growth is widely felt by many countries as a result of the implementation of policies to deal with Covid-19, such as restrictions on social activities that lead to a decline in economic activity. More deeply, the decline in economic activity



aktivitas ekonomi tampak dari indikator aktivitas perdagangan yang berada pada tingkat yang sangat rendah, serta sektor manufaktur yang juga terdampak sangat parah. Hal ini diperburuk juga oleh pelemahan harga komoditas akibat melemahnya permintaan global. Realisasi perekonomian global triwulan I 2020 ini membuat IMF memproyeksikan pertumbuhan perekonomian global akan berkontraksi sebesar -3,0 persen, dengan *downside risk* yang bergantung pada perkembangan Covid-19. Hampir seluruh negara di dunia saat ini telah mengambil berbagai langkah dan strategi kebijakan fiskal dan moneter untuk penanggulangan Covid-19. Namun demikian, efek kebijakan tersebut perlu untuk terus dipantau karena dikhawatirkan dapat menambah tekanan kepada likuiditas global.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang berat pada perekonomian Indonesia di triwulan I 2020, yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy). Konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melambat cukup dalam, yakni masing-masing hanya tumbuh sebesar 2,66 persen (yoy) dan 1,70 persen (yoy). Selanjutnya, konsumsi Pemerintah tumbuh 3,74 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan jumlah realisasi anggaran belanja bantuan sosial. Sementara itu pelemahan permintaan global turut memperlambat ekspor yang tumbuh tipis sebesar 0,24 persen, dan impor yang berkontraksi sebesar -2,19 persen. Secara spasial, perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, laju inflasi Mei 2020 tercatat 2,19 persen (yoy) atau 0,07 persen (mtm) atau secara kumulatif sebesar 0,90 (ytd). Relatif rendahnya inflasi ini sejalan dengan melemahnya permintaan masyarakat akibat pandemi.

Untuk menangani dan mencegah dampak pandemi Covid-19 yang lebih buruk pada perekonomian nasional, Pemerintah mengambil langkah luar biasa (*extra ordinary*) dengan menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Kebijakan keuangan negara yang diatur meliputi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, termasuk relaksasi batas defisit 3 persen PDB maksimal sampai 2022. Sementara itu, kebijakan stabilitas keuangan negara disusun oleh pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS untuk memitigasi dampak pandemi pada sektor keuangan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah dapat memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan sekaligus memberikan stimulus agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan. Pada perkembangan selanjutnya, sesuai amanat dari Undang-Undang tersebut, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya fasilitas subsidi bunga dan program penempatan dana pada Perusahaan.

can be seen from indicators of trade activity which are at a very low level, as well as the manufacturing sector which is also severely affected. This is also exacerbated by the weakening of commodity prices due to weakening global demand. The realization of the global economy in the first quarter of 2020 has made the IMF project that global economic growth will contract by -3.0 percent, with downside risk depending on developments in Covid-19. Almost all countries in the world today have taken various fiscal and monetary policy measures and strategies to deal with Covid-19. However, the effects of this policy need to be monitored continuously because it is feared that it could add pressure to global liquidity.

The Covid-19 pandemic put heavy pressure on the Indonesian economy in the first quarter of 2020, which was only able to grow by 2.97 percent (yoy). Public consumption and Gross Fixed Capital Formation (PMTB) slowed considerably, growing by only 2.66 percent (yoy) and 1.70 percent (yoy), respectively. Furthermore, government consumption grew by 3.74 percent (yoy), mainly driven by an increase in the realization of the social assistance budget. Meanwhile, weakening global demand also slowed down exports, which grew slightly by 0.24 percent, and imports, which contracted by -2.19 percent. Spatially, the slowdown in economic growth performance also occurred evenly throughout Indonesia. On the other hand, the inflation rate in May 2020 was recorded at 2.19 percent (yoy) or 0.07 percent (mtm) or cumulatively at 0.90 (ytd). This relatively low inflation is in line with the weakening public demand due to the pandemic.

To handle and prevent the worse impact of the Covid-19 pandemic on the national economy, the Government took an extraordinary step by issuing Perppu number 1 of 2020 which was ratified by the DPR into Law No. 2 of 2020 concerning State Finance Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic is intended to provide protection for people's lives which are very seriously threatened by the spread and spread of Covid-19, both from the aspect of life safety due to health and safety threats, as well as the social and economic life of the community. State financial policies that are regulated include policies on state revenues, state expenditures, and financing, including relaxation of the maximum 3 percent GDP deficit limit until 2022. Meanwhile, state financial stability policies are prepared by the government together with BI, OJK and LPS to mitigate the impact of the pandemic on the sector finance. With this policy, the government can provide social protection to the poor and vulnerable at the same time providing stimulus in order to maintain people's purchasing power and maintain economic and financial stability. In subsequent developments, in accordance with the mandate of the Law, the government launched a National Economic Recovery (PEN) program, including interest subsidy facilities and a program for placing funds in the Company.

Sementara itu, apabila melihat perkembangan industri pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa permintaan air diprediksi naik dari 205 m³/s pada 2015 menjadi 283 m³/s pada 2030. Indikasi peningkatan kebutuhan air secara bertahap setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi, laju urbanisasi yang tinggi, serta permintaan untuk sektor dan energi. Hal ini menyebabkan permintaan kebutuhan air di daerah perkotaan yang meningkat berbanding terbalik dengan permintaan air di daerah perdesaan yang menurun.

Perubahan struktur perekonomian Indonesia yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa berdampak pada peningkatan permintaan air untuk sektor industri. ADB memperkirakan jumlah permintaan air di tahun 2030 berjumlah dua kali lipat dari 2013. Pada tahun 2020, permintaan air untuk industri berkisar di 20,1 m³/s dan pada 2030 naik menjadi 28,7 m³/s. Sementara permintaan air dan proporsi air untuk sektor energi dan pembangkit listrik akan terus meningkat mengingat air memiliki energi potensial dan kinetik secara fisika sebagai pembangkit listrik. ADB memperkirakan permintaan air untuk pembangkit listrik akan meningkat hampir 88% di tahun 2030 dibandingkan tahun 2020.

Kondisi musim tahun 2020 diasumsikan normal, namun realisasi aliran Sungai Citarum pada Januari sifat aliran di bawah normal sebesar 496,01 juta m³ atau 76,18 % dari rencana sebesar 651,12 juta m³, bulan Februari sifat aliran di bawah normal sebesar 704,05 juta m³ atau 98,72 % dari rencana sebesar 713,21 juta m³, bulan Maret sifat aliran di atas normal sebesar 837,83 juta m³ atau 102,54 % dari rencana sebesar 817,04 juta m³, bulan April sifat aliran di atas normal sebesar 841,28 juta m³ atau 105,87 % dari rencana sebesar 794,60 juta m³, bulan Mei sifat aliran di atas normal sebesar 590,58 juta m³ atau 110,41 % dari rencana sebesar 534,89 juta m³, bulan Juni sifat aliran di bawah normal sebesar 246,85 juta m³ atau 82,58 % dari rencana sebesar 298,94 juta m³, bulan Juli sifat aliran di bawah kering sebesar 99,35 juta m³ atau 53,50 % dari rencana sebesar 185,70 juta m³, bulan Agustus sifat aliran di atas normal sebesar 121,58 juta m³ atau 104,30 % dari rencana sebesar 116,57 juta m³, bulan September sifat aliran di bawah normal sebesar 111,10 juta m³ atau 96,10 % dari rencana sebesar 115,61 juta m³, bulan Oktober sifat aliran di atas normal sebesar 344,34 juta m³ atau 131,11 % dari rencana sebesar 262,64 juta m³, bulan November sifat aliran di bawah kering sebesar 317,25 juta m³ atau 57,94 % dari rencana sebesar 547,54 juta m³ dan di bulan Desember sifat aliran di bawah kering sebesar 380,54 juta m³ atau 58,38 % dari rencana sebesar 651,85 juta m³.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap Tinggi Muka Air (TMA) waduk It. H. Djuanda di Jatiluhur, sehingga melalui forum Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC), pengaturan air di waduk akan dilaksanakan secara terpadu untuk pengendalian TMA.

Geliat pertumbuhan permintaan air yang kian meningkat mendorong Pemerintah untuk mengesahkan Undang-

Meanwhile, when looking at the development of the Water Resources management industry, the Asian Development Bank (ADB) reports that water demand is predicted to increase from 205 m/s in 2015 to 283 m/s in 2030. Indications of a gradual increase in water demand every year are in line with with increasing population, high rates of urbanization, and demand for the sector and energy. This causes the demand for water needs in urban areas to increase inversely with the decreasing demand for water in rural areas.

Changes in the structure of the Indonesian economy, which shifts from the agricultural sector to the manufacturing and service sectors, have an impact on increasing water demand for the industrial sector. ADB estimates that water demand in 2030 will double from 2013. In 2020, industrial water demand will be around 20.1 m/s and in 2030 it will rise to 28.7 m³/s. Meanwhile, the demand for water and the proportion of water for the energy sector and power generation will continue to increase considering that water has physical potential and kinetic energy as a power plant. ADB estimates that water demand for electricity generation will increase by almost 88% in 2030 compared to 2020.

Seasonal conditions in 2020 are assumed to be normal, but the realization of Citarum River flow in January below normal flow properties of 496.01 million m³ or 76.18% of the planned 651.12 million m³, in February below normal flow properties of 704.05 million m³ or 98.72 % of the planned 713.21 million m³, in March the flow properties were above normal at 837.83 million m³ or 102.54% from the plan at 817.04 million m³, in April the flow properties were above normal amounted to 841.28 million m³ or 105.87% of the planned amount of 794.60 million m³, in May the flow characteristics were above normal amounted to 590.58 million m³ or 110.41% of the planned 534.89 million m³, in June the nature below normal flow of 246.85 million m³ or 82.58% of the planned 298.94 million m³, in July below normal dry flow properties of 99.35 million m³ or 53.50% of the planned 185.70 million m³, in August the flow properties were above normal at 121.58 million m³ or 104.30% from the plan at 116.57 million m³, in September the nature below normal flow of 111.10 million m³ or 96.10% of the planned 115.61 million m³, in October the flow properties were above normal at 344.34 million m³ or 131.11% from the plan at 262.64 million m³, in November below normal dry flow properties of 317.25 million m³ or 57.94% of the planned 547.54 million m³, And in December below normal dry flow properties of 380.54 million m³ or 58.38% of the planned 651.85 million m³.

This is very influential on the Water Level reservoir It. H. Djuanda in Jatiluhur, so that through the Citarum Cascade Dam Operation Coordination Team (TKPBKC) forum, water management in the reservoir will be carried out in an integrated manner to control the Water Level.

The growing growth in water demand has prompted the Government to ratify Law Number 17 of 2019



Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mengatur mengenai tata kelola SDA dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air.

Kinerja Perum Jasa Tirta II Tahun 2020

Respon strategi Perum Jasa Tirta II ditengah pandemi Covid-19 mampu membawa Perum Jasa Tirta II mencapai kinerja yang baik di Tahun 2020. Perum Jasa Tirta II mengemban tugas dalam menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diamanatkan Pemerintah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk memenuhi amanat tersebut, PJT II kemudian menjalankan lima kegiatan usaha utama, yaitu pelayanan air baku, penyediaan tenaga listrik, pembangkitan dan penyaluran listrik tenaga air, penyediaan jasa laboratorium pemanfaatan lahan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan optimalisasi potensi sumber daya.

Pada tahun 2020, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.533.076 juta, meningkat Rp101.211 juta atau 7,07% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.431.865 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp312.236 juta, meningkat Rp76.005 juta atau 32,17% dari sebelumnya sebesar Rp236.231 juta pada tahun 2019. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.220.840 juta, meningkat Rp25.206 juta atau 2,11% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.195.634 juta. Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2020 sebesar Rp123.959 juta, menurun Rp29.850 juta atau 19,41% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp153.809 juta.

Berdasarkan opini audit Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra, tidak terlihat adanya dampak material dan signifikan terhadap realisasi investasi dan rasio likuiditas perusahaan berkenaan dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini, sedangkan rasio keuangan dan nilai z-score model pada umumnya mengalami penurunan di tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya. Perusahaan tetap melakukan upaya-upaya konstruktif, hati-hati dan tepat sasaran melalui prinsip-prinsip manajemen risiko dalam rangka tata kelola Perusahaan yang baik, dalam upaya mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan ke depan.

Tantangan, Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah Penyelesaiannya

Selama tahun 2020 terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi Perusahaan, Manajemen secara proaktif melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian. Adapun beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

A. Perum Jasa Tirta II belum dapat melakukan penagihan terhadap pemberian jasa atas penggunaan

concerning Water Resources which regulates water resource management by taking into account social, environmental, and economic functions in harmony to create synergy and integration between regions, sectors and sectors. Intergenerational to meet the community's need for water.

Performance of Perum Jasa Tirta II in 2020

The strategic response of Perum Jasa Tirta II in the midst of the Covid-19 pandemic was able to bring Perum Jasa Tirta II to achieve good performance in 2020. Perum Jasa Tirta II has the task of organizing the public use of quality and adequate water and water sources for meeting the needs of life and carrying out certain tasks mandated by the Government in the management of watersheds (DAS). To fulfill this mandate, PJT II then carries out five main business activities, namely raw water services, electricity supply, hydroelectric power generation and distribution, provision of land use laboratory services, development of drinking water supply systems (SPAM), and optimization of potential resources.

In 2020, the Company's assets were recorded at Rp1,533,076 million, an increase of Rp101,211 million or 7.07% when compared to 2019 of Rp1,431,865 million. The Company's liabilities were recorded at Rp312,236 million, an increase of Rp76,005 million or 32.17% from the previous Rp236,231 million in 2019. The Company's equity was recorded at Rp1,220,840 million, an increase of Rp25,206 million or 2.11% if compared to the realization in 2019 of IDR1,195,634 million. Net Profit for the Year in 2020 was IDR123,959 million, a decrease of IDR29,850 million or 19.41% compared to 2019 of IDR153,809 million.

Based on the audit opinion of the Public Accounting Firm of Djoko, Sidik and Indra, there is no visible and significant material impact on the realization of investments and the company's liquidity ratio in relation to the Covid-19 pandemic in 2020, while the financial ratios and z-score model values generally experience a decline. In 2020 compared to the previous year. The Company continues to make constructive, prudent and targeted efforts through risk management principles in the context of good corporate governance, in an effort to maintain the company's business continuity going forward.

Challenge, Obstacle Faced and Completion Steps

During 2020 there were challenges and obstacles faced by the Company, the Management proactively carried out prevention and resolution efforts. Some of the challenges and obstacles faced are as follows:

A. Perum Jasa Tirta II has not been able to collect services for the use of raw water to customers

air baku kepada para pelanggan yang disebabkan sebanyak 198 intake belum dapat diperpanjang kontrak perpanjangannya karena belum adanya Surat Ijin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak perjanjian dengan para pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan Perum Jasa Tirta II akan kehilangan potensi pengakuan pendapatan terhadap penggunaan air baku dalam laporan keuangan tahun 2020, karena belum mengikuti terhadap ketentuan yang ditetapkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Yang berdampak pada terganggunya *performance* keuangan Perum Jasa Tirta II dan capaian tingkat kesehatan perusahaan serta *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2020.

Penyelesaian:

Terkait dengan SIPSDA bagi para pemanfaat air yang belum memiliki SIPSDA, telah dilakukan upaya untuk mendorong para pemanfaat air memproses pengurusan SIPSDA kepada Kementerian PUPR. Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah dibentuk SPN tim percepatan SIPSDA guna membantu mendorong para pemanfaat air untuk mengurus SIPSDA.
2. Dilakukan pembahasan bersama para pemanfaat air dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) guna mendorong para pemanfaat air dalam mengajukan pengurusan SIPSDA dan sinkronisasi.
3. Telah disampaikan pemberitahuan kepada BBWSC terkait pendataan status kepemilikan SIPSDA oleh para pemanfaat air.
4. Telah diberikan akses oleh BBWSC untuk memonitor kepemilikan SIPSDA para pemanfaat melalui aplikasi *sinta*.
5. Akan dilakukan sinkronisasi prosedur pemanfaatan air sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di kementerian PUPR.

- B. Dalam menyusun laporan keuangan *inhouse* tahun 2020 terkait dengan penyajian umur piutang, Perum Jasa Tirta II belum menggunakan kelompok umur piutang untuk menentukan kelompok kualitas piutang usaha sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang instrumen keuangan.

Hal tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian penyajian akun piutang dalam rangka menyesuaikan agar mengikuti terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang instrumen keuangan yang berbasis *probability default* atau kualitas piutang usaha bukan mengacu pada umur piutang usaha.

Penyelesaian:

1. Pedoman pengelolaan piutang dan prosedur penyelesaian piutang yang mengacu kepada PSAK 71 masih dalam proses penyesuaian/penyempurnaan.

because as many as 198 intake contracts have not been able to be extended due to the absence of a Water Resources Use Permit (SIPSDA) issued by the Ministry of Public Works and Housing People (PUPR) which will be used as the basis for making a contract agreement with the customer. This causes Perum Jasa Tirta II to lose potential revenue recognition for the use of raw water in its 2020 financial statements, because it has not followed the provisions stipulated in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72 regarding revenue from customer contracts. Which has an impact on the disruption of the financial performance of Perum Jasa Tirta II and the achievement of the company's health level and Key Performance Indicators (KPI) in 2020.

Completion:

Regarding SIPSDA for water users who do not have SIPSDA, efforts have been made to encourage water users to process SIPSDA arrangements to the Ministry of PUPR. The efforts that have been made are as follows:

1. SPN acceleration team has been formed to help encourage water users to manage SIPSDA .
2. Discussions were held with water users and the Citarum River Basin Center (BBWSC) to encourage water users to apply for SIPSDA management and synchronization.
3. Has been submitted to BBWSC regarding data collection on the status of SIPSDA ownership by water.
4. Has been granted by BBWSC to monitor the SIPSDA ownership of the users through the *sinta* application.
5. Will be synchronization of water utilization procedures in accordance with the applicable mechanisms and procedures at the Ministry of PUPR.

- B. In compiling the 2020 in-house financial report related to the presentation of the age of receivables, Perum Jasa Tirta II has not used the age group of accounts receivable to determine the quality group of accounts receivable in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71 regarding financial instruments.

This resulted in an adjustment in the presentation of accounts receivable in order to conform to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71 concerning financial instruments based on probability default or the quality of trade receivables rather than referring to the age of trade receivables.

Completion:

1. For the man 1. Guidelines receivables and procedures for settlement of receivables referring to PSAK 71 are still in the process of adjustment/refinement.



2. Sambil menunggu penyesuaian pedoman sesuai dengan poin 1 di atas guna penyesuaian umur piutang telah diterbitkan Surat Edaran (SE) sementara.
- C. Tidak dipenuhinya komitmen kelancaran pembayaran piutang periode berjalan yang telah diperjanjikan PT. SANG HYANG seri dengan Perum Jasa Tirta II yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan penyelesaian piutang.
- Hal tersebut mengakibatkan Perum Jasa Tirta II belum mengikuti terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang pengakuan pendapatan dari kontrak pelanggan, sehingga berpotensi terjadinya penurunan nilai terhadap pengakuan piutang dan pengakuan pendapatan, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu performa keuangan Perum Jasa Tirta II tahun 2020 dan berakibat pada tidak tercapainya kinerja keuangan dan *key performance indicator* (KPI) tahun 2020.

Penyelesaian:

1. Telah disampaikan pemberitahuan penyelesaian piutang dan tagihan BJPSDA kepada PT Sang Hyang Seri.
2. Telah disampaikan permohonan permintaan informasi dan data kepada PT Sang Hyang Seri terkait penyelesaian piutang.
3. Telah dilakukan pembahasan bersama antara Direksi PJT II dengan Direksi PT Sang Hyang Seri perihal penyelesaian piutang pada tanggal 23 Februari 2021.
4. Telah dilakukan kesepakatan penyelesaian piutang dengan pihak terkait.
5. Akan dilakukan pertemuan secara berkala antara Direksi PJT II dengan Direksi PT Sang Hyang Seri untuk menjalin hubungan baik dan membangun loyalitas pelanggan, sehingga diharapkan Direksi PT Sang Hyang Seri akan memprioritaskan penyelesaian piutang kepada PJT II.

Prospek Usaha

Kami melihat ekonomi global dan domestik diproyeksikan akan masuk *fase recovery* di tahun 2021, meskipun belum dapat kembali ke kinerja sebelum pandemi Covid-19. *International Monetary Fund* (IMF) di dalam kajiannya *World Economic Outlook* (WEO) per Januari 2021 telah merevisi prediksi kontraksi ekonomi dunia tahun 2020 menjadi -3,50%, atau 90 basis point lebih tinggi dibanding WEO per Oktober 2020 yang sebesar -4,40%.

Sejalan dengan perekonomian dunia, Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan berada dalam tahap pemulihan dan kinerja Perusahaan nasional diyakini dapat tumbuh positif. Ekspektasi pemulihan ekonomi didukung oleh Kebijakan Pemerintah yang akomodatif untuk mendorong permintaan dan daya beli masyarakat. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 yang mulai dijalankan Pemerintah diharapkan dapat menjadi katalis positif akselerasi pemulihan ekonomi. Membaiknya perekonomian dan industri nasional, memperlihatkan bahwa prospek usaha Perum Jasa Tirta

2. While waiting for the adjustment of the guidelines in accordance with point 1 above to adjust the age of receivables, a temporary Circular Letter (SE) has been issued.

- C. Non-fulfillment of the commitment to smooth payment of receivables for the current period as agreed by PT. SANG HYANG is in series with Perum Jasa Tirta II which has been stated in the minutes of the agreement for the settlement of accounts receivable.
- This has resulted in Perum Jasa Tirta II not following the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 72 regarding revenue recognition from customer contracts, so that there is the potential for impairment of receivables recognition and revenue recognition, so it is feared that it will disrupt the financial performance of Perum Jasa Tirta II in 2020 result in not achieving financial performance and key performance indicators in 2020.

Completion:

1. Notification of settlement of receivables and bills of BJPSDA has been submitted to PT Sang Hyang Seri.
2. A request for information and data has been submitted to PT Sang Hyang Seri regarding the settlement of receivables.
3. There has been a joint discussion between the Directors of PJT II and the Directors of PT Sang Hyang Seri regarding the settlement of receivables on February 23, 2021.
4. An agreement for settlement of receivables has been made with related parties.
5. There will be regular meetings between the Directors of PJT II and the Directors of PT Sang Hyang Seri to establish good relations and build customer loyalty, so it is hoped that the Directors of PT Sang Hyang Seri will prioritize the settlement of receivables from PJT II.

Business Prospect

We see that the global and domestic economy is projected to enter the recovery phase in 2021, although it has not been able to return to its pre-Covid-19 performance. The International Monetary Fund (IMF) in its study of the World Economic Outlook (WEO) as of January 2021 has revised its prediction for world economic contraction in 2020 to -3.50%, or 90 basis points higher than the WEO as of October 2020 which was -4.40. %.

In line with the world economy, in 2021, the Indonesian economy is projected to be in the recovery stage and the performance of national companies is believed to be able to grow positively. Economic recovery expectations are supported by accommodative Government policies to boost public demand and purchasing power. In addition, the Covid-19 vaccination program that the Government has started to implement is expected to be a positive catalyst for accelerating economic recovery. The improvement in the national economy and industry shows that the business prospects of Perum Jasa Tirta II

It will be better. This is in line with signs of recovery.

In analyzing future business prospects, Perum Jasa Tirta II seeks to involve and consider external and internal factors that have a significant influence on the Company's business sustainability. If you look at the projections at the global level, world economic growth in 2020 is predicted to move towards recovery at the level of 2.5%, slightly increasing from the previous year. The projected improvement in conduciveness will move stronger if accompanied by accommodative fiscal policy from the regulator. In addition, the growth outlook is more prospective considering that the United States and China have signed an initial Phase I agreement to end the trade war, which is expected to provide a bright spot for the recovery of overall economic conditions.

The projected improvement in the global economic climate is expected to have a positive impact on the projection of domestic economic growth. This can be seen from the 2020 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) compiled by the Indonesian Ministry of Finance (Kemenkeu) which predicts economic growth of 5.3%, inflation at 3.1%, and the exchange rate of the Rupiah against the United States dollar (USD). Projected at Rp. 14,400 per US dollar.

Considering the projected growth of the industry, business prospects in the Water Resources (SDA) management industry will be strengthened by increasing population levels and accelerating the pace of urbanization which has implications for the increasing demand for water for both personal and industrial purposes. In addition, changes in the structure of the Indonesian economy, which shifts from the agricultural sector to the manufacturing and service sectors, increase the demand for water for industrial needs as well as for energy and power generation. As reported by the Asian Development Bank (ADB), in 2020 water demand for industry will be around 20.1 m³/s and water demand for electricity generation will increase by almost 88% until 2030.

These external factors are taken into consideration for the Company in compiling targets and work plans for the next financial year, which are included in the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP). Well preserved in the years to come. By remaining observant and careful with changes that occur in the economic and industrial environment, the Company will carry out the strategic steps that have been planned by implementing adequate risk control.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan

We believe in the importance of Good Corporate Governance (GCG) in supporting the business performance of Perum Jasa Tirta II and providing added

will be better. This is in line with signs of recovery.

In analyzing future business prospects, Perum Jasa Tirta II seeks to involve and consider external and internal factors that have a significant influence on the Company's business sustainability. If you look at the projections at the global level, world economic growth in 2020 is predicted to move towards recovery at the level of 2.5%, slightly increasing from the previous year. The projected improvement in conduciveness will move stronger if accompanied by accommodative fiscal policy from the regulator. In addition, the growth outlook is more prospective considering that the United States and China have signed an initial Phase I agreement to end the trade war, which is expected to provide a bright spot for the recovery of overall economic conditions.

The projected improvement in the global economic climate is expected to have a positive impact on the projection of domestic economic growth. This can be seen from the 2020 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) compiled by the Indonesian Ministry of Finance (Kemenkeu) which predicts economic growth of 5.3%, inflation at 3.1%, and the exchange rate of the Rupiah against the United States dollar (USD). Projected at Rp. 14,400 per US dollar.

Considering the projected growth of the industry, business prospects in the Water Resources (SDA) management industry will be strengthened by increasing population levels and accelerating the pace of urbanization which has implications for the increasing demand for water for both personal and industrial purposes. In addition, changes in the structure of the Indonesian economy, which shifts from the agricultural sector to the manufacturing and service sectors, increase the demand for water for industrial needs as well as for energy and power generation. As reported by the Asian Development Bank (ADB), in 2020 water demand for industry will be around 20.1 m³/s and water demand for electricity generation will increase by almost 88% until 2030.

These external factors are taken into consideration for the Company in compiling targets and work plans for the next financial year, which are included in the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP). Well preserved in the years to come. By remaining observant and careful with changes that occur in the economic and industrial environment, the Company will carry out the strategic steps that have been planned by implementing adequate risk control.

Implementation of corporate governance

We believe in the importance of Good Corporate Governance (GCG) in supporting the business performance of Perum Jasa Tirta II and providing added



kepentingan. Direksi bersama Dewan Pengawas dan seluruh karyawan memiliki komitmen tinggi memujudkan organisasi Perusahaan sebagai Perusahaan yang berstatus BUMN serta sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Independen, dan Kewajaran (TARIF).

Perum Jasa Tirta II memahami bahwa *Good Corporate Governance* merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dalam jangka panjang, penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja atau performance suatu perusahaan karena nilai akhir penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja (*high performance*) serta citra perusahaan yang baik.

Aktualisasi GCG di Perum Jasa Tirta II dilakukan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi perusahaan. Optimalisasi penerapan GCG Perum Jasa Tirta II terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik terbaik yang menjadi acuan maupun untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) terhadap Pedoman Pelaksanaan GCG, Perum Jasa Tirta II secara rutin setiap satu tahun sekali melaksanakan *Assessment / Self Assessment* terhadap penerapan GCG.

Pada tahun ini, Perum Jasa Tirta II melakukan *self assessment* menggunakan indikator parameter *assessment* berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 .Tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2012 yang mencakup 6 (enam) aspek yang diukur, yaitu: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham/Pemilik Modal dan RPB, Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya. Hasil penilaian *Assessment* GCG untuk praktek tahun ini menunjukkan hasil skor 83,669 dari nilai maksimal 100.

Selain melaksanakan *self assessment* GCG, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan penyusunan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi GCG agar menjadi bagian dari kultur Perum Jasa Tirta II. Sistem Pengendalian internal Perum Jasa Tirta II terus mengintensifkan penerapan GCG secara menyeluruh dengan menjamin pengendalian internal yang berfokus pada

value for all stakeholders. The Board of Directors together with the Supervisory Board and all employees have a high commitment to making the Company's organization a state-owned company and as a public company applying the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF).

Perum Jasa Tirta II understands that Good Corporate Governance is a standard reference that must be applied by SOEs as the operational basis for the company's business activities as stipulated in the Regulation of the Minister of State for SOEs Number: PER- 01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. In the long term, the implementation of GCG has relevance to the performance or performance of a company because the final value of GCG implementation is high performance and a good corporate image.

GCG actualization at Perum Jasa Tirta II is carried out at all levels and levels of the organization by referring to the provisions and requirements related to the implementation of GCG for the company. Optimization of the GCG implementation of Perum Jasa Tirta II continues to be carried out by strengthening infrastructure to achieve best practices, adjusting systems and procedures needed to support more effective GCG implementation.

In order to obtain an overview of the conditions of GCG implementation against the best practices as a reference as well as to identify areas that need improvement (*areas of improvement*) on the GCG Implementation Guidelines, Perum Jasa Tirta II regularly conducts an *Assessment / Self Assessment* on the implementation of GCG.

This year, Perum Jasa Tirta II conducted a self-assessment using parameter assessment indicators based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012. Regarding Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises issued on June 6, 2012 which includes 6 (six) measured aspects, namely: Commitment to the Implementation of Sustainable Governance, Shareholders/Equity Owners and RPB, Supervisory Board, Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects. The results of the GCG Assessment for practice this year showed a score of 83,669 out of a maximum score of 100.

In addition to carrying out the GCG self-assessment, Perum Jasa Tirta II socialized the Gratification Control Program and drafted the Whistleblowing System Guidelines. This is intended to strengthen the implementation of GCG so that it becomes part of the culture of Perum Jasa Tirta II. The internal control system of Perum Jasa Tirta II continues to intensify the implementation of GCG as a whole by ensuring internal control that focuses on maintaining the quality

pemeliharaan kualitas kepatuhan terhadap prinsip GCG dan regulasi yang berlaku serta keandalan dan efektivitas proses bisnis demi menjamin keberlangsungan usaha.

Perusahaan telah menerapkan pengembangan sistem pengendalian internal mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun sistem kontrol organisasi yang sehat dan efektif. Dalam menciptakan dan memelihara kesadaran seluruh insan Perum Jasa Tirta II akan urgensi pengendalian internal, Direksi dan organ Perusahaan lainnya terlibat aktif dalam menjalankan sistem pengendalian internal melalui pengambilan keputusan sesuai wewenang masing-masing, penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan, serta memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, meliputi perencanaan strategis, manajemen risiko, kebijakan akuntansi yang memadai, dan mekanisme evaluasi yang komprehensif dan berkala.

Selama tahun 2020 Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan *monitoring* evaluasi di mana penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dilakukan secara berkala dan menyatu dengan kegiatan operasional. Penilaian tersebut diperkuat dengan evaluasi terpisah oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Auditor Eksternal (KAP) dan dilaporkan kepada Direksi.

Manajemen Risiko

Tata kelola keberlanjutan yang diterapkan PJT II. dikomprehensifkan dengan implementasi manajemen risiko yang memastikan pengelolaan eksposur risiko telah dijalankan dengan baik pada seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan. Dalam hal ini, tidak hanya Direksi, tetapi seluruh insan PJT II memiliki peran dalam mendukung efektivitas manajemen risiko. Peran Direksi dalam pengelolaan risiko komprehensif diarahkan pada penyediaan sistem manajemen risiko serta pembinaan dan evaluasi penerapannya.

Direksi terus berupaya menjamin kerangka, perangkat, dan prosedur yang intensif dalam manajemen risiko telah memadai dan mencukupi dengan kebutuhan Perusahaan. Adapun pada tahun 2020 Perusahaan telah menetapkan Register Risiko melalui Surat Keputusan Direksi yang meliputi Risiko Operasional dan Risiko Strategis dengan memerhatikan target-target Perusahaan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) dan RKAP 2020.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kondisi yang terjadi di lingkungan makroekonomi maupun industri yang dinamis menuntut Perum Jasa Tirta II untuk senantiasa menggerakkan keseimbangan dan kelangsungan usaha jangka panjang. Upaya tersebut membutuhkan adanya penyempurnaan dan pelaksanaan fungsi yang lebih baik dari setiap elemen bisnis. Dalam hal ini, aspek Sumber Daya Manusia dimaknai sebagai elemen fungsional yang mampu menjaga kelangsungan usaha secara berkelanjutan jika diiringi dengan pengelolaan kualitas SDM yang dimiliki. Untuk itu, Perusahaan berfokus pada pembentukan SDM yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur.

of compliance with GCG principles and applicable regulations as well as the reliability and effectiveness of business processes to ensure business continuity.

The company has implemented the development of an internal control system that integrates all existing resources to build a healthy and effective organizational control system. In creating and maintaining awareness of all personnel of Perum Jasa Tirta II on the urgency of internal control, the Board of Directors and other Company organs are actively involved in running the internal control system through making decisions according to their respective authorities, implementing Company policies and procedures, and complying with applicable regulations, covering strategic planning, risk management, adequate accounting policies, and a comprehensive and periodic evaluation mechanism.

During 2020 Perum Jasa Tirta II has carried out monitoring and evaluation in which an assessment of the performance quality of the internal control system is carried out periodically and integrated with operational activities. This assessment is strengthened by separate evaluations by the Internal Audit Unit (SPI) and External Auditor (KAP) and reported to the Board of Directors.

Risk Management

The sustainability governance implemented by PJT II is comprehensive with the implementation of risk management which ensures that risk exposure management has been carried out properly in all operational activities carried out. In this case, not only the Board of Directors, but all PJT II personnel have a role in supporting the effectiveness of risk management. The role of the Board of Directors in comprehensive risk management is directed at providing a risk management system as well as fostering and evaluating its implementation.

The Board of Directors continues to ensure that the framework, tools, and procedures that are intensive in risk management are adequate and sufficient to meet the needs of the Company. Meanwhile, in 2020 the Company has determined the Risk Register through the Decree of the Board of Directors which includes Operational Risk and Strategic Risk by taking into account the Company's targets in the Key Performance Indicators (KPI) and RKAP of 2020.

Human Resource Improvement

Conditions that occur in the dynamic macroeconomic and industrial environment require Perum Jasa Tirta II to always drive balance and long-term business continuity. These efforts require refinement and better implementation of the functions of each business element. In this case, the Human Resources aspect is interpreted as a functional element that is able to maintain business continuity in a sustainable manner if it is accompanied by managing the quality of its human resources. To that end, the Company focuses on the formation of competent human resources, with high integrity, and upholds noble attitudes and behavior.



Perusahaan secara berkala meninjau ulang praktik-praktik pengelolaan SDM yang dimiliki agar senantiasa relevan dengan perkembangan iklim usaha terkini, kemajuan teknologi, serta dinamisnya kondisi sosial, politik, dan lingkungan. Praktik-praktik pengelolaan SDM telah mengadopsi pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) yang secara rutin dievaluasi efektivitasnya. Selama tahun 2020, kegiatan-kegiatan pengelolaan SDM berbasis MSDM-BK telah dilaksanakan dengan baik, antara lain penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK), penilaian kompetensi individu, pelaksanaan Survei Persepsi Karyawan, penyelenggaraan Inspeksi Mendadak, monitoring dan evaluasi kepegawaian, pemutakhiran data Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK), uji portofolio, hingga penyerahan Piagam Satya Karya.

Komitmen Perum Jasa Tirta II untuk mendukung peningkatan kapabilitas SDM direalisasikan melalui pelaksanaan program pengembangan kompetensi SDM.

Penilaian Kinerja Unit Kerja Di Bawah Direksi

Optimalisasi fungsi pengurusan dan pengelolaan perencanaan oleh Direksi didukung oleh unit kerja yang strukturnya berada satu tingkat dibawah Direksi. Sesuai dengan struktur organisasi tata kerja yang telah ditetapkan.

Direksi menilai bahwa unit kerja tersebut sepanjang tahun 2020 telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan optimal.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Amanat yang diemban Perum Jasa Tirta II untuk menjalankan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan pengembangan fungsi perairan bagi masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi sosial yang dimiliki. Dalam hal ini, Perum Jasa Tirta II memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Perum Jasa Tirta II meyakini bahwa tugas yang diemban Perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara praktik usaha, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat memiliki dampak yang berkelanjutan di masa mendatang. Melalui pemeliharaan hubungan yang sinergis dan harmonis antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan membidik masalah-masalah sosial dan lingkungan, Perusahaan ingin mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam agenda keberlanjutan Perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam mendukung upaya perbaikan berkelanjutan, pelaksanaan dan pelaporan CSR Perusahaan di tahun 2020 telah mengaplikasikan pendekatan ISO 26000: *Social responsibility* yang membidik tujuh aspek keberlanjutan, yaitu tata kelola, hak asasi manusia,

The Company periodically reviews its HR management practices so that they are always relevant to the latest developments in the business climate, technological advances, and dynamic social, political and environmental conditions. HR management practices have adopted a Competency-Based Human Resource Management (MSDM-BK) approach which is regularly evaluated for effectiveness. During 2020, HR management activities based on MSDM-BK have been carried out well, including assessment of the realization of Employee Work Targets (SKK), individual competency assessments, implementation of Employee Perception Surveys, implementation of Sudden Inspections, monitoring and evaluation of staffing, updating of data Certificate for Obtaining Family Allowance Payments (SKUMPTK), portfolio testing, and submission of the Satya Karya Charter.

The commitment of Perum Jasa Tirta II to support the improvement of HR capabilities is realized through the implementation of HR competency development programs.

Performance appraisal of work units under the board of directors

The optimization of the management function and planning management by the Board of Directors is supported by a work unit whose structure is one level below the Board of Directors. In accordance with the organizational structure of work procedures that have been set.

The Board of Directors considers that the work unit throughout 2020 has carried out its functions and responsibilities optimally.

Social and Environmental Responsibility

The mandate carried out by Perum Jasa Tirta II to run the management of Water Resources (SDA) and the development of water functions for the community is closely related to its social functions. In this case, Perum Jasa Tirta II has more responsibility to create a positive impact for the environment, society, and stakeholders. Perum Jasa Tirta II believes that the task of the Company to maintain a balance between business practices, environmental sustainability and community welfare has a sustainable impact in the future. By maintaining a synergistic and harmonious relationship between the Company and its stakeholders by targeting social and environmental issues, the Company wants to encourage community and stakeholder involvement in the Company's sustainability agenda through the Corporate Social Responsibility program and the Partnership and Community Development Program (PKBL).

In support of continuous improvement efforts, the Company's CSR implementation and reporting in 2020 has applied the ISO 26000: Social responsibility approach which targets seven aspects of sustainability, namely governance, human rights, fair operation of employment

operasi yang adil ketenagakerjaan dan K3, lingkungan hidup, pengembangan sosial kemasyarakatan, serta produk dan pelanggan. Pengaplikasian metode baru turut dikomprehensifkan melalui pemetaan isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan proses bisnis Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan dapat mewujudkan kemanfaatan yang lebih besar bagi pemangku kepentingan serta mendukung upaya perbaikan di masa mendatang.

Sementara itu, tanggung jawab Perusahaan terhadap pengembangan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2020 telah direalisasikan dengan baik. Efektivitas penyaluran dana PKBL telah tepat sasaran dengan capaian Program Kemitraan mitra binaan dan program Bina Lingkungan.

Perlu disampaikan bahwa Program Bina Lingkungan PJT II yang difokuskan kepada program Bina Lingkungan berbasis operasi dan konservasi, telah mendapatkan penghargaan *2nd Runner Up* dalam kategori *Thermal Off Grid Renewable Energy* di ASEAN Energi Awards yang merupakan penghargaan tertinggi di Asia Tenggara untuk keunggulan di bidang energi.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun 2020, terdapat perubahan komposisi Direksi. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II No. SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 mengangkat Imam Santoso sebagai Direktur Utama Perum Jasa Tirta II menggantikan U. Saefudin Noer yang diberhentikan secara hormat.

Selain itu, berdasarkan SK-196/MBU/06/2020 pemilik modal memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan mengangkat Indriani Widiastuti sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Anton Mardiyono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Dengan demikian susunan anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

and OSH, environment, social development, and products and customers. The application of the new method is also comprehensive through the mapping of social and environmental issues that are relevant to the Company's business processes. Thus, the Company can realize greater benefits for stakeholders and support future improvement efforts.

Meanwhile, the Company's responsibility for developing the quality of life for the community and the environment through the Partnership and Community Development Program (PKBL) in 2020 has been well realized. The effectiveness of the distribution of PKBL funds has been right on target with the achievements of the Partnership Program of fostered partners and the Community Development program.

It should be said that the PJT II Community Development Program, which focuses on operations and conservation-based Environmental Development programs, has been awarded the 2nd Runner Up in the Thermal Off Grid Renewable Energy category at the ASEAN Energy Awards, which is the highest award in Southeast Asia for excellence in the energy sector.

Changes in Board of Directors Composition

Throughout 2020, there was a change in the composition of the Board of Directors. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Representative of the Government as Capital Owner of Perum Jasa Tirta II No. SK-350/MBU/10/2020 dated 27 October 2020 appointed Imam Santoso as President Director of Perum Jasa Tirta II replacing U. Saefudin Noer who was honorably dismissed.

In addition, based on SK-196/MBU/06/2020 the capital owner decided to change the nomenclature of positions for the members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company and appointed Indriani Widiastuti as Director of Business Development and Anton Mardiyono as Director of Operations and Maintenance of Perum Jasa Tirta II.

Accordingly, the composition of the members of the Board of Directors as of December 31, 2020 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Imam Santoso	Direktur Utama / President Director	SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / SK-350/MBU/10/2020 dated 27 October 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the President Director of Jasa Tirta II Public Company (Perum).
Haris Zulkarnain	Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	SK-222/MBU/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / SK-222/MBU/08/2018 dated August 1, 2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum).



Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / <i>Director of Operational and Maintenance</i>	SK-196/MBU/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / <i>SK-196/MBU/06/2020 dated June 11, 2020 concerning Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum).</i>
Indriani Widiastuti	Direktur Pengembangan Usaha / <i>Director of Business Development</i>	SK-196/MBU/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / <i>SK-196/MBU/06/2020 dated June 11, 2020 concerning Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum).</i>

Penutup

Atas nama Direksi, Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan dukungan penuh kepada Perum Jasa Tirta II dapat melewati seluruh tantangan dan menutup tahun 2020 dengan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Kepada seluruh Konsumen, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya untuk tetap tumbuh berkembang bersama Perum Jasa Tirta II disegala situasi, dan merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat melayani dengan sepenuh hati.

Kepada Pemilik Modal kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas atas pengawasan dan nasihat yang telah diberikan kepada Direksi, sehingga pengelolaan bisnis Perum Jasa Tirta II dapat berjalan dengan efektif sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Direksi juga merasa bangga serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi yang tinggi untuk tetap maju bersama sehingga dapat mencapai kinerja tahun 2020 yang baik. Semoga kinerja tahun 2021 ini dapat terus dipertahankan dan semakin kuat di tahun berikutnya. Kedepannya, Perum Jasa Tirta II terus berkomitmen untuk tumbuh berkelanjutan untuk memberikan nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Closing

On behalf of the Board of Directors, we express our highest appreciation to all Stakeholders who have given full support to Perum Jasa Tirta II to overcome all challenges and close 2020 with good and sustainable performance. To all consumers, the Board of Directors would like to thank them for their trust in continuing to grow with Perum Jasa Tirta II in all situations, and it is an honor for us to be able to serve wholeheartedly.

We would like to thank the Capital Owners for the support and trust that has been given to the Company. We also thank the Supervisory Board for the supervision and advice that has been given to the Board of Directors, so that the business management of Perum Jasa Tirta II can run effectively in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The Board of Directors also feels proud and expresses gratitude to all levels of management and employees for their high dedication to keep moving forward together so that they can achieve a good performance in 2020. Hopefully the performance in 2021 can be maintained and will be even stronger in the following year. Going forward, Perum Jasa Tirta II will continue to be committed to sustainable growth to provide value for all Stakeholders.

Kita Mampu Menghadapi Covid 19 Untuk Kinerja yang Berkelanjutan!
We Are Able To Face Covid 19 For Sustainable Performance!

Jatiluhur, Juni 2021
 Jatiluhur, June, 2021

Direksi
 Board of Directors


Imam Santoso
 Direktur Utama
 President Director

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE





PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan

Company Identity

Nama Perusahaan Company Name	PERUM JASA TIRTA II
Tanggal Pendirian Date of Establishment	26 Agustus 1967 August 26, 1967
Tanggal Beroperasi First Operation	9 September 1969 September 9, 1969
Bidang Usaha Line of Business	Pengelola Sumber Daya Air Operator of Water Resource Management
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Government Regulation No. 7 of 2010
Bentuk Badan Hukum Legal Entity	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum State Owned Enterprise (SOE) in the form of Public Utility Company
Status Perusahaan Company Status	Perusahaan Umum (Perum) Public-utility Company
Domisili Domicile	Purwakarta, Jawa Barat
Modal Dasar Authorized Capital	Rp164.547.635.935,00
NPWP Tax Identification Number	010000552-409.003
Alamat Kantor Address	Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur – Purwakarta, Jawa Barat
Kantor Layanan Service Offices	1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Perwakilan, 2 (enam) Kantor Unit Usaha, 4 (empat) kantor Wilayah 1 (one) Head Office, 1 (one) Representative Office, 2 (six) Business Unit Offices, 4 (four) Regional offices
Kepemilikan Ownership	100% milik Negara Republik Indonesia 100% owned by the Republic of Indonesia
Jumlah Karyawan Total Employee	1.080 Karyawan (Tidak termasuk karyawan anak perusahaan, Pegawai Waktu Tertentu, dan Outsorce) 1.080 employees (Excluding subsidiary employees, Specific Time Employees, and Outsources)
Serikat Pekerja Workers Union	Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II (SEKAR)
Layanan Informasi Information Service	Email: pjt2@jasatirta2.co.id Telepon: (0264) 201972 Fax: (0264) 201971
Website	www.jasatirta2.co.id



Air Untuk Menghidupi Negeri



Kantor Pusat / Head Office

Jalan Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur
Purwakarta - Jawa Barat
Telp. (0264) 201 972
Fax. (0264) 201 971



Kantor Perwakilan / Representative Office

Jalan H. Agus Salim No. 69,
Jakarta Pusat
Telp. (021) 314 5827

Kantor Unit Wilayah I / Regional Unit Office I

Jalan Ir. Djuanda No. 124D
Bekasi - Jawa Barat
Telp. (021) 880 1884
Fax. (021) 880 1884



Kantor Unit Wilayah II / Regional Unit Office II

Jalan Curug Klari, Karawang
Jawa Barat
Telp. (0264) 200 487
Fax. (0264) 203 580

Kantor Unit Wilayah III / Regional Unit Office III

Jalan Arief Rahman Hakim
No. 16, Subang-Jawa Barat
Telp. (0260) 411510
Fax. (0260) 415 684



Kantor Unit Wilayah IV / Regional Unit Office IV

Jalan Rasamala Raya, Bendungan Jatiluhur,
Purwakarta-Jawa Barat
Telp. / Fax. (0264) 822 2537

Kantor Unit PLTA / Hydropower Unit Office

Jalan Rasamala Raya, Bendungan
Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat
Telp. (0264) 200 565
Fax. (0264) 200 060



Kantor Unit Usaha Pariwisata dan Hotel/ Tourism & Hotel Business Unit Office

Jatiluhur Valley & Resort Hotel
Purwakarta – Jawa Barat
Telp. (0264) 201087 , 201989



Profil Wilayah Sungai Citarum

Citarum River Basin Profile

Wilayah Sungai Citarum dengan luas $\pm 11.000 \text{ km}^2$ dan berada di sebagian besar wilayah Jawa Barat merupakan salah satu sumber air bumi Parahiyangan. Sumber air Sungai Citarum berasal dari mata air yang berlokasi di Gunung Wayang dan beberapa sungai seperti Citarik, Cisangkuy, Ciminyak, Cikapundung, Ciwidey, Cihaur, dan Cisokan. Wilayah sungai Citarum mencakup beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Indramayu, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian Kabupaten Bogor, dan sebagian Jakarta Timur.

Perum Jasa Tirta II (PJT II) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, memiliki tugas sebagai operator pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum. Sebagai Perusahaan yang dimiliki oleh Negara, selain menjalankan usaha dalam pengelolaan dan penyediaan air, PJT II juga memiliki tugas yang berhubungan dengan pelayanan umum di bidang SDA seperti pengendalian banjir, penyediaan air irigasi, dan konservasi. Tujuan dari pendirian PJT II adalah untuk mengelola penggunaan air dan memenuhi kebutuhan akan air. Tanggung jawab tersebut meliputi perlindungan, pembangunan, dan penggunaan air serta sumber air termasuk di dalamnya sebagai penyedia informasi. Hal ini menjadikan pentingnya sistem pelaksanaan operasi dan pemantauan air yang akurat di wilayah kerja PJT II.

Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum juga bertujuan untuk mengendalikan banjir di area hilir Sungai Citarum, khususnya di Kabupaten Karawang dan Bekasi. Selain bertujuan untuk mengendalikan banjir, pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum juga dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi seluas sekitar 290.000 hektar (240.000 hektar di Daerah Irigasi Jatiluhur dan 50.000 hektar di Daerah Irigasi Selatan Jatiluhur), yang merupakan salah satu lumbung padi nasional.

Citarum River basin covers an area of $\pm 11,000 \text{ km}^2$, located in most of West Java area and is one of the Parahiyangan water source. The water source of the Citarum River comes from a spring located at Wayang Mountain and several rivers such as Citarik, Cisangkuy, Ciminyak, Cikapundung, Ciwidey, Cihaur, and Cisokan. Citarum river basin covers several districts such as Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang Regency, Bandung Regency, West Bandung Regency, Bandung City, Bekasi City, Cimahi City, some of Indramayu Regency, some of Sumedang Regency, some of Cianjur Regency, some of Bogor Regency, and some of East Jakarta.

Perum Jasa Tirta II (PJT II), based on Government Regulation Number 7 Year 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II, has the duty as operator of Water Resource Management in Citarum River Region. As a State-owned Company, besides running the business in water supply and management, PJT II also serves public services in the field of water resources such as flood control, irrigation water supply, and conservation. The purpose of establishing PJT II is to manage water utilization and meet the water demand. Such responsibilities include the protection, development, water utilization, and water resources including providing information. This defines the significance of accurate water operation and monitoring system in the PJT II work area.

Water Resources Management in the Citarum River Basin also aims to control downstream flooding of the Citarum River, particularly in Karawang and Bekasi Regencies. Besides aiming to control flooding, water resources management in Citarum river basin is also carried out in order to fulfill water demand for irrigation covering approximately 290,000 hectares (240,000 hectares in Jatiluhur Irrigation Area and 50,000 hectares in Jatiluhur Southern Irrigation Area), which is one of national rice barns.

Sekilas Perusahaan

Company at a Glance

Sejarah perusahaan kami bermula dari proyek nasional Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda merupakan bagian dari tahap Pengembangan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum, dan berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan air irigasi pertanian di sebagai wilayah Jawa Barat, penyediaan air baku untuk PDAM dan Industri Pembangkit Listrik. Selain itu, Bendungan/Waduk PLTA Ir. H. Djuanda juga berfungsi sebagai pengendali banjir di sebagian wilayah Karawang dan daerah subur sekitarnya, serta sebagai salah satu tujuan wisata dan olahraga air di wilayah Jawa Barat.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, maka berdasarkan PP No. 8 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur. Badan ini bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya.

The history of our company was initiated from a national project of the Government of the Republic of Indonesia for the construction of the Ir. H. Djuanda Dam in 1957 that completed in 1967. The construction is part of the Water Resources Development stage in the Citarum River basin, and serves to support the national food security through the provision of agricultural irrigation in some areas of West Java, the provision of raw water for Regional Water Company (PDAM) and Power Generation Industries. In addition, Hydroelectric Power Plant (PLTA) dam/reservoir of Ir. H. Djuanda also serves as flood controllers in some part of Karawang and its surrounding areas, as well as one of the tourist destinations and water sports in West Java.

With the completion of the development, in conform to Government Regulation No.8 on July 24, 1967, the Government of the Republic of Indonesia established the Jatiluhur Board of Management and Supervisory under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur. This agency is in charge of carrying out Exploitation and Maintenance of Facilities and Infrastructure of Dams/Reservoirs and PLTA Ir. H. Djuanda as well as pioneering the development of subsequent projects.

Perum Jasa Tirta II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, memiliki tugas sebagai operator pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum.

Duty of Perum Jasa Tirta II pursuant to Government Regulation No. 7 of 2010 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II is to become operator of Water Resources management in the Citarum River Basin.





Dengan bertambah luasnya ruang lingkup tugas Perusahaan serta sejalan dengan usainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi Waduk, Bendungan Utama, Stasiun PLTA serta sarana-sarana Sistem Pengairan dan Irigasi, menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membentuk Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970 yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 Tahun 1980, PP No. 42 Tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998. POJ diberi mandat oleh Pemerintah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan Otorita, dan harus diusahakan pemasukannya semaksimal mungkin untuk dipergunakan bagi biaya rehabilitasi, perbaikan berat dan pembangunan jaringan.

RIWAYAT PERUBAHAN NAMA

Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat, maka berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan Perum Jasa Tirta II bertransformasi menjadi lebih dinamis, responsif, dan mampu meningkatkan perannya sebagai perusahaan yang terkemuka di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

Sesuai dengan tujuan didirikannya Perum JasaTirta II, manajemen tetap berkomitmen terhadap misi yang diemban Perum Jasa Tirta II yaitu menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan inovatif melalui penyediaan air baku. Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau selain PT PLN (Persero). Pengembangan kepariwisataan dan pemanfaatan lahan yang bertujuan memberikan kontribusi dalam menunjang ketahanan pangan nasional dan keuntungan bagi Negara dan turut melaksanakan kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

With the expansion of the Company's scope of work, in line with the majority of the construction of the Jatiluhur Multipurpose Project which includes the Reservoir, the Main Dam, the Hydroelectric Station, and the Irrigation System facilities, this became the basis of Government Consideration to form the established Jatiluhur Authority (POJ) based on PP No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Government Regulation No.35 of 1980, PP No.42 of 1990, and PP No.13 of 1998. POJ is mandated by the Government to manage the sources of income of the Authority, and must cultivate as much as possible to be used for rehabilitation, heavy repair, and network construction.

HISTORY OF COMPANY'S NAME

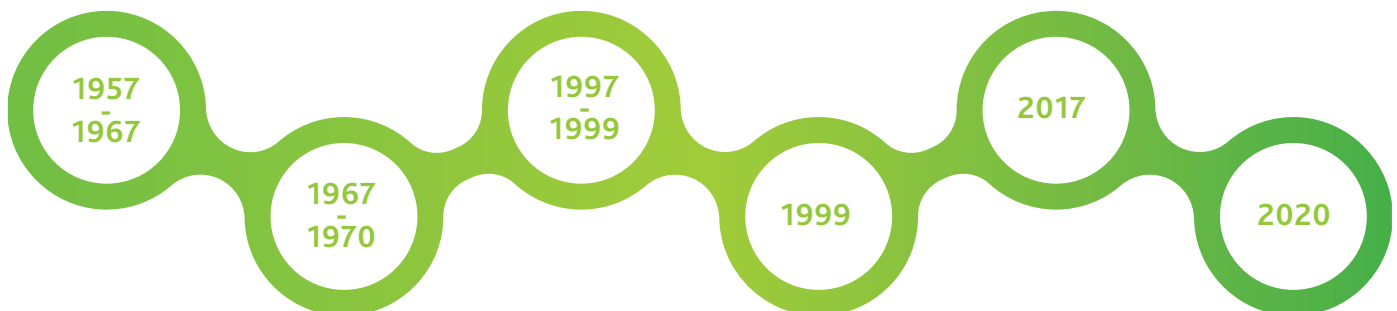
To assist the implementation and support of the government policies and programs in the field of economy and national development in general, especially in the field of water resources management and utilization and optimization of resources utilization of the Company, to produce goods and services based on sound management principles of the Company. Therefore, based on Government Regulation No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its duties and business activities with PP No.7 of 2010.

With these changes, Perum Jasa Tirta II is expected to transform into a more dynamic, responsive and able to improve its role as a leading company in the field of water resources management.

In accordance with the purpose in establishing Perum Jasa Tirta II, the management remains committed to the mission carried by Perum Jasa Tirta II, which is to manage the Water Resources with good and innovative Corporate Governance through the provision of raw water. Power generation and distribution to PT PLN (Persero), and/or any other than PT PLN (Persero). To develop tourism and land use which aims to contribute in supporting the national food security and profit for the State. To participate in implementing the Government program policies in the field of economy and national development in general, especially in the field of business and management of Water Resources and optimization of resource utilization of the Company to produce goods and services based on sound corporate management principles.

Jejak Langkah Milestones

- Proyek pembangunan Bendungan Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai dibangun pada tahun 1967 dan diresmikan Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Bendungan Ir. H. Djuanda.
- Construction of Jatiluhur Multipurpose Dam project was declared completed in 1967 and inaugurated by the Government of the Republic of Indonesia under the name of Ir. H. Djuanda Dam.
- Pemerintah membentuk Perum Otorita Jatiluhur yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970, yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 tahun 1980, PP No. 42 tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998.
- The government established the Perum Otorita Jatiluhur under Govt. Reg. No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Govt. Reg. No.35 of 1980, Govt. Reg. No.42 of 1990, and Govt. Reg. No.13 of 1998.
- Perusahaan melakukan perubahan logo sebagai bentuk implementasi transformasi. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.
- The company changes the logo as a form of implementing transformation. The latest logo has been ratified pursuant to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/DIR/35/PRD-PED/2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/01/PRT/2014 concerning the Guideline of Service Manuscript of Perum Jasa Tirta II.



- Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1967 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur.
- Based on Govt. Reg. No.8 of 1967, on July 24, 1967, the Government established the Board of Management and Advisory of Jatiluhur Lake under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur.
- Pegawai/Pekerja dari Proyek PLTA Jatiluhur beserta bangunan Waduk, PLTA serta Gardu Induknya diserahkan kepada PN Jatiluhur untuk menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan potensi-potensi yang timbul setelah selesainya sebagian Proyek PLTA Jatiluhur.
- Officers/Workers from Jatiluhur Hydroelectric Project and Reservoir building, hydropower, and substation were handed over to PN Jatiluhur to organize the Management and Exploitation of potentials that arise after the completion of part of Jatiluhur Hydroelectric Project.
- Berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II, yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.
- Based on Govt. Reg. No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its tasks and business activities with Govt. Reg. No. 7 of 2010.



Visi dan Misi

Vision and Mission

Visi / Vision

**Menjadi Perusahaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air
Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030.**

Being a Leading Company in ASEAN in the Field of Water Resources Management in 2030.

Misi / Mission

- **Pengoptimalan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara yang efisien, efektif, inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya.**

Optimizing the utilization of Water Resources in an efficient, effective, innovative and sustainable manner with the objective of maintaining the sustainability and management of Water Resources and derivatives.

- **Menciptakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya kreativitas dan inovasi serta berdaya saing tinggi dalam pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya.**

Creating Human Resources that have the power of creativity and innovation and high competitiveness in the management of Water Resources and derivatives.

- **Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).**

Implementing appropriate technology and environmentally friendly, especially in the Development of New and Renewable Energy (EBT).

Motto Perusahaan

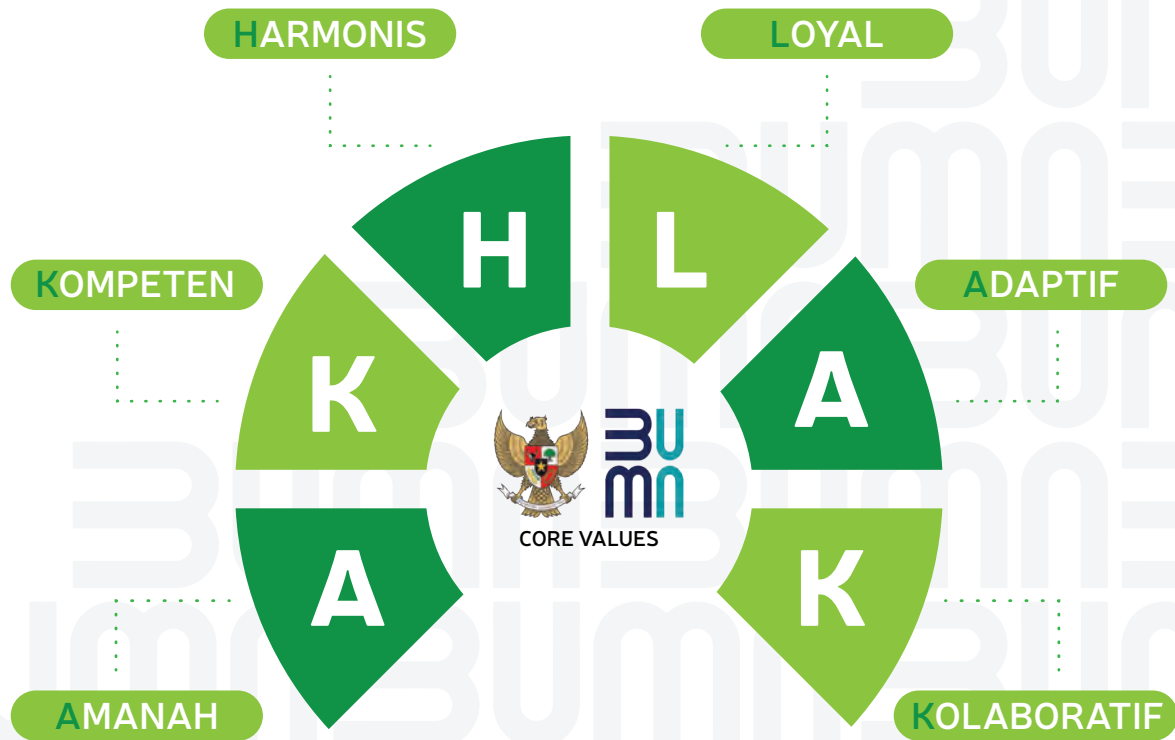
Air Untuk Menghidupi Negeri

Water For Wellness

Motto Perum Jasa Tirta II tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 01/DIR/27/PRT/2016. /
Perum Jasa Tirta II Motto has been established through Board of Directors Regulation No. 01/DIR/27/PRT/2016.

Nilai-Nilai Utama

Core Values



AMANAH / Trust

adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. / Hold on to the trust.

KOMPETEN / Competent

adalah terus belajar dan mengembangkan kapasitas. / Continue to learn and develop capacity.

HARMONIS / Harmony

adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. / Care for each other and respect differences

LOYAL / Loyal

adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. / Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

ADAPTIF / Adaptive

adalah terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan. / Continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

KOLABORATIF / Collaborative

adalah membangun kerjasama yang sinergis. / Build synergistic cooperation.



Tata Nilai Perusahaan

Corporate Values

Sejalan dengan Moto "Air untuk Menghidupi Negeri" (Water for Wellness) maka nilai-nilai perusahaan yang menjadi jiwa dan karakter seluruh insan PJT II sebagai pedoman bersama guna meraih tujuan perusahaan yang terus berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada negeri adalah sebagai berikut:

In line with the motto "Water For Wellness", the values of the Company that become the soul and the characters of all PJT II person serves as a common guideline in order to achieve the goals of a growing company and provide prosperity to the country are as follows:

T

Tangguh / Strong

Berkemampuan Tinggi dalam Melaksanakan Tugas
High Capability in Carrying out Tasks

I

Inovatif / Innovative

Memiliki Kreativitas dan Inovasi dalam Menjalankan Tugas
Having Creativity and Innovation in Running Duties

R

Responsif / Responsive

Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas untuk Kepuasan Pelanggan
Providing Fast and Qualified Services for Customers Satisfaction

T

Transparan / Transparent

Bersikap Jujur, Terbuka dan Profesional dan Menjalankan Tugas
Being Honest, Open, and Professional in Running Tasks

A

Akuntabel / Accountable

Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas
Responsible in Implementing Tasks



Filosofi Logo

Logo Philosophy

Logo Perusahaan telah berubah sebanyak 1 (satu) kali sejak berdirinya Perum Jasa Tirta II. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

Logo Perusahaan merupakan representasi dari bentuk tetesan air, sebagai manifestasi filosofi air yang mengajarkan kerendahan hati, kebaikan, kegigihan, fleksibilitas, dan keseimbangan.

Company logo has changed once since the establishment of Perum Jasa Tirta II. The latest logo has been ratified pursuant to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/DIR/35/PRD-PED/ 2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/01/PRT/2014 on Guidelines for Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

The Company logo is a representation of the shape of water droplets, as a manifestation of water philosophy that teaches humility, kindness, tenacity, flexibility, and balance.



TAGLINE

Tagline tersebut memberikan pemahaman bahwa Perusahaan sebagai Perusahaan Pengelola Sumber Daya Air (SDA) berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi dan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan menjaga SDA tersebut untuk keberlangsungan negeri.

Tagline

The tagline provides an understanding that the Company as a Water Resources Management Company (SDA) is committed to always contribute and benefit to the welfare and prosperity of the country and maintain the water resources for the sustainability of the country.

WARNA

Gradasi warna menunjukkan Langkah Besar yang diambil PJT II dan Aspirasi Perusahaan terhadap masa depan yang lebih Positif dan Dinamis.

- Warna biru mencerminkan Perusahaan yang andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab;
- Warna putih melambangkan kesucian amanah yang diemban Perusahaan dalam ikut berkontribusi membangun kemakmuran bangsa lintas generasi.
- Warna merah mencerminkan keuletan dan ketegasan serta keberanian Perusahaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan.
- Warna hijau mencerminkan pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan.

Color

The color gradation shows the Big Step taken by PJT II and the Company's Aspiration towards a more Positive and Dynamic future.

- The Blue reflects a reliable, trustworthy, and responsible Company;
- The white symbolizes the sanctity of the trust that the Company carries in contributing to build the nation's prosperity across generations
- The red reflects the resilience, firmness, and courage of the Company in the face of various challenges
- The green reflects the management of water resources that are environmentally sound.



PANDUAN WARNA

Color Guide



Biru Muda Light Blue

R=0, G=157, B=224
C=78, M=23, Y=0, K=0



Navy

R=0, G=74, B=169
C=100, M=83, Y=5, K=0



Hijau Green

R=153, G=204, B=51
C=47, M=0, Y=100, K=0



Merah Red

R=255, G=0, B=0
C=0, M=100, Y=100, K=0



Abu-abu Grey

R=102, G=102, B=102
C=62, M=53, Y=53, K=25

LOGOGRAM



Struktur logo terdiri dari logo gram (bentuk tetesan air) maupun logotype (Perum Jasa Tirta II) dan tagline (Air untuk Menghidupi Negeri).

The logo structure consists of logogram (water droplets), logotype (Perum Jasa Tirta II), and tagline (Water for Wellness).

LOGOTYPE

Perum Jasa Tirta II

Logotype Perum Jasa Tirta II, font Diavlo Black.otf dan Tagline Air untuk Menghidupi Negeri, font Amperzand.ttf.

Logotype Perum Jasa Tirta II, font: Diavlo Black.otf Tagline Air untuk menghidupi negeri, font: Amperzand.ttf

Tujuan Perusahaan

Company's Objectives

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in general, particularly in the field of Water Resources Enterprise and Management, as well as optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.

Bidang Usaha Perusahaan

Company's Line of Business

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Perum Jasa Tirta II adalah Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

KEGIATAN USAHA

Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang memiliki luas genangan 83 km persegi, mampu menampung 2,50 miliar meter kubik volume total air baku pada TMA +107 meter. Bendungan ini juga memiliki daerah tangkapan keseluruhan seluas 4.500 km persegi, dengan daerah tangkapan yang langsung ke waduk adalah seluas 380 km persegi. Dengan potensi sumber daya yang sangat besar tersebut, maka kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya air dan kelistrikan serta kegiatan usaha lainnya, sebagai berikut:

- Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
- Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
- Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

PRODUK DAN JASA

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Perum Jasa Tirta II mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir. H. Djuanda di Jatiluhur yang memiliki daya terpasang sebelumnya antara tahun 1994 sampai dengan 1998 adalah sebesar 150 MW. Hingga saat ini, daya terpasang pada PLTA Ir. H. Djuanda telah meningkat menjadi 187,5 MW. Produksi listrik rata-rata dalam setahun adalah sebesar 830 juta kWh yang sebagian digunakan untuk pemakaian sendiri dan penugasan Pemerintah, sedangkan selebihnya dipasok ke PT PLN (Persero) melalui jaringan tegangan 150 kV dan 70 kV.

In accordance with Government Regulation No.7 of 2010 and Company's Articles of Association, the business field of Perum Jasa Tirta II is the Business and Management of Water Resources, and optimizing the utilization of Company's resources to produce goods and services.

BUSINESS ACTIVITY

Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir covers the inundation area of 83 square km, able to accommodate 2.50 billion cubic meters of total raw water volume at TMA +107 meters. The dam also has a total catchment area of 4,500 sq km, with a direct catchment area to a reservoir of 380 sq km. With such enormous resources potential, the operational activities of Perum Jasa Tirta II concentrate on water and electricity resource management and other business activities, such as:

- Raw water supply services for drinking water, industry, agriculture, flushing, ports, power generation, and other water needs;
- Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) and/or any other than PT PLN in accordance with the laws and regulations;
- Generation, distribution of hydroelectricity, drinking water, consultancy services in the field of Water Resources technology, large equipment rental, and water quality laboratory services;
- Development of Drinking Water Supply System (SPAM); and
- Optimizing the Company's potential resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, leasing and exploitation of facilities and infrastructure owned by the Company.

PRODUCTS AND SERVICES

Power Generation and Distribution

Perum Jasa Tirta II manages Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant in Jatiluhur with previous installed power between 1994 and 1998 was 150 MW. Currently, the power installed on Ir. H. Djuanda hydropower has increased to 187.5 MW. The average electricity production in a year is 830 million kWh, partly for own usage and government assignments. While the rest is supplied to PT PLN (Persero) through a network voltage of 150 kV and 70 kV.



Dengan potensi sumber daya yang sangat besar, maka kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya air dan kelistrikan serta kegiatan usaha lainnya.

With a huge potential of resources, the operational activities of Perum Jasa Tirta II concentrate on managing water resources and electricity and other business activities.



Selain itu, pada sistem pengairan milik Perusahaan juga terdapat banyak bangunan terjunan dengan potensi minihidro yang banyak menghasilkan listrik mulai dari 50 kVA hingga 5.000 kVA.

Penyediaan Air Baku

Sebagai pengelola bendungan Ir. H. Djuanda, Perum Jasa Tirta II bertugas mendistribusikan air baku, di mana saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar meter kubik per tahun yang disalurkan ke 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor, dan Bandung. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Kepariwisataan

Keberadaan bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perum Jasa Tirta II telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, dan wahana rekreasi air.

In addition, there are numerous spillway constructions with minihidro potential on the Company's irrigation systems that can generate electricity ranging from 50 kVA to 5,000 kVA.

Raw Water Supply

As the manager of Ir. H. Djuanda dam, Perum Jasa Tirta II is in charge of distributing raw water, which currently has the production capacity of up to 1 billion cubic meters per year which is distributed to 15 Municipal Water Companies (PDAM) in Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor and Bandung. It is also channeled to a number of industries in the region of Bekasi, Karawang, Purwakarta, and Bandung.

Tourism

The existence of Ir. H. Djuanda Jatiluhur dam with its beautiful scenery, combined with the splendor of the dam building is a special attraction for tourists and become one of the destinations of tourism in West Java. In order to take advantage of tourism potential in this area, Perum Jasa Tirta II has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, and water recreation rides.

Fasilitas pariwisata di kawasan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi bangunan hotel bintang tiga dengan nama Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan hotel ini, terdapat 33 bungalow dengan 30 kamar Hotel, dan 7 ruang pertemuan yang 5 di antaranya berada di Gedung Grha Vidya (terdiri dari 1 ruang pertemuan utama berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Lahan

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan yang berupa lahan pertanian dan non pertanian seluas 689,18 ha melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta, seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PDAM Kabupaten/Kota, dan industri serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian.

Penyewaan Alat Berat dan Jasa Laboratorium Kualitas Air

Perum Jasa Tirta II memiliki berbagai macam alat berat berupa Long Arm Excavator, Amphibi Excavator, Ponton, dan Dump Truck yang difungsikan untuk pemeliharaan jaringan pengairan pada unit usaha wilayah serta dapat disewakan kepada pihak ketiga.

Di samping itu, Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga menyediakan Jasa Pelayanan Laboratorium untuk pengujian kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan "Komite Akreditasi Nasional" Jawa Barat. Beberapa perusahaan besar industri makanan dan minuman di Indonesia seperti ABC dan Indofood telah menggunakan jasa laboratorium milik PJT II. Kemudian Rumah Sakit besar, perhotelan, dan apartemen hingga pabrik tekstil dan kertas berskala besar juga telah menggunakan jasa pelayanan laboratorium milik PJT II selama ini.

Tourism facilities in the area of Ir.H.Danda Jatiluhur Dam has been equipped with three-star hotel building under Jatiluhur Hotel Resort which operated since 1967. There are 33 bungalows with 30 hotel rooms in the area of this hotel. Also, seven meeting rooms, five of which are located in Grha Vidya Building (consisting of one main meeting room with the capacity of 800 people, and 4 meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 separate meeting rooms located in the Istora Restaurant with the capacity of 80 people, each. The tourism area is also equipped with a swimming pool and water recreation facilities such as waterboom Jatiluhur Water World (JWW), cruises, water ski boating, and so forth.

Land Utilization

As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilizes land in the form of agricultural and non-agricultural land covering 689.18 ha through leasing system and business cooperation with various agencies, either state-owned (SOE) or private sector such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Regency/Municipal Water Company, industry, and individual communities that rent land for agriculture.

Heavy Equipment Rental and Water Quality Laboratory Services

Perum Jasa Tirta II has a wide range of heavy equipment such as Long Arm Excavator, Amphibious Excavator, Towboats, and Dump Truck, functioned for maintenance of irrigation networks in regional business units and can be leased to third parties.

In addition, Perum Jasa Tirta II (PJT II) also provides Laboratory Services for water quality testing, which is one of the reference laboratories for West Java's National Accreditation Committee. Some major food and beverage industries in Indonesia, such as ABC and Indofood, have used this laboratory service owned by PJT II. Then large hospitals, hotels and apartments, to large-scale textile and paper factories have also used the services owned by PJT II to date.



Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menyusun rencana strategis, di antaranya adalah diversifikasi usaha dengan berinvestasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PJT II menjalankan proyek SPAM Regional Jatiluhur I serta pengembangan SPAM Non-Regional yang akan memperkuat posisi PDAM.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral" dengan keterangan sebagai berikut:

Development of Drinking Water Supply System

In 2020, the company has developed strategic plan, such as diversification of business by investing in the Drinking Water Supply System (DWSS). PJT II runs the Jatiluhur I Regional SPAM project and the development of Non-Regional SPAM, which will strengthen the PDAM's position.

Bottled Drinking Water

Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to provide drinking water to communities in the Company's service areas. This commitment is realized in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral" with the following information:

Kemasan dan Isi Bersih / Packaging and Net Content	Nomor Pendaftaran Pangan / Food Registration Number	Sertifikat Halal / Halal Certification	Sertifikat SNI / SNI Certification	Kapasitas Produksi / Production Capacity
Gelas Plastik / Plastic Glass (240 ml)	BPOM RI MD 265228001325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	6.500 gelas/jam / cup/hour
Botol Plastik / Plastic Bottle 330 ml	BPOM RI MD 265228003325			1.500 botol/jam / bottle/hour
Botol Plastik / Plastic Bottle 600 ml				1.200 botol/jam / bottle/hour
Galon Plastik / Plastic Gallon (19 L)	BPOM RI MD 256228002325			200 galon/jam / gallon/hour

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan PH antara 5 -7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O3) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Biomagnetic serta Far Infrared untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H2O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan serta mitra/stakeholders Perusahaan.

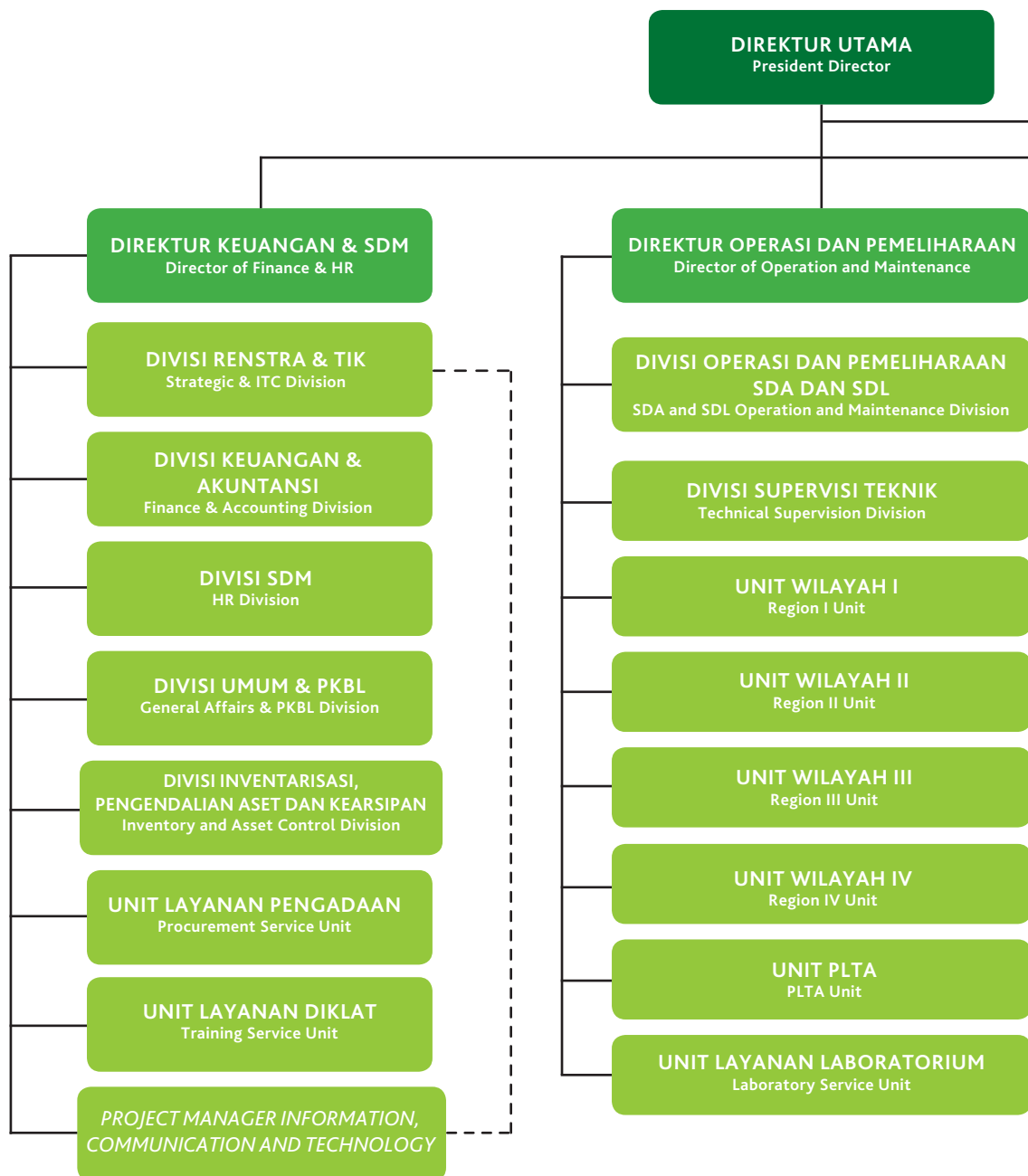
AMDK Jatiluhur is demineralized drinking water with PH between 5 – 7.5 and TDS below 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur is processed by Reverse Osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O3) and ultraviolet, and processed again with Biomagnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecule. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H2O) molecules that are identical to fluid molecules in human body cells to be more easily absorbed to the body that drives the nutrients and oxygen to be more easily transported. Target market of Air Demineral Jatiluhur, among others, are employees of the Company and their families, communities in the Company's work area and our partners/stakeholders.

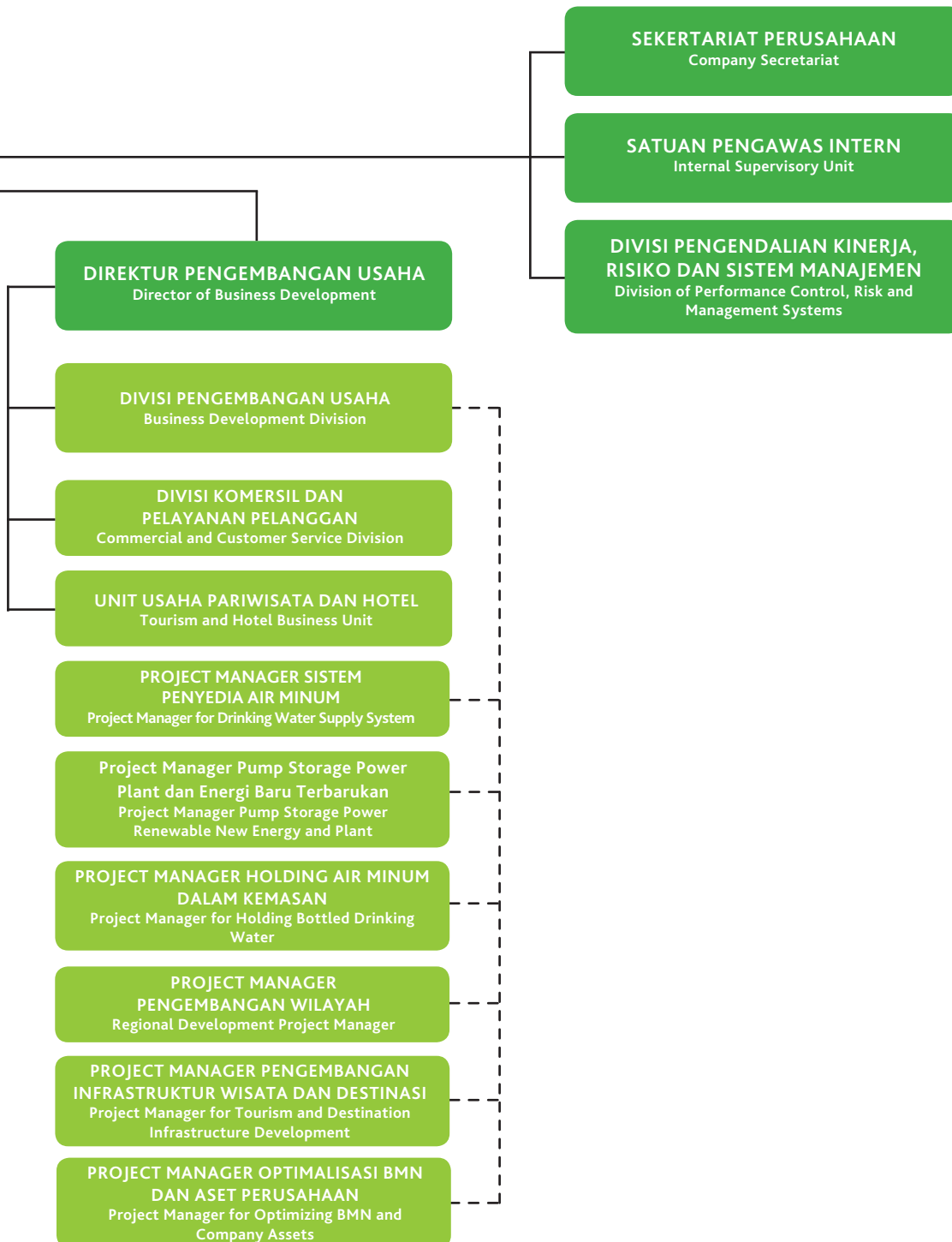
Struktur Organisasi

Organization Structure

Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PRD-18/DIR/11/2020 adalah sebagai berikut:

The organizational structure of Perum Jasa Tirta II based on the Decree of the Board of Directors number PRD-18/DIR/11/2020 is as follows:





Profil Dewan Pengawas

Supervisory Board Profile



**KELIK WIRAWAN WAHYU
WIDODO**

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory
Board

Usia / Age : 51 tahun / 51 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Depok, Jawa Barat / Depok, West Java

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-340/MBU/10/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tanggal 21 Oktober 2020. / He has served as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-340 / MBU / 10/2020 Regarding Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II on 21 October 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik (Jurusan Administrasi Negara) pada tahun 1994. / He obtained a Bachelor's degree from the Faculty of Social and Political Sciences (Department of State Administration) in 1994.

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2019-Sekarang), Komisaris Independen PT PP Properti Tbk (2017-Oktober 2020), dan Ketua Umum PP PERPANI (Persatuan Panahan Seluruh Indonesia) (2018-2019). / In his career, he is Special Staff to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (2019-Present), Independent Commissioner of PT PP Properti Tbk (2017-October 2020), and General Chair of PP PERPANI (Indonesian Archery Association) (2018-2019).

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau menjabat Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. / In addition to serving as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he also serves as Special Staff to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of Supervisory Board, members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

Workshop Komisaris Profesional, Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility (CSR) Workshop. / Workshop Commissioner has attended Professional, Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility (CSR) Workshop.



NUNING SRI REJEKI W.

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Usia / Age : 58 tahun / 58 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Depok

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK-4/MBU/01/2020 3 Januari 2020 / She served as Member of the Supervisory Board based on SK-4 / MBU / 01/2020 January 3, 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar sarjana dari IPB pada tahun 1987, Master dari Universitas Detroit Mercy Tahun 1994./ She obtained a bachelor's degree from IPB in 1987, a Master from Detroit Mercy University in 1994.

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Tenaga Pengkaji Harmonisasi, Strukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara pada Direktorat Jendral Kekayaan Negara./ In the course of his career, Head of the Regional Office of the Directorate General of State Assets, Reviewers of the Harmonization, Structure, Privatization and Effectiveness of State Assets at the Directorate General of State Assets.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to the position as Member of the Supervisory Board at Perum Jasa Tirta II, she does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemilik Modal. / She has no affiliation with other members of Supervisory Board, members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

Diklat Perencanaan Anggaran Bagi Pejabat Eselon 2 Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Diklat Kepemimpinan Tk. II angkatan XL Kelas A. / Budget Planning Training for Eselon 2 Officials of the Directorate General of State Assets, Tk Leadership Training. II class XL class A.



ROMY MARCANDI

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Usia / Age : 45 tahun / 45 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Tangerang Selatan / South Tangerang

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-92/MBU/03/2020 23 Maret 2020. / He has served as Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-92 / MBU / 03/2020 March 23, 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Magister dari Universitas Pembangunan Nasional. / He obtained a Master's degree from the National Development University.

Riwayat Karier / Employment History

Plt Asdep Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN. / Acting Assistant for Risk Management and Compliance of the Ministry of SOEs.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau memiliki rangkap jabatan sebagai plt. Asdep Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN. / In addition to serving as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he has concurrent positions as plt. Assistant Deputy for Risk Management and Compliance, Ministry of SOEs.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of Supervisory Board, members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

- Pemeriksaan Piutang Negara (Diklat Polri-Tahun 2001) / State Receivables Checker (Diklat Polri - Year 2001)
- Restrukturisasi Piutang Negara (UGM-Tahun 2002) / State Receivables Restructuring (UGM-Year 2002)
- Asset Appraisal for Financial Restructuring & Regional Autonomy (Queensland University of Technology-Tahun 2007) / Asset Appraisal for Financial Restructuring & Regional Autonomy (Queensland University of Technology-2007)
- Strengthening Private Sector Involvement in Public Asset Creation & Management (Queensland University of Technology-Tahun 2015) / Strengthening Private Sector Involvement in Public Asset Creation & Management (Queensland University of Technology-2015)



MOHAMAD SOFWAN

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Usia / Age : 33 tahun / 33 years old

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia

Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-392/MBU/10/2020 15 Desember 2020. / He has served as Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK392 / MBU / 10/2020 December 15, 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2012, Dan Magister dari Universitas Nahdatul Ulama pada tahun 2019. / He obtained a Bachelor of Management from Syarif Hidayatullah University, Jakarta in 2012, and a Masters degree from Nahdatul Ulama University in 2019.

Riwayat Karier / Employment History

Staf Ahli DPR RI, Staf Khusus-Dewan Pengarah BPIP RI. / Expert Staff to DPR RI, Special Staff to the Steering Committee of BPIP RI.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to the position as Member of the Supervisory Board Independent at Perum Jasa Tirta II, he does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of Supervisory Board, members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

-

Profil Direksi

Board of Directors Profile



IMAM SANTOSO

Direktur Utama
President Director

Usia / Age : 63 tahun / 63 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Jakarta Selatan / South Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / He served as President Director based on SK-350/MBU/10/2020 dated 27 October 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the President Director of Jasa Tirta II Public Company (Perum).

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil UGM pada tahun 1982, Master Sains dari Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University pada tahun 1990, dan Doktor dari Universitas Diponegoro pada tahun 2018. / He earned a Bachelor's degree in Civil Engineering from UGM in 1982, Master of Science from the Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University in 1990, and a Doctorate from Diponegoro University in 2018.

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero), dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. / In the course of his career, he has served as President Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero), and Director General of Water Resources, Ministry of PUPR.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to the position as President Director at Perum Jasa Tirta II, he does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi lainnya, dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of Supervisory Board, other members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

Workshop Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) secara Blended Learning, Peningkatan Kompetensi Teknis Pengajar Bidang SDA, Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator Pelatihan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK). / Workshop on Leadership Training (PKA) with Blended Learning, Technical Competence Improvement for Water Resources Teachers, Facilitator Capacity Development Training and Training of Workforce Competency Assessors (AKTK).



HARIS ZULKARNAIN

Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Usia / Age : 54 tahun / 54 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Bekasi

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM Perum Jasa Tirta II sejak 1 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-222/MBU/08/2018 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / He serves as the Finance & HR Director of Perum Jasa Tirta II since August 1, 2018 based on SOE Minister Decree SK 222/MBU/08/2018 concerning Termination of Change in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Public Corporation Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Tridiniati Palembang pada tahun 1992, Master Teknik Elektro dari Indian Institute Technology, India pada tahun 2001. / He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Tridiniati University, Palembang in 1992, Master of Electrical Engineering from Indian Institute Technology, India in 2001.

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Profesional Tingkat III Bidang Teknik, Divisi Satuan Pengawas Internal (2005), Kepala Sub Divisi Pemeliharaan Jaringan Listrik, Divisi PLTA (2005), Kepala Bagian Teknik, Divisi PLTA (2007), Kepala Unit Layanan Pengadaan, Divisi Unit Layanan Pengadaan (2011), Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Divisi PLTA (2012), Kepala Biro Perencanaan dan Penelitian & Pengembangan, Divisi Renlitbang (2013), Kepala Divisi Pengelolaan Air II, Divisi DPA II (2015), dan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II (2015). / In his career at Perum Jasa Tirta II, he served as a Professional Staff in Lvl III Engineering, Internal Control Unit Division, 2005; Head of Sub. Electricity Maintenance Division, Hydroelectric Division, 2005; Head of Engineering Division, Hydroelectric Division, 2007; Head of Procurement Services Unit, Procurement Unit Division, 2011; Head of Bureau of Planning and Head of PLTA Division, 2012; Head of Planning and Research & Development Bureau, Renlitbang Division, 2013; Head of Water Management Division II, Division of DPA II, 2015; Corporate Secretary at Perum Jasa Tirta II since 2015 to date.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perum Jasa Tirta II, beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris di Entitas Anak, PT Jasa Tirta Luhur. / In addition to serving as Finance and HR Director of Perum Jasa Tirta II, he also serves as a Commissioner in a Subsidiary, PT Jasa Tirta Luhur.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya, dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with members of the Supervisory Board, other members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated

Pelatihan yang pernah diikuti, yaitu sebagai pembicara pada AWHOT Asian Water Council di Nepal (2015). / The training that has been followed, namely as a speaker at the AWHOT Asian Water Council in Nepal (2015).



ANTON MARDIYONO

Direktur Operasi dan
Pemeliharaan
Operation and Maintenance
Director

Usia / Age : 46 tahun / 46 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Cimahi

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II sejak 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK - 196/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since June 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998) dan Magister WRDM di IIT Roorkee New Delhi, India (2006). / He obtained a Bachelor of Civil Engineering degree from Diponegoro University (1998) and a Masters in WRDM at IIT Roorkee New Delhi, India (2006).

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian dan Pengelolaan Data & Alokasi Air (2014), Kepala Divisi Pengelolaan Air II (2015), Kepala Divisi Rencana Strategis & Litbang (2016), General Manajer Wilayah III (2017), General Manajer Unit Usaha Wilayah I (2018), Kepala Divisi Pengembangan Usaha (2019), dan Komisaris PT Jasa Tirta Luhur (2020 sd sekarang). / In his career at Perum Jasa Tirta II, he served as Head of Data & Water Allocation of Controlling and Management Bureau, 2014; Head of Water Manajement Division II, 2015; Head of Planning and Research & Development Bureau, 2016; General Manager of Wilayah III, 2017; General Manager of Wilayah I, 2018, Head of Business Development, 2019 and Commisioner of PT Jasa Tirta Luhur (since 2020 until now).

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, beliau merangkap jabatan sebagai komisaris di Entitas Anak, PT Jasa Tirta Luhur. / In addition to serving as Director of Operations and Maintenance of Perum Jasa Tirta II, he also serves as a Commisioner in a Subsidiary, PT Jasa Tirta Luhur.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lainnya, dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with members of the Supervisory Board, other members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Training

Peserta Twinning Program on Integrated Water Resources Management (Beasiswa NARBO-2007), Peserta Dam Operation and Maintenance Expert Training (Beasiswa JICA-2010), Pembicara di Hydro International Conference and Exhibition , Italy (2014), dan Peserta Webinar KNIBB tentang waduk dan PLTA dan Pembangunan Bendungan (2020). / Participants of the Twinning Program on Integrated Water Resources Management (NARBO-2007 Scholarship), Participants of Dam Operation and Maintenance Expert Training (JICA-2010 Scholarships), Speakers at the Hydro International Conference and Exhibition, Italy (2014), and Participants of the KNIBB Webinar on reservoirs and hydropower and Dam Construction (2020).



INDRIANI WIDIASTUTI

Direktur Pengembangan Usaha
Director of Business
Development

Usia / Age : 53 tahun / 53 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Beliau menjabat sebagai Ke Direktur Pengembangan Usaha sejak tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK - 196/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / She has served as Director of Business Development since June 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / Educational Background

Beliau memperoleh gelar Sarjana Sains dari UGM tahun 1993, Master Teknologi Informasi dari UI tahun 2007, dan MBA dari UGM tahun 2019. / He obtained his Bachelor of Science degree from UGM in 1993, Master of Information Technology from UI in 2007, and MBA from UGM in 2019.

Riwayat Karier / Employment History

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat Dewan Pengawas Perum Perhutani sampai dengan September 2019-Juni 2020, Asdep Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, Komisaris PT Asuransi Jiwasraya. / In the course of his career, he served on the Supervisory Board of Perum Perhutani until September 2019-June 2020, Deputy Assistant for Transportation Facilities and Infrastructure Construction II Ministry of SOEs, Commissioner of PT Asuransi Jiwasraya.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Selain menjabat sebagai Direksi Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to serving as Director of Perum Jasa Tirta II, he does not have concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi / Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi lainnya, dan Pemilik Modal. / She has no affiliation with other members of Supervisory Board, other members of the Board of Directors, and Capital Owner.

Pelatihan yang Diikuti / Training

Pelatihan yang pernah diikuti, Business Model Canvas, PPM Manajemen. Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA Universitas Indonesia. / The training that has been followed, Business Model Canvas, PPM Management. Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA University of Indonesia.

Daftar Nama Pengurus dan Organ Dewan Pengawas

List of Names of Management and Organs of the Supervisory Board

PENGURUS PERUM JASA TIRTA II

Daftar Nama Pengurus Perum Jasa Tirta II per 31 Desember 2020 :

PERUM JASA TIRTA II MANAGEMENT

List of Management of PT Perum Jasa Tirta II as of December 31, 2020 :

Nama / Name	Jabatan / Position	No. SK	Periode Masa Jabatan / Terms of Office
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Supervisory Board	SK - 340/MBU10/2020 21 Oktober 2020 / October 21, 2020	Sejak 21 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / Since 21 October 2020 until now
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	SK - 92/MBU/03/2020 23 Maret 2020 / March 23, 2020	Sejak 23 Maret 2020 sampai dengan sekarang / Since March 23, 2020 until now
Nuning Sri Rejeki W	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	SK - 4/MBU/01/2020 3 Januari 2020 / January 3, 2020	Sejak 3 Januari 2020 sampai dengan sekarang / Since January 3, 2020 until now
Mohamad Sofwan	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	SK - 392/MBU/10/2020 15 Desember 2020 / December 15, 2020	Sejak 15 Desember 2020 sampai dengan sekarang / Since 15 December 2020 until now
Imam Santoso	Direktur Utama / President Director	SK - 350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 / October 27, 2020	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / Since 27 October 2020 until now
Haris Zulkarnain	Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	SK - 222/MBU/08/2018 1 Agustus 2018 / August 1, 2018	Sejak 1 Agustus 2018 sampai dengan sekarang / Since August 1, 2018 until now
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance Director	SK - 196/MBU/06/2020 11 Juni 2020 / June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since 11 June 2020 until now
Indriani Widiastuti	Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	SK - 196/MBU/06/2020 11 Juni 2020 / June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since 11 June 2020 until now

ORGAN DEWAN PENGAWAS

Daftar Nama Organ Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II per 31 Desember 2020 :

ORGANS OF THE BOARD OF SUPERVISORY

List of Names of Supervisory Board Organs of Perum Jasa Tirta II as of December 31, 2020 :

Nama / Name	Jabatan / Position	No. SK	Periode Masa Jabatan / Terms of Office
Hartanto (Menggantikan Arif Munzaini)	Pemberhentian & Pengangkatan Ketua Komite Audit / Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee	KEP-04/DEWAS/II/2020 3 Januari 2020 / January 3, 2020	Sebagai Ketua Komite Audit sejak 3 Januari 2020 s/d 21 Oktober 2020 / As Chairman of the Audit Committee from January 3, 2020 to October 21, 2020
Hartanto (Dari Anggota menjadi Ketua Dewas)	Pemberhentian, Pengalihan Tugas & Pengangkatan / Dismissal, Transfer of Tasks & Appointment	SK-4/MBU/01/2020 3 Januari 2020 / January 3, 2020	Sejak 3 Januari dari anggota menjadi Ketua Dewas sampai dengan 21 Oktober 2020 / Since January 3, from a member to become Chairman of the Dewas until October 21, 2020
Kandianawati	Anggota Komite Pemantauan Resiko / Risk Monitoring Committee Member	85/Dewas/XI/2020 5 November 2020 / November 5, 2020	Sejak 5 Nov 2020 sampai dengan sekarang / From 5 Nov 2020 until now
Romy Marcandi	Ketua Komite Pemantauan Resiko / Chairman of the Risk Monitoring Committee	85/Dewas/XI/2020 5 November 2020 / November 5, 2020	Dari tanggal 5 november 2020 sampai dengan sekarang / From 5 November 2020 until now
Kelik Wirawan Wahyu Widodo, Nuning Sri Rezeki Wulandar, Romy Marcandi	Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee	KEP-86/DEWAS/XI/2020	
Bambang Samudra Harimukti	Perpanjangan Masa tugas Staf Komite Audit / Extension of Audit Committee staff tenure	KEP- 05/DEWAS/1/2018	Staf Komite Audit sejak 15 Januari 2018 s/d sekarang / Audit Committee staff since 15 January 2018 up to now



Nama / Name	Jabatan / Position	No. SK	Periode Masa Jabatan / Terms of Office
Umi Gita Nugraheni	Pemberhentian & Pengangkatan Sekretaris Dewas / Dismissal & Appointment of Secretary of Dewas	KEP- 62/DEWAS/10/2017 30 Oktober 2017 / October 30, 2017	Dari Tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan sekarang (31 Desember 2021) / From 30 October 2017 until now (31 December 2021)
U. Saefudin Noer	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) / Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	SK-209/MBU/6/2020 18 Juni 2020 / June 18, 2020	Dari tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2020 / From March 6, 2019 to June 18, 2020
U. Saefudin Noer	Pengangkatan Direktur Utama PJT II / Appointment of the President Director of PJT II	SK-62/MBU/3/2019 6 Maret 2019 / March 6, 2019	
Royza Fauzi	Anggota Komite Audit / Audit Committee Members	KEP- 17/Dewas/IV/2019 15 April 2019 / April 15, 2019	Dari tanggal 15 April 2019 sampai dengan sekarang / From April 15, 2019 until now
Riad Oscha Chalik	Anggota Dewas PJT II Diangkat melalui SK- 71/ MBU /3/2016 tanggal 29 Maret 2016 / Members of Dewas PJT II Appointed through SK-71 / MBU / 3/2016 dated March 29, 2016	SK 340/MBU/10/2020 (Pengukuhan tanggal 21 Oktober 2020) Keputusan RUPS Luar Biasa PT. PUPUK Kujang tanggal 25 Agustus 2020 / SK 340/ MBU/10/2020 (Inauguration dated October 21, 2020) Resolution of the Extraordinary GMS of PT. PUPUK Kujang dated August 25, 2020	Dari tanggal 29 Maret 2016 s.d 25 Agustus 2020 / From 29 March 2016 to 25 August 2020

Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi

Profile of Officials One Level Below the Board of Directors



**NANDANG MUNANDAR,
SE, M. AKT**

Sekretaris Perusahaan, Sekretariat Perusahaan /
Corporate Secretary, Corporate Secretariat.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 12 Februari 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP dan Magister Akuntansi dari Budi Luhur Jakarta (2010). / Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 12, 1972. He obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP and Master's Degree in Accounting from Budi Luhur Jakarta (2010).



HERI HERMAWAN, SE

Kepala Satuan Pengawasan Intern /
Head of Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).



ANDRIYANTO, SE., M.M

Kepala Divisi Pengendalian Kinerja, Risiko dan Sistem Manajemen / Head of the Division of Performance Control, Risk and Management Systems.

Warga Negara Indonesia, lahir di Subang, 15 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Pasundan, Bandung (1994) dan gelar Magister Manajemen Bisnis dari Universitas Widyatama, Bandung (2017). / Indonesian citizen, born in Subang, on February 15, 1971. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from Pasundan University, Bandung in 1994 and a Master of Business Management degree from Widyatama University, Bandung (2017).



UDIEN YULIANTO, ST., M.TECH

Kepala Divisi Renstra dan TIK / Head of Strategic Planning and ICT Division.

Warga Negara Indonesia Lahir di Sidoarjo 10 Juli 1970. Memperoleh gelar sarjana pengairan dari Universitas Brawijaya, Master Teknik Pengairan dari University Of Roorke. / Indonesian citizen Born in Sidoarjo July 10, 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorke.



DERI DAMANHURI, SE., MM

Kepala Divisi Umum dan Program Kemitraan Bina Lingkungan / Head of General Division and Community Development Partnership Program.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 23 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari UNPAS. Gelar Magister Management dari Universitas Widyatama. / Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 23, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from UNPAS. Master's Degree in Management from Widyatama University.



EUIS RINA RISMAYANTI, SE., MM

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia / Head of Human Resources Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Unisba dan Master Manajemen dari Universitas Tama Jagakarsa. / Indonesian citizen, born in Bandung, November 19, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Unisba and Master Management from Tama Jagakarsa University.



**HERRY
RACHMADYANTO,
ST., MM., MSC**

Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan SDA dan SDL /
Head of Operation and Maintenance Division of SDA and
SDL.

Warga Negara Indonesia, Lahir di Lansia pada 12 Juni 1977. Memperoleh gelar sarjana teknik dari ITB tahun 2000, Master Manajemen dari UGM, dan Master Teknik Pengairan dari Institute For Water Education, Netherlands. / Indonesian citizen, born in Lansia on June 12, 1977. Obtained a bachelor's degree in engineering from ITB in 2000, Master of Management from UGM, and Master of Water Engineering from Institute For Water Education, Netherlands.



**I.S BUDI SATRIJO, SH.,
MH**

Kepala Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan / Head of the Inventory, Asset and Records Control Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 27 April 1968. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1983) dan gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran. / Indonesian citizen, born in Bandung on April 27, 1968. He obtained Bachelor of Laws degree from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1983, and Business Law Masters Degree from Padjadjaran University.



**HERRISON TOGATOROP,
SE., AK**

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi /
Head of Finance and Accounting Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 2 Juni 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (1999). / Indonesian citizen, born in Medan on June 2, 1972. He earned a Bachelor of Economics degree at the University of North Sumatra (1999).



BUDIYO, ST

Kepala Divisi Supervisi Teknik /
Head of Technical Supervision Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 12 April 1972. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS (1998). / Indonesian citizen, born in Bandung on April 12, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1998).



JOHN RICO, ST., MT

General Manajer Unit Wilayah I /
General Manager Unit Region I

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 19 April 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik sipil dari Universitas Andalas (1996), dan Master Teknik Pengairan dari ITS Bandung pada tahun 2003. / Indonesian citizen, born in Jakarta on April 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from Andalas University (1996), and a Master of Water Engineering from ITS Bandung in 2003.



RESKY HERAVENO, ST

General Manajer Wilayah II /
General Manager Region II

Negara Indonesia lahir di Tanjung Pandan pada 22 Februari 1971. Memperoleh gelar Teknik Sipil pada tahun 1995. / The State of Indonesia was born in Tanjung Pandan on February 22, 1971. Obtained a Civil Engineering degree in 1995.



FEMBRI SETYAWAN, ST

General Manajer Unit Wilayah III /
General Manager of Region III Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 3 November 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (2000). / Indonesian citizen, born in Nganjuk on November 3, 1975. He obtained Bachelor's degree in Water Engineering from Brawijaya University, Malang (2000).



**MARIO MORA
PANGESTU, ST., MM**

General Manajer Unit Wilayah IV /
General Manager of Regional Unit IV.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Februari 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Merdeka Malang (1996) dan gelar Magister Manajemen dari STIE-IPWIJA (2004). / Indonesian citizen, born in Jakarta on February 13, 1969. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from the Merdeka University of Malang (1996), and Master of Management from STIE- IPWIJA Jakarta (2004).



AGUS KUSNADI, ST., ME

General Manajer PLTA /
General Manager of Hydroelectric Power.

Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 5 Februari 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1996) dan gelar ME dari Universitas Padjadjaran (2009). / Indonesian citizen, born in Tasikmalaya, on February 5, 1970. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from Pasundan University (1996), and a ME degree from Universitas Padjadjaran (2009).



BIMA KAWINDRA, ST

Kepala Divisi Pengembangan Usaha /
Head of Business Development Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 28 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998). / Indonesian citizen, born in Yogyakarta, on May 28, 1974. He obtained Bachelor's degree in Civil Engineering from Diponegoro University (1998).



**RIMPUN RAJAB
HARAHAP, SE., MM**

Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan /
Head of Commercial and Customer Service Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (1997) dan Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2012). / Indonesian citizen, born in Jakarta, August 31, 1972. He obtained Bachelor of Economics in Management at the University of Prof. Dr. Moestopo (Religion) in 1997 and Master of Management at Budi Luhur University (2012).



**DADAN HIDAYAT, ST.,
ME**

General Manajer Unit Usaha Pariwisata dan Hotel /
General Manager of the Tourism and Hotel Business Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 19 November 1973. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITENAS (1998) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (2010). / Indonesian citizen, born in Cirebon, 19 November 1973. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from ITENAS (1998) and a Masters degree in Economics from Padjadjaran University (2010).



**BUDY GUNADY, ST.,
MPSDA**

Project Manager Information Communication and Technology / Information Communication and Technology Project Manager.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 11 November 1969. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjadjaran (1995) dan Magister dari Institut Teknologi Bandung (2010). / Indonesian citizen, born in Bandung on November 11, 1969. Obtained Bachelor's degree from UNPAD in 1995 and Masters from ITB (2010).



**DADANG HIDAYAT, ST.,
MT**

Project Manager SPAM /
Project Manager SPAM.

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 6 November 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1997) dan gelar Magister Teknik Mesin dari Universitas ISTN (2012). / Indonesian citizen, born in Ciamis, on November 6, 1970. He obtained a Bachelor of Engineering degree in Mechanical Engineering from UNPAS (1997) and a Masters in Mechanical Engineering from ISTN University (2012).



**EMIL MUHAMMAD NUR,
ST**

Project Manager Energy Baru Terbarukan /
New and Renewable Energy Project Manager.

Warga Negara Indonesia lahir di Bandung pada 29 November 1976. Memperoleh gelar sarjana elektro dari Univ Ahmad Yani pada 1998. / Indonesian citizen born in Bandung on November 29, 1976. Obtained a bachelor's degree in electrical engineering from Univ Ahmad Yani in 1998.



IMAS AAN, SE., MM

Project Manager Holding AMDK /
Project Manager Holding AMDK

Warga Negara Indonesia, lahir di Garut, 13 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari Ikopin Jatinangor (1996) dan gelar Magister Keuangan dari Universitas Tama Jagakarsa (2005). / Indonesian citizen, born in Garut on November 13, 1972. He obtained a bachelor's degree from Ikopin Jatinangor (1996) and a Masters in Finance from the University of Tama Jagakarsa (2005).



**CUCU HARNANTO, ST.,
MM**

Project Manager Pengembangan Wilayah /
Regional Development Project Manager

Warga negara Indonesia Lahir di Majalengka 13 Desember 1971. Memperoleh gelar Maaster dari Universitas Bhayangkara. / Indonesian citizen Born in Majalengka December 13, 1971. Obtained a Master's degree from Bhayangkara University.



**RENI MAYASARI, ST.,
M.Si**

Project Manager Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi / Project Manager for Tourism and Destination Infrastructure Development.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 9 Agustus 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Islam Bandung (2000) dan gelar Master Kebijakan Publik dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2006). / Indonesian citizen, born in Purwakarta on August 9, 1975. She obtained Bachelor degree in engineering from Bandung Islamic University (2000) and Master degree from Krisnadwipayana University, Jakarta (2006).



AGUS SURANTO, IR., MM

Project Manager Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan/
Project Manager for Optimizing BMN and Company Assets.

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 27 April 1967. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1991) dan gelar Magister Manajemen dari STIE Widya Jayakarta (2003). / Indonesian citizen, born in Semarang, Central Java on April 27, 1967. He pursued his undergraduate degree in Civil Engineering from Sebelas Maret University, Solo (1991) and a Master degree in Management from STIE Widya Jayakarta, Jakarta (2003).



**OYOK MUSTIKASARI, SE.,
MM**

Special Expertise Tingkat I, Bidang Pemeriksaan, Satuan Pengawasan Intern / Special Expertise Level I, Field of Examination, Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 6 Februari 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana (1990). / Indonesian citizen, born in Purwakarta on February 6, 1966. Obtained Bachelor of Economics in Management from Krisna Dwipayana University, Jakarta (1990).



DINDIN HENDRIANA, ST

Special Expertise Tingkat I, Bidang Pemeriksaan, Satuan Pengawasan Intern / Special Expertise Level I, Field of Examination, Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 19 Januari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS Bandung (1997). / Indonesian citizen, born in Karawang on January 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1997).



ANOM SOAL HERUDJITO, ST., MT

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and / or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance.

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 25 Februari 1974. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1997) dan gelar Magister Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2007). / Indonesian citizen, born in Sukabumi, on February 25, 1974. He obtained his undergraduate degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1997) and a Master degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (2007).



DEWI SYAFITRI, ST.

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and/or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Desember 1969. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Pancasila (1995). / Indonesian citizen, born in Jakarta on December 12, 1969. She obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from the University of Pancasila (1995).



ESTHI PAMBANGUN, SE

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and/or Performance Analysis of the Directorate of Business Development.

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 2 Juli 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1998). / Indonesian citizen, born in Semarang on July 2, 1976. He obtained Bachelor of Economics Degree from Universitas Diponegoro (1998).



**ADE FERRY
FIRMANSYAH, SE., MM**

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and / or Performance Analysis of the Directorate of Business Development.

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 29 Desember 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (1998) dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia (2004). / Indonesian citizen, born in Ciamis on December 29, 1974. He earned a bachelor's degree in economics from the Islamic University of Indonesia (1998) and a Masters in Economics from the University of Indonesia (2004).



KASWA, SE., MM

Direktur Utama merangkap Direktur Investasi Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II yang disetarakan dengan Special Expertise Tk. I di Perum Jasa Tirta II / President Director concurrently Director of Perum Jasa Tirta II Pension Fund Investment which is equivalent to Special Expertise Tk. I at Perum Jasa Tirta II.

Warga Negara Indonesia, lahir di Kuningan, 15 Juni 1965. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Tridarma Bandung (2002) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Tama Jagakarsa (2006). / Indonesian citizen, born in Kuningan on June 15, 65. He obtained Bachelor of Economics from the STIE Tridarma Bandung in 2002 and Master of Management degree from Tama Jagakarsa University (2006).



ANDRIJANTO, Ir., MT

Direktur Utama PT. Jasa Tirta Luhur / President Director of PT. Jasa Tirta Luhur.

Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, 5 Maret 1968. Memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Magister Manajemen SDA dari Institut Teknologi Bandung (2007). / Indonesian citizen, born in Pangkal Pinang, March 5, 1968. He obtained a degree in Engineering from Bandung Institute of Technology (1993) and Masters of Water Resources Management from the Bandung Institute of Technology (2007).



EEF SYAEFUL AMIEN, SE.

Direktur Investasi Dana Pensiun Jasa Tirta II / Investment Director of Jasa Tirta II Pension Fund.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 6 Oktober 1969. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Malangkecawara (1993) dan gelar Magister dari Universitas Widyatama Bandung (2018). / Indonesian citizen, born in Purwakarta on October 6, 1969. He obtained his Bachelor of Economics from STIE Malangkecawara in 1993 and Masters Degree from University of Widyatama, Bandung (2018).

Komposisi Pemilik Modal

Capital Owner Composition



Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri

100%

PERUM JASA TIRTA II
Milik Pemerintah
Republik Indonesia

Profil Entitas Anak

Subsidiaries Profile



Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri



JATILUHUR

PT JASA TIRTA LUHUR



PT TEGAR MANDIRI CEMERLANG



Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure



99%

PT JASA TIRTA LUHUR

Jl. Insinyur H. Juanda No. 124 D
Bekasi, Jawa Barat 17113



51%

PT TEGAR MANDIRI CEMERLANG

Kawasan Industri Pergudangan Marunda Center
Blok G No. 1 Jl. Marunda Timur Kabupaten Bekasi.



Kronologi Pencatatan Saham & Obligasi

Chronology of Share and Bond Listing

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perum Jasa Tirta II belum mencatatkan saham dan/atau obligasi di bursa mana pun. Kepemilikan modal 100% milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

As of December 31, 2020, Perum Jasa Tirta II has not listed shares and/or bonds on any stock exchange. The Company is 100% owned by The Republic of Indonesia.

Sekilas Tentang Anak Perusahaan

Subsidiaries at a Glance



PT JASA TIRTA LUHUR

PT Jasa Tirta Luhur didirikan pada tanggal 29 Agustus 2018 dan memulai operasi komersial pada tahun yang sama. Perusahaan bergerak dalam bidang jasa sistem penyediaan air minum dan konstruksi. Total aset dan liabilitas PT Jasa Tirta Luhur masing-masing sebesar Rp29.805 juta dan Rp6,5 juta. Total pendapatan Perusahaan tahun 2019 berjumlah Rp75 juta dengan total beban pokok pendapatan sebesar Rp465 juta sehingga membukukan rugi bruto sebesar Rp390 juta dan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp3,47 miliar. Perusahaan memiliki 1 (satu) anak usaha yaitu PT Tegar Mandiri Cemerlang.

Saat ini, kantor PT Jasa Tirta Luhur beralamat di Jl. Insinyur H. Juanda No. 124 D Bekasi, Jawa Barat 17113.

PT Jasa Tirta Luhur was established on August 29, 2018 and started commercial operations in the same year. The Company engaged in drinking water supply and construction systems. The total assets and liabilities of PT Jasa Tirta Luhur amounted to Rp29,805 million and Rp6,5 million respectively. The Company's total revenue for 2019 is Rp75 million with total cost of revenue of Rp465 million, resulting in gross loss of Rp390 million and net loss for the year of Rp3.47 billion. The company has a subsidiary, namely PT Tegar Mandiri Cemerlang.

Currently, PT Jasa Tirta Luhur office is located at Jl. Insinyur H. Juanda No. 124 D Bekasi, Jawa Barat 17113.



PT TEGAR MANDIRI CEMERLANG

PT Tegar Mandiri Cemerlang berdiri pada tanggal 16 Mei 2013 dan memulai operasi komersial pada tahun 2018. Perusahaan bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik (desain konstruksi fasilitas umum). Total aset dan liabilitas PT Tegar Mandiri Cemerlang masing-masing sebesar Rp43,83 miliar dan Rp24,97 miliar. Total pendapatan Perusahaan tahun 2019 berjumlah Rp75 juta dengan total beban pokok pendapatan sebesar Rp465 juta sehingga membukukan rugi bruto sebesar Rp390 juta dan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp1,16 miliar.

Saat ini, kantor PT Tegar Mandiri Cemerlang beralamat di Kawasan Industri Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1 Jl. Marunda Timur Kabupaten Bekasi.

PT Tegar Mandiri Cemerlang was established on May 16, 2013 and started commercial operations in 2018. The Company is engaged in technical consultancy (design construction facilities). The total assets and liabilities of PT Tegar Mandiri Cemerlang are Rp43.83 billion and Rp24.97 billion respectively. Total revenue of the Company in 2019 amounted to Rp75 million with a total cost of revenue at Rp465 million, thereby recording gross loss at Rp390 million and net loss for the year at Rp1.16 billion.

Currently, PT Tegar Mandiri Cemerlang office is located at Kawasan Industri Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1 Jl. Marunda Timur Kabupaten Bekasi.



Informasi Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan

Information on Company Supporting Institution and/or Professional

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	
Nama Lembaga / Name of Institution	KAP Djoko, Sidik & Indra
Alamat / Address	Graha Mandiri Jl. Imam Bonjol No. 61 Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tel. +62 21 4259670
Surat Penunjukan / Appointment Letter	SP-03/KA.DKS/09/2020
Periode Penunjukan / Appointment Period	Tahun Buku 2020
Jasa yang Diberikan / Service(s) Rendered	Melakukan Audit Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2020 Perum Jasa Tirta II / Audit Annual Report and Consolidated Financial Statements of Perum Jasa Tirta II for Fiscal Year 2020
Biaya Jasa / Fees	Rp 417.450.000

Konsultan Hukum / Legal Consultant	
Nama Lembaga / Name of Institution	Kantor Hukum Fajar, Agung & Partner Fajar, Agung and Partner Law Firm
Alamat / Address	Gedung Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jabar, Jl Sukabumi No. 42 Kota Bandung
Surat Penunjukan / Appointment Letter	SPK.JKons-06/Sekper.DU/II Tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Hukum Penyelesaian Perkara 2020
Periode Penunjukan / Appointment Period	36 hari kalender terhitung sejak 27 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Appointment Period 36 calendar days from November 27, 2020 to December 31, 2020
Jasa yang Diberikan / Service(s) Rendered	Melaksanakan jasa hukum penyelesaian perkara yaitu berupa bantuan hukum diluar maupun didalam pengadilan serta pendapat hukum dalam rangka mitigasi resiko hukum yang dihadapi oleh perusahaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). / Carry out legal services for settlement of cases, namely in the form of legal assistance outside and inside the court as well as legal opinions in the context of mitigating legal risks faced by the company in accordance with the Terms of Reference (TOR).
Biaya Jasa / Fees	Rp1.400.000.000

Informasi pada Website Perusahaan

Information on Company Website

Sebagai bentuk transparansi dan penyediaan kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan memiliki situs web/website resmi perusahaan yang memuat informasi mengenai kinerja perusahaan dan diperbaharui secara berkala. Website tersebut dapat diakses pada alamat www.jasatirta2.co.id.

Website resmi Perusahaan telah memuat informasi sebagai berikut:

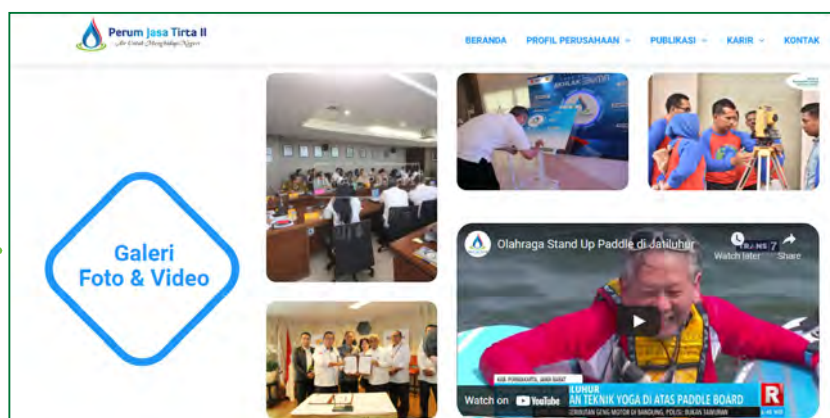
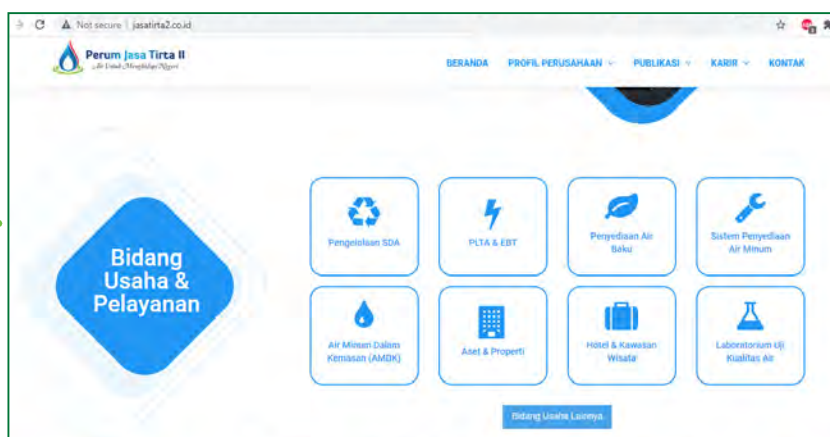
1. Profil Perusahaan
2. Berita & Informasi
3. Data Hidrologi
4. Bidang Usaha & Pelayanan
5. Keterbukaan Informasi Publik
6. Publikasi
 - Berita Perusahaan
 - Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa
 - Press Release
 - CSR
7. Karir
8. Link
9. E-Bulletin
10. E-Kaleidoskop
11. Layanan Pelanggan
12. Kontak

As a form of transparency and providing easy access to information for all stakeholders, the Company has an official website that contains information about the company's performance and is updated regularly. The website can be accessed at www.jasatirta2.co.id.

The official website of the Company has the following information:

1. Company Profile
2. News & Information
3. Hydrological Data
4. Line of Business & Services
5. Disclosure of Public Information
6. Publication
 - Company News
 - Announcement of Goods & Services Procurement
 - Press Release
 - CSR
7. Career
8. Link
9. E-Bulletin
10. E-Kaleidoscope
11. Customer service
12. Contact

Tampilan Website
Perum Jasa Tirta II /
Website View
Perum Jasa Tirta II





Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern

Education and / or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pada tahun 2020, Dewan Pengawas dan Direksi telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa sebagai pembicara seminar, dan/atau workshop melalui online dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19.

BOARD OF DIRECTORS EDUCATION AND/OR TRAINING

In 2020, the Board of Directors has participated in a number of competency development programs in the form of seminar speakers and / or online workshops due to the Covid 19 pandemic outbreak.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE AUDIT

Pada tahun 2020, Komite Audit telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa sebagai pembicara seminar, dan/atau workshop melalui online dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19.

AUDIT COMMITTEE EDUCATION AND/OR TRAINING

In 2020, the Audit Committee has participated in a number of competency development programs in the form of seminar speakers, and / or online workshops due to the Covid 19 pandemic outbreak.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop. Uraian mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2020 tercantum pada tabel berikut:

CORPORATE SECRETARY EDUCATION AND/OR TRAINING

In 2020, the Corporate Secretary have participated in a number of competency development programs in the form of training, education, seminars, and/or workshops. A description of the education and/or training that the Corporate Secretary participated in 2020 is listed in the following table:

Nama / Name	Jabatan / Position	Materi Pelatihan / Training Materials	Tanggal Pelatihan / Training Date	Lokasi Pelatihan / Training Location
Nandang Munandar, SE, M. Akt	Sekretaris Perusahaan	Building Service Culture	2020	Jakarta
		Company Strategic Planing		Jakarta
		SQ Transformational Leadership		Jakarta
		Webinar : How to Understand Government Policy and Take Action for Your Business		Perum Jasa Tirta II

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

OVERVIEW OF BUSINESS SUPPORT





TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

OVERVIEW OF BUSINESS SUPPORT

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perusahaan optimis bahwa SDM unggul mampu membawa Perusahaan pada pencapaian usaha yang lebih baik secara berkelanjutan.

The Company is optimistic that excellent HR is able to bring the Company to achieve better business sustainability.



Sumber Daya Manusia memiliki peran penting sebagai katalisator penggerak keberlangsungan usaha Perusahaan, sehingga kehadirannya dimaknai sebagai aset utama Perusahaan yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Kehadiran SDM terbaik yang profesional, kompeten, berdedikasi, dan berintegritas akan membuat Perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, Perum Jasa Tirta II telah mengembangkan kebijakan akomodatif dalam pengelolaan SDM dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis Perusahaan, di antaranya Sistem Kinerja Berbasis Kompetensi yang terdiri dari Kamus Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan, Sistem Penilaian Kinerja, Pengembangan Kompetensi Karyawan Pembinaan dan Pengembangan Karir Karyawan, Pembentukan Komite Appraisal, dan Sistem Remunerasi Karyawan. Berbekal kebijakan pengelolaan tersebut, Perusahaan optimis dapat mencetak SDM unggul yang mampu membawa Perusahaan pada pencapaian usaha yang lebih baik secara berkelanjutan.

Human Resources have an important role as a catalyst for driving the Company's business continuity, so that its presence is interpreted as the Company's main asset that requires good management. The presence of the best human resources who are professional, competent, dedicated, and with integrity will make the Company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve the vision and mission that has been set. In order to fulfill these interests, Perum Jasa Tirta II has developed an accommodative policy in HR management based on the Company's strategy and business plan, including a Competency-Based Performance System consisting of a Competency Dictionary and Position Competency Needs, Performance Assessment System, Employee Competency Development Coaching and Employee Career Development, Establishment of Appraisal Committee, and Employee Remuneration System. Armed with these management policies, the Company is optimistic that it can produce superior human resources who are able to lead the Company to achieve better business achievements on an on going basis.



STRUKTUR PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM di Perum Jasa Tirta II berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan & SDM. Saat ini, Kepala Divisi SDM dijabat oleh Euis Rina Rismayanti. Profil beliau telah tercantum pada Laporan Tahunan ini, di bagian Profil Kepala Divisi.

HR MANAGEMENT STRUCTURE

HR management at Perum Jasa Tirta II is under the Human Resources Division, which reports to the Director of Finance & HRD. At present, the Head of the HR Division is held by Euis Rina Rismayanti. His profile is contained in this Annual Report, in the Division Head Profile section.



TUGAS POKOK DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pengelolaan organisasi;
- Membuat peraturan kepegawaian dan sumber daya yang meliputi pengembangan organisasi, budaya kerja, dan peraturan dan prosedur kepegawaian;
- Perencanaan karyawan;
- Pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan;
- Pembinaan pengamanan.

MAIN DUTIES OF THE HUMAN RESOURCES DIVISION

The Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has the following main duties and responsibilities:

- Organizational management;
- Issue staffing and resource regulations covering organizational development, work culture, and staffing rules and procedures;
- Employee planning;
- Employee development and training, employee welfare, health and safety;
- Security training.

PROGRAM DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Program kerja Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

- Memastikan rencana kerja dan anggaran yang disusun telah mempertimbangkan risiko;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Memastikan adanya rencana strategi jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai kebijakan dan pengelolaan organisasi, peraturan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia;
- Menjamin berjalannya kegiatan pemenuhan dan alokasi karyawan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta kebutuhan perusahaan.
- Menjamin terlaksananya program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan potensi karyawan;
- Menjamin pengelolaan data kepegawaian secara terintegrasi dan berbasis sistem informasi;
- Memberi bimbingan teknis dan sosialisasi kepada unit kerja dalam hal pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain terkait dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Membuat pelaporan kinerja penyelenggaraan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya.

KOMPOSISI DAN JUMLAH KARYAWAN PERUM JASA TIRTA II

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perusahaan tercatat sebanyak 1.080 orang, berkurang sebanyak 24 orang dibandingkan jumlah pegawai tahun 2019 sebanyak 1.104 orang. Informasi demografi karyawan Perusahaan berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, level jabatan, kompetensi, dan status kepegawaian dimuat pada tabel-tabel berikut :

HUMAN RESOURCES DIVISION PROGRAM

The work programs of Perum Jasa Tirta II Human Resources Division are as follows:

- Ensure that the proposed work plan and budget has taken risks into consideration;
- Carry out supervision and training of the implementation of organizational development activities, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;
- Ensure that there are short, medium and long-term strategic plans regarding organizational policies and management, staffing regulations and human resources management;
- Ensuring the fulfillment and allocation of employee activities in accordance with applicable provisions and procedures and company needs.
- Ensure the implementation of education programs, training, and employee development in accordance with company needs and employee potential;
- Guarantee the management of staffing data in an integrated and information-based system;
- Provide technical guidance and dissemination to work units in terms of organizational development, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;
- Coordinate and build work relations with other work units related to other parties in carrying out their duties;
- Prepare a performance report on the implementation of tasks in accordance with their fields.

COMPOSITION AND NUMBER OF EMPLOYEES OF PERUM JASA TIRTA II

As of December 31, 2020, the number of employees of the Company was recorded at 1,080 people, a decrease of 24 people compared to the number of employees in 2019 of 1,104 people. Demographic information of the Company's employees based on age, education, gender, position level, competence, and employment status is contained in the following tables :



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition based on Age

Usia / Age	Jumlah Karyawan / Number of Employees				
	2020	2019	2018	2017	2016
18-25	99	147	143	191	190
26-35	356	340	243	103	212
36-45	326	328	304	244	341
46-55	299	288	241	342	251
> 55	0	1	0	132	0
Jumlah / Total	1.080	1.104	964	979	994

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin / Gender	Jumlah Karyawan / Number of Employees				
	2020	2019	2018	2017	2016
Perempuan / Female	198	197	178	169	164
Laki-laki / Male	882	907	786	810	830
Jumlah / Total	1.080	1.104	964	979	994

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Employee Composition based on Education

Pendidikan / Education	Jumlah Karyawan / Number of Employees				
	2020	2019	2018	2017	2016
SD / Elementary	6	7	13	17	21
SLTP / Junior High School	10	12	21	27	40
SLTA / Senior High School	682	700	580	597	585
Diploma	90	90	82	83	86
Sarjana / Undergraduate	248	250	223	211	216
Pasca Sarjana / Postgraduate	44	45	45	44	46
Jumlah / Total	1.080	1.104	964	979	994

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan
Employee Composition based on Position

Jabatan / Position	Jumlah Karyawan / Number of Employees				
	2020	2019	2018	2017	2016
Kepala Divisi/GM SE TK I / Head of Division/GM SE Lv I	34	29	27	20	16
Manajer/SE TK III / Manager/SE Lv II	58	55	54	58	55
Asisten Manajer/SE TK III / Assistant Manager/SE Lv III	136	123	124	121	114
Supervisor / SE TK IV / Supervisor /SE Lv IV	266	223	228	246	250
Staff	586	674	531	534	559
Jumlah / Total	1.080	1.104	964	979	994

HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan, diperlukan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan Perusahaan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II telah membentuk Serikat Karyawan sebagai wadah penyampaian aspirasi karyawan kepada Perusahaan.

Hubungan yang saling mendukung dan terpenuhinya hak serta kewajiban kedua belah pihak dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Jasa Tirta II yang merupakan hasil perundingan antara kedua belah pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PKB Perum Jasa Tirta II telah terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. B.247/PHIJSK-PK/PP&PKB/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Selain itu, dalam rangka menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis sekaligus membangun keterikatan karyawan baik lini vertikal maupun horizontal, Perum Jasa Tirta II juga setiap tahunnya menyelenggarakan Gathering Perum Jasa Tirta II dengan tema "Leadership & Spirit of Change" yang diikuti mulai dari tingkat Pelaksana sampai tingkat Direksi dan Dewan Pengawas.

Guna menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan, Perum Jasa Tirta II membentuk Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 4 guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Seiring dengan perjalanan waktu, Serikat Pekerja Jasa Tirta II selain sebagai wadah berserikat dan penghubung antara pegawai dan manajemen, juga berfungsi sebagai marwah proses bisnis Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).

Struktur organisasi pengurus Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II untuk periode 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

HARMONIOUS INDUSTRIAL RELATIONS

Perum Jasa Tirta II realizes that to increase employee productivity and involvement, harmonious industrial relations are needed between employees and the Company. Therefore, Perum Jasa Tirta II has formed an Employee Union, as a forum for delivering employee aspirations to the Company.

This mutually supportive relationship between the Employee Union and the Company is set forth in the Perum Jasa Tirta II Collective Labor Agreement (PKB) which is the result of negotiations between the two parties which contain work conditions, rights and obligations of both parties based on statutory provisions. PKB Perum Jasa Tirta II has been registered in the Decree of the Director General of Industrial Relations Development and Workers' Social Security No. B.247/PHIJSK-PK/PP&PKB/X/2019 dated October 25, 2019.

In addition, in order to create an atmosphere of a harmonious and dynamic work environment while at the same time building employees' ties both vertically and horizontally, Perum Jasa Tirta II also annually organizes the Perum Jasa Tirta II Gathering with the theme "Leadership & Spirit of Change" which starts from the level Implementing up to the level of Directors and Supervisory Board.

In order to guarantee freedom of association for employees, Perum Jasa Tirta II established the Perum Jasa Tirta II Workers Union based on 1945 Constitution article 4 to provide protection, defense of rights and interests, as well as to improve decent welfare for workers/laborers and their families. Along with the passage of time, the Tirta II Workers 'Workers' Union, aside from being a union and liaison between employees and management, also functions as a part of the Company's business processes in accordance with the principles of good corporate governance.

The organizational structure of the management of the Perum Tirta II Workers Union for the period 2017 - 2021 is as follows :

Nama / Name	Jabatan / Position
Iir Syahril Mubarak	Ketua Umum / Chairman
Sugeng Riyanto	Sekretaris Jenderal / Secretary General
Maherna Kartikawati	Wakil Sekretaris Jenderal / Deputy of General Secretary
Yedi Apriyadi	Bendahara Umum / General Treasurer



REKRUTMEN KARYAWAN

Perum Jasa Tirta II melakukan proses rekrutmen karyawan guna memenuhi kebutuhan organisasi yang dibutuhkan Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam penerimaan dan seleksi karyawan dengan menyesuaikan kebutuhan pemetaan kompetensi dari persyaratan jabatan tiap posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, attitude test, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Setelah dinyatakan lulus seleksi, para calon karyawan tersebut akan diberi program pembekalan karyawan baru yang meliputi gambaran umum mengenai Perusahaan dan maupun job description sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

Setiap pegawai baru yang telah memperoleh pembekalan dan penempatan akan dimonitor dan evaluasi sebagai bagian dari uji kelayakan apakah pegawai tersebut layak untuk diangkat sebagai pegawai tetap Perusahaan.

Selama tahun 2020, Perusahaan telah merekrut sebanyak 8 orang. Informasi mengenai rekapitulasi tingkat perputaran karyawan Perum Jasa Tirta II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

EMPLOYEE RECRUITMENT

Perum Jasa Tirta II carries out the process of employee recruitment to meet the organizational needs of the Company. In its implementation, the Company applies the principle of equality and equal opportunities in employee recruitment and selection by adjusting the mapping needs of the competencies of the position requirements of each position required. This recruitment process involves a third party and is carried out through the fulfillment of administrative aspects, attitude tests, psychological tests, health tests, and interviews. After passing the selection process, the prospective employees will be given a new employee briefing program which includes an overview of the company and also a job description according to their respective fields of work.

Every new employee who has been briefed and placed will be monitored and evaluated as part of the due diligence whether the employee is eligible to be appointed as a permanent employee of the Company.

During 2020, the Company recruited 8 people. Information regarding recapitulation of Perum Jasa Tirta II employee turnover in 2020 is as follows :

Deskripsi / Description	2020
Penambahan Karyawan / Additional Employees	8
Pengurangan Karyawan / Reduction of Employees	-
Pensiun / Retired	23
Pengunduran Diri / Resigned	4
Pemberhentian dengan tidak hormat / Dishonorable Discharge	-
Lain-lain (Meninggal Dunia) / Others (Passed Away)	5
Tingkat Perputaran Karyawan / Turn Over Rate	2,9%

MANAJEMEN JENJANG KARIER

Sebagai bagian dari program pengelolaan dan pengembangan karyawan berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan jenjang karier karyawan guna memberikan peluang bagi insan Perusahaan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi dan potensi individual yang dimiliki. Manajemen pengembangan karier ditujukan tidak hanya sebagai perencanaan suksesi dan manpower planning bagi Perusahaan, tetapi juga sebagai salah satu upaya retensi karyawan. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menyusun proyeksi jenjang yang akan dilalui oleh karyawan selama meniti karier di Perusahaan.

Pengembangan karier karyawan melalui mutasi (promosi dan rotasi) dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek utama, antara lain hasil penilaian kinerja, kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan pengalaman kerja. Sesuai dengan kebijakan dasar dalam pengelolaan SDM, Perum Jasa Tirta II menerapkan asas kesetaraan dalam menetapkan mutasi karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Pada level jabatan tertentu, Perusahaan juga mempertimbangkan kriteria kepemimpinan dan beberapa kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memerlukan kebijakan dalam mempertimbangkan sesuatu dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Komitmen Perusahaan terhadap kualitas SDM unggul diwujudkan melalui implementasi penilaian kinerja karyawan secara berkala dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II telah merancang program penilaian kinerja karyawan yang komprehensif, objektif, dan transparan. Program tersebut telah terintegrasi dan diatur dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berdasarkan pada pencapaian dan pemenuhan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan. Implementasi penilaian kinerja karyawan juga memungkinkan Perusahaan untuk menjaga komunikasi dan controlling yang tepat dan terukur dari atasan kepada karyawannya.

Penilaian kinerja dilakukan secara online yang terbagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja karyawan. Hasil penilaian kinerja karyawan selanjutnya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun proyeksi pengembangan karier, sistem remunerasi dan penghargaan, hingga sistem pengembangan kompetensi. Adapun kriteria yang turut dipertimbangkan dalam penilaian kinerja antara lain kompetensi teknis, kompetensi perilaku, cara kerja, dan output atau hasil yang dicapai berdasarkan KPI yang telah ditetapkan.

CAREER MANAGEMENT

As part of the ongoing employee management and development program, Perum Jasa Tirta II has a career path policy for employees to provide opportunities for Company people to develop themselves in accordance with the needs of positions in the organization and individual potential they possess. Career development management is aimed not only at succession planning and manpower planning for the company, but also as an effort to retain employees. The Company's management is responsible for planning and preparing projected levels that will be passed by employees during their careers at the Company.

Employee career development through mutation (promotion and rotation) is done by taking into account the main aspects, including the results of performance appraisal, company needs, competencies and work experience. In accordance with basic policies in the management of human resources, Perum Jasa Tirta II applies the principle of equality in determining employee mutations without discriminating against ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition. At a certain level of position, the Company also considers leadership criteria and several other criteria that are appropriate to the position needs that require policy in considering something and accuracy in decision making.

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

The Company's commitment to producing excellent quality human resources is realized through the implementation of employee performance appraisals on a regular and ongoing basis. In this case, the Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has designed a comprehensive, objective and transparent employee performance evaluation program. The program has been integrated and regulated in a Performance Management System (SMK) based on the achievement and fulfillment of a Key Performance Indicator (KPI) that has been determined. The implementation of employee performance appraisal also allows the Company to maintain precise and measured communication and control from superiors to their employees.

Performance appraisal is conducted online which is divided into several stages, including the stages of planning, monitoring, and measuring employee performance. The results of the employee performance appraisal will further serve as a basis for management to prepare projections for career development, remuneration and reward systems, and competency development systems. The criteria included in the performance evaluation include technical competencies, behavioral competencies, work methods, and outputs or results achieved based on established KPIs.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Menanggapi tujuan pengelolaan karyawan berkelanjutan, Perusahaan memastikan bahwa kompetensi dan keahlian karyawan senantiasa sesuai dan relevan dengan perkembangan pengetahuan dan kondisi industri yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan memberlakukan program pengembangan kompetensi karyawan. Pengembangan kompetensi menjadi salah satu bagian dari perencanaan bisnis serta kebutuhan jabatan Perusahaan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan keahlian dan kompetensi yang disyaratkan.

Adapun program pengembangan kompetensi karyawan yang diberikan berupa pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop baik yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan maupun pihak eksternal. Selama tahun 2020, Perusahaan telah merealisasikan biaya sebesar Rp3.935.896.943 untuk membekali karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Informasi mengenai jenis pelatihan, nama pelatihan, jumlah peserta, serta tanggal pelatihan dimuat dalam tabel sebagai berikut :

Program Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Program

Indikator / Indicator	2020	2019	2018	2017
Jumlah Pelatihan / Number of Training	79	62	84	61
Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pelatihan (dalam orang) / Number of Employees Attending Training (in person)	2.575	2.514	582	644
Jumlah Jam Pelatihan (dalam jam) / Number of Training Hours (in hours)	34.230	41.762	2.128	19.117
Realisasi Biaya Pelatihan (dalam Rp) / Realization of Training Costs (in Rp)	3.935.896.943	4.479.054.458	2.916.276.815	2.692.022.516

KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Remunerasi

Perum Jasa Tirta II senantiasa menjunjung asas kesetaraan (fairness) dan kompetitif (competitiveness) dengan industri sejenis dalam penyediaan remunerasi karyawan yang disesuaikan dengan faktor internal seperti bobot kerja serta faktor eksternal seperti ketentuan pengupahan yang berlaku. Perusahaan meyakini bahwa penyediaan kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan bobot kerja yang diemban mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja terbaik sekaligus menarik calon karyawan potensial serta mempertahankan karyawan terbaik di Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan pengupahan yang berlaku, struktur remunerasi yang disediakan meliputi :

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Fulfilling the objectives of sustainable employee management, the Company ensures that employee competencies and expertise are always appropriate and relevant to the development of knowledge and dynamic industry conditions. To realize this goal, the Company has implemented an employee competency development program. Competency development is a part of business planning and the needs of the Company's position by adjusting to the required expertise and competency requirements.

The employee competency development program provided is in the form of training, education, seminars, and/or workshops held both by the internal company and external parties. During 2020, the Company has spent Rp3,935,896,943 to provide education and training programs for employees. Information about the type of training, the name of the training, the number of participants, and the date of the training is contained in the following table :

EMPLOYEE WELFARE POLICY

Remuneration

Perum Jasa Tirta II always upholds the principle of fairness and competitiveness with similar industries in providing employee remuneration that is adjusted to internal factors such as work weight and external factors such as applicable wage provisions. The Company believes that providing competitive compensation in accordance with the workload carried out can encourage employees to produce the best performance while attracting potential employees and retaining the best employees in the Company.

As stipulated in the Collective Labor Agreement and applicable wage provisions, the remuneration structure provided includes :

- a. Penghasilan tetap yang terdiri dari :
 - Gaji Pokok
 - Tunjangan Grade
 - Tunjangan Posisi
 - Tunjangan Keluarga
 - Tunjangan Khusus Pajak
- b. Penghasilan tidak tetap berupa :
 - Tunjangan kinerja I, yang terdiri dari tunjangan
 - a. Jasa Produksi (Jasprod)
 - b. Insentif
 - Tunjangan hari raya keagamaan
 - Tunjangan Kinerja II
 - Tunjangan Penempatan Wilayah Kerja

Dalam menentukan besaran penghasilan tetap, yakni gaji pokok, Perum Jasa Tirta II mengacu pada aspek aturan hukum yang mengatur upah minimum dan kelayakan yang didasarkan pada beberapa indikator, termasuk inflasi. Sedangkan besaran penghasilan tidak tetap dihitung berdasarkan unjuk kerja perusahaan dan ketentuan yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pelayanan Kesehatan

Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dan keluarganya serta karyawan purnabakti beserta istri/suami dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karyawan purnabakti beserta istri/suami yang sah juga diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah memasuki masa pensiun.

Program Imbalan Pasca Kerja

Perum Jasa Tirta II menaruh perhatian kepada karyawan yang telah berkarya dan mengabdikan kontribusinya kepada Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selain program jaminan kesehatan dan pelatihan persiapan masa purnabakti, Perusahaan memberikan program pensiun guna menjamin kesejahteraan bagi karyawan setelah memasuki masa kerja. Perusahaan memiliki lembaga pengelola dana pensiun independen bagi karyawan Perum Jasa Tirta II yang pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.151/KM.17/2000 tanggal 15 Mei 2000 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000.

Selain Program Pensiun Manfaat Pasti, Perum Jasa Tirta II juga memberikan program imbalan pasca kerja manfaat pasti dalam bentuk Uang Pesangon/Uang Jasa yang diatur dalam peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor PRD-9/DIR/06/2020 dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2019-2021.

Di samping penyediaan pengelolaan imbalan pasca kerja, Perusahaan juga memberikan pembekalan mental dan peluang pasca kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun berupa seminar dan sosialisasi peluang-peluang berwirausaha guna memotivasi karyawan untuk meraih kesejahteraan yang baik di masa pensiun.

- a. Fixed income consisting :
 - Basic salary
 - Grade allowance
 - Position allowance
 - Family allowances
 - Special Tax Allowance
- b. Non-permanent income in the form of :
 - Performance allowance I, which consists of allowances
 - a. Production Services
 - b. Incentive
 - Religious holiday allowance
 - Performance Allowance II
 - Work Area Placement Allowance

In determining the amount of fixed income, namely basic salary, Perum Jasa Tirta II refers to aspects of the legal rules that regulate minimum wages and feasibility based on several indicators including inflation. Meanwhile the amount of non-fixed income is calculated based on the company's performance and applicable regulations and by taking into account the company's capabilities.

Health Services

The company includes all employees and their families and retired employees and their wives/husbands in a health insurance program organized by the Health Social Security Organizing Agency (BPJS). For full-time employees and their legal wives/husbands, they are included in the health insurance program for a period of 2 (two) years after retirement.

Post-employment Rewards Program

Perum Jasa Tirta II pays attention to employees who have worked and dedicated their contributions to the Company within a certain period of time. In addition to the health insurance program and post-retirement preparation training, the Company provides a pension program to ensure the welfare of employees after entering service. The company has an independent pension fund management institution for employees of Perum Jasa Tirta II, the establishment of which has been determined based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP.151/KM.17/2000 dated May 15, 2000 starting from January 1, 2000.

In addition to the Defined Benefit Pension Program, Perum Jasa Tirta II also provides defined benefit postemployment benefits in the form of severance pay/ service fees, which are stipulated in the regulation of PJT II Directors' Decree Number PRD-9/DIR/06/2020 and Collective Labor Agreement 2019-2021.

In addition to providing post-employment benefits management, the Company also provides mental training and post-employment opportunities for employees who are entering retirement in the form of seminars and socialization of entrepreneurial opportunities to motivate employees to achieve good welfare in retirement.



PENGHARGAAN KARYAWAN

Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan pemberian penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk mencetak produktivitas dan kreativitas kerja sekaligus memelihara kebanggaan dan semangat kerja karyawan. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang terbukti telah menunjukkan kesetiaan dalam mengabdikan masa kerjanya dalam jangka waktu tertentu, meraih prestasi kerja yang luar biasa, atau telah berjasa kepada Perusahaan.

Jenis penghargaan yang diberikan terdiri atas Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, Satya Karya Tiga Puluh Tahun, dan Tunjangan Kinerja II berupa uang tunai dan/atau Natura sebagai bentuk penghargaan dari Direksi. Adapun prestasi yang dikategorikan layak untuk memperoleh penghargaan antara lain pelaksanaan tugas dan kewajiban secara luar biasa, penemuan temuan baru, kontribusi ekstra dari karyawan secara individual maupun kelompok, dan prestasi serta kontribusi lainnya yang dianggap berjasa bagi Perusahaan.

EMPLOYEE AWARD

Perum Jasa Tirta II has an award policy that aims to motivate employees to produce work productivity and creativity while maintaining employee pride and enthusiasm. Awards are given to employees who have been shown to show loyalty in dedicating their tenure to a certain period of time, achieving outstanding work performance, or have served the Company.

The types of awards that are given consist of Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, and Satya Karya Thirty Years and Performance Allowance II in the form of cash and/or Natura which is a Board of Directors award given to employees for carrying out duties and obligations outside usual, finding new findings, extra contributions from employees, both individuals and groups that are considered meritorious for the Company.

Penetapan Penghargaan Determination of Awards

Indikator / Indicator	Bentuk / Form	Waktu Pemberian / Time of Awarding	Jumlah Penerima Tahun 2020 (dalam orang) / Total Awardees in 2020 (in person)
Satya Karya Sepuluh Tahun	Piagam dan Uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 10 tahun / Employees who have had continuous and uninterrupted years of services for at least 10 years	5 Karyawan / 5 Employees
Satya Karya Dua Puluh Tahun	Piagam dan Uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 20 tahun / Employees who have had continuous and uninterrupted years of services for at least 20 years	Nihil
Satya Karya Tiga Puluh Tahun	Piagam dan Uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 30 tahun / Employees who have had continuous and uninterrupted years of services for at least 30 years	1 Karyawan / 1 Employees

KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER

Mengintegrasikan tujuan pengelolaan SDM yang adil dan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Perusahaan menerapkan kebijakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh karyawan tanpa membedakan gender, agama, ras, suku, golongan, maupun kondisi fisik dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, penilaian dan evaluasi kinerja, pemberian kesempatan pengembangan karier dan kompetensi, maupun pemenuhan hak remunerasi dan kompensasi.

GENDER EQUALITY POLICY

Integrating the objectives of managing human resources fairly and upholding the principles of Human Rights (HAM), the Company applies a policy of equality and justice for all employees without discriminating gender, religion, race, ethnicity, class, or physical conditions in employee recruitment and selection, assessment and performance evaluation, career opportunity and competency development opportunities, as well as fulfillment of remuneration and compensation rights.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Menjadi bagian dari tanggung jawab Perusahaan, Perum Jasa Tirta II menempatkan pentingnya pemeliharaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sebagai prioritas. Hal ini ditujukan agar setiap karyawan dapat bekerja secara aman, nyaman, dan sehat serta bebas dari faktor-faktor yang berpotensi mengurangi produktivitas dan membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk melakukan Continuous Improvement dalam pengelolaan K3 secara menyeluruh dan difokuskan pada terciptanya kinerja K3 yang zero accident atau tingkat kecelakaan nihil.

Dalam menjamin pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di lingkungan operasional, Perum Jasa Tirta telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di salah satu unit kerja yang memiliki high risk atau potensi risiko tinggi yaitu Unit Usaha PLTA.

Selama tahun 2020, Perum Jasa Tirta II telah merealisasikan program pengembangan dan pemeliharaan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain :

1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan mengadakan seminar "Fire Behaviour" di Triwulan I Tahun 2020.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi K3 di Triwulan II, III, dan IV Tahun 2020.
3. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) Risiko Tinggi di Triwulan II Tahun 2020.
4. Pelaksanaan kegiatan Donor Darah di setiap triwulan tahun 2020.
5. Pelaksanaan kegiatan Dokter Keliling di setiap triwulan tahun 2020.
6. Pelaksanaan simulasi kebakaran di unit usaha Wilayah II di Triwulan IV tahun 2020.
7. Pendistribusian kekurangan seragam tahun 2018 dan seragam wearpack tahun 2020.
8. Pemilihan karyawan yang mendapatkan bantuan biaya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa Umroh dan Wisata Religi.
9. Pelaksanaan kegiatan olahraga setiap hari Jumat.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Being part of the Company's responsibilities, Perum Jasa Tirta II places importance on maintaining the occupational health and safety (OHS) aspects of employees as a priority. It is intended that every employee can work safely, comfortably, and healthily and free from factors that have the potential to reduce productivity and endanger themselves and the environment. Therefore, Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out Continuous Improvement in overall OHS management and is focused on creating OHS performance with zero accident or zero accident rate.

In ensuring the fulfillment of occupational health and safety aspects for employees in the operational environment, Perum Jasa Tirta has implemented Government Regulation Number 50 Year 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems, in one work unit that has a high risk, namely the Business Unit Hydropower.

During 2020, Perum Jasa Tirta II has implemented a development and maintenance program on Occupational Health and Safety (OHS) quality, including :

1. Implementation of OHS Month by holding a seminar on "Fire Behavior" in the First Quarter of 2020.
2. OHS Monitoring and Evaluation Implementation in Quarter II, III and IV of 2019.
3. Implementation of High-Risk Medical Check Up (MCU) in the Second Quarter of 2019.
4. Implementation of Blood Donation activities in each quarter of 2019.
5. The implementation of Mobile Medical Check-up activities in each quarter of 2019.
6. Implementation of fire simulations in Region II business units in Quarter IV of 2019.
7. Distribution of 2018 uniform shortages and 2019 uniform wearpack.
8. The selection of employees who receive financial assistance to the Almighty God in the form of Umrah and Religious Tourism.
9. Implementation of sports activities every Friday.



LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SDM BERBASIS KOMPETENSI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) oleh Divisi Sumber Daya Manusia. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester I Tahun 2020 dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2020 serta Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester II Tahun 2020 dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2020.
2. Survei Persepsi Karyawan meliputi Survei Kepuasan Karyawan dan Survei Keterikatan Karyawan periode Semester I Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2020 serta periode Semester II Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2020.
3. Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Triwulan I, II, dan IV Tahun 2020.
4. Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian pada Triwulan I dan III Tahun 2020.
5. Pemutakhiran Data Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada Triwulan I, II dan IV Tahun 2020.
6. Evaluasi Penilaian Calon Karyawan Triwulan II dan IV Tahun 2020.
7. Pelaksanaan Asesmen Calon Direksi pada Triwulan III Tahun 2020.
8. Pelaksanaan Asesmen Calon Manajemen Utama pada Triwulan III dan IV Tahun 2020.
9. Pelaksanaan Uji Portofolio pada Triwulan I Tahun 2020.
10. Pemberian Piagam Satya Karya pada Triwulan III Tahun 2020.
11. Pemberian Logam Mulia kepada Pensiunan PJT II pada Triwulan III dan IV Tahun 2020.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF COMPETENCY-BASED HR MANAGEMENT IN 2020

During 2020, the Company has carried out Competency Based Human Resources Management (MSDM-BK) by the Human Resources Division. The activities that have been carried out include :

1. Evaluation of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Individual Employee Competency Assessment for Semester I of 2020 was conducted in Quarter III of 2020 and Assessment of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Assessment of Employee Individual Competency for Semester II of 2020 carried out in Quarter IV of 2020.
2. The Employee Perception Survey covers the Employee Satisfaction Survey and the Employee Engagement Survey for Semester I of 2020 conducted in Quarter III 2020 and Semester II of 2020 which was conducted in Quarter IV of 2020.
3. Sudden Inspection (Sidak) in Quarter I, II, and IV of 2020.
4. Personnel Monitoring and Evaluation in Quarter I and III of 2020.
5. Updating of Certificate Data for Obtaining Family Benefits Payment (SKUMPTK) in Quarter I, II and IV of 2020.
6. Evaluation of Employee Candidates for Quarter II and IV of 2020.
7. Implementation of Assessment of Prospective Directors in Quarter III of 2020.
8. Implementation of the Main Management Candidate Assessment in Quarter III and IV of 2020.
9. Implementation of Portfolio Test in the First Quarter of 2020.
10. Award of Satya Karya Charter in the Third Quarter of 2020.
11. Awarding Logam Mulia to Retired PJT II in Quarter III and IV of 2020.

Teknologi Informasi

Information Technology

Menghadapi Revolusi Industri 4,0
Mengharuskan Kami menciptakan
inovasi TI berkelanjutan dengan
memperhatikan kebutuhan bisnis,
baik pada kebijakan, proses, hingga
infrastruktur yang dimiliki.

The Company seeks to create sustainable IT
innovations by focusing on business needs in
policies, processes, and infrastructure.



Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya.

Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, PJT II kembali melaksanakan penyesuaian IT Masterplan selaras dengan Perubahan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

The development of information technology that is growing rapidly and competition between companies is increasingly competitive requires PJT II to organize and improve the quality of services based on information technology to provide the best service to customers and the public. Because technology is the main key that enables us to provide products and services to customers, measure and track business performance, and make the right management decisions for business continuity.

In order to maintain the effectiveness and efficiency as well as the relevance of IT use, the Company strives to create sustainable innovation by taking into account business needs, both in policies, processes, and the infrastructure it owns. Supported by regular evaluation mechanisms, the presence of competent IT human resources, and careful planning, the Company is optimistic that it can move progressively towards achieving the stated vision, mission and business goals.

In 2020, PJT II will again carry out adjustments to the IT Master Plan in line with the Changes in the Company's Long-Term Plan (RJPP).



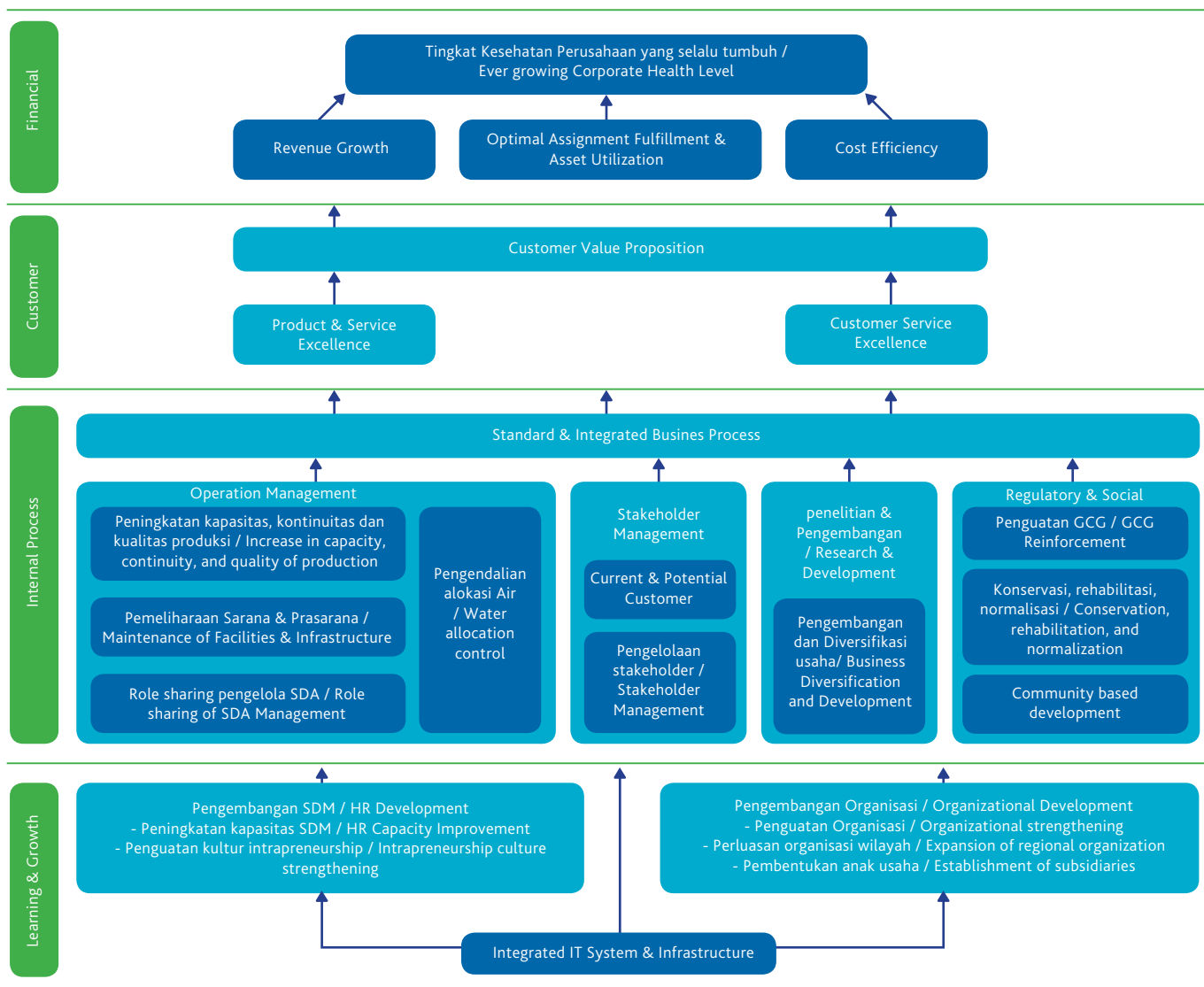
Didalam dokumen tersebut terdapat 3 (tiga) kategori perencanaan pengembangan IT, yang meliputi perencanaan pengembangan sistem informasi atau aplikasi, penguatan infrastruktur dan perbaikan tata kelola IT perusahaan.

Dalam rangka menyusun perencanaan pengembangan sistem informasi, maka pada tahap awal dilakukan kajian terhadap Arsitektur Bisnis PJT II sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

In this document, there are 3 (three) categories of IT development planning, which include planning for information system development or applications, strengthening infrastructure and improving corporate IT governance.

In order to prepare an information system development plan, at the initial stage, a study was carried out on the PJT II Business Architecture as shown in the figure below :

Peta Strategi (*Strategy Map*) Perum Jasa Tirta II Tahun 2018 – 2022
Perum Jasa Tirta II Strategy Map for 2018 – 2022



PETA STRATEGI TI

Tujuan Perusahaan dalam memelihara komitmen pengembangan TI secara berkelanjutan yang terarah dan terukur diwujudkan melalui penyusunan peta strategi (*strategy map*) TI sebagai acuan dasar yang memuat strategi utama pengembangan dan pengelolaan TI dalam proses bisnis yang dijalankan. Adapun penyusunannya didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk memperkuat lini fungsional serta arah pengembangan bisnis ke depan.

RANTAI NILAI PENGELOLAAN BISNIS

Sebuah perusahaan pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mendesain, menghasilkan, memasarkan, menyajikan dan mendukung produk atau jasa yang dihasilkan. Kesatuan aktivitas tersebut direpresentasikan ke dalam suatu bentuk rantai nilai (*value chain*). Pendekatan rantai nilai ini membedakan aktivitas bisnis ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (1) aktivitas utama (*primary activities*) yang berkaitan langsung dengan *core business* Perusahaan; dan (2) aktivitas pendukung (*supporting business*) yang tidak berkaitan langsung dengan *core business*, tetapi pengelolaannya dapat menentukan kesuksesan aktivitas utama.

Aktivitas-aktivitas tersebut dikelola oleh perusahaan menggunakan instrumen unit/fungsi bisnis yang dimuat dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, guna memahami bisnis yang dikelola Perum Jasa Tirta II maka perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh fungsi bisnis yang terdapat di Perusahaan sehingga dapat dianalisis sejauh mana kebutuhan fungsi, dukungan, dan infrastruktur TI bagi kelancaran operasional bisnis yang dijalankan.

Adapun model rantai nilai bisnis Perum Jasa Tirta II diuraikan dalam arsitektur bisnis sebagai berikut :

IT STRATEGY MAP

The Company's objective in maintaining IT development commitment that is directed and measurable is realized through the preparation of the IT strategy map as a basic reference that contains the main strategies for developing and managing IT in the business processes that are carried out. The preparation is based on the Company's need to strengthen functional lines and the direction of business development going forward.

BUSINESS MANAGEMENT VALUE CHAIN

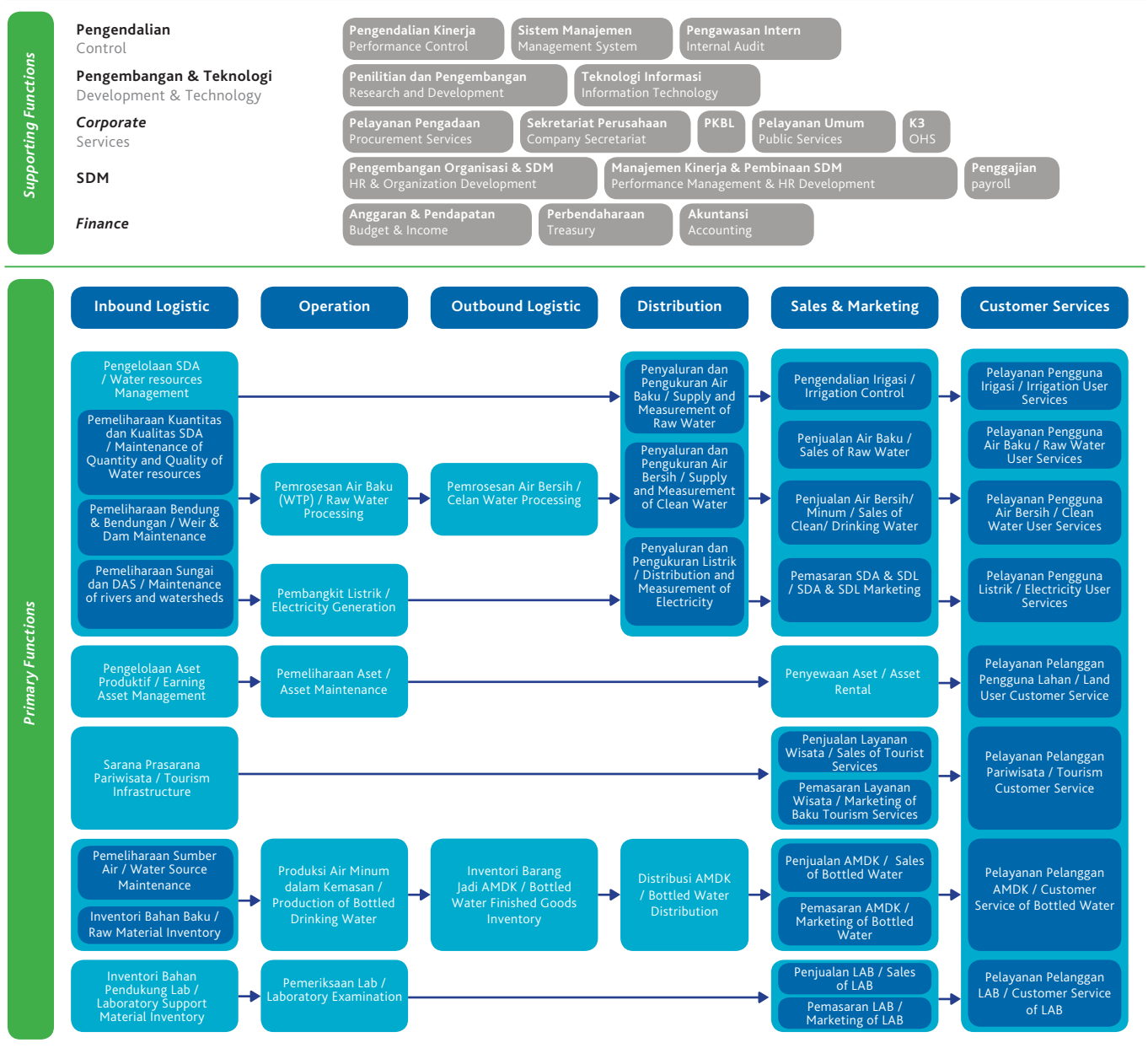
A company is basically a collection of activities carried out to design, produce, market, present and support the products or services it produces. All of these activities can be represented in the form of a value chain. This value chain approach distinguishes business activities into 2 (two) large groups, namely (1) Primary activities, which are directly related to the company's core business; and (2) supporting activities that are not directly related to the core business but their management can determine the success of the main activities.

These activities are managed by the company using business unit/function instruments contained in the organizational structure responsible for managing the effectiveness and efficiency of overall business activities. Thus, in order to understand the business managed by Perum Jasa Tirta II, it is necessary to identify all business functions in the Company so that it can be analyzed the extent to which the needs of functions, support, and IT infrastructure for the smooth running of business operations are run.

The Perum Jasa Tirta II business value chain model is described in the business architecture as follows :

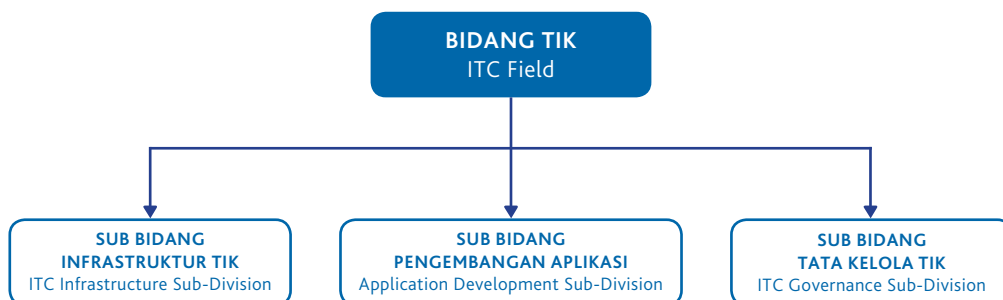


Peta Strategi (*Strategy Map*) Perum Jasa Tirta II Tahun 2018 – 2022 Perum Jasa Tirta II Strategy Map for 2018 – 2022



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI

IT MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE



TATA KELOLA DAN MANAJEMEN TI

Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Perum Jasa Tirta II diarahkan pada pemenuhan best practices *Good Corporate Governance* (GCG) dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, regulasi eksternal relevan lainnya, serta peraturan internal Perusahaan. Analisis dilakukan terhadap ketiga komponen tata kelola, yaitu (1) Struktur Tata Kelola TIK Korporat; (2) Proses tata kelola TIK; dan (3) Struktur Organisasi Pengelola TI.

Struktur Tata Kelola TIK Korporat

Struktur tata kelola TIK Korporat diorientasikan dan diarahkan pada optimalisasi investasi dan infrastruktur TI sehingga manfaat yang dihasilkan dapat terasah dan berdampak positif bagi proses dan aktivitas bisnis secara keseluruhan.

PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG TI

Sejalan dengan pengembangan teknologi informasi, Perusahaan turut menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM di bidang TI. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya.

Dalam mendukung tujuan tersebut, Perusahaan telah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya TI yang mengatur tatanan pengelolaan sumber daya TI Perum Jasa Tirta II yang menjamin efektivitas dan efisiensi produk TI yang dihasilkan. Kebijakan tersebut terdiri dari:

- Prosedur pengelolaan SDM TI
- Prosedur pengelolaan data/informasi
- Prosedur pengelolaan hardware/software
- Prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (data center dan jaringan komputer)

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA)

PJT II sebagai perusahaan umum mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan SDA di wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan SDA di wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2010.

Untuk menunjang penugasan tersebut, PJT II membangun Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) sejak tahun 2013 yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi pengelolaan SDA di seluruh wilayah kerja.

Data-data yang tersedia pada SISDA tersebut antara lain meliputi :

- I. Data Spasial
 - DAS dan Sub DAS WS Citarum dan sebagian WS Ciliwung – Cisadane
 - Jaringan hidrologi
 - Prasarana SDA

IT GOVERNANCE AND MANAGEMENT

Management of Information Technology in Perum Jasa Tirta II is directed at meeting the best practices of Good Corporate Governance (GCG) by referring to SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/02/2018 concerning Principles of Information Technology Governance in the Ministry of State-Owned Enterprises, external regulations other relevant, and internal company regulations. The analysis was carried out on the three components of governance, namely (1) Corporate ICT Governance Structure; (2) ICT governance processes; and (3) IT Management Organizational Structure.

Corporate ICT governance Structure

The corporate ICT governance structure is oriented and directed at optimizing IT investment and infrastructure so that the benefits generated can be felt and have a positive impact on the overall business processes and activities.

HR DEVELOPMENT IN IT FIELD

In line with the development of information technology, the Company also pays attention to meeting the needs of developing HR competencies in the IT field. This is intended to prepare competent human resources and able to adapt to technological developments, both in terms of knowledge and skills.

In support of these objectives, the Company has prepared an IT resource management policy that governs the management of Perum Jasa Tirta II's IT resources that ensures the effectiveness and efficiency of IT products generated. The policy consists of:

- IT HR management procedures
- Data/information management procedures
- Hardware/software management procedures
- Information technology infrastructure management procedures (data center and computer networks)

WATER RESOURCES INFORMATION SYSTEM (SISDA)

PJT II as a public company is assigned to carry out its duties and responsibilities in the exploitation of water resources in the river area and some of the tasks and responsibilities in the field of water resource management in the working area according to Government Regulation No. 7 of 2010.

To support this assignment, PJT II has built a Water Resources Information System (SISDA) since 2013 which is used to obtain information on the management of water resources in all working areas.

The data available on the SISDA include :

- I. Spatial Data
 - Watershed and sub-watershed for WS Citarum and part of WS Ciliwung – Cisadane
 - Hydrological network
 - Water Resources Infrastructure



II. Data Tabular

- Debit air di pos hidrologi
- Debit air di bending
- Data curah hujan
- Iklim
- Pengusahaan air baku
- Data kualitas air
- Batimetri Waduk Ir. H. Djuanda

III. Model

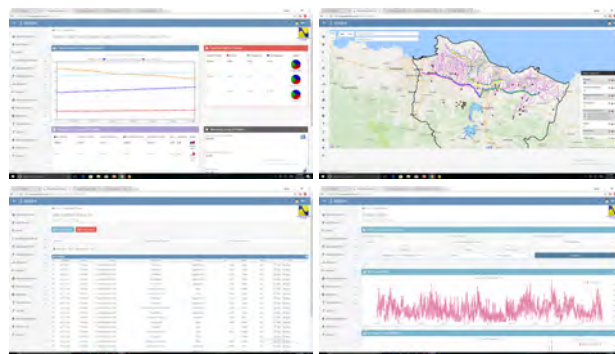
- Simulasi debit sesaat
- Simulasi debit harian

II. Tabular Data

- Water discharge at the hydrology post
- Water discharge in bending
- Rainfall data
- Climate
- Raw water exploitation
- Water quality data
- Bathymetry of Ir. H. Juanda

III. Model

- Simulation of instantaneous discharge
- Daily debit simulation



Gambar Tampilan SISDA PJT II / PJT II SISDA Display Picture

Pengembangan SISDA terus dilakukan sebagai satu kesatuan sistem informasi yang menampung data pantau operasi sarana prasarana SDA sehingga dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi serta analisis sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan (Decision Support System (DSS)).

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS)).



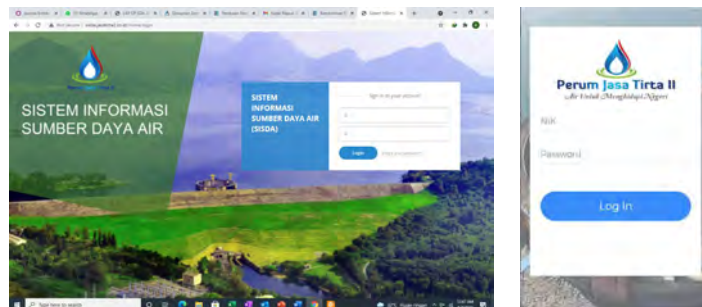
Gambar Network Operation Center (NOC) Room / Image of Network Operation Center (NOC) Room

PJT II juga memiliki Network Operation Center (NOC) yang merupakan perangkat infrastruktur untuk melakukan kontrol baik pengawasan maupun pengendalian aktivitas jaringan sekaligus memastikan agar jaringan data center SISDA tetap berfungsi baik. Dengan kata lain, NOC ini merupakan ruang kendali DSS.

PJT II also has a Network Operation Center (NOC) which is an infrastructure device to control both supervision and control of network activities while ensuring that the SISDA data center network continues to function properly. In other words, this NOC is a DSS control room.

Bertepatan dengan peringatan hari jadi PJT II yang ke 53, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah diluncurkan aplikasi SISDA berbasis smartphone. Di tahun 2020 ini dilakukan investasi pemasangan telemetri hidrometri berbasis Internet of Things (IoT) melalui pekerjaan *West-East Tarum Canal Water Security System and Bekasi Flood Warning System* di 14 lokasi sebagai bagian dari proses digitalisasi dan otomatisasi pengiriman data dari lapangan.

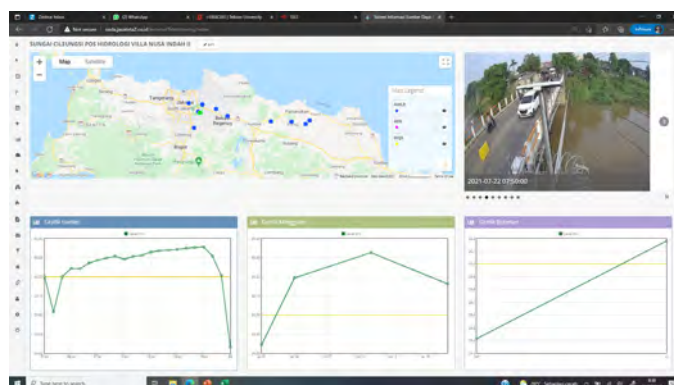
To coincide with the 53rd anniversary of PJT II, on August 26, 2020, the smartphone-based SISDA application was launched. In 2020, an investment in the installation of Internet of Things (IoT) based hydrometric telemetry was made through the work of the *West-East Tarum Canal Water Security System and Bekasi Flood Warning System* in 14 locations as part of the digitization process and automation of data transmission from the field.



Gambar SISDA Berbasis Website dan Mobile Aplikasi / Image of SISDA
Based on Website and Mobile Application

Proses digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan bagian dari penerapan *Smart Water Operation Management (SWOM)* yang akan terus dilakukan PJT II secara berkelanjutan.

The process of digitizing, automating and using Information and Communication Technology is part of the implementation of *Smart Water Operation Management (SWOM)* which will continue to be carried out by PJT II on an ongoing basis.



Gambar Tampilan Pemanfaatan IoT SISDA PJT II / Picture of IoT
SISDA PJT II Utilization Display

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa PJT II bertransformasi menjadi Badan Usaha yang siap menghadapi era disruptif Revolusi Industri 4.0 serta sejalan pula dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 dan Visium Kementerian PUPR 2030 bahwa kegiatan pengelolaan SDA didukung pilar strategis informasi, komunikasi dan teknologi.

This is clear evidence that PJT II is transforming into a Business Entity that is ready to face the disruptive era of the 4.0 Industrial Revolution and is also in line with the 2020-2024 RPJMN and the Vision of the Ministry of PUPR 2030 that water resource management activities are supported by strategic pillars of information, communication and technology.

Pengembangan TI Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perum Jasa Tirta II telah melakukan peningkatan sistem teknologi informasi sebagai berikut:

1. Integrasi Infrastruktur Jaringan Luas (*Wide Area Network*) Perum Jasa Tirta II di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang (Wilayah);
2. Implementasi Perangkat Video Conference antara Kantor Pusat dengan kantor-kantor cabang (Wilayah);
3. Implementasi Aplikasi Pendukung Proses Bisnis, antara lain Sistem Informasi Manajemen Risiko, Sistem Informasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sistem Informasi Karyawan, dan Sistem Informasi Geografis Aset Perum Jasa Tirta II.

IT Development in 2020

In 2020, Perum Jasa Tirta II has improved the information technology system as follows:

1. Integration of Wide Area Network Infrastructure of Perum Jasa Tirta II within the Head Office and Branch Offices (Regional);
2. Implementation of Video Conference Equipment between Headquarters and branch offices (Regions);
3. Implementation of Business Process Supporting Applications, including Risk Management Information System, Partnership and Community Development Program Information System, Employee Information System, and Geographic Information System of Perum Jasa Tirta II.

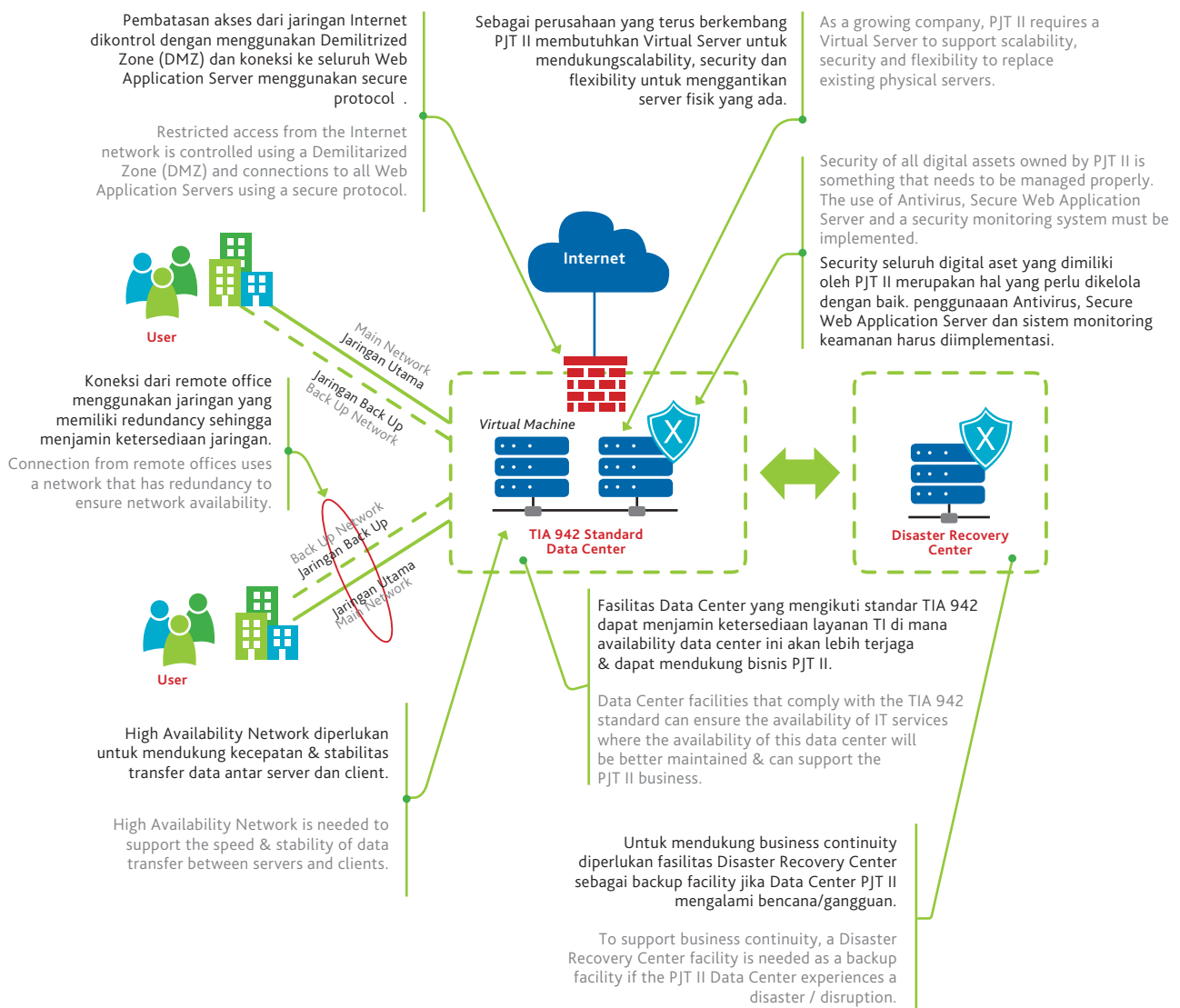


Rencana Pengembangan TI Tahun 2020

Berkaca dari peta strategi TI yang telah disusun, pengembangan dan pemanfaatan TI Perusahaan di tahun mendatang diarahkan pada implementasi Sistem Terintegrasi (*Enterprise Resource Planning*) di lingkungan PJT II, yang meliputi Aplikasi Accounting, *Human Resource Management* (HRM), *Procurement*, *Maintenance*, *Project Management*, dan aplikasi-aplikasi pendukung proses bisnis utama lainnya.

IT Development Plan for 2020

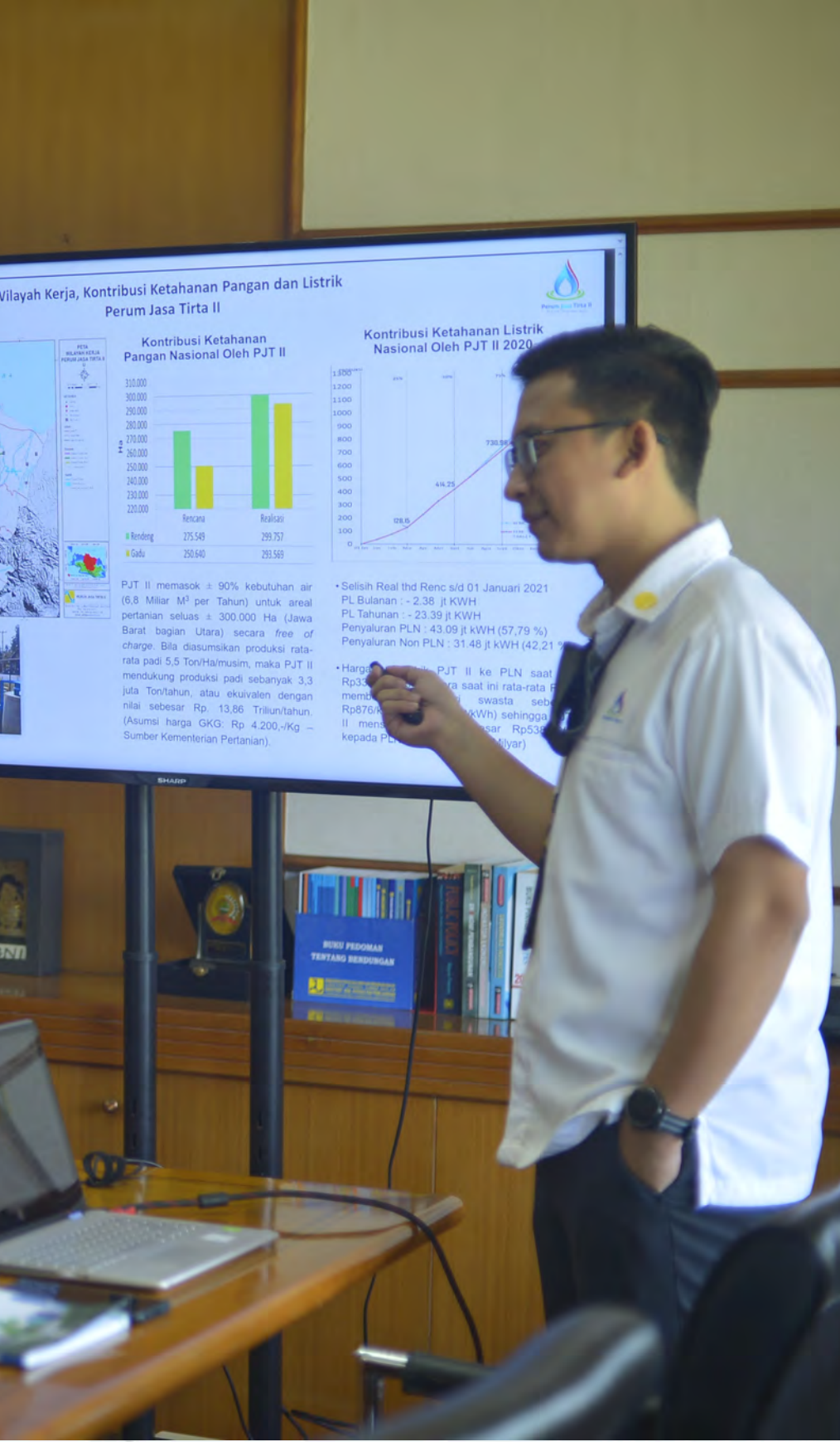
Reflecting on the IT strategy map that has been prepared, the development and utilization of the Company's IT in the coming year is directed at the implementation of the Integrated System (*Enterprise Resource Planning*) in the PJT II environment, which includes Accounting Application, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management, and other key business process supporting applications.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANEJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Perum Jasa Tirta II tetap melakukan upaya-upaya konstruktif, hati-hati dan tepat sasaran melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam rangka tata kelola Perusahaan yang baik, dalam upaya untuk mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan kedepan.

Perum Jasa Tirta II continues to make constructive, prudent and on target efforts through the application of risk management principles in the framework of good corporate governance, in an effort to maintain the continuity of the Company's business going forward.



TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Perekonomian global menghadapi tekanan yang sangat berat pada tahun 2020 yang bersumber dari pandemi Covid-19, yang tercermin dari realisasi pertumbuhan perekonomian global triwulan I 2020 yang mengalami kontraksi. Kontraksi pertumbuhan perekonomian secara luas dirasakan oleh banyak negara sebagai imbas dari pemberlakuan kebijakan penanganan Covid-19 seperti pembatasan aktivitas sosial yang berujung pada penurunan aktivitas ekonomi. Lebih dalam, penurunan aktivitas ekonomi tampak dari indikator aktivitas perdagangan yang berada pada tingkat yang sangat rendah, serta sektor manufaktur yang juga terdampak sangat parah. Hal ini diperburuk juga oleh pelemahan harga komoditas akibat melemahnya permintaan global. Realisasi perekonomian global triwulan I 2020 ini membuat IMF memproyeksikan pertumbuhan perekonomian global akan berkontraksi sebesar -3,0 persen, dengan downside risk yang bergantung pada perkembangan Covid-19. Hampir seluruh negara di dunia saat ini telah mengambil berbagai langkah dan strategi kebijakan fiskal dan moneter untuk penanggulangan Covid-19. Namun demikian, efek kebijakan tersebut perlu untuk terus dipantau karena dikhawatirkan dapat menambah tekanan kepada likuiditas global.

The global economy is facing very heavy pressures in the 2020 originating from the Covid-19 pandemic, which is reflected in the realization of global economic growth in the first quarter of 2020 which experienced contractions. The contraction in economic growth was widely felt by many countries as a result of the implementation of policies for handling Covid-19 such as limiting social activities culminating in a decrease in economic activity. Deeper, the decline in economic activity seen from the indicator of trading activity which is at a very low level, and the manufacturing sector which has also been badly affected. This was also exacerbated by weakening commodity prices due to weakening global demand. Realization of the economy global in the first quarter of 2020 made the IMF project global economic growth will contract by -3.0 percent, with downside risk that depends on the development of Covid-19. Almost all countries in the world today have taken various fiscal and monetary policy steps and strategies for the response to Covid-19 pandemic. However, the effect of this policy needs to be monitored continuously because it is feared that it could add to pressure on global liquidity.



Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang berat pada perekonomian Indonesia di triwulan I 2020, yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy). Konsumsi masyarakat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melambat cukup dalam, yakni masing-masing hanya tumbuh sebesar 2,66 persen (yoy) dan 1,70 persen (yoy). Selanjutnya, konsumsi Pemerintah tumbuh 3,74 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan jumlah realisasi anggaran belanja bantuan sosial. Sementara itu pelemahan permintaan global turut memperlambat ekspor yang tumbuh tipis sebesar 0,24 persen, dan impor yang berkontraksi sebesar -2,19 persen. Secara spasial, perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, laju inflasi Mei 2020 tercatat 2,19 persen (yoy) atau 0,07 persen (mtm) atau secara kumulatif sebesar 0,90 (ytd). Relatif rendahnya inflasi ini sejalan dengan melemahnya permintaan masyarakat akibat pandemi.

Untuk menangani dan mencegah dampak pandemi Covid-19 yang lebih buruk pada perekonomian nasional, Pemerintah mengambil langkah luar biasa (*extra ordinary*) dengan menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2020. Perppu dimaksud mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kebijakan keuangan negara yang diatur meliputi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, termasuk relaksasi batas defisit 3 persen PDB maksimal sampai 2022. Sementara itu, kebijakan stabilitas keuangan negara disusun oleh pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS untuk memitigasi dampak pandemi pada sektor keuangan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah dapat memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan sekaligus memberikan stimulus agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan. Pada perkembangan selanjutnya, sesuai amanat dari Perppu, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya fasilitas subsidi bunga dan program penempatan dana pada perbankan.

Meninjau industri pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa permintaan air diprediksi naik dari 205 m³/s pada 2015 menjadi 283 m³/s pada 2030. Indikasi peningkatan kebutuhan air secara bertahap setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi, laju urbanisasi yang tinggi, serta permintaan untuk sektor dan energi. Hal demikian menyebabkan permintaan kebutuhan air di daerah perkotaan yang meningkat berbanding terbalik dengan permintaan air di daerah perdesaan yang menurun.

Perubahan struktur perekonomian Indonesia yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa berdampak pada peningkatan permintaan air untuk sektor industri. ADB memperkirakan jumlah permintaan air di tahun 2030 berjumlah dua kali lipat dari 2013. Pada tahun 2020, permintaan air untuk industri berkisar di 20,1 m³/s dan pada 2030 naik menjadi 28,7 m³/s. Sementara permintaan air dan proporsi air untuk sektor energi dan pembangkit listrik akan terus meningkat mengingat air memiliki energi potensial dan kinetik secara fisika sebagai

The Covid-19 pandemic put heavy pressure on the Indonesian economy in the first quarter of 2020, which was only able to grow by 2.97 percent (yoy). Public consumption and Gross Fixed Capital Formation (PMTB) slowed considerably, namely growing by only 2.66 percent (yoy) and 1.70 percent (yoy). Furthermore, Government consumption grew by 3.74 percent (yoy), mainly driven by an increase in the amount of the social assistance spending budget. Meanwhile, weakening global demand also slowed down exports, which grew slightly by 0.24 percent, and imports, which contracted by -2.19 percent. In spatial terms, the slowdown in economic growth performance also occurred evenly across all regions of Indonesia. On the other hand, the inflation rate in May 2020 was recorded at 2.19 percent (yoy) or 0.07 percent (mtm) or a cumulative amount of 0.90 (ytd). This relatively low inflation rate is in line with weakening public demand due to the pandemic.

To deal with and prevent the worse impact of the Covid-19 pandemic on the national economy, the Government took extraordinary steps by by issuing Perppu number 1 of 2020. The Perppu regulates policies state finances and state financial system stability policies. State financial policy which is regulated includes the policy of state revenue, state expenditure, and financing, including the relaxation of the deficit limit of 3 percent of GDP maximum until 2022. Meanwhile, the stability policy state finances are prepared by the government together with BI, OJK, and LPS to mitigate impacts pandemic in the financial sector. With this policy, the government can provide social protection for the poor and vulnerable as well as providing a stimulus in order to maintain people's purchasing power and maintain economic and financial stability. In further developments, according to the mandate of the Perppu, the government launched National Economic Recovery program (PEN), including interest subsidy facilities and programs placement of funds in banks.

Reviewing the Water Resources Management (SDA) industry, the Asian Development Bank (ADB) reports that water demand is predicted to rise from 205 m³/s in 2015 to 283 m³/s in 2030. Indications of a gradual increase in water demand each year are in line with increasing population, high urbanization rates, and demand for the sector and energy. This causes the demand for water in urban areas to increase inversely with the declining demand for water in rural areas.

Changes in the structure of the Indonesian economy that shifted from the agricultural sector to the manufacturing and service sectors have an impact on increasing water demand for the industrial sector. ADB estimates that the number of water demand in 2030 will double from 2013. In 2020, water demand for industry ranges from 20.1 m³/s and in 2030 is estimated to increase to 28.7 m³/s. While the demand and proportion of water for the energy sector and electricity generation will continue to increase considering that water has potential and kinetic

pembangkit listrik. ADB memperkirakan permintaan air untuk pembangkit listrik akan meningkat hampir 88% di tahun 2030 dibandingkan tahun 2020.

Kondisi musim tahun 2020 diasumsikan normal, namun realisasi aliran Sungai Citarum pada Januari sifat aliran di bawah normal sebesar 496,01 juta m³ atau 76,18 % dari rencana sebesar 651,12 juta m³, bulan Februari sifat aliran di bawah normal sebesar 704,05 juta m³ atau 98,72 % dari rencana sebesar 713,21 juta m³, bulan Maret sifat aliran di atas normal sebesar 837,83 juta m³ atau 102,54 % dari rencana sebesar 817,04 juta m³, bulan April sifat aliran di atas normal sebesar 841,28 juta m³ atau 105,87 % dari rencana sebesar 794,60 juta m³, bulan Mei sifat aliran di atas normal sebesar 590,58 juta m³ atau 110,41 % dari rencana sebesar 534,89 juta m³, bulan Juni sifat aliran di bawah normal sebesar 246,85 juta m³ atau 82,58 % dari rencana sebesar 298,94 juta m³, bulan Juli sifat aliran di bawah kering sebesar 99,35 juta m³ atau 53,50 % dari rencana sebesar 185,70 juta m³, bulan Agustus sifat aliran di atas normal sebesar 121,58 juta m³ atau 104,30 % dari rencana sebesar 116,57 juta m³, bulan September sifat aliran di bawah normal sebesar 111,10 juta m³ atau 96,10 % dari rencana sebesar 115,61 juta m³, bulan Oktober sifat aliran di atas normal sebesar 344,34 juta m³ atau 131,11 % dari rencana sebesar 262,64 juta m³, bulan November sifat aliran di bawah kering sebesar 317,25 juta m³ atau 57,94 % dari rencana sebesar 547,54 juta m³ dan di bulan Desember sifat aliran di bawah kering sebesar 380,54 juta m³ atau 58,38 % dari rencana sebesar 651,85 juta m³.

Meninjau industri pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa permintaan air diprediksi naik dari 205 m³/s pada 2015 menjadi 283 m³/s pada 2030. Indikasi peningkatan kebutuhan air secara bertahap setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi, laju urbanisasi yang tinggi, serta permintaan untuk sektor dan energi. Hal demikian menyebabkan permintaan kebutuhan air di daerah perkotaan yang meningkat berbanding terbalik dengan permintaan air di daerah perdesaan yang menurun.

Perubahan struktur perekonomian Indonesia yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa berdampak pada peningkatan permintaan air untuk sektor industri. ADB memperkirakan jumlah permintaan air di tahun 2030 berjumlah dua kali lipat dari 2013. Pada tahun 2020, permintaan air untuk industri berkisar di 20,1 m³/s dan pada 2030 naik menjadi 28,7 m³/s. Sementara permintaan air dan proporsi air untuk sektor energi dan pembangkit listrik akan terus meningkat mengingat air memiliki energi potensial dan kinetik secara fisika sebagai pembangkit listrik. ADB memperkirakan permintaan air untuk pembangkit listrik akan meningkat hampir 88% di tahun 2030 dibandingkan tahun 2020.

energy as a physical power plant. ADB estimates that water demand for electricity generation will increase by almost 88% in 2030 compared to 2020.

The condition for the season in 2020 is assumed to be normal, however the river flow realization for Citarum in January, the river flow is below normal amounting to 496.01 million m³ or 76.18% of the planned 651.12 million m³, in February the river flow below normal amounting to 704.05 million m³ or 98.72% of the planned amount of 713.21 million m³, in March, the river flows above the normal amounted to 837.83 million m³ or 102.54% of the a plan of 817.04 million m³, in April the river flows above normal amounted to 841.28 million m³ or 105.87% of the planned 794.60 million m³, the month of May the river flow above normal amounted to 590.58 million m³ or 110.41% of the planned amount 534.89 million m³, in June, the river flows below normal amounted to 246.85 million m³ or 82.58% of the planned 298.94 million m³, the month of July the river flow below dry amounting to 99.35 million m³ or 53.50% of the planned 185.70 million m³, in August, the river flow above normal was 121.58 million m³ or 104.30% of the planned 116.57 million m³, in September the the river flow are below normal 111.10 million m³ or 96.10% of the planned 115.61 million m³, month October the river flow above normal amounted to 344.34 million m³ or 131.11% of plan amounting to 262.64 million m³, in November the nature of the flow under dry amounting to 317.25 million m³ or 57.94% of the planned 547.54 million m³ and in December the river flow under dry was 380.54 million m³ or 58.38% of the plan amounting to 651.85 million m³.

Reviewing the Water Resources Management (SDA) industry, the Asian Development Bank (ADB) reports that water demand is predicted to rise from 205 m³/s in 2015 to 283 m³/s in 2030. Indications of a gradual increase in water demand each year are in line with increasing population, high urbanization rates, and demand for the sector and energy. This causes the demand for water in urban areas to increase inversely with the declining demand for water in rural areas.

Changes in the structure of the Indonesian economy that shifted from the agricultural sector to the manufacturing and service sectors have an impact on increasing water demand for the industrial sector. ADB estimates that the number of water demand in 2030 will double from 2013. In 2020, water demand for industry ranges from 20.1 m³/s and in 2030 is estimated to increase to 28.7 m³/s. While the demand and proportion of water for the energy sector and electricity generation will continue to increase considering that water has potential and kinetic energy as a physical power plant. ADB estimates that water demand for electricity generation will increase by almost 88% in 2030 compared to 2020.



Tabel Realisasi Produksi Listrik Tahun 2019 – 2020
Table of Electricity Production Realization in 2019 – 2020

(dalam juta kWh / in million kWh)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to	
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
Produksi listrik / Electricity Production	999,08	974,27	844,72	97,52	115,34

Informasi mengenai realisasi produksi listrik per unit pembangkit tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Information on the realization of electricity production per plant unit in 2020 is presented in the following table:

Tabel Realisasi Produksi Listrik per Unit Pembangkit Tahun 2020
Table of Realization of Electricity Production per Plant Unit in 2020

(dalam ribu kWh / in thousand kWh)

Bulan / Month	Pembangkit Unit / Plant Unit							Jumlah / Total
	I	II	III	IV	V	VI	Mini Hydro	
Januari / January	7.418	7.131	83	12.190	4.505	4.213	274	35.814
Februari / February	9.298	10.882	99	13.680	4.270	2.813	986	42.028
Maret / March	14.727	14.711	576	8.694	12.860	-	219	51.787
April	21.350	20.989	14.705	16.217	16.954	7.064	325	97.604
Mei / May	21.821	21.116	7.605	13.837	21.274	16.448	829	102.930
Juni / June	19.705	17.288	-	15.232	19.500	14.999	-	86.724
Juli / July	19.539	19.179	-	18.574	19.098	15.204	-	91.594
Agustus / August	21.732	21.144	-	21.249	21.455	14.652	356	100.588
September	20.732	19.744	13.220	20.422	4.325	18.273	672	97.388
Oktober / October	20.322	19.932	19.791	20.270	-	17.265	879	98.459
November	18.768	18.594	18.688	18.789	-	17.443	866	93.148
Desember / December	13.744	16.262	16.340	16.438	-	12.412	1.006	76.202
Jumlah / Total	209.156	206.972	91.107	195.592	124.241	140.786	6.412	974.266

Kenaikan dan penurunan produksi listrik per unit pembangkit dari bulan ke bulan dikarenakan oleh PLTA Ir. H. Djuanda harus beroperasi mengikuti pola operasi pemberian air untuk irigasi dan program pemeliharaan rutin.

The increase and decrease in electricity production per plant unit from month to month were because hydropowerplant of Ir. H. Juanda must operate following the pattern of operation of water supply for irrigation and routine maintenance programs.

Pada bulan Maret 2020 Unit VI tidak beroperasi dikarenakan adanya perbaikan di rotor generator sedangkan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 Unit III tidak beroperasi dikarenakan adanya kebocoran pada *trust bearing cooler*. Unit V pada bulan September 2020 mengalami penurunan produksi dikarenakan adanya pekerjaan *Overhaul* sampai dengan bulan Desember 2020. Begitu juga dengan kenaikan dan penurunan produksi Mini Hydro, selain dikarenakan TMA di atas syarat maksimum, pada bulan Juni dan Juli 2020 tidak beroperasi dikarenakan adanya perbaikan pada Unit 1 dan adanya pekerjaan *Overhaul* Unit 2.

In March 2020 Unit VI did not produce due to repairs in the generator rotor while from June to August 2020, Unit III did not produce to a leak in the thrust bearing cooler. Unit V, in September 2020 undergo a decline in production due to overhaul work until December 2020. Likewise with the increase and decrease in mini production hydro, apart from being due to the TMA above the maximum requirement, in June and July 2020 did not produce due to repairs in Unit 1 and the work overhaul Unit 2.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap Tinggi Muka Air (TMA) waduk Ir. H. Djuanda di Jatiluhur, sehingga melalui forum Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC), pengaturan air di waduk akan dilaksanakan secara terpadu untuk pengendalian TMA.

Geliat pertumbuhan permintaan air yang kian meningkat mendorong Pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mengatur mengenai tata kelola SDA dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air.

This greatly affects the Water Level (TMA) of the Ir. H. Djuanda in Jatiluhur, so that through the Dam Operation Coordination Team forum Kaskade Citarum (TKPBKC), water management in the reservoir will be carried out in a manner integrated TMA control.

The increasing growth in demand for water is pushing the Government to Issue Law Number 17 of 2019 on Water Resources that regulates water resource management by paying attention to social, environmental and economic functions in harmony to create synergy and integration between regions, between sectors and intergeneration to meet the community's need for water.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Perum Jasa Tirta II bertugas menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk menjalankan tugas tersebut, Perusahaan melakukan 5 (lima) kegiatan usaha utama, meliputi :

1. Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
2. Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau Perusahaan pengelolaan tenaga listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
4. Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
5. Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusaha sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

Seluruh kegiatan usaha tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) segmen sebagai berikut:

1. Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;
2. Penyediaan air;
3. Kepariwisata;
4. Pemanfaatan lahan;
5. Jasa laboratorium kualitas air;
6. Air minum dalam kemasan (AMDK).

Kegiatan wilayah/usaha tersebut dijalankan oleh 7 (tujuh) unit usaha yang terdiri dari, Unit Wilayah I (UW I), Unit Wilayah II (UW II), Unit Wilayah III (UW III), Unit Wilayah IV (UW IV), Unit PLTA, Unit Usaha Pariwisata dan Hotel, Unit Layanan Laboratorium dan 1 (satu) anak Perusahaan yaitu PT. Jasa Tirta Luhur.

Seluruh unit wilayah/usaha yang berada di Wilayah I, II, III, dan IV utamanya bertugas mengembangkan usaha-usaha jasa air; menyelenggarakan kegiatan pelestarian, perlindungan air, pengelolaan SDA serta pelaksanaan konstruksi; Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) dan monitoring kualitas air; penyediaan air baku; pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas masyarakat lainnya.

Perusahaan juga memiliki Unit PLTA yang bertugas di bidang pengembangan dan pengoperasian PLTA serta pengusaha non Sumber Daya Air (non SDA). Uraian

Perum Jasa Tirta II has the duty to organize the general utilization of the high quality and viability of water and water sources for the fulfillment of the livelihood of the people and to carry out certain tasks assigned by the government in the management of the Watershed. To carry out these duties the Company carries out 5 business activities :

1. Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing, ports, power plants and, fulfillment of other water needs;
2. Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other power management companies in accordance with the provisions of legislation;
3. Generation, distribution of hydroelectric power, drinking water, business consulting services in the field of water resources technology, rental of large equipment and water quality laboratory services;
4. Development of DWSS (Drinking Water Supply System); and
5. Conducting efforts to optimize the potential of the Company's resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, rental and business services of facilities and infrastructure owned by the Company.

All business activities are grouped into the following 6 segments;

1. Generation and distribution of electricity
2. Water supply
3. Tourism
4. Land use
5. Water quality laboratory services
6. Bottled drinking water (bottled water).

The six segment business activities are carried out by 7 (seven) business units consisting of, Area I (UW I) Units, Region II (UW II) Units, Region III (UW III) Units, Region IV (UW IV) Units, PLTA, Tourism and Hotel Business Unit, Laboratory Service Unit and 1 (one) subsidiary, namely PT. Tirta Luhur Services.

All the Company's business units that operate in Region I, II, III, and IV are primarily in charge of developing water services, conducting conservation activities on water protection, Water Resources Management and construction implementation, OPSDA and water quality monitoring, raw water supply, maintaining relationships with local government, private establishments, and other elements in the communities.

The company also has a hydropower unit in charge of developing and operating hydropower plants and exploiting non-water resources (non-SDA). Further details regarding

lebih lanjut mengenai tinjauan operasi, produktivitas, pendapatan usaha, serta profitabilitas per segmen usaha disajikan dalam deskripsi sebagai berikut;

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Deskripsi Usaha

Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang dikelola oleh PJT II memiliki 6 (enam) turbin dengan kapasitas total daya terpasang sebesar 187,5 Mega Watt (MW). PLTA Ir. H. Djuanda dapat memproduksi listrik dengan rata-rata dalam setahun sebesar 900 juta kWh untuk didistribusikan ke PT PLN (Persero) serta industri di sekitar kawasan Jatiluhur – Purwakarta melalui jaringan transmisi 150 kV dan 70 kV.

Sesuai dengan karakteristiknya, PLTA Ir. H. Djuanda juga merupakan PLTA serbaguna, di mana selain berfungsi sebagai Pembangkit Tenaga Listrik, PLTA ini juga berfungsi untuk menyediakan air irigasi, pengendalian banjir, perikanan dan pariwisata, sehingga dalam pembangkitan tenaga listriknya perlu dikoordinasikan dengan keperluan irigasi dan musim tanam padi.

Di samping PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II juga mengoperasikan dan memelihara PLTA Mini Hydro yang bertempat di Curug – Klari – Karawang, sehingga lebih dikenal dengan nama PLTA Mini Hydro Curug. PLTA Mini Hydro Curug dibangun pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang sebesar 2x3,2 Mega Watt dan mulai dioperasikan pada tahun 2002 untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pompa Tarum Barat dan Tarum Timur guna menaikkan level air baku agar dapat disalurkan ke wilayah irigasi dan sekitarnya. Selain itu, penyaluran daya listrik juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bendung Curug serta area perkantoran dan perumahan di sekitar Bendung tersebut.

Produktivitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Pada tahun 2020, Perusahaan merealisasikan produksi listrik sebesar 974,26 juta kWh atau 97,52 dari RKAP 2020 sebesar 999,08 juta kWh. Bila dibandingkan dengan capaian produksi listrik tahun 2019, capaian ini meningkat 115,34% atau setara dengan 129,55 juta kWh dari sebelumnya sebesar 844,72 juta kWh. Belum tercapainya produksi listrik ini dikarenakan adanya pengurangan penyerapan produksi listrik oleh industri akibat dampak Covid-19, sehingga produksi listrik yang tidak terserap oleh industri disalurkan ke PT PLN (persero) dengan tarif lebih murah.

the operational review, productivity, operating income, and profitability per business segment are presented in the following descriptions;

Power Generation and Distribution

Business Description

Ir. H. Djuanda Jatiluhur Hydro Power Plant, which is managed by PJT II, has 6 (six) turbines with a total installed power capacity of 187.5 Mega Watt. PLTA Ir. H. Djuanda can produce an average of 900 million kWh electricity in a year to be distributed to PT PLN (Persero) and Industry around Jatiluhur-Purwakarta Area through 150 kV and 70 kV transmission lines.

In accordance with its characteristics, PLTA Ir. H. Djuanda is also a versatile hydropower plant, which in addition to functioning as a Power Plant, hydropower also serves to provide irrigation water, flood control, fisheries and tourism, so that in generating power it needs to be coordinated with irrigation needs and rice growing season.

Besides PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II also operates and maintains the Mini Hydro hydropower plant located at Curug-Klari-Karawang, which is familiarly known as PLTA Mini Hydro Curug. The Mini Hydro Curug Hydro Power Plant was built in 2000 with an installed power capacity of 2x3.2 Mega Watt and commenced in 2002 to meet the electricity needed by the pumps at East and West Tarum in order to raise the water level standard to be channeled to irrigation and surrounding areas and to meet the needs of electricity in Bendung Curug, Office and Housing area around the Bendung.

Productivity of Power Generation and Distribution Segment

In 2020, the Company realized electricity production of 974.26 million kWh or 97.52 from the 2020 RKAP of 999.08 million kWh. Compared to the achievement of electricity production in 2019, this figure increase by 115.34% or equivalent to 129.55 million kWh from the previous year of 844.72 million kWh. This electricity production target has not yet been achieved due to a reduction of absorption of electricity production by the industry due to impact of Covid-19, so that electricity production that is not absorbed by the industry is channeled to PT PLN (persero) at a lower rate.



Informasi mengenai penyaluran listrik untuk PT PLN, swasta, dan pemakaian sendiri pada tahun 2020 dimuat dalam tabel berikut :

Information regarding the distribution of electricity for PT PLN, private sector, and own use in 2020 are listed in the following table :

Tabel Perbandingan Realisasi Produksi Listrik Tahun 2020 dengan RKAP Tahun 2020 dan Realisasi Tahun 2019
Table of Comparison between Realization of Electricity Production in 2020 with RKAP 2020 and Realization in 2019

(dalam juta kWh / in million kWh)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to		
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	Porsi Tahun 2020 (dalam %) / Share in 2020 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
PT PLN (Persero)	647.473.283	631.540.765	466.612.970	97,54	135,35	64,82
Ke Non PLN/Swasta / To Non PLN/Private	309.344.151	295.302.156	347.174.655	95,46	85,06	30,31
Pemakaian Sendiri / Own Usage	42.266.769	47.423.079	30.928.375	112,20	153,333	4,87
Total	999.084.203	974.266.000	844.716.000	97,52	115,34	100,00

Listrik hasil produksi Perusahaan disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan swasta serta sebagian lainnya digunakan sendiri oleh Perusahaan. Pada tahun 2020, penyaluran listrik ke PT PLN (Persero) sebesar 631,54 juta kWh atau 64,82% dari total produksi. Penyaluran ke PT PLN (Persero) tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 35,35% atau setara dengan 164,93 juta kWh dari sebelumnya sebesar 466,61 juta kWh.

Electricity produced by the Company is distributed to PT PLN (Persero) and the private sector, and some are used by the Company itself. In 2020, the distribution of electricity to PT PLN (Persero) amounted to 631.54 million kWh or 64.82% of total production. Distribution to PT PLN (Persero) in 2020 increase from 2019 by 35.35% or equivalent to 164.93 million kWh from the previous year of 466.61 million kWh.

Penyaluran listrik kepada Non PT PLN (Persero)/Swasta pada tahun 2020 adalah sebesar 295,30 juta kWh atau 30,31% dari total produksi. Jumlah ini menurun 51,87 juta kWh atau 14,94% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 347,17 juta kWh.

The distribution of electricity to Non PT PLN (Persero)/ Private in 2020 amounted to 295.30 million kWh or 30.31% of total production. This amount decreased by 51.87 million kWh or 14.94% compared to 2019 at 347.17 million kWh.

Adapun penyaluran listrik untuk pemakaian sendiri di tahun 2020 sebesar 47,42 juta kWh atau 4,87% dari total produksi. Jumlah ini meningkat 16,49 juta kWh atau 53,33% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 30,93 juta kWh.

The distribution of electricity for electricity use in 2020 amounted to 47.42 million kWh or 4.87% of total production. This amount increase by 16.49 million kWh or 53.33% compared to 2019 which was 30.93 million kWh.

Pendapatan Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Pada tahun 2020, Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik mencatatkan Pendapatan sebesar Rp449.956 juta, meningkat Rp16.500 juta atau 3,81% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp433.456 juta.

Revenue from Power Generation and Distribution

In 2020, Power Generation and Distribution segment recorded revenues of Rp449,956 million, an increase of Rp16,500 million or 3.81% compared to 2019 of Rp433,456 million.

Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Profitability of Power Generation and Distribution Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2019 – 2020
Table of Profitability of Power Generation and Distribution Segment in 2019 – 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Listrik / Electricity Revenue	449.956	433.456	16.500	3,81
Beban Listrik / Electricity Expenses	101.634	96.430	5.204	5,40
Laba Operasi / Operating Profit	348.322	337.026	11.296	3,35
Profitabilitas / Profitability	77,41%	77,75%	-	-0,34

Pendapatan dari penyaluran listrik tahun 2020 berjumlah Rp449.956 juta dengan beban operasi sebesar Rp101.634 juta sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp348.322 juta dengan profitabilitas sebesar 77,41%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan listrik tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp16.500 juta atau 3,81%, beban listrik meningkat sebesar Rp5.204 juta atau 5,40%, dan laba operasi pun meningkat sebesar Rp11.296 juta atau 3,35%. Akan tetapi, peningkatan tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2020 menurun sebesar 0,34% dari tahun 2019 sebesar 77,75% menjadi 77,41% pada tahun 2020.

Penurunan profitabilitas ini akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya konsumsi listrik oleh pihak Non PLN/Swasta, dilain pihak berdampak pada meningkatnya serapan konsumsi listrik oleh PT. PLN dengan tarif lebih rendah.

Revenues from electricity distribution in 2020 amounted to Rp449,956 million with operating expense of Rp101,634 million, which resulted in an operating profit of Rp348,322 million and profitability of 77.41%. Compared to 2019, electricity revenues in 2020 increase by Rp16,500 million or 3.81%, electricity expenses increase by Rp5,204 million or 5.40%, and operating profit increase by Rp11,296 million or 3.35%. however, the increase caused profitability in 2020 to decrease by 0.34% from 2019 by 77.75% to 77.41% in 2020.

This decrease in profitability was a result of the Covid-19 pandemic which had an impact on reducing electricity consumption by non-PLN / private parties, on the other hand it had an impact on increasing electricity consumption absorption by PT. PLN at a lower rate.

Jasa Air Deskripsi Usaha

Segmen operasi penyediaan air meliputi air baku, air bersih, dan air irigasi. Perusahaan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) yang berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2020.

Sebagai BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), pelaksanaan tugas PJT II terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek sosial dan aspek komersial. Berdasarkan volume air yang disalurkan serta ditinjau dari aspek komersial, penyediaan air baku yang dipasok ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/ Kota, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya serta Air Bersih hanya sebesar 13%. Selebihnya merupakan kontribusi PJT II dalam membantu Pemerintah terkait dengan pengelolaan irigasi, penanganan banjir, konservasi, penyuluhan, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian di daerah irigasi utara dan selatan Jatiluhur yang mendapatkan *supply*/pasokan air dari sumber setempat dan Bendungan Ir. H. Djuanda (Jatiluhur).

Water Services Business Description

The water supply operation segment includes raw water, clean water and irrigation water. The Company includes in Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) which is guided by the 2020 Citarum Cascade Reservoir Operation Plan.

As a state-owned enterprise in the form of Perusahaan Umum (PERUM), there were 2 (two) aspects of duty of PJT II, namely commercial and social aspects. Based on the volume of water supplied, from the commercial aspect of the provision of raw water supplied to the Regency/Municipal Water Supply Company (PDAM), the Water Supply Company (PAM) Jaya and Water Supply only gained profit for PJT II of 13%, the rest is the contribution of PJT II in assisting the Government, related to irrigation management, flood handling, conservation, counseling and support to national food security program in agriculture, especially for agriculture in north and south parts of Jatiluhur that get water supply from local sources and Ir. H. Djuanda (Jatiluhur) Reservoir.



Produktivitas Segmen Jasa Air

1. Air Baku

Realisasi penyaluran air baku tahun 2020 sebesar 1.001,62 juta m³ atau 104,44% dari RKAP tahun 2020 sebesar 959,08 juta m³. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 30,15 juta m³ atau 2,92% ,bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.031,77 juta m³.

Water Service Segment Productivity

1. Raw Water

The realization of the distribution of raw water in 2019 was 1,031.77 million m³ or 92.15% of the 2019 RKAP of 1,119.63 million m³. This amount decreased by 59.45 million m³ or 5.45% compared to 2018 realization of 1,091.22 million m³.

Tabel Penyaluran Air Baku
Table of Raw Water Distribution

(dalam juta m³ / in million m³)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to		
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2020	Porsi Tahun 2020 (dalam %) / Share in 2020 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
PAM Jaya	528,95	526,70	530,19	99,57	99,34	52,58
PDAM Kabupaten/Kota	142,35	173,30	188,80	121,74	91,80	17,30
Industri / Industry	244,16	262,06	273,99	107,33	95,65	26,16
PT Sang Hyang Seri	43,62	39,56	38,79	90,70	101,98	3,96
Jumlah / Total	959,08	1.001,62	1.031,77	104,44	97,08	100,00

Dari tabel di atas, realisasi penyaluran air baku ke PAM Jaya pada tahun 2020 sebesar 526,70 juta m³ atau 99,57% dari RKAP 2020 sebesar 528,95 juta m³. Realisasi ini menurun 3,49 juta atau 0,66% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 530,19 juta m³.

From the above table, the realization of the distribution of raw water to PAM Jaya in 2020 was 526.70 million m³ or 99.57% of the 2020 RKAP of 528.95 million m³. This realization decreased by 3.49 million or 0.66% compared to the realization in 2019 of 530.19 million m³.

Realisasi penyaluran air baku ke PDAM Kabupaten/ Kota pada tahun 2020 sebesar 173,30 juta m³ atau 121,74% dari RKAP 2020 sebesar 142,35 juta m³. Realisasi ini menurun 15,50 juta m³ atau 8,20% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 188,80 juta m³. Turunnya produksi air baku dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh belum terbitnya Surat Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) dari Instansi Pemerintah yang berwenang karena masih dalam proses. Proses SIPSDA tersebut dalam tahun 2020 terkendala percepatannya karena dampak pandemi Covid-19.

The realization of raw water distribution to Regency/ City PDAMs in 2020 was 173.30 million m³ or 121.74% of the 2020 RKAP of 142.35 million m³. This realization decreased by 15.50 million m³ or 8.20% compared to the realization in 2019 of 188.80 million m³. The decrease the raw water production plan compared in 2019 was because the Water Resources Utilization Permit (SIPSDA) has not been issued yet from authorized Government Agencies and/or is still on process. Process accerelation is constrained in 2020 due to the impact of the Covid-19 pandemic.

Realisasi penyaluran air baku ke Industri pada tahun 2020 sebesar 262,06 juta m³ atau 107,33% dari RKAP 2020 sebesar 244,16 juta m³. Capaian ini menurun 11,93 juta m³ atau 4,35% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 273,99 juta m³. Turunnya produksi air baku industri dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan belum terbitnya SIPSDA.

The realization of the distribution of raw water to Industry in 2020 was 262.06 million m³ or 107.33% of the 2020 RKAP of 244.16 million m³. This achievement decreased by 11.93 million m³ or 4.35% when compared to the realization in 2019 of 273.99 million m³. The decline in industrial raw water production compared to 2019 is due to the absence of the publication of SIPSDA.

Realisasi penyaluran air baku ke PT Sang Hyang Seri tahun 2020 sebesar 39,56 juta m³ atau 90,70% dari RKAP 2020 sebesar 43,62 juta m³. Capaian ini meningkat 0,77 juta m³ atau 1,98% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 38,79 juta m³.

The realization of raw water distribution to PT Sang Hyang Seri in 2020 amounted to 39.56 million m³ or 90.70% of the 2020 RKAP of 43.62 million m³. This achievement increased by 0.77 million m³ or 1.98% when compared to the realization in 2019 of 38.79 million m³.

2. Air Baku ke PLTA

Realisasi penyaluran air baku tahun 2020 sebesar 631,54 juta kWh atau 13,33% dari RKAP tahun 2020 sebesar 4.739 juta m³. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 164,93 juta kWh atau 35,35% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 466,61 juta kWh. Disebabkan belum ada perjanjian pemanfaatan sumber daya air bagi pembangkitan ke PT Pembangkitan Jawa Bali (PLTA Cirata) dan PT Indonesia Power (PLTA Saguling).

Perbandingan realisasi penyaluran air baku ke PLTA tahun 2020 dengan RKAP tahun 2020 dan realisasi tahun 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

2. Raw water to Hydropower Plant

Realization of the distribution of raw water in 2019 was 466.61 million kWh or 11.35% of the 2019 RKAP of 4,112.75 million m³. This amount decreased by 33.25 million kWh or 6.65% compared to the realization in 2018 of 499.86 million kWh. This is because there is no agreement on the use of water resources for generation to PT Pembangkitan Jawa Bali (PLTA Cirata) and PT Indonesia Power (PLTA Saguling).

Comparison of the realization of the distribution of raw water to PLTA 2020 with the 2020 RKAP and the realization of 2019 is presented in the following table :

Tabel Perbandingan dan Realisasi Penyaluran Air Baku ke PLTA Tahun 2020
Table of Comparison and Realization of Raw Water Distribution to Hydropower Plant in 2020

(dalam juta kWh / in million kWh)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to	
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
PLTA Ir. H. Djuanda	669.547.944	631.540.765	466.612.970	94,32	135,35
PLTA Saguling	2.519.128.932	-	-	-	-
PLTA Cirata	1.550.329.429	-	-	-	-
Jumlah / Total	4.739.006.305	631.540.765	466.612.970	13,33	135,35

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran air baku ke PLTA Ir. H. Djuanda tahun 2020 menghasilkan produksi listrik sebesar 631,54 juta kWh atau 94,32% dari RKAP 2020 sebesar 669,55 juta kWh. Capaian ini meningkat 164,93 juta kWh atau 35,35% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 466,61 juta kWh.

Based on the table, the realization of the distribution of raw water to Ir. H. Djuanda Hydropower Plant in 2020 produced electricity production of 631.54 million kWh or 94.32% of the 2020 RKAP of 669.55 million kWh. This achievement increase by 164.93 million kWh or 35.35% compared to the realization in 2019 of 466.61 million kWh.

3. Air Bersih

Realisasi penyaluran air bersih tahun 2020 sebesar 2,52 juta m³ atau 104,46% dari RKAP 2020 sebesar 2,41 juta m³. Capaian ini meningkat 0.61 juta m³ atau 31.82% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 1,91 juta m³. Tidak tercapainya penyaluran air bersih terhadap rencana produksi disebabkan oleh belum terealisasinya penyaluran ke SPAM Marunda.

Perbandingan realisasi penyaluran air bersih tahun 2020 dengan RKAP tahun 2020 dan realisasi tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

3. Clean water

The realization of clean water distribution in 2020 was 2.52 million m³ or 104,46% of the 2020 RKAP of 2.41 million m³. This achievement increased by 0.61 million m³ or 31.82% compared to the realization in 2019 of 1.91 million m³. The clean water distribution target was not achieved according to the production plan because distribution to SPAM Marunda was not yet realized.

Comparison of the realization of clean water distribution in 2020 with the 2020 RKAP and the realization in 2019 is presented in the following table :



Tabel Penyaluran Air Bersih Tahun 2020
Table of Clean Water Distribution in 2020

(dalam m³ / in m³)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to		
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	Porsi Tahun 2020 (dalam %) / Share in 2020 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Industri / Industry	86.781	143.720	155.964	165,61	92,15	5,71
Pemakaian Sendiri / Own Usage	772,740	655.816	680.799	84,87	96,33	26,06
Penduduk / Occupant	1.003.332	1.041.102	1.047.383	103,76	99,40	41,38
Air Bersih Curah / Bulk Clean Water	545.946	675.631	24.697	123,75	2.735,68	26,85
Jumlah / Total	2.408.799	2.516.269	1.908.843	104,46	131,82	100,00

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran air bersih ke Industri pada tahun 2020 sebesar 143.720 m³ atau 165,61% dari RKAP 2020 sebesar 86.781 m³. Capaian tersebut menurun 12.244 m³ atau 7,85% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 155.964 m³.

Based on the table, the realization of clean water distribution to the industry in 2020 was 143,720 m³ or 165.61% of the 2020 RKAP of 86,781 m³. This achievement decreased by 12,244 m³ or 7.85% compared to the realization in 2019 of 155,964 m³.

Realisasi penyaluran air bersih pemakaian sendiri untuk wilayah Jatiluhur dan Curug pada tahun 2020 sebesar 655.816 m³ atau 84,87% dari RKAP 2020 sebesar 772.740 m³. Capaian tersebut menurun 24.983 m³ atau 3,67% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 680.799 m³.

The realization of the distribution of clean water for own usage for the Jatiluhur and Curug areas in 2020 was 655,816 m³ or 84.87% of the 2020 RKAP of 772,740 m³. This achievement decreased by 24,983 m³ or 3.67% compared to the realization in 2019 of 680,799 m³.

Realisasi penyaluran air bersih ke penduduk pada tahun 2020 sebesar 1.041.102 m³. Capaian tersebut menurun 6.281 m³ atau 0,60% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Capaian tersebut meningkat 37.770 m³ atau 3,76% bila dibandingkan RKAP tahun 2020 sebesar 1.003.332 m³.

The realization of the distribution of clean water to the occupants in 2020 amounted to 1,041,102 m³. This achievement decreased by 6,281 m³ or 0.60% compared to the realization in 2019. This achievement increased by 37,770 m³ or 3.76% compared to the realization in 2020 of 1,003,332 m³.

Realisasi penyaluran air bersih curah tahun 2020 sebesar 675.631 m³ atau 123,75% dari RKAP 2020 sebesar 545.946 m³. Jumlah tersebut meningkat 650.934 m³ atau 2.635,68% dibandingkan dengan realisasi 2019.

The realization of bulk clean water distribution in 2020 was 675,631 m³ or 123.75% of the 2020 RKAP of 545,946 m³. This amount increased 650,934 m³ or 2,635.68% compared to the realization of 2019.

4. Air Irigasi

Realisasi penyaluran air irigasi untuk tanam padi Musim Tanam (MT) Rendeng dan MT Gadu berjumlah 554.610 Ha atau 107,30% dari RKAP 2020 sebesar 516.868 Ha. Capaian ini terdiri dari 49,87% total Rendeng DI. Utara dan Selatan Jatiluhur sebesar 276.612 Ha dan 50,13% total Gadu DI. Utara dan Selatan Jatiluhur sebesar 270.484 Ha.

4. Irrigation Water

The realization of irrigation water distribution for the planting season of Rendeng and Gadu is 554,610 Ha or 107.30% of the 2020 RKAP of 516,868 Ha. This achievement consisted of 49.87% of the total Rendeng of DI of North and South Jatiluhur at 276,612 hectares and 50.13% of the total Gadu of DI of North and South Jatiluhur at 270,484 Ha.

Tabel Musim Tanam (MT) Rendeng Tahun 2019/2020 dan MT Gadu Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur Tahun 2020
Table of Wet Season Plantation in 2019-2020 and Dry Season Plantation in Jatiluhur Irrigation Area 2020

(dalam Ha, kecuali dinyatakan lain / in Ha, except stated otherwise)

No.	Daerah Irigasi / Irrigation Area	Realisasi 2020 / Realization 2020	Rencana / Plan	% Realisasi terhadap Rencana / % Realization to Plan
1.	MT Rendeng DI Utara Jatiluhur / Wet Season Plantation in North Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	213.228	220.053	96,90
	Luar Target / Beyond Target	3.068	-	-
	Jumlah / Total	216.296	220.053	98,29
	MT Rendeng DI Selatan Jatiluhur / Wet Season Plantation in South Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	50.431	50.431	100,00
	Luar Target / Beyond Target	9.885	-	-
	Jumlah / Total	60.316	50.431	119,60
	Total Rendeng	276.612	270.484	102,27
2.	MT Gadu DI Utara Jatiluhur / Dry Season Plantation in North Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	212.646	215.692	98,59
	Luar Target / Beyond Target	6.885	-	-
	Jumlah / Total	219.531	215.692	101,78
	MT Gadu DI Selatan Jatiluhur / Dry Season Plantation in South Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	29.332	30.692	95,57
	Luar Target / Beyond Target	29.135	-	-
	Jumlah / Total	58.467	30.692	190,50
	Total Gardu	277.998	246.384	112,83
	Total Rendeng + Gardu	554.610	516.868	107,30

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tanam padi MT Rendeng DI Utara Jatiluhur tahun 2019/2020 seluas 216.296 Ha atau 98,29% dari rencana produksi tahun 2019/2020 seluas 220.053 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target). Sedangkan untuk realisasi tanam padi MT Rendeng DI Selatan Jatiluhur seluas 60.316 Ha atau 119,60% dari rencana produksi tahun 2019/2020 seluas 50.431 Ha (terdiri dari target dan luar target).

Realisasi tanam padi MT Gadu DI Utara Jatiluhur sampai dengan Desember 2020 seluas 219.531 Ha atau 101,78% dari rencana produksi seluas 215.692 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target). Sedangkan untuk realisasi tanam padi MT Gadu DI Selatan Jatiluhur seluas 58.467 Ha atau 190,50% dari rencana produksi tahun 2020 seluas 30.692 ha (terdiri dari dalam target dan luar target).

Rencana produksi tanam padi MT Rendeng tahun 2019/2020 DI Jatiluhur berdasarkan pembagian golongan air dimulai sejak 1 Oktober 2019, sedangkan MT Gadu tahun 2020 dimulai 1 Juni 2020.

Based on the above table, rice planting on Wet Season Plantation in North Jatiluhur in 2019/2020 was realized on 216,296 hectares of land or 98.29% of the 2019/2020 production plan covering 220,053 hectares (consisting of both within and beyond target). As for the realization of rice planting on Wet Season Plantation in Jatiluhur was 60,316 hectares or 119.60% of the 2019/2020 production plan covering 50,431 hectares (consisting of target and beyond target).

The realization of rice planting on Dry Season Plantation in North Jatiluhur until December 2020 took an area of 219,531 hectares or 101.78% of the production area plan of 215,692 hectares (consisting of both within and beyond target). As for the realization of rice planting on Dry Season Plantation in South Jatiluhur, it covered an area of 58,467 hectares or 190.50% of the 2020 production area plan of 30,692 hectares (consisting of both within and beyond target).

The rice planting production plan of Wet Season Plantation in 2019/2020 in Jatiluhur was based on the division of water group that began on October 1, 2019, while Dry Season Plantation in 2020 began on June 1, 2020.



Realisasi pemberian air untuk Musim Tanam Rendeng 2019/2020 dan MT Gadu 2020 sebesar 6.916,09 juta m³ atau 111,05% dari RKAP 2020 sebesar 6.228,14 juta m³ yang airnya berasal dari sumber setempat dan Waduk Ir. H. Djuanda.

The realization of water supply for the 2019/2020 Wet Season Plantation and Dry Season Plantation 2020 amounted to 6,916.09 million m³ or 111.05% of the 2020 RKAP of 6,228.14 million m³ where water came from local sources and the Ir. H. Djuanda Reservoir.

5. Pengelolaan 3 Waduk

Rencana dan realisasi pengelolaan Waduk Saguling, Cirata dan Ir. H. Djuanda berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2020 yang merupakan hasil kesepakatan bersama institusi dalam rangka Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC).

5. Management of 3 reservoirs

Plan and realization of the management of the Saguling, Cirata and Ir. H. Djuanda Reservoirs refer to the 2020 Citarum Reservoir Operation Plan which is the result of an agreement with the institution as part of Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC).

Data yang menggambarkan realisasi dan rencana Air Masuk, Air Keluar dan Tinggi Muka Air 3 Waduk pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Data describing the realization and plan of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of 3 Reservoirs in 2020 is presented in the following table :

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Saguling Tahun 2020
Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Saguling Reservoir in 2020

Bulan / Month	Air Masuk (Juta m ³) / Incoming Water (Million m ³)		Air Keluar (Juta m ³) / Outgoing Water (Million m ³)		Tinggi Muka Air (mdpl) / Water Level (masl)	
	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Rencana / Plan	Realisasi / Realization
Januari / January	310,83	197,87	254,24	176,06	630,52	629,42
Februari / February	331,75	243,07	250,66	306,13	632,83	634,09
Maret / March	415,23	299,14	321,30	302,19	635,52	637,01
April / April	407,67	337,29	315,35	468,04	638,20	641,45
Mei / May	253,15	176,58	226,29	311,59	640,39	642,13
Juni / June	147,38	59,19	209,11	161,99	640,90	642,47
Juli / July	83,96	12,10	163,50	129,86	639,34	641,77
Agustus / August	48,87	45,83	124,98	128,25	637,08	639,95
September	49,09	26,00	113,88	136,65	634,52	637,52
Oktober / October	95,24	146,87	150,08	215,01	631,90	634,14
November / November	261,73	156,33	243,60	177,63	629,23	631,62
Desember / December	336,05	206,81	290,38	199,52	630,01	629,68
Jumlah / Total	2.740,95	1.907,08	2.663,37	2.712,92		
Rata-rata / Average	228,41	158,92	221,95	226,08		
% Realisasi : Rencana / % Realization : Plan	69,58%		101,86%			

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Saguling terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2020 berjumlah rata-rata sebesar 158,92 juta m³ atau 69,58% dari rencana sebesar 228,41 juta m³.

Based on the above table, the realization of incoming water from the Saguling Reservoir effective from January to December 2020 amounted to a total of 158.92 million m³ on average or 69.58% of the target at 228.41 million m³.

Realisasi air keluar Waduk Saguling dari Januari sampai dengan Desember 2020 memiliki rata-rata sebesar 226,08 juta m³ atau 101,86% dari rencana sebesar 221,95 juta m³.

The realization of outgoing water from the Saguling Reservoir effective from January to December 2020 amounted to a total of 226,08 million m³ on average or 101.86% of the target at 221.95 million m³.

Realisasi TMA Waduk Saguling pada tanggal 1 Desember 2020 berada pada elevasi +629,68 mdpl atau lebih rendah 0,33 meter dari rencana pada elevasi +630,01 mdpl.

The realization of water level at the Saguling Reservoir on December 1, 2020 was at +629.68 masl or 0,33 meters lower than the elevation target of +630.01 masl.

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Cirata Tahun 2020
Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Cirata Reservoir in 2020

Bulan / Month	Air Masuk (Juta m ³) / Incoming Water (Million m ³)		Air Keluar (Juta m ³) / Outgoing Water (Million m ³)		Tinggi Muka Air (mdpl) / Water Level (masl)	
	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Rencana / Plan	Realisasi / Realization
Januari / January	543,03	423,95	464,81	372,85	208,93	208,37
Februari / February	554,07	648,71	442,85	44,80	210,42	209,53
Maret / March	649,75	744,45	521,48	562,42	212,49	213,61
April / April	614,32	854,38	487,85	740,95	214,86	217,22
Mei / May	446,17	621,54	402,75	614,47	217,06	219,35
Juni / June	322,94	313,65	392,77	367,04	217,60	219,47
Juli / July	230,81	190,26	330,39	256,55	215,98	218,48
Agustus / August	170,05	191,61	262,50	315,82	213,83	217,23
September / September	169,00	217,72	249,29	383,60	211,69	214,69
Oktober / October	271,86	379,87	331,86	454,67	209,71	211,35
November / November	490,22	327,92	458,60	393,10	208,10	209,71
Desember / December	524,07	359,46	457,14	414,74	208,56	208,18
Jumlah / Total	4.986,29	5.273,52	4.802,30	5.324,01		
Rata-rata / Average	415,52	439,46	400,19	443,67		
% Realisasi : Rencana / % Realization : Plan		105,76%		110,86%		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Cirata terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2020 memiliki rata-rata sebesar 439,46 juta m³ atau 105,76% dari rencana sebesar 415,52 juta m³.

Realisasi air keluar Waduk Cirata dari Januari sampai dengan Desember 2020 memiliki rata-rata sebesar 443,67 juta m³ atau 110,86% dari rencana sebesar 400,19 juta m³.

Realisasi TMA Waduk Cirata pada tanggal 1 Desember 2020 berada pada elevasi +208,18 mdpl atau lebih rendah 0,38 meter dari rencana pada elevasi +208,56 mdpl.

Based on the above table, the realization of incoming water from the Cirata Reservoir effective from January to December 2020 amounted to a total of 439.46 million m³ on average or 105.76% of the target at 415.52 million m³.

The realization of outgoing water from the Cirata Reservoir effective from January to December 2020 amounted to a total of 443.67million m³ on average or 110.86% of the target at 400.19 million m³.

The realization of water level at the Cirata Reservoir on December 1, 2020 was at +208,18 masl or 0,38 meters lower than the elevation target of +208.56 masl.



Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Ir. H. Djuanda Tahun 2020
Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Ir. H. Djuanda Reservoir in 2020

Bulan / Month	Air Masuk (Juta m ³) / Incoming Water (Million m ³)		Air Keluar (Juta m ³) / Outgoing Water (Million m ³)		Tinggi Muka Air (mdpl) / Water Level (masl)	
	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Rencana / Plan	Realisasi / Realization
Januari / January	531,10	423,10	326,31	226,24	91,66	89,39
Februari / February	515,38	566,19	323,07	246,99	94,86	92,50
Maret / March	595,18	658,86	373,32	289,77	97,55	97,49
April / April	560,88	858,61	343,81	554,14	100,58	102,42
Mei / May	454,99	718,52	393,64	651,97	103,35	106,08
Juni / June	429,76	403,05	578,03	441,90	104,03	106,60
Juli / July	354,28	283,40	544,18	476,10	101,99	105,91
Agustus / August	277,86	328,21	458,82	549,67	99,27	103,15
September / September	253,45	382,28	406,60	558,21	96,51	99,68
Oktober / October	354,10	487,29	482,84	581,79	94,01	96,54
November / November	508,17	403,74	463,77	566,12	91,77	94,72
Desember / December	514,99	428,52	405,61	482,28	92,39	91,57
Jumlah / Total	5.350,14	5.941,77	5.100,00	5.625,18		
Rata-rata / Average	445,85	495,15	425,00	468,77		
% Realisasi : Rencana / % Realization : Plan	111,06%		110,30%			

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Ir. H. Djuanda terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2020 berjumlah rata-rata sebesar 495,15 juta m³ atau 111,06% dari rencana sebesar 445,85 juta m³.

Realisasi air keluar Waduk Ir. H. Djuanda dari Januari sampai dengan Desember 2020 memiliki rata-rata 468,77 juta m³ atau 110,30% dari rencana sebesar 425,00 juta m³.

Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda pada tanggal 1 Desember 2020 berada pada elevasi +91,57 mdpl atau lebih rendah 0,82 meter dari rencana pada elevasi +92,39 mdpl.

Based on the above table, the realization of incoming water from the Ir. H. Djuanda Reservoir effective from January to December 2020 amounted to a total of 495.15 million m³ on average or 111.06% of the target at 445.85 million m³.

The realization of outgoing water from the Ir. H. Djuanda Reservoir effective from January to December 2020 amounted to a total of 468.77 million m³ on average or 110.30% of the target at 425.00 million m³.

The realization of water level at the Ir. H. Djuanda Reservoir on December 1, 2020 was at +91.57 masl or 0.82 meters lower than the elevation target of +92.39 masl.

Pendapatan Segmen Jasa Air

Pada tahun 2020, Segmen Jasa Air mencatatkan Pendapatan sebesar Rp295.266 juta, menurun Rp3.547 juta atau 1,19% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp298.813 juta. penurunan pendapatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan air baku pada tahun 2020.

Water Services Segment Revenues

In 2020, the Water Services Segment recorded Revenue of Rp. 295,266 million, a decrease of Rp. 3,547 million or 1.19% compared to 2019 of Rp. 298,813 million. This decrease in revenue was mainly due to a decrease in raw water revenue in 2020.

Profitabilitas Segmen Jasa Air

Profitability of Water Service Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Jasa Air Tahun 2019 – 2020
Table of Profitability of Water Services Segment in 2019 – 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Jasa Air / Water Service Revenue	295,266	298.813	(3.547)	1,19
Beban Jasa Air / Water Service Expenses	363.175	325.436	37.738	11,59
Rugi Operasi / Operating Loss	(67.909)	(26.623)	41.286	39,20
Profitabilitas / Profitability	-22,99%	-8,90%	-	-15,65

Pendapatan dari jasa air tahun 2020 berjumlah Rp295.266 juta dengan beban operasi sebesar Rp363.175 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp67.909 juta dan profitabilitas sebesar minus 22,99%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan jasa air tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.547 juta atau 1,19%, beban jasa air meningkat Rp37.738 juta atau 11,59%, dan rugi operasi meningkat Rp41.286 juta atau 39,20%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2020 menurun 15,65% dari sebelumnya minus 8,90% pada tahun 2019 menjadi minus 22,99% pada tahun 2020. Penurunan ini terutama dikarenakan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) beberapa perusahaan belum diterbitkan.

Revenues from water services in 2020 amounted to Rp295,266 million with operating expenses of Rp363,175 million resulting in an operating loss of Rp67,909 million and profitability of minus 22.99%. Compared to 2019, water service revenue in 2020 decreased by Rp3,547 million or 1.19%, water service expenses increased by Rp37,738 million or 11.59%, and operating losses increased by Rp41,286 million or 39.20%. This caused profitability in 2020 to decrease by 15.65% from minus 8.90% in 2019 to minus 22.99% in 2020. This decrease was mainly due to the fact that several companies' Water Resources Concession Permits (SIPSDA) had not been issued.

Kepariwisata Deskripsi Usaha

Keberadaan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bangunan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perusahaan telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, playground, lapangan tenis, perkemahan, dan wahana rekreasi air serta sarana olahraga air.

Fasilitas pariwisata di kawasan Bandungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi dengan bangunan hotel bintang tiga dengan nama kawasan Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan ini, terdapat 33 bungalow dan 30 kamar hotel, juga terdapat 7 (tujuh) ruang pertemuan yang 5 (lima) di antaranya berada di Gedung Grha Vidya (terdiri dari satu ruang utama berkapasitas 800 orang dan empat ruang pertemuan berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 (dua) ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan fasilitas rekreasi lainnya.

Tourism Business Description

The existence of the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir that is equipped with beautiful natural scenery combined with the splendor of the reservoir building makes a tourist attraction and become one of the Tourism destinations in West Java. In taking advantage of the tourism potential in the region, the Company has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, playgrounds, tennis courts, campsites, and water recreation rides and sports facilities.

Tourism facilities in the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir area are complemented with a three-star hotel building called the Jatiluhur Hotel Resort area which has been operating since 1967. 33 bungalows and 30 hotel rooms were built within the premises, including 7 (seven) meeting rooms, 5 (five) of which are located in the Grha Vidya Building (consisting of one main room with a capacity of 800 people and four meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 (two) separate meeting rooms in the Istora Restaurant area with a capacity of 80 people each. The tourism area is also equipped with swimming pool and water recreation facilities in the form of a water park with the name Jatiluhur Water World (JWW), cruise ships, water skiing, and other recreational facilities.



Produktivitas Segmen Pariwisata

Optimalisasi produktivitas pariwisata yang tersedia di tahun 2020 telah dilaksanakan walaupun kunjungan tamu masih didominasi pada akhir pekan dan pada saat libur nasional. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tetap diterapkan di samping atraksi-atraksi guna meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Selama tahun 2020, Perusahaan telah menggelar beberapa event dalam rangka mendongkrak kinerja segmen pariwisata, antara lain Eksibisi Jatiluhur Paddle Board Festival, Fun and Family Run 10K, dan The 1st International Jatiluhur Jazz Festival.

Informasi mengenai perbandingan realisasi produksi pariwisata tahun 2020 dengan RKAP 2020 dan realisasi tahun 2019 dimuat dalam tabel berikut :

Tourism Segment Productivity

Productivity optimization of tourism available in 2020 were carried out even though guest traffic was mostly high on weekends and during national holidays. Efforts to improve facilities and infrastructure, as well as attractions itself, are continuously implemented in order to increase tourist visit rate. During 2020, the Company held several events in order to boost the performance of the tourism segment, including the Jatiluhur Paddle Board Festival Exhibition, 10K Fun and Family Run, and The 1st International Jatiluhur Jazz Festival.

Information regarding the comparison of the realization of tourism production in 2020 and the 2020 RKAP and the realization in 2019 is described in the following table:

Tabel Produktivitas Segmen Pariwisata Tahun 2020
Table of Productivity of Tourism Segment in 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / %	
					RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization in 2019
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Hotel & Bungalow						
Hotel Pesanggrahan	unit	6.661	2.622	1.620	39,36	161,85
Hotel Istora & Bungalow	kamar / Room	2.655	1.336	4.472	50,32	29,87
Rekreasi / Recreational						
Kapal Motor / Motor Boat	trip	122	191	145	156,56	131,72
Ticketing	Orang / Person	88.614	101.516	211.361	114,56	48,03
Water World						
Ticketing	Orang / Person	20.455	6.956	27.619	34,01	25,19
Bar & Restoran / Bar & Restaurant						
Room Service	Porsi / Portion	1.723	25	2.510	1,45	1,00
Restoran (Poolside Bar)	Porsi / Portion	25.889	19.155	56.995	73,99	33,61
Food & Beverages	Porsi / Portion	16.938	2.583	44.147	15,25	5,85
Gedung Konversi / Conversion Building						
Room Rental	Kali / Times	11	11	123	100,00	8,94

Realisasi Hotel Pesanggrahan tahun 2020 sebanyak 2.622 unit atau 39,36% dari RKAP 2020 sebanyak 6.661 unit. Capaian ini naik 1.002 unit atau 61,85% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 1.620 unit. Tidak tercapainya rencana produksi disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Realisasi Hotel Istora dan Bungalow pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.336 kamar atau 50,32% dari RKAP 2020 sebanyak 2.655 kamar. Capaian ini menurun 3.136 kamar atau 70,13% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 4.472 kamar. Tidak tercapainya rencana produksi ini selain dikarenakan pandemi Covid-19 juga adanya bencana longsor di Hotel Istora.

Realisasi Kapal Motor tahun 2020 sebanyak 191 trip atau 156,56% dari RKAP 2020 sebanyak 122 trip. Jumlah ini meningkat 46 trip atau 31,72% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 145 trip.

The occupancy realization of Pesanggrahan Hotel in 2020 was 2,622 units or 39.36% of the 2020 RKAP of 6,661 units. This achievement increased by 1,002 units or 61.85% compared to the realization in 2019 of 1,620 units. The production plan was not achieved affected by Covid-19 pandemic.

The occupancy realization of Istora Hotel and Bungalows in 2020 was 1,336 rooms or 50.32% of the 2020 RKAP of 2,655 rooms. This achievement decreased by 3.136 rooms or 70.13% compared to the realization in 2019 of 4,472 rooms. This production plan was not achieved other than due to a pandemic Covid-19, there was also a landslide disaster at the Hotel Istora.

Trip realization of Motor Boat in 2020 was 191 trips or 156.56% of the 2020 RKAP of 122 trips. This number increased by 46 trips or 31.72% compared to the realization in 2019 of 145 trips.

Realisasi Pengunjung Rekreasi (*Ticketing*) tahun 2020 sebanyak 101.516 orang atau 114,56% dari RKAP 2020 sebanyak 88.614 orang. Jumlah ini menurun 109.845 orang atau 51,97% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 211.361 orang. Turunnya realisasi pengunjung Rekreasi (*Ticketing*) dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan fasilitas rekreasi (wahana baru) sehingga kurang menarik pengunjung.

Realisasi pengunjung *Water World* tahun 2020 sebanyak 6.956 orang atau 34,01% dari RKAP 2020 sebanyak 20.455 orang. Jumlah ini menurun 20.663 orang atau 74,81% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebanyak 27.619 orang. Tidak tercapainya rencana produksi dikarenakan adanya beberapa pesaing kolam renang di wilayah Purwakarta dengan konsep terkini dan belum adanya wahana tambahan di *Water World*.

Realisasi *Room Service (Food & Beverage)* tahun 2020 sebanyak 25 porsi atau 1,45% dari RKAP 2020 sebanyak 1.723 porsi. Jumlah ini menurun 2.485 porsi atau 99,00% dari realisasi tahun 2019 sebanyak 2.510 porsi. Tidak tercapainya rencana produksi disebabkan oleh tingkat hunian Hotel Pesanggrahan dan bungalow yang rendah sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target *Room Service (Food & Beverage)*.

Realisasi *Poolside Bar* tahun 2020 sebanyak 19.155 porsi atau 73,99% dari RKAP 2020 sebanyak 25.889 porsi. Jumlah ini menurun 37.840 porsi atau 66,39% dari realisasi tahun 2019 sebanyak 56.995 porsi.

Realisasi penjualan *Food & Beverage (Banquet)* tahun 2020 sebanyak 2.583 porsi atau 15,25% dari RKAP 2020 sebanyak 16.938 porsi. Jumlah ini menurun 41.564 porsi atau 94,15% dari realisasi tahun 2019 sebanyak 44.147 porsi. Penurunan dan belum tercapainya rencana produksi dikarenakan tingkat kunjungan wisatawan rendah sehingga berpengaruh terhadap penjualan *Food & Beverage*.

Realisasi *Room Rental* gedung konvensi tahun 2020 sebanyak 11 kali atau 100% dari RKAP 2020 sebanyak 11 kali. Capaian ini turun 112 kali atau 91,06% dari realisasi tahun 2019 sebanyak 123 kali.

Realisasi pengunjung Pariwisata tahun 2020 sebanyak 101.516 orang, menurun 61.535 orang atau 37,74% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 163.051 orang. Informasi mengenai jumlah wisatawan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Realization of *Ticketing* in 2020 reached 101,516 people or 114.56% of the 2020 RKAP of 88,614 people. This number decreased by 109,845 people or 51.97% compared to the realization in 2019 of 211,361 people. The decrease in the realization of recreational visitors (*ticketing*) compared to the previous year was due to the absence of additional recreational facilities (new rides) so that it did not attract visitors.

The realization of visitors to *Water World* in 2020 was 6,956 people or 34.01% of the 2020 RKAP at 20,455 people. This number decreased by 20,663 people or 74.81% compared to the realization in 2019 of 27,619 people. The production target was not achieved due to the existence of several swimming pool competitors in the Purwakarta area that offered new and modern concept and absence of additional rides in *Water World*.

The realization of *Room Service (Food & Beverage)* in 2020 was 25 portions or 1.45% of the 2020 RKAP of 1,723 portions. This number decreased by 2.485 servings or 99.00% of the 2019 realization of 2.510 portions. The unachieved production target was caused by low occupancy rates of the Pesanggrahan Hotel and bungalows, which had an effect on the achievement of the *Room Service (Food & Beverage)* target.

The realization of *Poolside Bar* in 2019 was 19,155 portions or 73.99% of the 2020 RKAP at 25,889 portions. This number decreased by 37,840 portions or 66.39% of the 2019 realization of 56,995 portions.

The realization of *Food & Beverage (Banquet)* sales in 2020 was 2,583 portions or 15.25% of the 2020 RKAP of 16,938 portions. This number decreased by 41,564 servings or 94.15% from the realization in 2019 of 44,147 portions. The production target was not achieved because tourist visit rate was low so it affected *Food & Beverage* sales.

Room Rental realization at convention building in 2020 was realized at 11 times or 100% of the 2020 RKAP at 11 times. This achievement decreased 112 times or 91.06% from the realization in 2019 by 123 times.

Realization of number of tourists in 2020 was as many as 101,516 people, decreased by 61,535 people or 37.74% compared to the realization of 2019 at 163,051 people. Information on the number of tourists in 2019 is presented in the following table :



Tabel Realisasi Pengunjung Pariwisata Tahun 2019 – 2020
Table of Realization of Tourist in 2019 – 2020

Bulan / Month	Wisatawan / Tourist		Jumlah / Total	
	Nusantara / Local	Mancanegara / Foreign	Tahun 2020 / In 2020	Tahun 2019 / In 2019
Januari / January	13.042	-	13.042	15.459
Februari / February	7.026	-	7.026	8.885
Maret / March	4.347	-	4.347	13.397
April / April	-	-	-	16.525
Mei / May	-	-	-	6.275
Juni / June	5.617	-	5.617	40.236
Juli / July	12.547	-	12.547	10.520
Agustus / August	18.987	-	18.987	8.264
September / September	9.406	-	9.406	7.558
Oktober / October	13.215	-	13.215	8.512
November / November	9.925	-	9.925	10.116
Desember / December	7.404	-	7.404	17.304
Jumlah / Total	101.516	-	101.516	163.051

Pendapatan Segmen Pariwisata

Pada tahun 2020 Segmen Pariwisata mencatatkan Pendapatan sebesar Rp9.102 juta, menurun Rp5.974 juta atau 39,63% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp15.076 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan layanan, sarana dan prasarana, promosi, dan event-event kepariwisataan lainnya

Tourism Segment Revenue

In 2020, the Tourism Segment recorded Revenue of Rp9,102 million, an decrease of Rp5,974 million or 39.63% compared to 2019 of Rp15,076 million. This increase in revenue was mainly due to improvements in services, facilities and infrastructure, promotions, and other tourism events.

Profitabilitas Segmen Pariwisata

Profitability of Tourism Segment.

Tabel Profitabilitas Pariwisata Air Tahun 2020 – 2019
Table of Profitability of Tourism Segment in 2020 – 2019

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Pariwisata / Tourism Revenue	9.102	15.076	(5.974)	39,63
Beban Pariwisata / Tourism Expenses	23.147	24.694	(1.547)	6.26
Rugi Operasi / Operating Loss	(14.045)	(9.618)	4.427	46,03
Profitabilitas / Profitability	-154,31%	-63,80%	-	90.51%

Pendapatan dari segmen Pariwisata tahun 2020 berjumlah Rp9.102 juta dengan beban operasi sebesar Rp23.147 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp14.045 juta dan profitabilitas sebesar minus 154,31%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan pariwisata tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.974 juta atau 39,63%, beban pariwisata menurun Rp1.547 juta atau 6,26%, dan rugi operasi meningkat Rp4.427 juta atau 46,03%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 90,51% dari sebelumnya minus 63,80% pada tahun 2019 menjadi minus 154,31% pada tahun 2020.

Revenue from the Tourism segment in 2020 amounted to Rp9,102 million with operating expense of Rp23,147 million resulting in an operating loss of Rp14,045 million and profitability of minus 154.31%. Compared to 2019, tourism revenue in 2020 decreased by Rp5,974 million or 39.63%, tourism expenses decreased by Rp1,547 million or 6.26%, and operating losses increased by Rp4,427 million or 46.03%. This caused profitability in 2020 to increase by 90.51% from minus 63.80% in 2019 to minus 154.31% in 2020.

Pemanfaatan Lahan

Deskripsi Usaha

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan berupa pertanian darat maupun pertanian sawah, dan non pertanian seperti perikanan kolam, lahan komersil, jalan, halaman pabrik, lahan parkir, hingga jalur pipa & kabel, jalur hijau, jembatan, serta lahan untuk tower komunikasi dan listrik seluas 7.788,37 m³. Kegiatan usaha ini dijalankan melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota, instansi swasta, serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian. Pemanfaatan lahan ini dikelola oleh unit wilayah I, II, III, dan IV.

Produktivitas Segmen Pemanfaatan Lahan

Realisasi atas pemanfaatan lahan untuk disewakan pada tahun 2020 adalah seluas 603,00 Ha atau 81,91% dari RKAP 2020 seluas 736,13 Ha. Realisasi ini menurun 86,18 Ha atau 12,51% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 seluas 689,18 Ha. Tidak tercapainya pemanfaatan lahan selain dikarenakan dampak pandemi Covid-19, juga belum adanya kesepakatan atas tarif yang berlaku pada beberapa pelanggan, sebagian wilayah dipakai untuk program Pemerintah sebagai objek Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mengakibatkan berkurangnya aset/lahan yang dikelola Perum Jasa Tirta II dan adanya perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak disebabkan pailit dan terlibat kasus hukum. Informasi produktivitas pemanfaatan lahan tahun 2019 dan 2020 dimuat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Pemanfaatan Lahan Tahun 2020 – 2019
Table of Land Use in 2020 - 2019

(dalam Ha / In Ha)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to		
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	Porsi Tahun 2020 (dalam %) / Share in 2020 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Lahan Pertanian / Agricultural Land	361,74	432,33	407,07	119,51	106,21	57,17
Lahan Non Pertanian / Non Agricultural Land	327,44	323,86	338,93	98,91	95,55	42,83
Jumlah / Total	689,18	756,19	746,00	110,16	101,37	100,00

Pendapatan Segmen Pemanfaatan Lahan

Pada tahun 2020, Segmen Pemanfaatan Lahan mencatatkan Pendapatan sebesar Rp50.143 juta, menurun Rp4.183 juta atau 7,70% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp54.326 juta. Disebabkan selain dikarenakan pandemi covid 19, juga belum adanya kesepakatan atas tarif yang berlaku pada beberapa pelanggan dan adanya perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak disebabkan pailit dan terkait kasus hukum.

Land Utilization

Business Description

As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II carries out land use in the form of land agriculture and rice farming, and non-agriculture such as pond fisheries, commercial land, roads, factory yards, parking lots, pipelines & cables, green lines, bridges and land for communication and electricity towers covering an area of 7,788.37 m³ through a system of leasing and business cooperation with various agencies either BUMN (State-Owned Enterprises) such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) of Regency/City level, private institutions, and individual that lease land for agriculture. The use of this land is managed by business units I, II, III, and IV.

Productivity of Land Utilization Segment

Realization of land utilization for lease in 2020 was 603.00 Ha or 81,91% of the 2020 RKAP covering 736.13 Ha. This realization decreased by 86.18 Ha or 12.51% compared to the realization in 2019 of 689.18 Ha. Land use target was not achieved apart from the impact of the Covid-19 pandemic, there is also no agreement on the applicable tariff part of the area is used for Government programs as an object of the National Strategic Project (PSN), which caused the number of assets/land managed by Perum Jasa Tirta II to decrease and that because there are companies that did not extend contracts due to bankruptcy and legal cases.

Information on land use productivity in 2019 and 2020 is described in the following table :

Land Utilization Segment Revenue

In 2020, the Land Utilization Segment recorded Revenue of Rp50,143 million, an increase of Rp4,183 million or 7.70% compared to 2019 of Rp54,326 million. This is because apart from being due to the Covid 19 pandemic, there has also been no agreement on tariffs that apply to some customers and there are companies that do not renew contracts due to bankruptcy and related legal cases.



Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan

Profitability of Land Utilization Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan Tahun 2019 – 2020
Table of Profitability of Land Utilization Segment in 2019 – 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Pemanfaatan Lahan / Land Utilization Revenues	50,143	54,326	(4,183)	7,70
Beban Pemanfaatan Lahan / Land Utilization Expenses	6,942	7,565	(623)	8,25
Laba Operasi / Operating Profit	43,201	46,761	(3,560)	7,61
Profitabilitas / Profitability	86,16%	86,07%	-	0,09%

Pendapatan dari segmen Pemanfaatan Lahan tahun 2020 berjumlah Rp50.143 juta dengan beban operasi sebesar Rp6.942 juta sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp43.201 juta dan profitabilitas sebesar 86,16%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan pemanfaatan lahan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.183 juta atau 7,70%, beban pemanfaatan lahan menurun Rp623 juta atau 8,23%, dan laba operasi menurun Rp3.560 juta atau 7,61%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2020 mengalami perbaikan sebesar 0.09% dari sebelumnya 86,07% pada tahun 2019 menjadi 86,16% pada tahun 2020.

Revenue from the Land Utilization segment in 2020 amounted to Rp50,143 million with operating expenses of Rp6,942 million resulting in an operating profit of Rp43,201 billion and profitability of 86.16%. When compared to 2019, land use revenue in 2020 decreased by Rp4,183 million or 7.70%, land use expenses decreased by Rp623 million or 8.23%, and operating profit decreased by Rp3,560 million or 7.61%. This caused profitability in 2020 to improve by 0.09% from the previous 86.07% in 2019 to 86.16% in 2020.

Jasa Laboratorium Deskripsi Usaha

Laboratorium Perum Jasa Tirta II merupakan salah satu laboratorium rujukan di Jawa Barat yang sudah terakreditasi ISOIEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2003, dengan Nomor Akreditasi: LP-174-IDN serta telah teregister Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016, dengan Nomor Registrasi 00108 / LPJAABLING-1/LRK/KLHK.

Jumlah parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi ISONEC 17025:2017 adalah sebanyak 114 parameter terakreditasi meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi dari 9 (Sembilan) komoditi produk, yaitu : Air Limbah, Air Sungai/Danau, Air untuk keperluan Higien Sanitasi, Air Minum, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan Kerja, Kebisingan Lingkungan dan Sampling. Sedangkan parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Registrasi Labling KLHK adalah sebanyak 68 parameter dari 6 (enam) komoditi produk, yaitu: Air Limbah, Air Sungai/Danau, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan dan Sampling.

Peningkatan kualitas jasa pelayanan yang diberikan laboratorium kepada para pengguna jasa didukung oleh tenaga analis yang kompeten (dilengkapi dengan sertifikasi dan pelatihan terkait), alat instrumen yang lengkap serta penggunaan bahan kimia dan pemilihan metode pengujian yang sesuai dengan standar internasional/regional dan nasional. Pengguna jasa laboratorium meliputi pengguna internal dan eksternal

Laboratory Services Business Description

Perum Jasa Tirta II Laboratory is one of the reference laboratories in West Java that has been accredited to ISOIEC 17025: 2017 by the National Accreditation Committee since 2003, with Accreditation Number: LP-174-IDN and has been registered with the Environment at the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016, with Registration No. 00108 / LPJAABLING-1/LRK/KLHK.

The number of parameters included in the Scope of Accreditation of ISONEC 17025:2017 are 114 accredited parameters including physical, chemical, and microbiological parameters of 9 (Nine) product commodities, namely: Wastewater, River/Lake Water, Water for Sanitary Hygiene, Drinking Water, Ambient Air, Fixed Source Emissions, Work Environment Noise, Environmental Noise and Sampling. Meanwhile, the parameters included in the Scope of the KLHK Labling Registration are 68 parameters from 6 (six) product commodities, namely: Wastewater, River/Lake Water, Ambient Air, Emissions from Immovable Sources, Environmental Noise and Sampling.

Improved quality of service provided by laboratories to the users is supported by competent analysts (equipped with certification and related training), complete instrument tools and chemical usage and selection of testing methods in accordance with international/regional and national standards. Users of laboratory services include internal and external users such as industry/business activities, industrial estates, hospitals/

seperti industri/kegiatan usaha, kawasan industri, rumah sakit/klinik kesehatan, hotel/apartemen/mall, instansi dan perumahan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, dan sekitarnya.

Produktivitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Realisasi jasa analisa laboratorium tahun 2020 sebanyak 7.980 sampel atau 113,59% dari RKAP 2020 sebanyak 7.025 sampel. Jumlah ini meningkat 18 sampel atau 0,23% dari realisasi tahun 2019 sebanyak 7.962 sampel.

Informasi realisasi jasa analisa laboratorium kualitas air tahun 2020 adalah sebagai berikut :

health clinics, hotels/apartments/malls, agencies and individuals spread across Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta and surrounding areas.

Productivity of Water Quality Laboratory Service Segment

Realization of laboratory analysis services in 2020 were 7,980 samples or 113.59% of the 2020 RKAP of 7,025 samples. This number increased by 18 samples or 0.23% from the realization in 2019 of 7,962 samples.

Information on the realization of water quality laboratory analysis services in 2020 is as follows :

Tabel Populasi Analisa Laboratorium Tahun 2020
Table of Laboratory Analysis Population in 2020

(dalam satuan sampel / in sample unit)

Bulan / Month	Populasi Sampel / Sample Population		Jumlah Sampel / Total Sample
	Industri / Industry	Sungai/Saluran / River/Channel	
1	2	3	4=2+3
Januari / January	561	136	697
Februari / February	569	136	705
Maret / March	523	147	670
April / April	363	134	497
Mei / May	357	142	499
Juni / June	432	154	586
Juli / July	556	140	696
Agustus / August	560	144	704
September / September	580	151	731
Oktober / October	604	136	740
November / November	631	137	768
Desember / December	537	150	687
Jumlah / Total	6,273	1,707	7,980
Rata-rata / Average	523	142	665
RKAP Tahun 2020 / RKAP in 2020	5,465	1,560	7,025
% Realisasi : RKAP 200 / % Realization : RKAP 2020	114.78	109.42	113.59
Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	6,291	1,671	7,962
% Realisasi : Tahun 2019 / % Realization : in 2019	99.71	102.15	100.23

Berdasarkan tabel di atas, realisasi untuk sampel industri pada tahun 2020 sebanyak 6.273 sampel atau 114,78% dari RKAP 2020 sebanyak 5.465 sampel. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 18 sampel atau 0,29% dari realisasi tahun 2019 sebanyak 6.291 sampel.

Sedangkan realisasi untuk sampel sungai/saluran pada tahun 2020 sebanyak 1.707 sampel atau 109,42% dari RKAP 2020 sebanyak 1.560 sampel. Capaian ini menaik 36 sampel atau 2,15% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 1.671 sampel.

Based on the above table, the realization for industrial samples in 2020 was 6,273 samples or 114.78% of the 2020 RKAP of 5,465 samples. This number decreased by 18 samples or 0.29% from the realization in 2019 of 6,291 samples.

Meanwhile, the realization of river/channel samples in 2020 was 1,707 samples or 109.42% of the 2020 RKAP of 1,560 samples. This achievement decreased by 36 samples or 2.15% compared to the realization in 2018 of 1,671 samples.



Pendapatan Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Pada tahun 2020, Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air mencatatkan Pendapatan sebesar Rp6.057 juta, meningkat Rp931 juta atau 18,16% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.126 juta. Peningkatan pendapatan ini equivalent dengan penurunan produksi sebesar 0,29% serta adanya perubahan tarif dasar jasa analisa pada semester II tahun 2020. Selain itu, komoditas jasa pengujian kualitas udara dan lingkungan kerja juga memiliki kontribusi yang cukup baik dalam peningkatan pendapatan.

Profitabilitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Water Quality Laboratory Service Segment Revenues

In 2020, the Water Quality Laboratory Service Segment recorded Revenues of Rp6,057 million, an increase of Rp931 million or 18.16% compared to 2019 of Rp5,126 million. This increase in revenue is equivalent to an decreased production of 0.29% and a change in the base rate of analytical services in the second semester of 2020. In addition, air quality testing services and work environment also had a fairly good contribution to revenue increase.

Profitability of Water Quality Laboratory Service Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air Tahun 2019 – 2020
Table of Water Quality Laboratory Service Segment in 2019 – 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Laboratorium Kualitas Air	6.057	5.126	931	18.16
Beban Laboratorium Kualitas Air	6.669	5.384	1.285	23.87
Rugi Operasi / Operating Loss	(612)	(258)	(354)	37.21
Profitabilitas / Profitability	-10,10%	-5,03%	-	5,07%

Pendapatan dari segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2020 berjumlah Rp6,057 juta dengan beban operasi sebesar Rp6,669 juta. Hal ini masih menunjukkan kerugian operasi sebesar 612 juta dengan profitabilitas minus 10,10%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp931 juta atau 18,16%, meskipun beban Jasa Laboratorium Kualitas Air meningkat sebesar Rp1.285 juta atau 23,87%, namun rugi operasi naik sebesar Rp354 miliar atau 37,21%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,07% dari sebelumnya minus 5,03% pada tahun 2019 menjadi minus 10,10% pada tahun 2020.

Revenue from the Water Quality Laboratory Services segment in 2020 amounted to Rp6,057 million with an operating expense of Rp6,669 million. This still shows an operating loss of 612 million with a profitabilitas of minus 10.10%. When compared to 2019, the revenue of Water Quality Laboratory Services in 2020 increased by Rp931 million or 18.16%, although the expenses for Water Quality Laboratory Services increased by Rp1,285 million or 23.87%, but operating losses increased by Rp. 354 billion or 37.21%. This caused profitabilitas in 2020 to increase by 5.07% from minus 5.03% in 2019 to minus 10.10% in 2020.

Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Deskripsi Usaha

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral".

Lokasi pengolahan AMDK dibangun pada Oktober 2009, kemudian pindah ke Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Juni 2012. Lokasi pengolahan AMDK diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada 29 Mei 2013.

Bottled Drinking Water Business Description

Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to providing drinking water to communities in the Company's service areas. This commitment is realized in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral".

AMDK processing location was built in October 2009 before being relocated to Jatimekar Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency, West Java in June 2012. The location of AMDK processing was ratified by West Java Governor, Ahmad Heryawan, on May 29, 2013.

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan pH antara 5 – 7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O3) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Biomagnetic serta Far Infrared untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H2O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan, serta mitra/stakeholders Perusahaan.

Produktivitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Realisasi produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) masih di bawah rencana disebabkan oleh performa mesin yang belum maksimal karena terkendala pekerjaan rehabilitasi mesin produksi AMDK belum selesai.

Informasi perbandingan realisasi produksi AMDK tahun 2020 dengan RKAP 2020 dan realisasi tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Produksi AMDK Tahun 2020
Table of AMDK Production in 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / %	
					RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization in 2019
1	2	3	4	5	6=4:3	7=4:5
Galon 19 Liter / 19 Liter Gallon	Galon / Gallon	188.519	158.732	185.629	84,20	85,51
Botol 600 ml / 600 ml Bottle	Botol / Bottle	338.746	239.136	329.677	70,59	72,54
Botol 330 ml / 330 ml Bottle	Botol / Bottle	1.852.286	982.344	2.099.486	53,03	46,79
Gelas 240 ml / 240 ml Glass	Gelas / Glass	1.664.723	1.073.328	1.876.208	64,47	57,21

Realisasi produksi galon 19 liter tahun 2020 tercatat sebanyak 158.732 galon atau 84,20% dari RKAP 2020 sebanyak 188.519 galon. Jumlah ini menurun 26.897 galon atau 14,49% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebanyak 185.629 galon.

Realisasi botol 600 ml tahun 2020 sebanyak 239.136 botol atau 70,59% dari RKAP 2020 sebanyak 338.746 botol. Jumlah ini menurun 90.541 botol atau 27,46% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebanyak 329.677 botol.

Realisasi produksi botol 330 ml pada tahun 2020 sebanyak 982.344 botol atau 53,03% dari RKAP 2020 sebanyak 1.852.286 botol. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, jumlah ini menurun botol 1.117.142 atau 53,21% dari semula sebanyak 2.099.486 botol.

Realisasi produksi gelas 240 ml tahun 2020 sebanyak 1.073.328 gelas atau 64,47% dari RKAP 2020 sebanyak 1.664.723 gelas. Jumlah ini menurun 802.880 gelas atau 42,79% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebanyak 1.876.208 gelas.

AMDK Jatiluhur includes Demineral drinking water with PH between 5 - 7.5 and TDS below 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur is processed by Reverse Osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O3) and ultraviolet and processed again with Biomagnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecule. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H2O) molecules that are identical to fluid molecules in humans' cells so that the water would be easier to absorb, and nutrients and oxygen would be easier to transport. Target markets of Air Demineral Jatiluhur, among others, are employees of the Company and their families, communities in the Company's work area and our partners/stakeholders.

Productivity of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment

The realization of bottled drinking water production (bottled water) was still below the target due to less optimum machine's performance that was affected by uncomplete rehabilitation work of bottled water production machine.

Information on comparison of the realization of AMDK production in 2020 with the 2020 RKAP and the realization in 2019 is presented in the following table :

The realization of 19 liter gallon production in 2020 was recorded at 158,732 gallons or 84.20% of the 2020 RKAP of 188,519 gallons. This number increased by 26,897 gallons or 14.4% compared to the realization in 2019 of 185,629 gallons.

The realization of 600 ml bottles in 2020 were 239,136 bottles or 70.59% of the 2020 RKAP of 338,746 bottles. This number decreased by 90,541 bottles or 27.46% compared to the realization in 201 of 329,677 bottles.

The realization of the production of 330 ml bottles in 2020 was 982,344 bottles or 53.03% of the 2020 RKAP of 1,852,286 bottles. Compared to the realization in 2019, this number decreased by 1,117,142 bottles or 53.21% from previously of 2,099,486 bottles.

The realization of 240 ml glass production in 2020 was 1,073,328 glasses or 64.47% of the 2020 RKAP of 1,663,723 glasses. This number decreased by 802,880 glasses or 42.79% compared to the realization in 2019 of 1,876.208 glasses.



Pendapatan Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pada tahun 2020, Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mencatatkan Pendapatan sebesar Rp3.685 juta, menurun Rp1.866 juta atau 33,62% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.551 juta.

Revenue from Bottled Drinking Water (AMDK)

In 2020, the Bottled Drinking Water Segment (AMDK) recorded revenues of Rp3,685 million, a decrease of Rp1,866 million or 33.62% compared to 2019 of Rp5,551 million.

Profitabilitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Profitability of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tahun 2019 – 2020
Table of Profitability of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment in 2019 – 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK) Revenue	3.685	5.551	(1.866)	-33,62
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK) Expenses	6.655	8.366	(1.711)	-20,45
Rugi Operasi / Operating Loss	(2.970)	(2.815)	(155)	-5,51
Profitabilitas / Profitability	-80,60%	-50,71%	-	-29,89

Pendapatan dari segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2020 berjumlah Rp3.685 juta dengan beban operasi sebesar Rp6.655 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp2.970 juta dan profitabilitas sebesar minus 80,60%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.866 juta atau 33,62%, beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurun Rp1.711 juta atau 20,45%, dan rugi operasi menurun Rp155 juta atau 5,51%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 29,89% dari sebelumnya minus 50,71% pada tahun 2019 menjadi minus 80,60% pada tahun 2020.

Revenues from the Bottled Drinking Water (AMDK) segment in 2020 amounted to Rp3,685 million with operating expenses of Rp6,655 billion, resulting in an operating loss of Rp2,970 million and profitability of minus 80.60%. Compared to 2019, the revenues of Bottled Drinking Water (AMDK) in 2020 decreased by Rp1,866 million or 33.62%, Bottled Drinking Water (AMDK) expenses decreased by Rp1,711 million or 20.45%, and operating losses decreased by Rp155 million or 5.51%. This caused profitability to decrease in 2020 by 29.89% from minus 50.71% in 2019 to minus 80.60% in 2020.



KINERJA ANAK PERUSAHAAN

SUBSIDIARY PERFORMANCE

PT Jasa Tirta Luhur

PT Jasa Tirta Luhur bergerak dalam bidang jasa sistem penyediaan air minum dan konstruksi. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2018, berlokasi di Bekasi, dengan kepemilikan PJT II sebesar 99,00%.

PT Jasa Tirta Luhur

PT Jasa Tirta Luhur is engaged in the provision of water supply and construction services. The Company has been operating since 2018, located in Bekasi, with PJT II ownership of 99.00%.

Kinerja PT Jasa Tirta Luhur Tahun 2020
Performance of PT Jasa Tirta Luhur in 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Jumlah Aset / Total Assets	48.789	59.361	(10.572)	-17.81
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	26.841	33.031	(6.190)	-18.74
Jumlah Ekuitas / Total Equity	21.948	26.329	(4.381)	-16.64
Pendapatan Usaha / Revenues	4.527	75	4.452	5.936
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	3.403	465	2.938	631.83
Laba (Rugi) Bruto / Gross Profit (Loss)	1.124	(390)	1.514	188.21
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	(4.289)	(3.469)	(820)	23.64

Pada tahun 2020, Pendapatan Usaha PT Jasa Tirta Luhur sebesar Rp4.527 juta meningkat 5.936% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp75 juta. Kenaikan Pendapatan Usaha diiringi dengan kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp2.938 juta, sehingga menghasilkan Laba Bruto dan Rugi Bersih Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp1.124 juta dan Rp4.289 juta.

In 2020, Revenues of PT Jasa Tirta Luhur amounted to Rp4,527 million increased 5,936% compared to 2019 of Rp75 million. The increase in Revenues was accompanied by an increase in Cost of Revenues of Rp2,938 million, resulting in Gross Gain and Net Loss for the Year amounting to Rp1,124 million and Rp4,289 million respectively.

Jumlah Aset PT Jasa Tirta Luhur tahun 2020 tercatat sebesar Rp48.789 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp26.841 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp21.948 juta.

Total Assets of PT Jasa Tirta Luhur in 2020 were recorded at Rp48,789 million, Total Liabilities amounted to Rp26,841 million, and Total Equity amounted to Rp21,948 million.

PT Tegar Mandiri Cemerlang

PT Tegar Mandiri Cemerlang merupakan entitas cucu yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik (desain konstruksi fasilitas umum) dan telah beroperasi komersial sejak tahun 2018.

PT Tegar Mandiri Cemerlang

PT Tegar Mandiri Cemerlang is a second-tier subsidiary engaged in engineering consulting services (public facility construction design) and has been operating commercially since 2018.

Kinerja PT Tegar Mandiri Cemerlang Tahun 2020
Performance of PT Tegar Mandiri Cemerlang in 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Jumlah Aset / Total Assets	43.112	43.834	(722)	-1,65
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	26.590	24.974	1.616	6,47
Jumlah Ekuitas / Total Equity	16.522	18.860	(2.338)	-12,40
Pendapatan Usaha / Revenues	4.527	75	4.452	5.936
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	3.403	465	2.938	631,83
Laba (Rugi) Bruto / Gross Profit (Loss)	1.124	(390)	1.514	188.21
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	(2.261)	(1.155)	(1.106)	95,76



Pada tahun 2020, Pendapatan Usaha PT Tegal Mandiri Cemerlang sebesar Rp4.527 juta meningkat 5.936% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp75 juta. Kenaikan Pendapatan Usaha diiringi dengan kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp2.938 juta, sehingga menghasilkan Laba Bruto dan Rugi Bersih Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp1.124 juta dan Rp2.261 juta.

Jumlah Aset PT Tegal Mandiri Cemerlang tahun 2020 tercatat sebesar Rp43.112 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp26.590 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp16.522 juta.

In 2020, Revenues of PT Tegal Mandiri Cemerlang amounted to Rp4,527 million increased 5,936% compared to 2019 of Rp75 million. The increase in Revenues was accompanied by an increase in Cost of Revenues by Rp2,938 million, resulting in Gross Loss and Net Loss for the Year amounting to Rp1,124 million and Rp2,261 million respectively.

Total assets of PT Tegal Mandiri Cemerlang in 2020 was recorded at Rp43,112 million, total liabilities amounted to Rp26,590 million, and total equity amounted to Rp16,522 million.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra (an international member of Antea) dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

This description of the financial performance was prepared based on the Company's Consolidated Financial Statements which have been audited by Djoko, Sidik & Indra Public Accounting Firm (an international member of Antea) with a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries dated December 31, 2020 and its financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statements

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2018 - 2020
Table of Financial Position in 2018 - 2020

Uraian / Description	2020	2019	2018	(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)	
				Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Aset / Assets	1.533.076	1.431.865	1.316.789	101.211	7,07
Aset Lancar / Current Assets	770.443	765.188	751.254	5.255	0,69
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	762.633	666.677	565.535	95.956	14,39
Liabilitas / Liabilities	312.236	236.231	242.334	76.005	32,17
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	145.780	141.339	162.930	4.441	3,14
Liabilitas Jangka Panjang / Non Current Liabilities	166.456	94.892	79.404	71.564	75,42
ekuitas / equity	1.220.840	1.195.634	1.074.455	25.206	2,11

Pada tahun 2020, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.533.076 juta, meningkat Rp101.211 juta atau 7,07% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.431.865 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp312.236 juta, meningkat Rp76.005 juta atau 32,17% dari sebelumnya sebesar Rp236.231 juta pada tahun 2019. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.220.840 juta, meningkat Rp25.206 juta atau 2,11% bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.195.634 juta.

In 2020, the Company's Assets amounted to Rp1,533,076 million, an increase of Rp101,211 million or 7.07% compared to 2019 amounting to Rp1,431,865 million. The Company's liabilities were recorded at Rp312,236 million, increased by Rp76,005 million or 32.17% from Rp 236,231 million in 2019. The Company's equity was Rp1,220,840 million, an increase of Rp25,206 million or 2.11% compared to the realization in 2019 amounting to Rp1,195,634 million.

Aset

Pada tahun 2020, jumlah Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.533.076 juta yang terdiri dari 50,25% Aset Lancar dan 49,75% Aset Tidak Lancar. Nilai Jumlah Aset ini meningkat Rp101.211 juta atau 7,07% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.431.865 juta. Peningkatan Aset tersebut disebabkan karena kenaikan aset tidak lancar dari peningkatan aset tetap dan pajak dibayar di muka.

Aset Lancar

Asset

In 2020, the total assets of the Company were recorded at Rp1,533,076 million, consisting of 50.25% of Current Assets and 49.75% of Non-Current Assets. The value of these Assets increased by Rp101,211 million or 7.07% compared to 2019 amounting to Rp1,431,865 million. The increase in assets was due to an increase in non-current assets from an increase in fixed assets and prepaid taxes.

Current Assets

Tabel Aset Lancar Tahun 2018 - 2020
Table of Current Assets in 2018 - 2020

Uraian / Description	2020	2019	2018	(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)	
				Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	518.162	597.052	434.206	(78.890)	-13,21
Piutang Usaha / Trade Receivables	226.214	153.570	297.271	72.644	47,30
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current	2.901	2.194	2.792	707	32,22
Persediaan / Inventories	2.074	2.548	2.147	(474)	-18,60
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	21.092	9.824	14.838	11.268	114,70
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	770.443	765.188	751.254	5.255	0,69

Pada tahun 2020, Aset Lancar Perusahaan sebesar Rp770.443 juta, meningkat 0,69% atau setara dengan Rp5.255 juta bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp765.188 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos jumlah biaya dibayar di muka dan uang muka sebesar 114,70% atau setara dengan Rp11.268 juta dan aset keuangan lancar lainnya sebesar 32,22% atau setara dengan Rp707 juta.

In 2020, the Company's Current Assets reached Rp770,443 million, an increase of 0.69% or equivalent to Rp5,255 million compared to 2019 of Rp765,18 million. The increase was mainly due to an increase in the amount of prepaid advances and advances by 114.70% or equivalent to Rp11,268 million and other current financial assets by 32.22% or equivalent to Rp707 million.

• Kas dan Setara Kas

• Cash and Cash Equivalent

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2019 - 2020
Table of Cash and Cash Equivalent in 2019 - 2020

Uraian / Description	2020	2019	(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)	
			Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Kas dan Bank / Cash and Bank	38.162	97.052	(58.890)	-60,68%
Deposito Berjangka / Time Deposit	480.000	500.000	(20.000)	-4%
Jumlah / Total	518.162	597.052	(78.890)	-13,21%

Kas dan Setara Kas pada tahun 2020 sebesar Rp518.162 juta, menurun Rp78.890 juta atau 13,21% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp597.052 juta. Penurunan kas dan setara kas disebabkan oleh penurunan pos Kas dan Bank sebesar Rp58.890 juta atau 60,68% dan pos Deposito Berjangka sebesar Rp20.000 juta atau 4%. Adapun deposito yang digunakan merupakan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan.

Cash and Cash Equivalents in 2020 amounted to Rp518,162 million, an decrease of Rp78,890 million or 13.21% compared to 2019 of Rp597,052 million. The decrease in cash and cash equivalents was attributed to a decrease in Cash and Bank accounts by Rp58,890 million or 60.68% and Time Deposit account by Rp20,000 million or 4%. The deposits used are deposits that are due within three months or less from the date of acquisition.



• Piutang Usaha

Pada tahun 2020, Piutang Usaha sebesar Rp226.214 juta, meningkat Rp72.644 juta atau 47,30% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp153.570 juta. Disebabkan oleh kenaikan piutang usaha yang belum difakturkan.

• Trade Receivables

In 2020, Trade Receivables amounted to Rp226,214 million, an increase of Rp72,644 million or 47.30% compared to 2019 amounting to Rp153,570 million. Caused by an increase in unbilled trade receivables.

• Aset Keuangan Lancar Lainnya

• Other Current Financial Assets

Tabel Aset Keuangan Lancar Lainnya Tahun 2019 - 2020
Table of Other Current Financial Assets in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Entitas Induk / Holding	4.646	3.939	707	17,95
Entitas Anak / Subsidiary	500	500	0	0,00
Provisi Penurunan Nilai / Provision for Impairment Value	(2.245)	(2.245)	0	0,00
Jumlah / Total	2.901	2.194	707	32,22

Aset Keuangan Lancar Lainnya pada tahun 2020 sebesar 2.901 juta, meningkat Rp707 juta atau 32,22% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.194 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh piutang bunga deposito entitas induk perusahaan.

Other Current Financial Assets in 2020 amounted to 2,901 million, increased by Rp707 million or 32.22% compared to 2019 of Rp2,194 million. This increase was due to receivable interest of parent.

• Persediaan

• Inventories

Tabel Persediaan Tahun 2019 - 2020
Table of Inventories in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
<i>Spareparts</i>	748	1.137	(389)	-34,21
Bahan Baku – AMDK / Raw Material – AMDK	678	781	(103)	-13,19
Bahan Kimia / Chemicals	438	318	120	37,74
Bahan & Perlengkapan Lain / Material & Other Supplies	112	514	(402)	-78,21
Bahan Farmasi / Pharmaceuticals	199	86	113	131,39
Barang Jadi – AMDK / Finished Goods – AMDK	49	74	(25)	-33,78
Bahan Makanan & Minuman / Food & Beverage	29	171	(142)	-83,04
Bahan Perlengkapan Perhotelan / Hospitality Supplies	8	54	(46)	-85,19
Bahan Perlengkapan Bar & Restoran / Bar & Restaurant Supplies	2	15	(13)	-86,67
Provisi Penurunan Nilai / Provision of Impairment Value	(189)	(602)	413	68,60
Jumlah / Total	2.074	2.548	(474)	-18,60

Pada tahun 2020, Persediaan tercatat sebesar Rp2.074 juta, menurun Rp474 juta atau 18,60% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.548 juta. Penurunan tersebut berasal di hampir seluruh pos persediaan, kecuali bahan kimia dan bahan farmasi yang mengalami peningkatan. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perusahaan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

In 2020, inventories were recorded at Rp2,074 million, a decrease of Rp474 million or 18.60% compared to 2019 of Rp2,548 million. The decrease came from the almost pos in inventories except chemicals and pharmaceutical was increase. The management believes that the Company's inventories are located in several locations, so that the possibility of losses occurring at the same time in several locations is very small.

• **Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

• **Prepaid Expenses and Advances**

Tabel Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Tahun 2019 - 2020
Table of Prepaid Expenses and Advances in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Biaya Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	8.188	6.046	2.142	35,43
Uang Muka / Advances	12.904	3.778	9.126	241,56
Jumlah / Total	21.092	9.824	11.268	114,70

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2020 tercatat sebesar Rp21.092 juta, meningkat Rp11.268 juta atau 114,70% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp9.824 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari pembayaran uang muka ke KSO Putra Kencana sebesar 10.468 juta.

Prepaid Expenses and Advances in 2020 were recorded at Rp21,092 million, an increase of Rp11,268 million or 114,70% compared to 2019 amounting to Rp9,824 million. This increase mainly came from payment advance to KSO Putra Kencana amounting to Rp10,468 million.

Aset Tidak Lancar

Non Current Assets

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2018 - 2020
Table of Non Current Assets in 2018 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Aset Hak Guna / Rights of Used Assets	2.374	-	-	2.374	100,00
Aset Tetap / Fixed Assets	599.693	540.399	476.051	59.294	10,97
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	58.441	46.308	41.042	12.133	26,20
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other non Current Asset	102.125	79.970	48.442	22.155	27,70
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Other non Current Asset	762.633	666.677	565.535	95.956	14,39

Pada tahun 2020, Aset Tidak Lancar tercatat sebesar Rp762.633 juta, meningkat Rp95.956 juta atau 14,39% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp666.677 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan seluruh komponen, yaitu Aset Hak Guna sebesar 100,00% atau setara dengan Rp2.374 juta, Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar 27,70% atau setara dengan Rp22.155 juta, dan Aset Pajak Tangguhan sebesar 26,20% atau setara dengan Rp12.133 juta.

In 2020, Non Current Assets were recorded at Rp762,633 million, an increase of Rp95,956 million or 14.39% compared to 2019 of Rp666,677 million. The increase mainly came from the increase in all components, namely Rights of Used Assets of 100,00% or equivalent to Rp2,374 million, Other Non-current Assets of 27.70% or equivalent to Rp22,155 million, and Deferred Tax Assets of 26.20% or equivalent to Rp12,133 million.

• **Aset Hak Guna**

Aset hak guna merupakan dampak penerapan PSAK 73 yang berasal dari kegiatan sewa pembiayaan anak dan cucu perusahaan. Hal tersebut secara lebih rinci diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan kami.

• **Aset Tetap**

Pada tahun 2020, Aset Tetap tercatat sebesar Rp599.693 juta, meningkat Rp59.294 juta atau 10,97% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp540.399 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan sarana, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, serta peralatan sebesar Rp50.906 juta. Manajemen memiliki liabilitas dan aset kontijensi berupa tanah milik

• **Right of Use Assets**

Right to use assets is the impact of the implementation of PSAK 73 which is derived from the finance lease activities of the company's children and grandchildren. This is disclosed in more detail in the notes to our financial statements.

• **Fixed Assets**

In 2020, Fixed Assets were recorded at Rp599,693 million, an increase of Rp59,294 million or 10.97% compared to 2019 amounting to Rp540,399 million. The increase was due to the addition of facilities, spare parts, installations & networks, transportation & heavy equipment, and equipment amounting to Rp50,906 million. Management has contingent liabilities and assets in the form of land owned by Perum Jasa Tirta II,



Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas yang hingga saat ini telah diselesaikan, sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan.

located in Ciganea with a replacement land located in Kampung Bongas, which currently has been settled, so that the replacement land located in Kampung Bongas was recorded as a Company asset.

• Aset Pajak Tangguhan

Pada tahun 2020, Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp58.441 juta, meningkat Rp12.133 juta atau 26,20% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp46.308 juta.

• Deferred Tax Assets

In 2020, Deferred Tax Assets amounted to Rp58,441 million, an increase of Rp12,133 million or 26.20% compared to 2019 amounting to Rp46,308 million.

• Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada tahun 2020, Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar Rp102.125 juta, meningkat Rp22.155 juta atau 27,70% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp79.970 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan kelebihan bayar pajak sebesar Rp22.155 juta atau 27,70%.

• Other Non Current Assets

In 2020, Other Non-current Assets amounted to Rp102,125 million, an increase of Rp22,155 million or 27.70% compared to 2019 amounting to Rp79,970 million. The increase was mainly due to an increase in tax overpayments of Rp22,155 million or 27.70%.

Liabilitas

Pada tahun 2020, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp312.236 juta yang terdiri dari 46,68% Liabilitas Jangka Pendek dan 53,32% Liabilitas Jangka Panjang. Nilai Jumlah Liabilitas ini meningkat Rp76.005 juta atau 32,17% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp236.231 juta. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari liabilitas imbalan pasca kerja.

Liabilities

In 2020, the Company's liabilities were recorded at Rp312,236 million, consisting of 46.68% Current Liabilities and 53.32% Non Current Liabilities. Total Liabilities increase by Rp76,005 million or 32.17% compared to 2019 amounting to Rp236,231 million. The increase in liabilities mainly came from the post retirement liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2018 - 2020
Table of Current Liabilities in 2018 - 2020

Uraian / Description	2020	2019	2018	(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)	
				Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Utang Usaha / Trade Payables	46.542	39.620	76.453	6.922	17,47
Beban Akrua / Accrued Expenses	21.378	33.271	34.344	(11.893)	-35,75
Utang Pajak / Tax Payables	25.987	21.411	15.748	4.576	21,37
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Current Financial Liabilities	51.517	47.037	36.385	4.480	9,52
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / Short-term Contract Liabilities	356	-	-	-	100
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	145.780	141.339	162.930	4.441	3,14

Pada tahun 2020, Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan sebesar Rp145.780 juta, meningkat 3,14% atau setara dengan Rp4.441 juta bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp141.339 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos utang pajak sebesar 21,37% atau setara dengan Rp4.576 juta dan utang usaha sebesar 17,47% atau setara dengan Rp6.922 juta.

In 2020, the Company's Current Liabilities amounted to Rp145,780 million, increase by 3.14% or equivalent to Rp4,441 million compared to 2019 amounting to Rp141,339 million. The increase was mainly due to a increase in the tax payable account by 21.37% or equivalent to Rp4,576 million and account payable by 17.47% or equivalent to Rp6,922 million.

• Utang Usaha

Tabel Utang Usaha Tahun 2019 - 2020
Table of Trade Payables in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	32.657	29.845	2.812	9,42
Pihak Berelasi / Related Parties	13.885	9.775	4.110	42,05
Jumlah / Total	46.542	39.620	6.922	17,47

Pada tahun 2020, Utang Usaha sebesar Rp46.542 juta, meningkat Rp6.922 juta atau 17,47% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp39.620 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 42,05% atau setara dengan Rp4.110 juta.

In 2020, Trade Payables amounted to Rp46,542 million, an increaser of Rp6,922 million or 17.47% compared to 2019 amounting to Rp39,620 million. The increase was mainly derived from an increase in trade payables to related parties by 42.05% or equivalent to Rp4,110 million.

• Beban Akrua

Tabel Beban Akrua Tahun 2019 - 2020
Table of Accrued Expenses in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Beban Pegawai / Employee Expenses	14.477	24.519	(10.042)	-40,96
Beban Non Pegawai / Non Employee Expenses	6.902	8.752	(1.850)	-21,14
Jumlah / Total	21.379	33.271	(11.892)	-35,74

Pada tahun 2020, Beban Akrua sebesar Rp21.379 juta, menurun Rp11.892 juta atau 35,74% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp33.271 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan beban pegawai yang masih harus dibayarkan per 31 Desember 2020.

In 2020, Accrued Expenses amounted to Rp21,379 million, a decrease of Rp11,892 million or 35.74% compared to 2019 of Rp33,271 million. The decrease was mainly due to the decrease in employee expenses that was payable at December 31, 2020.

• Utang Pajak

Pada tahun 2020, Utang Pajak sebesar Rp25.987 juta, meningkat Rp4.576 juta atau 21,37% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp21.411 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan Titipan PPN.

• Tax Payable

In 2020, tax payable amounted to Rp25,987 million, an increase of Rp4,576 million or 21.37% compared to 2019 amounting to Rp21,411 million. This increase was mainly derived from the increase in VAT.

• Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Tabel Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Tahun 2019 - 2020
Table of Other Short-Term Financial Liabilities in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Utang Lain-lain / Other Payables	18.356	16.831	1.525	9,06
Pendapatan Diterima Dimuka / Prepaid Income	33.161	30.206	2.955	9,78
Jumlah / Total	51.517	47.037	4.480	9,52



Pada tahun 2020, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp51.517 juta, meningkat Rp4.480 juta atau 9,52% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp47.037 juta. Kenaikan ini disebabkan dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 9,78%.

In 2020, Other Current Financial Liabilities amounted to Rp51,517 million, an increase of Rp4,480 million or 9.52% compared to 2019 amounting to Rp47,037 million. This increase was due to Unearned Revenues of 9.78%.

Liabilitas Jangka Panjang

Non Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2018 - 2020
Table of Non Current Liabilities in 2018 - 2020

Uraian / Description	2020	2019	2018	(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)	
				Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Utang Sewa Jangka Panjang / Long term lease debt	2.154	-	-	2.154	100
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post Employment Benefits	150.037	72.762	79.404	77.275	106,20
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Non Current Liabilities	14.265	22.130	-	(7.865)	-35,54
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	166.456	94.892	79.404	71.564	75,42

Pada tahun 2020, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan sebesar Rp166.456 juta, meningkat 75,42% atau setara dengan Rp71.564 juta bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp94.892 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja tahun 2020.

In 2020, the Company's Non Current Liabilities amounted to Rp166,456 million, an increase of 75.42% or equivalent to Rp71,564 million compared to 2019 amounting to Rp94,892 million. The increase was mainly due to the post employment benefitd in 2020.

- Liabilitas Imbalan Pasca Kerja**

Pada tahun 2020, Liabilitas Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp150.037 juta, meningkat Rp77.275 juta atau 106,20% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp72.762 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian aktuarial pembayaran imbalan yang digunakan aktuaris dalam menghitung liabilitas imbalan kerja.

- Post-Employment Benefits Liabilities**

In 2020, Post-Employment Benefits Liabilities amounted to Rp150,037 million, increase by Rp77,275 million or 106.20% compared to 2019 of Rp72,762 million. This increase was mainly due to the increase in benefit payment loss used by actuaries in calculating employee benefit liabilities.

- Liabilitas Jangka Panjang Lainnya**

Pada tahun 2020, Liabilitas Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp14.265 juta. Pencatatan Liabilitas Jangka Panjang Lainnya merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang belum terselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal.

- Other Non Current Liabilities**

In 2020, Other Non Current Liabilities amounted to Rp14,265 million. The recording of Other Non Current Liabilities is a reclassification of the outstanding balance of trade payables that was not yet settled and paid in normal operating cycle.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2018 - 2020
Table of Equity in 2018 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Modal Pemerintah / Government Capital	164.548	164.548	164.548	0	0,00
Cadangan Umum / General Reserves	13.943	13.943	13.943	0	0,00
Cadangan Bertujuan / Appropriated Reserves	1.027.001	893.921	760.306	133.080	14,89
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	(118.576)	(40.587)	(49.605)	(77.989)	-192,15
Saldo Laba / Retained Earnings	124.003	153.844	175.264	(29.841)	-19,40
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Total Equity Attributable to Owners of Parent Entity	1.210.919	1.185.669	1.064.455	25.250	2,13
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali / Total Equity Attributable to Non Controlling Interest	9.921	9.965	9.999	(44)	-0,44
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	1.220.840	1.195.634	1.074.455	25.206	2,11

Pada tahun 2020, jumlah Ekuitas sebesar Rp1.220.840 juta, meningkat Rp25.206 juta atau 2,11% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.195.634 juta. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Cadangan Bertujuan sebesar 14,89% atau setara dengan Rp133.080 juta dan kenaikan Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar 2,13% atau setara dengan Rp25.250 juta.

In 2020, the Equity amounted to Rp1,220,840 million, an increase of Rp25,206 million or 2.11% compared to 2019 of Rp1,195,634 million. The increase was derived from an increase in Appropriated Reserves of 14.89% or equivalent to Rp133,080 million and an increase in Equity which is attributable to Owners of the Parent Entity by 2.13% or equivalent to Rp25,250 million.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements Profit of Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2018 - 2020
Table of Consolidated Income and Other Comprehensive Income in 2018 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	815.627	812.881	825.545	2.746	0,34
Beban Pokok / Cost of Goods Sale	(508.854)	(468.555)	(456.753)	(40.299)	8,60
Laba Kotor / Gross Profit	306.773	344.326	368.791	(37.553)	-10,91
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Profit Before Income Tax	138.567	190.365	236.531	(51.798)	-27,21
Beban Pajak / Tax Expenses	(14.608)	(36.556)	(69.935)	21.948	-60,04
Laba Bersih Tahun Berjalan / Net Profit for the Year	123.959	153.809	166.596	(29.850)	-19,41
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	(77.989)	9.018	54.062	(87.007)	-964,81
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	45.970	162.827	220.658	(116.857)	-71,77



Pada tahun 2020, Pendapatan Usaha sebesar Rp815.627 juta, meningkat Rp2.746 juta atau 0,34% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp812.881 juta.

Beban Pokok di tahun 2020 meningkat Rp40.299 juta atau 8,60% dari sebelumnya Rp468.555 juta pada tahun 2019 menjadi Rp508.854 juta pada tahun 2020.

Sementara itu, Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2020 sebesar Rp123.959 juta, menurun Rp29.850 juta atau 19,41% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp153.809 juta. Laba Komprehensif Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp45.970 juta, menurun 71,77% atau setara dengan Rp116.857 juta bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp162.827 juta.

In 2020, Revenues amounted to Rp815,627 million, an increase of Rp2,746 million or 0.34% compared to 2019 amounting to Rp812,881 million.

Cost of Goods Sale in 2020 increased by Rp40,299 million or 8.60% from Rp468,555 million in 2019 to Rp508,854 million in 2020.

Meanwhile, Net Profit for the Year in 2020 was Rp123,959 million, a decrease of Rp29,850 million or 19.41% compared to 2019 amounting to Rp153,809 million. Comprehensive Income for the Year was recorded at Rp45,970 million, a decrease of 71.77% or equivalent to Rp116,857 million compared to 2019 amounting to Rp162,827 million.

Pendapatan Usaha

Revenues

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2019 - 2020
Table of Revenues in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Pendapatan Listrik / Electricity Revenues	449.956	433.456	16.500	3,81
Pendapatan Air Baku / Raw Water Revenues	286.324	294.159	(7.835)	-2,66
Pendapatan Air Bersih / Clean Water Revenues	8.942	4.654	4.288	92,14
Pemanfaatan Lahan / Land Utilization	50.143	54.326	(4.183)	-7,70
Pariwisata / Tourism	9.102	15.076	(5.974)	-39,63
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK)	3.685	5.551	(1.866)	-33,61
Laboratorium / Laboratory	6.057	5.126	931	18,16
Usaha Lainnya / Other Businesses	1.418	533	885	166,04
Jumlah / Total	815.627	812.881	2.746	0,34

Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan Pendapatan usaha sebesar Rp815.627 juta, meningkat 0,34% atau setara dengan Rp2.746 juta bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp812.881 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Pendapatan Listrik, Air Bersih, Laboratorium, dan usaha lainnya.

Di sisi lain, Perusahaan membukukan penurunan atas Pendapatan Lahan, Air Baku, Pariwisata, dan Air Minum Dalam Kemasan.

In 2020, the Company booked revenues of Rp815,627 million, an increase of 0.34% or equivalent to Rp2,746 million compared to 2019 of Rp812,881 million. Such increase was caused by Electricity Revenue, Clean Water, Laboratory, Other Business.

On the other hand, the Company recorded an decrease in Land Revenue, Raw Water, Tourism, and Laboratory.

Beban Usaha

Operating Expenses

Tabel Beban Usaha Tahun 2019 - 2020
Table of Operating Expenses in 2019 - 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
			Nominal	%
Beban Listrik / Electricity Expenses	101.634	96.430	5.204	5,40
Beban Air Baku / Raw Water Expenses	337.821	309.817	28.004	9,04
Beban Air Bersih / Clean Water Expenses	25.354	15.619	9.735	62,33
Beban Pemanfaatan Lahan / Land Utilization Expenses	6.942	7.565	(623)	-8,23
Beban Pariwisata / Tourism Expenses	23.147	24.694	(1.547)	-6,26
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water Expenses	6.655	8.366	(1.711)	-20,45
Beban Laboratorium / Laboratory Expenses	6.669	5.384	1.285	23,87
Beban Usaha Lainnya / Other Operating Expenses	632	680	(48)	-7,06
Jumlah / Total	508.854	468.555	40.299	8,60

Pada tahun 2020, Beban Usaha Perusahaan sebesar Rp508.854 juta, meningkat Rp40.299 juta atau setara dengan 8,60% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp468.555 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan Air Baku, Pariwisata, Air Bersih, dan Laboratorium.

In 2020, the Company's Operating Expenses amounted to Rp508,854 million, an increase of Rp40,299 million, equivalent to 8.60% compared to 2019 of Rp468,555 billion. This increase came from an increase in Raw Water, Tourism, Clean Water, and Laboratory.

Laba Kotor

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatatkan Laba Kotor sebesar Rp306.773 juta, menurun Rp37.553 juta atau 10,91% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp344.326 juta. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya Beban Usaha sebesar Rp40.299 juta atau 8,60% di tahun 2020.

Gross Profit

In 2020, the Company recorded Gross Profit of Rp306,773 million, a decrease of Rp37,553 million or 10.91% compared to 2019 of Rp344,326 million. This decrease was in line with the increasing in Operating Expenses of Rp40,299 million or 8.60% in 2020.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatatkan Laba Sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp138.567 juta, menurun Rp51.798 juta atau 27,21% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp190.365 juta.

Profit Before Income Tax

In 2020, the Company recorded Profit Before Income Tax of Rp138,567 million, a decrease of Rp51,798 million or 27.21% compared to 2019 of Rp190,365 million.

Beban Pajak

Pada tahun 2020, Beban Pajak sebesar Rp14.608 juta, meningkat Rp21.948 juta atau 60,04% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp36.556 juta.

Tax Expenses

In 2020, Tax Expense was Rp14,608 million, an increase of Rp21,948 million or 60.04% compared to 2019 which was Rp36,556 million.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp123.959 juta, menurun Rp29.850 juta atau 19,41% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp153.809 juta.

Net Profit for the Year

In 2020, Net Profit for the Year amounted to Rp123,959 million, a decrease of Rp29,850 million or 19.41% compared to 2019 amounting to Rp153,809 million.

Penghasilan Komprehensif Lain

Pada tahun 2020, Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan sebesar minus Rp77.989 juta, menurun Rp87.007 juta atau 864,77% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp9.018 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial tahun 2020.

Other Comprehensive Income

In 2020, Other Comprehensive Income for the Year amounted to minus Rp77,989 million, a decrease of Rp87,007 million or 864.77% compared to 2019 of Rp9,018 million. This decrease was due to the decrease in actuarial profits in 2020.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2020, Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp45.970 juta, menurun Rp116.857 juta atau

Comprehensive Income for the Year

In 2020, Comprehensive Income for the Year amounted to Rp45,970 million, a decrease of Rp116,857 million



71,77% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp162.827 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar 19,41% atau setara dengan Rp29.850 juta dan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar 964,81% atau setara dengan Rp9.018 juta.

or 71.77% compared to 2019 amounting to Rp162,827 million. This decrease was in line with the decrease in Net Profit for the Year of 19.41% or equivalent to Rp29,850 million and Other Comprehensive Income of 964.81% or equivalent to Rp9,018 million.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow Statements

Tabel Arus Kas Konsolidasian Tahun 2018 - 2020
Table of Consolidated Cash Flow in 2018 - 2020

Uraian / Description	2020	2019	2018	(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)	
				Pertumbuhan 2019 – 2020 / Growth in 2019 – 2020	
				Nominal	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities	52.074	312.641	53.314	(260.567)	-83,34
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Used for Investing Activities	(110.200)	(108.146)	(114.256)	(2.054)	-1,90
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows (Used for) Financing Activities	(20.764)	(41.649)	(17.455)	20.885	50,14
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalent	(78.890)	162.846	(78.397)	(241.736)	-148,44
Kas dan Setara Kas – Saldo Awal / Cash and Cash Equivalent – Beginning Balance	597.052	434.206	512.604	162.846	37,50
Kas dan Setara Kas – Saldo Akhir / Cash and Cash Equivalent – Ending Balance	518.162	597.052	434.206	(78.890)	-13,21

Pada tahun 2020, Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp52.074 juta, menurun Rp260.567 juta atau 83,34% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp312.641 juta. Penurunan ini disebabkan oleh faktor penurunan jumlah penerimaan dari pelanggan dan peningkatan pembayaran ke dewas, direksi dan karyawan.

In 2020, the Company obtained net cash flow from operating activities of Rp52,074 million, an decrease of Rp260,567 million or 83.34% compared to 2019 of Rp312,641 million. This increase was due to a decrease in total receipts from customers and an increasing payment to comisioners, directors, employees.

Arus kas bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2020 tercatat sebesar Rp110.200 juta, menurun Rp2.054 juta atau 1,90% dari tahun 2019 sebesar Rp108.146 juta. Hal ini disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Net cash flow used for investing activities in 2020 was recorded at Rp110,200 million, decreased by Rp2,054 million or 1.90% from 2019 of Rp108,146 million. This was caused by a acquisition of fixed assets.

Sementara Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp20.764 juta, meningkat Rp20.885 juta atau 50,14% bila dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp41.649 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran dividen yang diberikan kepada pemilik modal.

Meanwhile, Net Cash Flows Used for Financing Activities amounted to Rp20,764 million, an increase of Rp20,885 million or 50.14% compared to 2019 amounting to Rp41,649 million. This increase was due to a dividend payments given to investors.

KEMAMPUAN MEMENUHI KEWAJIBAN, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

ABILITY TO MEET OBLIGATIONS, RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL, AND COMPANY PROFITABILITY

Selama tahun 2020, Perusahaan memiliki tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas Perusahaan. Tingkat kolektibilitas piutang meningkat dengan lebih cepatnya piutang tertagih, sedangkan profitabilitas perusahaan menurun dari tahun sebelumnya.

In 2020, the Company showed good ability to fulfill its obligations. This can be seen from the company's liquidity and solvency ratios. Receivables collectibility level increased in line with fast receivables collection, while the profitability of the company decreased from the previous year.

Kemampuan Memenuhi Kewajiban

Kemampuan memenuhi kewajiban Perusahaan untuk jangka pendek tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang dimiliki. Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan tentang kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Tingkat likuiditas tercermin dalam Rasio Kas dan Rasio Lancar. Sementara kemampuan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan dicerminkan melalui rasio solvabilitas, yaitu Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) dan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER).

Ability to Meet Obligations

The ability to meet the Company's short-term obligations is reflected on its financial ratios. Liquidity is a ratio that reflects the Company's ability to meet short-term obligations with current assets owned. The level of liquidity is reflected on the Cash Ratio and Current Ratio. Meanwhile, generally, the ability to meet obligations is reflected on the solvency ratio, namely the Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2018 – 2020
Table of Liquidity Ratio in 2018 – 2020

Uraian / Description	(dalam % / in %)		
	2020	2019	2018
Rasio Kas / Cash Ratio	355,44	422,43	266,50
Rasio Lancar / Current Ratio	528,50	541,39	461,09

• Rasio Kas

Rasio Kas merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi utang lancar, dengan kata lain rasio kas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar pada tahun buku yang bersangkutan. Rasio Kas tahun 2020 sebesar 355,44%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 422,43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas menurun di tahun 2020.

• Cash Ratio

Cash Ratio is a ratio that shows cash position that can cover current debt, in other words cash ratio is a ratio that illustrates the ability of cash held in the management of current liabilities in the financial year concerned. Cash Ratio in 2020 was recorded at 355.44%, an decrease compared to 2019 which was 422.43%. This shows that the Company's ability to settle its short-term obligations using Cash and Cash Equivalents decreased in 2020.



• Rasio Lancar

Rasio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu Perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Lancar tahun 2020 sebesar 528,50%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 541,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset Lancar yang tersedia menurun di tahun 2020.

• Current Ratio

The ratio is the ratio between current assets and current liabilities and is the most commonly used measure to determine the ability of a company to meet its short-term liabilities. The Current Ratio in 2020 was 528.50%, lower than in 2019 of 541.39%. This shows that the Company's ability to pay its short-term obligations using available Current Assets decreased in 2020.

Rasio Solvabilitas

Perusahaan menggunakan Rasio Solvabilitas untuk mengukur jumlah Aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR).

Solvency Ratio

The Company uses Solvency Ratio to measure total Company Assets financed by debt. The solvency ratio used is Debt to Equity (DER) ratio and Debt to Total Assets (DAR) ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2018 – 2020
Table of Solvability Ratio in 2018 – 2020

(dalam % / in %)

Uraian / Description	2020	2019	2018
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) / Liabilities/Debt to Equity Ratio	25,57	19,76	22,55
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) / Liabilities /Debt to Asset Ratio	20,37	16,50	18,40

• Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER)

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 25,57%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 19,76%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan Ekuitas yang tersedia menurun dari tahun 2019 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

• Liabilities/Debt to Equity (DER) ratio

The Liability/Debt to Equity (DER) ratio until the end of 2020 was recorded at 25.57%, higher compared to 2019 which was recorded at 19.76%. This shows that the Company's ability to pay company liabilities using available Equity is not better than 2019 as default risk was higher than the previous year.

• Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR)

Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) tahun 2020 tercatat sebesar 20,37%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan aset menurun dari tahun 2019 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

• Liabilities/Debt to Assets Ratio (DAR)

The Liability/Debt to Assets (DAR) ratio in 2020 was recorded at 20.37%, lower than in 2019 of 16.50%. This shows that the ability to pay company liabilities using assets is not better than 2019 as default risk was smaller than the previous year.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pengukuran tingkat kolektibilitas piutang Perum Jasa Tirta II dilakukan menggunakan rasio Perputaran Persediaan, Periode Penagihan, dan Perbandingan Modal Sendiri terhadap Total Ekuitas.

Receivable Collectability Rate

Measurement of receivables collectability rate of Perum Jasa Tirta II is carried out using Inventory Turnover ratio, Collection Period, and Ratio of Owned Capital to Total Equity.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun 2018 – 2020
Table of Receivables Collectability Rate in 2018 – 2020

Uraian / Description	2020	2019	2018
Perputaran Persediaan (dalam satuan kali) / Inventory Turnover (in times)	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / Collection Period (in day)	101	69	81
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (dalam %) / Equity to Total Assets Ratio (in %)	70,35	71,18	65,20

Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur periode yang diperlukan dalam menjual persediaan Perusahaan. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2020 adalah 1, sama dengan tahun 2019 dan 2018.

Periode Penagihan

Periode Penagihan adalah rasio yang mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Rasio Periode Penagihan tahun 2020 adalah 101 hari, lebih lambat dibandingkan tahun 2019 yang memakan waktu selama 69 hari.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah rasio yang menunjukkan tingkat total aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2020 adalah 70,35%, menurun dari tahun 2019 sebesar 71,18%.

Profitabilitas Usaha

Profitabilitas usaha dihitung untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Perusahaan. Adapun perhitungan profitabilitas usaha menggunakan Rasio Imbalan kepada Pemilik Modal (*Return on Equity*), Imbalan Investasi (*Return on Investment*), dan Laba terhadap Aset (*Return on Asset*).

Tabel Profitabilitas Usaha Tahun 2018 – 2020
Table of Profitability in 2018 – 2020

(dalam % / in %)			
Uraian / Description	2020	2019	2018
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / Return on Equity	11,49	15,07	20,33
Imbalan Investasi (ROI) / Return on Investment	12,43	16,35	22,13
Imbalan Aset (ROA) / Return on Asset	9,03	13,29	17,96

Imbalan Kepada Pemilik Modal (*Return on Equity*)

Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh Pemilik Modal. Pada tahun 2020, nilai ROE sebesar 11,49%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 15,07%.

Imbalan Investasi (*Return on Investment*)

Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola investasi untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2020, nilai ROI sebesar 12,43%, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,35%.

Imbalan Aset (*Return on Assets*)

Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2020, nilai ROA sebesar 9,03%, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,29%.

Inventory Turnover

Inventory Turnover is the ratio used to measure the period required to sell the Company's inventory. The Inventory Turnover Ratio in 2020 was 1, the same as 2019 and 2018.

Collection Period

Collection Period is a ratio that measures the average period needed to collect receivables (in day). Collection Period Ratio in 2020 was 101 days, slower than in 2019 which was recorded at 69 days.

Equity to Total Assets Ratio

Equity to Total Assets ratio is a ratio that shows the level of total assets financed by equity. Equity to total assets ratio in 2020 was 70.35%, an decrease from 2019 of 71.18%.

Profitability

Profitability is calculated to measure the Company's ability to increase profits as well as the level of business efficiency and profitability achieved by the Company. The calculation of profitability uses the Return on Equity, Return on Investment, and Return on Assets.

Return on Equity

Return on Equity (ROE) shows the ability of equity to generate profits for all Investorss. In 2020, the ROE value was 11.49%, a decrease compared to 2019 of 15.07%.

Return on Investment

Return on Investment (ROI) shows the ability of the Company to manage investments to generate profits. In 2020, the value of ROI was 12.43%, a decrease compared to 2019 of 16.35%.

Return on Assets

Return on Assets (ROA) shows the ability of the Company to manage assets to generate profits. In 2020, the value of ROA was 9.03%, a decrease compared to 2019 of 13.29%.



Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan, Pendapatan Bersih dan Kinerja Perusahaan

Perusahaan tidak dipengaruhi oleh volatilitas harga-harga komoditas global dan perusahaan juga belum menerapkan kebijakan lindung nilai (hedging).

Oleh karena itu dampak perubahan harga komoditas tidak berpengaruh terhadap penjualan, pendapatan bersih dan kinerja perusahaan.

Impact of Price Change on Sales, Net Revenue and Company Performance

The company is not affected by the volatility of global commodity prices and the company has not implemented a hedging policy.

Therefore, the impact of changes in commodity prices has no effect on sales, net income and company performance.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Rincian Struktur Modal

Permodalan yang kuat sangat diperlukan untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki. Struktur modal Perum Jasa Tirta II untuk tahun 2020 dapat terlihat dari jumlah Aset yang dibiayai melalui Liabilitas sebesar 20,37%. Porsi liabilitas dalam struktur modal Perusahaan mengalami peningkatan dari semula sebesar 16,50% pada tahun 2019 menjadi 20,37% pada tahun 2020.

Details of Capital Structure

Strong capital is required to support business expansion and maintain market share owned. The capital structure of Perum Jasa Tirta II for 2020 can be seen from the amount of assets financed through liabilities at 20.37%. The portion of liabilities in the Company's capital structure increased from originally 16.50% in 2019 to 20.37% in 2020.

Tabel Struktur Modal Tahun 2018 – 2020
Table of Capital Structure in 2018 – 2020

(dalam % / in %)			
Uraian / Description	2020	2019	2018
Liabilitas / Liabilities	20,37	15,07	18,40
Ekuitas / Equity	79,63	83,50	81,60
Aktiva / Assets	100,00	100,00	100,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Manajemen secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi Pemilik Modal dengan senantiasa mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Management Policy on Capital Structure

The management actively and routinely reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for the Investors by always considering the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure as well as future capital requirements.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Ekuitas, transaksi material diklasifikasikan sebagai transaksi yang bernilai di atas 20% ekuitas. Selama tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak mana pun.

Based on Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Equity Activities, material transactions are classified as transactions with of above 20% of equity. During 2019, the Company did not have a material commitment for investment in capital goods with any party.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2020

CAPITAL GOODS INVESTMENT IN 2020

Untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan konsumen, Perusahaan melakukan pengadaan barang modal yang dibukukan sebagai aset tetap. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan memiliki investasi barang modal sebesar Rp1.150.014 juta yang terdiri dari tanah, sarana, bangunan, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, perabot & peralatan, dan aset tanaman konservasi.

To improve capacity and customer service, the Company procures capital goods which are recorded as fixed assets. During 2020, the Company had capital goods investment of Rp1,150,014 million consisting of land, facilities, buildings, spare parts, installations & networks, transportation & heavy equipment, furniture & equipment, and conservation plant assets.

Tabel investasi Barang Modal Tahun 2020
Table of Capital Goods Investment in 2020

(dalam Juta Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	Sumber Dana / Fund Source	Mata uang / Currency	nilai / Value*
Tanah / Land	Internal	Rupiah	16.635
Sarana / Facilities	Internal	Rupiah	20.013
Bangunan / Building	Internal	Rupiah	194.988
Suku Cadang / Spare Parts	Internal	Rupiah	3828
Instalasi & Jaringan / Installation & Network	Internal	Rupiah	678.816
Alat Angkut & Alat Berat / Transportation & Heavy Equipment	Internal	Rupiah	63.087
Perabot & Peralatan / Furniture & equipment	Internal	Rupiah	165.136
Aset Tanaman Konservasi / Conservation Plant Assets	Internal	Rupiah	7.510
Nilai Buku / Book value			1.150.014

*) Catatan: Nilai Buku merupakan hasil biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. /
Note: Book Value is the result of acquisition cost less accumulated depreciation.

Tujuan investasi barang modal ini adalah untuk meningkatkan operasional layanan dan fasilitas pendukung guna mewujudkan layanan prima bagi pelanggan. Seluruh pengadaan barang modal tersebut menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran sehingga Perusahaan tidak memiliki risiko mata uang asing.

The purpose of this capital goods investment is to improve operational services and supporting facilities in order to provide excellent service for customers. All capital goods procurement uses the Rupiah currency as a means of payment so that the Company does not have foreign currency risk.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO REPORTING DATE

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

There are no important events / events after the date A consolidated statement of financial position (balance sheet) has a significant effect on financial statements consolidated as a whole.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Selama tahun 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan di tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

During 2020, the Company has fulfilled all of its obligations as a corporate taxpayer. The tax contributions from the Company in 2019 and 2020 are as follows :



Tabel Kontribusi Kepada negara (Pembayaran Pajak) Tahun 2019 – 2020
Table of Contribution to the Country (Tax Payment) in 2019 – 2020

Uraian / Description	2020	2019
A.Kontribusi Pada negara (Pajak) / Contribution to the Country (Tax)	165.156.821.899	168.052.213.669
Pajak Penghasilan (PPh) / income Tax		
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	18.994.200.214	17.368.020.634
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	1.444.409.911	1.235.480.109
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	1.982.261.684	1.971.732.364
PPh Pasal 4 ayat 2 / Income Tax Article 4 paragraph 2	2.418.590.611	2.435.725.945
PPh Pasal 25 / Income Tax Article 25	78.044.558.160	84.367.908.120
	102.884.020.580	107.378.867.172
Pajak Pertambahan nilai (PPn)/ Value Added Tax (vAT)		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Value Added Tax (VAT)	28.383.519.759	28.778.402.515
PPN Wajib Pungut / VAT Taxpayer	21.454.605.030	18.172.596.784
	49.838.124.789	46.950.999.299
Pajak Daerah / Regional Tax		
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tenant / Tenant Street Lighting Tax	3.434.845.104	7.206.000.008
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemakaian Sendiri / Street Lighting Tax for Own Use	184.142.867	186.944.021
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Penduduk / Street Lighting Tax for Occupants	24.157.636	35.593.505
Pajak Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant Tax	648.277.107	901.537.819
Pajak Bumi & Bangunan (PBB) / Land & Building Tax	8.143.253.816	5.399.271.765
	12.434.676.530	13.729.347.198

PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha industri listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun-tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Telah disepakatinya kesepakatan awal Fase I antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menghentikan perang dagang diprediksi akan menjadi salah satu indikator global bagi Indonesia dalam menyambut prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4% - 6,0%. Pemerintah optimis bahwa target tersebut akan tercapai didorong oleh beberapa hal, seperti revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa.

Sementara itu, prospek pertumbuhan industri listrik didukung oleh proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 – 2038 yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun. Hal tersebut diperkuat oleh pertumbuhan penjualan listrik

The Company is optimistic that business prospects of the electricity industry and the water industry continue to be bright for the upcoming years. This optimism is supported by projections of global, national and industrial economic growth that are in line with population growth.

The initial Phase I agreement between the United States and China to cease the trade war is predicted to be one of the global indicators for Indonesia in welcoming prospects for better economic growth in 2020. This is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020 - 2024 which targets national economic growth in the range of 5.4% - 6.0%. The government is optimistic that the target will be achieved as driven by several factors, such as revitalization of the manufacturing industry, transformation of the agricultural sector, downstream mining, sustainable infrastructure development and service sector transformation.

Meanwhile, growth prospects of the electricity industry are supported by the projections of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) as stipulated in the 2019-2038 National Electricity General Plan which projects an average growth in electricity demand of approximately 6.9% per year. This is strengthened by the growth in electricity sales by PT PLN (Persero) as

oleh PT PLN (Persero) selaku pihak tersalur utama Perusahaan kepada pelanggan. Pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahun dan adanya potensi demand untuk sektor industri, rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, maka kebutuhan akan air bersih, air minum dalam kemasan, dan air untuk pertanian cenderung meningkat sehingga mendorong terciptanya penyaluran air yang lebih besar dan luas. Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010–2035 milik Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk diprediksi naik antara 3% - 7% setiap lima tahun. Dalam laporan tersebut, penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi berjumlah 256 juta jiwa, meningkat 6% hingga tahun 2020 menjadi 271 juta jiwa, meningkat 5% hingga tahun 2025 menjadi 285 juta jiwa, meningkat lagi 4% hingga tahun 2030 menjadi 296 juta jiwa, dan kembali meningkat 3% hingga akhir tahun 2035 menjadi 306 juta jiwa.

the Company's main channel to customers. This growth is expected to be maintained in line with the projected population growth each year and the potential demand for the industrial, household, business, public, and transportation sectors.

In line with the projected population growth each year, the needs for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture tend to increase so that water is distributed in much greater amount and widely. According to Population Projection Data for 2010 - 2035 by the Statistics Indonesia, the population is predicted to increase between 3% - 7% every five years. In the report, Indonesia's population in 2015 is predicted to be 256 million people, increasing 6% until 2020 to 271 million people, increasing 5% until 2025 to 285 million people, increasing again 4% until 2030 to 296 million people, and again increasing 3% until the end of 2035 to 306 million people.

Data Proyeksi Penduduk 2010 – 2035
Population Projection Data for 2010 - 2035

Data Penduduk / Population Date	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Proyeksi Penduduk (dalam jutaan) / Population Projection (in million)	239	256	271	285	296	306
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan (%) / Population Percentage in Urban Areas (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

(data: Badan Pusat Statistik / data: Statistics Indonesia)

Kenaikan persentase pertumbuhan penduduk daerah perkotaan turut mendukung kenaikan permintaan air bersih dan air minum. Selain didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar, dan gaya hidup yang mengutamakan kepraktisan mendukung permintaan air minum dari perusahaan air minum (PAM) maupun permintaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) karena alasan kebersihan. Faktor pendukung lainnya seperti momen Ramadhan, Natal, dan Tahun Baru diprediksi menjadi momen andalan untuk menggenjot penjualan AMDK di setiap tahunnya. Meninjau faktor-faktor tersebut, Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang masih terjaga dengan baik.

The increase in the percentage of urban population growth contributed to the increase in demand for clean water and drinking water. Besides being supported by population growth, the level of availability of clean water in the surrounding environment, and lifestyles that prioritize practicality, support the demand for drinking water from drinking water companies (PAM) as well as requests for Bottled Drinking Water (AMDK) for hygiene reasons. Other supporting factors such as the moment of Ramadan, Christmas, and The New Year are predicted to be a mainstay moment to boost sales of bottled drinking water each year. In light of these factors, the Management considers that the Company's business prospects in 2020 and the coming years will continue to be bright.



PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI DAN REALISASI TAHUN 2020

COMPARISON BETWEEN 2020 PROJECTION AND REALIZATION

Perusahaan telah menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun buku 2020, khususnya untuk kinerja operasional dan keuangan pokok. Dalam pencapaiannya, Perusahaan senantiasa melakukan review terhadap target yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.

The Company has set targets to be achieved in fiscal year 2020, particularly for operational and financial performance. In its achievement, the Company always reviews the targets set in accordance with the development of internal and external conditions of the Company.

Aspek Produksi

Capaian aspek produksi di sepanjang tahun 2020 menunjukkan hasil yang positif. Beberapa aspek produksi dapat mencapai 100% atau lebih, antara lain penyaluran air baku mencapai 104,44% dari target, penyaluran air bersih 104,46 dari target, penyaluran air irigasi 111,05 dari target dan sampel laboratorium mencapai 113,59% dari target.

Production Aspects

Achievements of production aspects throughout 2020 showed positive results. Some aspects of production can reach 100% or more, i.e. raw water distribution reaching 104.44% of the target, clean water distribution 104,46 of the target, irrigation water distribution 111.05 of the target and laboratory samples reaching 113.59% of the target.

Informasi mengenai pencapaian aspek produksi dengan target RKAP tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Information on production aspect achievement against the 2020 RKAP target is presented in the following table:

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Produksi Tahun 2020
Table of Comparison between Target and Realization of Production Aspect in 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP 2020	% Pencapaian / % Achievement
Produksi listrik / Electricity production	kWh	974.266.000	999.084.203	97,52
Penyaluran air baku / Raw water distribution	Juta m ³	1.001,62	959,08	104,44
Penyaluran air baku ke PLTA / Raw water distribution to hydropower plant	kWh	631.540.765	4.739.006.304	13,33
Penyaluran air bersih / Clean water distribution	m ³	2.516.269	2.408.799	104,46
Penyaluran air irigasi / Irrigation water distribution	Juta m ³	6.916,09	6228,14	111.05
Sampel laboratorium / Laboratory sample	Sampel	7.980	7.025	113,59
Pemanfaatan lahan / Land utilization				
Pertanian / Agriculture	Ha	315,13	394,59	79,86
Non Pertanian / Non Agriculture	Ha	287,87	341,54	84,29
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water				
Galon 19 liter / 19 liter Gallon	Galon	158.732	188.519	84.20
Botol 600 ml / 600 ml bottle	Botol	239.136	338.746	70,59
Botol 330 ml / 330 ml bottle	Botol	982.344	1.852.286	53.03
Gelas 240 ml / 240 ml bottle	Gelas	1.073.328	1.664.723	64.47

Aspek Keuangan

Dari sisi Laporan Laba Rugi Konsolidasian, hampir seluruh komponennya belum mampu mencapai target RKAP tahun 2020. Perusahaan membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp815.627 juta, terealisasi 86,41% dari RKAP Tahun 2020 sebesar Rp943.894 juta, laba kotor mencapai 78,96% dari target RKAP 2020, dan Laba Bersih Tahun Berjalan mencapai 70,45% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya kinerja Laba Rugi di tahun 2020 disebabkan belum adanya perjanjian pemanfaatan

Financial Aspect

In terms of the Consolidated Income Statement, almost all of its components have not been able to achieve the 2020 RKAP target. The company posted Operating Revenues of Rp815,627 million, realized 86.41% of the 2020 RKAP of Rp943,894 million, gross profit reaching 78.96% of the 2020 RKAP target, and the Current Year Net Profit reaches 70.45% of the target set. The failure to achieve the Profit and Loss performance in 2020 is due to the absence of an agreement for the utilization of Water Resources (SDA) for

Sumber Daya Air (SDA) PLTA Saguling (PT. Indonesia Power) dan PLTA Cirata (PT. Pembangunan Jawa Bali) serta dampak pandemi Covid-19.

Dari sisi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, realisasi Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2020 masing-masing mencapai 96,35% dan 75% dari target RKAP tahun 2020. Sedangkan jumlah Ekuitas yang berhasil direalisasikan mencapai 103,92% dari target RKAP tahun 2020.

Saguling Hydroelectric Power (PT. Indonesia Power) and Cirata Hydroelectric Power Plant (PT. Pembangunan Jawa Bali) as well as the impact of the Covid-19 pandemic.

In terms of the Consolidated Financial Position Statements, the realization of Assets and Liabilities as of December 31, 2020 reached 96.35% and 75% of the 2020 RKAP target, respectively. Meanwhile the total realized Equity reached 103.92% of the 2020 RKAP target.

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Keuangan Tahun 2020
Table of Comparison between Target and Realization of Financial Aspect in 2020

Uraian / Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP 2020	% Pencapaian / % Achievement
Pendapatan Usaha / Revenue	815.626,66	943.893,64	86,41
Beban Pokok / Cost of Revenues	(508.853,68)	(545.292,59)	93,32
Laba Kotor / Gross Profit	306.772,98	398.601,05	76,96
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	138.567,21	234.601,40	59,06
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	123.959,61	175.951,05	70,45
Jumlah Aset / Total Assets	1.533.076	1.591.155,41	96,35
Aset Lancar / Current Assets	770.443	818.829,92	94,10
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	762.633	772.325,49	98,75
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	312.236	416.331,83	75,00
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	145.780	149.850,41	97,28
Liabilitas Jangka Panjang / Non Current Liabilities	166.456	90.530,37	183,87
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.220.840	1.174.823,58	103,92

PROYEKSI TAHUN 2021

PROJECTION FOR 2021

Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 sebagai acuan pokok Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target finansial untuk tahun 2021 didasarkan oleh berbagai asumsi kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas Perusahaan.

The Company has prepared the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 as the main reference for the Company in carrying out its business activities. The achievement of financial targets for 2021 is based on various assumptions of internal and external conditions that may affect the Company's activities.

Kondisi internal

1. Stagnasi penerapan air baku oleh PDAM dan Industri, disebabkan oleh kegiatan pengembangan investasi IPA maupun jaringan pipa distribusi yang sangat rendah karena keterbatasan APBD, bukan berarti permintaan air bersih dari para pelanggan PDAM rendah.
2. Peningkatan pendapatan penjualan listrik PLTA Ir. H. Djuanda melalui porsi penjualan kepada pelanggan Non PLN diharapkan dapat tercapai di tahun 2021.
3. Tarif Jual Tenaga Listrik ke PT PLN (Persero) rata-rata sebesar Rp338,00/kWh (atau naik 2,42% dari asumsi tarif tahun 2020).
4. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Pemakaian Sendiri rata-rata sebesar Rp825,00/kWh.
5. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Industri/Swasta rata-rata sebesar Rp825,00/kWh (atau turun rata-rata sebesar 7% dari asumsi tarif 2019).
6. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air:

Internal conditions

1. Stagnation in the application of raw water by PDAMs and industry, due to the very low WTP investment development activities and distribution pipelines due to budget constraints, does not mean that the demand for clean water from PDAM customers is low.
2. Increase in sales revenue of HEPP Ir. H. Djuanda through the portion of sales to Non PLN customers is expected to be achieved in 2021.
3. The average selling rate of electricity to PT PLN (Persero) is IDR 338.00/kWh (or an increase of 2.42% from the 2020 tariff assumption).
4. The average selling rate of electricity for own use is IDR 825.00/kWh.
5. The average selling rate of electricity to industry/private is IDR 825.00/kWh (or an average decrease of 7% from the 2019 tariff assumption).
6. Tariffs/Fees for Water Resources Management Services:



- PAM Jaya sebesar Rp280,68/m³;
 - PDAM Kabupaten/Kota sebesar Rp130,81/m³;
 - Industri dan PT Sang Hyang Seri sebesar Rp224,71/ m³;
7. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air ke PLTA:
 - BPJSDA PLTA Djuanda sebesar Rp85,28/kWh;
 - BPJSDA PLTA Saguling sebesar Rp14,01/kWh;
 - BPJSDA PLTA Cirata sebesar Rp45,69/kWh;
 - BPJSDA PLTA Rajamandala sebesar Rp5/kWh;
 8. Tarif jual rata-rata Air Bersih adalah sebagai berikut:
 - Air Bersih Industri Rp7.311,45/m³;
 - Air Bersih Penduduk/Perumahan Rp1.818,00/m³;
 - Air Bersih curah Rp3.276,00/m³;
 9. Tarif Jasa Laboratorium rata-rata sebesar Rp740.900/ sampel
 10. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
 - Galon 19 liter sebesar Rp12.000,00/galon;
 - Botol 600 ml sebesar Rp37.500,00/dus;
 - Botol 330 ml sebesar Rp32.000,00/dus;
 - Gelas 240 ml sebesar Rp20.000,00/dus.

Kondisi eksternal

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 mengikuti asumsi ekonomi makro pada RAPBN tahun 2021 beserta Nota Keuangan yang disampaikan tanggal 16 Agustus 2020 dan perubahan asumsi kurs RAPBN 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 16 Agustus 2020 serta tercantum dalam Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
 - Pertumbuhan ekonomi 5,50%;
 - Tingkat laju inflasi kisaran 3,00%;
 - Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp14.600/US\$;
 - Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 7,90%.
2. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) bahwa awal musim hujan 2021 pada 36 Zona Musim (ZOM) Jawa, diperkirakan umumnya berkisar pada bulan Januari dan Februari 2021 dengan curah Bawah Normal (N) hingga Normal (N). Berdasarkan prakiraan tersebut, Simulasi Operasi Waduk Seri Citarum untuk tahun 2021 sebagaimana lampiran RKAP ini, dibuat dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 - Tingkat keandalan debit diklasifikasikan dalam kondisi normal, sehingga ditetapkan untuk pemberian air dari waduk Ir. H. Djuanda tahun 2020 pada posisi TMA awal ±93,19 dpl, dengan produksi listrik PLTA Ir. H. Djuanda sebesar 948,89 juta kWh dan 19,00 juta kWh untuk PLT Mini Hidro.
 - Kebutuhan pengairan 2021 terpenuhi.
 - Kebutuhan ketenagalistrikan di atas 80 MW setiap bulannya.
 - Volume ketiga waduk menganut Equal Sharing.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Perusahaan telah menetapkan target finansial untuk tahun buku 2021 sebagai berikut :

External Conditions

1. The preparation of the 2021 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) follows the macro economic assumptions in the 2021 RAPBN along with the Financial Note submitted on 16 August 2020 and the change in the 2021 RAPBN exchange rate assumption at the Working Meeting of the Budget Board of the Republic of Indonesia on 16 August 2020 and is stated in the Aspirations of the Shareholders. Shares in 2021, are as follows:
 - 5.50% economic growth;
 - The inflation rate is around 3.00%;
 - Rupiah Exchange Rate of Rp.14,600/US\$;
 - The average 3-month SPN interest rate is 7.90%.
2. According to the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) that the start of the 2021 rainy season in the 36 Seasonal Zones (ZOM) of Java, it is generally predicted to range from January and February 2021 with Below Normal (N) to Normal (N) rainfall. Based on these forecasts, the Citarum Series Reservoir Operation Simulation for 2021 as attached to this RKAP was made using the following assumptions:
 - The level of discharge reliability is classified under normal conditions, so it is determined to provide water from the Ir. H. Djuanda in 2020 at the initial TMA position of ±93.19 above sea level, with hydropower production of Ir. H. Djuanda of 948.89 million kWh and 19.00 million kWh for Mini Hydro PLT.
 - 2021 irrigation needs are met.
 - Electricity needs above 80 MW per month.
 - The third volume of the reservoir adheres to Equal Sharing.

Based on these conditions, the Company has set financial targets for the 2021 financial year as follows :

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021
Comparison between Realization in 2020 and Projection for 2021

Uraian / Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP 2021	% Pencapaian / % Achievement
Pendapatan Usaha / Revenue	815.627	1.046.292	77,95%
Laba Bruto / Gross Profit	306.773	428.344	71,62%
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	138.567	246.284	56,26%
Laba Bersih Tahun Berjalan / Profit for the Year	123.960	184.713	67,11%
Aset / Assets	1.533.076	1.767.494	86,74%
Liabilitas / Liabilities	312.236	249.635	125,08%
Ekuitas / Equity	1.220.840	1.517.859	80,43%

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Pangsa Pasar

Listrik

Sampai dengan tahun 2020, pembeli listrik PLTA masih didominasi oleh PT PLN (Persero). Namun, Perusahaan terus berupaya memberikan pasokan listrik kepada pelanggan non-PLN di sekitar wilayah Jatiluhur sebagai upaya diversifikasi pelanggan dengan memperhatikan serta mengupayakan perijinan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Air Baku dan Air Bersih

Sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan permintaan pemanfaatan Air Baku dari industri mengalami stagnasi, tetapi di sisi lain permintaan pemenuhan kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terbukanya peluang kerja sama dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia Air Bersih.

Jasa Laboratorium

Pengguna Jasa Laboratorium adalah industri, PDAM dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laboratorium dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Sampai dengan tahun 2020, penetrasi pasar untuk segmen jasa laboratorium dikhususkan ke beberapa industri guna menambah pengguna jasa laboratorium. Adapun sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat 7.980 sampel yang diuji di Laboratorium PJT II, meningkat 0,23% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 7.962 sampel

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pangsa pasar produk AMDK adalah Industri, Perorangan dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas AMDK dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Pada tahun 2020, penetrasi pasar untuk segmen AMDK dilakukan melalui penguatan sinergi BUMN untuk membuka pasar di tengah maraknya merek-merek AMDK yang terlebih dahulu beredar di masyarakat.

Market Share

Electricity

Until 2020, Hydropower Plant power buyers were still dominated by PT PLN (Persero), but the Company continued providing electricity to non-PLN customers around the Jatiluhur as customer diversification effort by paying attention and seeking new licenses according to the provisions.

Raw Water and Clean Water

Until 2020, demand growth for Raw Water Utilization from industry has stagnated but on the other hand demand for water supply kept increasing along with population growth and the opening of opportunity to cooperate with PDAM as a provider of Clean Water.

Laboratory Services

Users of Laboratory Services were industry, PDAM and Government Institutions in PJT II working area. However, the Company continuously managed to improve the quality of laboratory and cooperate with local government. Until 2020, market penetration conducted by laboratories to several industrial areas could increase laboratory service users. As of the end of 2020, there were 7,980 samples tested in the Laboratory of PJT II, an increase of 0.23% compared to 7,962 in 2019.

Bottled Drinking Water (AMDK)

The market share of AMDK products are Industry, Individual and Government Institution in PJT II working area. However, the Company has continuously worked to improve the quality of AMDK and worked with local governments. Until 2020, the market penetration made by AMDK segment through the synergy of SOEs was an effort to open the market amid the rise of AMDK brands that have been circulating in the community.



Kepariwisataaan

Pengguna jasa Pariwisata di kawasan waduk Jatiluhur adalah Industri, masyarakat umum, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik kawasan pariwisata Jatiluhur dengan mengikutsertakan peran pihak-pihak swasta dalam pemasarannya.

Pemanfaatan Lahan

Sampai dengan tahun 2020, pangsa pasar pemanfaatan lahan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemanfaatan lahan untuk pertanian dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian. Pengguna lahan milik PJT II masih didominasi oleh Industri, PDAM, Perorangan, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan penatagunaan lahan sesuai peruntukan, seperti optimalisasi pengusahaan dan peruntukan lainnya.

Strategi Pemasaran

Perusahaan melakukan berbagai kegiatan pemasaran menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (untuk paragraf pembuka) serta bekerja sama dengan instansi terkait. Berikut adalah strategi dan kegiatan pemasaran yang dilakukan selama tahun 2020:

1. Pariwisata
 - a. Digital Marketing
 - b. Kolaborasi dengan ekosistem pariwisata
 - c. Infrastruktur IT untuk Pariwisata
 - d. Upgrading bisnis proses Pariwisata berbasis IT
 - e. Penerapan Cashless Payment
 - f. Pemenuhan Sertifikasi kesiapan New Normal (Safeguard)
 - g. Standarisasi Hospitality (SDM & Infrastruktur)
 - h. Sertifikasi Hotel Bintang
2. AMDK
 - a. Pemasaran akan dilakukan dengan menambah/meningkatkan target pemasaranyang sudah ada (intensifikasi) di kab. Purwakarta, Subang dan Karawang (Purwasuka) dan Jabodetabek dengan pendekatan agen-agen loyal.
 - b. Melakukan ekspansi pemasaran ke pelanggan-pelanggan baru (ekstensifikasi) antar lain Pemda Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi yang menjadi jalur distribusi eksisting.
 - c. Melakukan ekspansi ke BUMN-BUMN Karya (Konstruksi) dan lainnya, serta Kementrian/Lembaga/Badan di Jakarta. Mengingat terdapat agen/gudang milik PJT II di Jakarta (Cempaka Putih).
3. Laboratorium

Mengembangkan pasar dengan melakukan pendekatan ke Lab-Lab milik Pemda. Kab/Koat untuk menerima kelebihan/limpasan sample yang tidak dapat dilaksanakan antara lain Lab. Dinas LH Kab. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi dan DKI yang satu jalur dengan pelanggan yang ada saat ini (untuk efisiensi beban sampling).

Tourism

Users of Tourism Services in Jatiluhur reservoir area are Industry, general public, and Government Institution in PJT II working area. However, the Company continues to increase the attractiveness of Jatiluhur tourism area by involving the private sector in its marketing activities.

Land Utilization

Until 2020, the market share of land use was divided into two categories: land use for agriculture and land use for non-agricultural activities. Land users belonging to PJT II were still dominated by Industrial, PDAM, Individual, and Government Institution in PJT II working area. However, the Company managed to continuously improve the stewardship of the land according to designation such as for the optimization of the business.

Marketing Strategy

The company carries out various marketing activities with presentations, promotions, exhibitions, making booklets and leaflets or information to various parties and cooperating with relevant agencies. The following are strategies and marketing activities carried out during 2020 :

1. Tourism
 - a. Digital Marketing
 - b. Collaboration with the tourism ecosystem
 - c. IT Infrastructure for Tourism
 - d. IT-based Tourism business process upgrading
 - e. Application of Cashless Payment
 - f. Fulfillment of New Normal readiness certification (Safeguard)
 - g. Hospitality Standardization (HR & Infrastructure)
 - h. Star Hotel Certification
2. AMDK
 - a. Marketing will be done by adding/increasing the existing marketing targets (intensification) in the district. Purwakarta, Subang and Karawang (Purwasuka) and Jabodetabek with loyal agents approach.
 - b. Expansion of marketing to new customers (extensification) including the Regional Government of Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi and Bekasi City which are the existing distribution channels.
 - c. Expansion to BUMN-BUMN Karya (Construction) and others, as well as Ministries/Institutions/Agencies in Jakarta. Considering that there is an agent/warehouse owned by PJT II in Jakarta (Cempaka Putih).
3. Laboratory

Develop Padar by approaching the Labs owned by the Regional Government. District/Koat to receive excess/runoff samples that cannot be implemented include Lab. District LH Department. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi and DKI are in the same line with existing customers (for sampling load efficiency).

4. Penfaatan lahan
 - a. Mengadakan evaluasi atas perpanjangan izin pemanfaatan lahan;
 - b. Pemasangan patok dan papan larangan;
 - c. Mengadakan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan lahan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk reinventarisasi;
 - e. Membuat skala prioritas penyelesaian masalah;
 - f. Selektif dengan memperhatikan lingkungan; dan
 - g. Pembuatan sertifikat lahan.

4. Land use
 - a. Conduct an evaluation of the extension of the land use permit;
 - b. Installation of stakes and prohibition boards;
 - c. Carry out land measurement, mapping, and recording;
 - d. Carry out coordination with relevant agencies for reinventory;
 - e. Making a priority scale for problem solving;
 - f. Selective with regard to the environment; and
 - g. Making land certificates.

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDENDS POLICY

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, operasi Perusahaan turut diorientasikan pada perolehan laba guna meningkatkan nilai bagi Pemilik Modal dengan tetap memperhatikan efektivitas operasi dan efisiensi beban sehingga dapat menghasilkan laba yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Modal dalam bentuk dividen.

Surat Menteri BUMN Nomor: S-431/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tahun 2019 menetapkan penyetoran dividen sebesar Rp20.764 juta untuk kinerja keuangan tahun buku 2019. Pembayaran dividen tahun buku dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020. Adapun penyetoran dividen untuk kinerja keuangan tahun buku 2020 akan diputuskan pada tahun 2021.

The purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting Government program policies in the field of economy and national development in general, especially in the field of Business and Water Resources Management and optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on the principles of sound company management.

Based on the said aims and objectives, the Company's operations are also oriented towards earning profits in order to increase the value of the Capital Owners while still taking into account the effectiveness of operations and expenses efficiency to generate profits that can be distributed to the Capital Owners in the form of dividends.

Letter of Minister of SOE No: S-431/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 Regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of Jasa Tirta II Public Company (Perum) Jasa Tirta II Year 2019 stipulates the payment of dividends of Rp. 20,764 million for the financial performance of the 2019 financial year. The payment of the dividend for the financial year will be made on July 22, 2020. The payment of dividends is for the financial performance The 2020 financial year will be decided in 2021.

Tabel Dividen 5 (Lima) Tahun Terakhir
Dividend Table for the Last 5 (Five) Years

uraian / Description	2019	2018	2017	2016	2015
Laba Bersih (Rp juta) / Net Profit (Rp million)	123.959	166.596	174.551	170.646	54.603
Dividen (Rp juta) / Dividends (Rp million)	20.764	41.649	17.455	8.532	13.651
Rasio Dividen / Dividend Ratio	13,5%	40%	10%	5%	25%
Tanggal Pengumuman Dividen / Dividend Announcement Date	26 Juni 2020 / June 26, 2020	07 Mei 2019 / May 07, 2019	04 Mei 2018 / May 04, 2018	30 Mei 2017 / May 30, 2017	09 Juni 2016 / June 09, 2016
Tanggal Pembayaran Dividen / Dividend Payment Date	22 Juli 2020 / July 22, 2020	29 Mei 2019 / May 29, 2019	16 Mei 2018 / May 16, 2018	08 Juni 2017 / June 08, 2017	21 Juni 2016 / June 21, 2016



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (MESOP)

MANAGEMENT AND EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM (MESOP)

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di mana seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II tidak memiliki program tersebut.

Public Company, hereinafter referred to as PERUM, is a State-Owned Enterprise as regulated in Law No. 19 of 2003 in which the entire capital is owned by the State and not divided into shares. Therefore, Perum Jasa Tirta II does not have such program.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Sebagai Perusahaan Umum, Perum Jasa Tirta II tidak melakukan aktivitas terkait penawaran umum di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak ada informasi terkait dengan perolehan dana, rencana penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

As a Public Company, Perum Jasa Tirta II does not conduct activities related to public offerings on the Indonesia Stock Exchange, therefore, there is no information related to the acquisition of funds, planned use of funds, balance of funds, and the date of AGMS approval for the use of funds from the public offering.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION AND RESTRUCTURING OF DEBT/CAPITAL

Investasi

Sampai dengan 31 Desember 2020, investasi Perusahaan diwujudkan melalui pendirian Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan, dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Investment

As of December 31, 2020, the Company's investment was realized through the establishment of Subsidiaries, with ownership details as follows :

No.	Anak Perusahaan / Subsidiary	Kepemilikan / Ownership	Lembar Saham / Shares
1.	PT Jasa Tirta Luhur	99,00%	19.800
2.	PT Tegar Mandiri Cemerlang	51,00% (melalui PT Jasa Tirta Luhur / through PT Jasa Tirta Luhur)	10.200

Ekspansi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak melakukan ekspansi sehingga tidak terdapat informasi terkait ekspansi yang relevan untuk diungkapkan.

Expansion

As of December 31, 2020, the Company did not conduct an expansion, thus, there was no relevant expansion-related information to be disclosed.

Divestasi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak melakukan divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait divestasi yang relevan untuk diungkapkan.

Divestment

As of December 31, 2020, the Company did not conduct a divestment, thus, there was no relevant divestment-related information to be disclosed.

Penggabungan/Peleburan usaha

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha sehingga tidak terdapat informasi terkait penggabungan/peleburan usaha yang relevan untuk diungkapkan.

Akuisisi

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak melakukan akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait akuisisi yang relevan untuk diungkapkan.

Restrukturisasi utang/Modal

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang/modal sehingga tidak terdapat informasi terkait restrukturisasi utang/modal yang relevan untuk diungkapkan.

Business Merger/Consolidation

As of December 31, 2020, the Company did not conduct a business merger/consolidation, thus, there was no relevant business merger/consolidation-related information to be disclosed.

Acquisition

As of December 31, 2020, the Company did not conduct an acquisition, thus, there was no relevant acquisition-related information to be disclosed.

Debt/Capital Restructuring

As of December 31, 2020, the Company did not conduct debt/capital restructuring, thus, there was no relevant debt/capital restructuring-related information to be disclosed.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND / OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES / RELATED PARTIES

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

Throughout 2020, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (2015 improvement), concerning Disclosure of Related Parties. A related party is a person or entity that is related to the reporting entity :

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - 1) Has control or joint control over the reporting entity;
 - 2) Has significant influence over the reporting entity;
 - 3) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - 1) The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - 2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - 3) Both entities are joint venture of the same third party.
 - 4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.



- 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir a.
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam butir a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- 8) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- 5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- 6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- 7) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity)
- 8) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Nama Pihak, Sifat hubungan, dan Jenis Transaksi Berelasi

Name of Party, nature of Relationship and Type of Related Transaction

No.	Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat hubungan / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Type of Transaction
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R. I	Giro / Bank Account
2.	PT Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R. I	Giro / Bank Account
3.	PT Bank BNI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R. I	Giro / Bank Account
4.	PT Bank BTN (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Giro / Bank Account
5.	PT PLN (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha / Account Receivable
6.	PT Pertamina (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha / Account Receivable
7.	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha / Account Receivable
8.	PT Indra Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
9.	PT BUMN Hijau Lestari	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
10.	Care LPPM IPB	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
11.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable
12.	Hotel Indonesia Group	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R. I	Utang Usaha / Accounts Payable

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The details of balances and transactions with related parties in 2020 and 2019 are as follows :

Uraian / Description	2020		2019	
	Rp (juta) / Rp (million)	% terhadap Jumlah Aset / % to Total Assets	Rp (juta) / Rp (million)	% terhadap Jumlah Aset / % to Total Assets
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	512.540	33,43%	580.341	40,53%
Piutang Usaha / Trade Receivables	100.822	6,58%	85.592	0,06%
Piutang Usaha yang Belum Difakturkan / Unbilled Receivables	96.182	6,27%	39.071	0,03%
Utang Usaha / Accounts Payable	13.885	0,9%	9.776	0,68%

Manajemen menganalisis bahwa seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mendorong kinerja finansial pada tahun buku 2020 dan 2019.

Management analyzes that all transactions with Related Parties are needed to support the efficiency of the Company's operational activities which can propel financial performance in the 2020 and 2019 fiscal year.

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

AMENDMENT TO STATUTORY PROVISIONS THAT HAS SIGNIFICANT IMPACT

Perubahan undang-undang / Amendment of Law	Perihal / Subject	Dampak terhadap Perusahaan / Impact on the Company
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 / Law Number 17 of 2019	Sumber Daya Air / Water Resources	Menurunnya pendapatan air baku perusahaan disebabkan sebagian besar dari pelanggan perusahaan belum memiliki SIPSDA. / The decline in the company's raw water revenue is due to the fact that most of the company's customers do not have SIPSDA.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Catatan 2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anaknya.

Changes in accounting policies are presented in Note 2 in the Notes to the Consolidated Financial Statements of Perum Jasa Tirta II and its Subsidiaries.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan usaha Perusahaan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Manajemen menilai bahwa Perusahaan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari stabilitas kinerja operasional dan keuangan setiap tahunnya.

Assessment Manajemen akan Kelangsungan usaha Tahun 2020

Analisis terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dilakukan melalui assessment terhadap beberapa indikator, yaitu :

1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
2. Penilaian tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan kriteria Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
3. Hasil perhitungan Z-score model tahun 2020; dan
4. Gugatan atau tuntutan hukum yang dihadapi.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan assessment

Asumsi kelangsungan usaha terutama didasarkan pada upaya internal Perusahaan dalam memperkuat kinerja operasionalnya. Uraian mengenai analisa tingkat kesehatan Perusahaan dan penilaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2020 untuk mendukung keberlangsungan usaha Perusahaan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan yang Diterbitkan KAP

Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material baik pada posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. KAP tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2020.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan pada kriteria dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan penilaian tersebut, Perum Jasa Tirta II dalam tahun buku 2020 termasuk dalam kategori SEHAT dengan klasifikasi AA dengan total skor 88,59.

Potential Matters that have a Significant effect on the Company's Business Continuity in 2020

Throughout 2020, Management considers that the Company does not have matters that have the potential to significantly influence its business continuity. This can be seen from the stability of operational and financial performance each year.

Management Assessment on Business Continuity in 2020

Analysis on the Company's business continuity is carried out through an assessment of several indicators, namely:

1. Financial statements issued by the Public Accounting Firm (KAP);
2. The evaluation of the soundness of the Company based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment on the Health Level of the State-Owned Enterprises;
3. The results of the 2019 model Z-score calculation; and
4. Lawsuits faced.

Assumptions used by Management in Conducting Assessments

The assumption of business continuity is mainly based on the Company's internal efforts in strengthening its operational performance. A description of the Company's soundness analysis and the 2020 Key Performance Indicator (KPI) assessment to support the Company's business sustainability in the future is as follows.

Financial Statements Issued by KAP

Financial Statements issued by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra stated that the Company's financial statements have fairly presented in all material matters both in the financial position, results of operations and cash flow. The KAP provided an unqualified opinion on the 2020 Company Financial Statement.

Company Health Level

The company's health level assessment based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment on the Health Level of the State-Owned Enterprises; Based on this assessment, Perum Jasa Tirta II in 2019 fiscal year is included in the HEALTHY category with AA classification with a total score of 88.59.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020
Table of Company Health Level in 2020

Uraian / Description	2020
Aspek Keuangan / Financial Aspects	
Return on Equity (ROE)	12,00
Return on Investment (ROI)	7,00
Cash Ratio	3,00
Current Ratio	4,00
Collection Period (CP)	3,00
Perputaran Persediaan (PP)/ Inventory Turnover	4,00
Total Assets Turn Over (TATO)	1,50
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset / Total Own Capital to Total Assets Ratio	4,25
Jumlah Aspek Keuangan / Total Financial Aspects	38,75
Aspek operasional / operational Aspects	
Pelayanan Kepada Masyarakat / Services to the Public	14,88
Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah / Results of the Implementation of Government Assignments	10,00
Efisiensi Produksi & Produktivitas / Production Efficiency & Productivity	4,94
Kepedulian terhadap Lingkungan / Concern for the Environment	5,00
Jumlah Aspek operasional / Total operational Aspects	38,84
Aspek Administrasi / Administration Aspects	
Laporan Perhitungan Tahunan / Annual Calculation Report	3,00
Rancangan RKAP / RKAP draft	3,00
Laporan Periodik / Periodic Report	3,00
Kinerja PKBL/ PKBL Performance	
Efektivitas Penyaluran / Distribution Effectiveness	3,00
Kolektibilitas Pengembalian / Return Collectibility	3,00
Jumlah Aspek Administrasi / Total Administration Aspects	15,00
Total Skor / Total Score	88,59
Tingkat Kesehatan / health Level	Sehat / healthy ("AA")

Analisis Key Performance Indicator (KPI)

Perhitungan KPI yang digunakan Perusahaan meliputi performa Keuangan dan Pasar; Fokus Pelanggan; Efektivitas Produk & Proses; Fokus Tenaga Kerja; Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan; dan Agent of Development (AOD). Pada tahun 2020, skor KPI yang diraih oleh Perusahaan berdasarkan indikator-indikator tersebut tercatat sebesar 88,59 dari jumlah keseluruhan sebesar 100.

Key Performance Indicator Analysis (KPI)

KPI calculations used by the Company include Financial and Market performance; Customer Focus; Product & Process Effectiveness; Workforce Focus; Leadership, Governance & Community Responsibility; and Agent of Development (AOD). In 2020, KPI scores achieved by the Company based on these indicators were recorded at 88.59 out of a total of 100.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020
Table of Company Health Level in 2020

No.	Perspektif/indikator / Perspective/ Indicator	Bobot / Weight	Satuan / Unit	Target	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement	Skor / Score
Keuangan dan Pasar / Finance and Markets							
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha / Business Revenue Growth	10,00	%	16,12	0,34	2,10%	0,21
	EBITDA Margin	12,00	%	28,89	22,57	78,12%	9,37
	Sub Jumlah / Sub-Total	22,00					9,58



No.	Perspektif/indikator / Perspective/ Indicator	Bobot / Weight	Satuan / Unit	Target	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement	Skor / Score
Fokus Pelanggan / Customer Focus							
2	Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index	7,00	%	83,00	86,77	104,54%	7,32
	Penanganan Keluhan Pelanggan / Customer Complaints Management	7,00	%	100,00	100,00	100,00 %	7,00
	Realisasi Jumlah Pelanggan (Air Baku PDAM Industri dan Listrik) / Realization of Number of Customers (Raw Water Industrial and Electric PDAM)	6,00	Pelanggan/ Customer	445,00	445,00	94,33%	6,00
	Sub Jumlah / Sub-Total	20,00					20,32
efektivitas Produk & Proses / Product & Process effectiveness							
Layanan Air Baku Irigasi / Irrigation Raw Water Service							
3	Pencapaian Penyaluran Air Baku Irigasi / Achievement of Irrigation Raw Water Distribution	4,00	%	100,00	110,16	110,16%	4,20
	Pencapaian Luas Realisasi Tanam / Achievement of Planting Realization Area	4,00	%	100,00	107,30	107,30%	4,20
	Penjualan Air Bersih/ Clean Water Sales	5,00	juta m ³ / million m ³	2,40	2,52	105,00%	5,25
	Belanja Modal / Capital Expenditures	4,00	juta m ³ / million m ³	3.890,17	19.922,96	31,18%	1,25
	Sub Jumlah / Sub-Total	17,00					14,90
Fokus Tenaga Kerja / workforce Focus							
4	Produktivitas Karyawan / Employees Productivity	5,00	Juta Rp/orang / Rp Million/ person	358,45	284,05	79,24%	79,24%
	Kapabilitas Tenaga Kerja / Workforce Capability	6,00	%	80,00	100,00	125,00%	6,30
	Alokasi Biaya Pengembangan SDM / HR Development Cost Allocation	5,00	%	5,00	2,88	57,54%	2,88
	Sub Jumlah / Sub-Total	16,00					13,14
Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan / Leadership, governance & Community Responsibility							
5	Ketepatan Penyampaian Laporan FIS di Portal BUMN / Accuracy of Submission of FIS Reports on the BUMN Portal	3,00	%	100,00	100,00	100,00%	3,00
	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan / Partnerships and Community Development Program	3,00	%	100,00	95,52	95,52%	2,87
	Program Kemitraan / Partnership Program						
	Bina Lingkungan / Community Development						
	Sustainability Report						
	Skor GCG / GCG Score	3,00	Nilai / Score	82,00	83,69	102,06%	3,06
	Skor KPKU / KPKU Score	3,00	Nilai / Score	520,00	523,25	100,63%	3,02
	Skor RBOPB / RBOPB Score	3,00	Nilai / Score	56,00	53,95	96,35%	2,89
	Sub Jumlah / Sub-Total	15,00					14,84
	Agent of Development						
6	Sinergi BUMN / BUMN Synergy	5	Miliar Rupiah / Billion Rupiah	39,00	24,43	62,64%	3,13
	Penyaluran Air Baku untuk Energi Listrik PLAT untuk WS. Citarum / Distribution of Citarum River Basin	5	Juta kWh / Million kWh	444.531,37	4393.467,79	88,51%	4,43
	Sub Jumlah / Sub-Total	10,00					7,56
	Jumlah / Total	100,00					80,33

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE





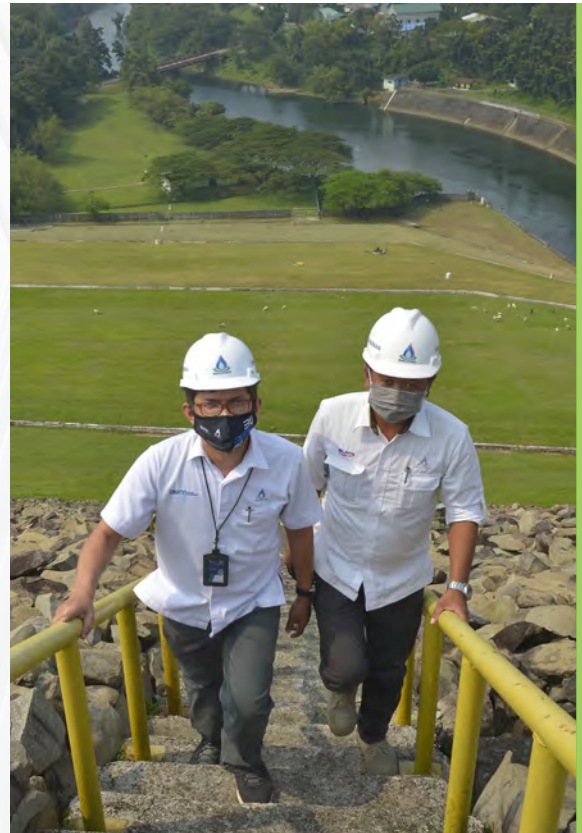
TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Komitmen penerapan GCG di Lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di Perusahaan.

The commitment to implement GCG in Perum Jasa Tirta II is carried out through strengthening existing infrastructure and continually improving systems and procedures to support the effectiveness of GCG implementation in the Company.



KOMITMEN PENERAPAN GCG GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perum Jasa Tirta II berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku.

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemangku Kepentingan dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

1. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perum Jasa Tirta II memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
4. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga

The implementation of good corporate governance at Perum Jasa Tirta II is based on the joint commitment of all levels of management and staff to obey and comply with all applicable laws and regulations and applicable ethical values.

The Company has implemented GCG principles and practices in the management and management of its business, so as to protect Stakeholders effectively. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

1. Perum Jasa Tirta II has a clear and realistic vision and mission formulation.
2. Perum Jasa Tirta II complies with applicable laws and regulations.
3. Perum Jasa Tirta II has corporate values that reflect the Company's good moral attitude in the conduct of its business.
4. Perum Jasa Tirta II has the formulation of business ethics and the Company's code of conduct. Business ethics and code of conduct are carried out continuously and consistently, so as to form



membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.

5. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan antar organ Perusahaan yaitu Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal dan Dewan Pengawas serta Direksi.
6. Perum Jasa Tirta II memiliki pedoman tata kerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
7. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan dengan stakeholders.
8. Perum Jasa Tirta II dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

a corporate culture that is a manifestation of the Company's values.

5. Perum Jasa Tirta II has governance relations between the Company's organs, namely Joint Discussion Meeting with the Capital Owners and the Supervisory Board and Board of Directors.
6. Perum Jasa Tirta II has guidelines for the work of the Supervisory Board and Board of Directors in carrying out their roles and duties.
7. Perum Jasa Tirta II has governance relations with stakeholders.
8. Perum Jasa Tirta II in its function as an intermediary institution and as part of the business world must care and play an active role in preserving natural resources and the environment.

DASAR HUKUM DAN SOFT STRUCTURE GCG

LEGAL BASIS AND GCG SOFT STRUCTURE

Peraturan dan Ketentuan GCG

Penerapan GCG Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices lainnya yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha yang dijalankan.

Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

GCG Rules and Regulations

The implementation of GCG of the Company refers to a number of applicable laws and regulations and other best practices that are appropriate and relevant to the line of business being carried out.

Laws of the Republic of Indonesia

- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
- Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Disclosure of Public Information;
- Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1974 concerning Irrigation;
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes;
- Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Government Regulations

- Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II;
- Republic of Indonesia Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment, Supervision and Dissolution of SOE.

SOE Minister Regulation

- Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises;

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Lainnya

- Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 & KBS-01/DIR/10/2019 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perum Jasa Tirta II;
- Peraturan direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-23/DIR/08/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan Perum Jasa Tirta II;
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
- Pedoman Governansi Korporat dalam Badan Usaha Milik Negara OECD.

Soft Structure dan Kelengkapan Kebijakan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai pedoman dan *Standard Operating Procedures* (SOP) antara lain:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*)
- Board Manual
- Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)
- Pedoman Manajemen Risiko
- SPI Charter
- Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Benturan Kepentingan
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi
- Pedoman Pengendalian Intern
- Komite Audit Charter
- Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan

- Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Supervisory Board of State Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment of SOE.
- Regulation of the Minister of SOE Number: PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of SOE;
- Decree of the Secretary of the Ministry of SOE Number S- 16/S.MBU/2012 concerning Indicators of Appraisal and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Other Regulations

- Joint Decree of the Supervisory Board and Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta No: 1/DP/68/KBS/10/2019 & KBS-01/DIR/10/2019 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jasa Tirta II;
- Regulation of the board of directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-23/DIR/08/2019 concerning Guidelines for the Management of Subsidiaries of Perum Jasa Tirta II;
- General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy;
- Guidelines for Corporate Governance in OECD State-Owned Enterprises.

Soft Structure and Comprehensiveness of GCG

Policies The optimal implementation of GCG within Perum Jasa Tirta II is carried out by strengthening various GCG policies and manuals to achieve best practices, systems and procedures that are reliable in accordance with the business development and regulations of the Company. Perum Jasa Tirta II complements the implementation of GCG with various guidelines and Standard Operating Procedures (SOP), including:

- Code of Corporate Governance
- Board Manual
- Code of Business Ethics and Code of Conduct
- Risk Management Guidelines
- SPI Charter
- Guidelines for Management of Violation Complaints (*Whistleblowing System*)
- Gratuity Guidelines
- Conflict of Interest Guidelines
- Information Technology Governance Guidelines
- Internal Control Guidelines
- Charter Audit Committee
- Subsidiary Management Guidelines



TUJUAN PENERAPAN GCG

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG principles consistently with the following objectives :

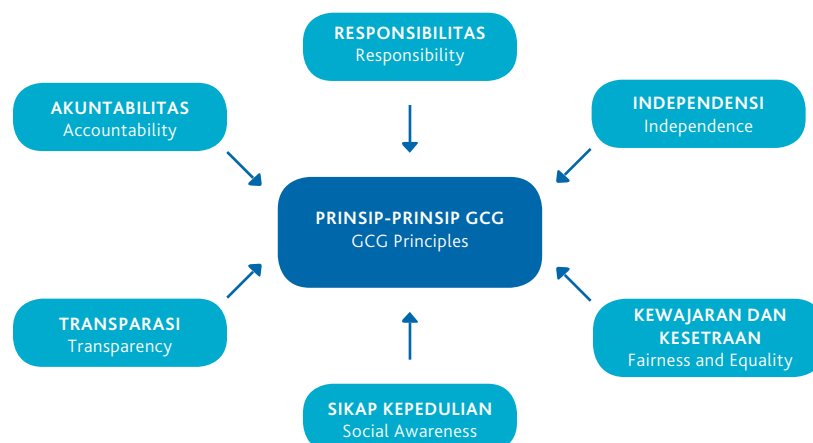
1. Achieve maximum growth and returns thereby increasing the prosperity of the Company, as well as realizing the value of the Capital Owners in the long run without ignoring the interests of other stakeholders;
2. Control and direct good relations between the Capital Owners, the Supervisory Board, the Board of Directors, and all Company stakeholders;
3. Support internal control and development activities of the Company;
4. Manage resources more reliably;
5. Increase accountability to stakeholders;
6. Improve the Company's work culture; and
7. Making the Company a value-added company, namely improving the welfare of all Company personnel as well as increasing the benefits for the Company's stakeholders.

PRINSIP PENERAPAN GCG

PRINCIPLES OF GCG IMPLEMENTATION

Perum Jasa Tirta menilai pentingnya penerapan dan pelaksanaan best practices GCG dengan berlandaskan pada kepatuhan dan standar yang berlaku. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, penerapan tata kelola Perusahaan berprinsip pada prinsip-prinsip dasar, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independence*), Kewajaran (*Fairness*), dan Sikap Kepedulian (*Social Awareness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Pengawas dan Direksi sampai pada seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II.

Perum Jasa Tirta assesses the importance of applying and implementing GCG best practices based on compliance and applicable standards. Meet the provisions in SOE State Minister Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Minister of State Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in SOEs, the implementation of corporate governance is based on the basic principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Social Awareness in each of its business activities in all levels or levels of the organization from the Supervisory Board and Directors to all employees of Perum Jasa Tirta II.



Prinsip GCG / GCG Principles	Definisi / Definition	Bentuk Implementasi / Implementation
Transparansi / Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang diatur dalam regulasi, tetap juga hal penting lainnya dalam pengambilan keputusan oleh Pemilik Modal dan pemangku kepentingan lainnya. / To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The company takes the initiative to disclose not only the problems required by laws and regulations, but also matters that are important for decision making by Capital Owners and other stakeholders.	- Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II memuat informasi penting dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II, antara lain tetapi tidak terbatas kepada: / Perum Jasa Tirta II's Annual Report contains important information in the management of Perum Jasa Tirta II, including but not limited to: - Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perum Jasa Tirta II; / Vision, Mission, Objectives, Business Objectives, and Strategy of Perum Jasa Tirta II; - Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor; / Financial condition of audit results by external auditors; - Susunan pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas); / Management composition (Board of Directors and Supervisory Board); - Informasi Pemilik Modal Pengendali; / Information on Controlling Capital Owners. - Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas beserta anggota keluarganya dan Perum Jasa Tirta II lainnya memiliki benturan kepentingan; / Share ownership by members of the Board of Directors and the Supervisory Board and their family members and Perum Jasa Tirta II who have a conflict of interest; - Sistem manajemen risiko; / Risk Management System - Sistem pengawasan dan pengendalian internal; / Internal supervision and control system; - Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya; / System and implementation of GCG and the level of compliance; - Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi; / Important events that can affect the condition; - Biodata anggota Direksi dan Dewan Pengawas; / Profile of members of the Board of Directors and Supervisory Board; - Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; / Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board; - Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Pengawas. / Meetings held by the Directors and Supervisory Board. - Informasi penting kepada stakeholders, antara lain: / Important information to stakeholders, including: - Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemilik Modal; / Quarterly reports containing routine management reports, submitted to the Capital Owners; - Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; / Procurement procedures and relations with partners; - Ketaatan dalam pembayaran pajak; / Compliance with tax payments; - Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB. / HR management mechanism, in accordance with PKB.
Kewajaran / Fairness	Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perum Jasa Tirta II menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. / Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. Perum Jasa Tirta II guarantees that every party concerned has fair treatment in accordance with the applicable laws and regulations.	- Pemilik Modal berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; / The Capital Owner has the right to attend and vote in the RPB in accordance with the applicable provisions; - Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan; / Perum Jasa Tirta II will treat all partners fairly and transparently; - Perum Jasa Tirta II akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap karyawan sesuai dengan kemampuan Perum Jasa Tirta II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; / Perum Jasa Tirta II will provide good and safe working conditions for each employee in accordance with Perum Jasa Tirta II's capabilities and applicable laws and regulations. - Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal usul, jenis kelamin, atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan kinerja. / Perum Jasa Tirta II will treat every employee fairly and be free from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender or other matters that have no relation to performance
Akuntabilitas / Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perum Jasa Tirta II meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. / Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Organ and the entire ranks of Perum Jasa Tirta II so that the management of Perum Jasa Tirta II is carried out effectively. Perum Jasa Tirta II believes that accountability is related to the existence of a system that controls relations between individuals and or organs in Perum Jasa Tirta II and the relationship between Perum Jasa Tirta II and interested parties.	- Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perum Jasa Tirta II (Direksi, Dewan Pengawas, SPI, Sekper, dan organ struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (<i>Corporate Values</i>), dan strategi Perum Jasa Tirta II; / Sets out the details of the duties and responsibilities of each organ of Perum Jasa Tirta II (Directors, Supervisory Board, SPI, CORSEC and other Structural Organ) and all employees clearly and in harmony with Perum's vision, mission, values (corporate values), and the strategy of Perum Jasa Tirta II. - Berupaya agar semua organ Perusahaan dan seluruh karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; / Strive to ensure that all organs of the Company and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities and roles in the implementation of GCG; - Menciptakan sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan; / Creates an effective internal control system in managing the Company. - Menyelenggarakan RPB untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, persetujuan laporan tahunan, penetapan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan; / Carrying out RPB to ratify long-term plans, annual budget plans, approval of annual reports, determination of profit sharing and dividends paid; - Pemenuhan <i>check and balances</i> Direksi dan Dewan Pengawas yang sesuai dengan prinsip GCG. / Fulfilment of checks and balances of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with GCG principles.



Prinsip GCG / GCG Principles	Definisi / Definition	Bentuk Implementasi / Implementation
Pertanggung jawaban / Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perum Jasa Tirta II bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta aspek lainnya. / Compliance in the management of Perum Jasa Tirta II with applicable laws and regulations and sound corporate principles. Perum Jasa Tirta II is responsible for complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, unfair business competition, occupational safety and health, and other aspects.	1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik; / Carry out tax obligations properly; 2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; / Comply with the provisions of the laws on occupational safety and health and the environment; 3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi; / Carry out the obligation of fostering the surrounding community, for example by participating in fostering small businesses and cooperatives. 4. Melaksanakan UU Tenaga Kerja, UU Jasa Konstruksi, pedoman GCG, dan regulasi lainnya; / Implement the Manpower Act, Construction Services Law, GCG guidelines, and other regulations; 5. <i>Community Development</i> (0,3% dari anggaran) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak mampu. / Community Development (0.3% of the budget) as a form of concern for the community in improving the welfare of the lives of disadvantaged people.
Kemandirian / Independence	pengelolaan Perusahaan yang profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian secara optimal mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas seluruh organ Perusahaan dan pengelolaan terbaik bagi Perum Jasa Tirta II. / Professional company management without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles. The optimal implementation of the principle of independence is able to optimize the implementation of the duties of all Company organs and the best management for Perum Jasa Tirta II.	1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing organ dan tidak saling mendominasi satu sama lain; / Mutual respect for the rights, obligations, duties, authority, and responsibilities of each organ and not dominating each other; 2. Tidak mencampuri urusan Perusahaan selain organ yang berkepentingan; / Do not interfere in the management of the Company other than organs of interest; 3. Selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II. / Always avoid conflicts of interest in making decisions made by the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II.
Sikap Kepedulian / Social Awareness	Rasa peduli kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial. / A sense of caring for the community and the environment through humanitarian and social activities.	Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) setiap tahunnya dengan membidik isu-isu lingkungan dan sosial yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. / The implementation of Corporate Social Responsibility activities every year by targeting environmental and social issues that are relevant to the needs of stakeholders.



ROAD MAP GCG

GCG ROAD MAP

Perum Jasa Tirta II telah membentuk road map GCG sebagai kerangka acuan yang menentukan arah implementasi dan pengembangan GCG Perusahaan dalam jangka waktu tertentu sekaligus menjadi panduan bagi seluruh organ Perusahaan dalam menjalankan tata kelola di setiap aktivitas operasional. Road map GCG Perum Jasa Tirta II tahun 2015 – 2020 merupakan *Grand Strategy* dan Milestone Implementasi GCG berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun sasaran akhir road map GCG tahun 2015 – 2020 adalah terciptanya tata kelola yang berkelanjutan pada seluruh proses bisnis oleh seluruh organ perusahaan.

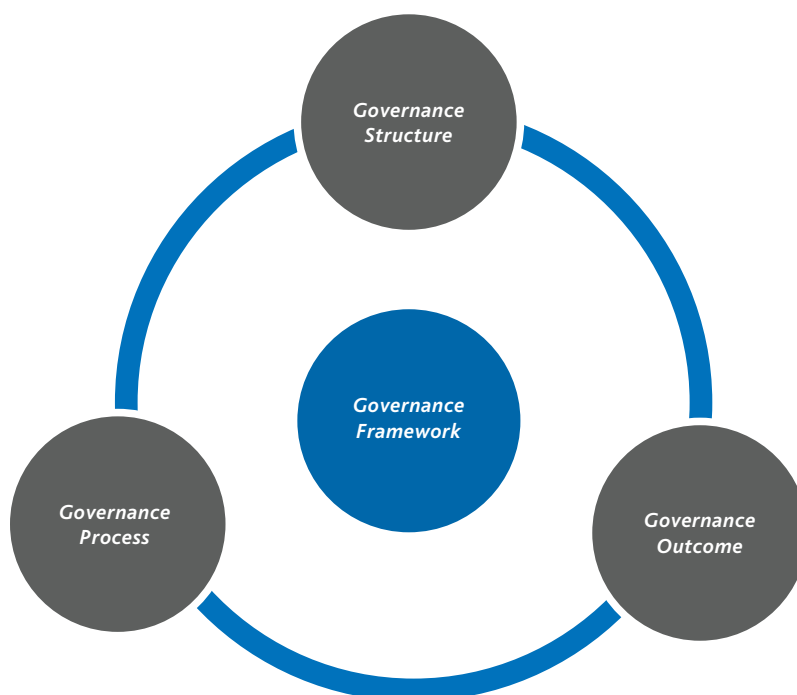
Perum Jasa Tirta II has established a GCG road map as a reference that determines the direction of the implementation and development of the Company's GCG within a certain time frame as well as a guide for all Company organs in carrying out governance in every operational activity. Perum Jasa Tirta II GCG Road Map for 2015 – 2020 is a grand strategy and milestone for sustainable GCG implementation by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The final goal of the 2015 – 2020 GCG Road Map is the creation of sustainable governance in all business processes by all company organs.

Road Map GCG Perum Jasa Tirta II Tahun 2015 – 2020
GCG Road Map of Perum Jasa Tirta II in 2015-2020



KERANGKA GCG

GCG FRAMEWORK





Governance Structure

Governance structure mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan demi menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Perum Jasa Tirta II melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Perum Jasa Tirta II memenuhi jumlah Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Perum Jasa Tirta II juga membentuk Satuan Pengawasan Intern dan Pengendalian Kinerja Sistem Manajemen. Struktur organisasi yang dimiliki didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan sarana Informasi dan Teknologi (IT) hingga aturan yang mengatur kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II seperti kebijakan, SOP, surat edaran internal harus dipatuhi semua organ Perusahaan.

Governance Process

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan organ Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun proses yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, penerapan sistem reward dan punishment secara konsisten, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Pedoman Good Corporate Governance disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas. Sedangkan proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan GCG Perum Jasa Tirta II setiap semester.

Governance Outcome

Governance outcome merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan dan infrastruktur tata kelola Perusahaan. Dalam menilai dan mengevaluasi governance outcome, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara internal melalui self assessment dan secara eksternal oleh pihak independen. Merangkum ketiga kerangka utama tersebut, penerapan GCG kemudian diimplementasikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Governance Structure

Governance structure includes the structure and infrastructure of corporate governance in order to produce outcomes that are in line with stakeholder expectations. Perum Jasa Tirta II complements its organizational structure in accordance with the provisions and needs to support its operational activities, starting from the highest level to the lowest level. Perum Jasa Tirta II meets the number of the Supervisory Board in accordance with the applicable laws and regulations. In addition, Perum Jasa Tirta II also established an Internal Audit Unit and Performance Control Management System. The organizational structure of the Company is supported by adequate facilities and infrastructure, including the availability of Information and Technology (IT) facilities to the rules governing the operations of Perum Jasa Tirta II such as policies, SOPs, and internal circulars that must be obeyed by all Company organs.

Governance Process

Governance process is a method or mechanism carried out by the Company's organs in carrying out its functions and duties. The process can be in the form of a coordination meeting of the Supervisory Board, the Board of Directors, Committees, the implementation of a reward and punishment system consistently, as well as policies implemented to prevent fraud.

The implementation of GCG principles as outlined in the Guidelines for Good Corporate Governance is disseminated to all employees with the aim that all employees of Perum Jasa Tirta II can understand and implement GCG principles in carrying out their duties. While the evaluation process is carried out through a self-assessment process for the implementation of GCG Perum Jasa Tirta II every semester.

Governance Outcome

Governance outcome is the result of the process of implementing GCG principles supported by the adequacy and infrastructure of the Company's governance. In assessing and evaluating governance outcomes, the Company evaluates the implementation of GCG internally through self assessment and externally by an independent party. Summarizing the three main frameworks, the application of GCG is then implemented through the following stages:

Tahapan Implementasi GCG Perum Jasa Tirta II
Stages of GCG Implementation of Perum Jasa Tirta II



PENILAIAN PENERAPAN GCG (GCG ASSESSMENT)

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Sebagai bagian dari tujuan penerapan GCG yang berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II melakukan mekanisme penilaian penerapan GCG guna menilai kualitas penerapan GCG, memperoleh rekomendasi perbaikan kinerja dan implementasi di masa mendatang, serta memelihara kredibilitas dan akuntabilitas Perusahaan di mata Pemilik Modal dan pemangku kepentingan.

Penilaian (*Assessment*) GCG dilakukan setiap dua tahun oleh konsultan independen dengan mengacu kepada kriteria dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola.

Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Selain melakukan penilaian GCG berlandaskan kriteria tersebut, Perusahaan juga mempertimbangkan capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Key Performance Indikator (KPI) dalam menilai kualitas dan keberhasilan implementasi selama tahun buku.

Pada tahun 2020, penilaian GCG dilakukan Informasi mengenai hasil pencapaian penilaian GCG, KPKU, dan KPI Perum Jasa Tirta II dimuat dalam tabel sebagai berikut :

As part of the objectives of sustainable GCG implementation, Perum Jasa Tirta II conducts a mechanism for evaluating the implementation of GCG in order to assess the quality of GCG implementation, obtain recommendations for improving performance and implementation in the future, and maintain the Company's credibility and accountability in the eyes of Capital Owners and stakeholders.

GCG assessment is carried out every two years by an independent consultant with reference to the criteria in the Decree of the Secretary of the State Ministry of SOEs No. SK-16/S-MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good.

Corporate Governance in SOEs. In addition to conducting GCG assessments based on these criteria, the Company also considers the achievement of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) and Key Performance Indicators (KPI) in assessing the quality and success of implementation during the fiscal year.

In 2020, a GCG assessment was carried out. Information regarding the achievements of the GCG, KPKU, and KPI Perum Jasa Tirta II assessments is contained in the following table :

Tabel Penilaian GCG, KPKU, dan KPI Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 – 2020
Assessment Table of GCG, KPKU, and KPI Perum Jasa Tirta II for 2017 - 2020

GCG

Tahun / Year	2020	2019	2018	2017
Target	85	85	90	90
Realisasi / Realization	83,699	81,653	79,72	79,08

KPKU

Tahun / Year	2020	2019	2018	2017
Target	520	560	520	498
Realisasi / Realization	523,25	515	527,5	510

KPI

Tahun / Year	2020	2019	2018	2017
Target	100	100	100	100
Realisasi / Realization	80,33	86,85	85,94	97,55

Penilaian GCG berdasarkan kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang meliputi :

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;

GCG assessment based on criteria set out in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE Number SK-16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs consists of 6 (six) GCG Implementation Factors/Aspects which include :

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;



2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya.

Hasil *assessment* GCG tahun 2020 menunjukkan Perum Jasa Tirta II memperoleh skor 83,6994 dengan predikat "Baik" dengan rincian penilaian sebagai berikut :

No.	Aspek / Aspects	Bobot / Weight	Skor / Score	% Capaian / Achievement
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan / Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;	7,00	6,8430	97,76%
2.	Pemilik Modal / Capital Owners	9,00	8,0660	89,62%
3.	Dewan Pengawas / Supervisory Board	35,00	30,5005	87,14%
4.	Direksi / Board of Directors	35,00	30,0885	85,97%
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,00	8,2014	91,13%
6.	Lainnya / Other Aspects	5,00	0,0000	0,00%
7.	Skor Keseluruhan / Overall Score	10	83,6994	83,699%
Predikat Kualitas Penerapan GCG / Quality of GCG Implementation Predicate			BAIK / GOOD	

Hasil Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Di samping penilaian atas pelaksanaan GCG, Perum Jasa Tirta II juga melakukan penilaian terhadap Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang diadopsi dari *Malcolm Bridge Criteria for Performance Excellence* menjadi alat ukur untuk mengetahui posisi serta capaian kinerja finansial dan non finansial BUMN baik pada tingkat nasional maupun regional sebelum menjadi Perusahaan kelas dunia (*world class company*). Hasil penilaian KPKU Perum Jasa Tirta II tahun 2019 memperoleh skor 515, terealisasi 91% dari target sebesar 560.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Assessment GCG Tahun 2020

Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari penilaian dan evaluasi GCG menjadi acuan pokok bagi perbaikan dan penguatan penerapan GCG Perum Jasa Tirta II di masa mendatang.

Sepanjang tahun 2020, Perum Jasa Tirta II telah melakukan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan melakukan berbagai inisiatif dalam memperkuat implementasi GCG demi mewujudkan tata kelola Perusahaan yang berkelanjutan.

2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. The Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other aspects.

The results of the GCG assessment in 2020 showed that Perum Jasa Tirta II obtained a score of 83,6994 with the title "Good" with the following assessment details :

Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU)

In addition to evaluating the implementation of GCG, Perum Jasa Tirta II also conducts an assessment of the Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) adopted from the *Malcolm Bridge Criteria for Performance Excellence* as a measurement tool to determine the position and financial and non-financial performance achievements of SOEs both at the national and national level regional before becoming a world class company. The results of the assessment of KPKU Perum Jasa Tirta II in 2019 obtained a score of 515, realized 91% of the target of 560.

Recommendations and Follow Up on GCG Assessment in 2020

A number of recommendations resulting from the assessment and evaluation of GCG become the main reference for the improvement and strengthening of the implementation of GCG Perum Jasa Tirta II in the future.

Throughout 2020, Perum Jasa Tirta II has followed up on all recommendations and made various initiatives in strengthening the implementation of GCG in order to realize sustainable corporate governance.

PEMILIK MODAL DAN PENGENDALI

CAPITAL OWNER AND CONTROL

Perum Jasa Tirta II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang 100% modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia oleh karena itu Menteri BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku pemilik modal merupakan pengendali perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2010. Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal Negara pada Perum Jasa Tirta II, jumlahnya sebesar Rp164.547.635.935,-.

Perum Jasa Tirta II is a State-Owned Enterprise (SOE) in the form of Public Company (Perum), where 100% of its shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the Minister of BUMN as the representative of the Government as the owner of capital is the controller of the company based on Government Regulation Number 7 of 2010. The amount of Company's capital is the total value of State equity participation in Perum Jasa Tirta II, for Rp164,547,635,935.

RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB)

JOINT DISCUSSION MEETING (RPB)

Perum Jasa Tirta II yang berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) membuat Perum Jasa Tirta II tidak memiliki Rapat Umum Pemegang Saham. Namun demikian, Perum Jasa Tirta II tetap melaksanakan pertemuan dengan Pemilik Modal yakni Negara yang diwakili oleh Kementerian BUMN setiap tahunnya dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Perum Jasa Tirta II, which is a Public Company (Perum), thus, it does not have a General Meeting of Shareholders. However, Perum Jasa Tirta II continues to hold meetings with the Capital Owners, namely the State, represented by the Ministry of SOEs annually in the Joint Discussion Meeting (RPB).

Pelaksanaan RPB dihadiri oleh Menteri selaku wakil Pemilik Modal dan diselenggarakan oleh Kementerian BUMN atas permintaan Dewan Pengawas, Direksi atau Menteri dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal, penggunaan laba dan dana cadangan, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

The implementation of the RPB is attended by the Minister as the representative of the Capital Owners and held by the Ministry of SOEs at the request of the Supervisory Board, Directors or Ministers in order to make important decisions relating to capital, use of profits and reserve funds, issuance of bonds and other debt securities or for decision making on matters things whose authority is not granted to the Board of Directors and the Supervisory Board.

Dalam pelaksanaan RPB, Pemilik Modal berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat terkait dengan hal-hal berikut di antaranya :

1. Pemanggilan untuk RPB disampaikan kepada Pemilik Modal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum acara RPB dilaksanakan.
Surat atau media pemanggilan harus mencakup Informasi mengenai:
 - Agenda RPB.
 - Materi, usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RPB.
 - Hari, tanggal dan jam diadakannya RPB.
 - Tempat pelaksanaan RPB.
2. Tempat pelaksanaan RPB adalah di lokasi tempat beroperasinya Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
3. RPB dipimpin oleh Pemilik Modal atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemilik Modal.
4. RPB diawali dengan pembacaan Tata Tertib RPB.
5. Agenda tambahan RPB dapat dibahas jika disetujui oleh peserta rapat dan keputusan atas agenda tambahan tersebut harus disetujui dengan suara bulat oleh peserta RPB.
6. Kesimpulan yang diambil dalam RPB disampaikan kepada Menteri selaku Pemilik Modal untuk memperoleh pengesahan.
7. Setiap penyelenggaraan RPB wajib dibuatkan Risalah RPB.

In implementing the RPB, the Capital Owner is entitled to obtain a complete explanation and accurate information related to the following matters including :

1. The summons for the RPB shall be submitted to the Capital Owner no later than 14 (fourteen) working days before the RPB event is held.
The summons letter or media must include Information regarding:
 - RPB agenda.
 - Materials, suggestions and other explanations related to the RPB agenda.
 - The day, date and time of the RPB.
 - Place of implementation of RPB.
2. The place of implementation of the RPB is at the location where the Company operates or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia.
3. The RPB is led by the Capital Owner or authorized with substitution rights by the Capital Owner.
4. RPB begins with reading the RPB Rules of Conduct.
5. Additional RPB agenda can be discussed if approved by the meeting participants and the decision on the additional agenda must be unanimously approved by the RPB participants.
6. The conclusions drawn in the RPB are submitted to the Minister as the Capital Owner for approval.
7. Every RPB implementation, Minutes of RPB must be made.



8. Risalah RPB harus ditandatangani oleh ketua RPB dan paling sedikit 1 (satu) dari peserta RPB dari Pemilik Modal atau Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Risalah RPB harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
10. Pemilik Modal berhak memperoleh Risalah RPB.

Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Penyelenggaraan RPB terdiri dari RPB Tahunan, RPB Luar Biasa, dan RPB sirkuler dengan penjelasan sebagai berikut :

1. RPB Tahunan dilaksanakan untuk mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Pengawas termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku. Laporan Keuangan harus disampaikan kepada Pemilik Modal paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. RPB untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
2. RPB Luar Biasa yaitu penyelenggaraan RPB secara sewaktu-waktu apabila diminta atau dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas dan/atau atas permintaan dari Pemilik Modal.
3. RPB sirkuler yaitu RPB yang dilaksanakan selain RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa tanpa melakukan pertemuan tatap muka.

Selama tahun 2020, Perum Jasa Tirta II melaksanakan 1 (satu) kali RPB Tahunan dan 1 (satu) RPB Luar Biasa, yakni RPB Pengesahan Laporan Keuangan 2019 dan Revisi RKAP 2020.

Pelaksanaan RPB yang Dilaksanakan pada Tahun 2020

Waktu dan Tempat Pelaksanaan RPB Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

Hari, Tanggal / Day, Date	8 Mei 2020 / May 8, 2020
Waktu / Time	09:30 – selesai / 09.30 - finished
Tempat / Place	Kementrian BUMN (secara online)

Waktu dan Tempat Pelaksanaan RPB Luar Biasa Pembahasan Revisi RKAP 2020 Perum Jasa Tirta II

Hari, Tanggal / Day, Date	13 Agustus 2020 / August 13, 2020
Waktu / Time	10:30 – selesai / 10.30 - finished
Tempat / Place	Kementerian BUMN (secara online)

Tindak Lanjut Hasil Keputusan RPB Tahun Sebelumnya

Perum Jasa Tirta II telah menindaklanjuti dan merealisasikan seluruh keputusan RPB tahun sebelumnya dan tidak terdapat keputusan RPB yang belum dilaksanakan.

8. Minutes of RPB must be signed by the chairman of the RPB and at least 1 (one) of the RPB participants from the Capital Owner or the Proxy of the Capital Owner, the Supervisory Board and the Board of Directors.
9. Minutes of RPB must be documented and kept by the Corporate Secretary.
10. The owner of the capital is entitled to obtain the Minutes of RPB.

Implementation of Joint Discussion Meeting (RPB)

Implementation of the RPB consists of the Annual RPB, Extraordinary RPB, and the circular RPB with the following explanation :

1. The Annual RPB is implemented to ratify the Annual Report that has been signed by all members of the Board of Directors and all members of the Supervisory Board including the ratification of the Financial Statements for the fiscal year. Financial Statements must be submitted to the Capital Owners no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year with due regard to the applicable provisions. RPB to ratify the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) which is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year.
2. Extraordinary RPB is the implementation of RPB at any time if requested or deemed necessary by the Board of Directors and/or the Supervisory Board and/or at the request of the Capital Owner.
3. Circular RPB is a RPB that is carried out in addition to the Annual RPB and Extraordinary RPB without conducting direct meetings.

Throughout 2020, Perum Jasa Tirta II implemented 1 (one) Annual RPB and 1 (one) Extraordinary RPB, namely RPB to approve Financial Statements 2019 and RKAP Revision 2020.

Implementation of RPB in 2020

Time and Place of RPB on Financial Statements for 2019 Fiscal Year

Time and Place of Extraordinary RPB Implementation Discussion on Revised RKAP 2020 Perum Jasa Tirta II

Follow-up to the RPB Resolutions of the Previous Year

Perum Jasa Tirta II has followed up and realized all the decisions of the previous year's RPB and there were no RPB decisions that had not been implemented.

DEWAN PENGAWAS SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha perusahaan.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari satu orang ketua dan beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK-092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK-392/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II.

Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

The Supervisory Board performs a supervisory function, while the BoD is responsible for determining and implementing strategies to achieve the goals and objectives of the Company's business.

Number and Composition of the Supervisory Board

The composition of the Supervisory Board consists of one chairman and several members whose numbers are adjusted in such a way as to enable decision making to be carried out effectively, precisely and quickly according to the needs of the Company.

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Owner of Perum Jasa Tirta II Capital Number: SK-4/MBU/01/2020 dated January 3, 2020, SK-092/MBU/03/2020 dated March 23, 2020, SK-340/MBU/10/2020 dated 21 October 2020, SK-392/MBU/12/2020 dated 15 December 2020 concerning dismissal and appointment of Board Members Perum Jasa Tirta II Supervisor.

The number and composition of the Supervisory Board for Perum Jasa Tirta II in 2020 are as follows :

Nama / Name	Jabatan / Position	Bidang Pengawasan / Supervision Field	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Hartanto	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Supervisory Board	Mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Dewan Pengawas serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan. / Coordinating all duties and functions of the Supervisory Board and providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business.	SK-4/MBU/01/2020 Tanggal 3 Januari 2020. / SK-4/MBU/01/2020 January 3, 2020.
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Supervisory Board	Mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Dewan Pengawas serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan. / Coordinating all duties and functions of the Supervisory Board and providing direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business.	SK-340/MBU/10/2020 Tanggal 21 Oktober 2020. / SK-340/MBU/10/2020 October 21, 2020.
Riad Oscha Chalik	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Manajemen / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors regarding the management of company businesses in the fields of management.	SK-71/MBU/03/2016 Tanggal 29 Maret 2019. Sampai dengan 25 Agustus 2020. / SK-71/MBU/03/2016 March 29, 2019. Until August 25, 2020.
Nuning Sri Rejeki W	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Hukum, SDM dan Hubungan Antar Lembaga. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors regarding the management of company businesses in the fields of Law, Human Resources and Inter-Institutional Relations.	SK-4/MBU/01/2020 Tanggal 3 Januari 2020. / SK-4/MBU/01/2020 January 3, 2020.
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Aset dan Keuangan. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors regarding the management of the company's business in the Asset and Finance sector.	SK-92/MBU/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020. / SK-92/MBU/03/2020 March 23, 2020.
Mohamad Sofwan	Anggota Dewan Pengawas / Member Supervisory Board	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors regarding the management of company businesses in the field of Business Development and Risk Monitoring.	SK-392/MBU/10/2020 Tanggal 15 Desember 2020. / SK-392/MBU/10/2020 December 15, 2020.



Kriteria Dewan Pengawas

Kendati Pemilik Modal memiliki wewenang untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas wajib memperhatikan kriteria-kriteria yang diatur dalam Pedoman Kerja, Anggaran Dasar, maupun peraturan dan regulasi lain yang berlaku.

Kriteria Dewan Pengawas antara lain meliputi :

1. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit;
2. Orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
3. Mantan anggota Direksi BUMN yang sudah tidak menjabat anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan perundang-undangan lain yang melarangnya;
4. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. Komposisi Dewan Pengawas paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas Independen;
6. Komposisi Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, serta dapat bertindak secara independen;
7. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, maupun kementerian dan pimpinan departemen/lembaga lain yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan;
8. Antar anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi demikian, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut;
9. Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangka sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
10. Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah;

Supervisory Board Criteria

Although the Capital Owner has the authority to appoint members of the Supervisory Board, the appointment and stipulation of the Supervisory Board must pay attention to the criteria set out in the Work Guidelines, Articles of Association, as well as other applicable rules and regulations.

Criteria for the Supervisory Board include :

1. An individual who is capable of carrying out legal actions and has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Supervisory Board found guilty of causing a Company or Public Corporation to be declared bankrupt;
2. People who have never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the State's finances;
3. Former member of the Board of Directors of the SOE who has not served as a member of the Board of Directors of the relevant SOE for at least one year, except for certain considerations decided by the Minister in the framework of maintaining the sustainability of the BUMN restructuring program concerned, as long as there are no other statutory provisions prohibiting it;
4. Possess integrity, dedication, understanding Company management issues related to one of the management functions, having adequate knowledge in the Company's business fields and being able to provide sufficient time to carry out their duties;
5. The composition of the Supervisory Board of at least 20% (twenty percent) is a member of the Independent Supervisory Board;
6. The composition of the Supervisory Board must be such that it allows effective, fast, and independent decision making;
7. Members of the Supervisory Board may consist of elements of officials under the Technical Minister, the Minister of Finance, as well as ministries and heads of other departments/institutions whose activities are directly related to the Company;
8. The Supervisory Board and the Board of Directors are prohibited from having blood relations or marital relations up to the third degree, both vertically and horizontally. In the event of such conditions, the Minister is authorized to dismiss one of the Supervisory Board;
9. Members of the Supervisory Board are prohibited from taking office in terms of:
 - a. Members of the Board of Directors of SOE, ROE, and Private-Owned Business Entities;
 - b. Other positions in accordance with statutory provisions;
 - c. Other positions that may lead to a conflict of interest;
10. Members of the Supervisory Board are prohibited from becoming managers of political parties, candidates for legislative members, legislative members, candidates for Regional Heads, candidates for Deputy Regional Heads, Regional Heads, and/or Deputy Regional Heads;

11. Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Dewan Pengawas;
12. Masa jabatan Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;
 - c. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - (i) Meninggal dunia;
 - (ii) Masa jabatan berakhir;
 - (iii) Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri;
 - (iv) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan tersebut, Menteri sudah harus mengisi kekosongan jabatan tersebut.

11. Members of the Supervisory Board are prohibited from taking personal benefits from Company activities, other than the income received as a member of the Supervisory Board;
12. The tenure of the Supervisory Board is set as follows:
 - a. Members of the Supervisory Board are appointed for a term of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office;
 - b. Members of the Supervisory Board may be dismissed before their term of office expires based on the Minister's decision by stating the reasons;
 - c. The position of member of the Supervisory Board ends if :
 - (i) Deceased;
 - (ii) The term of office ends;
 - (iii) Dismissed under the Minister's decision;
 - (iv) No longer meet the requirements as a member of the Supervisory Board based on the provisions of Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II and other laws and regulations;
 - d. In the event of a vacant position of a member of the Supervisory Board, then no later than 30 (thirty) days after the end of the term of office, the Minister must fill the vacancy.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas sebagai organ Perusahaan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran serta rekomendasi kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri, dan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diterapkan di Perusahaan;
3. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan;

Duties and Responsibilities of the Board of Trustees

The Supervisory Board as an organ of the Company is collectively responsible for supervising and providing advice and recommendations to the Directors on managing the Company and ensuring that the Company implements GCG principles properly.

The duties, responsibilities and authority of the Supervisory Board are as follows :

Duties and Responsibilities

1. Overseeing the Management policy, the general course of the Management for both the Company and the Company's business conducted by the Board of Directors; and provide advice to the Board of Directors including supervision on the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, the Articles of Association and the Minister's Decree, in the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company;
2. Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance implementation in the Company;
3. The Supervisory Board is fully responsible for the Company's oversight for the Company's interests and objectives;



4. Bertanggung jawab penuh kepada Pemilik Modal;
5. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Wewenang Dewan Pengawas

1. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perusahaan, dalam hal ini melihat buku-buku, surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
3. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan, dengan menyebutkan alasannya;
7. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan RPB.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas berjalan dengan baik, Perum Jasa Tirta II telah menyusun Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas merupakan hasil modifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik GCG, hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemilik Modal, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas memuat petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan, sehingga dapat terciptanya standar kerja yang tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas meliputi penjelasan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab serta hak dan wewenang Dewan Pengawas, keanggotaan Dewan Pengawas, komposisi Dewan Pengawas dan masa jabatannya, standar penilaian

4. The Supervisory Board is responsible to the Capital Owners;
5. Each member of the Supervisory Board is personally liable for the loss of the Company if the person is guilty or negligent in performing his or her duties for the Company's interests and business.

Authority of the Supervisory Board

1. Obtain sufficient access to Company information, in this case viewing books, securities, and examining the Company's assets;
2. Requesting an explanation from the Board of Directors and / or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
3. To evaluate the accuracy of information prepared for other parties, particularly in financial reports and annual reports;
4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Requesting the BoD and / or other officers under the BoD with the knowledge of the BoD to attend the Supervisory Board meeting;
6. To temporarily suspend a member of the BoD in accordance with the provisions, stating the reasons thereof;
7. Establish committees other than the audit committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;
8. Using experts for certain matters and within a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary;
9. Carry out other supervisory powers as long as they do not conflict with statutory regulations and RPB decisions.

Guidelines and Code of Conduct of the Supervisory Board

In order to ensure that the implementation of the functions, duties and responsibilities of the Supervisory Board runs well, Perum Jasa Tirta II has prepared Board Manual that was validated in Joint Decree of Supervisory Board and Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II on Guidelines for Good Corporate Governance No. 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019.. The work guidelines and code of conduct of the Supervisory Board are the result of modifications of various applicable regulations and GCG best practices, corporate law, applicable laws and regulations, directions of the Capital Owners, and provisions of the Company's Articles of Association.

The work guidelines and code of conduct of the Supervisory Board contain guidelines for the work of the Supervisory Board for each of its member in carrying out tasks that are in line with the Company's vision and mission, so as to create high work standards and in line with GCG principles. Matters regulated in the work guidelines and code of conduct of the Supervisory Board include an explanation of the functions, duties, obligations, and responsibilities as well as the rights and authority of the Supervisory Board, Supervisory Board membership, the composition of the Supervisory Board and their tenure, performance evaluation

kinerja Dewan Pengawasan, kebijakan independensi bagi Pengawas Independen, mekanisme rapat Dewan Pengawas, penjelasan komite-komite di bawah Dewan Pengawas, dan tata laksana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Prosedur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan dalam yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Dewan Pengawas
 - a. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
 - b. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
 - d. Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
2. Pemberhentian Dewan Pengawas
 - a. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri BUMN, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
 - Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - Tidak melaksanakan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;
 - Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - Mengundurkan diri.
 - b. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin a diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri :
 - Pembelaan diri dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut;
 - Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya;
 - Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Menteri BUMN tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas

standards for the Supervisory Board, policies independence for the Independent Supervisor, the mechanism of the Supervisory Board meeting, explanation of the committees under the Supervisory Board, and work procedures relating to the implementation of the Supervisory Board's duties.

Appointment and Dismissal of the Supervisory Board

The procedure for the appointment and dismissal of the Supervisory Board within Perum Jasa Tirta II is carried out by the Ministry of SOEs by referring to the provisions stipulated in SOE Ministerial Regulation Number: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Members' Appointment and Dismissal Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The appointment and dismissal mechanism of the Supervisory Board is as follows :

1. Appointment of Supervisory Board
 - a. Members of the Supervisory Board are appointed and dismissed by the Minister of SOEs;
 - b. Members of the Supervisory Board are appointed for the same term as members of the Board of Directors and can be reappointed for 1 (one) term of office;
 - c. The appointment of members of the Supervisory Board does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors;
 - d. If deemed necessary, in the event of appointing the Supervisory Board, the SOE Minister may request input from the Technical Minister.
2. Dismissal of Supervisory Board
 - a. Members of the Supervisory Board may be dismissed before their term of office ends by the Minister of SOEs, if based on the reality of the members of the Supervisory Board :
 - Not carrying out their duties properly;
 - Not implementing the provisions and applicable laws;
 - Engaging in actions that are detrimental to the Company;
 - Declared guilty by a court decision that has permanent legal provisions;
 - Deceased or permanent absence;
 - Resign.
 - b. The dismissal decision as referred to in point a is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself :
 - Self defense is carried out in writing and submitted to the Minister of SOEs within a period of 1 (one) month since the member of the Supervisory Board concerned is notified in writing by the Minister of SOEs about the plan to terminate it;
 - As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Supervisory Board concerned continues to carry out their duties;
 - If within 2 (two) months from the date of submission of self-defense the Minister of SOE does not give a decision on the dismissal of the member of the Supervisory Board,



tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;

- Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian dari Menteri BUMN.

Program Orientasi Dewan

Pengawas Baru

Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan program orientasi dan pengenalan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat untuk memberikan gambaran aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja, dan pengenalan aspek lainnya yang mampu menunjang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan materi pengenalan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II;
2. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

Program orientasi yang dilaksanakan dapat disampaikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Selama tahun 2020, tidak terdapat Dewan Pengawas yang baru diangkat sehingga program pengenalan/orientasi tersebut tidak dilaksanakan manajemen pada tahun 2020.

Kebijakan Suksesi Dewan Pengawas

Dalam menjamin kecukupan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas, Perum Jasa Tirta II menjalankan kebijakan suksesi Dewan Pengawas yang dilaksanakan dengan tunduk pada regulasi yang berlaku dan ketentuan internal yang disusun Perusahaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sumber bakal calon Dewan Pengawas berasal dari :

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; dan/atau
4. Sumber lain.

Dalam mendukung kebijakan suksesi tersebut, Perum Jasa Tirta II tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas, hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), program pengenalan dan orientasi bagi anggota Dewan

then the dismissal plan will be annulled;

- His/her position as the Supervisory Board ends with the issuance of a decision on dismissal from the Minister of SOEs.

New Supervisory Board

Orientation Program

Perum Jasa Tirta II has a policy of orientation program and introduction of newly appointed members of the Supervisory Board to provide an overview of business activities, future business plans, work guidelines, and other aspects that can support the implementation of the Supervisory Board's duties. The implementation of the orientation program is carried out by the Corporate Secretary with the following introductory material :

1. Implementation of GCG principles by Perum Jasa Tirta II;
2. The description of Perum Jasa Tirta II relates to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Trustees.

The orientation program implemented can be delivered through presentations, meetings, visits to branch offices and reviewing documents and other programs in accordance with Company policy. During 2020, no new Supervisory Board was appointed so the introduction/orientation program was not implemented by management in 2020.

Supervisory Board Succession Policy

In guaranteeing the adequacy of the number and composition of the Supervisory Board, Perum Jasa Tirta II carries out a succession policy for the Supervisory Board which is carried out subject to applicable regulations and internal provisions prepared by the Company. Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the source of prospective candidates for the Supervisory Board comes from :

1. Former BUMN Directors;
2. BUMN BoC/Supervisory Board;
3. Structural Officers and Government Functional Officers; and/or
4. Another source.

In supporting the succession policy, Perum Jasa Tirta II still pays attention to fulfilling the qualification requirements of prospective members of the Supervisory Board, the results of the Fit and Proper Test, the introduction and orientation program for new Supervisory Board

Pengawas baru, serta mekanisme evaluasi atas kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) Dewan Pengawas

Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Dewan Pengawas telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

members, as well as the evaluation mechanism for the performance of each member of the Supervisory Board.

Fit and Proper Test of the Supervisory Board

Perum Jasa Tirta II ensures that all members of the Supervisory Board have the integrity, competence, reputation and experience, as well as the expertise needed to carry out their respective functions and duties. To ensure compatibility between competency background, expertise, reputation and work experience with the position requirements, all members of the Supervisory Board have passed the Fit & Proper Test.

Nama / Name	Jabatan / Position	Penyelenggara Fit & Proper Test / Fit & Proper Test Organizer
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of the Supervisory Board	
Muhamad Sofwan	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	Kementrian BUMN/ Ministry of SOE
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara berkala menyelenggarakan rapat internal Dewan Pengawas maupun rapat gabungan bersama Direksi dan komite-komite. Adapun rapat Dewan Pengawas dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengawasan, penyusunan saran dan rekomendasi atas kegiatan operasional, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Pengawas. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Pengawas. Keputusan rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode voting. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

Rapat Internal Dewan Pengawas Tahun 2020

Selama tahun 2020 Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan ruang lingkup pokok bahasan sebagai berikut :

1. Program kerja Dewan Pengawas;
2. Surat masuk dari Direksi dan memberikan masukan arahan atau rekomendasi;
3. Draft audited dengan KAP dan Komite Audit untuk laporan audit tahun buku 2020;
4. Mengusulkan kepada Pemilik Modal untuk penetapan Kantor Akuntan Publik laporan audit tahun buku 2020;

Frequency and Level of Attendance at the Supervisory Board Meeting

The Supervisory Board regularly holds internal meetings as well as joint meetings with the Board of Directors and committees. The Supervisory Board meeting is used as a medium for discussion and discussion of various supervisory needs, the preparation of suggestions and recommendations for operational activities, as well as decision making which is the responsibility of the Supervisory Board.

The Supervisory Board must hold a meeting at least 1 (one) time in 1 (one) months attended by a majority of all members of the Supervisory Board. Each member of the Supervisory Board must attend at least 75% of the total Supervisory Board meeting. Decisions of the Supervisory Board meeting are carried out by adhering to the principle of deliberation to reach consensus and in the event that consensus agreement is not reached, decision making is based on the voting method. The results of the meeting are stated into the minutes of the meeting, including in the event of dissenting opinions accompanied by the reasons, signed by all participants present, and well documented.

Supervisory Board Internal Meeting 2020

During 2020 the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II has held 12 (twelve) meetings with the following subject areas :

1. Work program of the Supervisory Board;
2. Incoming letter from the Board of Directors and providing input on directions or recommendations;
3. Draft audited with KAP and the Audit Committee for the 2020 financial year audit report;
4. Propose to Capital Owners the establishment of a Public Accountant Firm for the 2020 fiscal year audit report;



5. Mengusulkan kepada Pemilik Modal untuk penetapan Kantor Akuntan Publik laporan audit tahun buku 2020;
6. Tindak Lanjut RPB Audit 2019;
7. Pembahasan Hasil MoU PJT II dengan K-Water;
8. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK-RI;
9. Pembahasan Pengembangan Wilayah Kerja PJT II;
10. Pembahasan Draft Struktur Organisasi BOD-1;
11. Pembahasan Perubahan SOTK;
12. Pembahasan Progres Rehabilitasi Pintu Air Bendung Bekasi;
13. Pembahasan Peningkatan Modal dari BUMN HL;
14. Pembahasan Rancangan RKAP 2021;
15. Pembahasan RJPP PJT II;
16. Pembahasan Kinerja Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan;
17. Dan Lain Sebagainya.

Hasil-hasil keputusan dari rapat-rapat tersebut didokumentasikan dalam bentuk Notulen Rapat, di samping itu dalam beberapa hal juga diterbitkan surat baik kepada Direksi maupun kepada Pemilik Modal seperti Tanggapan Dewan Pengawas mengenai RKAP, Laporan Tahunan dan Persetujuan Dewan Pengawas.

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Pelaksanaan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi diselenggarakan sebagai media diskusi sekaligus koordinasi antara kedua organ tersebut. Pelaksanaan rapat gabungan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama tahun 2020, Perusahaan mengadakan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi sebanyak 13 kali dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut :

5. Propose to Capital Owners the establishment of a Public Accountant Firm for the 2020 fiscal year audit report;
6. Follow-up to the 2019 Audit RPB;
7. Discussion on the results of the MoU PJT II with K-Water;
8. Discussion on the Follow-Up Findings of the BPK-RI;
9. Discussion on the Development of PJT II Work Areas;
10. Discussion on the Draft BOD-1 Organizational Structure;
11. Discussion on SOTK Changes;
12. Discussion on the Progress of the Bekasi Dam Water Gate Rehabilitation;
13. Discussion on Capital Increase from BUMN HL;
14. Discussion on the Draft RKAP 2021;
15. Discussion on RJPP PJT II;
16. Discussion on Monthly, Quarterly, Semesterly and Annual Performance;
17. And others.

The results of the resolutions of these meetings are documented in the form of Meeting Minutes, in addition to that in several cases letters are also issued to both the Directors and the Capital Owners such as the Supervisory Board's response to the RKAP, Annual Report and the Supervisory Board Approval.

Joint Meeting of the Supervisory Board and Board of Directors

The joint meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors is held as a medium of discussion as well as coordination between the two organs. The joint meeting shall be held at least once every 4 (four) months.

During 2020, the Company held a joint meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors 13 times with a recapitulation of attendance and meeting agenda as follows :

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah kehadiran / Total Attendance	% kehadiran / Attendance
Hartanto	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of the Supervisory Board	13	11	84,6
Riad Oscha Chalik	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	13	10	76,9
Nuning Sri Rejeki Wulandari A	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	13	13	100
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / Supervisory Board Member	13	11	84,6
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of the Supervisory Board	13	3	23,0

Kriteria Penentuan Dewan Pengawas Independen

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Criteria for Determination of an Independent Supervisory Board

All members of the Supervisory Board that has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Supervisory Board, Board of Directors, and/or Controlling Capital Owners or relationships with the Company that can affect its ability to act independently.

Perusahaan menerapkan kriteria pemilihan Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi :

- Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;
- Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak memiliki keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya.

Pernyataan Independensi Dewan Pengawas

Dalam memenuhi persyaratan independensi Dewan Pengawas yang disyaratkan, Dewan Pengawas dipastikan telah memenuhi kriteria kualifikasi dalam hal administratif dan kepatuhan serta dinyatakan dalam kondisi sesungguhnya terkait pribadi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria non administratif yang disyaratkan dan dipenuhi anggota Dewan Pengawas yaitu Dewan Pengawas diharuskan untuk bebas dari hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan satu sama lain hingga derajat ketiga secara vertikal maupun horizontal, bebas benturan kepentingan pribadi, dan memenuhi komitmen untuk tidak memanfaatkan Perusahaan demi kepentingan pribadi.

Menguatkan kriteria tersebut, Dewan Pengawas menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan independensi dan integritas yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Pemeliharaan hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan untuk menjaga agar kedua organ dapat menjalankan check and balances dengan efektif dan efisien demi terciptanya kemajuan Perusahaan. Adapun mekanisme hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui :

- Terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko yang tepat dan cermat;
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemilik Modal;
- Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhi pelaksanaan GCG.

The Company applies the selection criteria for the Supervisory Board in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (SOEs) which include :

- Not serving as a Director in an affiliated company;
- Not working for the Government including in departments, institutions, and military in the last three years;
- Not working for the relevant SOE or its affiliates within the last three years;
- Has no direct or indirect financial relations with the SOE concerned or the company providing services and products to the SOE concerned and its affiliates.

Statement of Independence of the Supervisory Board

In fulfilling the independence requirements of the Supervisory Board as required, the Supervisory Board is certain to meet the qualification criteria in administrative and compliance matters and stated in actual conditions related to the members of the Supervisory Board according to the specified criteria.

Non-administrative criteria required and fulfilled by members of the Supervisory Board namely the Supervisory Board are required to be free from family relations or marital relations to the third degree vertically or horizontally, free from conflicts of personal interests, and fulfill commitments not to use the Company for personal interests .

To affirm these criteria, the Supervisory Board signs the Integrity Pact as a form of statement of independence and integrity needed in accordance with applicable laws and regulations.

Work Relations of the Supervisory Board and Board of Directors

Upholding the work relationship of the Supervisory Board and the Board of Directors is carried out to ensure that both organs can carry out checks and balances effectively and efficiently for the sake of the Company's progress. The working relationship mechanism of the Supervisory Board and the Board of Directors is carried out through :

- Implementation of proper and careful internal control and risk management;
- Achieving a reasonable return for Capital Owners;
- Properly protecting the interests of stakeholders;
- Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
- Fulfillment of GCG implementation.



Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Pemilik Modal dalam menetapkan komposisi Dewan Pengawas senantiasa memperhatikan unsur keberagaman, baik dari segi latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin guna menghadirkan pendekatan yang solutif dan beragam dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di Perusahaan.

Kebijakan penetapan persyaratan komposisi anggota Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas tercermin dari latar belakang pendidikan, keahlian, usia, dan jenis kelamin yang dapat yang terdapat dalam profil dewan pengawas pada bagian profil dalam laporan ini.

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas dengan Direksi dan Pemilik Modal Utama/Pengendali

Selama tahun 2020, seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan afiliasi, yang mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di Perusahaan dengan sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi ataupun Pemilik Modal.

Diversity of the Composition of the Supervisory Board

Capital Owners in determining the composition of the Supervisory Board always pay attention to elements of diversity, both in terms of educational background, expertise, work experience, age, and gender in order to present a solutive and diverse approach to decision making and problem solving in the Company.

The policy on determining the composition requirements of the members of the Supervisory Board refers to the provisions of SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of SOEs.

The diversity of the composition of the Supervisory Board is reflected in their educational background, expertise, age and gender, which can be seen in the following table:

Relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors and Major/Controlling Capital Owners

During 2020, all members of the Supervisory Board have no affiliation, which includes family relations, financial relationships, as well as management and share ownership in the Company with fellow members of the Supervisory Board, Board of Directors or Capital Owners.

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan / Family Relations with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relations with						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham dengan Perusahaan Lain / Management and Share Ownership with Other Companies					
	Dewan Pengawas / Supervisory Board		Direksi / Board of Director		Pemilik Modal / Capital Owners		Dewan Pengawas / Supervisory Board		Direksi / Board of Director		Pemilik Modal / Capital Owners		Dewan Pengawas / Supervisory Board		Direksi / Board of Director		Pemilik Modal / Capital Owners	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Muhamad Sofwan	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Nuning Sri Rejeki Wulandari	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Romy Marcandi	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;

Supervisory Board Concurrent Position Policy

Referring to SOE Ministerial Regulation Number PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, members of the Supervisory Board are prohibited from holding concurrent positions as :

1. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and/or Private-Owned Enterprises;

2. Pengurus partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala/wakil kepala daerah;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
4. Jabatan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas disajikan pada tabel berikut :

2. Management of political parties and/or candidates for members of DPR, DPD, DPRD Level I, and DPRD Level II and/or candidates for head / deputy regional head;
3. Other positions that may lead to a conflict of interest;
4. Other positions as stipulated in the legislation in force.

Information regarding the concurrent positions of members of the Supervisory Board is presented in the following table :

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain / Position in Other Companies / Agencies	Nama Perusahaan/Instansi / Company / Institution Name
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Supervisory Board	Nihil / None	Nihil / None
Muhamad Sofwan	Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory Board	Nihil / None	Nihil / None
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory Board	Nihil / None	Nihil / None
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory Board	Nihil / None	Nihil / None

Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Informasi mengenai kepemilikan saham Dewan Pengawas dimuat dalam tabel berikut :

Management of Conflicts of Interest and Share Ownership of the Supervisory Board

Information regarding the ownership of the Supervisory Board is contained in the following table :

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham di / Share Ownership in	
		Perum Jasa Tirta II	Perusahaan Lain / Other Companies
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Supervisory Board	-	-
Muhamad Sofwan	Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory Board	-	-
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory Board	-	-
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory Board	-	-

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, oleh karenanya Dewan Pengawas senantiasa berusaha menambah dan memutakhirkan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kesempatan bagi untuk mengikuti berbagai pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar, dan/atau conference baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya ditanggung oleh Perum Jasa Tirta II.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas selama tahun 2020 telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Pendidikan dan/atau Pelatihan

Supervisory Board Competency Development

Perum Jasa Tirta II Supervisory Board is committed to being able to carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors, therefore the Supervisory Board always strives to add and update their knowledge or competencies. In order to facilitate the implementation of the competency improvement of the Supervisory Board, the Company provides the opportunity to participate in various special education, training, workshops, seminars, and/or conferences held both domestically and abroad with costs borne by Perum Jasa Tirta II.

Information on the competency development program that the Supervisory Board participated in in 2020 has been presented in this Annual Report, chapter 'Company Profile', sub-section 'Education and/or Training of the



Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern'.

Rekomendasi Dewan Pengawas

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas secara efektif telah memberikan arahan, nasihat, dan masukan kepada Direksi untuk melaksanakan pengembangan usaha Perusahaan, baik yang dilakukan melalui rapat-rapat rutin maupun melalui evaluasi atas kinerja Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi dituangkan ke dalam surat sebanyak 93 arahan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas selama tahun 2020 disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas dengan fokus pengawasan kepada kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP 2020, pemenuhan arahan dan keputusan Menteri melalui RPB, serta pemberian nasihat ataupun arahan-arahan kepada Direksi untuk memastikan pengelolaan telah memperhatikan praktik-praktik pengelolaan yang baik.

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Direksi

Pengawasan Dewan Pengawas meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

2. Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Perusahaan Tahun Buku 2020

Dalam mendukung independensi dan objektivitas pelaporan keuangan, Dewan Pengawas menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra sebagai auditor untuk laporan keuangan Perum Jasa Tirta II yang berakhir pada 31 Desember 2020. Dalam hal ini, evaluasi kinerja dan pengawasan perusahaan tercermin dari kinerja Perum Jasa Tirta II

3. Aktivitas Pengawasan dan Rekomendasi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas melakukan aktivitas pengawasan terhadap perencanaan (RJPP dan RKAP) dan pelaksanaan operasi (SOP dan kondisi lapangan) melalui:

- 1) Rapat rutin Dewan Pengawas sebanyak 12 kali;
- 2) Rapat Direksi dan Dewan Pengawas sebanyak 13 kali;
- 3) Kunjungan kerja ke seluruh wilayah kerja;
- 4) Rapat Dewan Pengawas bersama Komite Audit dengan divisi-divisi;

Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit'.

Recommendation of the Supervisory Board

In order to carry out the supervisory function, the Supervisory Board has effectively provided direction, advice and input to the Board of Directors to carry out business development of the Company, whether conducted through routine meetings or through evaluations of the Company's performance.

Throughout 2020, the advice and recommendations of the Supervisory Board to the Board of Directors were stated into 93 directives.

Report on the Implementation of the Supervisory Board's Duties

The implementation of the duties of the Supervisory Board during 2020 is adjusted to the duties and responsibilities stated in the work guidelines and rules of the Supervisory Board with a focus on oversight of the management policies and the management of the company by the Board of Directors, including supervision of the implementation of the 2020 RKAP, fulfillment of directives and decisions of the Minister through RPB, as well as providing advice or direction to the Board of Directors to ensure that management has considered good management practices.

The implementation of the Supervisory Board's duties during 2020 include the following:

1. Supervision of the Supervisory Board of the Board of Directors

Supervision of the Supervisory Board includes oversight of the management policies and management of the Company by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the Board of Directors has implemented the provisions of the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations.

2. Performance Evaluation and Company Supervision for the 2020 Financial Year

In supporting the independence and objectivity of financial reporting, the Supervisory Board appointed the Public Accountant Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra as the auditor for the financial statements of Perum Jasa Tirta II which ended on 31 December 2020. In this case, performance evaluation and company supervision are reflected in the performance Perum Jasa Tirta II

3. Monitoring and Recommendation Activities

In carrying out its supervisory function, the Supervisory Board carries out supervisory activities on planning (RJPP and RKAP) and implementation of operations (SOP and field conditions) through:

- 1) Routine meeting of the Supervisory Board 12 times;
- 2) Board of Directors and Supervisory Board Meetings 13 times;
- 3) Working visits to all work areas;
- 4) Meetings of the Supervisory Board together with the Audit Committee and the divisions;

- 5) Mengundang Direksi dan unit kerja terkait untuk membahas yang mendesak untuk mencari solusi.
4. Kegiatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKAP Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP tahun 2020.
5. Kegiatan Lain Dewan Pengawas
 - a. Memberikan arahan dan pemantauan atas penugasan khusus dari Pemerintah kepada BUMN;
 - b. Melakukan kunjungan langsung ke unit-unit serta bertemu langsung dengan karyawan yang berada di unit kerja.
6. Penyampaian Surat/Tanggapan Dewan Pengawas Tahun 2020 baik kepada Direksi dan Pemilik Modal adalah sebanyak 93 surat tanggapan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemilik Modal. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolektif maupun individual. Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema dan besaran remunerasi dan kompensasi Dewan Pengawas maupun pertimbangan dalam penunjukan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Prosedur penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal dilakukan melalui penyelenggaraan RPB, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II.
3. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka pelaksanaan GCG.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pemilik Modal menilai dan mengevaluasi kinerja pengawas Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain :

- 5) Inviting the Board of Directors and related work units to discuss urgent solutions to find solutions.
4. Supervision activities on the implementation of the RKAP The Supervisory Board has supervised the implementation of the 2020 RKAP.
5. Other Activities of the Supervisory Board
 - a. Provide direction and monitoring of special assignments from the Government to SOEs;
 - b. Make direct visits to units and meet directly with employees in work units.
6. Submission of Letters/Responses of the Supervisory Board for 2020 both to the Board of Directors and Capital Owners is as many as 93 response letters.

Performance Evaluation of the Supervisory Board

The performance evaluation of the Supervisory Board is carried out by the Capital Owners. Evaluation and assessment of the performance of the Supervisory Board is carried out as a whole based on collegial and individual performance considerations. The results of the performance evaluation of the Supervisory Board by the Capital Owners become an inseparable part in determining the scheme and the amount of remuneration and compensation of the Supervisory Board as well as consideration in the reappointment of members of the Supervisory Board concerned.

Procedure for Performance Evaluation of the Supervisory Board

The procedure for evaluating the performance of the Supervisory Board by the Capital Owner is carried out through the implementation of the RPB, with the following mechanism :

1. In its function as a Supervisory Board, the Board of Directors submits a report on oversight of the management of the Company by the Board of Directors. This report is part of the Annual Report submitted to the RPB for approval.
2. By giving approval to the Annual Report and ratification of the financial statements, it means that the RPB has given full discharge and full responsibility to each member of the Supervisory Board insofar as these are reflected in the Annual Report, without prejudice to the responsibilities of the Supervisory Board members in the event of criminal acts or errors and/or negligence which cause loss to third parties that can be met with Perum Jasa Tirta II assets.
3. The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of the accountability of supervision of the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.

Criteria for Assessment of the Supervisory Board Performance

The Capital Owner assesses and evaluates the performance of the Supervisory Board by considering several criteria, including :



1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD) yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian mandiri (self-assessment) GCG pada aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dilakukan oleh Pemilik Modal.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil keputusan RPB, Pemilik Modal menilai Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Pengawas atas pengawasan yang dilakukan hingga akhir tahun buku.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing komite Dewan Pengawas secara rutin setiap tahun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas organ pendukung Dewan Pengawas. Masing-masing komite Dewan Pengawas dinilai dan dievaluasi berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas komite yang mencakup realisasi pelaporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, frekuensi kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan dalam tugasnya membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Pengawas yang pada tahun buku 2020 telah dilaksanakan dengan baik.

1. Supervising the realization of the Directors' General Policies (KUD) which is carried out periodically;
2. GCG self-assessment on the aspects of the Supervisory Board and its supporting organs with reference to the prevailing laws and regulations;
3. Accountability Annual Report and Company Work Report.

Parties Conducting the Assessment

The Supervisory Board performance appraisal in the Joint Discussion Meeting (RPB) is carried out by the Capital Owner.

Results of the Performance Assessment of the Supervisory Board

Based on the results of the RPB decision, the Capital Owner assesses that the Supervisory Board has carried out its duties properly and gives the Supervisory Board a full release of responsibility for the supervision carried out until the end of the financial year.

Performance Appraisal of the Supervisory Board Committee

The Supervisory Board conducts performance appraisals on each committee of the Supervisory Board on a regular basis every year as a material for consideration in order to improve the quality of the implementation of the duties of the Supervisory Board's supporting organs. Each committee of the Supervisory Board is assessed and evaluated based on the performance of the committee's duties which includes the realization of the report on the implementation of the committee's duties in accordance with their respective responsibilities, the frequency of meeting attendance and the recommendations given in their duties to assist the implementation of the Supervisory Board's supervisory and advisory functions during the fiscal year 2020 has been well executed.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan, serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab kepada Pemilik Modal. Pertanggungjawaban Direksi kepada Pemilik Modal merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik Modal.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada periode 2020 Direksi mengalami perubahan susunan dan komposisi.

Pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, komposisi Direksi Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut :

The Board of Directors is a Company organ that has the duty and collective responsibility to manage the Company, and implement GCG at all levels of the organization. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is responsible to the Capital Owners. The responsibility of the Board of Directors to the Capital Owners is a manifestation of the accountability of the management of the company in accordance with the principles of GCG. The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Capital Owners.

Number and Composition of the Board of Directors

In 2020, the Board of Directors underwent a change in structure and composition.

In the period from January 1 to December 31, 2020, the composition of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II was as follows :

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Periode Jabatan / Term of Office
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	SK-209/MBU/6/2020 tanggal 18 Juni 2020 / June 18, 2020	Sejak 6 Maret 2019 sampai dengan 18 juni 2020 / Since March 6, 2019 until June 18, 2020
Imam Santoso	Direktur Utama / President Director	SK - 350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 / October 27, 2020	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / Since October 27, 2020 until now
Haris Zulkarnain	Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	SK - 222/MBU/08/2018 1 Agustus 2018 / August 1, 2018	Sejak 1 Agustus 2018 sampai dengan sekarang / Since August 1, 2018 until now
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance Director	SK - 196/MBU/06/2020 11 Juni 2020 / June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since June 11, 2020 until now
Indriani Widiastuti	Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	SK - 196/MBU/06/2020 11 Juni 2020 / June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since June 11, 2020 until now

Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kelola perusahaan yang berlaku, dan meliputi :

- Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah:
 - Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Board of Directors Criteria

All members of the Board of Directors meet the criteria set out in the prevailing laws and regulations and corporate governance guidelines, and include :

- Those who can be appointed as members of the Board of Directors are:
 - Individuals who are able to carry out legal actions and have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Commissioners or Supervisory Board who are found guilty of causing a company or Perum to be declared bankrupt or people who have never been punished for committing a crime that is detrimental to the state's finances.



- b. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
2. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, tidak berlaku mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
3. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan Lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
4. Antar anggota dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut.
5. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN.
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 22.
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.
7. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepemimpinan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan. Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2020.

- b. Meet the criteria of expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and have a high dedication to advancing and developing the Company.
2. The appointment of members of the Board of Directors is carried out through a fit and proper test mechanism conducted by a team and/or professional institution established and/or appointed by the Minister. In the case of reappointment to the same position for members of the Board of Directors who are considered capable of carrying out their duties well during their term of office, the fit and proper test mechanism does not apply.
3. Candidates for members of the Board of Directors who have been declared to have passed the fit and proper test and members of the Board of Directors who have been reappointed must sign a management contract prior to their appointment as members of the Board of Directors.
4. Between members and between members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, it is prohibited to have blood relations or marital relations up to the third degree, either in a straight line or a sideways line. In the event that such conditions occur, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.
5. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as :
 - a. Members of the Board of Directors in BUMN, BUMD, or privately owned enterprises.
 - b. Member of the Board of Commissioners or Supervisory Board in BUMN.
 - c. Other structural and functional positions in Central or Regional Government agencies or institutions.
 - d. Other positions in accordance with the provisions of the legislation 22.
 - e. Other positions that may cause a conflict of interest.
6. Members of the Board of Directors are prohibited from serving as administrators of political parties, candidates for legislative members, members of the legislature, candidates for regional heads, candidates for deputy regional heads, regional heads, and/or deputy regional heads.
7. Members of the Board of Directors are prohibited from taking personal advantage from the Company's activities, other than the income received as a member of the Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of the Company and the determination of strategies and policies within the Company and their implementation in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association contained in Government Regulation No. 7 of 2020.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Direksi menyusun rencana kerja jangka panjang (*Corporate Plan*), Rencana Bisnis Perusahaan (*Business Plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemilik Modal untuk mendapatkan persetujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemilik Modal;
4. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (Surat Keputusan AI), auditor eksternal, hasil audit atau hasil audit lain;
6. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan;
7. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sehat;
8. Direksi menyediakan atau memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Adapun penetapan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

The duties and responsibilities of the Board of Directors include :

1. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of the management of the Company;
2. The Board of Directors prepare long-term work plans (*Corporate Plans*), *Corporate Business Plans* and *Work and Budget Plans*;
3. The Board of Directors submits an annual report to the General Meeting of Capital Owners to obtain approval as a form of accountability for the execution of the duties of the Board of Directors to the Capital Owner;
4. The Board of Directors implements the principles of GCG in each of the Company's business activities at all levels or levels of the organization;
5. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Work Unit (AI Decree), external auditors, the results of Indonesian Company audits and/or audit results of other authorities;
6. The Board of Directors prepares the Company's risk management policies and strategies and is responsible for implementing the Company's risk management policies and strategies;
7. The Board of Directors has the responsibility of creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system runs smoothly and healthily;
8. The Board of Directors provides or provides accurate, relevant and timely data and information to the Supervisory Board.

The determination of the division of duties and delegation of authority of the Board of Directors are as follows :



Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Utama / President Director	Direktur Utama mempunyai tugas untuk melaksanakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian di Bidang Keuangan, SDM, Operasi dan Pemeliharaan, Pengembangan Usaha, Kesekretariatan, Pengawasan Intern, Pengendalian Kinerja, Risiko dan Sistem Manajemen Perusahaan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The President Director has the duty to carry out the management of the Company which includes guidance, supervision, control in the fields of Finance, Human Resources, Operations and Maintenance, Business Development, Secretariat, Internal Control, Performance Control, Risk and Company Management System in order to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the President Director has the following functions: - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Keuangan dan SDM yang meliputi Kebijakan: Perencanaan Strategis Perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta Teknologi Informasi Komunikasi; Keuangan dan Akuntansi; Sumber Daya Manusia; Umum dan Program Kemitraan Bina Lingkungan; Inventarisasi, Pengendalian Aset dan kearsipan; Layanan Pengadaan; dan Pengelolaan Diklat. / Establishing the Company's management policies in the Management of Finance and HR tasks which include the following policies: Corporate Strategic Planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as Information and Communication Technology; Finance and Accounting; Human Resources; General and Community Development Partnership Program; Inventory, Asset Control and archives; Procurement Services; and Management of Education and Training. - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Operasi dan Pemeliharaan yang meliputi kebijakan: Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik; Supervisi Teknis; Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan, dan pengusahaan sarana prasarana SDA; Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan, dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; dan Pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan, dan pengusahaan laboratorium. / Establishing the Company's management policies in the Management of Operations and Maintenance tasks which include the following policies: Operation and Maintenance of Water Resources and Electrical Resources; Technical Supervision; Implementation of operation, maintenance, repair, and exploitation of water resources infrastructure; Implementation of the operation, maintenance, repair, and operation of the laboratory. - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Pengembangan usaha yang meliputi kebijakan: Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan; dan Pengusahaan Pariwisata dan Hotel. / Establishing company management policies in the management of business development tasks which include the following policies: Business Development; Commercial and Customer Service; and Tourism and Hotel Business. - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Direktur Keuangan dan SDM, Direktur Operasi dan Pemeliharaan dan Direktur Pengembangan Usaha. / Improve coordination and working relationship with the Director of Finance and HR, Director of Operations and Maintenance and Director of Business Development. - Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam pengelolaan tugas: Kesekretariatan Perusahaan, Hubungan Masyarakat, dan Legal Korporat; Pengawasan Internal; dan Pengendalian Kinerja, Risiko dan Sistem Manajemen. / Establish the Company's management policies in managing tasks: Corporate Secretariat, Public Relations, and Corporate Legal; Internal monitoring; and Performance Control, Risk and Management System. - Melakukan pembinaan dan pengendalian tugas Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengendalian Kinerja, Risiko dan Sistem Manajemen; / Conducting coaching and controlling the duties of the Corporate Secretariat, Internal Control Unit, Division of Performance Control, Risk and Management System; - Melakukan pembinaan hubungan dengan instansi pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat yang berkaitan dengan tugas Perusahaan; / Conducting relationship development with government agencies, private sector and community related to the Company's duties; - Melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan / Implementing Good Corporate Governance; and - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri dan Menteri Teknis. / Submit a report on the results of the implementation of tasks to the Government in this case the Minister and the Technical Minister. Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Utama membina, mengawasi dan mengendalikan para Direktur dan Unit Kerja sebagai berikut: / The President Director fosters, supervises and controls the following Directors and Work Units: - Direktorat Keuangan dan SDM; / Directorate of Finance and HR; - Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; / Directorate of Operations and Maintenance; - Direktorat Pengembangan Usaha; / Directorate of Business Development; - Sekretariat Perusahaan; / Corporate Secretariat; - Satuan Pengawasan Intern; dan / Internal Control Unit; and - Divisi Pengendalian Kinerja, Risiko dan Sistem Manajemen. / Division of Performance Control, Risk and Management System.

Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	Direktur Keuangan dan SDM memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan PKBL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The Director of Finance and HR has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on the company's strategic planning activities which include RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and PKBL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and development of ICT to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Keuangan dan SDM mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Finance and HR has the following functions: - Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan PKBL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and PKBL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; - Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan PKBL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Fostering, controlling and supervising management in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and PKBL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan PKBL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and PKBL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; - Menyampaikan laporan kinerja di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan PKBL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsipan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Submit a performance report in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and PKBL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; - Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Keuangan dan SDM; dan / Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, Company Long Term Plan (RJPP) and Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Finance and HR; and - Mengkoordinasikan ketersediaan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). / Coordinate the availability of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Budget Work Plan (RKAP). Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Keuangan dan SDM membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / The Director of Finance and HR fosters, supervises and controls the following Work Units: - Divisi Rencana Strategis dan Teknologi Informasi Komunikasi; / Division of Strategic Planning and Information and Communication Technology; - Divisi Keuangan dan Akuntansi; / Finance and Accounting Division; - Divisi Sumber Daya Manusia; / Human Resources Division; - Divisi Umum dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; / General Division and Partnership and Community Development Programs; - Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan; / Inventory, Asset Control and Archives Division; - Unit Layanan Pengadaan; dan / Procurement Service Unit; and - Unit Layanan Diklat. / Training Service Unit.



Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Director of Operation and Maintenance	Direktur Operasi dan Pemeliharaan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The Director of Operations and Maintenance has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on planning and controlling activities for the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Operations and Maintenance has the following functions: - Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; / Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of water resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; - Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; / Fostering, controlling and supervising management in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; / Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; - Menyampaikan laporan kinerja di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; / Submitting performance reports in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of water resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; - Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. / Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Operations and Maintenance Directorate. Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Operasi dan Pemeliharaan membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / The Director of Operations and Maintenance fosters, supervises and controls the following Work Units: - Divisi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik; / Division of Operation and Maintenance of Water Resources and Electrical Resources; - Divisi Supervisi Teknis; / Technical Supervision Division; - Unit Wilayah I; / Regional Unit I; - Unit Wilayah II; / Region II Units; - Unit Wilayah III; / Regional Unit III; - Unit Wilayah IV; / Region IV Units; - Unit PLTA; dan / Hydropower Units; and - Unit Layanan Laboratorium. / Laboratory Service Unit.

Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	Direktur Pengembangan Usaha memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan; Pengusahaan Pariwisata dan Hotel untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The Director of Business Development has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on Business Development activities; Commercial and Customer Service; Tourism and Hotel Business to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengembangan Usaha mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Business Development has the following functions: - Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development of AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; - Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Fostering, controlling and supervising management in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; - Meningkatkan koordiansi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Improve coordination and work relations with Stakeholders in carrying out tasks in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; - Menyampaikan laporan kinerja di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Submit performance reports in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; - Bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Business Development Sector; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; - Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Pengembangan Usaha. / Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Business Development. Susunan Organisasi / Organization Structure Direktur Pengembangan Usaha membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / The Director of Business Development fosters, supervises and controls the following Work Units: - Divisi Pengembangan Usaha; / Business Development Division; - Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan; dan / Commercial and Customer Service Division; and - Divisi Usaha Pariwisata dan Hotel. / Tourism and Hotel Business Division.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi yang memuat tata laksana kerja Direksi serta tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis dengan pembagian tugas yang jelas. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi tersebut telah dimuat dalam Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pokok-pokok yang dimuat dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi telah diselaraskan dengan visi dan misi Perum Jasa Tirta II serta standar kerja yang tinggi sesuai best practices GCG dengan memperhatikan

Board of Directors' Guidelines and Code of Conduct

The implementation of the functions, duties and responsibilities of the Board of Directors is guided by the Work Guidelines and Code of Conduct of the Board of Directors which contain the work procedures of the Board of Directors and the stages of activities in a structured and systematic manner with clear division of tasks. The Board of Directors guidelines and work procedures have been included in the Board Manual which was approved in the Joint Decree of the Supervisory Board and Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II regarding Guidelines for Good Corporate Governance No: 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The principles contained in the work guidelines and code of conduct of the Board of Directors have been aligned with the vision and



prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip GCG.

Pedoman dan tata tertib Direksi antara lain mengatur mengenai :

- Ketentuan Umum
- Pembagian tugas dan wewenang Direksi
- Susunan Direksi
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab
- Waktu dan Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Etika kerja Direksi
- Perjalanan dinas
- Laporan

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi. Adapun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Direksi
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
 - b. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - c. Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis;
 - d. Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memegang jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas melalui surat penunjukan yang disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Dewan Pengawas, Menteri BUMN menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memegang jabatan yang terluang;
 - e. Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
2. Pemberhentian Direksi
 - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;

mission of Perum Jasa Tirta II as well as high work standards in accordance with GCG best practices by taking into account corporate legal principles, Articles of Association, applicable laws and regulations, and GCG principles.

The Board of Directors' guidelines and code of conduct include regulating :

- General requirements
- Distribution of duties and authority of the Board of Directors
- Board of Directors Structure
- Duties, authorities and responsibilities
- Board of Directors' Time and Tasks
- Directors Meeting
- The work ethics of the Directors
- Business trip
- Report

Appointment and Dismissal of the Board of Directors

The mechanism and procedure for the appointment and dismissal of the Board of Directors refer to SOE Ministerial Regulation Number: PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors and State-Owned Enterprises. The provisions stipulated in these regulations are then internalized into the work guidelines and code of conduct of the Board of Directors. The mechanism for appointment and dismissal of Directors is as follows :

1. Appointment of the Board of Directors
 - a. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Minister of SOEs;
 - b. Members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) next term of office;
 - c. If deemed necessary, in the event of appointing the Board of Directors, the Minister of SOEs may seek input from the Technical Minister;
 - d. If one or more members of the Board of Directors are unable to carry out their work or if the position is vacated and a successor has not been appointed or has not assumed his position, then that position is held by another member of the Board of Directors who is appointed temporarily by the Supervisory Board through a letter of appointment submitted to the Minister of SOEs no later than 14 (fourteen) days. Within a period of no later than 2 (two) months from the receipt of notification from the Supervisory Board, the SOE Minister appoints new members of the Board of Directors to take the vacant positions;
 - e. If all members of the Board of Directors are unable to continue to carry out their work or the position of Directors is fully available and has not been appointed, the management of the company is temporarily carried out by the Supervisory Board.
2. Dismissal of the Board of Directors
 - a. Members of the Board of Directors may be dismissed before their term of service expires based on a Ministerial Decree stating the reasons;

- b. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:
 - (i) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - (ii) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - (iii) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan;
 - (iv) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - (v) Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (vi) Meninggal dunia;
 - (vii) Mengundurkan diri.
- c. Keputusan pemberhentian karena alasan (i) sampai (vii) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya, dan bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri kepada Menteri BUMN tidak memberikan keputusannya, maka rencana tersebut menjadi batal;
- d. Pemberhentian karena alasan (v) tersebut di atas merupakan pemberhentian tidak hormat;
- e. Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri BUMN.

- b. The dismissal of members of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) is based on the reason that in reality the members of the Board of Directors concerned:
 - (i) Cannot fulfil their obligations agreed in the management contract;
 - (ii) Cannot carry out their duties properly;
 - (iii) Not implementing the provisions of the legislation and/or provisions;
 - (iv) Engaging in actions that are detrimental to the Company;
 - (v) Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
 - (vi) Deceased;
 - (vii) Resign.
- c. Dismissal decisions for reasons (i) to (vii) are taken after the person concerned has been given the opportunity to defend themselves. Self-defense is submitted in writing to the Minister of SOEs within a period of 1 (one) month as from the member of the Board of Directors concerned notified in writing by the Minister of SOEs about the plan of dismissal. As long as the dismissal plan is still in process, the relevant member of the Board of Directors can continue their work, and if within 2 (two) months from the date of submission of self-defense to the Minister of BUMN does not provide his decision, then the plan will be voided;
- d. Dismissal for reasons (v) above is a dishonorable discharge;
- e. Position as a member of the Board of Directors ends with the issuance of a termination decision by the Minister of SOEs.

Program Orientasi Direksi Baru

Program orientasi atau pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lebih senior. Adapun materi program orientasi yang diberikan kepada Direksi baru meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II;
2. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi yang dilaksanakan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Selain itu juga diperhatikan

New Board of Directors Orientation Program

An orientation program or introduction to Perum Jasa Tirta II is given to members of the Board of Directors who are appointed for the first time. The orientation program is carried out by more senior members of the Board of Directors. The orientation program material given to the new Board of Directors includes:

1. Implementation of GCG principles by Perum Jasa Tirta II;
2. Description of Perum Jasa Tirta II relating to the scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and strategic issues;
3. Information relating to the delegated authority;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Directors.

The orientation program is carried out in the form of presentations, meetings, visits to branch offices and reviewing documents and other programs in accordance with Company policy. In addition, the level of attendance



tingkat kehadiran dan efektivitas anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan Perum Jasa Tirta II kepada Direksi baru.

Pada tahun 2020, terdapat anggota Direksi yang baru diangkat yaitu Bapak Imam Santoso sebagai Direktur Utama, Ibu Indriani Widyastuti sebagai Direktur Pengembangan Usaha, dan Bapak Anton Mardiyono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Para direksi telah mengikuti rangkaian program pengenalan Perum Jasa Tirta II dengan baik.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka memastikan bahwa Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang disyaratkan, Perusahaan memiliki kebijakan suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jasa Tirta II mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas :
 - a) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b) Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN;
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Pejabat BUMN lain dan sumber lainnya.

Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemanggilan terhadap calon anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
2. Melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan lembaga profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian lembaga profesional, jika pengujian menggunakan lembaga profesional;
4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan;
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
6. Menyampaikan seluruh dokumen Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

and effectiveness of the members of the Board of Directors was also noted in participating in a series of introductions to Perum Jasa Tirta II to the new Directors.

In 2020, there were newly appointed members of the Board of Directors, namely Mr. Imam Santoso as President Director, Mrs. Indriani Widyastuti as Director of Business Development, and Mr. Anton Mardiyono as Director of Operations and Maintenance. The directors have followed a series of programs to introduce Perum Jasa Tirta II well to completion.

Board of Directors Succession Policy

In order to ensure that the Company is managed by management that has the required expertise and competence, the Company has a Directors succession policy in which the determination of prospective Directors of Perum Jasa Tirta II refers to the provisions stipulated in SOE Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Directors of State-Owned Enterprises. Sources of prospective Directors come from:

1. SOE Directors;
2. SOE Board of Commissioners/Supervisory Board;
3. SOE talents consisting of :
 - a) Officials one level below the Board of Directors or officials who have special achievements;
 - b) Directors of SOE subsidiaries/SOE joint ventures;
4. Ministry of SOE talent;
5. Other SOE Officials and other sources.

The process of selecting the Directors is carried out by an Evaluation Team established by the Minister based on a proposal from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry. The selection process by the Evaluation Team is as follows :

1. Inviting prospective members of the Board of Directors who are included in the Candidate List that has been approved by the Minister to take the UKK (fit & proper test);
2. Conduct testing of prospective members of the Board of Directors, if testing does not use professional institutions;
3. Evaluate the results of testing professional institutions, if testing uses professional institutions;
4. Make decisions and provide recommendations on assessments made;
5. Determine the final evaluation results signed by the Chairperson and Deputy Chairperson of the Evaluation Team to be submitted to the Minister in order to obtain a determination;
6. Delivering all UKK (fit & proper test) documents to the Secretary of the Ministry for administration;
7. Perform other tasks given by the Minister in order to expedite the UKK (fit & proper test) process.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)

Direksi Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Direksi telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

Board of Directors' Fit & Proper Tests

Perum Jasa Tirta II strives to ensure that all members of the Board of Directors have integrity, competence, reputation and experience, as well as the expertise needed to carry out their respective functions and duties. To ensure compatibility between competency background, expertise, reputation and work experience with the position requirements, all members of the Board of Directors have passed the Fit & Proper Test.

Nama / Name	Jabatan / Position	Penyelenggara Fit & Proper Test / Fit & Proper Test Organizer
Imam Santoso	Direktur Utama / President Director	Lembaga Profesional yang direkomendasi oleh Kementerian BUMN / Profesional Institution recommendation by SOE
Haris Zulkarnain	Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance Director	
Indriani Widiastuti	Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Rapat Direksi

Direksi secara berkala menyelenggarakan rapat internal Direksi maupun rapat gabungan bersama Dewan Pengawas. Adapun rapat Direksi dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengelolaan Perusahaan, kegiatan operasi, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi. Keputusan rapat Direksi dilaksanakan dengan mengikut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode voting. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal secara offline maupun online sebanyak 14 kali.

Frequency and Level of Attendance at the Board of Directors' Meetings

The Board of Directors periodically holds internal meetings of the Directors and joint meetings with the Supervisory Board. The Board of Directors meeting is used as a medium for discussion and discussion of various corporate management needs, operational activities, and decision making that is the responsibility of the Directors.

The Board of Directors must hold a meeting at least 1 (one) time in 1 (one) months attended by a majority of all members of the Board of Directors. Each member of the Board of Directors must attend at least 75% of the total number of the Board of Directors' meetings. The decision of the Board of Directors meeting is carried out by adhering to the principle of deliberation to reach consensus and in the event that deliberation to reach consensus is not reached, then decision making is based on the voting method. The results of the meeting are stated into the minutes of the meeting, including in the event of dissenting opinions accompanied by the reasons, signed by all participants present, and well documented.

During 2020, the Board of Directors held 14 internal meetings with a recapitulation of attendance as follows:

Keberagaman Komposisi Direksi

Perum Jasa Tirta II mengedepankan pentingnya penyesuaian diri di industri dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan profesional secara komprehensif, termasuk dalam tingkatan manajemen kunci. Dalam hal ini, Perusahaan memperhatikan keberagaman komposisi dan karakteristik Direksi berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian guna meng-hadirkan solusi pemecahan masalah yang beragam dari berbagai perspektif sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Diversity of the Board of Directors' Composition

Perum Jasa Tirta II emphasizes the importance of selfadjustment in the industry by preparing reliable and professional Human Resources (HR) comprehensively, including in key management levels. In this regard, the Company pays attention to the diversity of the composition and characteristics of the Directors based on their age, educational background, work experience, and expertise in order to present a variety of problem solving solutions from various perspectives according to their respective expertise.



Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Pengawas dan Pemilik Modal Utama/Pengendali

Kriteria hubungan afiliasi Direksi dapat terlihat dari hubungan antara anggota Direksi dengan Dewan Pengawas, anggota Direksi dengan Pemilik Modal Utama/Pengendali, dan sesama anggota Direksi. Selama tahun 2020, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, maupun kepengurusan dan kepemilikan saham di Perusahaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Pengawas, ataupun Pemilik Modal.

Affiliation between the Board of Directors and Supervisory Board and Majority/Controlling Capital Owners

Criteria for the affiliation of the Board of Directors can be seen from the relationship between the members of the Board of Directors and the Supervisory Board, members of the Board of Directors with the Majority/Controlling Capital Owners, and fellow members of the Board of Directors. During 2020, all members of the Board of Directors have no affiliation, including family relationships, financial relationships, as well as managerial and share ownership in the Company with fellow members of the Board of Directors, Supervisory Board, or Capital Owners.

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan / Family Relations with						Hubungan Keuangan dengan / Financial Relations with						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham dengan Perusahaan Lain / Management and Share Ownership with Other Companies					
	Dewan Pengawas / Supervisory Board		Direksi / Board of Director		Pemilik Modal / Capital Owners		Dewan Pengawas / Supervisory Board		Direksi / Board of Director		Pemilik Modal / Capital Owners		Dewan Pengawas / Supervisory Board		Direksi / Board of Director		Pemilik Modal / Capital Owners	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Imam Santoso	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Haris Zulkarnain	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Anton Mardiyono	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V
Indriani Widiastuti	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V	-	V

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
5. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Board of Directors Concurrent Position Policy

Pursuant to the SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, members of the Board of Directors are prohibited from holding dual positions as :

1. Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and/or Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State Owned Enterprises;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Management of political parties and/or candidates/legislative members;
5. Positions that may lead to a conflict of interest and/or other position in accordance with the laws and regulations;
6. Legislative candidates or candidates for regional head/ deputy regional head.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut :

Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Directors is presented in the following table :

Nama / Name	Jabatan / Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain / Position in Other Companies/ Agencies	Nama Perusahaan/Instansi / Company/Institution Name
Imam Santoso	Direktur Utama / President Director	Tidak ada/Nothing	-
Haris Zulkarnain	Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	Tidak ada/Nothing	-
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance Director	Tidak ada/Nothing	-
Indriani Widiastuti	Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	Tidak ada/Nothing	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Kepemilikan Saham Direksi

Perum Jasa Tirta II Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang Kepemilikan Modalnya 100% milik Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, sehingga tidak ada satupun Direksi yang memiliki saham Perum Jasa Tirta II. Informasi mengenai kepemilikan saham Direksi dimuat dalam tabel berikut :

Management of Conflict of Interest and Share Ownership of Board of Directors

Perum Jasa Tirta II is a State-Owned Enterprise whose Capital Ownership is 100% owned by the Republic of Indonesia and is not divided into shares, so that none of the Directors owns shares of Perum Jasa Tirta II. Information regarding the share ownership of the Board of Directors is contained in the following table :

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham di / Share Ownership in	
		Perum Jasa Tirta II	Perusahaan Lain / Other Companies
Imam Santoso	Direktur Utama / President Director	Tidak Ada / Nothing	Tidak Ada / Nothing
Haris Zulkarnain	Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR	Tidak Ada / Nothing	Tidak Ada / Nothing
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Operation and Maintenance Director	Tidak Ada / Nothing	Tidak Ada / Nothing
Indriani Widiastuti	Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	Tidak Ada / Nothing	Tidak Ada / Nothing

Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi dalam pengelolaan Perusahaan, Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Direksi untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selama tahun 2020, Direksi Perum Jasa Tirta II telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi yang telah dipaparkan dalam bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern' dalam Laporan Tahunan ini.

Board of Directors Competence Development

To improve the competence of the Board of Directors in managing the Company, Perum Jasa Tirta II provides wide opportunity for the Board of Directors to attend training, education, seminars, and/or workshops in accordance with the required competencies. Throughout 2019, the Directors of Perum Jasa Tirta II have participated in various competency development programs that have been described in the 'Company Profile' chapter, 'Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit' sub-chapter in this Annual Report.

Keputusan Direksi Tahun 2020

Direksi memiliki kewenangan dalam memutuskan berbagai kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan. Penetapan kebijakan telah melalui prosedur yang ditentukan dengan mempertimbangkan arahan dan rekomendasi secara komprehensif dari pihak-pihak berwenang ataupun hasil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Board of Directors Resolutions in 2020

The Board of Directors has the authority to decide various policies related to the management of the Company. Determination of policy has been through the procedures determined by considering comprehensive directions and recommendations from the authorities or the results of decisions based on deliberation and consensus as stipulated in applicable regulations.



Selama tahun 2020, Direksi telah memutuskan sejumlah kebijakan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) sebanyak 188 surat keputusan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menjalankan pengelolaan Perusahaan dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Perusahaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan senantiasa memperhatikan visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Uraian pelaksanaan tugas Direksi selama tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :

- Direksi telah menetapkan kebijakan terkait kepengurusan Perusahaan;
- Direksi telah mengambil keputusan dalam mewakili Perusahaan;
- Direksi telah melakukan pengembangan Perusahaan dan Entitas Anak melalui keputusan yang dibuat selama tahun 2020.

Penilaian Kinerja Direksi

Perum Jasa Tirta II melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja Direksi melalui beberapa metode, yaitu mekanisme penilaian GCG, khususnya aspek Direksi dan metode penilaian Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG

Perusahaan melakukan penilaian atas implementasi GCG aspek Direksi yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian kinerja Direksi melalui *assessment* GCG aspek Direksi mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan, antara lain kontribusi Direksi dalam penyusunan rencana pengembangan Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang, penetapan strategi dan inisiatif pengelolaan perusahaan, pemenuhan target kinerja Perusahaan, penyelenggaraan rapat, pemberian keputusan Direksi, dan sejumlah kriteria lainnya.

Pada tahun 2020, hasil *assessment* GCG aspek Direksi Perum Jasa Tirta II meraih skor 30,0885 atau terealisasi 85,97% dari bobot aspek Direksi sebesar 35,00. Skor tersebut memperoleh predikat penilaian "Baik".

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Selain melalui *assessment* GCG, tolok ukur penilaian kinerja Direksi memperhitungkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis Kriteria Penilaian

Throughout 2020, the Board of Directors has decided on a number of policies through the issuance of 188 Decree (SK).

Implementation of Board of Directors Duties in 2020.

Through out 2020, the Board of Directors has carried out the management of the Company based on the Work Plan and Budget of the Company as well as the Long-Term Company Plan that has been determined by taking into account the vision, mission, and goals of the Company. A description of the implementation of the Board of Directors' duties throughout the 2020 fiscal year is as follows :

- The Board of Directors has established policies related to the management of the Company;
- The Board of Directors has taken decisions in representing the Company;
- The Board of Directors has developed the Company and Subsidiaries through decree made during 2020.

Board of Directors Performance Assessment

Perum Jasa Tirta II periodically evaluates the performance of the Board of Directors through several methods, namely the GCG assessment mechanism, particularly the aspects of the Board of Directors and the Key Performance Indicator (KPI) assessment method set by the Ministry of SOEs.

Board of Directors Performance Based on GCG Assessment

The Company assessed GCG implementation in the Board of Directors aspects in accordance with the terms of reference for the implementation of the GCG assessment developed by the State Ministry of SOE based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The Board of Directors performance evaluation through GCG assessment in the Board of Directors aspect considers relevant criteria, including the contribution of the Board of Directors in the preparation of short-term and longterm Company development plans, the establishment of strategies and initiatives for the management of the company, meeting the Company's performance targets, organizing meetings, providing decisions, and other criteria.

In 2020, the results of the GCG assessment on the aspects of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II achieved a score 30,0885 or realized 85,97% of the Directors' aspect weight of 35.00. The score received "Good" predicate.

Board of Directors Performance Assessment Based on Key Performance Indicator (KPI)

In addition to GCG assessment, the Board of Directors' performance assessment benchmarks take into account the achievement of Key Performance Indicators (KPI)

Kinerja Unggul (KPKU) dengan berpedoman pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI pada BUMN.

Kriteria yang dinilai berdasarkan KPKU mencakup 6 (enam) indikator utama, yaitu Keuangan dan Pasar, Fokus Pelanggan, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan, dan Agent of Development (AOD).

based on Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) based on the Ministry of SOE Letter No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs to SOEs.

The criteria assessed based on KPKU include 6 (six) main indicators, namely Finance and Market, Customer Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Governance Leadership and Community Responsibility, and Agent of Development (AOD).

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI REMUNERATION POLICY OF SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Dewan Pengawas dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dan beberapa fasilitas lainnya sebagai bayaran atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan penetapan, skema, dan prosedur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengikuti kaidah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas melakukan kajian mengenai remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi, baik dilakukan secara mandiri atau dapat meminta bantuan dari pihak independen;
2. Dewan Pengawas mengusulkan penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada pemilik modal;
3. Pemilik Modal selanjutnya mengkaji dan menelaah usulan dari Dewan Pengawas;
4. Pemilik Modal menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi.

Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan dan tingkat perolehan keuntungan perusahaan pada tahun buku;
2. Prestasi dan capaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
3. Pencapaian prestasi kerja dan KPI individual;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Supervisory Board and the Board of Directors are entitled to remuneration and other facilities as payment for carrying out their duties and responsibilities. Determination policy, scheme, and remuneration procedures for the Supervisory Board and Board of Directors refer to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 concerning Guidelines for Determining the Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Procedures for Determining the Remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors

The procedures for determining the remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors are as follows :

1. The Supervisory Board conducts a review of the remuneration received by the Supervisory Board and the Board of Directors, whether done independently or can request assistance from an independent party;
2. The Supervisory Board proposes the determination of the remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors to the Capital Owner;
3. The Capital Owner further reviews and examines proposals from the Supervisory Board;
4. The Capital Owner determines the remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors.

Indicator of Remuneration

Determination of remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors takes into account the following indicators :

1. Financial performance and profitability of the Company in the fiscal year;
2. Achievements and performance of the Supervisory Board and Board of Directors in accordance with their duties and responsibilities;
3. Work performance and individual KPIs;
4. Consideration of the Company's long-term goals and strategies.



Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Ketentuan penentuan struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Gaji Direktur adalah 85% dari Direktur Utama;
2. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 90% dari Ketua Dewan Pengawas;
3. Tantiem Direktur dan Ketua Dewan Pengawas masing-masing 85% dan 45% dari tantiem Direktur Utama;
4. Tantiem anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas;
5. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tahun 2020 mengacu pada ketetapan Nomor S-28/Wk2.MBU.C/08/2020 tanggal 4 agustus 2020;
6. Pembayaran dihitung dengan memperhitungkan masa kerja efektif pada tahun buku. Pajak penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perusahaan.

Remuneration Structure of the Supervisory Board and Board of Directors

The determination of the structure of the Supervisory Board and Board of Directors is as follows :

1. Director's salary is 85% of the President Director's;
2. Honorarium of the Head of the Member Board is 90% of the Head of the Supervisory Board;
3. Tantiem for Directors and Head of the Supervisory Board are 85% and 45%, respectively of the tantiem of the President Director;
4. Tantiem for the members of the Supervisory Board is 90% of the tantiem for the Head of the Supervisory Board;
5. Allowances and facilities for the Board of Directors and the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Year 2020 refers to the stipulation Number S-28/Wk2.MBU.C/08/2020 dated August 4, 2020;
6. Payment is calculated by taking into account the effective service period of the fiscal year. Income tax (PPh) on the bonus is borne by the recipient and is not permitted to be charged as a Company expense.

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas / Remuneration Structure of Supervisory Board	Struktur Remunerasi Direksi / Remuneration Structure of Board of Directors
• Honorarium / Honorarium • Fasilitas: / Facilities: a) Transportasi / Transportation b) Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance c) Tantiem / Tantiem d) Premi Asuransi / Insurance Premium	• Gaji / Honorarium • Fasilitas: / Facilities: a) Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance (THR) b) Tunjangan Asuransi / Insurance Benefits c) Tunjangan Rumah Jabatan / Housing Allowance

Rincian Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2020

Informasi mengenai rincian struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi dimuat dalam tabel sebagai berikut :

Details of Supervisory Board and Board of Directors Remuneration in 2020

Information on details that show remuneration component and total remuneration nominal of Supervisory Board and Board of Directors can be seen below :

No.	Jabatan / Position	REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI						
		GAJI / HONOR	TUNJANGAN-TUNJANGAN (RUMAH JABATAN/ TUNJANGAN TRANSPORTASI)	TANTIEM TAHUN BUKU 2019	PENGOBATAN	PREMI ASURANSI PURNA JABATAN	LAIN-LAIN	TOTAL BRUTO
I.	Dewan Pengawas	1.617.996.774	320.899.354	1.629.141.472	-	401.124.194	-	3.969.161.794
A.	Ketua	426.600.000	85.320.000	777.100.156	-	106.650.000	-	1.395.670.156
1.	Hartanto	353.700.000	70.740.000	777.100.156	-	88.425.000	-	1.289.965.156
2.	Kelik Wirawan Wahyu Widodo	72.900.000	14.580.000	-	-	18.225.000	-	105.705.000
B.	Anggota	1.015.896.774	203.179.354	777.100.156	-	253.974.194	-	2.250.150.478
1.	Riad Oscha Chalik	250.446.774	50.089.354	777.100.156	-	62.611.694	-	1.140.247.978
2.	Nuning Sri Rejeki	437.400.000	87.480.000	-	-	109.350.000	-	634.230.000
3.	Romi Marcandi	328.050.000	65.610.000	-	-	82.012.500	-	475.672.500
C.	Sekretaris	175.500.000	32.400.000	74.941.160	-	40.500.000	-	323.341.160
1.	Umi Gita Nugraheni	175.500.000	32.400.000	74.941.160	-	40.500.000	-	323.341.160
II.	Direksi	2.556.000.000	706.500.000	3.349.026.869	-	639.000.000	-	7.250.526.869
A.	Direktur Utama	666.000.000	166.500.000	1.589.178.946	-	166.500.000	-	2.588.178.946
1.	U. Saefudin Noer	486.000.000	121.500.000	1.589.178.946	-	121.500.000	-	2.318.178.946
2.	Imam Santoso	180.000.000	45.000.000	-	-	45.000.000	-	270.000.000
B.	Direktur	1.890.000.000	540.000.000	1.759.847.923	-	472.500.000	-	4.662.347.923
1.	Haris Zulkarnain	972.000.000	270.000.000	1.759.847.923	-	243.000.000	-	3.244.847.923
2.	Anton Mardiyono	459.000.000	135.000.000	-	-	114.750.000	-	708.750.000
3.	Indriani Widiastuti	459.000.000	135.000.000	-	-	114.750.000	-	708.750.000
JUMLAH		4.173.996.774	1.027.399.354	4.978.168.341	-	1.040.124.194	-	11.219.688.663



ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS SUPPORTING ORGANS OF SUPERVISORY BOARD

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar tugas-tugas Dewan Pengawas.

Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II pada tahun 2020 dijabat oleh Umi Gita Nugraheni.

Profil Sekretaris Dewan Pengawas



UMI GITA NUGRAHENI
Sekretaris Dewan Pengawas /
Secretary of Supervisory Board

Support ing Organs of Supervisory Board Secretary of Supervisory Board

The effectiveness of the implementation of Supervisory Board duties is assisted by the Supervisory Board Secretary who is responsible directly to the Supervisory Board. The Secretary of Supervisory Board provides administrative and secretarial support to the Supervisory Board to facilitate the duties of the Supervisory Board.

The position of Secretary of the Supervisory Board of Jasa Tirta II in 2020 was held by Umi Gita Nugraheni.

Profile of the Secretary of the Supervisory

Warga Negara Indonesia, berusia 32 tahun, berdomisili di Tangerang. Beliau diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan KEP-62/DEWAS/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Beliau meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2009. / Indonesian citizen, 32 years old, residing in Tangerang. She was appointed as Secretary of the Supervisory Board based on Decree KEP-62/DEWAS/X/2017 dated October 30, 2017. She obtained his Bachelor's Degree in Psychology from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 2009.

Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Staf Dewan Pengawas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2013), Staf Dewan Pengawas PT Hutama Karya (Persero) (2014), Analis Pengembangan Kompetensi di Kementerian BUMN (2014 – 2015), dan Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN (2017). / In her career, she has served as a Staff of the Supervisory Board of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2013), Staff of the Supervisory Board of PT Hutama Karya (Persero) (2014), Competency Development Analyst at the Ministry of SOEs (2014-2015), and Head of Subdivisions Implementation of SOE Executive Human Resources Training (2017).

Beliau telah mengikuti sejumlah pelatihan, antara lain Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP (2012), Short Course Human Resource in Bureaucratic Reform yang diselenggarakan oleh Training Technology Transfer di Malaysia (2011), dan Pelatihan Strategy Management and Corporate Culture yang diselenggarakan oleh The Jakarta Consulting Group (2011). / She has participated in a number of trainings, including Government Services Procurement Training organized by LKPP (2012), Short Course in Human Resources in Bureaucratic Reform organized by Technology Transfer Training in Malaysia (2011), and Strategy Management and Corporate Culture Training organized by The Jakarta Consulting Group (2011).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Kehadiran Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas;
7. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
10. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas

Penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas mengacu pada Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas yang tercantum dalam Board Manual Board of Commissioners & Board of Directors yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2020, Sekretaris Dewan Pengawas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Pengawas, meliputi:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan pelaksanaan tata tertib Direksi dan prinsip-prinsip GCG secara tertib dan patuh.
2. Membuat risalah rapat baik internal maupun rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi dan mendokumentasikannya dengan baik.
3. Menjalankan proses administrasi dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya.
4. Menyampaikan dan membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas selama tahun 2020.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Pengawas secara akurat dan tepat waktu.
6. Menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Pengawas apabila dibutuhkan.
7. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.

Board Duties and Responsibilities of Secretary of Supervisory Board

Duties and responsibilities of the Secretary of the Supervisory Board are as follows:

1. Prepare for meetings, including briefing sheet for the Supervisory Board;
2. Prepare minutes of the Supervisory Board meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Administer Supervisory Board documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
4. Draw up the Work Plan and Budget Draft of the Supervisory Board.
5. Prepare a draft of the Supervisory Board Reports.
6. Carry out other duties from the Supervisory Board.
7. Ensure that the Supervisory Board complies with laws and regulations and applies GCG principles;
8. Provide information needed by the Supervisory Board periodically and/or at any time when requested;
9. Coordinate Committee members, if needed, in order to facilitate the duties of the Supervisory Board;
10. Serve as liaison officer of the Supervisory Board with other parties.

Work Guidelines for Secretary of Supervisory Board

The implementation of the functions and duties and responsibilities of the Secretary of Supervisory Board refers to the Supervisory Board Secretary's Work Guidelines included in the Board Manual for Board of Commissioners & Board of Directors as stipulated in Joint Decree of Supervisory Board and Board of Directors of Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II on Guidelines for Good Corporate Governance No. 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019.

Implementation of Duties of Secretary of Supervisory Board

Throughout 2020, the Secretary of the Supervisory Board has carried out various activities that support the supervisory function of the Supervisory Board, including:

1. Assisted the Supervisory Board in carrying out the implementation of the Board of Directors' rules and GCG principles in an orderly and compliant manner.
2. Prepared minutes of both internal and joint meetings of the Supervisory Board and Board of Directors and documented them properly.
3. Carried out the administrative process of the Supervisory Board's documents, both incoming letters, outgoing letters, and other documents.
4. Submitted and drafted the Supervisory Board Work Plan and Budget throughout 2019.
5. Prepared and submitted reports of the Supervisory Board in an accurate and timely manner.
6. Provided information needed by the Supervisory Board if needed.
7. Coordinated Committee members, if needed, in order to expedite the duties of the Supervisory Board.



8. Menjalankan fungsi penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain yang berkepentingan.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dengan memperhitungkan capaian tugas dan tanggung jawab sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan manajemen Perusahaan dan fungsi kesekretariatan lainnya. Selama tahun 2020, Dewan Pengawas menilai bahwa Sekretaris Dewan Pengawas telah dilakukan dengan baik dan memuaskan.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai salah satu organ kelengkapan Dewan Pengawas yang berfungsi untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG, pengendalian internal, proses audit, dan pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Selama tahun 2020, tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit Perum Jasa Tirta II. Jumlah anggota Komite Audit Perum Jasa Tirta II pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari anggota dewan pengawas sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal independen yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan korporasi.

8. Performed the liaison officer function of the Supervisory Board with other interested parties.

Performance Evaluation of the Secretary of Supervisory Board

The Supervisory Board is responsible for assessing and evaluating the performance of the Secretary of the Supervisory Board by taking into account the achievements of the duties and responsibilities as a liaison between the Supervisory Board and the Company's management and other secretarial functions. During 2020, the Supervisory Board considered that the Secretary of the Supervisory Board had performed well and satisfactorily.

Audit Committee

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as one of the organs of the Supervisory Board that functions to ensure the implementation of GCG principles, internal control, audit processes, and monitoring compliance with laws and regulations in every business activity at all levels in the Company's organization. In carrying out its duties, the Audit Committee is independent and reports to the Supervisory Board.

Basis for the Establishment of the Audit Committee

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as a form of compliance with the laws and regulations, namely:

1. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to PER-1/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
2. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Number and Composition of the Audit Committee

In 2020, there were no changes in the membership of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II. The number of members of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II in 2020 is 3 (three) people, consisting of a member of the supervisory board as the Chairman of the Committee and 2 (two) members of the Audit Committee from independent external parties who are experts in accounting and corporate finance.

Profil Komite Audit

Profile of Audit Committee



NUNING SRI REJEKI WULANDARI

Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas) /
Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)

Profil Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari telah dimuat dalam Laporan Tahunan ini, bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Profil Dewan Pengawas'. / Profile of Mrs. Nuning Sri Rejeki Wulandari has been provided in this Annual Report on 'Company Profile' chapter, 'Profile of Supervisory Board' sub-chapter.

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Terms of Office
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas) / Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)	Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor : KEP-83/DEWAS/XI/2020 / Supervisory Board Decree : KEP-83/DEWAS/XI/2020	Teknik Sipil / Civil Engineering	5 tahun / 5 years
Wawan Saeful Anwar	Anggota (Pihak Independen) / Member (Independent Party)	Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-72/DEWAS/XI/2017 tanggal 7 November 2017 / Decree of Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II No. KEP-72/DEWAS/XI/2017 dated November 7, 2017	Akuntansi dan Keuangan/ Accounting and Finance	3 tahun / 3 years



WAWAN SAEFUL ANWAR
Anggota Komite Audit / Audit Committee Member

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Garut, 12 Maret 1957 / Garut, March 12, 1957
Usia / Age : 62 tahun / 62 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II SK nomor: KEP-80/DEWAS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit dan Nomor: KEP-72/DEWAS/XI/2017 tanggal 7 November 2017. / Decision of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II SK number: KEP-80/DEWAS/X/2020 dated October 14, 2020 concerning the Extension of the Audit Committee's Term of Service and Number: KEP-72/DEWAS/XI/2017 dated November 7, 2017.

Riwayat Pendidikan / Education

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. / Bachelor's Degree in Economics Majoring in Accounting from Universitas Padjadjaran, Bandung

Riwayat Jabatan / Career History

Beliau mengawali kariernya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987 – 2013), Komite Audit di PT Pindad (Persero) (2013 – 2017), Kantor Akuntan Publik HLB Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan (2014 – 2017), Tenaga Ahli di ITDC (2017), Komite Audit di Perum Jasa Tirta II (2017 – sekarang). / He started his career at the Financial and Development Supervisory Board (BPKP)(1987-2013), Audit Committee of PT Pindad (Persero) (2013-2017), at Public Accounting Firm HLB Hadori, Sugiarto, Adi & Associates (2014-2017), Expert at ITDC (2017), and as Audit Committee in Perum Jasa Tirta II (2017-present).

Pelatihan yang Pernah Diikuti / Trainings

Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Seminar atau Pelatihan Tenaga Pengawas/Akuntan, Perpajakan, Penyidikan/Pengusutan, Training for Trainers, Audit Operasional, Good Corporate Governance (GCG), TOT Membangun Pemahaman GCG, TOT Instruktur Jabatan Fungsional Auditor, TOT Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP bagi Satgas Pusat, TOT atas Modul dan Limited Hearing SPIP, Overseas Training on Developing Performance Measurement in Public Sector, Professional Internal Auditor (PIA), Fraud Audit (Audit Kecurangan/Audit Forensik). / Seminar or training of Supervisors/Accountant, Taxation, Investigation/Investigation, Training of Trainers, Operational Audit, Good Corporate Governance (GCG), TOT Building GCG Understanding, TOT Instructor Functional Auditor Position TOT Task Force of Government Internal Control System (SPIP), SPIP for Central Task Force, TOT on Module and Limited Hearing SPIP, Overseas Training on Developing Performance Measurement in Public Sector, Professional Internal Auditor (PIA), and Fraud Audit.



ROYZA FAUZI

Anggota Komite Audit / Audit
Committee Member

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / : Jakarta, 2 November 1989 /
Place, Date of Birth : Jakarta, November 2, 1989
Usia / Age : 30 tahun / 30 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-17/DEWAS/IV/2019 tanggal 15 April 2019. / Decree of Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II No. KEP-17/DEWAS/IV/2019 dated April 15, 2019.

Riwayat Pendidikan / Education
Menempuh pendidikan Sarjana (S1) Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung dan Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Indonesia. / Bachelor's Degree in Law from Universitas Padjadjaran, Bandung and Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Indonesia.

Riwayat Jabatan / Career History
Beliau pernah bekerja sebagai Pemeriksa Anggaran (2015 - 2017) dan Auditor Pertama (2017 - sekarang). / He had worked as a Budget Auditor (2015 - 2017) and Principal Auditor (2017 - present).

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Saat ini, beliau merangkap jabatan sebagai Auditor Pertama (2017 - sekarang). / Currently, he also serves as Principal Auditor (2017 - present).

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Terms of Office
Royza Fauzi	Anggota (Pihak Independen) / Member (Independent Party)	Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-17/DEWAS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 / Decree of Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II No. KEP-17/DEWAS/IV/2019 dated April 15, 2019	Hukum dan Akuntansi/ Law and Accounting	3 tahun / 3 years

Kriteria Komite Audit

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki independensi, integritas, akhlak, dan moral yang baik. Selain itu, anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas, hak, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan auditor internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya;
6. Melaksanakan tugas lainnya dan Dewan Pengawas, berupa namun tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya;

Audit Committee Criteria

The general criteria to be appointed as an Audit Committee are to have independence, integrity, character and good morals. In addition, Committee members have expertise in finance or accounting.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Duties, rights and responsibilities of Audit Committees are as follows:

1. Assist the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of External Auditors and Internal Examiners;
2. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and External Auditors;
3. Provide recommendations on improving management control systems and their implementation;
4. Ensure that there are satisfactory review procedures for all information released by the Company;
5. Identify matters that require the attention of the Supervisory Board and the duties of other Supervisory Boards;
6. Carry out other duties and the Supervisory Board, in the form of but not limited to:
 - a. Review information about the Company, as well as the Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, management reports and other information;

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
 - c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
 - d. Mengkaji kecukupan fungsi pemeriksaan internal, termasuk jumlah pemeriksa, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan;
 - e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor;
7. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Pengawas;
 8. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan;
 9. Melakukan klarifikasi dengan Direksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan dan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
 10. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit;
 11. Anggota Komite Audit yang bukan Dewan Pengawas berhak mendapatkan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan Dewan Pengawas yang maksimum nilainya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- b. Review the Company's compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
 - c. Review complaints related to the Company;
 - d. Review the adequacy of the internal audit function, including the number of Examiners, annual work plans and assignments that have been carried out;
 - e. Review the adequacy of external audit including the depth of audit planning and the number of auditors;
7. Based on a written assignment letter from the Supervisory Board, the Audit Committee can access records or information about employees, funds, assets, and other Company resources relating to the implementation of their duties and report in writing the results of the assignment to the Supervisory Board;
 8. Prepare and submit an annual work program to the Supervisory Board to be established, before the current fiscal year;
 9. Conduct clarification with the Board of Directors in carrying out their duties in accordance with the annual work program and reporting in writing to the Supervisory Board accompanied by recommendations if needed;
 10. Prepare quarterly reports and annual reports to the Supervisory Board, which are signed by at least the Chairman of the Audit Committee and a member of the Audit Committee;
 11. Audit Committee Members who are not the Supervisory Board are entitled to receive an honorarium at the expense of the Company, the amount of which is set by the Supervisory Board with a maximum value of 20% (twenty percent) of the salary of the President Director.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP84/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perum Jasa Tirta II. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, dan/atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Utama/Pengendali.

Appointment and Dismissal of Audit Committee

The Audit Committee is appointed and dismissed based on the Decree of the Supervisory Board No. KEP-72/DEWAS/XI/2017 concerning Dismissal and Appointment of Head and Member of Audit Committee of Perum Jasa Tirta II. Dismissal of members of the Audit Committee can be done if the concerned ends the term of office of his/her membership and based on the decision of the Supervisory Board is terminated because it does not meet the performance that has been determined and/or is incompetent in carrying out its duties.

Independence of Audit Committee

All members of the Audit Committee have met the independence criteria as evidenced by not having a financial relationship, managerial relationship, share ownership, family relations, and/or other relationships that can affect his ability to act independently with other members of the Audit Committee, the Supervisory Board, Board of Directors, and/or Major/Controlling Capital Owners.



Independensi Komite Audit
Independence of Audit Committee

Aspek Independensi / Independence Aspect	Hartanto	Wawan Saeful Anwar	Royza Fauzi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / No Financial relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / No family relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perum Jasa Tirta II, Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan / No managerial relation in Perum Jasa Tirta II, subsidiaries or Joint Ventures	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perum Jasa Tirta II / No shareholding in Perum Jasa Tirta II	√	√	√

Piagam Komite Audit

Perum Jasa Tirta II membekali Komite Audit dengan Piagam (Charter) Komite Audit sebagai pedoman tata laksana kerja Komite Audit sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Adapun piagam tersebut memuat dan mengatur aspek-aspek pelaksanaan tugas Komite Audit, di antaranya visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, kode etik, persyaratan auditor, pelaksanaan rapat, dan mekanisme kerja lainnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala dengan auditor eksternal setidaknya satu kali dalam 1 (satu) tahun guna membahas progres pemeriksaan audit. Komite Audit juga dapat mengundang manajemen Perusahaan melalui Satuan Pengawasan Intern untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan proses audit.

Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan disebutkan alasannya. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir dalam rapat.

Selama tahun 2020, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 14 kali dengan frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota sebagai berikut:

Audit Committee Charter

Perum Jasa Tirta II provides the Audit Committee with the Audit Committee Charter as a guideline for the work procedures of the Audit Committee as stipulated through Joint Decree of Supervisory Board and Board of Directors of Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II on Guidelines for Good Corporate Governance No. 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The charter contains and regulates aspects of implementation of the Audit Committee's duties, including vision and mission, structure and position, duties and responsibilities, authority, work relationship, code of conduct, auditor requirements, meeting implementation, and other work mechanisms.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee conducts regular meetings with the external auditor at least once a year to discuss audit progress. The Audit Committee may also invite the Company's management through the Internal Audit Unit to obtain information needed to support the audit process needs.

All decisions taken at the meeting are recorded and documented properly in the minutes of the meeting, including in the event of dissenting opinions and the reasons. Minutes of the meeting are signed by the chair of the meeting and distributed to all members of the Audit Committee, both present and absent in the meeting.

Throughout 2020, the Audit Committee held 14 meetings with the frequency and recapitulation of the attendance of members as follows:

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2020
Audit Committee Meeting Agenda in 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / Attendance
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Ketua Komite Audit (Pengawas Independen) / Head of Audit Committee (Independent Auditor)	14	14	100%
Wawan Saeful Anwar	Anggota (Pihak Independen) / Member (Independent Party)	14	14	100%
Royza Fauzi	Anggota (Pihak Independen) / Member (Independent Party)	14	14	100%

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan audit Perusahaan, Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Komite Audit untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit selama tahun 2020 telah dipaparkan dalam bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern' dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan dan program sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Triwulan I, II, III, dan IV
2. Pertemuan Rutin Triwulanan dan Koordinasi dengan SPI
3. Pengadaan Kantor Akuntan Publik
4. Evaluasi Kinerja Kantor Akuntan Publik
5. Evaluasi RKAP 2021
6. Rapat Internal Dewan Pengawas
7. Rapat Gabungan Dewan Pengawas & Direksi
8. Kunjungan Kerja & Evaluasi per Divisi & Wilayah Kerja
9. Kajian & Evaluasi Prosedur Kerja
10. Kajian & Evaluasi Pedoman Pengadaan Barang & Jasa
11. RKAP 2021 dan RJPP 2020-2024 harus sejalan dengan Tugas dalam PP 7 tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan tentang pengusahaan dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah Kerja.
12. Dalam melaksanakan investasi agar dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dan melihat Analisa risiko strategis yang berpengaruh kepada penugasan perusahaan dalam PP 7 tahun 2010.
13. Perlunya melihat kembali urgensi Project Investasi agar dana Investasi yang dilaksanakan dapat memberikan value added bagi perusahaan dan menjadi penunjang dalam rangka Penugasan Pemerintah yang termuat dalam PP 7 tahun 2010.

Competence Development of Audit Committee

To improve the competence of the Audit Committee in carrying out the Company's audit function, Perum Jasa Tirta II provides wide opportunity for the Audit Committee to attend training, education, seminars, and/or workshops in accordance with the required competencies. Information on the competency development program undertaken by the Audit Committee throughout 2019 has been presented in the 'Company Profile' chapter, 'Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit' sub-chapter in this Annual Report.

Audit Committee Duties Implementation Report 2020

Throughout 2020, the Audit Committee carried out the following activities and programs:

1. Evaluation on Company Performance in Quarter I, II, III, and IV
2. Quarterly Meeting and Coordination with SPI
3. Procurement of Public Accounting Firm
4. Evaluation of Public Accounting Firm Performance
5. Evaluation on RKAP 2020
6. Supervisory Board Internal Meeting
7. Joint Meeting of Supervisory Board & Board of Directors
8. Work Visit & Evaluation per Division & Operational Area
9. Review & Evaluation of Working Procedures
10. Review & Evaluation of Goods & Service Procurement Guidelines
11. RKAP 2021 and RJPP 2020-2024 must be in line with the Tasks in PP 7 of 2010 article 4 paragraph (1) and paragraph (2) which state about the exploitation and part of the task of managing water resources in the Work area.
12. In carrying out investments, they must be carried out with the principles of efficiency and prudence and look at the strategic risk analysis that affects the company's assignments in PP 7 of 2010.
13. It is necessary to review the urgency of the Investment Project so that the Investment funds implemented can provide added value for the company and become a supporter in the framework of Government Assignments contained in PP 7 of 2010.



Remunerasi Komite Audit

Struktur dan jumlah remunerasi Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari honorarium sebesar 20% dari pendapatan Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Audit Committee Remuneration

The structure and amount of the remuneration of the Audit Committee that is not a member of the Supervisory Board has been stipulated by the Supervisory Board that consists of honorarium 20% of income of the President Director in accordance with Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-86/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

1. **Ketua** : Kelik Wirawan Wahyu Widodo
2. **Sekretaris** : Nuning Sri Rejeki Wulandari
3. **Anggota** : Romy Marcandi

In accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-86/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee for Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

1. **Chairman** : Kelik Wirawan Wahyu Widodo
2. **Secretary** : Nuning Sri Rejeki Wulandari
3. **Member** : Romy Marcandi

Terkait dengan fungsi Nominasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
- b. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas; dan
- d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.

Related to the Nomination function:

- a. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding:
 - 1) Composition of positions for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board;
 - 2) Policies and criteria required in the Nomination process; and
 - 3) Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board;
- b. Assist the Supervisory Board in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;
- c. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board; and
- d. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board to the Supervisory Board to be submitted to the Capital Owners.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai struktur Remunerasi;
 - 1) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 2) besaran atas Remunerasi;
- b. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Related to the Remuneration function:

- a. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the structure of the Remuneration;
 - 1) policy on Remuneration; and
 - 2) the amount of Remuneration;
- b. Assisting the Supervisory Board in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board.

REALISASI KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2020

Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2020 mengadakan 2 kali rapat pada tanggal 29 April 2020 dan 7 Oktober tahun 2020 dalam rangka Pengusulan Talenta Perum Jasa Tirta II pada sistem Talent Management BUMN.

REALIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2020

Nomination and Remuneration Committee during 2020 held 2 meetings on April 29, 2020 and October 7, 2020 in the context of Proposing the Talents of Perum Jasa Tirta II in the BUMN Talent Management system.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Dasar hukum kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada Perum Jasa Tirta II adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 jo. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/DP/68/KBS/10/2019 dan Nomor KBS01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Perum Jasa Tirta II. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Ketua** : Romy Marcandi
2. **Anggota** : Kandianawati

The legal basis for the activities of the Risk Management Monitoring Committee at Perum Jasa Tirta II is the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of SOE No. PER-10/MBU/2012 jo. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as well as Joint Decree of the Supervisory Board and Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. 1/DP/68/KBS/10/2019 and No. KBS01/DIR/10/2019 dated 30 October 2019 regarding the Code of Corporate Governance of Perum Jasa Tirta II. In accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II No: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated 05 November 2020 concerning the Appointment of the Chair of the Monitoring Committee Risk Management for Public Company (Perum) Jasa Tirta II and No: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the Risk Management Monitoring Committee in 2020 is as follows :

1. **Chairman** : Romy Marcandi
2. **Member** : Kandianawati

TUGAS KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

- 1) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Pengawas;
- 2) Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko;
- 3) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, termasuk kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya, serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang telah diambil Direksi terkait dengan manajemen risiko;
- 4) Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

DUTIES OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

- 1) Prepare and submit work plans annually to the Supervisory Board for stipulation, as well as reporting the implementation of the annual work plan to the Supervisory Board;
- 2) Provide input to the Supervisory Board regarding the preparation and improvement of the Risk Management Monitoring Committee Charter;
- 3) Evaluate the risk management policies and strategies prepared by the Board of Directors, including the suitability of the policies with implementation, as well as submit recommendations to the Supervisory Board on policies that have been taken by the Board of Directors related to risk management;
- 4) Reviewing information regarding the company, the Company's Long Term Plan (RJPP), and the Company's Work Plan and Budget (RKAP);



- 5) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara berkala serta memantau potensi risiko yang dihadapi perusahaan dan implementasi mitigasinya;
 - 6) Melakukan penelaahan atas kebijakan perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan sasaran kinerja dan bidang usaha perusahaan;
 - 7) Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Pengawas untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam hal manajemen risiko;
 - 8) Membantu Dewan Pengawas dalam hal pengawasan kepatuhan Direksi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk jika ada potensi benturan kepentingan;
 - 9) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Internal Dewan Pengawas.
- 5) Evaluating and analyzing risk profile reports on a regular basis as well as monitoring the potential risks faced by the company and the implementation of their mitigation;
 - 6) Reviewing the company's policies in managing risks related to the company's performance targets and business fields;
 - 7) Provide suggestions and/or recommendations to the Supervisory Board for the necessary improvements and improvements in terms of risk management;
 - 8) Assist the Supervisory Board in supervising the compliance of the Board of Directors with the prevailing laws and regulations, including if there is a potential conflict of interest;
 - 9) Carry out other duties of the Supervisory Board as long as it is within the scope of duties and obligations of the Supervisory Board, based on the prevailing laws and regulations;
 - 10) A report on the implementation of special tasks to the Supervisory Board for further consideration in the Internal Meeting of the Supervisory Board.

REALISASI KEGIATAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

Secara umum, program kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berjalan secara optimal. Komite Pemantau Manajemen Risiko secara periodik melakukan pembahasan dengan unit kerja yang membidangi manajemen risiko, dengan agenda sebagai berikut:

- a) Rapat tanggal 26 November 2020 tentang Pembahasan Profil Risiko Perusahaan di RKAP 2021
- b) Rapat tanggal 22 Desember 2020 tentang Pembahasan Realisasi Pengendalian Risiko tahun 2020 dan Rencana Kerja Manajemen Risiko tahun 2021

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Komite Pemantau Manajemen Risiko melaporkan ke Dewan Pengawas untuk kemudian disampaikan arahan kepada Direksi sebagaimana dalam surat No. S-93/DP/2020 tentang Profil Risiko Perusahaan dan Rencana Investasi dalam RKAP tahun 2021.

REALIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE IN 2020

In general, the activity program of the Risk Management Monitoring Committee can run optimally. The Risk Management Monitoring Committee periodically conducts discussions with the work unit in charge of risk management, with the following agenda:

- a) Meeting on November 26, 2020 regarding the Discussion of the Company's Risk Profile in the 2021 RKAP
- b) Meeting on December 22, 2020 regarding the Discussion on the Realization of Risk Control in 2020 and the Work Plan for Risk Management in 2021

Based on the results of the discussion, the Risk Management Monitoring Committee reports to the Supervisory Board to then submit directions to the Board of Directors as stated in letter No. S-93/DP/2020 concerning the Company's Risk Profile and Investment Plan in the 2021 RKAP.

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Ruang lingkup tugas Sekretaris Perusahaan meliputi Kesekretariatan Direksi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, serta Hubungan Internasional.

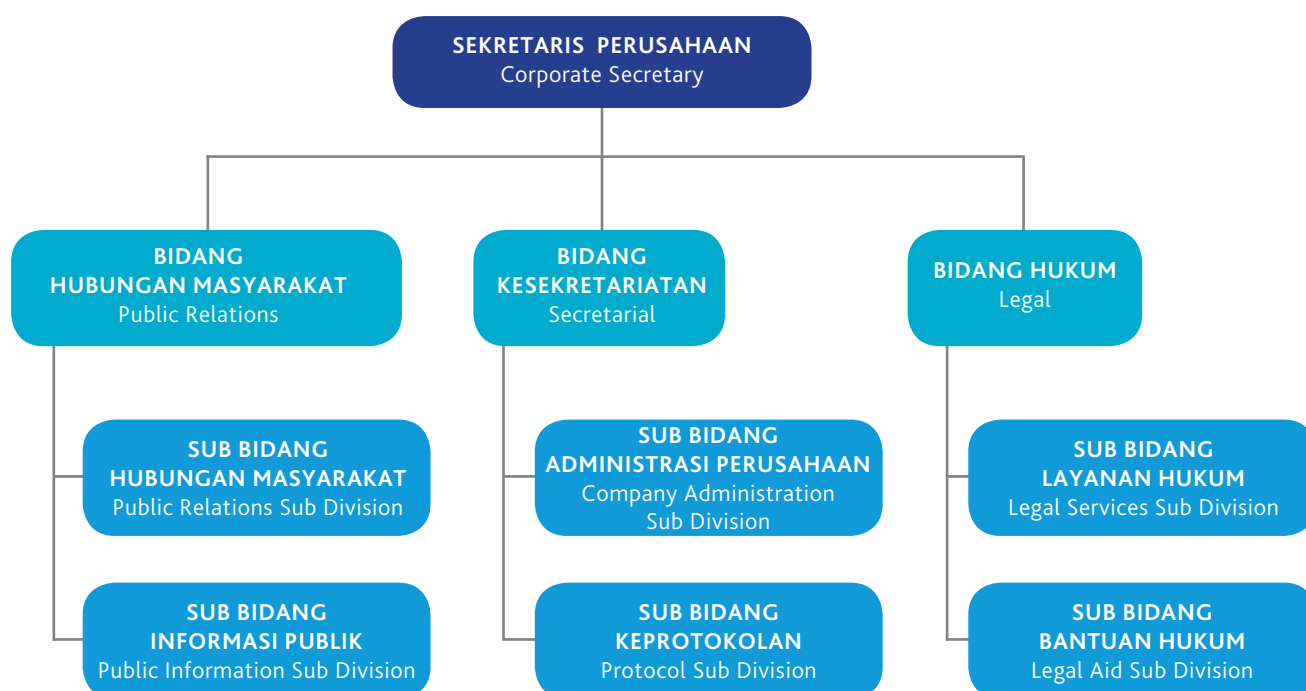
Struktur Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor PRD-19/DIR/11/2020, tanggal 6 November 2020 beserta perubahannya tentang Struktur Organisasi, dan tata kerja perusahaan umum Jasa Tirta II struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and carries a mission to support the creation of a good and consistent Company image through an effective communication program to all stakeholders. The scope of duties of the Corporate Secretary includes the Secretariat of Directors, Public Relations and Institutional Relations, and International Relations.

Company Secretary Structure

In accordance with the Decree of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number PRD-19/DIR/11/2020, dated November 6, 2020 and its amendments regarding Organizational Structure, and work procedures for the general company Jasa Tirta II the organizational structure of the Corporate Secretary is as follows:





Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile



NANDANG MUNANDAR

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / : Purwakarta, 12 Februari 1972
Place, Date of Birth : Purwakarta, February 12, 1972
Usia / Age : 49 tahun / 49 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Keputusan Direksi Nomor KPT-27/DIR/02/2020. / Decree of Board of Directors NO. KPT-27/DIR/02/2020.

Riwayat Pendidikan / Education

Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP (1997) dan Magister Akuntansi dari Budi Luhur Jakarta (2010) / Obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP (1997) and Master of Accounting from Budi Luhur Jakarta (2010).

Riwayat Jabatan / Career History

Saat ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Maret 2020 – sekarang). Kepala Divisi SDM di Perum Jasa Tirta II (Februari 2019 – Februari 2020) / Currently, he serves as Corporate Secretary (March 2020 – present). Head of HR Division at Perum Jasa Tirta II (February 2019 - February 2020).

Kualifikasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan wajib memenuhi kriteria kualifikasi yang disyaratkan, antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, hubungan masyarakat, keterampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Qualification of Corporate Secretary

The Corporate Secretary shall meet the required qualification criteria, among others knowledge of regulations relating to the Company, public relations, administrative skills, and experience that supports the implementation of his/her duties. In addition, the Corporate Secretary shall also have academic qualifications and sufficient competence to carry out his/her duties and responsibilities.

Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors under the Company's internal mechanisms with the approval of the Supervisory Board.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Menghadiri rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat;
2. Menyiapkan Daftar Khusus, yaitu daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi beserta keluarganya sebagai sebuah dokumen benturan kepentingan;
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan atau kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
5. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin;
7. Menindaklanjuti setiap keputusan rapat Direksi dan memantau tindak lanjut hasil rapat;
8. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
10. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan;
11. Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat;
12. Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan strategis pengelolaan Perusahaan serta menyusun program dan pelaksanaannya antara lain di bidang hukum, humas, pendidikan masyarakat;
13. Memastikan tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan;
14. Memastikan bahwa Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Pengawas apabila diminta oleh Dewan Pengawas;
15. Mengkoordinasikan isu strategis Perusahaan lintas biro/divisi;
16. Menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

Duties, Responsibilities, and Functions of Corporate Secretary

1. Attend the Board of Directors meetings and draw up the minutes of meetings;
2. Prepare a Special List that contains the shareholding of members of the Supervisory Board and the Board of Directors along with their families as a conflict of interest documents;
3. Responsible for the carrying out of RPB;
4. Prepare the necessary materials in relation to reports or routine activities of the Board of Directors to be presented to outsiders;
5. Prepare the necessary materials in relation to matters to be obtained by the Board of Directors with regard to the management of the Company;
6. Facilitate meetings of the Board of Directors, both routine and non-routine;
7. Follow-up any decision of the Board of Directors by recording every decision of the Board of Directors meeting and monitor the follow up of the meeting result;
8. Ensure that the Company complies with the rules on disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
9. Provide information required by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular basis and/or at any time if requested;
10. Administer and store the Company's documents;
11. Organize an introduction program for newly appointed members of the Supervisory Board;
12. Assist the Board of Directors in establishing strategic policies of the Company's management, preparing its programs and implementation, among others in the field of law, public relations, public education;
13. Ensure that information is accessible to stakeholders in accordance with the stakeholders' fair needs;
14. Ensure that Perum Jasa Tirta II complies with applicable disclosure requirements and is obliged to provide information relating to its duties to the Board of Directors on a regular basis and to the Supervisory Board when requested by the Supervisory Board;
15. Coordinate corporate strategic issues across Bureau/ Division;
16. Submit Annual Report on the performance of its duties to the Board of Directors.



Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Menjadi penghubung (liaison officer); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemilik Modal, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan RPB.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perum Jasa Tirta II membekali pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Sekretaris Perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern'.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja, antara lain:

1. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
2. Penyelenggaraan kegiatan Rapat Direksi serta rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
3. Mendokumentasikan dan membuat risalah rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
4. Menyusun pembuatan Annual Report untuk tahun buku 2019;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan assessment GCG;
6. Mendukung sosialisasi penerapan GCG di lingkungan perusahaan;
7. Penyelenggaraan kegiatan terkait corporate communication melalui publikasi, press release, kegiatan sponsorship, corporate branding dan kegiatan lainnya;
8. Pemeliharaan hubungan perusahaan dengan regulator.

Functions

1. Ensuring that the Company complies with the rules on disclosure requirements in line with the application of GCG principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and Supervisory Board periodically and/or as per request;
3. Being a liaison officer; and
4. Administering and maintaining Company documents, including but not limited to the Capital Owner List, Special List, and minutes of Board of Directors meetings, Supervisory Board meetings and General Meeting of Capital Owners.

Competence Development of Corporate Secretary

Perum Jasa Tirta II provides the knowledge and competencies to the Corporate Secretary through participation in training and education, both formally and informally. Information about the Corporate Secretary's training and education program has been presented in this Annual Report on the 'Company Profile' chapter, 'Education and/or Training of Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit' subchapter.

Report on Implementation of Corporate Secretary Duties in 2020

Corporate Secretary has carried out various activities and work programs throughout 2019, including:

1. Organized Joint Discussion Meeting (RPB);
2. Organized the activities of the Board of Directors' Meeting and joint meetings of the Supervisory Board and Board of Directors;
3. Documented and drew up minutes of Board of Directors' meetings and joint meetings of the Supervisory Board and Board of Directors;
4. Prepared the Annual Report for the 2019 fiscal year;
5. Coordinated the implementation of GCG assessments;
6. Supported the dissemination of GCG implementation in the company environment;
7. Organized activities related to corporate communication through publications, press releases, sponsorship activities, corporate branding, and other activities;
8. Maintained the Company's relations with regulators.

AKSES DAN KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE AND ACCESS

Komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyampaian informasi terkini terkait setiap perkembangan yang terjadi secara akurat, tercatat, diolah, dan dirangkum menjadi sebuah laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penyebaran informasi kepada semua pemangku kepentingan Perusahaan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II telah menyediakan berbagai akses informasi melalui sarana dan media sebagai berikut:

The commitment of Perum Jasa Tirta II to the principles of transparency and compliance with applicable laws and regulations relating to information disclosure is realized through the delivery of the latest information regarding any developments that occur accurately, recorded, processed, and summarized into a report submitted to stakeholders.

Information dissemination to all of the Company's stakeholders is an essential part of upgrading the internal and external information transparency principles. These are expected to help keep and enhance knowledge, understanding and positive perceptions of stakeholders on policies and activities of Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II has provided various information access through the following facilities and media:

Website Perusahaan / Company Website : www.jasatirta2.co.id
Kontak Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary Contact
Telp. (0264) 201972
Fax. (0264) 201971
Email: pjt2@jasatirta2.co.id
Media Sosial / Social Media
Instagram: [jasatirta2](https://www.instagram.com/jasatirta2) | Facebook: Perum Jasa Tirta
Twitter: [umas_pjt2](https://twitter.com/umas_pjt2) | YouTube: Humas PJT II

Keterbukaan Informasi dan Data Perusahaan

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perum Jasa Tirta II secara berkala menyebarluaskan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja yang sejalan dengan kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator, yakni sebagai berikut:

Disclosure of Information and Company Data

As a form of transparency to the public, Perum Jasa Tirta II periodically disseminates material information about its activities and performance in line with the obligations to meet the information disclosure set by the regulator, as follows:

Bentuk Keterbukaan Informasi / Form of Information Disclosure	Jumlah / Total
Laporan Tahunan / Annual Report	1
Laporan Keberlanjutan / Sustainability Report	1
Siaran Pers / Press Release	582

Website Perusahaan

Perum Jasa Tirta II memiliki situs website resmi yaitu www.jasatirta2.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Situs tersebut menyajikan informasi mengenai profil dan sejarah perusahaan, informasi mengenai manajemen Perusahaan, layanan, informasi kinerja keuangan, berita terkini mengenai Perusahaan, serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi lainnya.

Company Website

Perum Jasa Tirta II has an official website, www.jasatirta2.co.id that can be accessed by all stakeholders. The site presents information about company profile and history, information about Company management, services, financial performance information, the latest news about the Company, as well as a number of other information disclosure documents.

Laporan Tahunan

Perum Jasa Tirta II menerbitkan Laporan Tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Perusahaan di tahun buku. Laporan Tahunan

Annual Report

Perum Jasa Tirta II publishes Annual Report as the official documentation of the Company's performance in a fiscal year. Annual Reports are distributed to Capital Owners



didistribusikan kepada Pemilik Modal dan segenap pemangku kepentingan lainnya. Dalam penyusunannya, Laporan Tahunan telah mengikuti kriteria dan ketentuan yang berlaku serta diikutsertakan dalam ajang Annual Report Awards (ARA).

Aktivitas Hubungan Investor

Perum Jasa Tirta II berupaya menjaga hubungan yang sinergis dengan Pemilik Modal dan pemangku kepentingan melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kinerja Perusahaan secara berkala baik secara formal maupun informal.

Komunikasi Internal

Perum Jasa Tirta II senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada karyawan melalui berbagai media komunikasi dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja. Hubungan komunikasi dengan pihak internal Perusahaan dilakukan melalui penyediaan buletin dan penyebaran email blasting internal untuk menyampaikan informasi material bagi internal Perum Jasa Tirta II.

and other stakeholders. The preparation of Annual Report complies with the prevailing criteria and rules. The Annual Report is included in Annual Report Awards (ARA).

Investor Relations Activities

Perum Jasa Tirta II strives to maintain a synergistic relationship with the Capital Owners and stakeholders through the fulfillment of the obligation by reporting the Company's performance periodically, both formally and informally.

Internal Communication

Perum Jasa Tirta II always creates two-way communication to employees through various communication media in order to create a favorable internal communication climate to support the achievement of performance. Communication with internal parties is conducted by providing bulletin and internal e-mail blasting to deliver material information for internal parties of Perum Jasa Tirta II.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) INTERNAL AUDIT UNIT

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Struktur dan Kedudukan SPI

SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II has an Internal Audit Function which is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises, Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) and Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Jasa Tirta II Public Company (Perum). In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for management that can be trusted, acted professionally, objectively, and independently so that it can provide added value to the achievement of the Company's goals through efforts to increase the effectiveness of risk management, compliance with laws and regulations and Good Corporate Governance.

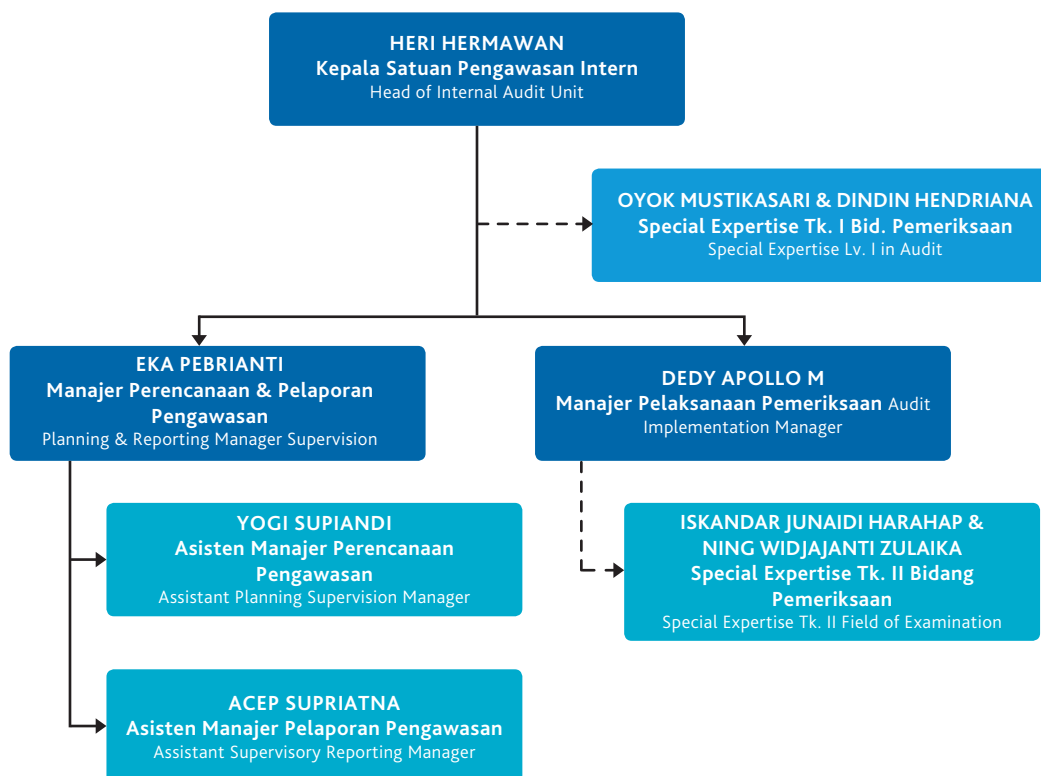
Structure and Position of SPI

SPI has direct position under the President Director to ensure the independence of the audited activities or work units. The Head of SPI shall be qualified in accordance with applicable regulations and have sufficient competence in order to properly carry out its duties and responsibilities. The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director, with considerations from other Directors.

Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-18/DIR/11/2020 dan PRD-19/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

As stipulated in the organizational structure in the Regulation of the Board of Directors No: 1/11/PRT/2016 dated May 31, 2016, on Organizational Structure and Working Procedure of Perum Jasa Tirta II, Organizational Structure for Internal Supervisory Unit is as follows

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern PJT II
Organization Structure of Internal Audit Unit of PJT II



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan SPI

SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.

Jumlah dan Komposisi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2020, personil SPI berjumlah 12 (dua belas) orang dengan 1 (satu) orang Kepala SPI, 10 orang auditor, dan 1 orang petugas Tata Usaha (TU).

Appointment and Dismissal of SPI

SPI is led by a Head of SPI that is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board.

Total and Composition of SPI Personnel

As of December 31, 2019, there were 12 (twelve) SPI personnel with 1 (one) SPI Head, 10 auditors, and 1 Administrative Officer (TU).



Profil Kepala SPI



HERI HERMAWAN

Kepala Satuan Pengawasan Intern
(SPI) / Head of Internal Audit Unit
(SPI)

Profile of Head of SPI

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / : Purwakarta, 7 April 1972 /
Place, Date of Birth : Purwakarta, April 7, 1972
Usia / Age : 49 tahun / 49 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Keputusan Direksi Nomor 1/82/KPTS/2016 untuk periode 2016 sampai sekarang. / Decree of the Board of Directors No. 1/82/KPTS/2016 for period of 2016 - present

Riwayat Pendidikan / Education
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / Bachelor's Degree in Economics Majoring in Management from Universitas Islam Bandung (1997).

Riwayat Jabatan / Career History
Special Expertise Tingkat IV Bidang Evaluasi & Pelaporan (2001), Asisten Manajer Tata Operasional (2003), Kepala Seksi Pemasaran (2006), Manajer Unit Kepariwisata (2008), Kepala Unit Kepariwisata, Unit Pariwisata (2011), General Manager Kepariwisata (2013), Kepala Divisi Satuan Pengendali Kinerja Korporasi (2014), dan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II (2016 – sekarang). / Special Expertise Level IV. Evaluation & Reporting (2001), Assistant Operational Manager (2003), Head of Marketing Section (2006), Head of Hotel and Marketing Section (2008), Tourism Unit Manager (2008), Head of Tourism Unit, Tourism Unit (2011), General Manager of Tourism (2013), Head of Corporate Performance Control Unit Division (2014), Head of the Internal Audit Unit (2016 –present).

Pelatihan yang Diikuti / Trainings
Seminar dan Pengukuhan PIA, Diklat Pengelolaan Tugas-tugas Audit, Diklat Audit Kecurangan (Fraud Audit), Diklat Komunikasi dan Psikologi Audit, Diklat Audit Operasional, Diklat Dasar-dasar Audit, Pelatihan Cascading KPI Individual, TOT Pelaksanaan ABK, Training of Trainers Pelaksanaan Analisa Beban Kerja, Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Workshop Peranggaran (Budgeting) di Lingkungan PJT II, Pelatihan Kepemimpinan atas Jasa dan Ketekunan, Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Motivation to Quality Based on Spiritual Power, Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang, Pelatihan Penanggulangan Bencana pada BUMN/BUMD, Pelatihan Penggunaan Teknologi Internat dan Jaringan Komputer, Seminar Born to Win, Seminar Lokakarya Tax Reform & Petunjuk Umum Pengisian SPT, Pelatihan Cost Control bagi Hotel dan Restoran, Seminar Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam, Implementasi dan Audit Internal ISO 9001:2008, dan Pelatihan TOT Pelaksanaan ABK. / Seminar & Inauguration of PIA, Training on the Management of Audit Duties, Fraud Auditing Training, Training for Audit Communication and Psychology, Operational Audit Training, Basic Audit Training, Individual KPI Cascading Training, TOT Implementation of ABK, TOT Implementation of Workload Analysis, HSE Training, Workshop on Budgeting in PJT II Environment, Senior Leadership Training, Training on Service and Persistence Award, Training of Guidelines on Procurement of Goods/Services Implementation, Training of Motivation to Quality Based On Spiritual Power, Training of Guidelines on Inventory, Training on Disaster Management in SOE/ROE, Training on Use of Internet Technology and Computer Network, Born to Win seminar, Workshop Seminar on Tax Reform & General Instruction of SPT Filling, Cost Control Training for Hotels and Restaurants, Upgrading Seminar P-4 Supporting 25 Hours, Implementation and Internal Audit ISO 9001-2008, TOT of ABK Implementation.

Sertifikasi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perum Jasa Tirta II memiliki beberapa auditor tersertifikasi sebagai berikut:

SPI Personnel Certification

Certified auditors of Perum Jasa Tirta II as of December 31, 2020 are as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Sertifikasi / Certificate	Institusi Pemberi Sertifikat / Certified by
Heri Hermawan	Kepala Satuan Pengawasan Intern / Head of Internal Audit Unit	Profesional Internal Auditor / Professional Internal Auditor	PPAK
Eka Pebriantii	Manajer Perencanaan & Pelaporan Pemeriksaan / Audit Reporting & Planning Manager	Profesional Internal Auditor / Professional Internal Auditor	PPAK
Dedy Apollo M	Manajer Pelaksana Pemeriksaan / Audit Implementation Manager	Profesional Internal Auditor / Professional Internal Auditor	PPAK
Yogi Supardi	Asisten Manajer Perencanaan / Planning Manager Assistant	Profesional Internal Auditor / Professional Internal Auditor	PPAK

Piagam SPI

Landasan SPI Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Internal Audit Charter yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat kriteria minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal, sehingga dapat tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, isi dari piagam SPI adalah sebagai berikut:

- BAB I – Pendahuluan
- BAB II – Satuan Pengawasan Intern (SPI)
- BAB III – Standar Profesional dan Kode Etik
- BAB IV – Hubungan Satuan Pengawasan Intern dengan Pihak Lain
- BAB V – Dukungan Manajemen terhadap Satuan Pengawasan Intern
- BAB VI – Mekanisme Kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI)
- BAB VI – Peran Strategis Lainnya
- BAB VII – Penutup

SPI Charter

The legal basis of Perum Jasa Tirta II SPI in carrying out its duties and functions has referred to the Internal Audit Charter based on SOE Ministerial Decree No. Kep-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance. The Internal Audit Charter is prepared as a standard guideline which contains the minimum criteria regarding the function of the Internal Audit that needs to be carried out by the Company and aspects related to the implementation of Internal Audit, in order to create a common understanding and foundation regarding the level of maintenance of the interests and commitment of all parties related to Company.

In carrying out the duties, functions and responsibilities as mandated in the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Perum Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance Number: 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019, contents of the SPI charter are as follows:

- CHAPTER I – Introduction
- CHAPTER II – Internal Audit Unit (SPI)
- CHAPTER III – Professional Standards and Code
- CHAPTER IV – Relationship of Internal Audit Unit with Other Parties
- CHAPTER V – Management Support to Internal Audit Unit
- CHAPTER VI – Working Mechanism of Internal Audit Unit (SPI)
- CHAPTER VI – Other Strategic Roles
- CHAPTER VII – Closing



Visi dan Misi SPI

Visi

Menjadi unit kerja dan mitra yang dapat memberikan fungsi pengawasan, konsultasi dan katalisator secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi atas upaya pencapaian target-target Perusahaan.

Misi

- Mengendalikan kegiatan perusahaan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan
- Memberikan saran konstruktif dan terjangkau atas pelaksanaan kegiatan Perusahaan
- Membantu memberikan percepatan dalam upaya pelaksanaan alur proses sistem manajemen

Tugas dan Tanggung Jawab, dan Fungsi SPI

Tugas SPI adalah melaksanakan sebagian tugas Perusahaan di bidang pengawasan terhadap operasional Perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: Nomor: PRD-18/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPI mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan risiko, program kerja, dan Key Performance Indicator (KPI) SPI;
- b. Penyusunan, review, dan sosialisasi aturan/pedoman/prosedur;
 - 1). Pemeriksaan (audit) operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (POTT) dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 2). Pemeriksaan (audit) internal sistem manajemen mutu;
 - 3). Evaluasi pengendalian internal;
 - 4). Penilaian program jaminan kualitas (*quality assurance*) SPI;
 - 5). Piagam SPI (SPI Charter)
- c. Penyusunan usulan RKAP termasuk kelengkapan dokumen namun tidak terbatas pada Project Dogest Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan RAB untuk pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan;
- e. Penyusunan rencana paket pengadaan barang/jasa berdasarkan RKAP;
- f. Pembuatan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
- g. Penyiapan naskah Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
- h. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI;

Vision and Mission of SPI

Vision

To be a work unit and partner that can provide professional audit, consultancy, and catalyst functions to contribute to the achievement of the Company's targets.

Mission

- Controlling the Company's activities from regulatory compliance aspects.
- Providing constructive and affordable advice in implementing the Company's activities.
- Providing assistance to accelerate the implementation of system management process flow.

Duties, Responsibilities, and Functions of SPI

SPI is responsible for carrying out part of the Company's duties in auditing the Company's operations based on Jasa Tirta II Public Company (Perum) Board of Directors' Regulation Number: PRD-25/DIR/10/2019 concerning Organizational Structure and Work Procedures of Jasa Tirta II Public Company (Perum). In performing this duty, the Internal Audit Unit has the following responsibilities and functions:

- a. Risk management, work program and SPI Key Performance Indicator (KPI);
- b. Preparation, review, and dissemination of rules/guidelines/procedures;
 - 1). Operational and financial audits, specific purpose audits (POTT) and monitoring evaluation of the follow-up of audit results;
 - 2). Internal audit of the quality management system;
 - 3). Evaluation of internal control;
 - 4). Assessment of the SPI quality assurance program;
 - 5). SPI Charter
- c. The preparation of the proposed RKAP includes the completeness of documents but is not limited to Project Dogest Terms of Reference (KAK), and RAB for consultancy services work in accordance with applicable regulations;
- d. Execution of goods/services procurement in accordance with authority;
- e. Preparation of plans for procurement of goods/services based on the RKAP;
- f. Making complete procurement plan documents including but not limited to Terms of Reference (KAK), Self Estimated Price (HPS), and Contract Design for consultancy service work in accordance with applicable procurement guidelines for goods and services;
- g. Document Preparation for the Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions;
- h. Preparation of the SPI Annual Inspection Work Program (PKPT);

- i. Pelaksanaan pemeriksaan operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan internal sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Pendampingan kegiatan pemeriksaan/penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi;
- k. Monitoring dan evaluasi atas progres tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal;
- l. Penyelenggaraan pemeriksaan sistem manajemen mutu oleh pihak eksternal;
- m. Penyelenggaraan Penilaian atau Assessment Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang dilakukan oleh pihak eksternal;
- n. Evaluasi (*self assessment*) implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko;
- o. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan;
- p. Penyelenggaraan penilaian program jaminan kualitas (*quality assurance*) kinerja SPI;
- q. Fungsi konsultasi perbaikan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- r. Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang pengawasan dengan Komite Audit;
- s. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
- t. Pengendalian bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- v. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang muka kerja unit kerja

Kode Etik SPI

Panduan pelaksanaan tugas SPI senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku dan etika pelaksanaan audit yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, tujuan serta visi misi Perusahaan. Dalam mendukung tujuan tersebut, SPI memiliki Kode Etik yang mengatur standar etika yang wajib dimiliki oleh setiap auditor internal, antara lain:

1. Jujur, objektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Loyal terhadap profesi, Perusahaan, dan unit SPI;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal pemeriksa atau Perusahaan;
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara objektif;
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari unit kerja yang diperiksa, pegawai, ataupun mitra bisnis Perusahaan yang patut diduga dapat memengaruhi pertimbangan profesional;
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;

- i. Carrying out operational and financial audits, audits with specific objectives and internal quality management system audits in accordance with applicable regulations;
- j. Assistance with inspection/evaluation activities carried out by external parties in accordance with their duties and functions;
- k. Monitoring and evaluation of the follow-up progress of the results of internal and external auditor investigations;
- l. Execution of quality management system inspection by external parties;
- m. Organizing an Evaluation or Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) conducted by external parties;
- n. Evaluation (self assessment) of Good Corporate Governance implementation and risk management;
- o. Evaluate the effectiveness of the implementation of the Company's internal controls;
- p. Organizing an assessment of the quality assurance program of the SPI's performance;
- q. Consultancy function to improve internal control system, risk management and Good Corporate Governance.
- r. Organizing coordination meetings in the field of supervision with the Audit Committee;
- s. Monitor follow-up on the results of inspections that have been reported;
- t. Control of evidence of work implementation of duties and functions;
- u. Preparation of reports on the results of the implementation of tasks and functions; and
- v. Management and accountability of work unit advances

SPI Code of Conduct

Guidelines for implementing the duties of SPI always refer to the conduct and ethics of conducting audits that are in line with the applicable legislation, Articles of Association, objectives, vision and mission of the Company. In supporting these objectives, SPI has a Code of Conduct that regulates the ethical standards that must be held by every internal auditor, including:

1. Honest, objective, and earnest in performing their duties and fulfilling their responsibilities;
2. Loyal to profession, Company, and SPI unit;
3. Should not engage in actions or activities that may discredit the internal profession of the auditor or the Company;
4. Refrain from activities that may create a conflict of interest with the Company, or activities that may create prejudices that cast doubt on its ability to perform objectives and tasks objectively;
5. Not receiving any kind of remuneration from an inspected work unit, employee, or business partner of a Company that is reasonably suspected of professional consideration.;
6. Implement all of the assignments by taking advantage of his or her professional competence;



7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan Perusahaan;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan;
9. Mengungkapkan semua fakta untuk menghindari distorsi informasi dan praktik-praktik yang melanggar hukum;
10. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya serta mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

Pengembangan Kompetensi SPI

Dalam mengakomodasi kebutuhan audit internal yang dinamis, Perum Jasa Tirta II memberikan program pengembangan kompetensi bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) secara sistematis dan berjenjang melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Adapun pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal diselenggarakan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan audit. Sementara perkembangan kompetensi yang dilaksanakan secara internal dikelola oleh Perusahaan sendiri.

Informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang diikuti SPI selama tahun 2020 telah dimuat dalam Laporan Realisasi PKPT Tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2020

Program Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan ada RKT I, II, III, dan IV Tahun 2020 untuk mengetahui sejauh mana efektivitas unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan atas temuan dari auditor SPI, Kantor Akuntan Publik, serta BPK RI.

Berikut adalah laporan realisasi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-03/ SPI.DU/PW/1/2021 tanggal 5 Januari 2021.

7. Comply fully with the Internal Auditing Professional Standards, Company policies, and regulations;
8. Not utilizing any information obtained for personal gain, violating any law, or causing any harm to the Company;
9. Disclose all facts to avoid distorting information and unlawful practices;
10. Always improve the skills, effectiveness, and quality in implementing their duties and follow the continuing professional education.

SPI Competence Development

In accommodating the need for dynamic internal audits, Perum Jasa Tirta II provides a competency development program for Internal Audit Unit (SPI) systematically and tiered through competency development programs that are held internally and externally.

The development of competencies in external institutions is carried out through formal training in the form of courses or seminars/workshops related to audit issues and developments. Meanwhile, competency development that is carried out internally is managed by the Company.

Information on training and education that was participated in by SPI during 2020 was published in the 2020 PKPT Realization Report.

Internal Audit Implementation Report 2020

Monitoring and Evaluation Program

The monitoring and evaluation activities were carried out on RKT I, II, III, and IV in 2020 to identify the extent of the effectiveness of the work unit in following up on recommendations for improvement of the findings of the SPI auditors, the Public Accounting Firm, and BPK RI.

The followings are the reports on the realization of monitoring and evaluation carried out based on the Office Note No ND.344/SPI.DU/PW/11/2019 tanggal 5 Januari 2021.

Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2018 sampai dengan Triwulan IV 2020
Recapitulation of the Follow-Up Progress of BPK RI Findings from 2018 until Quarter IV of 2020

Uraian / Description	Temuan/Rekomendasi / Findings/ Recommendations	Telah Ditindaklanjuti / Followed-up	Sisa Temuan/ Rekomendasi / Remaining Findings/ Recommendations
Temuan / Findings	14	8	6
Rekomendasi / Recommendations	28	21	7

Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV 2020
Recapitulation of the Follow-Up Progress of BPK RI Findings from 2019 until Quarter IV of 2020

Uraian / Description	Jumlah / Total	Status Tindak Lanjut sampai dengan Triwulan IV 2020 / Status of Follow-up as of Quarter IV 2020	
		Closed	Open
Temuan Audit Kepatuhan KAP terhadap Pengendalian Internal sampai dengan Tahun 2020/ Audit Findings of Compliance of KAP to Internal Control until 2020	4	3	1
Management Letter Tahun 2020 / Management Letter in 2020	8	7	1

Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern Triwulan IV Tahun 2020
Recapitulation of the Follow-Up Progress of the Internal Audit Unit in Quarter IV of 2020

No.	Unit Kerja / Work Unit	Jumlah Temuan/ Number of Findings	Tindak Lanjut Monev Triwulan IV/2020 / Follow-up of Monev in Quarter IV/2020	Sisa Temuan/ Remaining Findings/
1.	Divisi Pengelolaan Proyek / Project Management Division	2	0	2
2.	Divisi SDM / HR Division	1	0	1
3.	Unit Wilayah I / Regional Unit I	1	0	1
4.	Unit Wilayah II / Regional Unit II	2	0	2
5.	Unit Wilayah IV / Regional Unit IV	5	2	3
6.	Unit Usaha PLTA / Regional Unit PLTA & EBT	3	0	3
7.	Unit Usaha Pariwisata & AMDK / Tourism & AMDK Business Unit	1	0	1
Jumlah / Total		15	2	13

Pembinaan Bidang dan Kegiatan Lain

Dalam menunjang kegiatan monitoring serta mendukung pemecahan masalah di bidang lain, SPI memenuhi tanggung jawabnya dengan berperan sebagai:

1. Counterpart auditor eksternal;
2. Konsultan berbagai permasalahan yang dihadapi unit kerjanya;
3. Pembina auditee yang berkaitan dengan materi hasil audit.

Other Activities and Coaching

In supporting monitoring activities and problem solving in other fields, SPI fulfills its responsibilities by acting as:

1. Counterpart of external auditors;
2. Consultants on various problems faced by the work unit;
3. Guiding auditees related to the results of the audit.

Pelaporan SPI

Selama tahun 2020, SPI telah menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu, di antaranya:

1. Laporan Hasil Audit masing-masing Unit Kerja Perum Jasa Tirta II;
2. Laporan Hasil Audit Intern Triwulan I, II, III & IV yang disampaikan kepada kepada Direktur Utama.
3. Laporan kaji ulang fungsi audit internal tahun 2020 oleh KAP Djoko, Sidik & Indra yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga kepada Direktur Utama serta Dewan Pengawas;

SPI Reporting

SPI had prepared and reported reports as its responsibilities in timely manner throughout 2020, among others:

1. Audit results report of each work unit of Perum Jasa Tirta II;
2. Quarter I, II, III & IV Internal Audit Report submitted to the President Director.
3. The 2020 Internal Audit Function review report by KAP Djoko, Sidik & Indra which was submitted to the Financial Services Authority and also to the President Director, Director of Compliance and Supervisory Board;



Kegiatan Audit Pasif

Selain mencermati kegiatan audit secara aktif, SPI juga melaksanakan kegiatan Audit Pasif (*off-site*), antara lain:

1. Mencermati dan mengevaluasi proses bisnis perusahaan untuk bidang yang lebih spesifik;
2. Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Pelanggan;
3. Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik internal maupun eksternal.

Penanganan Penyimpangan Internal

Potensi atau risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan selalu menjadi prioritas yang turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan audit internal. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perusahaan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dalam mengantisipasi potensi tersebut, Perusahaan menerapkan sistem pengawasan melalui organ SPI dalam integrasi fungsi audit internal yang dijalankan.

Berbekal Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk, Perusahaan memiliki komitmen kuat dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pejabat atau pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang memengaruhi kondisi keuangan Perusahaan secara signifikan. Upaya realisasi atas komitmen tersebut diwujudkan dalam upaya penyelesaian permasalahan penyimpangan internal sesuai dengan kerangka aturan yang berlaku dan upaya tindak lanjut secara adil dan tunduk pada prinsip-prinsip GCG serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Passive Audit Activities

In addition to actively observing the audit activities, SPI also held passive (*off-site*) audit as follows:

1. Observed and evaluated company business processes for more specific fields;
2. Monitored the completion of the Customer Complaints Report;
3. Monitored and reviewed the follow-up of audit results, both internal and external.

Internal Violation Management

The potential or risk caused by violations or fraud in each of the Company's operational activities is always a priority that is also a concern in the implementation of internal audit. Internal violation can originate from individuals in the Company at various levels who aim to gain personal profit. In anticipating this potential, the Company implemented a monitoring system through the SPI organ in the integration of the internal audit function.

Armed with the established Internal Control System, the Company has a strong commitment in preventing the occurrence of violation or fraud committed by officials or management, permanent and non-permanent employees related to work processes and operational activities that significantly affect the Company's financial condition. Efforts to realize this commitment are manifested in efforts to resolve internal deviance problems in accordance with the applicable regulatory framework and fair follow-up efforts and are subject to GCG principles and applicable laws and regulations.

AUDIT EKSTERNAL

EXTERNAL AUDIT

Penguatan terhadap independensi dan akuntabilitas pemeriksaan audit dilakukan dengan melibatkan Auditor Eksternal. Auditor eksternal dalam hal ini merupakan pihak independen profesional dalam melakukan audit, baik audit laporan keuangan, audit terkait mutu (Sistem Manajemen Mutu), audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesejahteraan (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, hatan Kerja (SMK3), maupun kegiatan audit lainnya.

Khusus dalam menangani audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan prosedur penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kriteria independensi dan bebas benturan kepentingan, standar profesional akuntan publik, dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang wajib dipenuhi oleh KAP.

Ruang Lingkup Audit Kantor Akuntan Publik

1. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Laba Komprehensif
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian internal yang ditemukan selama audit dalam bentuk *Management Letter* & laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian Internal.
3. Jasa lainnya
 - Laporan *review* penilaian tingkat kesehatan
 - Laporan *review* atas laporan *key performance indicators*
 - Laporan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Strengthening the independence and accountability of audit audits is carried out by involving External Auditors. The external auditor in this case is a professional independent party in conducting audits, both financial report audits, quality-related audits (Quality Management Systems), ISO 9001: 2015 and ISO 37001: 2016 Safety Management Systems audits and Quality Management Systems (SMK3).), as well as other audit activities.

Specifically in handling financial report audits, the Company appoints a Public Accountant Firm (KAP) with due observance of the appointment procedure in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, the criteria for independence and conflict of interest free, professional standards of public accountants, and cooperation agreements and audit scope must be fulfilled by KAP.

Scope of Public Accounting Firm Audit

1. An audit of the Financial Statements for the year ended 31 December 2020, aims to provide an accountant's opinion on the fairness of the financial statements which includes:
 - Statement of Financial Position
 - Comprehensive Income Report
 - Statement of Changes in Equity
 - Cash flow statement
 - Notes on Financial Statements
2. Provide recommendations on weaknesses in the internal control structure found during the audit in the form of a Management Letter & report on compliance with laws and regulations and internal control.
3. Other services
 - Health level assessment review report
 - Review reports on key performance indicators
 - Report on the management of the Partnership and Community Development Program (PKBL) funds



Akuntan Publik dan Fee dalam 5 Tahun Terakhir

Berikut informasi Kantor Akuntan Publik dan komisi (fee) yang diberikan dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Public Accountant and Fee in the Last 5 Years

The following is information on the Public Accounting Firm and the commissions (fees) given in the last 5 (five) years :

Tahun / Year	Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Akuntan Publik / Public Accountant	Biaya (dalam Rp) / Fee (in Rp)	Opini / Opinion
2020	KAP Djoko, Sidik & Indra	Drs. Abubakar Sidik, MS., CA., CPA.	417.450.000	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / Unmodified opinion with other matters paragraph
2019	KAP Djoko, Sidik & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA	434.293.000	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Drs. Djoko Sutardjo, Ak., CA., CPA	373.450.000	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2017	KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan	Drs. Salam Manan, Ak., MM, CPA., CA	402.902.500	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / Unmodified opinion with other matters paragraph
2016	KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan	Drs. Salam Manan, Ak., MM, CPA., CA	405.900.000	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / Unmodified opinion with other matters paragraph

Auditor Eksternal

Selain Kantor Akuntan Publik, terdapat juga Auditor Eksternal lain yang melakukan audit sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perum Jasa Tirta II, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang salah satu tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada bidang kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN) di antaranya melalui audit atas kinerja Perusahaan dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

External Auditors

Apart from the Public Accounting Firm, there are also other External Auditors who carry out audits in connection with the implementation of Perum Jasa Tirta II's business activities, namely the Supreme Audit Agency (BPK RI), one of which is to examine the management and responsibility of State finances in the sector of separated State assets (BUMN) including through an audit of the Company's performance and / or an examination with a specific purpose.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan suatu Perusahaan. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tepat dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara Efisien, Efektif, dan Ekonomi (3E), mengamankan investasi dan aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian.

Ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengharuskan Direksi BUMN menetapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu BUMN strategis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, berkomitmen menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif yang diawali dengan merancang dan menetapkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal berdasarkan lampiran VIII Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Nomor 1/DP/68/KBS/10/2019 – KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat menjaga dan mengamankan aset Perusahaan, mengurangi dampak/kerugian penyimpangan termasuk kecurangan fraud; menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan

Internal Control System is an important instrument in the management of a company. Implementing the right Internal Control System can support the Board of Directors in managing the Company's business Efficiently, Effectively, and Economically (3E), securing the Company's investment and assets, ensuring reliable financial reporting, enhancing compliance with the prevailing laws and regulations, as well as reduce the risk of loss.

Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-OOIMBU/2012 on Amendment of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) jo. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Good Corporate Governance, require the Board of Directors of SOEs to establish an effective internal control system to secure the investment and assets of SOEs.

In this regard, Perum Jasa Tirta II as one of the strategic SOEs in the field of Water Resources Management, is committed to implementing an effective Internal Control System which begins with designing and establishing General Guidelines for Internal Control Systems based on attachment VIII of the Joint Decree of the Board of Supervisors and Directors of Perum Jasa Tirta II concerning Good Corporate Governance Number 1 / DP / 68 / KBS / 10/2019 - KBS-01 / DIR / 10/2019 dated 30 October 2019.

Purpose of Internal Control

The Internal Control System is an integrated process and attached to the actions and activities undertaken continuously by the leaders and all employees to provide reasonable assurance on achieving the objectives of the organization of the Company through effective and efficient activities, ensuring security in the management of Company's property, reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations.

The purpose of the Internal Control System is as a framework of the organization and working procedures of financial and non-financial operations that can guarantee that any implementation of activities within the Company can safeguard and secure the Company's assets; reduce financial impacts/loss, irregularities including fraud; to ensure the implementation of all business activities of PJT II II is in accordance with prevailing laws and regulations; providing a valid,



yang berlaku; menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan; meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada organisasi secara menyeluruh.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengelolaan Perusahaan, antara lain Dewan Pengawas, Direksi, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Pejabat, dan karyawan Perum Jasa Tirta II, dan pihak eksternal lainnya yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang andal dan efektif, agar tujuan keterlibatan mereka terjaga secara aman, berhasil guna, dan berdaya guna.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kerangka sistem pengendalian internal PJT II telah sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal PJT II dalam membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Adapun sistem pengendalian internal PJT II terdiri dari lima unsur pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk kondisi yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengembangkan dan melaksanakan kompetensi, independensi, integritas, serta patuh pada peraturan yang berlaku di Perusahaan;
2. Penilaian Risiko merupakan tindakan untuk menentukan pengaruh negatif suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan bila terjadi akan menghalangi pencapaian tujuan perusahaan;
3. Kegiatan Pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada secara konsisten dipatuhi;
4. Informasi dan Komunikasi yang meliputi unsur pengendalian yaitu penggunaan informasi yang relevan, komunikasi internal, dan eksternal;
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal pada Perusahaan berjalan dengan baik.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal PJT II merupakan kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat :

1. Menjaga dan mengamankan aset perusahaan;
2. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis PJT II sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

complete, and timely financial and management information; improve efficiency, effectiveness, and economics in PJT II operational activities; improve the effectiveness of risk management in organizations as a whole.

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the management of PJT II, among others: Supervisory Board, Board of Directors, Internal Control Unit (SPI), Officials, and employees of PJT II, and other external parties having an interest in the implementation of the Company's Internal Control that is reliable and effective, so that their engagement objectives are secure, effective, and efficient.

Internal Control System Framework

The framework of PJT II internal control system complies with the internationally recognized framework, i.e. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). According to COSO, the internal control system is a process involving the Supervisory Board, Board of Directors, and other personnel. This is in line with the internal control system of PJT II in establishing an organizational control system by involving all available resources. PJT II internal control system consists of five control elements, they are:

1. Control Environment embodied in the form of conditions that can create a conducive working atmosphere, develop and implement competence, independence, integrity, and compliance with applicable regulations in the Company;
2. Risk Assessment is an action to determine the negative influence of an event that is not expected and if it occurs will hinder the achievement of corporate objectives;
3. Control Activities shall include the establishment of control policies and procedures, as well as verification processes to ensure that existing policies and procedures are consistently adhered to;
4. Information and Communication that includes controlling elements, which is the use of relevant information, internal and external communication;
5. Monitoring Internal Control System to ensure that the internal control system in the Company is running well.

Financial and Operational Control System

The internal control system of PJT II is an organizational framework and working procedure of financial and nonfinancial operations that can guarantee that any implementation of activities within the Company will be able to :

1. Maintaining and securing the Company's assets;
2. Reduce the impact of financial/loss, irregularities including fraud;
3. Ensure the implementation of all business activities of PJT II in accordance with applicable laws and regulations;

4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional PJT II;
6. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) pada organisasi secara menyeluruh.

Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2020

Dalam pemantauan sistem pengendalian internal, terdapat tiga komponen yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta evaluasi dan komunikasi kelemahan untuk perbaikan.

Sepanjang tahun 2020, PJT II telah melaksanakan monitoring evaluasi di mana dilakukan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan operasional Perusahaan. Evaluasi tersebut mencakup proses penilaian atas capaian kualitas pengendalian intern dalam jangka waktu satu tahun buku. Kemudian dilakukan evaluasi terpisah oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PJT II dan pihak eksternal yaitu auditor eksternal serta dilakukan audit atau self assessment yang diidentifikasi oleh SPI dan pihak lain untuk dilaporkan kepada Direksi.

4. Providing a valid, complete, and timely financial and management information;
5. Improve efficiency, effectiveness, and economics in operational activities of PJT II;
6. Increase the effectiveness of risk management in the organization as a whole.

Evaluation on the implementation of Internal Control System in 2020

In monitoring the internal control system, there are three components: continuous evaluation, separate evaluation, and evaluation and communication of weakness to be improved.

Throughout 2020, PJT II has done monitoring evaluation where an assessment was conducted on the quality of internal control system performance continuously and united in the Company's operational activities. The evaluation includes a process of assessing the quality performance of internal control within a period of one fiscal year. Then a separate evaluation was conducted by the Internal Control Unit of PJT II and external parties, which was the external auditor, and then an audit or self-assessment was conducted identified by PKRSM Division, Human Resources Division, SPI, and other parties to be reported to the Board of Directors.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

Perusahaan berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dalam berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan etika guna memenuhi tanggung jawabnya kepada para Pemangku Kepentingan dan Pemilik Modal.

Untuk itu, Perum Jasa Tirta II senantiasa menjaga hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingannya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Hubungan baik tersebut dilaksanakan dalam kaidah undang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan terdiri dari :

The Company is committed to always abide by and comply with applicable laws and regulations and uphold the Company's values in interacting and behaving in accordance with ethics in order to fulfill its responsibilities to both stakeholders and Capital Owners.

Therefore, Perum Jasa Tirta II always maintains good relations with all stakeholders in order to maintain business continuity. Such good relations are carried out in the rules of laws and regulations. Stakeholders are parties who have an interest in the Company either directly or indirectly. The Company's Stakeholders consist of :



- **Stakeholder Primer**
Stakeholder primer merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung pada suatu kebijakan, program, dan proyek Perusahaan. Tanpa partisipasi berkelanjutan dari stakeholder primer, Perusahaan tidak dapat bertahan. Adapun contoh stakeholder primer yaitu Pemilik Modal (Kementerian BUMN, Kementerian PUPR), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen (PDAM DKI Jakarta, PDAM Kabupaten/Kota, PLN, dan konsumen lainnya), penyalur, pesaing atau rekanan.
- **Stakeholder Sekunder**
Stakeholder sekunder tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Akan tetapi, pihak ini memiliki kepedulian (*concern*) sehingga turut berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal Pemerintah. Stakeholder ini juga didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Perusahaan tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan Perusahaan. Adapun yang termasuk dalam stakeholder sekunder adalah Pemerintah setempat (Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemda Kab. Purwakarta, pemerintah asing (JICA), kelompok sosial (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), media massa, dan pihak lainnya.
- **Stakeholder Kunci**
Stakeholder kunci memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Adapun yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah Pemerintah Kabupaten (Pemprov DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Karawang, DPRD, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan).
- **Primary Stakeholder**
The primary stakeholder is a key determinant in the decision-making process as it has a direct interest in a Company's policies, programs, and projects. Without the ongoing participation of the primary Stakeholders, the Company could not survive. Examples of primary Stakeholders are capital owner (Ministry of State Owned Enterprises, Ministry of PUPR), creditors, employees, suppliers, consumers (PAM DKI Jakarta, local water company, State Electricity Company, etc.), distributors, competitors, or partners.
- **Secondary Stakeholder**
Secondary stakeholders have no direct interest in a policy, program, or project. However, this party has a concern that also affects the public attitudes and legal decisions of the government. These stakeholders are also defined as those affecting or influenced by the Company but they are not involved in transactions with the Company. Secondary stakeholders include local government (Provincial Government of DKI Jakarta, West Java Provincial Government, Purwakarta District Government), foreign government (JICA), social group (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), mass media, and so on.
- **Key Stakeholder**
Key stakeholders have legal authority in terms of decision-making. The stakeholder in question is the executive element according to its level, legislative, and institution. Included in key stakeholders: the district government (Provincial Government of DKI Jakarta, Bekasi City Government, Bekasi District Government, Karawang District Government), DPRD and the agency directly supervises the project concerned.

Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan stakeholders, Perusahaan harus memperhatikan pola hubungannya, antara lain :

- Pola hubungan Perusahaan dengan pemilik pemangku kepentingan seperti Pemilik Modal bersifat pola hubungan yang proaktif (*proactive*), di mana Perusahaan cenderung berusaha untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan para stakeholders. Hal ini diimplementasikan dengan membentuk departemen khusus yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan:
 - o Bidang Hubungan Masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hubungan Perusahaan dengan para stakeholders, media massa, LSM, dan masyarakat pada umumnya.
 - o Government Relation Officer yang berfungsi sebagai pejabat yang ditunjuk khusus untuk menjadi penghubung antara Perusahaan dengan stakeholders Pemerintah seperti Kementerian PUPR, Kementerian BUMN maupun instansi Pemerintah lainnya.
 - o Perusahaan juga membentuk tim-tim khusus yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu
- **Relationship Pattern with Stakeholders**
To achieve a balance in the management of Stakeholders, the Company must pay attention to the pattern of its relationship, among others :
 - The pattern of the Company's relationships with stakeholders such as capital owner is a proactive relationship pattern; The Company tends to anticipate the interests of stakeholders. This is implemented by forming a special department under the Corporate Secretary:
 - o Public Relations that serves to maintain the continuity of the Company's relationships with stakeholders, mass media, NGOs, and the public at large.
 - o Government Relation Officers are specially appointed officials to serve as liaison between the Company and government stakeholders such as the Ministry of PUPR, the Ministry of SOEs, and other government agencies.
 - o The Company also sets up special teams that serve to identify issues of concern to

- yang menjadi para pemangku kepentingan utama, contohnya Tim Pengembangan Wilayah, Tim Pembentukan Anak Perusahaan, Tim Percepatan Proyek SPAM Jatiluhur, dan sebagai sebagainya.
- Pola Hubungan yang Interaktif (*interactive*) tercermin antara hubungan Perusahaan dengan para pelanggannya. Dengan adanya Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan serta kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap semester, Perusahaan menggunakan pendekatan interaktif untuk mendapatkan masukan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Perusahaan juga membuka komunikasi dengan para stakeholders melalui berbagai media (surat, telepon, email, media sosial) serta memiliki prosedur untuk menangani keluhan dari para stakeholders khususnya pelanggan, yaitu dengan ditetapkannya Prosedur No. 37 tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk:

- o Mengetahui respons stakeholders maupun pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
- o Menangani dan mengevaluasi keluhan pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
- o Menjadikan umpan balik pelanggan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

key stakeholders. Examples are Regional Development Teams, Subsidiary Development Team, Project Acceleration Team of SPAM Jatiluhur, and so forth.

- Interactive Relationship Pattern (*interactive*); also reflected the relationship between the Company and its customers. With the Commercial and Customer Service Division satisfaction survey activities conducted every semester, the Company uses an interactive approach to get inputs and meet the customer needs.

The Company also opened communication with stakeholders through various media (letters, phone, email, social media) and has procedures to handle complaints from stakeholders especially customers, that is by stipulation of Procedure no. 37 of 2018. It aims to:

- o Know the response of stakeholders and customers to products and services of PJT II;
- o Handle and evaluate customer complaints against PJT II products and services;
- o Make customer feedback as a management decision-making material in improving the Company's performance.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Pelaksanaan aktivitas bisnis Perusahaan tidak terlepas dari berbagai eksposur risiko yang memiliki potensi dampak terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam mengantisipasi risiko tersebut, Perum Jasa Tirta II memiliki Sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagai salah satu komponen penting dalam manajemen Perusahaan dan memastikan Perusahaan dalam keadaan sehat, aman, dan baik, sehingga seluruh aktivitas usaha dapat membawa Perusahaan pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perum Jasa Tirta II memiliki komitmen kuat yang secara berkelanjutan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yang terpadu dan komprehensif, yang bertujuan untuk melindungi Perusahaan dari risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

The implementation of the Company's business activities is inseparable from various risk exposures that have the potential impact on the Company's business sustainability. In anticipating these risks, Perum Jasa Tirta II has an effective Risk Management System as one of the important components in the management of the Company and ensures that the Company is in a healthy, safe, and good condition, so that all business activities can bring the Company to the stated mission and objectives.

Perum Jasa Tirta II has a strong commitment to continuously develop and improve the framework of an integrated and comprehensive risk management system, which aims to protect the Company from risks that negatively impact the achievement of objectives and explore opportunities to increase benefits for all stakeholders.



Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, Perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan praktik terbaik manajemen risiko di seluruh kegiatan operasional, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Seluruh elemen Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan risiko dengan risikonya masing-masing, sehingga dalam mendukung keberhasilannya dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mengatur setiap prosedur dan mekanisme manajemen risiko. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan Perusahaan;
2. Menjadikan Manajemen Risiko sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) berbasis risiko untuk mencapai realisasi setiap proses secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kesadaran budaya risiko dalam keseharian kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik bisnis perusahaan dan pengambilan keputusan;
4. Menjadikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (*risk based audit*) dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas;
5. Menginformasikan, mengelola, dan melakukan pengendalian serta penanganan (mitigasi) risiko secara berkala sebagai dasar upaya perbaikan berkesinambungan dalam penerapan manajemen risiko.

Pengelola Manajemen Risiko

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perum Jasa Tirta II belum membentuk Komite Manajemen Khusus, namun pengelolaannya dilakukan oleh Pengendali Kinerja, Risiko & Sistem Manajemen (PKRSM). Adapun pembagian fungsi organ Perusahaan dalam pengelolaan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

Risk Management Policy

In optimizing the effectiveness and efficiency of risk management, the Company is faced with the need to implement risk management best practices in all operational activities, both in the internal and external environments. All elements of the Company have a role in managing risk with their respective risks, so that in supporting its success requires policies that govern each procedure and mechanism of risk management. These policies include:

1. Implement Risk Management in an integrated manner in accordance with Good Corporate Governance to achieve the Company's Vision, Mission and objectives;
2. Making Risk Management as the basis for the preparation of a risk-based Corporate Budget Work Plan (RKAP) to achieve the realization of each business process effectively and efficiently;
3. Increase awareness of risk culture in daily work so that it becomes an integrated part of the Company's business practices and decision-making;
4. Making the results of identification, analysis, evaluation, and handling of risks as the basis for inspection and supervision (*risk based audit*) in order to improve performance and accountability;
5. Inform, manage, and control and periodically mitigate risks as a basis for continuous improvement efforts in implementing risk management.

Risk Management Manager

As of the end of 2020, Perum Jasa Tirta II has not yet established a Special Management Committee, however its management is carried out by the Performance Control & Management System (PKRSM). The division of functions of the Company's organs in managing risk management is as follows :

Fungsi Organ Perum Jasa Tirta II dalam Pengelolaan Manajemen Risiko
Organ Function of Perum Jasa Tirta II in Managing Risks

Organ Perusahaan / Company Organ	Fungsi / Function
Direksi / Directors	Menjamin penyediaan sistem manajemen risiko serta pembinaan dan evaluasi penerapannya. / Ensure the provision of risk management systems as well as guidance and evaluation of its implementation
PKRSM	Tugas dan fungsi Unit Kerja Pengelolaan Risiko Perusahaan sebagai berikut: / The duties and functions of the Company's Risk Management Unit are as follows: 1) Mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan; / Develop and monitor the implementation of the Company's overall risk management; 2) Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Perusahaan; / Supervise how business functions are carried out in the scope of risk management policies determined by the Company; 3) Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan secara menyeluruh kepada Direksi. / Monitor and report the Company's risks as a whole to the Board of Directors.

Organ Perusahaan / Company Organ	Fungsi / Function
	Wewenang dan tanggung jawab Unit Kerja Pengelolaan Risiko Perusahaan meliputi: / The authority and responsibilities of the Company's Risk Management Work Unit include: 1) Mengembangkan, memelihara, mengevaluasi validitas dan kapasitas sistem manajemen risiko Perusahaan; / Develop, maintain, evaluate the validity and capacity of the Company's risk management system; 2) Membuat format dan formula kriteria risiko korporat serta kriteria risiko unit kerja, selanjutnya mengusulkan kepada Direksi; / Formulate corporate risk criteria and work unit risk criteria, then propose them to the Board of Directors; 3) Menjadi fasilitator dan katalisator dalam penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi yang dilakukan oleh para RTU. Selanjutnya memastikan bahwa para RTU serta jajarannya memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola risiko sesuai ketentuan dalam Pedoman Manajemen Risiko; / Serve as a facilitator and catalyst in the implementation of the integrated risk management system conducted by the RTU. Furthermore, ensure that RTUs and their staff have sufficient competence to manage risk in accordance with the Risk Management Guidelines; 4) Mengevaluasi register risiko berikut evidence pengendalian risiko yang dilaporkan RTU dengan membandingkan Laporan Hasil Audit RTU oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), KPI RTU, Peraturan dan Kebijakan, serta hasil kajian perusahaan terkini; / Evaluate the risk register along with evidence of risk control reported by RTU by comparing the RTU Audit Report by the Internal Audit Unit (SPI), RTU KPI, Regulations and Policies, and the results of the latest company reviews; 5) Memberikan feedback kepada RTU dan hasil evaluasi register risiko kepada SPI sebagai masukan pelaksanaan Audit Berbasis Risiko; / Provide feedback to RTU and the results of risk register evaluation to SPI as input for the implementation of Risk Based Audit; 6) Melakukan proses learning from experience melalui manajemen peristiwa kerugian (Loss Event Management) secara berkala dan konsisten; / Regularly and consistently conduct a learning process from experience through loss event management; 7) Menyusun, memelihara, memantau dan mengkaji perkembangan status risiko korporat sesuai dinamika perubahan database risiko yang dilaporkan para RTU. Selanjutnya melaporkan kepada Direksi secara menyeluruh dalam bentuk profil/portfolio risiko; / Develop, maintain, monitor and assess developments in the status of corporate risk in accordance with the dynamics of changes in the risk database reported by RTUs. Furthermore, report to the Board of Directors as a whole in the form of risk profile/portfolio; 8) Mengevaluasi aplikasi sistem manajemen risiko melalui pemantauan dan kaji ulang terhadap laporan pengelolaan risiko oleh RTU serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistem kepada Direksi; / Evaluate the implementation of the risk management system through monitoring and review of risk management reports by RTU and recommending steps to improve the system to the Board of Directors; 9) Memberikan opini/kajian terhadap semua kebijakan perusahaan, tindakan korporat (corporate action), dan penempatan investasi dari sudut pandang manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan strategis oleh Direksi. / Providing opinions/studies on all company policies, corporate actions, and investment placement from a risk management perspective to support strategic decision making by the Directors.
Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Internal Audit Unit (SPI)	SPI melakukan assurance (jaminan atau kepastian) secara independen bahwa sistem dan prosedur dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan dan bertanggung jawab untuk: / SPI independently provides assurance that the systems and procedures are carried out properly and in accordance with the regulations and is responsible for: 1) Melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan; / Reviewing and evaluating the overall risk management design and implementation; 2) Memastikan bahwa risiko yang dilaporkan oleh RTU dan yang menjadi isu pada saat dilaksanakan audit telah dikelola dengan baik termasuk menguji efektivitas atas pelaksanaan perlakuan risiko; / Ensuring that the risks reported by the RTU and those that become issues at the time of the audit are well managed including testing the effectiveness of the risk treatment; 3) Melakukan verifikasi atas kualitas proses asesmen risiko, status perlakuan risiko, dan pelaporan risiko. / Verifying the quality of the risk assessment process, the status of risk treatment, and risk reporting.



Organ Perusahaan / Company Organ	Fungsi / Function
Seluruh Unit Kerja / All Work Units	1) Menentukan konteks kegiatan pada Unit Kerja sebagai dasar bagi proses asesmen risiko; / Determine the context of activities in the Work Unit as the basis for the risk assessment process; 2) Memahami karakteristik setiap risiko yang melekat pada rangkaian kegiatan agar perlakuan risiko (risk treatment) dapat berjalan efektif dalam rangka lebih memastikan pencapaian sasaran dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan; / Understand the characteristics of each inherent risk in a series of activities so that risk treatment may run effectively in order to better ensure the achievement of the targets and Key Performance Indicator (KPI) that have been set; 3) Memastikan bahwa perlakuan risiko berlangsung secara tepat biaya (cost-effective); / Ensure that risk treatment takes place in a cost-effective manner; 4) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan satu orang bawahan kepada Direksi melalui Unit Kerja pengelola risiko Perusahaan, untuk diangkat sebagai risk officer guna dilatih secara khusus dan berjenjang agar dapat memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Unit Kerja masing-masing; / The Head of the Work Unit proposes one subordinate to the Board of Directors through the Work Unit of the Company's risk management to be appointed as a risk officer to be trained in special and tiered manner so that they can provide technical assistance in the implementation of the risk management process in their respective Work Units; 5) Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi ke dalam setiap sistem manajemen atau proses bisnis yang dijalankan oleh Unit Kerja yang dipimpinnya; / Ensure that the risk management process is integrated into every management system or business process carried out by the Work Unit it leads; 6) Memastikan bahwa pemantauan terhadap dinamika status risiko dapat terlaksana secara reguler melalui rapat koordinasi pada Unit Kerja yang dipimpinnya dan melaporkan apabila terjadi kejadian risiko dan tindakannya; / Ensure that monitoring of the dynamics of risk status can be carried out regularly through coordination meetings at the Work Unit it leads and reporting when a risk event and its actions occur; 7) Mampu menunjukkan adanya pengendalian risiko yang efektif, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian risiko tersebut; / Able to show effective risk control, and also the monitoring and transparency of the effectiveness of risk control; 8) Melaporkan secara berkala profil risiko RTU kepada Unit Kerja pengelola risiko Perusahaan; / Regularly reports RTU risk profiles to the Company's risk management Work Unit; 9) Melaporkan secara sistematis (jelas, wajar, dan tepat waktu) kepada Direksi setiap perubahan konteks (lingkungan) bisnis atau kejadian risiko yang dapat memicu perubahan profil risiko pada Unit Kerja yang dipimpinnya, melalui Unit Kerja pengelola risiko Perusahaan. / Report systematically (clearly, fairly, and in a timely manner) to the Board of Directors of any changes in the context (environment) of the business or risk events that can trigger changes in the risk profile in the Work Unit they lead, through the Company's risk management Work Unit.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan akhir tahun 2020, karyawan Perum Jasa Tirta II belum memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko.

Risk Management Certificate

As of the end of 2020, employees of Perum Jasa Tirta II does not have Risk Management Certification.

Roadmap Manajemen Risiko

Perusahaan telah menetapkan arah pengembangan manajemen risiko dengan mengacu pada roadmap manajemen risiko 2015 – 2020

Risk Management Roadmap

The company has set a risk management development direction by referring to the risk management roadmap 2015 - 2020

Infrastruktur Manajemen Risiko

Penyusunan infrastruktur dan proses manajemen risiko menjadi perangkat bagi Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam setiap proses bisnis Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi Perusahaan untuk memetakan potensi peluang maupun kerugian, sehingga proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan dapat menimbang serta mengefektifkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Risk Management Process and Infrastructure

The preparation of infrastructure and risk management processes are tools for the Company to identify, measure, monitor, and report potential risks faced in each of the Company's business processes. This aims to provide a comprehensive picture for the Company to map potential opportunities and losses, so that the decision making process and policy formulation can balance and make effective every policy and decision taken.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di lingkungan Perum Jasa Tirta II berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN tentang tata kelola perusahaan yang sehat dan praktik manajemen risiko yang berlaku umum dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Adapun proses dan penerapan manajemen risiko Perum Jasa Tirta II dibagi menjadi proses dasar, proses inti, dan proses penunjang.

Proses Dasar

Proses dasar manajemen risiko meliputi kegiatan membangun lingkungan intern yang kondusif untuk berlangsungnya proses risiko berikutnya, serta menyusun konteks untuk menempatkan proses inti manajemen risiko. Dalam mendukung proses dasar tersebut, PJT II telah memiliki aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada simrisk.jasatirta2.co.id. Adapun dalam implementasi proses dasar, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Dalam membangun lingkungan manajemen risiko, Direksi menetapkan kebijakan/pedoman manajemen risiko, membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko melalui sosialisasi kepada risk owner, menyiapkan organisasi/fungsi yang menangani manajemen risiko serta menyediakan sumber daya yang menangani manajemen risiko.
- Dalam penyusunan konteks risiko, Divisi PKRSM dan/atau risk owner menyusun dan mempelajari hubungan/kaitan peristiwa risiko yang mungkin terjadi terhadap sasaran kegiatan rutin maupun kegiatan non rutin (proyek/investasi) sebagai dasar kegiatan identifikasi risiko.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan strategi perusahaan dan perlu pengelolaan secara berlanjut terhadap kemungkinan terjadinya, dampak, serta pengaruhnya bagi kelangsungan usaha perusahaan untuk kemudian dikelompokkan dalam risiko strategis.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan kegiatan tertentu dari operasional tahunan perusahaan dan pengelolannya diperlukan sesuai dengan tingkat kualitas nilai risikonya, dikelompokkan dalam risiko operasional.
- Risiko strategis maupun risiko operasional secara tertulis dikompilasi dalam Dokumen Register Risiko.
- Konteks risiko digunakan untuk menetapkan level kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang dikaitkan dengan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

Proses Inti

Proses inti manajemen risiko secara garis besar meliputi kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko, serta tanggapan/tindak lanjut terhadap risiko. Setelah melalui tahap analisis dan evaluasi risiko, Perusahaan menyusun rencana tindakan untuk memitigasi risiko yang nilainya tinggi dengan mengacu pada daftar atau register risiko serta risiko strategis perusahaan. Rencana tindakan ini digunakan sebagai bahan analisis manfaat dan biaya sebelum manajemen memutuskan memberikan tanggapan/perlakuan terhadap risiko. Berikut adalah proses dan penerapan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II :

The implementation and development of risk management in the environment of Perum Jasa Tirta II refer to the Regulation of the Minister of SOEs regarding sound corporate governance and risk management practices that are generally accepted and can be implemented effectively and efficiently. The process and application of Perum Jasa Tirta II risk management is divided into basic processes, core processes and supporting processes.

Basic Process

The basic process of risk management includes activities to build an internal environment that is favorable to subsequent risk processes, as well as setting the context for placing the core process of risk management. In supporting the basic process, PJT II has a web-based application that can be accessed at simrisk.jasatirta2.co.id. As for the implementation of the basic process, matters that need to be considered include:

- In establishing the risk management environment, the Board of Directors establishes risk management policies/ guidelines, raises the awareness and maintains risk conscious culture through socialization to risk owners, prepares organizations/functions that handle risk management, and provides resources that handle risk management.
- In preparing risk context, PKRSM Division and/or risk owner develops and examines the association of risk events that may occur to routine and non-routine (project/ investment) objectives as the basis for risk identification activities.
- The risk of routine activities that are linked to corporate strategy and the need for ongoing management of the likelihood of occurrence, impact, and impact on the viability of the enterprise, and grouped under strategic risk.
- The risk of routine activities linked to certain activities of the Company's annual operations and their management is required in accordance with the level of risk quality, grouped into operational risk.
- Strategic risk and operational risk, in writing is compiled in the Risk Register Document.
- The risk context is used to determine the level of both qualitative and quantitative criteria associated with the level of impact and the likelihood of risk occurrence.

Core Process

The core risk management process outlines the activities such as: Identifying Risks, Risk Analysis and Risk Evaluation, and Providing Risk Response/Treatment. After the risk analysis and evaluation phase, an action plan is needed to mitigate the high value risk that refers to the list or risk register and strategic risk of the Company. This action plan is used as a benefit and cost benefit analysis before management decides to provide risk responses/treatment. The following is the process and implementation of Perum Jasa Tirta II Risk Management :



1. Pelaksanaan Identifikasi Risiko

- Identifikasi risiko dilaksanakan dengan mengamati indikasi risiko, sumber dan penyebab terjadinya risiko, jenis kegiatan yang terpengaruh risiko, akibat dan konsekuensi (biaya) bila terjadi risiko tersebut, serta pendokumentasian risiko.
- Indikasi risiko dideteksi dari masalah yang timbul di masa lalu atau selama periode berjalan, baik kasus-kasus internal maupun kasus eksternal yang sejenis, tingkat kerumitan proses suatu kegiatan, adanya perubahan peraturan atau perubahan proses kegiatan, serta opini pakar dan masyarakat.
- Sumber risiko secara garis besar dapat berasal dari risiko lingkungan, risiko proses, dan risiko informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan ISO 31000:2018. Risiko proses dan risiko informasi merupakan risiko internal perusahaan yang umumnya masih dalam kendali manajemen (*controllable*). Risiko lingkungan sebagian besar berasal dari eksternal yang umumnya bersifat di luar kendali manajemen (*uncontrollable*).
- Risiko yang sifatnya *controllable* dapat disusun action plan-nya secara langsung, sedangkan risiko yang sifatnya *uncontrollable* perlu dilaporkan atau dikoordinasikan dengan pejabat eksternal yang terkait.
- Risiko yang diidentifikasi adalah risiko awal (risiko *inherent*) yang belum ditindaklanjuti dengan action plan.

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

- Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko digunakan untuk mengetahui tingkat besarnya risiko yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh risiko terhadap tujuan perusahaan, serta untuk menyusun prioritas risiko yang memerlukan perlakuan tertentu.
- Besaran nilai risiko merupakan hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan taksiran besarnya nilai dampak bila peristiwa risiko benar-benar terjadi.
- Nilai risiko dinilai melalui perhitungan Nilai Kemungkinan dan Nilai Dampak. Nilai Kemungkinan yang dimaksud adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan Nilai Dampak adalah penilaian dampak dari risiko yang dapat diukur dari sasaran atau tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI).

3. Penilaian Tingkat Risiko

- Penilaian risiko ditentukan dengan perkalian antara nilai kemungkinan dan nilai dampak. penilaian tingkat risiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan risiko.
- Skala rating untuk kolom kemungkinan terjadinya dan kolom dampak dari peristiwa risiko yang paling kecil dimulai dengan level 1 sedangkan yang paling besar dinilai dengan level 5, karena rumus/notasi risiko adalah nilai dampak dikalikan nilai kemungkinan maka nilai peristiwa risiko berkisar antara 1 sampai dengan 25.

1. Implementation of Risk Identification:

- Risk identification is carried out by observing the risk indication, the source and cause of the risk occurrence, the type of activity affected by the risk, impact and consequences (costs) in the event of such risk, and risk documentation.
- Risk indications are detected from problems that have occurred in the past or during the period, both internal cases and similar external cases, the complexity of an activity process, changes in regulatory or activity process changes, and expert and community opinion.
- Risk sources are broadly derived from environmental risks, process risks, and information risks for decision-making based on ISO 31000:2018. Risks of process and information are Company's internal risks that are generally controllable. Environmental risks mostly come from external ones that are generally beyond the control of management, or uncontrollable.
- A direct action plan could apply on controllable risk, while the uncontrollable risk needs to be reported or coordinated with the relevant external officials.
- Risks identified are initial risks (*inherent risk*) that have not been acted upon by an action plan.

2. Risk Analysis and Risk Evaluation

- Risk Analysis and Risk Evaluation are used to determine the level of risk that can indicate the magnitude of risk effect to Company's objectives, and to prepare risk priorities that require certain treatment.
- The magnitude of risk is the product of the multiplication of risk occurrence probability and the estimated value of the impact if the risk event actually occurs.
- Risk value is assessed through calculation of Probability Value and Impact Value. The Probability Value is the probability of an event occurring, while the Impact Value is an assessment of the impact of risks that can be measured from the Company's goals or objectives specified in the Key Performance Indicator (KPI).

3. Risk Level Assessment

- Risk assessment is determined by multiplying the Probability Value and the Impact Value. The assessment of the level of risk determines the follow-up of risk management.
- The rating scale for the likelihood of occurrence and the impact column of the lowest risk event starts with level 1 while the highest is assessed with level 5, because the risk formula/notation is the impact value multiplied by the probability value, the value of the risk event ranges from 1 to 25.

4. Pengendalian Risiko

- Proses pengendalian risiko melibatkan komparasi nilai risiko yang muncul dan analisis proses prioritas dan persyaratan yang ada. Berdasarkan hasil penilaian risiko, maka dilakukan pengendalian risiko sesuai dengan tingkat risiko dan menentukan prioritasnya dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

4. Risk Control

- The process of risk control involves a comparison of the value of emerging risks and an analysis of existing priority processes and requirements. Based on the results of the risk assessment, risk control is carried out in accordance with the level of risk and determine priorities using the following conditions:

Tingkat Risiko / Risk Level	Pengendalian Risiko / Risk Control
Ekstrem/Strategis / Extreme/Strategic	Memerlukan tindakan segera karena sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian dan hancurnya Perusahaan. / Requires immediate action because the distribution of potential risks allows the loss and collapse of the Company.
Tinggi / High	Memerlukan tindakan cepat (maksimal 3 bulan), karena potensi dampaknya melemahkan organisasi. / Requires quick action (maximum 3 months) because the potential impact weakens the organization.
Sedang / Moderate	Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan (antara 3 – 6 bulan). Risiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya kegagalan proses. / Requires treatment with an action plan (between 3 - 6 months). This risk is acceptable, but efforts are needed to reduce the likelihood of process failure.
Rendah / Low	Merupakan batas risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan, namun selalu memantau dan mengevaluasi risiko tersebut. / Risk limit that is acceptable to the Company, but the Company always monitors and evaluates the risk.
Sangat Rendah / Very Low	Dikaji, dipantau, dan dievaluasi minimal setahun sekali. / is reviewed, monitored, and evaluated at least once a year.

Proses Penunjang

Proses penunjang manajemen risiko meliputi kegiatan pemantauan dan pengkajian ulang (*review*), komunikasi, konsultasi, dan pendokumentasian.

1. Pemantauan & Kaji Ulang (*Monitoring & Review*)

- Pemantauan terhadap risiko yang berprioritas tinggi harus dievaluasi lebih sering.
- Pemantauan atas efektivitas implementasi pengelolaan risiko pada unit-unit fungsional organisasi (*risk owner*) harus dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh pimpinan unit yang bertanggungjawab.
- Pengkajian ulang risiko meliputi pengkajian perubahan status tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dikaitkan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal, serta perubahan rencana tindakan.
- Pelaporan monitoring dan pengkajian ulang disampaikan kepada Direksi, paling tidak setiap tahun, mencakup efektivitas rencana tindakan, analisa manfaat dan biaya mitigasi, perubahan prioritas risiko, dan posisi nilai total risiko saat ini dibandingkan periode yang lalu.
- Evaluasi penerapan manajemen risiko perusahaan dapat dilakukan secara mandiri (*self assessment*) atau oleh pihak eksternal.
- Evaluasi penerapan manajemen risiko secara mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan *check list*, *questionnaire*, atau *flowcharting*.

2. Komunikasi dan Pelaporan

- Penerapan manajemen risiko harus disampaikan kepada karyawan operasional meliputi sosialisasi untuk membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko, meliputi pemahaman secara bertahap, membangkitkan partisipasi pengamatan indikasi risiko serta partisipasi dalam usulan rencana tindakan (*action plan*).

Basic Process

The process of supporting risk management includes monitoring and reviewing, communication, consultation, and documentation activities.

1. Monitoring & Reviewing

- High priority risk monitoring should be evaluated more frequently.
- Monitoring on the effectiveness of risk management implementation in the organizational function unit/risk owner must be done independently/self-assessment by the responsible unit leader.
- Reviewing risk involves assessing changes in impact level status and possible risk occurrence associated with changes in internal and external conditions, and changes in action plans.

- Monitoring and review reporting is submitted to the Board of Directors, at least annually, including the effectiveness of the action plan, benefit and mitigation cost analysis, risk priority change, and current total risk position compared to the previous period.
- Evaluation of Company's risk management can be done independently/self-assessment or by external party.
- Evaluation of independent risk management implementation can be conducted by using checklist, questionnaire, or flowchart.

2. Communication and Reporting

- Implementation of risk management must be submitted to operational employees including socialization to raise and maintain a risk conscious culture, including gradual understanding, generating participation in observation of risk indication, and participation in the proposed action plan.



- Komunikasi internal manajemen risiko antar risk owner meliputi kemungkinan terjadinya risiko yang sama, kejadian pengulangan atau risiko baru termasuk rencana tindakannya, pembandingan nilai dampak dari risiko yang sejenis serta pelaporan kepada Atasan atau Direksi untuk memperoleh pertimbangan rencana tindakan dan keputusan perlakuan risiko.
 - Komunikasi internal manajemen risiko kepada Divisi PKRSM dan SPI, meliputi proses inti manajemen risiko, sebagai alat pemantauan dan saran pengembangan manajemen risiko serta bahan pelaksanaan audit berbasis risiko.
 - Komunikasi eksternal manajemen risiko kepada Dewan Pengawas meliputi risiko-risiko strategis dalam daftar prioritas risiko perusahaan, rencana tindakan serta keputusan perlakuan risiko oleh Direksi.
 - Komunikasi eksternal kepada pemilik modal mencakup perlakuan khusus mengenai risiko strategis, serta rencana tindakan dan perlakuan risiko oleh Direksi, maupun pelaporan manajemen risiko sebagai bagian materi RKAP dan laporan tahunan perusahaan.
 - Dalam hal keterbukaan informasi penerapan manajemen risiko, Direksi harus memperhatikan komunikasi kepada publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.
3. Konsultasi
- Konsultasi dilakukan untuk membantu unit-unit pemilik risiko, terutama dalam mengidentifikasi dan asesmen risiko.
 - Konsultasi internal dilakukan oleh Divisi PKRSM dan/atau SPI.
 - Untuk pertama kali perusahaan mendesain sistem manajemen risiko, pelaksanaan self assessment serta pengembangan konsep manajemen risiko lebih lanjut (misalnya audit internal berbasis risiko), konsultasi dapat dilaksanakan oleh konsultan eksternal atau pakar bidang khusus yang terkait.
4. Pendokumentasian
- Pendokumentasi manajemen risiko dilakukan melalui aplikasi simrisk.jasatirta2.co.id.
 - Pendokumentasian manajemen risiko dilaksanakan oleh risk owner dan Divisi PKRSM.
 - Risk Owner mendokumentasikan identifikasi risiko di unitnya masing-masing, meliputi uraian indikasi risiko, sumber, penyebab dan akibat risiko serta kertas kerja penetapan kriteria skala rating tingkat kemungkinan, tingkat dampak risiko secara ordinal, dan uraian perhitungan secara nominal.
 - Divisi PKRSM mendokumentasikan rekapitulasi risiko, kertas kerja penggabungan dan eliminasi risiko, register risiko, prioritas risiko, keputusan Direksi tentang perlakuan risiko, pelaporan/ surat-surat internal dan eksternal yang terkait dengan kegiatan manajemen risiko.
- Internal risk management communications among risk owners include the possibility of equal risks, repetitive events or new risks including action plans, benchmarking the value of the impact of similar risks and reporting to the Boss and the Board of Directors for consideration of the risk treatment action plan and decision.
 - Internal risk management communications to PKRSM and SPI Division, including core risk management process, as a monitoring tool and advice on the development of risk management as well as materials for the implementation of risk-based audit.
 - External risk management communications to the Supervisory Board include reporting of strategic risks in the Company's risk priority list, action plan, and risk management decisions by the Board of Directors.
 - External communications to capital owner include special reporting on strategic risks, as well as action plans and risk treatment by the Board of Directors, risk management reporting as part of RKAP's material and annual reports.
 - In the case of disclosure of risk management implementation, the Board of Directors shall pay attention to the communication to the public, in accordance with Law No. 14 of 2009 concerning Information Disclosure to the Public.
3. Consultation
- Consultations are conducted to assist risk-owner units, particularly in identifying and assessing risks.
 - Internal consultations are conducted by the PKRSM Division and/or SPI.
 - For the first time when the Company designs a risk management system, the first self-assessment, and the development of further risk management concepts (eg risk-based internal audit), consultations can be carried out by external consultants or specialist field experts.
4. Documenting
- Documenting risk management is conducted through the application simrisk.jasatirta2.co.id.
 - Documenting risk management is implemented by risk owner and PKRSM Division.
 - The Risk Owner documents the identification of risks in each unit, including description of the risk indication, the source, the cause and effect of the risk, and the working paper on the determination of the probability rating scale criteria, the ordinal risk level of impact, and a nominal accounting description.
 - The PKRSM Division documents the risk recapitulation, risk pooling work paper and elimination, risk registers, risk priorities, Board decisions regarding risk treatment, internal/ external reporting/letters related to risk management activities.

Dalam pengelolaan risiko, terdapat 3 (tiga) komponen yang saling terkait, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses pengelolaan risiko. Skema ketiga komponen tersebut dijelaskan melalui bagan di bawah ini:

Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Proses Manajemen Risiko

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko sementara, konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan untuk komunikasi dan konsultasi adalah metode matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed) untuk mendeteksi tingkat keterlibatan para pihak dalam setiap tahap proses manajemen risiko.

2. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai.

- Ruang lingkup manajemen risiko meliputi Regular Objective Direktorat/Divisi/Unit Usaha/ Anak Perusahaan dan Specific Objective/khusus
- Konteks risiko meliputi Konteks Eksternal dan Konteks Internal
- Kriteria risiko disesuaikan dengan konteks risiko

3. Asesmen/Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran Perusahaan. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.

4. Perlakuan Risiko

Perlakuan risiko melibatkan proses berulang meliputi:

- Formulasi dan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko;
- Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko;
- Penilaian keefektifan perlakuan risiko;
- Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.

5. Pemantauan dan Tinjauan

Pemantauan dan tinjauan dilakukan secara periodik secara teratur dalam tahun berjalan minimal per triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun mekanisme pemantauan dan tinjauan dilakukan dengan cara self-assessment, audit internal atau eksternal, Forum Group Discussion/Executive Briefing, dan/atau umpan balik dari karyawan dan stakeholder.

In risk management, there are 3 (three) interrelated components, namely the risk management principles, the risk management framework, and the risk management process. The schematic of the three components is explained in the chart below:

This risk management framework is incorporated into other policies, procedures, authorities, and other provisions as well as various risk management tools applicable throughout the scope of business activities.

Risk Management Process

1. Communication and Consultation

Communication is carried out to build awareness and understanding of risks while consultation is carried out to obtain feedback from information needed in decision making. The method used for communication and consultation is the RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) matrix method to detect the level of involvement of the parties in each stage of the risk management process.

2. Scope, Context, and Criteria

The purpose of determining the scope, context, and criteria is to adjust the risk management process, enable effective risk assessment and adequate risk treatment.

- The scope of risk management includes the Regular Objective of the Directorate / Division / Business Unit / Subsidiary and the Specific Objective
- The risk context includes External Context and Internal Context
- Risk criteria are adapted to the context of risk

3. Risk Assessment

Risk assessment is a structured approach to identify and analyze uncertainties in achieving the Company's goals. Risk assessment consists of risk identification, risk analysis, and risk evaluation.

4. Risk Treatment

Risk treatment involves an iterative process including:

- Formulation and selection of risk treatment options;
- Planning and implementing risk treatment;
- Assessment of the effectiveness of risk treatment;
- Decision making whether remaining risk is acceptable

5. Monitoring and Review

Monitoring and review are carried out periodically in the current year at least quarterly and at any time if necessary. The monitoring and review mechanism is carried out by self-assessment, internal or external audit, Forum Group Discussion/Executive Briefing, and/or feedback from employees and stakeholders.



6. Pencatatan dan Pelaporan

Mekanisme proses pencatatan dan pelaporan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada manrisk.jasatirta2.co.id.

Register Risiko dan Profil Risiko Strategis Perusahaan

Register Risiko

Pada tahun 2020, telah ditetapkan Register Risiko Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi yang meliputi Risiko Operasional Perusahaan maupun Risiko Strategis dengan memperhatikan target-target Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) serta telah menjadi pedoman dalam penyusunan RKAP tahun 2020.

6. Recording and Reporting

The process of recording and reporting the identifying, analyzing and evaluating risk is conducted periodically using a web-based application that can be accessed at manrisk.jasatirta2.co.id.

Risk Register and Strategic Risk Profile of the Company

Risk Register

In 2020, the Company's Risk Registers have been determined by Board of Directors Decision Letter covering Operating Risk as well as Strategic Risk by taking into account the Company's targets as stipulated in the Key Performance Indicator (KPI) and has become a guidelines in preparing RKAP 2020.

Daftar Rekapitulasi Register Risiko Perusahaan Tahun 2020
List of Corporate Risk Register Recapitulation in 2020

Perspektif KPI / KPI Perspective	Total
Kuangan dan Pasar / Finance and Market	6
Fokus Pelanggan / Customer Focus	1
Efektivitas Proses dan Produk / Product and Process Effectiveness	13
Fokus Tenaga Kerja / Manpower Focus	4
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat / Leadership, Governance, and Social Responsibility	12
Jumlah / Total	36

Profil Risiko

Penilaian risiko menggunakan akal ordinal kemungkinan (K) x Dampak (D).

Risk Profile

Risk assessment uses the ordinal sense of probability (K) x Impact (D).

PERMASALAHAN HUKUM LEGAL ISSUES

Perum Jasa Tirta II terus berupaya dalam menjalankan kegiatan usaha yang berprinsip pada kepatuhan dan prinsip korporasi yang sehat guna menghindari potensi atau dampak negatif terlibat dalam perkara hukum. Selama tahun 2020, Perusahaan terlibat perkara hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Perum Jasa Tirta II continuously seeks to carry out business activities based on compliance and sound corporate principles to avoid the potential or negative impacts involved in legal cases. Throughout 2020, the Company was involved in civil lawsuits.

Permasalahan Hukum / Legal Issues	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap) / Settled (Already has Permanent Legal Force)	10	Nihil / Nil
Dalam Proses Penyelesaian (Legal Settlement)	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Permasalahan Hukum Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas dan Direksi tidak terlibat atau menghadapi gugatan atau perkara hukum di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun.

Legal Issues of Supervisory Board and Board of Directors

Throughout 2020, the Supervisory Board and the Board of Directors were not involved in or facing lawsuits or legal proceedings in any judiciary and/or arbitration body.

Perkara Hukum di Entitas Anak/Patungan

Selama tahun 2020, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak/Patungan maupun terkait dengan Dewan Pengawas dan Direksi Entitas Anak.

Legal Issues in Subsidiary/Joint Venture

During 2020, there were no legal cases faced by the Subsidiaries/Joint Entities or related to the Supervisory Board and Directors of the Subsidiaries.

SANKSI ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE SANCTION

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perum Jasa Tirta II, Dewan Pengawas, ataupun Direksi yang sedang menjabat oleh regulator dan pihak berwenang lainnya.

During 2020, there were no administrative sanctions imposed on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the current Board of Directors by the regulator and other authorities.



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal. Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan di Perum Jasa Tirta II. Setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Setiap individu berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan perusahaan. Dengan demikian, Perum Jasa Tirta II mengharuskan setiap individu untuk:

1. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apa pun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan;
3. Memahami dan menaati Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the Board of Directors, Supervisory Board, and Capital Owner. In 2020, no transaction has a conflict of interest in Perum Jasa Tirta II, every transaction is done in accordance with applicable provisions and always taking into account the principles of GCG. Each individual is obliged to put the Company's interests first and avoid the occurrence of conflicts of interest in various forms with the Company. Therefore, each individual is:

1. Not allowed to hold any dual positions outside the Company that may cause a conflict of business interest with the Company, except in relation to the employee cooperative as stipulated in applicable laws and regulations;
2. Not permissible to engage in private business or family engagement, with other parties that may cause a conflict of business interests with the Company;
3. Understand and adhere to the Guidelines for Handling Conflict of Interest in the Environment of Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

KODE ETIK PERUSAHAAN

CODE OF CONDUCT

Perum Jasa Tirta II menempatkan keseragaman etika dan perilaku sebagai bagian tak terpisahkan dalam menunjang integritas dan akuntabilitas dalam setiap individu Perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi komitmen atas terciptanya best practices GCG dan mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Untuk itu, Perum Jasa Tirta II telah mempunyai Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang dijadikan pedoman dan berlaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II mulai dari Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II dalam bekerja dan berinteraksi segenap pemangku kepentingan Perusahaan.

Dengan mengacu pada Budaya Perusahaan "Air Untuk Menghidupi Negeri", segenap insan Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan Kode Etik (Code of Conduct) secara konsisten selama menjalankan kegiatan usaha serta senantiasa mendukung terlaksananya GCG yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan (corporate image) bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perum Jasa Tirta II positions uniformity in ethics and behavior as an inseparable part in supporting integrity and accountability in each individual in the Company. This is intended to fulfill commitments for the creation of GCG best practices and support long-term business sustainability. For this reason, Perum Jasa Tirta II already has a Code of Conduct that is used as a guideline and applies to all Perum Jasa Tirta II employees, starting from the Supervisory Board, Board of Directors and all employees of Perum Jasa Tirta II in working and interacting with all Company stakeholders.

With reference to the Corporate Culture of "Water for Wellness", all personnel of Perum Jasa Tirta II are committed to implement Code of Conduct consistently, wherever they are and work and always support the implementation of GCG which will eventually improve the Corporate Image for all stakeholders' interests.

Isi/Pokok Kode Etik

Pedoman Etik Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perum Jasa Tirta II memuat nilai-nilai etika dan tata perilaku sebagai suatu standar beretika dan berperilaku bagi insan Perum Jasa Tirta II yang meliputi:

- Standar Etika Usaha dalam mengatur interaksi Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, pemerintah, auditor, masyarakat, mitra binaan dan lingkungan, Serikat Pekerja, Organisasi Profesi, serta Perguruan Tinggi.
- Standar Tata Perilaku dalam mengatur sikap individu, etika kerja sama insan Perum Jasa Tirta II dengan Perusahaan, etika kerja sesama insan Perum Jasa Tirta II, perilaku sebagai atasan, perilaku sebagai bawahan, menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menjaga aset Perusahaan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mencatat data dan pelaporan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, kegiatan berpolitik, hadiah, cendera mata, donasi, komisi dan suap, dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras.
- Penerapan dan Penegakan Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku mengatur tentang organisasi, penegakan etika usaha dan tata perilaku, sanksi pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, sosialisasi dan interaksi, serta mekanisme pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penerapan Code of Conduct bagi Perusahaan yaitu:

Setiap insan Perum Jasa Tirta II memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

- Membentuk karakter insan Perum Jasa Tirta II yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama dalam perusahaan maupun dengan pihak lain di luar Perusahaan;
- Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan;
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
- Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam perusahaan;
- Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang tepat sehingga dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis perusahaan secara efisien, efektif, dan ekonomis (3E).

Adapun tujuan penerapan Code of Conduct bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh stakeholders, sehingga akhirnya pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal

Content of Code of Conduct

The Code of Conduct of Perum Jasa Tirta II contains ethical values and codes of conduct as an ethical and behavioral standard for Perum Jasa Tirta II Personnel, which includes:

- Standards of Business Ethics Manage the Company's interactions with employees, customers, suppliers of goods and services, partners, government, Auditors, communities, community partners and the environment, Trade Unions, Professional Organizations, and Universities;
- Standards of Conduct Setting the basic attitude of the individual, the ethics of cooperation of Insan Perum Jasa Tirta II with the Company, the work ethic of Perum tJasa Tirta II's employees, the behavior as superiors, the subordinate's behavior, maintaining the confidentiality of the Company's data and information, safeguarding the Company's assets, HSE, records and reports the data, avoiding conflicts of interest and abuse of positions, political activities, prizes, souvenirs, donations, commissions and bribes, and drug and alcohol abuse;
- Implementation and Enforcement of Standards of Business Ethics and Code of Conduct Managing the organization, enforcement of business ethics and codes of conduct, sanctions of business ethics violations and codes of conduct, socialization and interaction, as well as mechanisms for re-form/revision of business ethics and codes of conduct.

Purpose, Objective, and Benefit

The purpose of the Code of Conduct in the Company is as follows:

Every person of Jasa Tirta II understands that all activities of the Company are based on the principles of Good Corporate Governance;

- Establish the character of Perum Jasa Tirta II personnel to be disciplined and ethical in associating with others within the Company and with other parties outside the Company;
- Becoming a benchmark of behavior for individuals within the Company to carry out their respective duties and responsibilities and interact with the Company's stakeholders;
- Creating a healthy and comfortable working environment within the Company;
- As guidelines that regulate, supervise and prevent abuse of authority and position of every individual in the Company;
- Minimize opportunities for irregularities or to be part of the appropriate Internal Control System so as to assist Directors in managing the business of the Company efficiently, effectively and economically (3E).

The objective of Code of Conduct in the Company is as follows:

- As a joint commitment to realize the vision and carry out the Company's mission in a professional and ethical manner by taking into account all stakeholders, so that in the end it will realize the maximum working standards for all individuals and



bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku di Perusahaan;

- Sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
- Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan maupun litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh insan Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.

Pedoman Perilaku Perum Jasa Tirta II

Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan. Pedoman Etika dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang terdapat pada Lampiran III Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II nomor : KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 ini merupakan salah satu wujud dari komitmen tersebut yang dituangkan dalam dokumen tertulis atas dasar perilaku etis yang diharapkan Perusahaan dari Insan Perusahaan yang mencakup perilaku yang harus dilakukan dan dilarang dilakukan.

Code of Conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan Perusahaan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Adapun komitmen-komitmen yang dimaksud adalah :

- Komitmen Terhadap Pemilik Modal
- Komitmen Terhadap Insan Perusahaan
- Komitmen Terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
- Komitmen Terhadap Pelanggan
- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa
- Komitmen Terhadap Pesaing
- Komitmen Terhadap Mitra Usaha
- Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan dan Lingkungan
- Komitmen Terhadap Media Massa, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan
- Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
- Komitmen Terhadap Anak Perusahaan

Pengungkapan Code of Conduct

Untuk memastikan Code of Conduct diketahui dan dijalankan oleh seluruh insan Perusahaan, Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan sosialisasi dan mendistribusikan buku Code of Conduct kepada seluruh insan Perum Jasa Tirta II dalam bentuk Buku Saku. Setelah sosialisasi dilakukan, seluruh insan Perum Jasa Tirta II wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan code of conduct yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

still be guided by the rules applicable in the Company;

- As a behavioral guidelines for all Perum Jasa Tirta II Personnel that must be obeyed in carrying out all activities of the Company;
- To prevent the conflict of interest or litigation due to negligence made by Perum Jasa Tirta II personnel in performing all activities of the Company.

Code of Conduct of Perum Jasa Tirta II

Perum Jasa Tirta II as one of the State-Owned Enterprises (BUMN) is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices as part of efforts to achieve the Company's vision and mission. The Code of Conduct (Code of Conduct) contained in Appendix III of the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company (PERUM) number: KBS-01/DIR/10/2019 dated 30 October 2019 is a manifestation of the commitment is stated in a written document on the basis of the ethical behavior expected by the Company from the Company's Personnel which includes behaviors that must be carried out and prohibited from being carried out.

The Company's Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's business ethics and the work ethic of every Company Personnel that is voluntary which is structured to influence, shape, regulate and conform to behavior, so as to achieve consistent outputs that are in accordance with the Company's work culture in achieving the vision and his mission. The commitments in question are:

- Commitment to Capital Owners
- Commitment to the Company's People
- Commitment to the Government, Local Government and other Agencies
- Commitment to Customers
- Commitment to Goods/Services Providers
- Commitment to Competitors
- Commitment to Business Partners
- Commitment to Surrounding Communities, Partners and the Environment
- Commitment to Mass Media, NGOs and Community Organizations
- Commitment to Trade Unions
- Commitment to Subsidiaries

Disclosure of Code of Conduct

To ensure that the Code of Conduct is acknowledged and executed by all Company Personnel, Perum Jasa Tirta II has conducted dissemination and distribution of Code of Conduct book to all Perum Jasa Tirta II personnel in the form of Pocket Book. After the socialization event is completed, all Perum Jasa Tirta II obliged to sign the Integrity Pact which is the commitment of the personnel of Perum Jasa Tirta II to implement the updated code of conduct as needed.

Penegakan dan Sosialisasi Code of Conduct

Sebagai upaya penegakan atas Code of Conduct, Perum Jasa Tirta II akan memberikan sanksi terhadap insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran Code of Conduct. Bagi setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Code of Conduct, harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi.

Perum Jasa Tirta II akan melindungi kerahasiaan setiap insan Perum Jasa Tirta II yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran Code of Conduct

Pelanggaran Code of Conduct di Perum Jasa Tirta II merupakan tindakan indisipliner dan ditindaklanjuti oleh Direktur Keuangan & SDM sebagai penanggung jawab implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan. Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui terjadinya pelanggaran Code of Conduct wajib melaporkan kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan SDM, atasan langsung, dan kontak pengaduan yang bertanggung jawab untuk:

- Memonitor kepatuhan atas Code of Conduct;
- Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan;
- Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Code of Conduct ini tidak perlu merasa khawatir karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran atas Code of Conduct ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh insan Perum Jasa Tirta II. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Perum Jasa Tirta II wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

- Divisi SDM;
- Atasan Langsung;
- Kotak Pengaduan (Whistleblowing System)

Segenap insan Perum Jasa Tirta II dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh oknum insan Perum Jasa Tirta II dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya.

Enforcement and Dissemination of Code of Conduct

As an effort to enforce the Code of Conduct, Perum Jasa Tirta II will sanction the Company's employees who violate the Code of Conduct. For every Perum Jasa Tirta II employee, who knows a situation that is believed to have the potential to violate the Code of Conduct, must immediately report to the superior or higher leadership in writing by including the identity of the reporter on the basis of full and accountable evidence and does not contain elements of slander and personal interest.

Perum Jasa Tirta II will protect the confidentiality of any Perum Jasa Tirta II personnel who reported the violation and will follow up immediately unless the report is incorrect and to the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Violations of Code of Conduct

Violation of the Code of Conduct at Perum Jasa Tirta II is an disciplinary action and is followed up by the Director of Finance & HR as the person in charge of implementing Good Corporate Governance (GCG) in the Company. Every employee of Perum Jasa Tirta II who knows of a violation of the Code of Conduct is required to report to the work unit in charge of HR management, direct supervisor, and complaint contact who are responsible for:

- Monitor compliance with the Code of Conduct;
- Record all types of alleged offenses;
- Follow up on violations that occur in accordance with applicable regulations;
- Report violations to the Board of Directors.

Any Person of Perum Jasa Tirta II that submits the report on this Code of Conduct violation shall not be worried, because the Company will protect the identity of the Reporter as long as its reporting can be accounted for. Violations of this Code of Conduct shall be subject to sanctions or rewards in accordance with the Company's prevailing rules and regulations. Implementation of the Code of Conduct is the commitment and responsibility of all Perum Jasa Tirta II personnel. In the event of any violation or deviation, then Insan Perum Jasa Tirta II shall report such violation through:

- Human Resources Division;
- Direct supervisor;
- Complaint Box/Whistle Blowing System

All person of Perum Jasa Tirta II and external parties of the Company (Customers, Partners, and Communities) may report Code of Conduct violations committed by Perum Jasa Tirta II personnel and the Company is obliged to follow up reporting that is potentially harmful to the Company and may damage the Company's image caused by deviations, manipulations and so forth.



Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Perusahaan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Code of Conduct Tahun 2020

Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan oleh Pemilik Modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders lain maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila pelanggaran terkait dengan tindak pidana, maka diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman Code of Conduct.

The Reporting Party shall clearly identify its identity on the report made, accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report shall keep the identity of the complainant confidential.

The Company shall follow up any reports received pursuant to applicable procedures and mechanisms. The Company provides legal protection in accordance with applicable laws and regulations.

Total Violations and Sanctions of Code of Conduct in 2020

The imposition of sanctions for Code of Conduct violations committed by the employees is granted by the Board of Directors or authorized officers in accordance with applicable regulations. Whereas the sanction for violations committed by the Board of Directors and Supervisory Board refers entirely to Company's Articles of Association and Bylaws according to the applicable provisions.

In the event that other Partners or Stakeholders committed an offense, then it will be subject to the provisions as contained in the contract. If related to a crime can be forwarded to the authorities. The provision of sanctions shall be made after evidence of violation of the Code of Conduct guidelines has been found.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI GUIDELINES FOR GRATIFICATION CONTROL

Gratifikasi merupakan kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan (entertainment) kepada insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.

Perum Jasa Tirta II telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang menjadi lampiran VII Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik Nomor : KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 mengenai Pedoman Gratifikasi. Pedoman tersebut memuat mengenai:

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup dan Sistematika
- Pengertian
- Dasar Hukum
- Prinsip Dasar Gratifikasi
- Kategori Gratifikasi
- Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G)
 - Tugas dan Fungsi TP3G
 - Koordinasi TP3G
- Pelaporan

Gratification is an activity of giving and/or receiving gifts/souvenirs and entertainment to Company personnel, whether received domestically or abroad and by electronic means and/or without electronic means.

Perum Jasa Tirta II has compiled Guidelines for Gratification Control which is attachment VII of Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding guidelines for good corporate governance Number: KBS-01/DIR/10/2019 dated October 30, 2019 regarding Gratification Guidelines. The guidelines contain about:

- Background
- Purpose and objectives
- Scope and Systematic
- Definition
- Legal basis
- Basic Principles of Gratification
- Gratification Category
- Violation and Gratification Complaint Handling Team (TP3G)
 - Tasks and Functions of TP3G
 - TP3G Coordination
- Reporting gratification Handling

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Dalam menegakkan kebijakan anti gratifikasi, setiap insan Perum Jasa Tirta II dapat melaporkan indikasi pelanggaran gratifikasi dengan mengikuti tata cara sebagai berikut :

1. Setiap penerimaan hubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Direksi melalui TP3G.
2. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada TP3G dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, e-mail, website yang telah disediakan oleh Perusahaan.
3. Jangka waktu pelaporan melalui TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan.
4. Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan, maka TP3G tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Insan Perusahaan melaporkan langsung kepada Direksi dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1), TP3G meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan berdasarkan ketentuan dalam pedoman ini.
6. Apabila hasil penelitian TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, TP3G menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada Direksi dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) hari kerja sejak laporan Gratifikasi tersebut diterima.

Pakta Integritas dan Gratifikasi

Perum Jasa Tirta II mewajibkan setiap insan Perum Jasa Tirta II untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap Perum Jasa Tirta II.

Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, penandatanganan kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dilakukan setiap tahun.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Menindaklanjuti surat sekretaris kementerian BUMN Nomor : S-17S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal setifikasi ISO 37001:2016. Sistem manajemen anti penyuapan, perusahaan telah diaudit oleh pihak eksternal dan pada tanggal 28 Desember 2020. Serta hasilnya PJT II Telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016.

Gratification Reporting Procedure

In enforcing the anti-gratification policy, every employee of Perum Jasa Tirta II can report indications of violations of gratification by following the following procedures :

1. Every acceptance of a relationship with Gratification that is considered a bribe must be reported to the Board of Directors through TP3G.
2. The Gratification Report as referred to in number (1) is submitted to TP3G by filling out the form determined by the Board of Directors completely and attaching documents related to Gratification, either in person or by post, e-mail, website provided by the Company.
3. The reporting period through TP3G as referred to in number (1) is no later than 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by the Company's Personnel.
4. If the reporting period exceeds 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by the Company Personnel, then TP3G cannot receive the report and the Company Personnel reports directly to the Board of Directors by filling out the form determined by the Board of Directors completely and attaching the required relating to gratuities.
5. After receiving the report as referred to in number (1), TP3G examines the Gratification received to determine whether the Gratification received is considered a bribe or not based on the provisions in this guideline.
6. If the results of the TP3G examination as referred to in number (5) constitutes a Gratification which is considered a bribe, the TP3G shall submit the Gratification to the Board of Directors within a period of no later than 7 (days) working days since the Gratification report is received.

Integrity Pact and Gratification

The Company requires every Perum Jasa Tirta II Employee to comply with the provisions stipulated in the Company's Code of Conduct. It is implemented through the signing of an Integrity Pact conducted by the Supervisory Board, Board of Directors, and Perum Jasa Tirta II Permanent Employees.

In order to maintain a sustainable commitment, the signing of compliance to the Integrity Pact and Compliance with the Company's Code of Conduct is conducted annually.

Anti-Bribery Management System (SMAP)

Following up on the letter from the secretary of the Ministry of SOEs Number: S-17S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020 regarding ISO 37001:2016 certification. Anti-bribery management system, the company has been audited by an external party and on December 28, 2020. As a result, PJT II has received ISO 37001:2016 certificate.



Oleh karena itu perusahaan telah Menyusun Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : PRD-16/DIR/10/2020.

Therefore, the company has compiled Anti-Bribery Management System Guidelines (SMAP) which is regulated in the Board of Directors Regulation Number: PRD-16/DIR/10/2020.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tujuan penerapan praktik terbaik dan prinsip-prinsip GCG yang diarahkan pada pemeliharaan kualitas kepatuhan dikukuhkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang berperan sebagai mekanisme deteksi dini (*Early Warning System*) yang mampu mencegah indikasi penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan. Perum Jasa Tirta II juga telah membentuk Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai dasar dalam komitmen untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asasi kewajaran dan kesetaraan.

Dalam hal ini, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menjadi media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dengan berlandaskan pada kejujuran dan bukan bersifat fitnah dengan disertai bukti yang kuat.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran telah ditetapkan melalui Lampiran VI Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik Nomor : KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Whistleblowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perum Jasa Tirta II dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Adapun maksud, tujuan dan manfaat Whistleblowing System, di antaranya:

- Sebagai dasar atau pedoman dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari para pemangku kepentingan;
- Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian Pengaduan Pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh para pemangku kepentingan;
- Menghindari publikasi negatif terhadap Perusahaan;
- Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan;
- Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

The purpose of implementing best practices and GCG principles aimed at maintaining compliance quality is confirmed through the Whistleblowing System which acts as an early warning system that is able to prevent indications of violations and fraud in the Company. Perum Jasa Tirta II has also established a Whistleblowing System Guidelines as a basis for commitment to pay attention to and safeguard the interests of stakeholders based on fairness and equality.

In this case, the Whistleblowing System becomes a medium for whistleblowers to submit information regarding violations that occur in the Company's environment based on honesty and not slander with strong evidence.

Guidelines for Reporting Violations have been established through Attachment VI to Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company (PERUM) regarding guidelines for good corporate governance Number: KBS-01/DIR/10/2019 dated October 30, 2019.

Purpose, Objective, and Benefit

Whistleblowing System is a system that manages complaints/disclosures about unlawful and unethical behavior, conducted in discreet, anonymous, and independent that is used to optimize the participation of Perum Jasa Tirta II Persons and other parties in disclosing any violations occurring within the Company.

The purpose, objectives, and benefits of Whistleblowing System including:

- Serving as a basis or guidelines in handling Complaints from stakeholders;
- Ensuring effective mechanisms for Whistleblowing settlement Violations in a timely manner by all stakeholders;
- Avoiding negative publicity to the Company;
- Supporting the principle of fairness in the relationship between the Company and its stakeholders as the Company's business actors and partners;
- Serving as an effort in disclosing various problems in the Company that are not in accordance with ethical standards applicable in the Company.

Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan pada Whistleblowing System Perum Jasa Tirta II meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penyimpangan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
- Pemerasan;
- Perbuatan curang (fraud);
- Benturan kepentingan;
- Gratifikasi

Struktur Pengelola Whistleblowing System

pengelolaan Whistleblowing System dilakukan oleh 3 (tiga) organ, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G).

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab organ-organ tersebut dalam pengelolaan Whistleblowing System adalah sebagai berikut:

Scope of Reporting

The scope of the complaint that can be submitted to Whistleblowing System of Perum Jasa Tirta II covers the following matters:

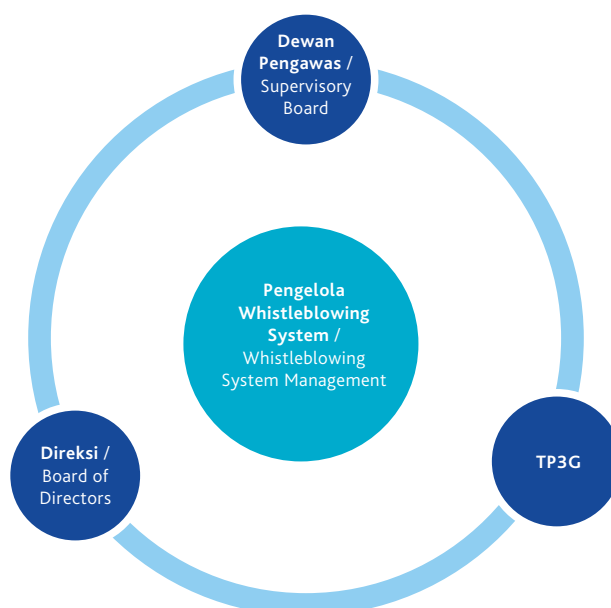
- Deviations of applicable laws and regulations;
- Abuse of position for other purposes outside the Company;
- Extortion;
- Fraud;
- Conflict of interest;
- Gratuities

Whistleblowing System Management Structure

The management of the Whistleblowing System is carried out by 3 (three) organs, namely the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Whistleblowing Handling Team (TP3G).

The division of duties and responsibilities of these organs in the management of the Whistleblowing System are as follows:

Organ Pengelola WBS / WBS Management Organs	Fungsi dan Tanggung Jawab / Functions and Responsibilities
Dewan Pengawas / Supervisory Board	Bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi. / Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of both the Supervisory Board, and the Board of Directors.
Direksi / Board of Directors	Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan. / Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by the Employees.





Organ Pengelola WBS / WBS Management Organs	Fungsi dan Tanggung Jawab / Functions and Responsibilities
Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G) / Whistleblowing Handling Team (TP3G)	- TP3G jalur Direksi adalah tim yang dibentuk oleh Direksi dan beranggotakan perwakilan dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi PKRSM serta pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Direksi adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI). / TP3G Board of Directors is a team formed by the Board of Directors and consists of representatives from the Corporate Secretary, Internal Audit Unit (SPI), Human Resources Division, PKRSM Division, and others required in accordance with their competence and expertise. TP3G of the Board of Directors is headed by the Head of Internal Audit Unit (SPI). - TP3G jalur Dewan Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dan beranggotakan perwakilan dari Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit serta pihak independen lainnya yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Dewan Pengawas adalah Anggota Dewan Pengawas. / TP3G of the Supervisory Board is a team established by the Supervisory Board and comprising representatives from members of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board, the Audit Committee and other Independent parties required in accordance with their competence and expertise. TP3G of Supervisory Board is headed by the member of Supervisory Board.

Saluran/Media Pelaporan

Pengaduan Pelanggaran dapat disampaikan melalui media penyampaian laporan pelanggaran sebagai berikut:

Whistleblowing Media/Channel

Complaints of violations can be submitted through the media for submitting reports of violations as follows:

Website	www.jasatirta2.co.id
Surat Resmi / Official Letter	- Direksi Perum Jasa Tirta II / Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat (apabila pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan / if the violation is allegedly committed by an employee); - Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II / Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Jalan H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat (apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh oknum Direksi, Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Dewan Pengawas/Direksi / if the violation is allegedly committed by the Board of Directors, the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Supervisory Board/Board of Directors).

Mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pengelolaan Whistleblowing System yang sedang dikembangkan Perum Jasa Tirta II mengikuti alur sebagai berikut:

1. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan ditujukan kepada Direksi Perusahaan.
2. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi ditujukan kepada Dewan Pengawas Perusahaan.
3. Pengaduan Pelanggaran dilakukan dalam jam kerja.
4. Apabila penerima Pengaduan Pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan wajib meneruskan Pengaduan Pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan menerima setiap Pengaduan Pelanggaran yang diajukan oleh para pemangku kepentingan dan/atau Perwakilan para pemangku kepentingan baik secara lisan maupun tertulis.
6. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat pemangku kepentingan dan/atau perwakilan para pemangku kepentingan mengajukan Pengaduan Pelanggaran.
7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis melalui website resmi Perusahaan dan/atau menyampaikan surat

Mechanisms for Whistleblowing System Management

Mechanisms for Whistleblowing System Management that are currently developed by Perum Jasa Tirta II are as follows:

1. The alleged violations committed by the Employees are directed to the Company's Board of Directors.
2. Violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of both Supervisory Board and Board of Directors are directed to the Supervisory Board of the Company.
3. Complaints are made within working hours.
4. If the recipient of the whistle blowing is not the Board of Directors or the Supervisory Board, the person concerned shall forward the Complaint to the Board of Directors or Supervisory Board.
5. The Company receives any whistle blowing filed by stakeholders and/or Representatives of the stakeholders in both verbally or in writing.
6. The Company provides an explanation of the policies and procedures for receiving a whistleblowing when stakeholders and/or representatives of stakeholders serve as whistleblower.
7. Whistleblowing of the alleged violations committed by the employees are done in writing with through the Company's website and/or official letter

resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q. Direksi, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:

Direksi Perum Jasa Tirta II

Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat

8. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:
Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II
Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat
9. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
10. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
11. Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan wajib dilengkapi dengan data (bukti pendukung).
12. Perusahaan memberikan tanda terima, jika Pengaduan Pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
13. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan para pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - Fotokopi bukti identitas para pemangku kepentingan dan perwakilan para pemangku kepentingan;
 - Surat kuasa dari para pemangku kepentingan kepada perwakilan para pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama para pemangku kepentingan. Jika perwakilan para pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
14. Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada para pemangku kepentingan dan/atau perwakilan pemangku kepentingan yang mengajukan Pengaduan.

addressed to the Company c.q. Board of Directors, by direct delivery or by mail to the Company to:

Board of Directors of Perum Jasa Tirta II

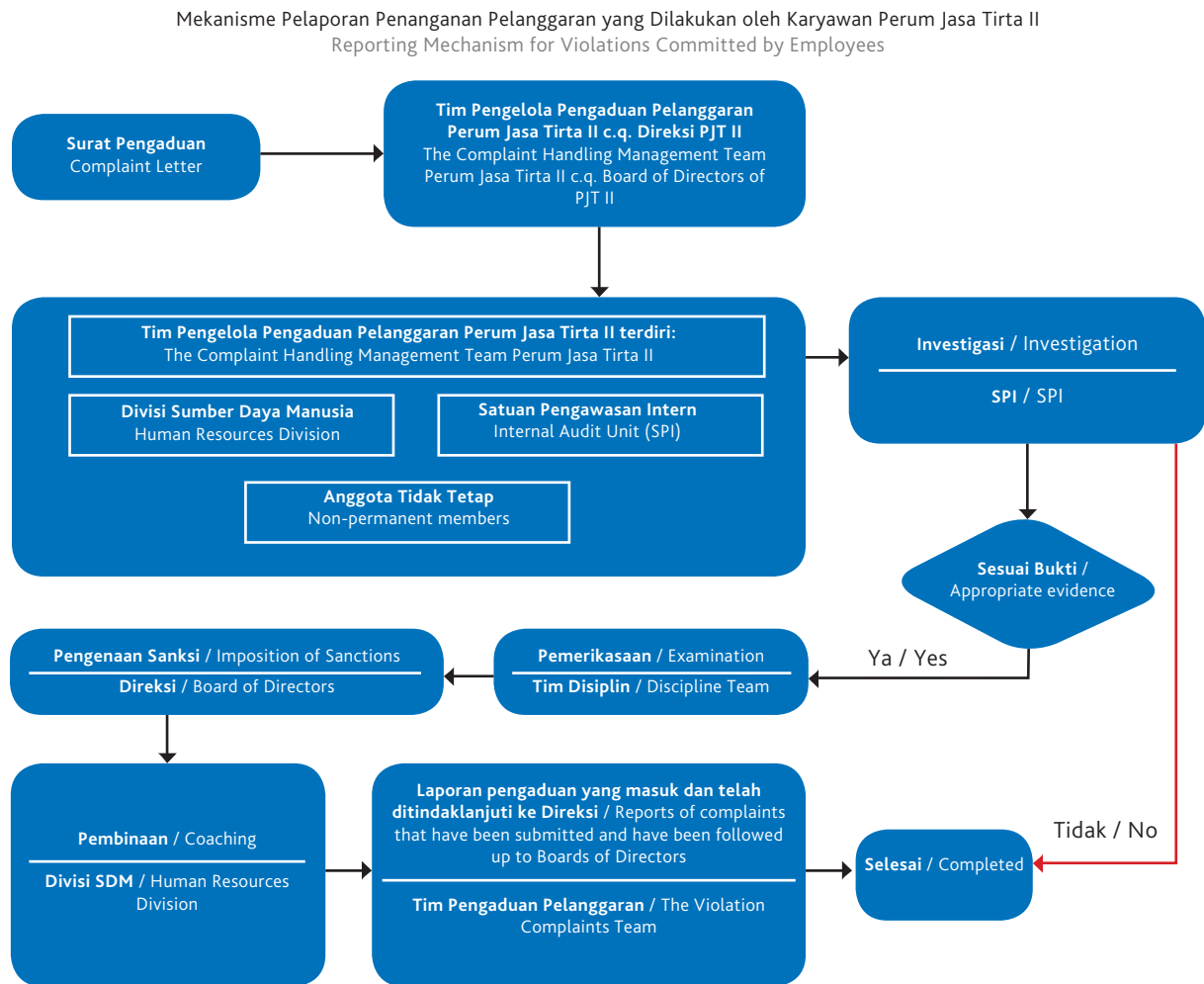
Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat

8. Whistle blowing of the alleged violations committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of Supervisory Board and Board of Directors are done in writing by delivering an official letter addressed to the Supervisory Board, or by mail to the Company with the address:
Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II
Jln. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat
9. Whistleblowing in writing must be accompanied by a copy of ID and supporting evidence such as: Documents relating to transactions conducted and/or whistle blowing to be submitted.
10. Whistleblowing in writing without a copy of ID shall be accompanied by supporting evidence such as documents relating to the transactions conducted and/or whistle blowing to be submitted.
11. Complaints Violations submitted must be accompanied by data (supporting evidence).
12. The Company provides a receipt if a violation complaint is filed in writing with identity
13. If the violation complaint is filed by a representative of the stakeholders, then in addition to the above documents, other documents to be submitted are:
 - Copy of ID of stakeholders and representatives of stakeholders;
 - Power of attorney from the stakeholders to representatives of stakeholders stating that the stakeholders provide the authority to act for and on behalf of the stakeholders; if the representative of the stakeholders is a legal entity, it must be enclosed with a document stating that the complaining party has the authority to represent the agency or legal entity.
14. The Company is required to submit receipt of the whistleblowing to the stakeholders and/or representatives of the complaining stakeholders.

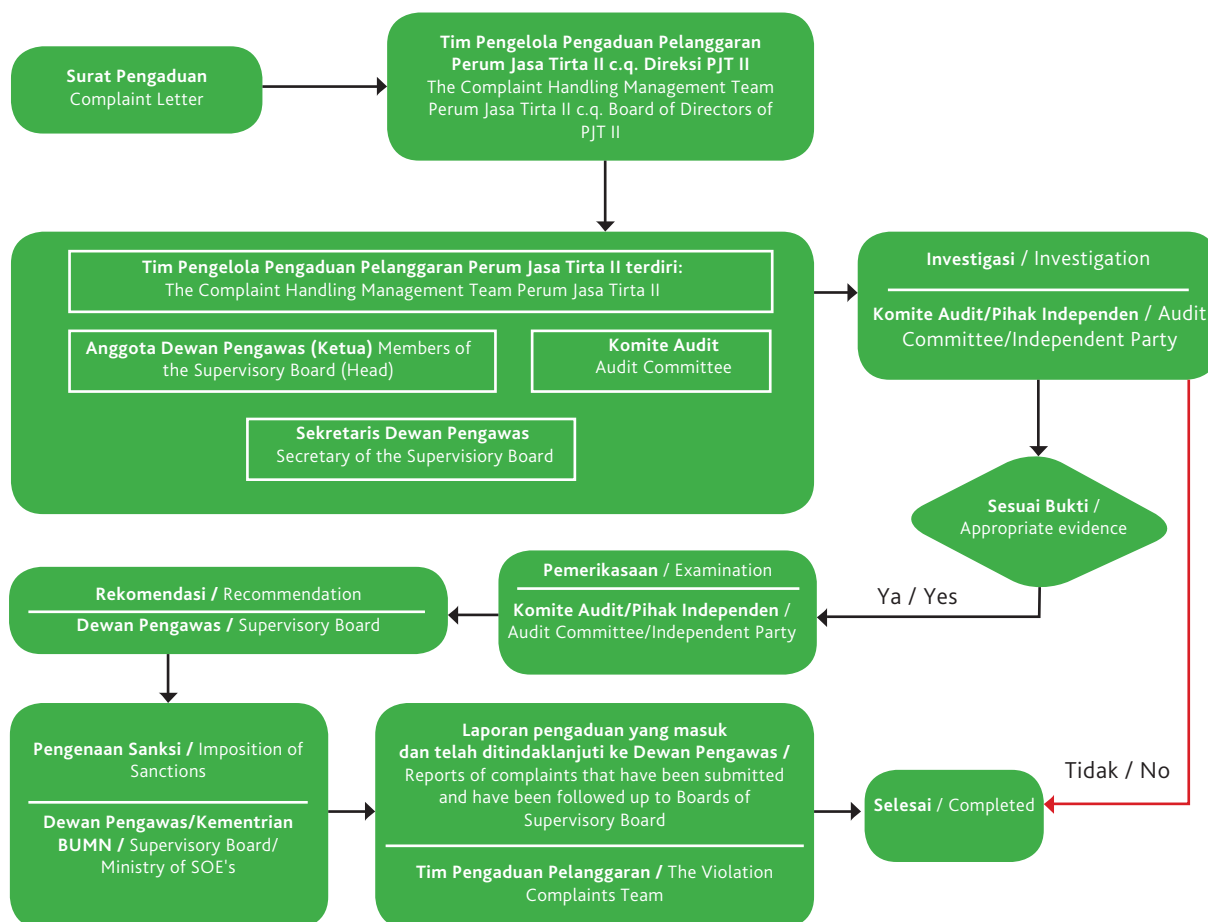


Adapun bagan mekanisme pelaporan pengaduan penanganan pelanggaran digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

The whistleblowing mechanism is illustrated in the chart as follows:



Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Direksi
Whistleblowing Mechanism for Violations Committed by Member of the Board Of Directors, Members of Supervisory Board, Supporting Organs of Supervisory Board and Board of Directors



Perlindungan bagi Pelapor

Perum Jasa Tirta II memberikan perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme Whistleblowing System. Adapun kebijakan perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada Perusahaan.
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyimpangan tersebut. Selain perlindungan di atas, Perum Jasa Tirta II juga akan menyediakan perlindungan hukum. Diharapkan dengan adanya jaminan perlindungan ini, akan mendorong setiap insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor dan keluarganya.

Protection for Whistleblowers

Perum Jasa Tirta II provides protection to the whistleblower that reports the alleged violations through Whistleblowing System mechanism. The policy for whistleblower protection is as follows:

- The identity of the whistleblower is secured by the Company.
- The Company guarantees the protection of the whistleblower from any form of threat, intimidation, or misconduct by any party as long as the Reporting Party keeps the confidentiality of the violations reported.
- Protection of the Reporting Entity also applies to the parties conducting the Investigation as well as the parties providing information related to the Complaint/Disclosure. In addition to the above protection, Perum Jasa Tirta II will also provide legal protection. It is hoped that, under the guarantee of this protection, will encourage every Company personnel and other Reporting Entity to be courageous to report the violation and ensure the security of the Reporting Party and their families.



Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pengaduan Pelanggaran dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum karyawan yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Direksi untuk diinvestigasi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Rekomendasi hasil dari investigasi yang dilakukan oleh SPI tersebut diajukan kepada Tim Disiplin untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direksi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas untuk diinvestigasi Komite Audit atau melimpahkan kepada pihak independen.
- Direksi akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Disiplin, untuk Dewan Pengawas akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Komite Audit/Independen.
- Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut karyawan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- Dalam hal hasil investigasi yang dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Pengawas tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- Pelaku Pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi Whistleblowing System

Dalam memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui kebijakan dan mekanisme Whistleblowing System, Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi melalui presentasi langsung kepada karyawan dan pemangku kepentingan. Sosialisasi Whistleblowing System didukung juga oleh internalisasi prinsip GCG dan materi Code of Conduct sehingga diharapkan seluruh insan Perusahaan dapat senantiasa patuh dan berlaku etis sesuai dengan peraturan Perusahaan.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2020

Selama tahun 2020, tidak terdapat pelaporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke Whistleblowing System Perum Jasa Tirta II.

Complaint Handling

- Whistle Blowing Handling Manager verifies incoming reports based on team notes. The Whistle Blowing Handling Team will decide whether to have an investigation of such report within a period of 30 (thirty) days and may be extended for a maximum of 30 (thirty) working days.
- If the verification result indicates a violation accompanied by sufficient evidence, then the whistleblowing may be processed into the investigation stage.
- In relation with the whistle blowing that involves employees who require investigation shall be followed up by the Board of Directors for investigation of the Internal Audit Unit (SPI).
- The recommendations of the investigations undertaken by the SPI are submitted to the Disciplinary Team for follow-up and reported to the Board of Directors.
- In relation with whistle blowing that involves members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of Supervisory Board and the Board of Directors that requires investigations shall be followed up by the Supervisory Board to be investigated by the Audit Committee or delegated to independent parties.
- The BoD will decide upon the follow up on the recommendation of the Disciplinary Team, for the Supervisory Board to decide upon the follow-up on the recommendation of the Audit Committee/Independent.
- In the event of a proven investigation result concerning the employees, the follow-up is completed by the Board of Directors without involving any party.
- In the event of a proven investigation of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board and the Board of Directors, the follow-up is completed by the Supervisory Board without involving the any party.
- The proven offender under investigation will be processed in accordance with applicable regulations.

Dissemination of Whistleblowing

In facilitating and ensuring that all Company personnel and other interested parties are aware of the Whistleblowing System's policies and mechanisms, the Company conducts dissemination and internalization through direct presentations to employees and stakeholders. The Whistleblowing System dissemination is also supported by the internalization of GCG principles and the material of the Code of Conduct so that it is expected that all Company personnel can always comply with and be ethical in accordance with Company regulations.

Total Complaints and the Follow-up in 2020

There were no complaints received by Whistleblowing System of Perum Jasa Tirta II throughout 2020.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) REPORT OF STATE OFFICIAL ASSETS (LHKPN)

Dukungan Perum Jasa Tirta II terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan melalui pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan dan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi wajib lapor ditujukan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kepatuhan, kejujuran, dan integritas, serta transparansi di kalangan penyelenggara negara.

Dasar Hukum LHKPN

Dasar hukum kebijakan pelaporan LHKPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun di lingkup internal, kebijakan pelaporan LHKPN di lingkungan Perum Jasa Tirta II telah ditetapkan melalui PRD 18/DIR/03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/DIR/02/PRD-DRD/2018 tentang Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Perum Jasa Tirta II.

Wajib Lapor LHKPN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Dewan Pengawas dan Direksi;
2. Pejabat struktur sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi;
3. Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi;
4. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

Mekanisme Pelaporan LHKPN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana wajib lapor berkewajiban untuk:

1. Diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun;
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

The support of Perum Jasa Tirta II to the implementation of a state that is clean and free of corruption, collusion and nepotism (KKN) is realized through the implementation and management of policies and mechanisms for the submission of Report of State Official Assets (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK). The obligation to report assets for compulsory reporting is aimed at preventing the potential for abuse of position and authority, instilling compliance, honesty, and integrity, as well as transparency among state administrators.

Legal Basis of LHKPN

The legal basis for the LHKPN policy is as follows:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

As for the internal scope, the LHKPN policy in Perum Jasa Tirta II has been established through PRD 18/DIR/03/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. 1/DIR/02/PRD-DRD/2018 concerning Compliance Guidelines for Submission of Report of State Official Assets (LHKPN) for Officials in Perum Jasa Tirta II.

Compulsory LHKPN Report

As stipulated in the applicable laws and regulations, officials that must report LHKPN in the Company include:

1. Supervisory Board and Board of Directors;
2. Officials of structures up to two levels below the Board of Directors;
3. Board of Directors of Subsidiaries and/or Associated Companies;
4. Other officials who have strategic functions in relation to state administrators.

LHKPN Reporting Mechanism

The mechanism for reporting the assets of the Company officials is carried out by referring to Law No. 28 of 1999, in which:

1. The officials' assets must be examined before, during, and after taking office;
2. The officials shall report their assets at the first time in office, transfer, promotion and retirement;
3. The officials shall announce their assets.



Pelaksanaan Laporan LHKPN Tahun 2020

Perum Jasa Tirta II telah menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun buku 2019 yang dilaporkan di tahun 2020 oleh pejabat Perusahaan dengan jumlah dan rekapitulasi sebagai berikut:

Implementation of LHKPN Report in 2020

Perum Jasa Tirta II has submitted the LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2019 fiscal year reported in 2020 by Company officials with the following number and recapitulation:

No.	Unit Kerja/Bisnis/Anak Perusahaan / Business/Work Unit/Subsidiary	Total Wajib Lapor / Total Officials	Pelaporan 2020 / Reporting in 2020			
			Telah Melaporkan / Have Report	%	Belum Melaporkan / Have not Report	%
1.	- Dewan Pengawas / Supervisory Board - Direksi / Board of Directors - BOD-1 (Struktural) / BOD-1 (Structural) - BOD-2 (Struktural) / BOD-2 (Structural)	86	85	98,84	1	1,16

Sosialisasi LHKPN

Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dissemination of LHKPN

As a commitment to LHKPN compliance, the Company routinely conducts dissemination and training related to the procedures for using e-LHKPN to follow-up on KPK Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Conducting Announcements and Examination of Assets.

PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Pelaksanaan dan pengelolaan barang dan jasa Perum Jasa Tirta II dilakukan melalui optimalisasi sinergi BUMN sebagai upaya pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap berprinsip pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi, fleksibilitas, jujur, adil, serta bebas dari benturan kepentingan. Penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, di mana Perusahaan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

The implementation and management of goods and services in Perum Jasa Tirta II are carried out through optimization of BUMN synergy as an effort to empower SOEs with the principle of mutual benefit while remaining principled in compliance with applicable laws, transparency, flexibility, honesty, fairness, and free from conflicts of interest. The appointment of providers of goods and services is carried out openly for those who meet the requirements and is carried out through fair competition. The entire procurement process is carried out based on clear and transparent provisions and procedures, in which the Company also has an Owner Estimate (HPS) calculated in expertise and based on data that can be accounted for.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam proses pengadaan akan menjadi mudah apabila didukung oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengadaan baik Divisi Pengadaan, Unit Kerja terkait dan Penyedia. Semua pihak haruslah bersama memahami dan serentak mengimplementasikan semua etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel) yang telah terkandung dalam pasal-pasal kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan.

The implementation of good corporate governance (GCG) principles in the procurement process will be easy if supported by all components involved in the procurement process which are the Procurement Division, the relevant Work Unit, and the Provider. All parties must jointly understand and simultaneously implement all procurement ethics and principles (efficient, effective, transparent, open, competitive, fair and accountable) that have been contained in the articles of the Company's procurement of Goods and Services.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen menegluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor : PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor : PRD-8/DIR/03/2020 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PJT II.

Prosedur dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan secara sistematis, dimulai dari rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan.

Perusahaan merencanakan transformasi sistem dalam mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan target memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Informasi mengenai realisasi pengadaan barang dan jasa selama tahun 2020 yang direalisasikan adalah sebagai berikut:

Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 Procurement of Goods and Service in 2020

Jenis Pengadaan Barang dan Jasa / Type of Procurement of Goods and Service	Nilai (dalam Rp) / Value (in Rp)
Investasi / Investment	105.896.787.341

Metode pengadaan barang dan jasa turut direalisasikan melalui program integrasi Sinergi BUMN, yang pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Legal Basis of Procurement of Goods and Service

The policy applied in the process of procuring goods and services refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-08/MBU/12/2019 concerning general guidelines for the implementation of procurement of goods and services for State-Owned Enterprises, therefore management issues a board of directors regulation. to adopt these rules through the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Directors of PJT II Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning the guidelines for the implementation of the procurement of goods/services within the PJT II environment.

Procedures and Realization of Procurement of Goods and Services

Procedures for the procurement of goods and services in Perum Jasa Tirta II are carried out systematically, starting from the procurement plan, the procurement process, receipt and storage, as well as the use and management of assets by the relevant divisions for approval.

The Company plans a system transformation in managing and controlling policies and activities related to the procurement of goods and services with the target of selecting an experienced Goods and Services Provider who is able to provide the best quality service, competitive prices, the best after-sales guarantee and is carried out by experienced companies that have the appropriate expertise with the needs of goods and services.

Information regarding the realization of the procurement of goods and services in 2020 is as follows:

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sinergi BUMN Tahun 2020 Procurement of Goods and Service through Sinergi BUMN in 2020

No.	Nama Mitra (BUMN/Anak) / Name of Partners (SOE/ Subsidiary)	Nama Kegiatan/Proyek / Name of Activities/Projects	Nilai Proyek (dalam Rp) / Value of Projects (in Rp)
1	PT Pindad (Persero)	Excavator Long Arms	1,848,000,000
2	PT. Sucofindo Advisory Utama	Jasa Konsultan Studi Kelayakan Pengusahaan Aset & Lahan	1,346,763,000
3	PT. Sucofindo (Persero)	Jasa Konsultan Reinventarisasi Aset di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta II	1,032,823,350
4	PT. Surveyor Indonesia (Persero)	Penyusunan FS AMDK BUMN Holding (Brand Infresh)	690,954,000



No.	Nama Mitra (BUMN/Anak) / Name of Partners (SOE/ Subsidiary)	Nama Kegiatan/Proyek / Name of Activities/Projects	Nilai Proyek (dalam Rp) / Value of Projects (in Rp)
5	PT. Indra Karya (PERSERO)	Study Daya dukung Perairan waduk untuk pengembangan PLTS	480,480,000
6	PT. Indra Karya (PERSERO)	Perencanaan teknik Unit Usaha PLTA & EBT - Perum Jasa Tirta II	298,543,300
7	PT. Indra Karya (PERSERO)	Beban perencanaan teknik jangka panjang 2021	298,180,300
8	Hotel Indonesia Group	Manajemen Fee Pengelolaan Hotel	276,271,584
9	PT Bahana Kapital Investa	Pekerjaan Jasa Konsultasi "Pra Studi/Assesment dan Strategi Akuisisi Bisnis	213,840,000
10	PT. Indah Karya (Persero)	Pekerjaan Jasa Konsultan Bimbingan dan Penerapan SMAP ISO 37001 : 2016 Pra Sertifikasi	189,200,000
11	PT. Indra Karya (PERSERO)	Beban perencanaan teknik 2020 Unit Usaha PLTA & EBT Perum JASA Tirta II	149,150,100
12	PT Bahana Kapital Investa	Pek. Pra Studi/ Assesment & Strategi Akuisisi Bisnis	142,560,000
Total			6,966,765,634

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Seluruh pejabat dan pegawai dalam manajemen Perum Jasa Tirta II merupakan pribadi yang independen sehingga tidak diperkenankan terlibat secara aktif dan pasif dalam kegiatan politik, termasuk memberikan bantuan dana atau donasi untuk kepentingan politik. Kebijakan demikian bertujuan untuk menjagaindependensi, integritas, serta akuntabilitas manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara kepedulian terhadap masalah sosial merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab Perum Jasa Tirta II kepada masyarakat. Uraian lebih lengkap mengenai penyediaan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dimuat dalam Laporan Tahunan ini, bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

All officials and employees in the management of Perum Jasa Tirta II are independent individuals so that they are not allowed to be actively and passively involved in political activities, including providing financial assistance or donations for political purposes. Such policies aim to maintain the independence, integrity and accountability of management in carrying out business activities in accordance with applicable rules and regulations.

Meanwhile, awareness of social issues is an important part of the duties and responsibilities of Perum Jasa Tirta II to the community. A more complete description of the provision of funds for social and environmental responsibility activities has been included in this Annual Report, Corporate Social Responsibility chapter.

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE

Salah satu komitmen Perum Jasa Tirta II dalam menjalankan praktik terbaik GCG diwujudkan melalui pencegahan dan minimalisasi potensi terjadinya praktik Bad Corporate Governance yang mampu membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Evaluasi atas keberhasilan pencegahan terjadinya praktik Bad Corporate Governance dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan terkait indikasi aktivitas kegiatan usaha Perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar.

Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga sejalan dengan tidak terdapatnya teguran kepada Perusahaan terkait permasalahan perpajakan.

Kasus Terkait Buruh dan Pegawai

Selama tahun 2020, tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perusahaan dengan buruh atau pegawai Perusahaan. Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditunjukkan kepada Perusahaan telah dijabarkan dalam pembahasan informasi Permasalahan Hukum dalam Laporan Tahunan ini.

Hubungan dengan Pejabat Publik dan Pejabat Pemerintah

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan pejabat publik dan pejabat Pemerintah melalui ketentuan hubungan kerja yang dimuat dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan.

One of Perum Jasa Tirta II's commitments in carrying out GCG best practices is realized through the prevention and minimization of the potential for the occurrence of Bad Corporate Governance practices that may have a negative impact on the sustainability of the Company's business. An evaluation of the success in preventing the occurrence of Bad Corporate Governance practices is described in the following description:

Report on Company Activities that Pollute the Environment

There were no reports related to indications of the Company's business activities that pollute the surrounding environment throughout 2020.

Tax Obligation Compliance Report

The Company fulfilled all tax obligations throughout 2020. This is also in line with the absence of reprimands to the Company regarding tax issues.

Cases Regarding Labor and Employees

There were no cases involving the Company with workers or employees of the Company in 2020. The recapitulations of cases and lawsuits both committed and/or aimed at the Company have been elaborated in the discussion of Legal Issues information in this Annual Report.

Relations with Public Officials and Government Officials

The Company has policies that regulate relations with public officials and Government officials through the terms of work relations contained in the Company's Code of Conduct.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY





TANGGUNG JAWABN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Perusahaan secara berkala mengevaluasi kinerja tanggung jawab sosial perusahaannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup tiga dimensi, yaitu People, Profit, dan Planet.

The Company periodically evaluates the performance of its corporate social responsibility by taking into account the principles of sustainability which includes three dimensions, namely People, Profit, and Planet.



In-Take Buaran, salah satu in-take pengambilan air baku untuk PAM Jaya

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL) memiliki peran penting dalam keberlanjutan suatu usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dan perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial yang matang dan sistematis agar pelaksanaan kegiatan TJSL dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan Perusahaan ke depan. Perusahaan juga terus berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan operasi, pemenuhan kesejahteraan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen Perum Jasa Tirta II dalam mewujudkan komitmen tersebut, Perusahaan secara berkala mengevaluasi kinerja tanggung jawab sosial perusahaannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mencakup tiga dimensi, yaitu People, Profit, dan Planet. Ketiga aspek ini menjadi perhatian utama Perusahaan dalam merumuskan agenda TJSL dan diwujudkan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan hubungan dengan konsumen, peningkatan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, serta pengelolaan kelestarian lingkungan.

Perum Jasa Tirta II is aware that corporate social responsibility (Social and Environmental Responsibility/ TJSL) has a significant contribution in the sustainability of a business. Therefore, a high level of commitment and thorough and systematic planning of social responsibility activities are required so that the implementation of CSR activities can have a positive impact on the Company's growth in the future. The company also strives to create a balance between operations, fulfillment of the welfare of human resources, community empowerment, and environmental preservation to achieve sustainable development goals.

As part of Perum Jasa Tirta II's commitment in realizing that commitment, the Company periodically evaluates the performance of its corporate social responsibility by considering sustainability principles which include three dimensions, namely People, Profit, and Planet. These three aspects are the main concern of the Company in formulating CSR agenda and manifested in programs to improve community welfare, maintain customer relations, improve occupational health and safety assurance for employees, and manage environmental sustainability.



KOMITMEN PELAKSANAAN TJSL

COMMITMENT TO CSR IMPLEMENTATION

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa kinerja positif Perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Kontribusi dalam pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci keberhasilan Perusahaan secara berkelanjutan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL) yang secara konsisten dilakukan oleh Perusahaan.

Program TJSL Perusahaan dilakukan melalui berbagai inisiatif dengan mengadopsi pendekatan ISO 26000 Social responsibility yang secara holistik dan komprehensif mengatur 7 (tujuh) aspek utama dalam tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut menjadi pendekatan ideal yang digunakan organisasi dan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yang berprinsip pada tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Perum Jasa Tirta II is aware that the Company's positive performance is not only measured by growth and business performance. Contributions to environmental preservation, community empowerment, employee welfare, and customer satisfaction are part of the positive performance and key to the Company's continued success. This is the background of the implementation of Social and Environmental Responsibility which is consistently carried out by the Company.

The Company's CSR program is applied through various initiatives by adopting ISO 26000 of Social responsibility approach that holistically and comprehensively manages 7 (seven) main aspects of social responsibility. The approach is an ideal approach used by organizations and companies in carrying out social responsibility that is based on the principles of sustainable development goals.

Hollistic Integrated Approach ISO 26000 Social Responsibility
Hollistic Integrated Approach of ISO 26000 of Social Responsibility



ISO 26000 Social Responsibility mengatur mengenai tujuh fokus tanggung jawab sosial dengan uraian sebagai berikut :

ISO 26000 of Social Responsibility governs seven focuses of social responsibility as follows :

Fokus Tanggung Jawab Perusahaan / Corporate Responsibility Focus	Uraian / Description
Tata Kelola Organisasi / Organizational Governance	Penetapan, pengambilan, dan penerapan keputusan strategis sehingga prinsip tanggung jawab sosial dapat diterapkan. / Determination, the making, and application of strategic decisions so that the principles of social responsibility can be applied.
Hak Asasi Manusia / Human Rights	Hak dasar yang dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. / Basic rights that all people have as humans, including civil, Political, economic, social and cultural rights.
Praktik Ketenagakerjaan / Labour Practices	Kebijakan dan praktik terkait pekerjaan dan ketenagakerjaan. / Policies and practices related to job and labour.
Lingkungan / Environment	Tanggung jawab atas dampak lingkungan kepada masyarakat dari kegiatan bisnis yang dilakukan. / Responsibility on environmental impact on the community from business activities carried out.
Operasi yang Adil / Fair Operating Practices	Penerapan perilaku etis dan adil saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan. / Implementation of ethical and fair behaviour when interacting with stakeholders.
Isu Konsumen / Consumer Issues	Pemenuhan hak-hak konsumen terkait produk dan layanan yang diberikan, kejelasan informasi, dan perlakuan yang adil. / Fulfillment of consumer rights related to product and services given, information clarity, and fair treatment
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat / Community Involvement and Development	Hubungan dan interaksi perusahaan dengan masyarakat di lingkungan operasinya. / Relationship and interaction of the company with community around its operational area.

PRINSIP DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN TJSL

PRINCIPLES AND LEGAL BASIS OF CSR IMPLEMENTATION

Pelaksanaan kegiatan TJSL melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program yang bersifat mandatory bagi entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 tahun 2003 di mana salah satu kewajiban Perusahaan adalah melaksanakan program TJSL.

Amanat dalam melaksanakan TJSL dalam bentuk PKBL juga diatur dalam dan mengacu pada regulasi yang menjadi pedoman kebijakan bagi perusahaan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

The implementation of CSR activities through Partnership and Community Development Program (PKBL) is a mandatory program for State-Owned Enterprises (SOEs) based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/7/2017 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of State Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership and Community Development Program of SOE. This policy is a manifestation of the Limited Liability Company Law No. 19 of 2003 in which one of the Company's obligations is to implement CSR program.

The mandate of implementing CSR in the form of PKBL is also regulated in and refers to the following regulations that become the policy guidelines for the company :

- Law Number 40 of 2007 Article 74 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility;
- Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises;
- Regulation of the Minister of BUMN Number KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/04/2020 concerning the third amendment to the regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning partnership programs and environmental development programs for State-Owned Enterprises.



Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun kebijakan dan program TJSL baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program TJSL. Di samping itu, Perum Jasa Tirta II telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) TJSL yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program-program TJSL agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkan untuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan program TJSL.

Referring to the above policies, the Company prepares CSR policies and programs both in concept and in written implementation objectives. The company has established policies that are validated in writing by leaders of the Company regarding the CSR program. In addition, Perum Jasa Tirta II already has a CSR Standard Operating Procedure (SOP) which regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs in order to be effective and have an optimal impact on stakeholders. The SOP is also intended to uphold the principles of good corporate governance in the implementation of CSR programs.

METODE PROGRAM TJSL

CSR PROGRAM METHOD

Kebijakan TJSL Perum Jasa Tirta II mengacu kepada konsep *triple bottom line* yaitu profit, people, dan planet. Dalam konsep ini, Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan (*profit*) semata, namun berkontribusi memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lain (*people*) serta turut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Guna mengimplementasikan prinsip tersebut, Perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dimulai dari aspek yang terkecil, sebagai contoh dengan memiliki kebijakan dan menjalankan program kerja yang tidak mengeksploitasi alam.

The PJT II CSR policy refers to the Triple Bottom Line concept namely "Profit, People, Planet". In this concept, the Company is not only pursuing return (profit), but contributes to paying attention and being involved in fulfilling the welfare of the community, employees and other stakeholders (people) and actively participating in protecting the environment (planet). In order to implement this principle, the Company applies social responsibility starting from the smallest aspects, for example by having policies and running work programs that do not exploit nature.

Perusahaan merancang dan melaksanakan program TJSL secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan TJSL dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

The company designs and implements CSR programs in a systematic and integrated manner. The implementation of CSR is carried out by participatory methods, namely by empowering the potential of existing regions in order to improve the ability, income and welfare of the community in a sustainable manner.

TATA KELOLA TJSL

CSR GOVERNANCE

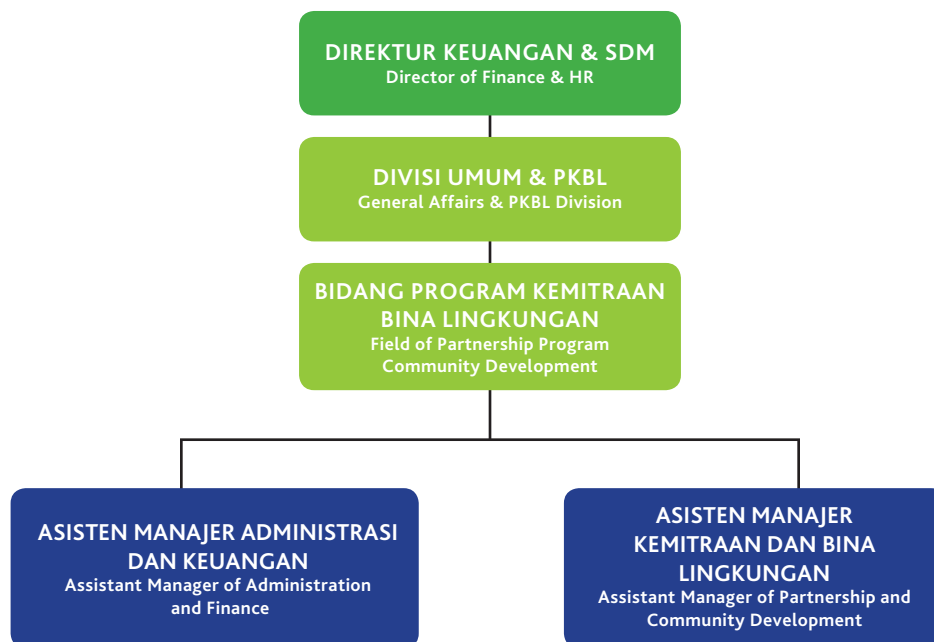
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN TJSL

Kegiatan TJSL Perum Jasa Tirta II dilaksanakan oleh satu unit kerja khusus yaitu Bidang PKBL yang merupakan Unit Organisasi yang tidak terpisahkan dari organisasi BUMN, sesuai dengan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor PRD-25/DIR/10/2019 beserta peraturan perubahannya tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Unit tersebut setingkat Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Divisi Umum & PKBL dengan pembina Direktur Keuangan & SDM Perum Jasa Tirta II. Adapun struktur organisasi PKBL adalah sebagai berikut :

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CSR ACTIVITY MANAGEMENT

CSR activity of Perum Jasa Tirta II is implemented by CSR special unit in Field of PKBL which is an inseparable Unit of SOE organization, pursuant to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-25/DIR/10/2019 and its regulation of change concerning Organizational Structure and Administration of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. The unit is at the level of Section that is directly responsible to the Head of General Division & PKBL with the supervisor of Director Finance & HR of Perum Jasa Tirta II. Organizational Structure PKBL is as follows :

Struktur Organisasi PKBL & TJSL organizational Structure of PKBL & CSR



METODE DUE DILIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Dalam memetakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha, Perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran tingkat urgensi dampak keberlanjutan yang dihasilkan setiap aktivitas usahanya. Pelaksanaan metode due diligence dilakukan dengan melibatkan unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya guna memetakan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan yang diangkat. Hasil metode due diligence selanjutnya menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menyusun kegiatan dan program yang dikhususkan untuk membidik isu-isu keberlanjutan tersebut.

Dalam menetapkan isu-isu keberlanjutan, Perusahaan melakukan identifikasi dengan berlandaskan pada 4 (empat) langkah yang disyaratkan sebagai berikut :

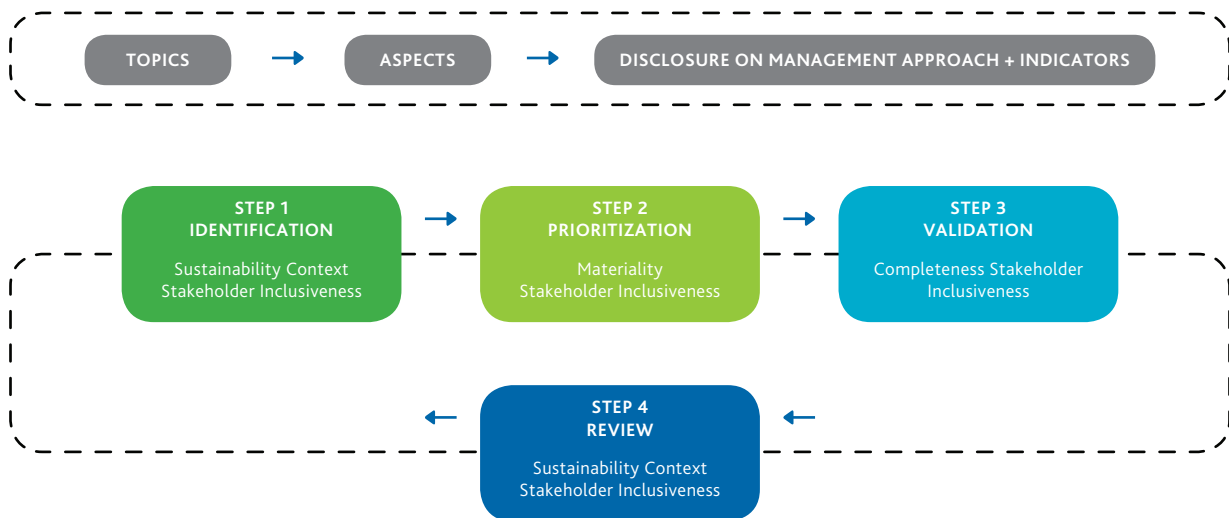
1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang material dan boundary (langkah identifikasi);
2. Membuat prioritas atas aspek-aspek pada langkah sebelumnya (langkah Prioritas);
3. Melakukan validasi atas aspek-aspek material tersebut (langkah Validasi);
4. Melakukan review atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya (langkah Review).

DUE DILIGENCE METHOD FOR THE SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COMPANY ACTIVITIES

In mapping the social, economic and environmental impacts resulting from business activities, the Company identifies and measures the urgency level of the sustainability impacts that are generated from each of its business activities. The implementation of due diligence method is carried out by involving work units and other stakeholders in order to map priorities of the sustainability issues raised. The results of the due diligence method then become a reference for the Company to prepare activities and programs that focus on these sustainability issues.

In determining sustainability issues, the Company identifies the issue based on 4 (four) required steps as follows :

1. Identifying material and boundary aspects (identification steps);
2. Setting priorities of the aspects in the previous step (Priority step);
3. Validating the material aspects (Validation step);
4. Reviewing the report after it has been published to improve the quality of the next year's report (Review step).



STAKEHOLDER TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dalam berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan etika guna memenuhi tanggung jawabnya kepada para Pemangku Kepentingan dan Pemilik Modal. Untuk itu, Perum Jasa Tirta II senantiasa menjaga hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingannya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Hubungan baik tersebut dilaksanakan dalam kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pemangku kepentingan dalam hal ini dimaknai sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga kehadirannya berdampak terhadap dan/atau terdampak akibat pelaksanaan proses usaha Perusahaan. Adapun stakeholders Perusahaan terdiri dari :

- **Stakeholder Primer**
Stakeholder primer merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung pada suatu kebijakan, program, dan proyek Perusahaan. Tanpa partisipasi berkelanjutan dari stakeholder primer, Perusahaan tidak dapat bertahan. Adapun contoh stakeholder primer yaitu Pemilik Modal (Kementerian BUMN, Kementerian PUPR), kreditur, karyawan, pemasok, konsumen (PAM DKI Jakarta, PDAM Kabupaten/Kota, PLN), penyalur, pesaing atau rekanan dan Masyarakat sekitar DAS Citarum dan Bendungan Ir H. Djuanda.
- **Stakeholder Sekunder**
Stakeholder sekunder tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek. Akan tetapi, pihak ini memiliki kepedulian (*concern*) sehingga turut berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal Pemerintah. Stakeholder ii juga didefinisikan sebagai pihak yang memengaruhi atau

STAKEHOLDERS AFFECTED BY SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL OF COMPANY ACTIVITIES

The Company is committed to always adhering to and complying with applicable laws and regulations and upholding the Company's values in interacting and behaving in accordance with ethics in order to fulfill its responsibilities to the Stakeholders and Investors. Therefore, Perum Jasa Tirta II always maintains good relations with all its stakeholders in order to maintain business continuity. Good relations are carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Stakeholders in this case are interpreted as parties who have direct or indirect interests in the Company, so that their presence has an impact on and/or is affected by the implementation of the Company's business processes. The company's stakeholders consist of :

- **Primary Stakeholders**
Primary stakeholders are the main determinants in the decision-making process because they have a direct interest in a Company policy, program and project. Without the continued participation of primary stakeholders, the company cannot survive. The examples of primary stakeholders are Capital Owners (Ministry of BUMN, Ministry of PUPR), creditors, employees, suppliers, consumers (PAM DKI Jakarta, PDAM Regency / City, PLN), distributors, competitors or partners and communities around the Citarum Watershed and Dam Ir H. Djuanda.
- **Secondary Stakeholders**
Secondary stakeholders do not have direct interest in a policy, program and project. However, this party has concern so that it will also affect the attitude of the community and the Government's legal decisions. Stakeholders ii are also defined as parties who influence or are influenced by the Company but are not involved in transactions

dipengaruhi oleh Perusahaan tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan Perusahaan. Adapun yang termasuk sebagai stakeholder sekunder yaitu pemerintah setempat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Asing (JICA), kelompok sosial (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), media massa, dan lain sebagainya.

- **Stakeholder Kunci**

Stakeholder kunci memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Adapun yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah pemerintah kabupaten, di antaranya Pemprow DKI Jakarta, Pemda Kabupaten Karawang, DPRD dan dinas Pemprow Jawa Barat, Kabupaten Subang, Indramayu, Bekasi, Bandung, Sumedang, Garut dan kabupaten lainnya di sepanjang DAS Citarum..

with the Company. Those included as secondary stakeholders are the local government (DKI Jakarta Provincial Government, West Java Provincial Government, Purwakarta Regency Government, Foreign Government (JICA), social groups (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), mass media, and so on.

- **Key Stakeholders**

Key stakeholders have legal authority in decision making. Stakeholders are defined as elements of the executive according to their level, legislative and agency. As for those included in the key stakeholders are the district government, including the DKI Jakarta Provincial Government, the Karawang Regency Government, the DPRD and the West Java Provincial Government offices, Subang Regency, Indramayu, Bekasi, Bandung, Sumedang, Garut and other districts along the Citarum watershed.

ISU-ISU PENTING TERKAIT SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS PERUSAHAAN

Penetapan isu-isu keberlanjutan terkait aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan relevansi dan signifikansi pengaruh topik tersebut kepada pemangku kepentingan dan nilai keberlanjutan Perum Jasa Tirta II. Isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah diidentifikasi selanjutnya akan ditentukan batasannya guna menentukan pelibatan dan tindak lanjut yang akan diambil Perusahaan.

IMPORTANT ISSUES RELATED TO SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENT RELATED TO COMPANY ACTIVITIES

The determination of sustainability issues related to social, economic and environmental aspects related to the Company's activities is determined by considering the relevance and significance of the impact of the topic to stakeholders and the sustainability value of Perum Jasa Tirta II. Boundary of the identified social, economic and environmental issues will then be determined in order to determine engagement and follow-up to be taken by the Company.

No.	Isu dan Topik Material / Issues and Material Topic	Alasan Isu/Topik Ini Material / Reason Why These Issues/Topics are Material	Relevan di dalam Batasan Perusahaan / Relevant in the Company's Boundary	Relevan di luar Batasan Perusahaan / Relevant outside the Company's Boundary
1	Organ Perusahaan / Company Organ	Berdampak signifikan bagi karyawan / Have significant impact on the employees	√	
2	Manajemen Risiko / Risk Management	Berdampak signifikan bagi kelangsungan usaha / Have significant impact on business sustainability	√	
3	Anti Korupsi / Anti Corruption	Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan dan pembangunan / Have significant impact on stakeholders and development	√	
4	Informasi Produk dan Jasa / Product and Service Information	Berdampak signifikan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan / Have significant impact on customers and stakeholders	√	
5	Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction	Berdampak signifikan bagi pelanggan / Have significant impact on the customers	√	√
6	Kinerja Operasional / Operational Performance	Berdampak signifikan bagi Pemilik Modal dan pemangku kepentingan serta keberlangsungan usaha / Have significant impact on Investors and stakeholders as well as business continuity	√	
7	Kontribusi Nilai Ekonomi / Economic Value Contribution	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan / Have significant impact on stakeholders	√	
8	Implikasi Finansial, Risiko dan Peluang Akibat Perubahan Iklim / Financial Implication, Risk, and Opportunities due to Climate Change	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan / Have significant impact on stakeholders	√	



No.	Isu dan Topik Material / Issues and Material Topic	Alasan Isu/Topik Ini Material / Reason Why These Issues/Topics are Material	Relevan di dalam Batasan Perusahaan / Relevant in the Company's Boundary	Relevan di luar Batasan Perusahaan / Relevant outside the Company's Boundary
9	Rekrutmen Pegawai / Employee Recruitment	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	√
10	Penilaian Kinerja Pegawai / Assessment of Employee Performance	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	
11	Pengembangan Karier Pegawai / Employee Career Development	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	
12	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai / Employee Competency Training and Development	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	√
13	Hubungan Industrial Manajemen dan Pegawai / Industrial Relations between Management and Employees	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	
14	Pelibatan dan Kepuasan Pegawai / Employee Engagement and Satisfaction	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	
15	<i>Reward & Punishment</i>	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	
16	Kesejahteraan Pegawai / Employee Welfare	Berdampak signifikan bagi pegawai / Have significant impact on employees	√	
17	Konsumsi dan Efisiensi Energi / Energy Consumption and Efficiency	Berdampak signifikan bagi nilai keberlanjutan / Have significant impact on sustainability values	√	
18	Pemanfaatan dan Daur Ulang Air / Utilization and Recycle of Water	Berdampak signifikan bagi nilai keberlanjutan / Have significant impact on sustainability values	√	√
19	Pengelolaan Emisi, Limbah B3, Non B3, dan Tumpahan Kimia / Emission, Hazardous, Non Hazardous Waste and Chemical Spills	Berdampak signifikan bagi nilai keberlanjutan / Have significant impact on sustainability values	√	√
20	Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat / Community Engagement and Development	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan / Have significant impact on stakeholders	√	√



Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial yang Menjadi Kewajiban Perusahaan

Sebagai bagian dari entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan program PKBL ditujukan untuk mendukung pembinaan usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat yang bersifat filantropis. Adapun besaran dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan bersumber dari laba bersih dan/atau biaya paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

Sumber dan Realisasi Anggaran Dana TJSL PKBL

Realisasi penggunaan dana Program Kemitraan tahun 2020 sebesar Rp1.637.250.000, menurun 6,10% dari realisasi penggunaan dana Program Kemitraan tahun 2018 sebesar Rp1.743.674.443. Sementara realisasi program Bina Lingkungan tahun 2019 sebesar Rp5.159.558.599, meningkat dari realisasi penyaluran dana program Bina Lingkungan tahun 2018 sebesar Rp29.617.729.

Scope of Corporate Social Responsibility which is the Obligation of the Company

As part of a State-Owned Enterprise (BUMN) entity, the Company has the responsibility and obligation to carry out the Partnership and Community Development Program (PKBL) as stipulated in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and the Ministerial Regulation for Entities. State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/04/2020 concerning the third amendment to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Environmental Development Program for State-Owned Enterprises.

The implementation of PKBL program is aimed at supporting the development of small and medium-sized businesses and empowering environmental and philanthropic social conditions. Partnership Program and Community Development Program funds are sourced from net profit and/or take at most 4% (four percent) of the projected net profit of the previous year, which is definitively determined at the time of the annual report validation.

Source and Realization of PKBL CSR Fund Budget

The realization of the use of Partnership Program funds in 2020 amounted to Rp1,637,250,000, a decrease of 6.10% from the realization of the use of Partnership Program funds in 2018 amounting to Rp1,743,674,443. Meanwhile, the realization of the Community Development Program in 2019 amounted to Rp5,159,558,599, an increase from the realization of the distribution of the Community Development program in 2018 amounting to Rp29,617,729.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA CORPORATE RESPONSIBILITY REGARDING HUMAN RIGHTS

KEBIJAKAN TJSL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap pemeliharaan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pemangku kepe ntingan dilandasi dengan rasa hormat terhadap aspek-aspek dan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia. Adapun nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan kesetaraan dan anti diskriminasi terhadap suku, agama, ras, gender, latar belakang budaya, dan warna kulit.

Hubungan yang saling mendukung dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) telah dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Jasa Tirta II yang terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.247/PHIJSK-PK/PP&PKB/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

CSR POLICIES RELATED TO HUMAN RIGHTS

The commitment of Perum Jasa Tirta II to maintaining synergic and harmonious relations with stakeholders is based on respect for the basic aspects and values of Human Rights. The values are realized through the application of equality and anti-discrimination policies against ethnicity, religion, race, gender, cultural background, and skin color.

Relationships that mutually support and fulfill Human Rights (HAM) have been reinforced through the Joint Work Agreement (PKB) of Perum Jasa Tirta II registered in the Decree of the Director General of Industrial Relations and Workers Social Security No. KEP.247/PHIJSK-PK/PP&PKB/X/2019 dated October 25, 2019.



TARGET TJSL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Pemenuhan prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari tanggung jawab Perusahaan diarahkan pada pemberian perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, dan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan melalui penyediaan iklim dan lingkungan kerja yang aman dan anti-diskriminatif, bebas kerja paksa, dan menjunjung nilai kesetaraan bagi pemangku kepentingan.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Kebebasan Berserikat

Perum Jasa Tirta II berupaya mengakomodasi dan mendukung kebebasan berserikat bagi karyawan melalui pembentukan Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II sebagai organisasi serikat karyawan yang sah untuk mewakili kepentingan karyawan di Perusahaan. Pembentukan Serikat Pekerja telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 pasal 4 yang mendukung penyediaan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Pembentukan Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II telah dilengkapi dengan penunjukan struktur pengelola yang bertanggung jawab dalam mengurus dan mengkomunikasikan perundingan permasalahan ketenagakerjaan dengan manajemen.

Hak Cuti

Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan cuti tahunan selama 12 hari per tahun dan cuti besar maksimal selama 3 bulan bagi karyawan yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus. Dalam mendukung dan melengkapi pelaksanaan cuti tersebut, Perusahaan juga memberikan tunjangan cuti.

Selain cuti wajib, Perusahaan juga menyediakan hak cuti menunaikan ibadah haji, hak cuti melahirkan (*maternity leave*), dan hak cuti mendampingi istri melahirkan (*paternity leave*) bagi karyawan.

Kegiatan Ibadah Keagamaan

Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada karyawan untuk menjalankan kegiatan ibadah wajib sesuai dengan agama yang dianut masing-masing karyawan. Selain menyediakan waktu, Perusahaan juga menyediakan tempat dan sarana ibadah yang dapat dipergunakan sebagai tempat peribadatan yang bersifat wajib.

CSR TARGETS RELATED TO HUMAN RIGHTS

The fulfillment of Human Rights principles and values as part of the Company's responsibilities is directed at providing protection, defending rights and interests, and improving the welfare of employees through the provision of a safe and anti-discriminatory work environment and climate, free of forced labor, and upholding the equality value for stakeholders.

CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES FOR HUMAN RIGHTS

Freedom of Association

Perum Jasa Tirta II strives to accommodate and support freedom of association for employees through the establishment of Perum Jasa Tirta II Labor Union as a legal employee labor organization to represent the interests of employees in the Company. The formation of labor union is in accordance with the provisions in Article 4 of the 1945 Law which supports the provision of protection, defense of rights and interests, and the promotion of adequate welfare for workers/labor and their families.

The establishment of Perum Jasa Tirta II Labor Union has been complemented by the appointment of a management structure responsible for managing and communicating labor issues with the management.

Leave Rights

Perum Jasa Tirta II provides an opportunity for 12 days of annual leave per year and a maximum cut of 3 months for employees who have worked continuously for 6 (six) years. In supporting and completing the implementation of the leave, the Company also provides leave allowances.

In addition to compulsory leave, the Company also provides leave rights for pilgrimage, maternity leave, and paternity leave for employees.

Religious Activities

Perum Jasa Tirta II provides the opportunity and flexibility for employees to carry out their obligatory religious practices in accordance with the religion of each employee. In addition to providing time, the Company also provides a place of worship that can be used as a place of worship for doing obligatory acts of worship.

DAMPAK TJSL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Dengan menerapkan pengelolaan SDM yang berlandaskan pemenuhan hak-hak asasi manusia, Perusahaan memperoleh tingkat engagement karyawan yang terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin melalui mekanisme survei kepuasan karyawan yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur tingkat pelayanan yang telah diberikan sekaligus memperoleh umpan balik (*feedback*) terhadap pengelolaan SDM secara berkesinambungan.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL COMPANY RESPONSIBILITIES REGARDING FAIR OPERATIONS

KEBIJAKAN TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap kegiatan dan proses bisnis yang sehat, bersih, dan adil dimaknai sebagai sebuah prinsip yang wajib dipelihara sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan kepada pemangku kepentingan. Praktik dan operasi yang adil dalam Perusahaan didukung oleh kebijakan dan mekanisme yang berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui penegakan *Code of Conduct*, kebijakan Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan infrastruktur kepatuhan lainnya yaitu *Whistleblowing System*.

TARGET TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perusahaan berusaha mengintegrasikan praktik dan aktivitas bisnis yang berlandaskan pada operasi yang adil untuk memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas serta menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Pelaksanaan aktivitas usaha yang adil turut mendukung tujuan Perusahaan untuk mencegah potensi praktik-praktik kecurangan yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha Perusahaan.

KEGIATAN TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Pengelolaan Penerimaan Hadiah dan Gratifikasi

Larangan terhadap penerimaan hadiah dan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu kemampuan insan Perusahaan dalam bertindak objektif dan independen telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman Gratifikasi Perum Jasa Tirta II dan ketentuan perundangan lain yang berlaku.

Perusahaan telah membentuk Tim Pengawas Pelaksana Etik Usaha yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Anti Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan. Dalam mengukuhkan komitmen anti gratifikasi, Perum Jasa Tirta II juga mewajibkan setiap insan perusahaan untuk menandatangani Pakta Integritas setiap tahunnya. Secara berkala, Perusahaan

IMPACT OF CSR RELATED TO HUMAN RIGHTS

By implementing HR management that is based on the fulfillment of human rights, the Company acquire employee engagement level that continues to rise. This is reflected through the mechanism of employee satisfaction surveys that are carried out periodically to measure the level of service that has been provided where feedback is also received on sustainable HR management.

CSR POLICIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

The commitment of Perum Jasa Tirta II to activities and business processes that are healthy, clean, and fair is interpreted as a principle that must be maintained as a form of corporate responsibility to stakeholders. Fair practices and operations within the Company are supported by policies and mechanisms that are based on compliance with applicable laws and regulations through the enforcement of Code of Conduct, Anti-Corruption and Anti-Gratuity policies, conflict of interest management, and other compliance infrastructure, namely Whistleblowing System.

CSR TARGETS REGARDING FAIR OPERATIONS

The company strives to integrate business practices and activities based on fair operations to strengthen accountability and credibility and create added value for stakeholders. The implementation of fair business activities also supports the Company's objectives to prevent potential fraud practices that can disrupt the sustainability of the Company's business.

CSR ACTIVITIES RELATED TO FAIR OPERATIONS

Management of Gift Receipts and Gratuities

The prohibition on accepting gifts and gratuities that may create conflict of interest potential and interfere with the ability of the Company's people to act objectively and independently has been carried out properly in accordance with the Gratuity Guidelines of Perum Jasa Tirta II and other applicable laws and regulations.

The Company has established a Business Ethics Implementation Supervisory Team which is responsible for managing and overseeing the implementation of Anti-Gratuity policies that apply in the Company. In affirming its commitment to anti-gratuity, Perum Jasa Tirta II also requires every employee of the Company to sign an Integrity Pact every year. Periodically, the



memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme pelaporan penerimaan hadiah atau gratifikasi disosialisasikan bersamaan dengan *Code of Conduct* dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Selama tahun 2019, tidak terdapat laporan mengenai indikasi penerimaan hadiah atau gratifikasi yang menyebabkan benturan kepentingan di lingkungan Perum Jasa Tirta II.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Perum Jasa Tirta II secara konsisten memberlakukan kebijakan yang melarang penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak atau mengambil keputusan secara objektif dan independen. Setiap individu berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan Perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan mewajibkan setiap individu untuk :

1. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apa pun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan;
3. Memahami dan menaati Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Etika Berhubungan dengan Stakeholders

Dalam mewujudkan tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil, Perusahaan berkomitmen untuk memelihara hubungan yang etis, harmonis, dan komunikatif dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilandasi oleh kesadaran Perusahaan dalam menghindari praktik usaha yang curang dan tidak etis serta memelihara nilai kejujuran dan saling menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan segenap pemangku kepentingan, Perusahaan telah menerapkan praktik-praktik operasi yang adil dengan memperhatikan pola hubungan dengan stakeholders demi mencapai keseimbangan bagi kedua belah pihak. Pola hubungan yang dibina Perusahaan antara lain sebagai berikut :

- Pola hubungan Perusahaan dengan pemilik pemangku kepentingan seperti Pemilik Modal bersifat pola hubungan yang proaktif (*proactive*), di mana Perusahaan cenderung berusaha untuk mengantisipasi kepentingan para stakeholders. Hal ini diimplementasikan dengan membentuk departemen khusus yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan, antara lain Bidang Hubungan Masyarakat, *Government Relation Officer*, dan tim-tim khusus yang bertugas untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan dengan stakeholders.

Company ensures that the policies and mechanisms for reporting receipt of gifts or gratuities are disseminated together with the Code of Conduct and the Whistleblowing System. During 2019, there were no reports of indications of receipt of gifts or gratuities that caused conflict of interest within Perum Jasa Tirta II.

Conflict of Interest Management

Perum Jasa Tirta II consistently enforces policies that prohibit abuse of power or authority for personal or other group interests that can affect its ability to act or make decisions objectively and independently. Every individual is obliged to put forward the interests of the Company and avoid conflicts of interest by requiring each individual to :

1. Not holding any double position outside the Company that may cause conflict of business interests with the Company, except in relation to employee cooperatives as stipulated in the applicable laws and regulations;
2. Not engaging in business relationship for personal interest or that involve families with other parties that can cause family problems, with other parties that can cause conflict of business interests with the Company;
3. Understand and comply with the Regulation of Handling of Conflicts of Interest in the Environment of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Ethics Related to Stakeholders

In realizing the Company's responsibilities related to fair operations, the Company is committed to maintaining an ethical, harmonious and communicative relationship with all stakeholders. This is based on the Company's awareness of avoiding fraud and unethical business practices and the value of honesty and mutual respect in accordance with prevailing laws and regulations.

Together with all stakeholders, the Company has implemented fair operation practices by taking into account the pattern of relations with stakeholders in order to achieve balance for both parties. The pattern of relationships developed by the Company include the following :

- The pattern of the Company's relationship with stakeholder such as Investor is a proactive relationship pattern, where the Company tends to anticipate the interests of the stakeholders. This is implemented by forming a special department under the Corporate Secretary, including the Public Relations Division, Government Relations Officer, and special teams tasked with identifying issues that are relevant to stakeholders.

- Pola Hubungan yang Interaktif (*interactive*) tercermin antara hubungan Perusahaan dengan para pelanggannya. Dengan adanya Divisi Pengusahaan dan Pelayanan Pelanggan serta kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap semester, Perusahaan menggunakan pendekatan interaktif untuk mendapatkan masukan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan.

DAMPAK TJSL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Dengan diterapkan kegiatan tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil, Perusahaan berhasil meraih sejumlah pencapaian yang tercermin dari tidak terdapatnya laporan yang mengindikasikan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perum Jasa Tirta II. Capaian tersebut turut diperkuat dengan perolehan sejumlah penghargaan sebagai bentuk pengakuan eksternal atas penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Perusahaan, antara lain CEO Revolusi Mental Gotong Royong Terbaik II dan Gold Winner Kategori Indonesia Bersih dalam 2nd Revolusi Mental Awards BUMN 2019 dan The Best CEO in Environment and Water Management Industry 2019 dan The Best Innovation and Business Transformation in Environment and Water Management Industry 2019 dalam Indonesia Business News Awards (IBA 2019).

- Interactive relationship pattern are reflected on the Company's relationships with its customers. With the presence of Business and Customer Service Division and a customer satisfaction survey conducted every semester, the Company uses an interactive approach to get input and meet the needs of customers.

IMPACT OF CSR RELATED TO FAIR OPERATIONS

By implementing the Company's responsibility activities related to fair operations, the Company succeeded in achieving numerous achievements as reflected on zero report indicating violations and fraud in the environment of Perum Jasa Tirta II. This achievement was also strengthened by the attainment of several awards as a form of external recognition for the implementation of good governance in the Company's environment, including CEO Revolusi Mental Gotong Royong Terbaik II and Gold Winner of the Clean Indonesia Category in the 2nd Revolusi Mental Awards BUMN 2019 and The Best CEO in Environment and Water Management Industry 2019 dan The Best Innovation and Business Transformation in Environment and Water Management Industry 2019 at the Indonesia Business News Awards (IBA 2019).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP CORPORATE RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

KEBIJAKAN TJSL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Dilatarbelakangi dengan pemahaman bahwa setiap aktivitas operasi memiliki dampak terhadap perubahan kondisi lingkungan, Perum Jasa Tirta II secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak hanya bagi Perusahaan tetapi turut melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai perusahaan yang diamanatkan dalam mengelola Sumber Daya Air (SDA), Perusahaan memiliki tanggung jawab lebih dalam merealisasikan tanggung jawab terhadap lingkungan, karena selain bertujuan dalam memperoleh profit, pengelolaan SDA yang dijalankan wajib diiringi dengan upaya pelestarian sehingga manfaat yang diberikan dapat terasa bagi seluruh stakeholders. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab Perusahaan terhadap kualitas SDA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2010 Pasal 3 tentang tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan dan pengelolaan SDA wilayah sungai yang berada di wilayah kerja Perusahaan, seperti Sungai Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

CSR POLICIES RELATED TO THE ENVIRONMENT

Based on the understanding that every operational activity has an impact on changing environmental conditions, Perum Jasa Tirta II proactively develops a culture of environmental responsibility, not only for the Company but also involves employees and other stakeholders. As a company mandated in managing Water Resources, the Company has more responsibility in realizing its responsibility to the environment. This is because water resources management is not only done solely to make profit, but shall also be accompanied by conservation efforts so that the benefits provided can be felt by all stakeholders. This is in line with the Company's responsibility towards the quality of water resources as stated in Government Regulation No. 7 of 2010 Article 3 concerning duties and responsibilities in the business implementation and management of river water resources in the Company's working area, such as Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, and Citarum Rivers.



Upaya untuk mengelola dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan pengelolaan SDA jangka panjang bagi lingkungan ini terus menjadi fokus tanggung jawab Perusahaan. Komitmen tersebut direalisasikan melalui program konservasi dan kualitas air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian SDA dan ekosistemnya serta pengelolaan kualitas air atau pengendalian pencemaran guna menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA itu sendiri.

Dalam mendukung pelaksanaan aktivitas dan program tanggung jawab lingkungan, Perusahaan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

TARGET TJSL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Pemenuhan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan diorientasikan pada pelaksanaan kegiatan operasional yang mampu mendukung keberlanjutan usaha Perusahaan antara lain melalui penerapan *Green Office*, pengelolaan sampah dan limbah, efisiensi listrik dan air, hingga konservasi dan kualitas air. Dengan demikian, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dapat terlaksana sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.

KEGIATAN TJSL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan aspek-aspek pengelolaan lingkungan di Perusahaan, maka sepanjang tahun 2020 telah dilakukan program-program lingkungan antara lain :

Green Office

Kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dalam kegiatan operasional diwujudkan melalui penerapan prinsip *Green Office*. *Green Office* merupakan konsep kantor yang pelaksanaan kegiatannya dijalankan secara ramah lingkungan, di mana seluruh pegawai dan manajemen kantor berupaya untuk menerapkan berbagai penghematan, seperti hemat kertas, hemat penggunaan listrik, hemat konsumsi air, dan didukung oleh pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan.

Efforts to manage environmental impacts and maintain long-term sustainability of water resource management for the environment continue to be the focus of the Company's responsibility. This commitment is realized through conservation and water quality programs through the protection and preservation activities of water resources and their ecosystems as well as water quality management or pollution control in order to maintain the sustainability of the carrying capacity, capacity and function of the water resources themselves.

In supporting the implementation of environmental responsibility activities and programs, the Company complies with applicable laws and regulations, among others :

1. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
2. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
3. Decree of the Minister of Environment No. 45 of 2005 concerning Guidelines for AMDAL Preparation.

CSR TARGETS RELATED TO THE ENVIRONMENT

The fulfillment of the Company's responsibility on the environment is oriented to the implementation of operational activities that are able to support the Company's business sustainability through the implementation of *Green Office*, waste management, electricity and water efficiency, and conservation and water quality. Therefore, the management and monitoring of environmental impacts can be carried out in accordance with the environmental management and monitoring plan and other prevailing laws and regulations.

CSR ACTIVITIES RELATED TO THE ENVIRONMENT

In accordance with the environmental management aspects in the Company, the following environmental programs were carried out throughout 2020 :

Green Office

The Company's concern for the environment in operational activities is manifested in the implementation of *Green Office* principles. *Green Office* is a concept for office which is implemented through environmentally friendly activities, where all employees and office management strive to implement various saving programs, such as saving paper, saving electricity usage, saving water consumption, and supported by good waste management that does not pollute the environment.

Beberapa pelaksanaan green office yang diterapkan antara lain penggunaan listrik yang sepenuhnya bersumber dari PLTA yang merupakan energi ramah lingkungan, penggunaan solar cell khususnya untuk keperluan seluruh stasiun/pos pemantauan yang tersebar di wilayah kerja PJT II, penggunaan tumbler atau gelas untuk keperluan minum karyawan maupun dalam kesempatan rapat/pertemuan internal untuk mengurangi sampah plastik bekas minuman kemasan, pengurangan pemakaian kertas (*paperless*) dan penerapan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

Efisiensi dan Konservasi Air

Perusahaan menitikberatkan pada pentingnya penerapan upaya efisiensi dan konservasi air secara efektif dan efisien guna mendukung pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan pada lingkup operasional perkantoran maupun penyaluran air kepada pemangku kepentingan melalui pemantauan dan pengawasan penggunaan air sesuai kebutuhan.

Dalam lingkup operasional perkantoran, efisiensi air digencarkan melalui sosialisasi penghematan air dengan memasang petunjuk hemat air di setiap sarana penggunaan air, penggunaan kembali air limbah bersih untuk kebutuhan siram tanaman di lingkungan kantor, dan penggunaan air minum galon dibandingkan air minum kemasan sekali pakai.

Adanya pandemi Covid-19 yang tengah terjadi tidak membatasi dan menghalangi seluruh insan Jasa Tirta II untuk tetap memberikan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam melalui program konservasi di HUT PJT II ke-53 yang jatuh di tahun 2020. Dengan mengusung tagline *Save Water, Save Trees, Save Life*, kegiatan konservasi ini menjadi bagian penting dari corporate campaign mengenai pentingnya menjaga kelestarian air melalui penanaman pohon untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan di kehidupan masa depan.

Tema kegiatan konservasi 53 Tahun Peum Jasa Tirta II ini adalah *Community Based, Participatory and Collaboration* dengan melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari masyarakat, insan PJT II, hingga stakeholder terkait untuk mengoptimalkan gerakan tanam pohon agar dapat berjalan lebih masif dan berdampak besar.

Kegiatan konservasi dilakukan di seluruh wilayah kerja perusahaan, di 53 lokasi bendung, bendungan, situ, oxbow dan greenbelt mulai dari hulu (Sumber Mata Air Sungai Citarum) di Situ Cisanti, hingga ke hilir Sungai Citarum di Muara Gembong Bekasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak pada tanggal 19-24 Agustus 2020.

Selain sebagai bagian dari kegiatan HUT Ke-53 Jasa Tirta II, kegiatan konservasi ini menjadi sarana bagi Jasa Tirta II untuk mewujudkan fungsi BUMN, yakni bina lingkungan. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Divisi Umum dan PKBL, PJT II menggandeng komunitas untuk berperan serta dalam kegiatan konservasi. Pemberian bantuan bina lingkungan bertema konservasi

Some of the green office implementations that are implemented include the use of electricity that is entirely sourced from hydropower which is environmentally friendly energy, the use of solar cells especially for the needs of all monitoring stations / posts scattered in the PJT II work area, the use of tumblers or glasses for the drinking needs of employees and in opportunities for internal meetings / meetings to reduce used plastic waste for packaged drinks, reduce paper use (*paperless*) and implement the 3R (*reduce, reuse and recycle*).

Water Efficiency and Conservation

The company emphasizes the importance of implementing water efficiency and conservation efforts in an effective and efficient manner to support sustainable management of Water Resources. This effort is realized in the scope of office operations and water distribution to stakeholders through monitoring and supervision of water use as needed.

Within the scope of office operations, water efficiency is intensified through the promotion of water savings by installing water-saving guidelines in each water use facility, reusing clean wastewater for plant watering needs in the office environment, and using gallon drinking water rather than disposable bottled water.

The ongoing Covid-19 pandemic does not limit and prevent all Jasa Tirta II personnel from continuing to actively participate in preserving nature through a conservation program at the 53rd PJT II Anniversary which falls in 2020. Carrying the tagline *Save Water, Save Trees, Save Life*, this conservation activity is an important part of a corporate campaign regarding the importance of preserving water through tree planting to support the realization of sustainability in future life.

The theme of the 53 Years Peum Jasa Tirta II conservation activity is *Community Based, Participatory and Collaboration* by involving many related parties, from the community, PJT II personnel, to related stakeholders to optimize the tree planting movement so that it can run more massively and have a big impact.

Conservation activities are carried out in all company working areas, in 53 weir, dam, lake, oxbow and greenbelt locations starting from the upstream (The Source of the Citarum River) in Situ Cisanti, to the downstream of the Citarum River in Muara Gembong Bekasi. The implementation of these activities was carried out simultaneously on 19-24 August 2020.

Apart from being part of the 53rd Anniversary of Jasa Tirta II, this conservation activity is a means for Jasa Tirta II to realize the function of BUMN, namely environmental development. Through the Partnership and Community Development Program (PKBL) of the General Division and PKBL, PJT II collaborates with communities to participate in conservation activities. The provision of environmental



ini diberikan kepada 3 (tiga) komunitas yang berada di wilayah kerja PJT II, yakni Komunitas Warga Peduli Lingkungan (WPL), Komunitas Pencinta Alam Sukasari, dan Komunitas Anak Peduli Alam Semesta.

Komunitas Warga Peduli Lingkungan (WPL) adalah komunitas yang turut berperan aktif dalam banyak kegiatan lingkungan di Sungai Citarum, khususnya Oxbow Daraulin. Bantuan pelestarian alam penanaman pohon diberikan dalam bentuk bibit pohon bambu dan tanaman buah yang akan ditanam di sekitar oxbow Daraulin yang merupakan salah satu oxbow Sungai Citarum dengan aliran yang telah dinormalisasi. Ke depan, secara berkelanjutan oxbow ini akan menjadi bagian dari lokasi bina lingkungan PJT II sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari etalase Sungai Citarum sekaligus untuk kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Komunitas Pencinta Alam Sukasari adalah komunitas yang berperan aktif dalam kegiatan lingkungan di daerah Sukasari. Sukasari merupakan daerah yang berada di sekitar Waduk Ir. H. Djuanda yang dikelola PJT II. Greenbelt Jatiluhur menjadi kawasan yang terus dijaga sebagai area hijau yang menjadi bagian dari daerah tangkapan air Waduk Ir. H. Djuanda.

Kegiatan konservasi dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta terlibat ini merupakan bentuk pendekatan yang menjadi perhatian dari PJT II. Bantuan pelestarian alam pada lokasi ini diberikan dalam bentuk bibit pohon tanaman buah. Pemilihan tanaman buah sebagai bibit pohon yang diberikan kepada masyarakat sekitar waduk dilakukan dengan mempertimbangkan dampak keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Konservasi ini akan berjalan berkelanjutan jika masyarakat memperoleh dampak baik terutama dari segi ekonomi melalui pemanfaatan optimal, serta menjaga lingkungan khususnya daerah tangkapan air.

PJT II menaruh perhatian pada keterlibatan generasi muda yang menjadi generasi masa depan di dalam kegiatan konservasi, oleh karena itu PJT II turut mengajak anak muda untuk ikut serta dalam kegiatan konservasi ini.

Salah satu komunitas anak muda yang berkaitan dengan konservasi di wilayah kerja PJT II adalah Komunitas Anak Peduli Alam Semesta. Anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini melakukan kegiatan konservasi dengan penanaman bibit pohon kopi di area Situ Cimeuhmal yang merupakan hulu dari DAS Citarum. Pemberian bantuan bibit pohon kopi ini diberikan untuk mendorong semangat penanaman pohon kopi di areal Situ Cimeuhmal sehingga kelestarian tetap terjaga.

Kolaborasi konservasi juga dilakukan dengan Satgas Citarum Harum yang memiliki kaitan dengan pengelolaan Sungai Citarum sebagai bentuk dukungan kepada program nasional Citarum Harum untuk meningkatkan kualitas air Sungai Citarum. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui program pemberian bibit pohon

development assistance with the theme of conservation is given to 3 (three) communities in the PJT II working area, namely the Community Caring for the Environment (WPL), the Community of Sukasari Nature Lovers, and the Community of Children Caring for the Universe.

Community of Environmental Care Citizens (WPL) is a community that plays an active role in many environmental activities on the Citarum River, especially Oxbow Daraulin. Nature conservation assistance for tree planting is provided in the form of bamboo tree seedlings and fruit trees to be planted around Oxbow Daraulin, which is one of the oxbows of the Citarum River with normalized flow. In the future, this oxbow will be part of the location of the PJT II environmental development in a sustainable manner so that it is expected to be part of the Citarum River storefront as well as for community empowerment-based activities.

The Sukasari Nature Lovers Community is a community that plays an active role in environmental activities in the Sukasari area. Sukasari is an area around the Ir. H. Djuanda which is managed by PJT II. Jatiluhur Greenbelt is an area that continues to be maintained as a green area that is part of the catchment area of Ir. H. Djuanda.

Conservation activities by inviting the community to get involved are a form of approach that has become the focus of PJT II. Nature conservation assistance at this location is provided in the form of fruit tree seedlings. The selection of fruit trees as tree seeds that are given to the community around the reservoir is carried out by considering the sustainability impact on the community and the environment. This conservation will run sustainably if the community gets a good impact, especially from an economic point of view through optimal use, as well as protecting the environment, especially the water catchment area.

PJT II pays attention to the involvement of young people who become future generations in conservation activities, therefore PJT II also invites young people to participate in this conservation activity.

One of the youth communities related to conservation in the PJT II working area is the Community of Children Cares for the Universe. Young people who are members of this community carry out conservation activities by planting coffee tree seedlings in the Situ Cimeuhmal area which is the upstream of the Citarum watershed. The donation of coffee tree seedlings is given to encourage the spirit of planting coffee trees in the Situ Cimeuhmal area so that sustainability is maintained.

Conservation collaboration is also carried out with the Citarum Harum Task Force which is associated with the management of the Citarum River as a form of support for the Citarum Harum national program to improve the quality of Citarum River water. This form of support is realized through a program of providing 2,300 tree

sebanyak 2.300 bibit (100 bibit pohon untuk setiap Sektor Citarum Harum) dengan jenis tanaman tabebuaya, asem jawa, dan aren. Ketiga jenis tanaman ini dipilih karena ketahanannya terhadap hama dan merupakan tanaman keras yang cocok untuk menjadi tanaman konservasi.

Pengelolaan Sampah dan Limbah

Kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Perum Jasa Tirta II dalam mendukung efektivitas konservasi sumber daya air. Pengelolaan sampah dan limbah dilakukan dengan pengangkutan sampah yang mengganggu kualitas air dan berpotensi menimbulkan banjir akibat penyumbatan sampah. Selain itu pengelolaan sampah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran air, yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air, dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber air. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air yang dilaksanakan oleh PJT II antara lain:

1. Pembuatan Project Biogas
Pembangunan Project Biogas dipilih oleh PJT II sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian alam dan untuk membantu masyarakat sesuai dengan semangat "Air untuk menghidupi negeri". Terbentuknya program pembangunan Project Biogas yang perencanaannya dimulai pada November 2016 adalah sebagai upaya pengendalian pencemaran air dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. PJT II membuat project di 2 lokasi yaitu di Pangalengan merepresentasikan Bandung Selatan dan di Lembang merepresentasikan Bandung Utara.
2. Penertiban Keramba Jaring Apung
Dasar Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung:
 - a. Statement Presiden Joko Widodo agar Sungai Citarum bersih dalam kurun waktu 7 tahun (Kompas 23/02/2018)
 - b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
 - c. Permen PUPR nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan
 - d. Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025
 - e. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 660.31/Kep.923-DKP/2019 tentang Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur yang memenuhi Daya Dukung Lingkungan.
3. Penerapan Culture Base Fisheries (CBF)
Culture Base Fisheries (CBF) adalah Kegiatan perikanan tangkap dimana ikan hasil tangkapan berasal dari benih ikan hasil budidaya yang

seedlings (100 tree seedlings for each Harum Citarum Sector) with the types of tabebuaya, Javanese tamarind and sugar palm plants. These three types of plants were chosen because of their resistance to pests and are perennials suitable for conservation plants.

Waste Management

Waste management activities in the watershed (DAS) environment are routine activities carried out by Perum Jasa Tirta II in supporting the effectiveness of water resources conservation. Garbage and waste management is carried out by removing garbage that disturbs water quality and has the potential to cause flooding due to garbage clogging. In addition, waste management is also part of efforts to control water pollution, which are intended to maintain and restore the quality of water that enters and is in water sources, by preventing water pollution from entering into water sources and water source infrastructure. Water Pollution Control activities carried out by PJT II include:

1. Making the Biogas Project
The development of the Biogas Project was chosen by PJT II as a form of commitment to the preservation of nature and to help people in accordance with the spirit of "Water to support the country". The establishment of the Biogas Project development program, which is planned to begin in November 2016, is an effort to control water pollution based on community empowerment. PJT II made projects in 2 locations, namely in Pangalengan representing South Bandung and in Lembang representing North Bandung.
2. Control of floating net cages
Basic Implementation of Control of Floating Net Cages:
 - a. Statement of President Joko Widodo so that the Citarum River is clean within 7 years (Kompas 23/02/2018)
 - b. Presidential Regulation Number 15 of 2018 concerning Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin
 - c. PUPR Regulation number 27 of 2015 concerning Dams
 - d. Governor Regulation No. 28 of 2019 concerning the Action Plan for Controlling Pollution and Damage to the Citarum Watershed for 2019-2025
 - e. West Java Governor Decree number 660.31/Kep.923-DKP/2019 concerning the Number of Floating Net Cages (KJA) in Cirata Reservoir, Saguling Reservoir, and Jatiluhur Reservoir which meet the Environmental Supporting Capacity.
3. Application of Culture Base Fisheries (CBF)
Culture Base Fisheries (CBF) is a capture fishery activity where the fish caught from cultivated fish seeds are spread into water bodies and the fish



ditebarkan ke badan air dan benih ikan yang ditebar tumbuh dengan memanfaatkan pakan alami yang tersedia di lingkungan perairan, ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

seeds that are stocked grow by utilizing natural food available in the aquatic environment, the fish can be utilized by the community.

Penghijauan dan Penanaman Pohon

Kegiatan penghijauan dilakukan sebagai salah satu upaya Perum Jasa Tirta II untuk memperbaiki kualitas udara sekaligus mendorong kesadaran lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan terhadap pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2020, Perum Jasa Tirta II telah menggelar kegiatan penghijauan dan penanaman pohon di wilayah Daerah Aliran Sungai dan sejumlah wilayah sekitar, antara lain penanaman 500 pohon sekitar wilayah Waduk Jatiluhur di Desa Ciririp dan penanaman pohon di Desa Tarumajaya, Kabupaten Bandung untuk menambah resapan air di hulu Sungai Citarum.

Greening and Tree Planting

Greening activities are implemented as an effort by Perum Jasa Tirta II to improve air quality while encouraging healthy and sustainable environmental awareness for stakeholders. Throughout 2020, Perum Jasa Tirta II held greening and tree planting activities in the Watershed and its surrounding areas, including planting 500 trees around the Jatiluhur Reservoir area in Desa Ciririp and planting trees in Desa Tarumajaya, Bandung Regency, to increase water absorption in the upstream of Citarum River.

DAMPAK TJSL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun 2020, melalui penerapan konsep Green Office, Perusahaan telah melakukan penghematan penggunaan air dan listrik.

IMPACT OF CSR RELATED TO THE ENVIRONMENT

Throughout 2020, through the application of Green Office, the Company conducted water and electricity saving.

Sementara kegiatan konservasi air, pengelolaan sampah, dan penghijauan yang dilaksanakan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) selama tahun 2020 memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi penyaluran air bagi kebutuhan pemangku kepentingan. Secara kuantitatif, hal tersebut tercermin dari penyediaan air baku, air baku ke PLTA, air bersih, dan air irigasi tahun 2020 sebagai berikut :

Meanwhile, water conservation, waste management, and reforestation activities carried out in the watershed area during 2020 had a positive impact on the effectiveness and efficiency of water distribution for the needs of stakeholders. Quantitatively, this is reflected on the supply of raw water, raw water to hydropower, clean water, and irrigation water in 2020 as follows :

Uraian / Description	2020	2019
Air Baku (dalam juta m ³) / Raw Water (in million m ³)	1.001,62	1.031,77
Air Baku ke PLTA (dalam kWh) / Raw Water to Hydropower (in kWh)	631.540.765	466.612.970
Air Bersih (dalam m ³) / Clean Water (in m ³)	2.516.269	1.908.843
Air Irigasi (Rendeng + Gadu) (dalam Ha) / Irrigation Water (Rendeng + Gadu) (in Ha)	554.610	552.810

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perum Jasa Tirta II belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

Certification in the Environment Field

As of December 31, 2020, Perum Jasa Tirta II did not yet have environmental certification.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

CORPORATE RESPONSIBILITY RELATED TO LABOR AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (K3)

KEBIJAKAN TJSL TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Berbekal pemahaman akan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal insan (*human capital*), Perum Jasa Tirta II memaknai SDM sebagai aset yang harus diperhatikan pengelolaannya agar mampu menjadi katalisator penggerak keberhasilan usaha jangka panjang. Untuk itu, Perusahaan memprioritaskan pengelolaan SDM secara komprehensif baik dari perencanaan, seleksi dan rekrutmen, manajemen karier dan talenta, remunerasi, hingga penyediaan kesempatan pengembangan kompetensi.

Dalam mewujudkan tanggung jawab Perusahaan di bidang ketenagakerjaan, Perusahaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan meyakini bahwa pengelolaan dan pemenuhan tanggung jawab yang berlandaskan kepatuhan mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran sekaligus menjamin terciptanya nilai tambah bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan.

Perusahaan berupaya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab Perusahaan dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang melebihi peraturan ketenagakerjaan. Hal ini didukung dengan prinsip-prinsip tanggung jawab ketenagakerjaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menyediakan kesempatan pengembangan karier dan pengembangan kompetensi, berprinsip kesetaraan dan anti diskriminatif terhadap gender, suku, ras, agama, dan latar belakang budaya.

Komitmen Perusahaan terhadap pengelolaan SDM yang menjunjung penuh hak dan kewajibannya diperkuat dengan penerapan kebijakan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Perusahaan telah menerapkan kebijakan SMK3 di salah satu unit kerja yang memiliki potensi risiko tinggi (*high risk*) yaitu Unit Usaha PLTA.

Adapun dasar pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Perusahaan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa :
 - Pasal 86: pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

CSR POLICIES RELATED TO MANPOWER AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Equipped with an understanding of Human Resources (HR) as human capital, Perum Jasa Tirta II defines HR as an asset that must be considered in its management to be able to become a catalyst of long-term business success. To that end, the Company prioritizes comprehensive HR management, from planning, selection and recruitment, career and talent management, remuneration, to providing competency development opportunities.

In realizing the Company's responsibilities in the field of manpower, the Company refers to the laws and regulations set out in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The Company believes that the management and fulfillment of responsibilities that is based on compliance can minimize the occurrence of violations while ensuring the creation of added value for the Company and stakeholders.

The Company seeks to ensure that human resource management as a form of corporate responsibility is carried out through policies applied beyond labor regulations. This is supported by principles of labor responsibility that uphold human rights, provide opportunities for career development and competency development, put forward the principle of equality and anti-discrimination against gender, ethnicity, race, religion, and cultural background.

The Company's commitment to HR management that upholds full rights and obligations is strengthened by the implementation of Occupational Safety and Health (K3) management policy. As regulated in Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System (SMK3), the Company has implemented the SMK3 policy in one work unit that has a high risk potential, namely the Hydropower Business Unit.

The basis for the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in the Company's environment refers to the following regulations :

- Law No. 01 of 1970 concerning Work Safety;
- Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which states that :
 - Article 86: the worker has the right to obtain protection for occupational safety and health.



- Pasal 87: setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN yang menyebutkan bahwa:
 - Pasal 36: Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

PENGELOLA SDM DAN K3

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor PRD-19/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Jasa Tirta II, pengelolaan SDM dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia, Direktorat Keuangan dan SDM.

TARGET TJSL TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN K3

Pemenuhan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diintegrasikan dengan komitmen Perusahaan dalam memenuhi hak-hak dasar karyawan sebagaimana disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku; menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif bagi seluruh karyawan; menumbuhkan loyalitas dan kinerja terbaik dari seluruh karyawan; meningkatkan kesejahteraan karyawan; serta menciptakan kondisi kerja yang nihil kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

KEGIATAN TJSL TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN K3 KETENAGAKERJAAN Pengelolaan Hubungan Manajemen dan Karyawan

Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa hubungan antara manajemen Perusahaan dengan karyawan terbina dengan baik dan memenuhi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan membentuk Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II sebagai organisasi yang mewakili karyawan dalam menjalin hubungan dengan manajemen dan secara aktif terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

PKB Perum Jasa Tirta II ini telah terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B.247/PHIJSK-PK/PP&PKB/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019. PKB secara jelas

- Article 87: each company is required to implement an Occupational Safety and Health Management System that is integrated with the company's management system.

- Government of Republic of Indonesia Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems;
- Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs which states that:
 - Article 36: The Board of Directors is obliged to ensure that assets and business locations and other SOE facilities comply with laws and regulations relating to occupational health and safety and environmental preservation.

HR AND K3 MANAGEMENT

As stipulated in the Board of Directors Regulation Number PRD-19/DIR/11/2020 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Perum Jasa Tirta II, HR management and Occupational Health and Safety (K3) are the responsibility of the Human Resources Division, Directorate of Finance and HR.

CSR TARGETS RELATED TO MANPOWER AND K3

The fulfillment of the Company's responsibility on manpower and occupational safety and health (K3) is integrated with the Company's commitment to fulfill the basic rights of employees as mutually agreed in the Collective Labor Agreement (PKB) and comply with applicable labor regulations; creating a safe, healthy and productive climate and work environment for all employees; fostering loyalty and best performance of all employees; improving employee welfare; and creating zero workplace accidents and occupational diseases at work.

CSR ACTIVITIES RELATED TO MANPOWER AND K3 MANPOWER

Handling of Management and Employee Relations

Perum Jasa Tirta II strives to ensure that the relationship between the Company's management and employees is maintained and fulfills the rights and obligations of both parties. To support this, the Company established Perum Jasa Tirta II Labor Union as an organization that represents employees in building relationships with the management and is actively involved in the preparation and management of Collective Labor Agreements (PKB).

PKB of Perum Jasa Tirta II has been registered in the Decree of Director General of Industrial Relations Development and Labor Social Security Nomor : B.247/PHIJSK-PK/PP&PKB/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

telah mengatur aspek-aspek hubungan manajemen dan karyawan yang meliputi :

- Pengakuan Para Pihak dan Fasilitas Ikatan Karyawan Perum Jasa Tirta II
- Kewajiban dan Hak Karyawan
- Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Sistem Karier
- Remunerasi
- Fasilitas Kesehatan
- Waktu Kerja, Lembur, dan Dinas Luar
- Libur, Cuti, dan Izin Tidak Masuk Kerja
- Sanksi
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Penyelesaian Keluh Kesah
- Lain-lain dan Penutup

Implementasi Prinsip Kesetaraan

Dalam membina hubungan kerja yang sehat dan anti diskriminatif, Perusahaan menjunjung prinsip kesetaraan gender dalam proses rekrutmen SDM, pengembangan karier, serta pengembangan kompetensi. Proses rekrutmen dan seleksi baik secara internal maupun eksternal difokuskan pada kualifikasi dan kemampuan individu dalam mengisi kekosongan jabatan tanpa membedakan ras, suku, maupun gender. Pada saat yang bersamaan, penerapan prinsip kesetaraan juga diimplementasikan pada pemberian kesempatan pengembangan karier dan pengembangan kompetensi dengan sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kualitas kinerja, serta kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, Perusahaan dapat mendukung terciptanya pengelolaan SDM yang bebas diskriminasi, sehat dan adil bagi seluruh karyawan.

Penyediaan Skema Remunerasi yang Sesuai

Skema kompensasi dan benefit yang disediakan Perusahaan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan sehingga skema remunerasi yang ditawarkan bersifat kompetitif dan mampu mendorong kinerja dan kondusivitas terbaik dari setiap karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan berupaya memberikan imbal jasa terbaik yang melebihi ketentuan penggajian (UMR), yang sesuai dengan kemampuan Perusahaan. Adapun skema kompensasi dan benefit yang ditawarkan yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas serta jaminan lainnya.

Dalam menyediakan skema remunerasi bagi karyawan, Perusahaan berusaha menjaga gap rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan. Informasi mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah dimuat dalam tabel berikut :

PKB has expressly regulated aspects of management and employee relations, which include :

- Recognition of the Parties and Perum Jasa Tirta II Employees Association
- Obligations and Employee Rights
- Protection of Occupational Safety and Health
- Career System
- Remuneration
- Health Facilities
- Working Hours, Overtime, and External Service
- Holidays, Leave, and Permission for Leave
- Sanctions
- Termination of Employment (FLE)
- Complaints Settlement
- Other and Closing

Implementation of Equality Principles

In fostering healthy and anti-discriminatory working relationships, the Company upholds gender equality principles in the process of HR recruitment, career development, and competency development. The recruitment and selection process both internally and externally is focused on the qualification and ability of individuals in filling vacant positions without prejudice to race, ethnicity, or gender. At the same time, the application of the equality principle is also implemented in providing career development and competency development opportunities by fully considering organizational needs, quality of performance, and capabilities. Thus, the Company can support the creation of human resources management that is free of discrimination, healthy and fair for all employees.

Provision of Appropriate Remuneration Schemes

The compensation and benefit schemes provided by the Company are always adjusted to the development of the Company's business so that the remuneration scheme offered is competitive and able to encourage the best performance and conducive work of each employee. In this case, the Company strives to provide the best income that exceeds payroll requirements (UMR), which is in accordance with the Company's ability. The compensation and benefit schemes offered consist of salary, benefits, incentives, and other facilities and insurances.

In providing remuneration schemes for employees, the Company strives to maintain the gap of salaries for all employees so that there are no significant differences. Information regarding the ratio of the highest and lowest salaries is contained in the following table :

Uraian / Description	Rasio / Ratio
Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah / Highest and Lowest Employee Salary	5,71 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah / Highest and Lowest Board of Directors Salary	1,18 : 1
Gaji Dewan Pengawas Tertinggi dan Terendah / Highest and Lowest Supervisory Board Salary	1,11 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Karyawan Tertinggi / Highest Board of Directors Salary and Highest Employee Salary	3,10 : 1



Program Pensiun

Perusahaan memberikan jaminan yang layak dengan mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jaminan Hari Tua dengan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, karyawan juga diikutsertakan dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II yang didirikan oleh Perusahaan. Dalam mendukung kesiapan karyawan yang akan memasuki masa pensiun, Perusahaan juga memberikan pembekalan mental dan kesiapan kompetensi sesuai dengan masa kerja karyawan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Survei Kepuasan Karyawan

Perusahaan melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan karyawan, salah satunya dengan melaksanakan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap pelayanan dan pengelolaan yang telah diberikan sekaligus memungkinkan Perusahaan untuk memperoleh umpan balik sebagai acuan dalam pengembangan sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan karyawan.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perusahaan berupaya tanggap dan responsif terhadap setiap kebutuhan karyawan, termasuk dalam menangani dan menindaklanjuti pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan. Untuk itu, Perusahaan menyediakan sarana bagi karyawan untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, saran, maupun rekomendasi kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Penyediaan Fasilitas dan Jaminan Kesehatan

Pemenuhan kewajiban penyediaan sarana dan pelayanan kesehatan bagi karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. Jaminan kesehatan yang diberikan meliputi :

1. Fasilitas jaminan kesehatan karyawan dan keluarga, baik yang bersifat normatif dalam bentuk program BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Kesehatan swakelola dari Perusahaan.
2. Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang diberikan Perusahaan berupa bantuan biaya untuk menjaga dan memelihara kesehatan pensiunan beserta keluarganya, baik yang bersifat normatif berupa program BPJS Kesehatan dan program jaminan kesehatan swakelola dari Perusahaan.

Pengembangan Kualitas K3

Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk melakukan *Continuous Improvement* dalam pengelolaan K3 secara menyeluruh dan difokuskan pada terciptanya kinerja K3 yang zero accident atau tingkat kecelakaan nihil. Selama tahun 2020, Perum Jasa Tirta II telah merealisasikan program pengembangan dan pemeliharaan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain :

Pension Program

The company provides good insurance by registering all of its employees in the Pension program in cooperation with BPJS Employment. In addition, the employees are also registered in the Pension Program organized by Perum Jasa Tirta II Pension Fund established by the Company. In supporting the readiness of employees who are about to retire, the Company also provides courses on mental preparation and competency readiness in accordance with the employee's service period as stipulated in the applicable regulations.

Employee Satisfaction Survey

The company exerts every endeavor in order to meet employee expectations, one of which is by conducting routine employee satisfaction survey to measure the level of employee satisfaction on services and management that have been provided from which the Company is able to obtain feedback as a reference in developing service delivery systems that are responsive to employee's needs.

Labor Complaints Mechanism

The Company seeks to be responsive to every employee's needs, including in handling and following up complaints regarding employment issues. Therefore, the Company provides facilities for employees who wish to channel their complaint suggestions, and recommendations to the Company as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB).

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH)

Provision of Health Facilities and Insurance

The fulfillment of the obligation to provide health facilities and services for employees has been regulated in a Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and Labor Union. Health insurance provided includes :

1. Health insurance facilities for the employees and their families, both mandatory in the form of the BPJS Health program and the Company's self-managed Health Insurance Program.
2. Health insurance benefits in the form of health facilities provided by the Company include financial support to maintain the health of the retired and their families, both mandatory in the form of the BPJS Health program and the company's self-managed health insurance program.

K3 Quality Development

Perum Jasa Tirta II is committed to applying Continuous Improvement in overall OSH management and is focused on creating OSH performance with zero accident. During 2020, Perum Jasa Tirta II has realized a development and maintenance program on Occupational Safety and Health (OSH) quality, namely :

1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan mengadakan seminar "Fire Behaviour" di Triwulan I Tahun 2020;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi K3 di Triwulan II, III, dan IV Tahun 2020;
3. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) Risiko Tinggi di Triwulan II Tahun 2020;
4. Pelaksanaan kegiatan Donor Darah di setiap triwulan tahun 2020;
5. Pelaksanaan kegiatan Dokter Keliling di setiap triwulan tahun 2020;
6. Pelaksanaan simulasi kebakaran di unit usaha Wilayah II di Triwulan IV tahun 2020;
7. Pendistribusian kekurangan seragam tahun 2019 dan seragam wearpack tahun 2020;
8. Pemilihan karyawan yang mendapatkan bantuan biaya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa Umroh dan Wisata Religi;
9. Pelaksanaan kegiatan olahraga setiap hari Jumat.

Dampak TJSL terkait Ketenagakerjaan dan K3

Tingkat perputaran karyawan atau turnover menjadi indikator yang menunjukkan dampak pemenuhan tanggung jawab Perusahaan, di mana pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) orang karyawan yang mengundurkan diri. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3 (tiga) orang.

Uraian / Description	2020	2019	2018
Jumlah Karyawan Awal Tahun / Total Employees at Beginning of Year	1.101	963	978
Jumlah Karyawan Akhir Tahun / Total Employees at End of Year	1.080	1.104	964
Jumlah Karyawan Mengundurkan Diri / Total Resigning Employees	4	3	1
Jumlah Karyawan Pensiun Dini / Total Employees Who Take Early Pension	23	1	2

Terlaksananya pemenuhan tanggung jawab Perusahaan terkait ketenagakerjaan turut berdampak pada perolehan tingkat produktivitas karyawan pada penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2020 yang mencapai Rp311,89 juta per karyawan.

Adapun dampak pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tercermin dari nihilnya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja selama tahun 2020. Secara kuantitatif, Perusahaan telah merealisasikan biaya pemeliharaan kualitas K3 sebesar Rp828.075.000 pada tahun 2020 sebagai bentuk investasi terhadap best practices K3 secara berkelanjutan.

SERTIFIKASI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN/ATAU K3

Pada tahun 2020, Perum Jasa Tirta II memperoleh sertifikasi Zero Accident dari Kementerian Tenaga Kerja atas pencapaian Perusahaan atas nihilnya laporan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja selama tahun 2020.

1. Implementation of the OSH Month by holding a seminar on "Fire Behavior" in the First Quarter of 2020;
2. Implementation of OSH Monitoring and Evaluation in Quarter II, III, and IV of 2020;
3. Implementation of High Risk Medical Check Up (MCU) in the Second Quarter of 2020;
4. Implementation of Blood Donation activities in each quarter of 2020;
5. Implementation of mobile doctor every quarter of 2020;
6. Implementation of fire simulations in Region II business units in Quarter IV of 2020;
7. Distribution of uniform to fulfill uniform shortage in 2019 and distribution of uniform wearpack in 2020;
8. Selection of employees who receive financial aid to support worship practice in the form of Umrah and Religious Tourism Program;
9. Implementation of sports activities every Friday.

Impact of CSR related to Labor and OSH

Employee turnover rate is an indicator that shows the impact of the Company's responsibility fulfillment, in which in 2020 there were 4 (four) employees who resigned. The number increased from the previous year of 3 (three) people.

The implementation of the Company's responsibility fulfillment related to employment also impacts on the employee's productivity level as shown in the 2020 *Key Performance Indicator* (KPI) assessment which reached Rp311.89 million per employee.

The impact of the implementation of the Company's responsibilities related to occupational safety and health (OSH) is reflected on zero accident or occupational diseases during 2020. Quantitatively, the Company realized OSH quality maintenance cost of Rp828,075,000 in 2020 as a continuous investment in OSH best practices.

CERTIFICATION IN THE FIELD OF MANPOWER AND/OR OSH

In 2020, Perum Jasa Tirta II obtained Zero Accident certification from the Ministry of Manpower for the Company's achievement of zero reports on work accidents and occupational diseases during 2020.



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN CORPORATE RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL COMMUNITY

KEBIJAKAN TJSL TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

Perum Jasa Tirta II sebagai bagian dari masyarakat yang beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan memiliki tanggung jawab dalam memelihara dampak yang dihasilkan kepada pemangku kepentingan melalui kontribusi positif dan peningkatan kualitas komunitas lokal masyarakat secara lebih luas. Dalam mewujudkan kontribusinya kepada masyarakat, Perum Jasa Tirta II melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Selain merupakan kewajiban bagi entitas BUMN, program PKBL menjadi sarana yang komprehensif bagi Perusahaan untuk membina hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan yang mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola Perusahaan diatur dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

TARGET TJSL TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

Tujuan pelaksanaan program tanggung jawab dalam bidang pengembangan sosial kemasyarakatan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diorientasikan sebagai wujud kepatuhan dan kepedulian Perum Jasa Tirta II terhadap pemeliharaan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan masyarakat, dukungan terhadap kemandirian ekonomi, serta penciptaan dampak positif yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Adapun tujuan kepatuhan dari pelaksanaan PKBL difokuskan pada komitmen Perusahaan untuk menjadi BUMN yang sehat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan global.

CSR POLICIES RELATED TO SOCIAL COMMUNITY

Perum Jasa Tirta II as part of the community whose operations involve the environment has a responsibility to stakeholders in maintaining impacts that the Company generate through positive contributions and by improving the quality of local communities in more comprehensive manner. In realizing its contribution to the community, Perum Jasa Tirta II implements Partnership and Community Development Program (PKBL). Aside from its obligation as SOE, PKBL program is a comprehensive tool for the Company to foster harmonious relations with stakeholders in order to be able to provide added value on a continuous basis.

The Partnership and Community Development Program (PKBL) managed by the Company is regulated in the following laws and regulations :

- Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises;
- Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises;
- Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister for SOE of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/04/2020 concerning the third change to the regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and Environmental Development Programs for State-Owned Enterprises.

CSR TARGETS RELATED TO SOCIAL COMMUNITY

The objective of implementing responsibility program in the field of social community development through the Partnership and Community Development Program (PKBL) is oriented to compliance and care of Perum Jasa Tirta II towards maintaining harmonious and mutually beneficial relations with the community, support for economic independence, and creating long-term, positive and sustainable impacts. The goal of compliance with the implementation of PKBL is focused on the Company's commitment to become a healthy and compliant SOE with laws and regulations as well as to support global sustainable development goals.

KEGIATAN TJSL TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

CSR ACTIVITIES RELATED TO SOCIAL COMMUNITY

Ruang Lingkup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Scope of Partnership and Community Development Program



Program Kemitraan

Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat khususnya pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat mengembangkan usahanya melalui pinjaman berbunga lunak. Selain penyaluran bantuan pinjaman modal kerja, Program Kemitraan juga memberikan bantuan lain berupa pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran, dan bantuan pembinaan lainnya sehingga pelaku usaha UMKM dapat tumbuh mandiri dan memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat.

Jenis kemitraan yang diberikan Perusahaan kepada Mitra Binaan antara lain sebagai berikut :

1. Bantuan Kemitraan dalam peningkatan SDM berbentuk pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajemen melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh bidang PKBL dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan yang dibutuhkan.
2. Pinjaman modal kerja dan investasi untuk peningkatan modal usaha, pengadaan sarana kerja dan modernisasi peralatan.
3. Beban pembinaan untuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Adapun sasaran dari kegiatan Program Kemitraan yaitu usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah Mitra Binaan Perum Jasa Tirta II adalah sebanyak 2.640 mitra, dengan rincian akumulasi mitra binaan sebagai berikut :

Partnership Program

Partnership Program is a program that encourages the community, especially micro business people or Fostered Partners, to develop their business through low interest loans. In addition to providing working capital loans, the Partnership Program also provides other aid in the form of business management training, marketing assistance, and other coaching assistance so that MSME entrepreneurs can grow independently and have strong resilience and competitiveness.

The type of partnerships provided by the Company to the Fostered Partners is as follows :

1. Partnership aid in improving human resources in the form of education and/or training to improve entrepreneurial and management skills through training conducted PKBL unit and parties related to the required education.
2. Working capital and investment loans to increase business capital, procurement of work facilities and equipment modernization.
3. Development cost on education, training, internship, marketing, promotion, and other matters related to improvement of productivity of the Fostered Partners and evaluation/research related to the Partnership Program.

The target of the Partnership Program activities are small businesses, in this case individuals or business entities and cooperatives that have a net worth of Rp500,000,000 at max, excluding land and buildings of business premises, or have annual sales of Rp2,500,000,000 at max.

As of December 31, 2020, the number of Fostered Partners of Perum Jasa Tirta II was 2.640 partners, with details of the accumulated partners as follows :



Jenis Usaha / Business Type	2020	2019	2018
Koperasi / Cooperative	219	219	216
Usaha Kecil / Small Business	2.421	2.354	2.276
Jumlah / Total	2.640	2.573	2.492

Informasi mengenai realisasi pengelolaan dana Program Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan tahun 2020 dan perbandingan dengan RKAP 2020 dan Realisasi 2019 dimuat dalam tabel berikut :

Information regarding the realization of Partnership Program fund management implemented by the Company in 2020 and its comparison with RKAP 2020 and 2019 Realization is stated in the following table :

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019	% Realisasi terhadap / % Realization to	
				RKAP 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
Saldo Awal Penerimaan / Beginning Balance of Receipt	-	42.595.875	50.613.515		84,16%
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina / Allocation of Profit Share from SOE	-	-	-	-	-
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan / Loan Payment of Fostered Partner	1.733.108.845	1.185.510.164	1.497.203.957	68,40%	79,18%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman / Income from Loan Administration Service	166.148.212	73.639.271	129.611.065	44,32%	56,82%
Pendapatan Jasa Giro / Giro Service Income	5.387.750	1.250.954	2.417.338	23,22%	51,75%
Jumlah Penerimaan	1.904.644.807	1.260.400.389	1.629.232.360	66,18%	77,36%
Jumlah Dana yang Tersedia / Total Funds Available	1.904.644.807	1.302.996.264	1.679.845.875	68,41%	77,57%
Pengeluaran / Spending					
Pinjaman pada Mitra Binaan / Loans of Fostered Partners	1.868.000.000	1.200.000.000	1.600.000.000	64,24%	75,00%
Dana Pembinaan Kemitraan / Partnership Development Fund	36.644.807	36.620.000	37.250.000	99,93%	98,31%
Lain-lain / Others					
Jumlah Pengeluaran / Total Spending	1.904.644.807	1.236.620.000	1.637.250.000	64,93%	75,53%
Saldo Akhir Dana / End Balance of Fund	-	66.376.264	42.595.875		

1. Realisasi penyerapan dana Program Kemitraan tahun 2020 sebesar Rp1.236.620.000, atau 94,91% dari jumlah dana yang tersedia sebesar Rp1.302.996.264, atau mencapai 64,93% dari RKA tahun 2020 sebesar Rp1.904.664.807.
2. Realisasi Penerimaan Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan tahun 2020 sebesar Rp 1.185.510.164 atau 68,40% dari RKAP sebesar Rp 1.733.108.845, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 311.693.793, atau turun 20,82%.
3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Jasa Giro tahun 2020 sebesar Rp1.250.954, atau 23,22% dari RKAP sebesar Rp5.387.750, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.166.384, atau turun 48,25%.
4. Realisasi Penyaluran Pinjaman tahun 2020 sebesar Rp1.200.000.000, atau 64,24% dari RKAP sebesar Rp1.868.000.000, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp400.000.000 atau turun 25%.

1. Realization of absorption of Partnership Program funds in 2020 amounted to Rp1,236,620,000 or 94.91% of the total available funds of Rp1,302,996,264 Absorption of funds in 2020 reached 64.93% of the 2020 RKAP of Rp1,904,664,807.
2. Realization of Receipt of Loan Payment of Fostered Partners in 2020 amounted to Rp1,185,510,164 or 68.40% of the 2020 RKAP of Rp1,733,108,845 Compared to the realization in 2019, it decreased by Rp 311,693,793 or 20.82%.
3. Realization of Receipt of Giro Services Income in 2020 amounted to Rp1.250,954 or 23.22% of the 2020 RKAP of Rp5,387,750 Compared to the realization in 2019, it decreased by Rp1,166,384 or 48.25%.
4. Realization of Loan Distribution in 2020 amounted to Rp1,200,000,000 or 64.24% of the 2020 RKAP of Rp1,868,000,000 Compared to the realization in 2019, it decreased by Rp 400,000,000 or 25%.

5. Realisasi Dana Pembinaan Kemitraan untuk tahun 2020 sebesar Rp36.620.000, atau 99,93% dari RKA sebesar Rp36.644.807, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp630.000, atau turun 1,69%.

6. Saldo akhir Dana tersedia Tahun 2020 sebesar Rp66.376.264.000.

5. The realization of Partnership Development Funds in 2020 amounted to Rp36,620,000 or 99.93% of the 2020 RKAP of Rp36,644,807 Compared to the realization in 2019, it decreased by Rp 630,000 or 1.69%.

6. The final balance of available funds in 2020 is Rp 66,376,264,000 .

Sektor Usaha / Business Sector	Realisasi sampai 2019 / Realization until 2019		Realisasi 2020 / Realization 2020		Realisasi sampai 2020 / Realization until 2020	
	Jumlah Mitra Binaan / Total Fosterd Partners	Jumlah Rupiah / Total Amount in Rupiah	Jumlah Mitra Binaan / Total Fosterd Partners	Jumlah Rupiah / Total Amount in Rupiah	Jumlah Mitra Binaan / Total Fosterd Partners	Jumlah Rupiah / Total Amount in Rupiah
Penyalur Pinjaman Jawa Barat / Lender West Java	2.573	28.438.117.500	67	1.200.000.000	2.640	29.638.117.500
Sektor Industri / Industry Sector	309	2.798.000.000	3	20.000.000	312	2.818.000.000
Sektor Perdagangan / Trade Sector	994	12.274.500.000	32	636.000.000	1.026	12.910.500.000
Sektor Pertanian / Agriculture Sector	267	1.591.417.500	-	-	267	1.591.417.500
Sektor Peternakan / Animal Husbandry Sector	76	904.500.000	3	45.000.000	79	949.500.000
Sektor Perkebunan / Plantation Sector	15	222.500.000	22	-	37	222.500.000
Sektor Perikanan / Fisheries Sector	426	4.485.500.000	7	354.000.000	433	4.839.500.000
Sektor Jasa / Service Sector	246	3.148.700.000	-	145.000.000	246	3.293.700.000
Sektor Lainnya / Other Sectors	239	3.005.500.000	-	-	239	3.005.500.000
Banten						
Sektor Lainnya / Other Sectors	1	7.500.000	-	-	1	7.500.000
Dana Pembinaan Kemitraan / Partnership Development Fund	-	2.113.647.440	0	36.620.000	-	2.150.267.440
Jumlah / Total	2.573	30.551.764.940	67	1.236.620.000	2.640	31.788.384.940

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 sektor usaha yang paling banyak memperoleh penyaluran dana Program Kemitraan berasal dari sektor perdagangan dengan realisasi di tahun 2020 sebesar Rp636.000.000 bagi 32 mitra binaan.

Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan kegiatan pemberdayaan serta pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah usaha Perum Jasa Tirta II dalam bentuk :

- Bantuan korban bencana alam;
- Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan/atau sarana pendidikan;
- Bantuan peningkatan kesehatan;
- Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- Bantuan sarana ibadah;
- Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk :
 - Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - Penyediaan sarana air bersih;
 - Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian

Based on the above table, in 2020, business sector that received the most Partnership Program fund was the trade sector with fund realization in 2020 reaching Rp636,000,000 for 32 fostered partners.

Community Development

Community Development Program is an activity of empowerment and assistance aimed at providing benefits to the community in Perum Jasa Tirta II business area in the form of :

- Natural Disaster Victim Aid;
- Educational aid, which can be in the form of training, education facilities and/or infrastructure;
- Health improvement aid;
- Public facilities and/or infrastructure development aid;
- Religious facilities aid;
- Conservation aid; and/or
- Social community aid for poverty alleviation, including for :
 - Electrification in areas without electricity;
 - Provision of clean water facilities;
 - Provision of Toilet Facilities;
 - Education aid, training, apprenticeship, promotion and other forms of aid related to efforts to increase economic independence of small businesses in



ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

- Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
- Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
- Bantuan peralatan usaha.

Kegiatan program Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan Perusahaan sepanjang tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- Bantuan Korban Bencana Alam

Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp400.000.000 untuk pemberian bantuan bagi korban bencana alam. Bantuan bagi korban bencana alam disalurkan di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta Barat, Bandung, Subang, Purwakarta, Banjarnegara, dan Serang.

- Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp300.000.000 untuk pemberian bantuan pendidikan dan/atau pelatihan. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan disalurkan di beberapa wilayah, antara lain Purwakarta dan Depok, Jawa Barat.

- Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana

Umum Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp900.000.000 untuk pemberian bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum di beberapa wilayah, yaitu Bandung, Cirebon, Purwakarta, dan Karawang.

- Bantuan Sarana Ibadah

Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp565.000.000 untuk pemberian bantuan sarana ibadah di beberapa wilayah, antara lain Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Tangerang.

- Bantuan Peningkatan Kesehatan

Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp345.000.000 untuk pemberian bantuan peningkatan kesehatan di beberapa wilayah, antara lain Subang dan Purwakarta.

- Bantuan Pelestarian Alam

Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp250.000.000 untuk pemberian bantuan pelestarian alam di beberapa wilayah, antara lain Bandung, Purwakarta, dan Bekasi.

- Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Pengentasan Kemiskinan

Selama tahun 2020, Perusahaan merealisasi biaya sebesar Rp2.499.580.000 untuk pemberian bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah, antara lain Ciamis, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat.

addition to the Partnership Program Partners;

- House renovation for underprivileged people;
- Nurseries for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
- Business equipment aid.

Community Development program activities that were carried out by the Company throughout 2020 are as follows :

- Natural Disaster Victim Aid

In 2020, the Company realized a total of Rp400,000,000 to provide aid to natural disaster victims. Aid for natural disaster victims is distributed in a number of areas, among others, West Jakarta, Bandung, Subang, Purwakarta, Banjarnegara, and Serang.

- Educational and/or Training Aid

In 2020, the Company realized a total of Rp300,000,000 to provide education and/or training aid. Education and/ or training aid is distributed in several regions, including Purwakarta and Depok, West Java.

- Public Facilities and/or Infrastructure Development Aid

In 2020, the Company realized a total of Rp900,000,000 to provide public facilities and/or infrastructure development aid in several regions, namely Bandung, Cirebon, Purwakarta and Karawang.

- Religious Facilities Aid

In 2020, the Company realized a total of Rp565,000,000 to provide religious facilities aid in several areas, i.e. Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, and Tangerang.

- Health Improvement Aid

In 2020, the Company realized a total of Rp345,000,000 to provide health improvement aid in several regions, namely Subang and Purwakarta.

- Natural Conservation Aid

In 2020, the Company realized a total of Rp 250,000,000 to provide natural conservation aid in several regions, i.e. Bandung, Purwakarta and Bekasi.

- Social Community Aid for Poverty Alleviation

In 2020, the Company realized a total of Rp2,499,580,000 to provide social community aid for poverty alleviation in several regions, i.e. Ciamis, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, West Bandung.

DAMPAK TJSL TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan di bidang sosial kemasyarakatan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak kualitatif dan kuantitatif yang mendukung pemerataan dan perbaikan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Hubungan yang sinergis antara dampak kuantitatif dan kualitatif diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp1.236.620.000 karena tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya diharapkan berdampak pada meningkatnya kapasitas finansial mitra binaan yang berimplikasi pada meningkatkan kemandirian dan ketangguhan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan program kemitraan melalui penyaluran pinjaman modal kerja, yaitu penyediaan fasilitas pendampingan dan pembinaan pengelolaan usaha, berdampak pada potensi pengembangan yang semakin optimal dan profitabilitas yang semakin meningkat.
3. Tingkat penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2020 sebesar Rp5.259.580.000 yang meningkat dari realisasi tahun 2019 berimplikasi pada semakin kuatnya kontribusi Perum Jasa Tirta II dalam mewujudkan investasi sosial dan bantuan komprehensif yang mendukung kesejahteraan masyarakat.



IMPACT OF CSR RELATED TO SOCIAL COMMUNITY

The implementation of the Company's corporate social responsibility program through the Partnership and Community Development Program is expected to have qualitative and quantitative impacts that support equity economic improvement as well as welfare of society at large. The synergistic relationship between quantitative and qualitative impacts is illustrated as follows :

1. The level of distribution of funds for the Partnership Program is IDR 1,236,620,000 because in 2020 it is down from the previous year which is expected to have an impact on increasing the financial capacity of the fostered partners which has implications for increasing the independence and resilience of the community's economy.
2. The implementation of the partnership program through the distribution of working capital loans, namely the provision of facilities for business management assistance and guidance, has an impact on the potential for more optimal development and increasing profitability.
3. The rate of distribution of the Community Development Program in 2020 amounting to Rp5.259.580.000 an increase from the realization in 2019, led to stronger contribution of Perum Jasa Tirta II in realizing social investment and providing comprehensive aid that supports public welfare.





TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN COMPANY RESPONSIBILITIES RELATED TO CUSTOMERS

KEBIJAKAN TJSL TERKAIT PELANGGAN

Perum Jasa Tirta II memiliki komitmen kuat terhadap para konsumen atau pelanggan karena meyakini bahwa pelanggan merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran signifikan dalam menunjang pengembangan usaha secara berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai salah satu prioritas.

Pemenuhan tanggung jawab Perusahaan kepada pelanggan diwujudkan melalui pemberian perlindungan terhadap konsumen dan penyediaan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan, saran, kritik, masukan, serta laporan pelanggaran kepada Perusahaan. Setiap aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti dan ditangani dengan sebaik-baiknya.

TARGET TJSL TERKAIT PELANGGAN

Dalam memenuhi tanggung jawab Perusahaan kepada konsumen, Perum Jasa Tirta II menargetkan untuk senantiasa meningkatkan efisiensi penyelesaian pengaduan konsumen secara efektif dan efisien serta memelihara kepuasan pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara berkala serta mengevaluasi dan memonitor efektivitas penyelesaian pengaduan pelanggan secara rutin guna menciptakan perbaikan secara berkesinambungan.

KEGIATAN TJSL TERKAIT PELANGGAN

Program Penanganan Keluhan Pelanggan

Dalam menyelesaikan keluhan pelanggan secara efektif dan cepat, Perusahaan melakukan koordinasi melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penerimaan keluhan dari pelanggan melalui media penyampaian aspirasi yang disediakan;
2. Analisa permasalahan yang dikeluhkan oleh pelanggan dan ditindaklanjuti oleh bagian terkait dan Mitra lainnya apabila dibutuhkan;
3. Identifikasi alternatif solusi;
4. Penentuan solusi;
5. Implementasi solusi;
6. Penyampaian penyelesaian keluhan kepada pelanggan;
7. Dokumentasi dan evaluasi seluruh keluhan yang masuk untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan inovasi proses kerja sehingga mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi tuntutan bisnis dan harapan pelanggan.

Keluhan pelanggan pada umumnya dapat langsung ditangani secara efektif dan cepat melalui tahapan tersebut. Namun, apabila keluhan belum dapat terselesaikan, maka keluhan akan ditindaklanjuti lebih jauh dengan tetap menyediakan informasi terkini melalui email kepada pelanggan yang menjelaskan kondisi yang terjadi serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan tersebut.

CSR POLICIES REGARDING CUSTOMERS

Perum Jasa Tirta II has a strong commitment to customers because as the Company believes that customers are stakeholders who have a significant role in supporting sustainable business development. To that end, the Company places customer satisfaction as one of its priorities.

The fulfillment of the Company's responsibilities to customers is realized by providing protection to customers and facilities for consumers to channel their complaints, suggestions, criticisms, input, and reports of violations to the Company. Every incoming aspiration will be followed up and handled as well as possible.

CSR TARGET RELATED TO CUSTOMERS

In fulfilling the Company's responsibilities to its customers, Perum Jasa Tirta II aims to continuously improve the efficiency of the settlement of customer complaints effectively and efficiently and maintain customer satisfaction regarding goods or services provided by the Company. To that end, the Company conducts regular customer satisfaction surveys and routinely evaluates and monitors the effectiveness of customer complaints settlement in order to create continuous improvement.

CSR ACTIVITIES RELATED TO CUSTOMERS

Customer Complaints Handling Program

In settling customer complaints effectively and quickly, the Company coordinates through the following stages :

1. Receiving complaints from customers through aspiration reporting channel provided;
2. Analysis of the problems that become the customers' complaints to be followed up by the relevant department and other partners if needed;
3. Identification of alternative solutions;
4. Determination of the solution;
5. Implementation of the solution;
6. Reporting complaint settlement to customers;
7. Documentation and evaluation of all incoming complaints to be followed up through improvements and innovation of work process so as to produce products and services that meet business demands and customer expectations.

In general, customer complaints can be resolved effectively and quickly through these stages. However, if the complaint cannot be resolved, then the complaint will be followed up further as the Company continues to provide updates by email to the customer explaining the conditions that occurred and the time needed to resolve the complaint.

Hasil tindak lanjut akan dimonitor dan dievaluasi dalam pertemuan bulanan, seperti rapat koordinasi, sebagai usaha untuk memperoleh umpan balik yang menjadi acuan dalam perbaikan produk dan dukungan pelanggan, perencanaan produk, optimalisasi kinerja, pengaturan produksi dan pasokan, perbaikan sistem kerja, dan pengembangan bisnis baru.

Survei Kepuasan Pelanggan

Survei Kepuasan Pelanggan menjadi mekanisme pengukuran tingkat kepuasan pelanggan atas produk barang dan jasa yang dihasilkan Perusahaan serta perolehan umpan balik bagi perbaikan kinerja dan kualitas produk di masa mendatang. Survei kepuasan pelanggan dilakukan secara berkala di masing-masing lini bisnis. Pada semester I tahun 2020, Perusahaan memperoleh Indeks Kepuasan Pelanggan sebesar 86,77%, dengan rincian sebagai berikut :

Aspek / Aspects	Tahun 2020 / In 2020	
	Semester I	Semester II
Listrik / electricity	91,49 %	87,37 %
Air Baku / Raw Water	79,80%	85,89%
Air Bersih / Clean Water	81,03%	86,27%
Pariwisata / Tourism	93,17%	82,10%
AMDK / AMDK	84,90%	89,26%
Laboratorium / Laboratory	92,90%	92,44%
Lahan / Land	84,13%	83,89%
Rata-rata Indeks / Average Index	86,77%	87,37%

Indeks Kepuasan Pelanggan PJT II pada semester 2 tahun 2020 mencapai angka 87,37% atau naik 0,6% dibandingkan semester sebelumnya. Walaupun tidak terlalu signifikan, kenaikan ini tetap menjadi gambaran tren kinerja layanan yang positif.

Penyediaan Asuransi Pengunjung Wisata

Sebagai bentuk layanan prima terhadap wisatawan dan pelanggan lainnya, khususnya di lini bisnis Kepariwisata, Perum Jasa Tirta II menyertakan program asuransi kecelakaan diri kepada pengunjung wisata di Kawasan Wisata Grama Tirta Jatiluhur. Asuransi yang disediakan merupakan hasil kerja sama dengan PT Jasa Raharja bertujuan untuk memberi rasa aman bagi wisatawan akan hal-hal yang tidak diharapkan. Adapun nominal dana premi asuransi bersumber dari harga tiket masuk di kawasan wisata.

Sepanjang tahun 2020, Perum Jasa Tirta II telah menyetorkan dana asuransi secara tepat waktu kepada pihak terkait.

Temu Pelanggan

Kegiatan Temu Pelanggan diselenggarakan guna mempererat silaturahmi dan sinergi dengan para pelanggan Perum Jasa Tirta II sekaligus menjadi wadah bagi pelanggan untuk menyalurkan aspirasinya terkait dengan pelayanan dan produk Perum Jasa Tirta II.

The results of the follow-up will be monitored and evaluated in monthly meetings, such as coordination meetings, in an effort to obtain feedback that becomes a reference in product improvement and customer support, product planning, performance optimization, production and supply management, work system improvement, and new business development.

Customer Satisfaction Survey

The Customer Satisfaction Survey is a mechanism for measuring the level of customer satisfaction with the products and services produced by the Company as well as obtaining feedback for improving product performance and quality in the future. Customer satisfaction surveys are conducted regularly in each line of business. In the first semester of 2020, the Company obtained a Customer Satisfaction Index of 86.77 %, with details as follows :

Customer Satisfaction Index of PJT II in semester 2 of 2020 reached 87.37% or increased by 0.6% compared to the previous semester. Although insignificant, this increase remains a positive description of service performance trends.

Provision of Tourism Visitor Insurance

As a form of excellent service to tourists and other customers, especially in the tourism business line, Perum Jasa Tirta II provides personal accident insurance program for tourist visitors in the Grama Tirta Jatiluhur Tourism Area. The insurance provided is the result of cooperation with PT Jasa Raharja which aims to provide a sense of security for tourists in case of unexpected events. The nominal insurance premium fund source from the price of admission ticket to the tourist area.

Throughout 2020, Perum Jasa Tirta II has deposited insurance funds in a timely manner to related parties.

Customer Gathering

Customer Gathering activities are held to strengthen cooperation and synergy with Perum Jasa Tirta II customers and at the same time serve as a platform for customers to channel their aspirations related to Perum Jasa Tirta II services and products.



Customer Visit

Upaya dalam menjalin hubungan yang sinergis dengan konsumen diperkuat melalui pelaksanaan Customer Visit secara berkala guna memperoleh pemaparan dan mendengar langsung mengenai isu-isu terkait kinerja ataupun produk dan layanan yang dihasilkan Perusahaan.

DAMPAK TJSL TERKAIT PELANGGAN

Dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan kepada pelanggan terlihat dari hasil survei kepuasan pelanggan serta tidak terdapatnya komplain atau keluhan pelanggan terkait produk yang dihasilkan maupun aktivitas atau proses bisnis yang dijalankan selama tahun 2020.

Customer Visit

Efforts to establish a synergistic relationship with customers are strengthened through regular Customer Visit implementation to obtain exposure and listen directly to issues related to performance or products and services provided by the Company.

IMPACT OF CSR RELATED TO CUSTOMERS

The impact resulting from the implementation of the Company's responsibility to customers can be seen from the results of the customer satisfaction survey and there are no complaints regarding the products provided or business activities or processes carried out during 2020.



PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PERUM JASA TIRTA II

RESPONSIBILITY STATEMENT OF SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS FOR 2020 ANNUAL REPORT OF PERUM JASA TIRTA II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that every information contained in Perum Jasa Tirta II Annual Report 2020 has been fully disclosed and take full responsibility for the authenticity of the annual report content. This statement has been made truthfully.

Dewan Pengawas Supervisory Board



Ketik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Dewan Pengawas Supervisory Board



Muhamad Sofwan
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Dewan Pengawas Supervisory Board



Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Dewan Pengawas Supervisory Board



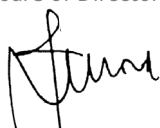
Romy Marcandi
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Direksi Board of Directors



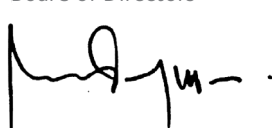
Imam Santoso
Direktur Utama
President Director

Direksi Board of Directors



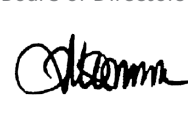
Haris Zulkarnain
Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Direksi Board of Directors



Anton Mardiyono
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Director of Operational and
Maintenance

Direksi Board of Directors



Indriani Widiastuti
Direktur Pengembangan Usaha
Director of Business Development

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

AUDITED FINANCIAL REPORT



DJOKO, SIDIK & INDRA

*Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant*

International member of:



*Alliance of
independent firms*

**PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
DAN / AND
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
*As of December 31, 2020 and
for the Year Then Ended
(With Comparative As of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)*

Nomor / Number : 00046/2.0999/AU.1/04/0138-1/1/III/2021
Tanggal / Date : 05 Maret / March , 2021

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

	Halaman/ Pages	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - iii	INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERUM JASA TIRTA II		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PERUM JASA TIRTA II
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position (Balance Sheets)
Tanggal 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019)		As of December 31, 2020 (With Comparative As of December 31, 2019)
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019)		For The Year Ended December 31, 2020 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2019)
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Changes in Equity
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019)		For The Years Ended December 31, 2020 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2019)
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Cash Flows
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019)		For The Year Ended December 31, 2020 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2019)
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5 - 210	Notes to Consolidated Financial Statements
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)		As of December 31, 2020 and for The Year Then Ended (With Comparative As of December 31, 2019 and for The Year Then Ended)
INFORMASI TAMBAHAN :		ADDITIONAL INFORMATION :
LAPORAN KEUANGAN POKOK Perum Jasa Tirta II Laporan Keuangan Tersendiri - Induk Saja	1 - 4	BASIC FINANCIAL STATEMENTS Perum Jasa Tirta II Individual Financial Statements - Parent Only
Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut)		As of December 31, 2020 and for The Year Then Ended (With Comparative As of December 31, 2019 and for The Year Then Ended)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUM JASA TIRTA II DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PERUM JASA TIRTA II AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned below:

1. Nama	:	Imam Santoso	:	1. Name
Alamat Kantor	:	Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat	:	Official Address
Nomor Telepon	:	(0264) 201792 / (0264) 201971	:	Phone Number
Alamat Email	:	imam.santoso@jasatirta2.co.id	:	Email Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jln. Warga I No. 7 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	:	Domicile Address (ID card) or Other Identification Card
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position
2. Nama	:	Haris Zulkarnain	:	2. Name
Alamat Kantor	:	Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II	:	Official Address
Nomor Telepon	:	(0264) 201792 / (0264) 201971	:	Phone Number
Alamat Email	:	haris.zulkarnain@jasatirta2.co.id	:	Email Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Komplek Grand Prima Bintara Cluster Blok A No. 50 (CA-50), Bekasi, Jawa Barat	:	Domicile Address (ID card) or Other Identification Card
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan SDM	:	Position
3. Nama	:	Anton Mardiyono	:	3. Name
Alamat Kantor	:	Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II	:	Official Address
Nomor Telepon	:	(0264) 201792 / (0264) 201971	:	Phone Number
Alamat Email	:	antonmardiyono@gmail.com	:	Email Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jl. Pondok Mutiara Raya II No 27, Kota Cimahi, Jawa Barat	:	Domicile Address (ID card) or Other Identification Card
Jabatan	:	Direktur Operasi dan Pemeliharaan	:	Position
4. Nama	:	Indriani Widiastuti	:	4. Name
Alamat Kantor	:	Kantor Pusat Perum Jasa Tirta II	:	Official Address
Nomor Telepon	:	(0264) 201792 / (0264) 201971	:	Phone Number
Alamat Email	:	indriani.widiastuti@gmail.com	:	Email Address
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain	:	Jl. Siaga I gg. Lukis No.36 RT/ RW 004/005 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	:	Domicile Address (ID card) or Other Identification Card
Jabatan	:	Direktur Pengembangan Usaha	:	Position

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anak tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang ditentukan oleh Perum Jasa Tirta II untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, serta dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance.

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its Subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended;
2. The consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its Subsidiaries were prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its Subsidiaries has been fully and properly;
b. The consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its Subsidiaries does not contain information or material facts are not correct and does not omit material information or facts.
4. We are responsible for the internal control system as determined by Perum Jasa Tirta II to enable the preparation of financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or error.

This is our declaration which made in truth and can be legally accountable, and in order to meet the principles of good corporate governance.

Jakarta, 5 Maret 2021 / March 5, 2021

PERUM JASA TIRTA II

Direksi



Imam Santoso
Direktur Utama


Haris Zulkarnain
Direktur Keuangan dan SDM


Anton Mardiyono
Direktur Operasi dan Pemeliharaan


Indriani Widiastuti
Direktur Pengembangan Usaha

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Alliance of
independent firms

Nomor :

00046/2.0999/AU.1/04/0138-1/1/III/2021

Number :

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**Pemilik Modal
Dewan Pengawas dan Direksi
Perum Jasa Tirta II
dan Entitas Anaknya**

**The Capital Owners
Boards of Supervisory and Directors
Perum Jasa Tirta II
and Its Subsidiaries**

Laporan atas laporan keuangan

Report on the financial reports

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries enclosed, which comprise the consolidated statements of financial position (balance sheets) as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated changes in equity, and the consolidated cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. We also conducted tests on the company's compliance with laws and regulations and internal control that direct and material effect on the consolidated financial statements presentation.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Manajemen juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Management is responsible to other legal and regulatory requirements and internal control that direct affect and material effect to fairly presentation of these consolidated financial statements.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung-jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian.

Our responsibilities is to express an opinion on such consolidated financial statements, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that direct affect and material effect on the financial statements presentation based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and examination standards established by The Financial Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that direct affect and material effect on the present fairly to the accompanying consolidated financial statements.

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, juga mencakup pengujian atas kepatuhan entitas terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke catatan 34 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang dampak Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan penurunan kinerja pendapatan dan produksi, serta belum terbitnya Surat Ijin Pemanfaatan – Sumber Daya Air (SIP-SDA) untuk beberapa PDAM Kabupaten / Kota yang berdampak ke menurunnya nilai pendapatan yang berasal dari produksi (penyaluran) air baku secara signifikan sebagai akibat hilangnya potensi pendapatan dari pelanggan atas SDA - air baku di tahun 2020. Selain itu, adanya pengeluaran yang berkenaan dengan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Meskipun demikian, tidak terlihat adanya dampak material dan signifikan dari pandemi Covid-19 ini terhadap realisasi investasi dan rasio likuiditas perusahaan, sedangkan rasio keuangan dan nilai *z-score model* pada umumnya mengalami penurunan di tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan tetap melakukan upaya-upaya konstruktif, hati-hati dan tepat sasaran melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam rangka tata-kelola perusahaan yang baik, dalam upaya untuk mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan ke depan. Meskipun bukan merupakan bagian audit kami berkenaan dengan kinerja yang ditunjukkan dalam rasio keuangan dan perolehan nilai *z-score model*, tidak terdapat keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kesinambungan usahanya; dan oleh karena itu opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment for risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or errors. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also include evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. An audit also include examination for compliance to contract, certain section and their conditions to other legal and regulatory requirements and internal control.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements enclosed present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performances and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We bring attention to note 34 of the attached financial report which explains the impact of the Covid-19 Pandemic, which resulted in a decline in income and production performance, and the issuance of a Permit for Utilization - Water Resources (SIP-SDA) for several affected Regency / City PDAMs. to the decline in the value of revenue from the production (distribution) of raw water significantly as a result of the loss of potential revenue from customers on SDA - raw water in 2020. In addition, there are expenditures related to the Covid-19 pandemic in 2020. However, There was no visible material and significant impact from the Covid-19 pandemic on investment realization and company liquidity ratios, while the financial ratios and z-score models generally experienced a decline in 2020 compared to the previous year. The company continues to make constructive, prudent and on target efforts through the application of risk management principles in the framework of good corporate governance, in an effort to maintain the sustainability of the company's business going forward. Although it is not part of our audit regarding the performance shown in the financial ratios and the z-score model, there is no doubt about the company's ability to sustain its business; and therefore our opinion is not modified in connection with the matter.



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Laporan keuangan tersendiri (induk saja) Perum Jasa Tirta II terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern kami sampaikan kepada manajemen dalam laporan kami nomor: No. 00006/2.0999/ASS-LAK.UU/04/0138-1/1/III/2021 dan 000007/2.0999/ASS-LAK.PI/04/0138-1/1/III/2021, tanggal 05 Maret 2021.

Other matter

Our audit of the consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries dated December 31, 2020 and for the year ended then attached conducted to formulate an opinion on the consolidated financial statements as a whole. Separate financial statements (parent only) of Perum Jasa Tirta II attached, which consists of a statement of financial positions (balance sheets) dated December 31, 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flow for the year then ended, presented as additional information of the accompanying consolidated financial statements, which are presented for purposes of additional analysis of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The Financial Information - Parent Entity Only as Separate Financial Statement is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements enclosed. The Financial Information - Parent Entity Only as Separate Financial Statement has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, The Financial Information - Parent Entity Only as Separate Financial Statement is fairly stated, in all material respect, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Reports on the provisions of laws and regulations and internal control

Compliance to other legal and regulatory requirements and internal control we issued to management in our report number: No. 00006/2.0999/ASS-LAK.UU/04/0138-1/1/III/2021 and 000007/2.0999/ASS-LAK.PI/04/0138-1/1/III/2021, date March 05, 2021.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA

DJOKO, SIDIK & INDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Drs. Abubakar Sidik, MS., CA., CPA
NRAP / Public Accountant License AP. 0138

05 Maret / March, 2021

NOTICE TO READERS

The above auditor's report and the accompanying consolidated financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and consolidated financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying consolidated financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the consolidated financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements are conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PERUM JASA TIRTA II
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of Desember 31, 2020
(With Comparative As of December 31, 2019)
(Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	Catatan / Notes	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	518.162.003.406	3,8;5;32;33	597.052.214.312	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha :				Trade Receivables :
Pihak Berelasi	176.133.218.879	3,8;4.a;4.b;4.d;	106.676.984.227	Related Parties
Pihak Ketiga	50.080.686.849	4.e;4.i;6;32;33; 34	46.892.769.722	Third Parties
(Setelah dikurangi Provisi Penurunan Nilai Piutang Per 31 Des 2020 dan 2019 masing- masing sebesar RP44.926.265.940 dan Rp37.888.849.575).				(Less Provision for uncollectible trade receivables As of 31 Des 2020 and 2019 respectively RP44.926.265.940 and Rp37.888.849.575).
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.901.278.942	3,8;7;32	2.194.041.664	Other Current Financial Assets
Persediaan	2.073.688.495	3,9;8	2.548.128.165	Inventories
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	21.092.240.399	3,10;10	9.824.380.647	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	770.443.116.970		765.188.518.737	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Aset Tetap	599.693.365.173	3,11;3,12;4.e;4 j;12	540.398.798.265	Fixed Assets
(Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan dan Penurunan nilai Per 31 Desember 2020 dan 2019 Sebesar Rp558.645.509.058 dan Rp507.739.630.025).				(Less accumulated depreciation and decrease in value Per 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp558.645.509.058 and Rp507.739.630.025).
Aset Hak Guna	2.373.797.898	3,13;4.e;13	-	Used Rights Assets
Aset Pajak Tangguhan	58.440.542.076	3,21;4.c;9.d	46.307.703.419	Deferred tax Asset
Aset Tidak Lancar Lainnya	102.125.227.342	3,12;3,13;4.b;4 .c;14	79.970.190.130	Other Non-current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	762.632.932.489		666.676.691.814	Total Non Current Asset
JUMLAH ASET	1.533.076.049.459		1.431.865.210.551	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Short-term Liabilities
Utang Usaha	46.541.937.164	3,8;15;32;33	39.620.267.071	Trade Payables
Beban Akrua	21.378.656.871	16;32	33.271.428.406	Accrual Expense
Utang Pajak	25.987.074.732	3,20;4.c; 4.h;9.b	21.410.461.252	Tax Payable
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	355.757.131	3,13;17	-	Short Term Lease Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	51.516.849.599	18;32	47.036.782.527	Other Short Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	145.780.275.497		141.338.939.256	Total Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long-term Liabilities
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	2.153.877.927	3,13;3,18;19	-	Long Term Lease Payable
Liabilitas Imbalan				Post-employment & Pension
Pasca Kerja & Pensiun	150.036.722.159	3,18;4.g;20	72.762.134.718	Benefits Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	14.265.066.700	21	22.130.129.200	Other long-term liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	166.455.666.786		94.892.263.918	Total Long-term Liabilities
Jumlah Liabilitas	312.235.942.283		236.231.203.174	Total Liabilities
Ekuitas				Equity
Modal Pemerintah R.I.	164.547.635.935	22	164.547.635.935	Government R.I. Capital
Cadangan Umum	13.943.023.591	23	13.943.023.591	General Reserves
Cadangan Bertujuan	1.027.001.112.300	24	885.252.980.572	Appropriated Reserves
Komponen Ekuitas Lainnya	(118.576.571.677)	25	(40.587.280.666)	Other Equity Component
Saldo Laba	124.003.429.661	24	162.512.354.404	Retained Earnings
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan:				Total Equity Atributable To:
Pemilik Entitas Induk	1.210.918.629.810		1.185.668.713.836	Parent Entity
Non Pengendali	9.921.477.366		9.965.293.541	Non Controlling Interest
Jumlah Ekuitas	1.220.840.107.176		1.195.634.007.377	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.533.076.049.459		1.431.865.210.551	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these consolidated financial statements.

PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang berakhir
31 Desember 2019)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PERUM JASA TIRTA II
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2020
(With Comparative for The Year Ended
December 31, 2019)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan / Notes	2019	
PENDAPATAN USAHA		3.16;4.k;26		OPERATING REVENUES
Pendapatan Sumber Daya Air	745.221.276.595		732.269.200.506	Water Resources Revenues
Pendapatan Non Sumber Daya Air	70.405.386.548		80.611.950.695	Non Water Resources Revenue
JUMLAH PENDAPATAN	815.626.663.143		812.881.151.201	TOTAL REVENUES
BEBAN POKOK		3.16;4.k;27		COST OF GOOD SALES
Beban Sumber Daya Air	(464.808.972.415)		(421.866.080.338)	Water Resources Expenses
Beban Non Sumber Daya Air	(44.044.709.078)		(46.688.796.755)	Non Water Resources Expense
JUMLAH BEBAN POKOK	(508.853.681.493)		(468.554.877.093)	TOTAL COST OF GOOD SALES
LABA KOTOR	306.772.981.650		344.326.274.108	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA				OPERATING REVENUES (EXPENSES)
Beban Pemasaran	(5.370.625.562)	3.16;28	(14.424.155.057)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(164.295.936.020)	3.16;29	(167.799.289.358)	General and Administration Expenses
Pendapatan Non Usaha	28.245.800.682	30.a	48.881.388.006	Non Operating Revenues
Beban Non Usaha	(26.785.004.941)	30.b	(20.619.115.005)	Non Operating Expense
	(168.205.765.841)		(153.961.171.414)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	138.567.215.809		190.365.102.694	PROFIT BEFORE TAXES
Manfaat (Beban) Pajak:				Tax Benefit (Expenses) Income:
Pajak Kini	(26.740.440.980)	3.20;4.c; 4.h;9.c	(41.821.786.500)	Current Taxes
Pajak Tangguhan	12.132.838.657	3.20;4.c; 4.h;9.d	5.265.740.668	Deferred Taxes
Jumlah Beban Pajak	(14.607.602.323)		(36.556.045.832)	Total Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN	123.959.613.486		153.809.056.862	PROFIT FOR THE CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
- Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				- Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(77.989.291.012)	3.18;4.g;20	9.018.484.205	Actuarial gains (loss) of post-employment benefits
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-		-	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(77.989.291.012)		9.018.484.205	Other Comprehensive Income for the Current Year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	45.970.322.474		162.827.541.067	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				Profit for the Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	124.003.429.661		153.843.749.220	The Owners of Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	(43.816.175)		(34.692.358)	Non-controlling Interest
Jumlah Laba Tahun Berjalan	123.959.613.486		153.809.056.862	Total Profit for the Current Year
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				Total Comprehensive Income for the Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	45.970.322.474		162.827.541.067	The Owners of Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	-		-	Non-controlling Interest
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	45.970.322.474		162.827.541.067	Total Comprehensive Income for the Current Year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these financial statements.

PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PERUM JASA TIRTA II
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Year Ended December 31, 2020
 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2019)
 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas induk/Equity Attributable to Owner of The Parent Entity										
Uraian	Catatan / Notes	Modal Pemerintah R.I./Government Capital R.I	Cadangan Umum / General Reserves	Cadangan Bertujuan / Appropriated Reserves	Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	Saldo Laba / Retained Earnings	Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling Interest	Jumlah/ Total	Description
Saldo 1 Januari 2019 / 31 Desember 2018		164.547.635.935	13.943.023.591	760.306.186.552	(49.605.764.871)	175.264.330.544	1.064.455.411.751	9.999.985.899	1.074.455.397.650	Balance as of January 1, 2019 December 31, 2018
Peningkatan Cadangan	24	-	-	124.946.794.020	-	(124.946.794.020)	-	-	-	Net Income for Current Year
Keuntungan Aktuarial	3.18;4.g; 24;25	-	-	-	9.018.484.205	-	9.018.484.205	-	9.018.484.205	Actuarial Gains
Pembayaran Dividen	23	-	-	-	-	(41.648.931.340)	(41.648.931.340)	-	(41.648.931.340)	Recovery Value of Financial Assets
Laba Tahun Berjalan	23	-	-	-	-	153.843.749.220	153.843.749.220	(34.692.358)	153.809.056.862	Dividends Declaired
Saldo 31 Desember 2019		164.547.635.935	13.943.023.591	885.252.980.572	(40.587.280.666)	162.512.354.404	1.185.668.713.836	9.965.293.541	1.195.634.007.377	Balance as of December 31, 2019
Peningkatan Cadangan	24	-	-	141.748.131.728	-	(141.748.131.728)	-	-	-	Net Income for Current Year
Keuntungan Aktuarial	3.18;4.g; 24;25	-	-	-	(77.989.291.011)	-	(77.989.291.011)	-	(77.989.291.011)	Actuarial Gains
Pembayaran Dividen	24	-	-	-	-	(20.764.222.676)	(20.764.222.676)	(43.816.175)	(20.808.038.851)	Recovery Value of Financial Assets
Laba Tahun Berjalan	24	-	-	-	-	124.003.429.661	124.003.429.661	-	124.003.429.661	Dividends Declaired
Saldo 31 Desember 2020		164.547.635.935	13.943.023.591	1.027.001.112.300	(118.576.571.677)	124.003.429.661	1.210.918.629.810	9.921.477.366	1.220.840.107.176	Balance as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these financial statements.

PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang berakhir

31 Desember 2019)

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PERUM JASA TIRTA II
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Year Ended December 31, 2020

(With Comparative for The Year Ended

December 31, 2019)

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari:				Receipts for:
Pelanggan	740.752.913.253		979.044.935.530	Customer
Pembayaran Kas kepada :				Cash Payment to:
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	(133.089.423.096)		(164.401.357.587)	Suppliers and Other Third Parties
Dewas, Direksi dan Karyawan	(258.275.094.590)		(198.305.929.696)	Comisioner, Directors, and Employees
Pembayaran Beban	(251.930.460.773)		(247.107.938.278)	Expenses Payment
Jumlah dari Hasil Aktivitas Operasional	97.457.934.794		369.229.709.969	Total from Operating Activities
Penghasilan Bunga	25.423.924.676		28.734.287.070	Interest Received
Pembayaran Pajak	(70.807.401.759)		(85.323.371.079)	Tax Payment
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	52.074.457.711		312.640.625.960	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	(110.200.445.941)	12	(108.361.645.998)	Acquisition of Fixed Asset
Penjualan Aset Tetap	-	12, 30.a	215.767.580	Sales of Fixed Assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(110.200.445.941)		(108.145.878.418)	Net Cash Flows Used in Investment Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran:				Payments:
Pembayaran Dividen	(20.764.222.676)	24	(41.648.931.340)	Dividend Payment
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(20.764.222.676)		(41.648.931.340)	Net (Increase) Cash Flows(Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(78.890.210.906)		162.845.816.202	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	597.052.214.312	3.8;5	434.206.398.110	CASH & CASH EQUIVALENTS - BEGINNING BALANCE
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	518.162.003.406	3.8;5	597.052.214.312	CASH & CASH EQUIVALENTS - ENDING BALANCE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements as an integral part of these financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN /
*NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS***

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

1.1. Pendirian Perusahaan Umum (Perum)

Pembangunan Bendungan/Waduk PLTA Ir. H. Djuanda dimulai tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Dengan selesainya pembangunan tersebut maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967 Pemerintah menetapkan berdirinya Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur yang bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya. Dengan berfungsinya sebagian besar prasarana pengairan yang meliputi waduk, bendungan utama dan PLTA Ir. H. Djuanda serta jaringan irigasi, maka berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1970 Pemerintah menetapkan pendirian Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang kemudian diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 1980. PP Nomor 20 Tahun 1970 jo. PP Nomor 35 Tahun 1980 disesuaikan dan disempurnakan menjadi PP Nomor 42 Tahun 1990 yang memperluas kewenangan, tugas serta lapangan usaha Perusahaan, selanjutnya dengan diterbitkannya PP Nomor 94 Tahun 1999, Perum Otorita Jatiluhur (POJ) diubah menjadi Perum Jasa Tirta II (PJT II). Selanjutnya diatur kembali dengan PP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG). Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha :

- 1) Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- 2) Penyediaan tenaga listrik kepada PT. Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain PT. Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. GENERAL

1.1. The Company's Establishment

Construction of Hydropower Dam / Reservoir Ir. H. Djuanda began in 1957 and was completed in 1967. With the completion of the construction then based on Government Regulation (PP) Number 8 of 1967 the Government established the Djatiluhur State Company (PN) tasked with organizing the Exploitation and Maintenance of Dam / Reservoir Facilities and Infrastructure of Ir. H. Djuanda hydropower plant and pioneering the development of further projects. With the functioning of most irrigation infrastructure which includes reservoirs, main dams and Ir. H. Djuanda hydropower plant and irrigation networks, then based on Government Regulation Number 20 Year 1970 the Government establishes the establishment of the Jatiluhur Authority Public Corporation (called POJ) which is then amended by Government Regulation Number 35 of 1980. Government Regulation Number 20 of 1970 jo. PP No. 35 of 1980 was adjusted and refined to become Government Regulation No. 42 of 1990 which expanded the authority, duties and field of business of the Company, then with the issuance of Government Regulation No. 94 of 1999, the Jatiluhur Authority (called POJ) was changed to Perum Jasa Tirta II (PJT II). Furthermore, it is regulated again with Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II.

1.2. Purposes and Objectives

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the national economy and development sector in general, especially in the field of Water Resources Management and Management as well as optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on good corporate governance Good Corporate Governance (GCG). In order to carry out the aims and objectives, the Company conducts business activities:

- 1) *Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing out, power plants and other water needs;*
- 2) *Provision of electricity to PT. Perusahaan Listrik Negara and / or other than PT. Perusahaan Listrik Negara in accordance with the provisions of laws and regulations;*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

- 3) Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
- 4) Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
- 5) Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, perdagangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

1.3. Tempat dan Kedudukan

Jl. Lurah Kawi No. 01. Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

1.4. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Sehubungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-92/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-340MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-392/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-79/DEWAS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Dewan Pengawas per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

1.2. Purposes and Objectives (continued)

- 3) Generation, distribution of hydropower, drinking water, business consulting services in the field of Water Resources technology, large equipment rental and water quality laboratory services;
- 4) Development of SPAM (Drinking Water Supply System); and
- 5) Conducting business optimization of the Company's potential resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, leasing and business facilities and infrastructure owned by the Company.

1.3. Place and Domicile

Jl. Lurah Kawi No. 1. Jatiluhur, Purwakarta, West Java.

1.4. Board of Supervisory and Working Devices, Directors and Employee

The composition of the Supervisory Board and Directors of Perum Jasa Tirta II are as follows:

Supervisory Board

Based on the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: SK-4 / MBU / 01/2020 dated January 3, 2020 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, Number: SK-92 / MBU / 03/2020 dated 23 March 2020 concerning the Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, Number: SK-340MBU / 10/2020 dated 21 October 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Public Companies (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK- 392 / MBU / 12/2020 dated December 15, 2020 concerning the Appointment of Members of the Supervisory Board for Jasa Tirta II Public Companies and Decree of the Supervisory Board Number: KEP-79 / DEWAS / X / 2020 dated 14 October 2020 concerning the Extension of the Service Period of the Supervisory Board Secretary of the Perum Jasa Tirta II, the membership composition of the Supervisory Board as of 31 December 2020 is as follows:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.4. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya,
 Direksi, dan Karyawan (lanjutan)**

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi
 Perum Jasa Tirta II sebagai berikut: (lanjutan)

Dewan Pengawas (lanjutan)

(lanjutan)

Ketua	:	Kelik Wirawan Wahyu W	:
Anggota	:	Nuning Sri Rejeki W	:
Anggota	:	Romy Marcandi	:
Anggota	:	Mohamad Sofwan	:
Sekretaris Dewan Pengawas	:	Umi Gita Nugraheni	:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
 Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-
 234/MBU/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan
 Nomor : SK-71/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret
 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
 Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum
 (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan
 Dewan Pengawas pada tanggal 31 Desember.
 2019 sebagai berikut:

Anggota	:	Hartanto	:
Anggota	:	Riad Oscha Chalik	:
Sekretaris Dewan Pengawas	:	Umi Gita Nugraheni	:

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas
 mendapat penghasilan berupa honorarium yang
 besarnya ditetapkan melalui Surat Menteri BUMN
 No.S-28/Wk2.MBU.C/08/2020, tanggal 04 Agustus
 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan
 Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II tahun 2020.
 Honorarium Ketua Dewan Pengawas ditetapkan
 sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama dan
 honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan
 sebesar 90% dari honorarium Ketua Dewan
 Pengawas atau sebesar Rp36.450.000.

1. GENERAL (continued)

**1.4. Board of Supervisory and Working Devices,
 Directors and Employee Directors (continued)**

The composition of the Supervisory Board and
 Directors of Perum Jasa Tirta II as follows:
 (continued)

Supervisory Board (continued)

(continued)

Chairman	:	Kelik Wirawan Wahyu W	:
Members	:	Nuning Sri Rejeki W	:
Members	:	Romy Marcandi	:
Members	:	Mohamad Sofwan	:
Secretary of the Supervisory Board	:	Umi Gita Nugraheni	:

Based on the Decree of the State Minister for
 State-Owned Enterprises Number: SK-234 / MBU /
 2014 dated 17 October 2014 and Number: SK-71 /
 MBU / 03/2016 dated 29 March 2016 concerning
 Dismissal and Appointment of Members of the
 Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, the
 composition of the Supervisory Board membership
 on December 31, 2019 as follows:

Members	:	Hartanto	:
Members	:	Riad Oscha Chalik	:
Secretary of the Supervisory Board	:	Umi Gita Nugraheni	:

In carrying out its duties, the Supervisory Board
 receives income in the form of an honorarium, the
 amount of which is determined through the Letter
 of the Minister of BUMN No.S-28 / Wk2.MBU.C /
 08/2020, dated August 4, 2020 concerning
 Determination of Income for Directors and
 Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II in 2020
 Honorarium for the Chairman of the Supervisory
 Board is set at 45% of the salary of the President
 Director and honorarium for members of the
 Supervisory Board is set at 90% of the honorarium
 for the Chairman of the Supervisory Board or
 amounting to Rp36,450,000.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.4. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya,
Direksi, dan Karyawan (lanjutan)**

Dewan Pengawas (lanjutan)

Dewan Pengawas menerima tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : Per-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per-04/MBU/2014, tanggal 10 Maret 2014, tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini.

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-222/MBU/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan umum (Perum) Jasa Tirta II. Nomor: SK-196/MBU/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Nomor: SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Susunan Keanggotaan Direksi per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Imam Santoso	:	President Director
Direktur Keuangan dan SDM	:	Haris Zulkarnain	:	Finance and HR Director
Direktur Operasi	:		:	Director of Operating and
dan Pemeliharaan	:	Anton Mardiyono	:	Maintenance
Direktur Pengembangan Usaha	:	Indriani Widiastuti	:	Director of Business Development

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-222/MBU/08/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-301/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perum Jasa Tirta II tanggal 12 Desember 2018, Nomor: SK-62/MBU/03/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: S-63/DP/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Operasi dan Pengembangan, susunan keanggotaan Direksi per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

**1.4. Board of Supervisory and Working Devices,
Directors and Employee (continued)**

Supervisory Board (continued)

The Supervisory Board receives allowances and / or facilities to be provided with reference to the provisions as stated in the Regulation of the Minister of State for SOEs number: Per-01 / MBU / 05/2019 dated May 31, 2019, Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs number Per- 04 / MBU / 2014, dated March 10, 2014, concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The regulation is still valid until today.

Decree of the Minister of BUMN Number: SK-222 / MBU / 08/2018 dated 1 August 2018 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II. Number: SK-196 / MBU / 06/2020 dated 11 June 2020 concerning Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II. Number: SK-350 / MBU / 10/2020 dated 27 October 2020 concerning Dismissal and Appointment of the Main Director of Perum Jasa Tirta II. Membership Composition of the Board of Directors as of December 31, 2020 as follows:

Based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises Number: SK-222 / MBU / 08/2018, dated August 1, 2018, concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II, Number: SK -301 / MBU / 12/2018 concerning Dismissal of the Managing Director of Perum Jasa Tirta II dated 12 December 2018, Number: SK-62 / MBU / 03/2019 dated 6 March 2019 concerning the Appointment of the President Director of Perum Jasa Tirta II, Letter The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: S-63 / DP / 2019 dated 16 October 2019 regarding the Appointment of the Operations and Development Director's Acting Director, the composition of the Board of Directors as of 31 December 2019 is as follows:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.4. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya,
 Direksi, dan Karyawan (lanjutan)**

Dewan Pengawas (lanjutan)

Direktur Utama	:	U. Saefudin Noer	:
Direktur Keuangan dan SDM	:	Haris Zulkarnain	:
Direktur Operasi dan Pengembangan	:	Haris Zulkarnain (Plt)	:

Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Direksi mendapat penghasilan berupa honorarium yang besarnya ditetapkan melalui Surat Menteri BUMN No.S-28/Wk2.MBU.C/08/2020, tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II tahun 2020. Honorarium Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp90.000.000 per bulan. Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 90% dari gaji Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

Tantiem atas insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2019 ditetapkan sebesar Rp6.601.000.000 dengan ketentuan: tantiem Direktur Utama, Direktur yang membidangi SDM, anggota Direksi lainnya dan Ketua Dewan Pengawas masing-masing sebesar 100%, 90%, 85% dan 45% dari tantiem Direktur Utama, dan tantiem anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas. Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas dalam tahun buku 2019.

1. GENERAL (continued)

**1.4. Board of Supervisory and Working Devices,
 Directors and Employee (continued)**

Supervisory Board (continued)

	:	President Director	:
	:	Finance and HR Director	:
	:	Director of Operating and Development	:

Directors

In carrying out its duties, the Board of Directors receives income in the form of an honorarium, the amount of which is determined through the Letter of the Minister of BUMN No. The President Director is set at Rp90,000,000 per month. The salary of the Director in charge of Human Resources is 90% of the salary of the President Director and other members of the Board of Directors of 85% of the salary of the President Director.

The bonus for performance incentives for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019 are is set at Rp.6,601,000,000 with the following provisions: the tantiem for the President Director, the Director in charge of HR, other members of the Board of Directors and the Chairman of the Supervisory Board respectively 100%, 90%, 85% and 45% of the bonus for the President Director, and the bonus for members of the Supervisory Board of 90% from the bonus for the Chairman of the Supervisory Board. The amount of tantiem is calculated proportionally according to the terms of office of each Board of Directors and Supervisory Board in 2019.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**1.4. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya,
 Direksi, dan Karyawan (lanjutan)**

Komite Audit

Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-72/DEWAS/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: S-42/DP/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukkan Ketua Komite Audit. Nomor: KEP-17/DEWAS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: KEP-80/DEWAS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: KEP-83/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Ketua	:	Nuning Sri Rejeki W	:	Chairman
Anggota	:	Wawan Saeful Anwar	:	Member
Anggota	:	Royza Fauzi	:	Member
Anggota	:	Kandianawati	:	Member

Sehubungan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-72/DEWAS/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: S-42/DP/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukkan Ketua Komite Audit dan Nomor: KEP-17/DEWAS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Ketua	:	Hartanto	:	Chairman
Anggota	:	Wawan Saeful Anwar	:	Member
Anggota	:	Royza Fauzi	:	Member

1. GENERAL (continued)

**1.4. Board of Supervisory and Working Devices,
 Directors and Employee (continued)**

Audit Committees

Decree of the Board of Supervisors of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-72 / DEWAS / XI / 2017 dated 7 November 2017 concerning Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II, Number: S-42 / DP / 2018 dated 5 June 2018 concerning the Appointment of the Chairman of the Audit Committee. Number: KEP-17 / DEWAS / IV / 2019 dated April 15, 2019 concerning the Appointment of Perum Jasa Tirta II, Number: KEP-80 / DEWAS / X / 2020 dated October 14, 2020 concerning the Extension of the Audit Committee Term of Perum Jasa Tirta II, Number: KEP-83 / DEWAS / XI / 2020 dated 5 November 2020 concerning Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee and Number: KEP-85 / DEWAS / XI / 2020 dated 5 November 2020 concerning Appointment of Members Risk Management Monitoring Committee for of Perum Jasa Tirta II. The membership composition of the Audit Committee as of December 31, 2020 is as follows:

Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-72 / DEWAS / XI / 2017 dated 7 November 2017 concerning the Appointment of Members of the Jasa Tirta II Public Company Audit Committee, Number: S-42 / DP / 2018 dated 5 June 2018 concerning the Appointment of the Chairman of the Audit Committee and Number: KEP-17 / DEWAS / IV / 2019 dated 15 April 2019 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of Perum Jasa Tirta II, the membership composition of the Audit Committee as of December 31 2019 is as follows :

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.4. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya, Direksi, dan Karyawan (lanjutan)

Tantiem

Tantiem ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Perusahaan Umum (Perum) dan dianggarkan dalam RKAP Tahun 2020 sebesar ("Rp10.000.000.000"), serta dibukukan sebagai beban (*expense*) tahun berjalan.

Tantiem atas insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2019 ditetapkan sebesar Rp6.601.000.000 dengan ketentuan: tantiem Direktur Utama, Direktur yang membidangi SDM, anggota Direksi lainnya dan Ketua Dewan Pengawas masing-masing sebesar 100%, 90%, 85% dan 45% dari tantiem Direktur Utama, dan tantiem anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas. Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Pengawas dalam tahun buku 2019.

1.5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah SDM Perusahaan terdiri dari: (tidak diaudit)

	2020	2019
SDM Perusahaan		
PJT II (Organik)	1072	923
Calon Karyawan	8	181
Jumlah	1.080	1.104

Struktur SDM Perusahaan per 31 Desember 2020 dan 2019 menurut kelompok SDM dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

2020							
Kelompok SDM / HR Group	Menurut Jenjang Pendidikan/ Levels of Education (orang/person)						Jumlah
	S2	S1	D3	SMU	SMP	SD	
Organik/ Organic	44	243	87	682	10	6	1.072
Calon Karyawan/ Prospective	-	5	3	-	-	-	8
Jumlah/ Total	44	248	90	682	10	6	1.080

2019							
Kelompok SDM / HR Group	Menurut Jenjang Pendidikan/ Levels of Education (orang/person)						Jumlah
	S2	S1	D3	SMU	SMP	SD	
Organik/ Organic	45	221	82	556	12	7	923
Calon Karyawan/ Prospective	-	29	8	144	-	-	181
Jumlah/ Total	45	250	90	700	12	7	1.104

1. GENERAL (continued)

1.4. Board of Supervisory and Working Devices, Directors and Employee (continued)

Tantiem

Tantiem is determined based on the management estimates of general companies (Perum) and budgeted in the 2020 RKAP amounting to ("Rp10,000,000,000"), and is recorded as expenses in the current year.

The bonus for performance incentives for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019 are set at Rp.6,601,000,000 with the following provisions: the tantiem for the President Director, the Director in charge of HR, other members of the Board of Directors and the Chairman of the Supervisory Board respectively 100%, 90%, 85% and 45% of the bonus for the President Director, and the bonus for members of the Supervisory Board of 90% from the bonus for the Chairman of the Supervisory Board. The amount of tantiem is calculated proportionally according to the terms of office of each Board of Directors and Supervisory Board in 2019.

1.5. Human Resources

As of December 31, 2020 and 2019 the total HR Company consists of: (unaudited)

The company's human resources structure as of 31 December 2020 and 2019 according to HR group and education level as follows:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Unit Usaha yang Dimiliki

Sehubungan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi unit kerja yang tercantum dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-10/DIR/07/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II. Perusahaan telah melakukan penyesuaian tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-18/DIR/11/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-1/DIR/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-19/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah dan Satuan Unit Kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, sedangkan unsur pelaksanaan nya adalah unit usaha yang terdiri dari:

Unit Usaha	Lokasi / Location	Business Unit
Unit Wilayah I	Bekasi	Regional I Unit
Unit Wilayah II	Karawang	Regional II Unit
Unit Wilayah III	Subang	Regional III Unit
Unit Wilayah IV	Jatiluhur	Regional IV Unit
Unit PLTA	Jatiluhur	PLTA Unit
Unit Usaha Pariwisata dan Hotel	Jatiluhur	Tourism & AMD Business Unit

- Fungsi Unit Wilayah I, II dan III adalah merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan operasi dan usaha, perencanaan teknik, move dan risiko, pengelolaan administrasi serta pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana SDA dalam rangka pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja Unit Wilayah I.

1. GENERAL (continued)

1.6. Owned Business Unit

In connection with the results of monitoring and evaluation of the implementation of the Organizational Structure and Work Procedure (called SOTK) of Perum Jasa Tirta II, it is necessary to make adjustments to the nomenclature, duties and functions of work units listed in the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-10 / DIR / 07/2020 concerning Organizational Structure and Work Procedure of Perum Jasa Tirta II. The company has made adjustments to the duties and functions of the organization as stated in the Regulation of the Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-18 / DIR / 11/2020 dated November 6, 2020 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of Perum Jasa Tirta II and Regulation of the Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-1 / DIR / 01/2021 dated January 29, 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-19 / DIR / 11/2020 concerning Organizational Structure and Work Procedures under the Internal Control Unit, Company Secretariat, Divisions, Business Units, Regional Units and Work Units in Perum Jasa Tirta II, while the implementation element is a business unit consisting of:

- The function of the Region I, II and III Unit is to plan, determine, implement, control, analyze and evaluate and report on the activities of the implementation of operations and business, technical planning, monitoring and evaluation and risk, administrative management as well as maintenance and repair of water resources (called SDA) facilities and infrastructure in the context of exploiting River Basin Water Resources and part of the duties and responsibilities in the field of water resources management in the work area of the Region I Unit.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- Fungsi Unit Wilayah IV adalah merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan teknik, movev dan risiko, usaha, pelaksanaan operasi, pengelola Bendungan Ir. H. Djuanda dan Bandung Curug, pengelolaan administrasi serta pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana SDA dalam rangka perusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja Unit Wilayah IV.
- Fungsi Unit PLTA adalah merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan teknik, movev, risiko, usaha dan pengelolaan administrasi serta pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan Unit Pembangkit dan Jaringan dalam rangka perusahaan ketenagalistrikan.
- Fungsi Unit Usaha Pariwisata & Hotel mempunyai tugas merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan teknik dan pemasaran, operasional Hotel dan Bungalow, serta pengelolaan administrasi dalam rangka perusahaan pariwisata dan hotel.

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi

Entitas Anak

PT. Jasa Tirta Luhur

PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, dengan Akta nomor 46 tanggal 29 Agustus 2018. Perseroan bergerak dalam bidang jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan perusahaan adalah:

1. GENERAL (continued)

1.6. Owned Business Unit (continued)

- The function of the Region IV Unit is to plan, determine, implement, control, analyze and evaluate as well as report on the activities of engineering planning, monitoring and evaluation and risk, business, operational implementation, manager of Ir. H. Djuanda dam and Bandung Curug, administrative management as well as maintenance and repair of SDA facilities and infrastructure in the context of exploiting River Basin Water Resources and some of the duties and responsibilities in the field of water resources management in the area of Area IV Unit work.
- The function of the hydropower plant (called PLTA) Unit is to plan, determine, implement, control, analyze and evaluate and report on the activities of technical planning, monitoring and evaluation, risk, business and administrative management as well as the implementation of operations, maintenance and repair of the Power Plant and Network Units in the framework of electricity business.
- The function of the Tourism & Hotel Business Unit has the task of planning, determining, implementing, controlling, analyzing and evaluating and reporting on technical and marketing activities, hotel and bungalow operations, as well as administrative management in the context of tourism and hotel business.

1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and Associated Entities

Subsidiaries Entities

PT. Jasa Tirta Luhur

PT Jasa Tirta Luhur was established based on the Notary Deed of Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, with Deed number 46 dated 29 August 2018. The company is engaged in Drinking Water Supply System and Construction services.

According to the company's article, article 3, the aims and objectives of the company are:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT. Jasa Tirta Luhur (lanjutan)

- 1) Melakukan kegiatan usaha dalam Bidang Jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Melakukan usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.

- 3) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) oleh para pendiri.

1. GENERAL (continued)

1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and Associated Entities (continued)

Subsidiaries Entities (continued)

PT. Jasa Tirta Luhur (continued)

- 1) Conducting business activities in the Drinking Water Supply System and Construction Services Sector.
- 2) To achieve the aims and objectives mentioned above, the company can carry out business activities as follows:

Conducting efforts to extract water directly from springs and groundwater as well as purifying surface water from water sources and channeling drinking water directly from water terminals through pipelines, tank cars (provided that the tankers are still under administrative management of the water company) to be sold to consumers or customers, such as households, government agencies / institutions / agencies, social agencies, state-owned enterprises, companies / private businesses, including hotels, industrial processing and shops.

- 3) To achieve the aims and objectives mentioned above, the company can carry out business activities.
- 4) Carrying out business activities for the construction, improvement, maintenance and repair of the construction of water networks, irrigation systems (canals), reservoirs and siphons and irrigation drainage.

The authorized capital of the Company is Rp 80,000,000,000 (eighty billion Rupiah) divided into 80,000 (eighty thousand) shares, each share with a nominal value of Rp 1,000,000 (one million rupiah). Of the Authorized Capital, 25% (twenty five percent) or a total of 20,000 (twenty thousand) shares with a total nominal value of Rp.20,000,000,000 (twenty billion rupiah) had been issued by the founders.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT. Jasa Tirta Luhur (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 13 Februari 2020
 oleh Putranto Nur Utomo, SH., M.Kn, Notaris di
 Bogor, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT
 Jasa Tirta Luhur berubah menjadi :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Haris Zulkarnain
Komisaris :	Anton Mardiyono

Direksi

Direktur Utama :	Ir. Andrijanto, MT
Direktur :	Gok Ari Joso Simamora

Mulai tanggal 16 September 2020, Saudara Gok
 Ari Joso Simamora, telah mengundurkan diri
 sebagai Direktur Keuangan dan Komersial, karena
 diangkat sebagai Direktur Operasional Perum Jasa
 Tirta I sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN
 No. SK-286/MBU/09/2020, tanggal 15 September
 2020.

Sebelumnya, berdasarkan Akta No. 46 tanggal 29
 Agustus 2018 oleh Putranto Nur Utomo, SH.,
 M.Kn, Notaris di Bogor, susunan Dewan Komisaris
 dan Direksi PT Jasa Tirta Luhur sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Ir. Djoko Saputro
Komisaris :	Haris Zulkarnain

Direksi

Direktur Utama :	Ir. Andrijanto, MT
Direktur :	-

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian
 Tanggal 31 Desember 2020 (Dengan
 Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019):

1. GENERAL (continued)

**1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and
 Associated Entities (continued)**

Subsidiaries Entities (continued)

PT. Jasa Tirta Luhur (continued)

Based on the Deed No. 41 dated February 13,
 2020 by Putranto Nur Utomo, SH., M.Kn, Notary in
 Bogor, the composition of the Board of
 Commissioners and Directors of PT Jasa Tirta
 Luhur changed to:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director

Starting September 16, 2020, Mr. Gok Ari Joso
 Simamora, has resigned as Director of Finance
 and Commercial, because he was appointed as
 Operational Director of Perum Jasa Tirta I in
 accordance with the Decree of the Minister of
 BUMN No. SK-286 / MBU / 09/2020, dated 15
 September 2020.

Previously, based on the Deed No. 46 dated 29
 August 2018 by Putranto Nur Utomo, SH., M.Kn,
 Notary in Bogor, the composition of the Board of
 Commissioners and Directors of PT Jasa Tirta
 Luhur as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director

Consolidated Statements of Financial Position
 (Balance Sheets) as of December 31, 2020 (with
 Comparative as of December 31, 2019)

	2020	2019	
- Aset	48.789.273.413	59.360.688.965	Assets -
- Liabilitas	26.841.536.827	33.031.334.836	Liabilities -
- Ekuitas	21.947.736.587	26.329.354.129	Equity -

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT. Jasa Tirta Luhur (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
 Lain Konsolidasian Tahun 2020 (Dengan
 Perbandingan Tahun 2019) :

	2020	2019
- Pendapatan	4.527.426.160	253.623.214
- Beban	8.909.043.703	3.722.858.998
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(4.381.617.543)	(3.469.235.784)
- Pendapatan (Beban) Pajak	-	-
- Laba (Rugi) Bersih	(4.381.617.543)	(3.469.235.784)
- Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
- Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain	(4.381.617.543)	(3.469.235.784)

Entitas Anak dari PT Jasa Tirta Luhur

PT. Tegar Mandiri Cemerlang

PT Tegar Mandiri Cemerlang (atau sering disingkat dengan "TMC") didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Odang dengan Akta nomor 16 tanggal 16 Mei 2013. Pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor. 06 dengan notaris Henry Susanto, S.H., M.Kn dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-44847.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 serta telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.09/1-0863/DPMPSTSP/PK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan Tanda Nomor Pendaftaran (TDP) Perseroan Terbatas nomor 0678/BH.10.07/V/2018 tanggal 24 Mei 2018. Perseroan bergerak dalam Jasa Konsultansi Teknik (Desain Konstruksi Fasilitas Umum). Perusahaan beroperasi sejak Agustus 2018.

1. GENERAL (continued)

1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and Associated Entities (continued)

Subsidiaries Entities (continued)

PT. Jasa Tirta Luhur (continued)

Consolidated Statements of Profit or Loss and
 Other Comprehensive Income For Year 2020 (With
 Comparative Balance for Year 2019) :

	2020	2019	
			Revenues -
			Expenses -
			Profit (Loss) Before Tax -
			Tax Income (Expense) -
			Profit (Loss) -
			Other Comprehensive Income -
			Gain (Loss) Other Comprehensive Income

Subsidiaries Entities from PT Jasa Tirta Luhur

PT. Tegar Mandiri Cemerlang

PT Tegar Mandiri Cemerlang (or often abbreviated as "TMC") was established based on the Notarial Deed of Soeleman Odang with Deed number 16 dated 16 May 2013. On 21 December 2018 based on the Statement of Shareholders' Decisions outside the Meeting as a Substitute for the Extraordinary General Meeting of Shareholders number 06 with notary Henry Susanto, S.H., M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, number AHU-44847.AH.01.01. 2013 dated 27 August 2013 and already has a Small Business Trading License (SIUP) Number 503.09 / 1-0863 / DPMPSTSP / PK / V / 2018 dated 24 May 2018 and a Limited Company Registration Number (TDP) Number 0678 / BH.10.07 / V / 2018 dated 24 May 2018. The Company is engaged in Engineering Consultant Services (Public Facility Construction Design). The company has been operating since August 2018.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak dari PT Jasa Tirta Luhur (lanjutan)

PT. Tegar Mandiri Cemerlang (lanjutan)

Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sesuai dengan Akta No.08 tanggal 6 Agustus 2020 Notaris Henry Susanto, SH., M.Kn. pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan sebagai berikut:

a. Industri

Industri air minum dan air mineral, mencakup usaha pembuatan airminum dalam kemasan dan air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.

b. Pengelolaan Air

Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air tersebut).

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, nomor 06 dari Henry Susanto Notaris di Kabupaten Karawang tanggal 21 Desember 2018. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah) terbagi atas 50.000 (Lima Puluh Ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Dari modal dasar Perseroan tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai oleh para pemegang saham 40% atau sejumlah 20.000 (Dua Puluh Ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari modal yang ditempatkan dan telah diambil bagian oleh para pendiri.

1. GENERAL (continued)

1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and Associated Entities (continued)

Subsidiaries Entities from PT Jasa Tirta Luhur (continued)

PT. Tegar Mandiri Cemerlang (continued)

Changes in the aims and objectives as well as the company's business activities in accordance with Deed No. 08 dated 6 August 2020 Notary Henry Susanto, SH., M.Kn. Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of establishing the Company are as follows:

a. Industry

Drinking water and mineral water industry, including the business of making bottled drinking water and natural mineral water, demineralized water, including the refill water industry.

b. Water Management

Storage, purification and distribution of drinking water includes efforts to extract water directly from springs and groundwater and purify surface water from sources water and channeling drinking water directly from the water terminal through pipelines, tank cars (as long as the tanker is still under the same administrative management of the water company).

In accordance with the Deed of Decision of Shareholders Outside the Meeting as a Substitute for the Extraordinary General Meeting of Shareholders, number 06 of Henry Susanto Notary in Karawang Regency dated December 21, 2018. The Company's authorized capital is Rp 50,000,000,000 (Fifty Billion Rupiah) divided into 50,000 (Fifty Thousand) shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (One Million Rupiah). Of the authorized capital of the Company, 40% of the shareholders have issued and paid up in cash or a total of 20,000 (Twenty Thousand) shares with a total nominal value of Rp.20,000,000,000 (Twenty Billion Rupiah) of the issued and issued capital. has been taken part by the founders.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak dari PT Jasa Tirta Luhur (lanjutan)

PT. Tegar Mandiri Cemerlang (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.08 tanggal 6 Agustus 2020 oleh Henry Susanto, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Karawang, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Tegar Mandiri Cemerlang sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Ir. Andrijanto, MT
Komisaris :	Wong Haris

Direksi

Direktur Utama :	-
Direktur :	Temmy Gunawan

Mulai tanggal 16 September 2020, Saudara Gok Ari Joso Simamora, telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, karena diangkat sebagai Direktur Operasional Perum Jasa Tirta I sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-286/MBU/09/2020, tanggal 15 September 2020.

Sebelumnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.06 tanggal 21 Desember 2018 oleh Henry Susanto, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Karawang, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Tegar Mandiri Cemerlang sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Ir. Andrijanto, MT
Komisaris :	Wong Haris

Direksi

Direktur Utama :	Gok Ari Joso Simamora

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Tanggal 31 Desember 2020 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019) :

	2020	2019
- Aset	43.112.184.051	43.834.356.549
- Liabilitas	26.590.001.066	24.974.534.836
- Ekuitas	16.522.182.986	18.859.821.713

1. GENERAL (continued)

1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and Associated Entities (continued)

Subsidiaries Entities from PT Jasa Tirta Luhur (continued)

PT. Tegar Mandiri Cemerlang (continued)

Based on the Deed of Decision of Shareholders Outside the Meeting as Substitute for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 08 dated 6 August 2020 by Henry Susanto, S.H., M.Kn Notary in Karawang Regency, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Tegar Mandiri Cemerlang as follows:

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Commissioner

Directors

:	President Director
:	Director

Starting September 16, 2020, Mr. Gok Ari Joso Simamora, has resigned as the President Director, because he was appointed as Operational Director of Perum Jasa Tirta I in accordance with the Decree of the Minister of BUMN No. SK-286 / MBU / 09/2020, dated 15 September 2020.

Previously, based on the Deed of Decision of Shareholders Outside the Meeting as a Substitute for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 06 dated 21 December 2018 by Henry Susanto, S.H., M.Kn Notary in Karawang Regency, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Tegar Mandiri Cemerlang as follows:

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Commissioner

Directors

:	President Director

Statements of Financial Position (Balance Sheets) as of December 31, 2020 (with Comparative as of December 31, 2019) :

Assets -
 Liabilities -
 Equity -

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Anak, Cucu dan Asosiasi (lanjutan)

Entitas Anak dari PT Jasa Tirta Luhur (lanjutan)

PT. Tegar Mandiri Cemerlang (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Tahun 2020 (Dengan Perbandingan Tahun
2019):

	2020	2019
- Pendapatan	4.527.426.160	136.668.765
- Beban	6.865.064.887	1.291.497.574
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(2.337.638.727)	(1.154.828.809)
- Pendapatan (Beban) Pajak	-	-
- Laba (Rugi) Bersih	(2.337.638.727)	(1.154.828.809)
- Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
- Laba (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain	(2.337.638.727)	(1.154.828.809)

Entitas Asosiasi

Entitas Asosiasi / Associated Entities	Lokasi / Domicile	Kegiatan Usaha / Main Business Activities	% Kepemilikan / Ownership Percent	Tahun Operasi Komersial / Start of Commercial Operation	Jumlah Aset sebelum Eliminasi / Total Assets before Elimination
PT. Bakti Usaha Menanam Hijau I (BUMN Hijau Lestari I)	Bandung	Bergerak dalam bidang ekobisnis yang berbasis agroforestry dan korporasi / Engaged in agroforestry and corporate eco- business	20,54%	2008	-
PT. Air Minum Indonesia	Bogor	Penyediaan Air Minum / Drinking Water Supply	10,00%	2015	-

1. GENERAL (continued)

**1.7. Subsidiaries, Sub of Subsidiaries and
Associated Entities (continued)**

**Subsidiaries Entities from PT Jasa Tirta Luhur
(continued)**

PT. Tegar Mandiri Cemerlang (continued)

Statements of Profit of Loss and Other
Comprehensive Income for year 2020 (With
Comparative Balance for Year 2019)

Revenues -
Expenses -
Profit (Loss) Before Tax -
Tax Income (Expense) -
Profit (Loss) -
Other Comprehensive Income -
Gain (Loss) Other Comprehensive -
Income

Asosiasi Entities

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Asosiasi (lanjutan)

Entitas Asosiasi / Associated Entities	Lokasi / Domicile	Kegiatan Usaha / Main Business Activities	% Kepemilikan / Ownership Percent	Tahun Operasi Komersial / Start of Commercial Operation	Jumlah Aset sebelum Eliminasi / Total Assets before Elimination
PT. Padi Energi Nusantara (PEN)	Jakarta	Melaksanakan dan menunjang kegiatan dan program Pemerintah di bidang ketahanan pangan dan energi / Carry out and support Government activities and programs in the field of food security and energy	6,90%	2008	-

PT. Bakti Usaha Menanam Hijau (BUMN Hijau Lestari I)

Berdasarkan surat dari PT. BUMN Hijau Lestari I Nomor SB/A.II/3790/XI/2008 tanggal 3 November 2008, Perusahaan menginvestasikan dananya di PT. BUMN Hijau Lestari I sebesar Rp1.400.000.000,- atau 20% dari total modal yang disetor. Pada tahun 2011 dan 2012 Perusahaan menambah modal disetor masing-masing sebesar Rp750.000.000,- dan Rp250.000.000,- sehingga total modal disetor sebesar Rp2.400.000.000,- yang telah diaktakan oleh notaris Irma Rahmawati, SH.

Berdasarkan Risalah Rapat PT. BUMN Hijau Lestari I tanggal 6 Mei 2013 bahwa PT. BUMN Hijau Lestari II melakukan Merger (Penggabungan Usaha) dengan PT. BUMN Hijau Lestari I. Sehingga jumlah penyertaan Perusahaan di PT. BUMN Hijau Lestari I menjadi sebesar 21,52%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. BUMN Hijau Lestari I Nomor 16 tanggal 6 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Irma Rachmawati, SH., yang berkedudukan di Kota Bandung, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0105825.AH.01.10.Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum (Perum) Terbatas PT. BUMN Hijau Lestari I, menyatakan total modal disetor Perusahaan sebanyak 3.800 saham dengan nilai nominal Rp3.800.000.000. Jumlah 3.800 saham tersebut setara dengan 20,54% dari total saham ditempatkan sebanyak 18.504 saham.

1. GENERAL (continued)

1.7. Associated Entities (continued)

PT. Bakti Usaha Menanam Hijau (BUMN Hijau Lestari I)

Based on a letter from PT. BUMN Hijau Lestari I number SB/A.II/3790/XI/2008 dated November, 2008, the Company invested in PT. BUMN Hijau Lestari I at amount of Rp1.400.000.000,- or 20% of shares. In 2011 and 2012, the Company invested additional amount of Rp750.000.000,- and Rp250.000.000,- respectively. Therefore the amount of the investment is Rp2.400.000.000,-. It was notarized by Irma Rahmawati, SH.

Based on the Minutes of Meeting of PT. BUMN Hijau Lestari I dated May 6, 2013, PT. BUMN Hijau Lestari II was merged with PT. BUMN Hijau Lestari I. Therefore, the Company's share of interest in PT. BUMN Hijau Lestari I become 21,52%.

Based on the Deed of Circular Decision of the Shareholders of PT. BUMN Hijau Lestari I number 16 dated July 6, 2015, notarised by Irma Rachmawati, SH, in Bandung, and approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number AHU-0105825.AH.01.10.Tahun 2015 dated July 15, 2015 regarding Approving of the company's article of association of PT. BUMN Hijau Lestari I said that the equity sharing of the Company are at 3.800 shares or at face value of Rp3.800.000.000. Total 3.800 shares are equivalent to 20,54% shares of 18.504 shares as a whole.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT. Bakti Usaha Menanam Hijau (BUMN Hijau Lestari I) (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. BUMN Hijau Lestari I yang berlaku efektif serta mengikat sejak tanggal 05 Agustus 2015, Para Pemegang Saham telah menyepakati peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perusahaan Umum (Perum) dari Rp18.503.000.000 yang terbagi dalam 18.504 saham menjadi Rp25.500.000.000 atau terbagi dalam 25.500 saham.

Atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut Perusahaan harus menyetorkan sebesar Rp1.437.000.000. Sampai dengan saat ini, Perusahaan belum melakukan setoran atas penambahan modal tersebut.

PT. Air Minum Indonesia

Berdasarkan Akta Pendirian PT. Air Minum Indonesia Nomor 04 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.KN., yang berkedudukan di Kota Bogor, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2449637.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015, menyatakan modal dasar Perusahaan Umum (Perum) berjumlah Rp250.000.000.000 terbagi atas 250.000 saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 62.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.500.000.000.

Total modal disetor Perusahaan adalah 6.250 saham atau seluruhnya sebesar Rp6.250.000.000. Jumlah 6.250 saham tersebut setara dengan 10% dari total saham ditempatkan sebanyak 62.500 saham.

PT. Padi Energi Nusantara (PEN)

Berdasarkan surat dari Kementerian BUMN Nomor: S-899/MBU/2008 tentang persetujuan Pendirian PT. PEN tanggal 17 November 2008 Perusahaan melakukan penyertaan sebesar Rp2.000.000.000,- atau 6,9% dari total modal yang disetor pada PT. PEN, yang telah tercatat dalam akta Pendirian PT. PEN Nomor 12 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Neny Saadah, SH.

1. GENERAL (continued)

1.7. Associated Entities (continued)

PT. Bakti Usaha Menanam Hijau (BUMN Hijau Lestari I) (continued)

Based on Circular Decision of Shareholders of PT. BUMN Hijau Lestari I which effectively bound since August, 5 2015. The Shareholders have agreed to increase the issued and paid-in capital from Rp18.503.000.000 which divided into 18.504 shares to Rp25.500.000.000 which divided into 25.500 shares.

Due to increasing of the issued and paid-in capital the Company shall invest additional amount of Rp1.437.000.000. To date, the company has not made any additional payments for the increase of issued capital.

PT. Air Minum Indonesia

Based on Establishment Deed of PT. Air Minum Indonesia No. 04 dated July, 30 2015 notaried by notary Putranto Nur Utomo, S.H., M.KN., located in Bogor, approved with the Decision of Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia No. AHU-2449637.AH.01.01.year 2015 dated August, 03 2015, explained that authorized capital of Company at amount of Rp250.000.000.000 that divided into 250.000 shares. Of the authorised capital, 25% or at amount of 62.500 shares with total face value of Rp62.500.000.000 had been issued and paid.

Total interest share of the Company is at amount of 6.250 shares or Rp6.250.000.000. The total of 6.250 shares equals 10% of total issued shares at amount of 62.500 shares.

PT. Padi Energi Nusantara (PEN)

Based on Letter of Ministry of SOE No : S-899/MBU/2008 about the Agreement of PT. PEN establishment dated November 17, 2008, the Company invested Rp 2.000.000.000,- or equal to 6,9% of total paid-in capital of PT. PEN as shown in the Deed of Establishment of PT. PEN No. 12 dated December 30, 2008 which issued by Notary Neny Saadah, SH.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT. Padi Energi Nusantara (PEN) (lanjutan)

Berdasarkan Financial Due Diligence konsultan PT. Saraswati Perdana, nilai ekuitas proforma PT. PEN per 31 Desember 2012 sebesar Rp882.000.000 yang terbagi atas 29.000 saham atau Rp30.430 per saham. Penyertaan saham Perusahaan pada PT. PEN adalah 2.000 saham dengan total nominal Rp2.000.000.000. Sehingga berdasarkan hasil Due Diligence PT. Saraswati Perdana tersebut nilai saham perusahaan menjadi sebesar Rp60.860.000.000. Karena kondisi PT. PEN menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperkirakan nilai penyertaan saham perusahaan pada PT. PEN per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000.000 (100%). Penurunan nilai tersebut telah dibukukan pada akhir tahun 2013.

Saat ini Perusahaan dalam kondisi tidak beroperasi. (lihat catatan 11)

1. GENERAL (continued)

1.7. Associated Entities (continued)

PT. Padi Energi Nusantara (PEN) (continued)

Based on Financial Due Diligence of PT. Saraswati Perdana, fair value of PT. PEN per December, 31 2012 was at amount of Rp882.000.000 which divided into 29.000 shares or Rp30.430 per shares. Investment in PT. PEN was 2.000 shares or equal to Rp2.000.000.000,-. Therefore, based on the Due Diligence of PT. Saraswati Perdana, the shares value became Rp60.860.000,00. The objective conditions of PT. PEN indicates a doubt of going concern. Then the fair value of Company investment in PT. PEN per December, 31 2013 expected to decrease to be at amount of Rp0,00. In otherword, it decreased at amount of Rp2.000.000.000 (100%). The impairment loss have been recorded at the end of 2013.

At this time, the company is not operating. (see note 11)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018:

- PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"

Amandemen tersebut tidak menentukan format spesifik untuk mengungkapkan aktivitas pendanaan; namun, suatu entitas dapat memenuhi tujuan pengungkapan dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan posisi keuangan.

- PSAK 13 (Amandemen 2017), "Properti Investasi: tentang Pengalihan Properti Investasi"

Amandemen ini mengatur perubahan penggunaan properti investasi, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. The Amendments and Interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018:

- PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative"

The amendments do not prescribe a specific format to disclose financing activities; however, an Entities may fulfill the disclosure objective by providing a reconciliation between the opening and closing balances in the statement of financial position for liabilities arising from financing activities.

- PSAK 16 (Amendment 2017), "Investment Property: Transfers of Investment Property"

This amendment governs changes in the use of investment property, when the property meets, or stops fulfilling, the definition of investment property and there is evidence of changes in use.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018: (lanjutan)

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

Penyesuaian ini mengatur bahwa entitas dapat memilih untuk mengukur investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki oleh, atau dimiliki secara tidak langsung melalui, entitas yang merupakan organisasi modal ventura, atau reksa dana, unit perwalian dan entitas serupa termasuk dana asuransi terkait- investasi, pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Entitas melakukan pemilihan tersebut secara terpisah untuk masing-masing entitas asosiasi atau ventura bersama.

- PSAK 16 (Amandemen 2015), "Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur"

Mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) masuk ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap; tanaman produktif sebagai Tanaman Hidup yang (i) digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur, (ii) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk lebih dari 1 periode, dan (iii) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Amandemen ini tidak relevan dengan operasi dan bisnis Perseroan sehingga tidak menyebabkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan grup.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") (continued)

a. The Amendments and Interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018: (continued)

- PSAK 15 (Improvement 2017), "Investments in Associates and Joint Ventures"

This adjustment stipulates that the Entities may choose to measure investments in associates or joint ventures owned by, or indirectly through, entities that are venture capital organizations, or mutual funds, trusteeship units and similar entities including investment-related insurance funds, at fair value through profit or loss in accordance with PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement. The Entities makes these selections separately for each associate or joint venture.

- PSAK 16 (Amendment 2015), "Fixed Asset: regarding Adding Paragraphs related to Agricultural Assets"

Clarifying that biological assets that meet the definition of bearers are within the scope of PSAK 16: Fixed Assets; productive plants as Living Plants which (i) are used in the process of producing or supplying agricultural products, (ii) are expected to produce products for more than 1 period, and (iii) have very rare possibilities to be sold as agricultural products, except for the sale of residues incidental.

This amendment is not relevant to the operations and business of the Company so that it does not cause changes to the Company's accounting policies and does not have an impact on the presentation or disclosure of the group's financial statements

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018: (lanjutan)

- PSAK 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"

Amandemen ini mengklarifikasi hal berikut:

- Bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya;
- Bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak;
- PSAK 46 (Amandemen 2016), "Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- Bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai;
- Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai nilai pemulihan tersebut.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") (continued)

a. The Amendments and Interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018: (continued)

- PSAK 46 (Amendment 2016), "Taxation; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses"

The amendments clarify the following:

- That the temporary difference may be deducted arising when the carrying amount of the debt instrument assets measured at fair value and fair value is less than the tax purpose, regardless of whether the debt instrument's holders expect to recover the carrying amount of the debt instruments by self or by use, for example by owning and receiving a contractual cash flow, or a combination of both.
- The taxable income will be available therefore the deductible temporary differences can be utilized, and the valuation of the deductible temporary differences shall be made in accordance with the tax regulation;
- PSAK 46 (Amendment 2016), "Taxation; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses"
- That tax deductions arising from the reversal of deferred tax assets are Exception from future estimated taxable income. Then the Entities compares the temporary differences that can be deducted by the estimated future taxable income that does not include the tax deductions resulting from the reversal of the deferred tax assets to assess whether the Entities has sufficient future taxable income;
- Estimated on the possibility of the future taxable income may include the recovery of some of the Entities's assets over than its carrying amount if there is sufficient evidence that prove the Entities can be achieve this recovery amounts.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

a. Standar dan Amandemen Standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018: (lanjutan)

- PSAK 53 (Amandemen 2017), "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"

Amandemen ini mengatur klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas serta mensyaratkan adanya pengungkapan informasi tambahan yang diperlukan.

- PSAK 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"

Penyesuaian ini mengatur bahwa ketika kepentingan entitas dalam entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan ringkasan laporan keuangan untuk entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi.

b. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, relevan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK 62 (Amandemen), "Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan". dan

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") (continued)

a. The Amendments and Interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018: (continued)

- PSAK 53 (Amendment 2017), "Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions"

This amendment regulates the classification and measurement of stock-based payment transactions that are settled in cash and requires the disclosure of additional information needed.

- PSAK 67 (2017 Adjustment), "Disclosure of Interest in Other Entities"

This adjustment stipulates that when the interests of an Entities in a subsidiary, joint venture or associate are classified as controlled for sale in accordance with PSAK 58: Non-Current Assets Controlled for Sale and Discontinued Operations, the Entities is not required to disclose a summary of financial statements for subsidiaries, joint venture, or associate.

b. Standards and Amendments to Standards that have been issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, are relevant but are effective for financial years starting on or after January 1, 2020, with earlier application permitted, namely:

- PSAK 15 (Amendments), "Investments in Associates and Joint Ventures on Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures".
- PSAK 62 (Amendment), "Insurance Contracts: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts".
- PSAK 71, "Financial Instruments". And

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

b. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, relevan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu: (lanjutan)

- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK 73, "Sewa".

Penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 berdampak material dan signifikan pada laporan keuangan konsolidasian tahun ini. Lihat catatan 6, 26, dan catatan 34, angka 1), huruf b, tentang belum terbitnya SIP-SDA.

c. Standar yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia, relevan namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 69 (2015), "Agrikultur"

PSAK ini mengatur tentang definisi tanaman produktif, transformasi biologis, aktivitas agrikultur, pengakuan dan pengukuran aset biologis, serta keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.

Penerbitan standar baru ini tidak relevan dengan kegiatan usaha Grup, sehingga tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan Grup.

Dengan demikian, penerapan Standar, Amandemen dan Penyesuaian Standar, tidak menimbulkan dampak material dan signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun ini dan tahun sebelumnya.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK") (continued)

b. Standards and Amendments to Standards that have been issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, are relevant but are effective for financial years starting on or after January 1, 2020, with earlier application permitted, namely: (continued)

- PSAK 71 (Amendments), Financial Instruments concerning Features of Early Repayment with Negative Compensation".
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers".
- PSAK 73, "Leases".

The adoption of PSAK 71 and PSAK 72 has material and significant impact on the consolidated financial statements for this year. See notes 6, 26, and note 34, number 1), letter b, regarding the not yet published SIP-SDA.

c. The standards issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, are relevant but have only been effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted, namely:

- PSAK 69 (2015), "Agricultural"

This PSAK provides for the definition of productive crops, biological transformation, agricultural activities, recognition and measurement of biological assets, as well as gains and losses arising from the initial recognition of biological assets at fair value less costs to sell and from changes in fair value less the cost of selling biological assets.

The issuance of this new standard is irrelevant to the Group's business activities, so as not to have an impact on the presentation or disclosure of the Group's financial statements.

Accordingly, the application of Standards, Amendments and Standard Adjustments, does not have a material and significant impact in the consolidated financial statements for this year and the previous year.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

3.1. Penyusunan Laporan Keuangan

3.1.a Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS, sampai dengan yang berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019/2020.

3.1.b Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan", dan PSAK No.65, "Laporan Keuangan Konsolidasian" berikut amandemennya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

3.1. Basis of Preparation the Financial Statements

3.1.a The Statement of Compliance

These consolidated financial statements are prepared and presented using Financial Accounting Standards in Indonesia, including Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - Indonesian Institute of Accountants which have converged with IFRS, up to the applicable on or after January 1 2019/2020.

3.1.b Basic of Presentation and Preparation of the Financial Statements

The presentation of financial statements is prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 1 (Amendment 2015), "Presentation of Financial Statements", and PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements" and their amendments.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2019 for the year then ended.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating, investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.1. Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

**3.1.b Dasar Penyajian dan Penyusunan
Laporan Keuangan** (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

3.2. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan Umum (Perum).

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh sebagai mata uang fungsional, sekaligus sebagai mata uang pelaporan, kecuali apabila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Sesuai PSAK 10 (Penyesuaian 2014): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu, Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.1 Basis of Preparation the Financial Statements
(continued)

**3.1.b Basic of Presentation and Preparation of
the Financial Statements** (continued)

In preparing these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, estimates and assumptions that affect:

- *The reported value of assets and liabilities, and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements;*
- *Total revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of the event and the current action, the results may differ resulting in the amount originally estimated.

3.2. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Transactions included in the financial statements of the Group's are measured in the currency of the main economic environment in which the Entities operates ("functional currency"). The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency and presentation of the Company.

All financial figures in these financial statements are presented in full Rupiah as the functional currency as well as the reporting currency, unless otherwise stated.

Transactions and Balances

In accordance with PSAK 10 (2014 Improvement): Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, at initial recognition, foreign exchange transactions are recorded in the functional currency (i.e., Rupiah). The total foreign currency is calculated into the functional currency at the spot rate between the functional currency and the foreign currency on the transaction date.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.2. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

3.2. Foreign Currency Translation (continued)

Pada akhir setiap periode pelaporan:

At the end of each reporting period:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

- Foreign exchange monetary items are translated using the closing exchange rate;
- Pos nonmonetary measured in historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction;
- Pos nonmonetary measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date when fair value is measured.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

The closing exchange rate used at the reporting is the middle rate of Bank Indonesia as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
1 USD	14.105	13.901	1 USD

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan '**kurs pajak mingguan**' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) with respect to claims and liabilities in foreign currency payable in dollars, and recorded in accordance with the '**weekly tax rate**' prevailing at the date of issuance of tax invoice.

3.3. Dasar Konsolidasian

3.3. Basic of Consolidation

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.3. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan, yang relevan dalam menilai apakah hak suara atas *investee* tersebut mencukupi untuk memberinya kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa, investor memiliki atau tidak memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pengambilan keputusan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi pada entitas berbadan usaha "Perum" dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT atau Persero).

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak tersebut dan tidak mengkonsolidasikan entitas anak ketika kehilangan pengendaliannya. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakui atau dilepas selama tahun berjalan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan jumlah laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.3. Basic of Consolidation (continued)

The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether the voting rights of the investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's voting rights ownership relative to the size and distribution of ownership of other voters; (ii) potential voting rights held by the Company, other voters or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances indicating that, the investor has or does not have the current ability to direct the relevant activities at the time the decisions need to be made, including the pattern of decision making in the Joint Discussion Meeting (so called "RPB") is the organ that holds the highest power in the incorporated Entities business "Perum" and the General Meeting of Shareholders (so called "RUPS") in a Limited Company (PT and Persero).

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest. Total comprehensive income are attributed to owners of the Company and the noncontrolling interest even if this results in the noncontrolling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.3. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Selisih antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diijinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran dan / atau PSAK 71: Instrumen Keuangan, atau ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.3. Basic of Consolidation (continued)

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transaction between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55: Financial Instruments - Recognition and Measurement and / or PSAK 71: Financial Instruments, or when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented in equity. The interests of a non-controlling shareholders may initially be measured at fair value or on the proportion of non-controlling interest in the identifiable net assets of the acquired party.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.3. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non-pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali, bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto entitas anak disajikan sebagai "kepentingan non-pengendali" pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian.

Hak non-pengendali atas laba (rugi) neto entitas anak pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian disajikan sebagai "Laba / Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali".

3.4. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.3. Basic of Consolidation (continued)

Measurement options are made at the time of acquisition on an acquisition basis. After the acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of non-controlling interest in initial recognition plus the proportion of non-controlling interest in subsequent changes in equity. The amount of comprehensive income is attributable to non-controlling interests, even if this results in a non-controlling interest having a deficit balance.

The portion of minority shareholders' ownership of the subsidiaries' net assets is presented as "non-controlling interests" in the Consolidated Statements of Financial Position.

The non-controlling interest in net income (loss) of the subsidiaries in the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income is presented as "Income or Loss for the Period Attributable to Non-Controlling Interests".

3.4. Business Combinations

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.4. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

3.5. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak berelasi, bahwa pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya ("entitas pelapor"):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
 - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
 - 3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.4. Business Combinations (continued)

If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period in which the merging entities were placed under common control.

3.5. Transactions with Related Parties

Transactions with related parties, defined in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 (Improvement 2010), regarding the related party disclosures, that related parties are persons or entities related to the Entities preparing their financial statements ("reporting Entities"):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting Entities if that person:*
 - 1) *Has control or joint control over the reporting Entities,*
 - 2) *Has significant influence over the reporting Entities; or*
 - 3) *Is a member of the key management personnel of the reporting Entities or of a parent of the reporting Entities*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.5. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
 - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir - a.
 - 7) Orang yang diidentifikasi dalam butir - a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - 8) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.5. Transactions with Related Parties (continued)

- b. An Entities is related to the reporting Entities if any of the following conditions applies:
- 1) The Entities, and the reporting Entities are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - 2) One Entities is an associate or joint venture of the other Entities (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other Entities is a member).
 - 3) Both entities are joint venture of the same third party.
 - 4) One Entities is a joint venture of a third Entities and the other Entities is an associate of the third Entities.
 - 5) The Entities is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Entities, or an Entities related to the reporting Entities. If the reporting Entities is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting Entities.
 - 6) The Entities is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - 7) A person identified in (a) (i) has significant influence over the Entities or is a member of the key management personnel of the Entities (or a parent of the Entities)
 - 8) The Entities, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting Entities or to the parent of the reporting Entities.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 3.

3.6. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas, antara lain:

- a. Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan
- b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk bank garansi tidak diklasifikasikan sebagai dari "Kas dan Setara Kas". Kas dan deposito berjangka ini disajikan sebagai bagian dari "Aset Keuangan Lancar Lainnya" atau "Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya".

3.7. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan operasi dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.6. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, in bank accounts and instruments that can be classified as cash equivalents include:

- a. Time deposits with original maturities of three (3) months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and
- b. Market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

Time deposits used as collateral for bank guarantees are not classified as of "Cash and Cash Equivalents". Cash and time deposits is presented as part of "Other Current Financial Assets" or "Other Non-current Financial Assets".

3.7. Investments in Associates and Joint Ventures

An associate is an Entities over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. A joint venture is arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these financial statements using the equity method of accounting, except when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with PSAK 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.7. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Grup dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Grup telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investee menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

Persyaratan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama Grup, hal ini berlaku juga dengan BUMN, entitas anak. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.7. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture), the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of the acquisition over the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture, this implementation in BUMN, subsidiary Entities. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.7. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi atau ventura bersama. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.

Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi atau ventura bersama akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Grup mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.7. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities.

Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.7. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (lanjutan)

Ketika Grup mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup terus menggunakan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

3.8. Instrumen Keuangan

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.7. Investments in Associates and Joint Ventures (continued)

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a group Entities transacts with an associate or a joint venture of the Group, profit and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's financial statements only to the extent of interests in the associate or joint venture that are not related to the Group.

3.8. Financial Instruments

The Group's recognize financial assets or financial liabilities in the statement of financial position if, and only if, the Group's become a party to the terms of the instrument contract. Regular purchases or sales of financial instruments are recognized on the date of the transaction.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan Umum (Perum) dan Entitas Anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

The effective interest rate method is the method used to calculate the amortized cost of a financial asset or a financial liability and a method of allocating interest income or interest expense over the period during the relevant period, using an interest rate that correctly discounts the estimated future cash payments or receipts during the estimated life of financial instruments, or, if appropriate, a shorter period is used to obtain net carrying amounts of financial instruments.

When calculating the effective interest rate, the Company and Subsidiaries estimate cash flows taking into account all contractual terms of the financial instrument, without considering future credit losses, but including all commissions and other forms paid or received, which form an integral part of effective interest rate.

Amortized cost is the amount at which the financial assets or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) 3.

**SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8. Financial Instruments (continued)

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Company and its subsidiaries classifies its financial instruments in following categories: financial assets at FVPL, loans and receivables, held-to maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL and other financial liabilities.

Penentuan Nilai Wajar

Determination of Fair Value

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

The fair value of financial instruments traded on the active market at the date of the statements of financial position is based on the quoted market price or the quoted price of the seller / dealer (bid price for buy position and ask price for the selling position), regardless of transaction costs. If the current bid price and ask price are not available, then the last transaction price used to reflect current fair value evidence, as long as there is no significant change in the economy since the transaction.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have quoted prices, fair value is determined using valuation techniques.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Assessment techniques include present value techniques, comparison of similar instruments that have observable market prices, pricing models, and other valuation models.

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

In the event that fair value can not be determined reliably using valuation techniques, then investments in equity instruments that do not have quoted prices are stated at cost less after impairment.

Grup mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

The Group's classifies the measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy has the following levels:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

- Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

3.8.1 Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Namun, dengan penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan, maka dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut: (i) beban biaya diamortisasi, misalnya piutang dan pinjaman; (ii) nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVPL); nilai wajar penghasilan komprehensif lain (FVTOCI); dan biaya diamortisasi, misalnya sertifikat obligasi dan sertifikat Bank Indonesia (SBI); (iii) biaya diamortisasi; nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVPL); dan nilai wajar penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), misalnya surat berharga pasar modal; serta (iv) biaya diamortisasi; nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVPL); nilai wajar penghasilan komprehensif lain (FVTOCI); dan nilai wajar penghasilan komprehensif lain (tanpa FVTOCI), misalnya surat berharga pasar modal dan investasi dalam saham. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

- Quoted prices in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices which include in Level 1, and are either directly or indirectly observable for assets or liabilities (Level 2); and
- Inputs for assets and liabilities which are not derived from observable data (Level 3).

3.8.1 Financial Assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified into 4 (four) categories, namely (i) financial assets are measured at fair value through profit and loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity investments, and (iv) available for sale financial assets. With the enactment of PSAK 71: Financial Instruments, they are grouped into 4 (four) categories, namely (i) amortized costs, for example accounts receivable and loans; (ii) fair value through profit or loss (FVPL); fair value of other comprehensive income (FVTOCI); and amortized costs, for example bond certificates and Bank Indonesia certificates (SBI); (iii) amortized costs; fair value through the income statement (FVPL); and the fair value of other comprehensive income (FVTOCI), for example, capital market securities; and (iv) amortized cost; fair value through the income statement (FVPL); fair value of other comprehensive income (FVTOCI) and fair value of other comprehensive income (without FVTOCI), for example, capital market securities and investments in stocks. This classification depends on the company's purpose of financial assets' acquisition. Management recognized financial assets' classification at initial acquisition. The Company determines the classification of financial assets at initial recognition and, when allowed and appropriate, re-evaluate the classification of these assets at the end of each financial period.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.1 Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Kecuali piutang, untuk opsi Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan **2 (dua) dasar**, yaitu:

- a) Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan; dan
- b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup memiliki aset keuangan dalam kategori beban biaya diamortisasi, berupa piutang usaha dan aset keuangan lancar lainnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan aset keuangan dalam kategori ini diukur diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*).

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

1) Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*), jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi :

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.1 Financial Assets (continued)

Initial recognition (continued)

With the exception of receivables, for the Financial Asset Measured at Fair Value through Profit or Loss option, the company classifies financial assets so that after initial recognition the financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss, using 2 (two) basic, namely:

- a) The Entities's business model for managing financial assets; and
- b) The characteristics of the contractual cash flows of a financial asset.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has financial assets under the amortized expense category, in the form of accounts receivables and other current financial assets. Therefore, the accounting policies relating to financial assets in this category are measured at amortized cost.

Measurement after Initial Recognition

Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification as follows:

1) Amortized Cost

Financial assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:

- (a) Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of a financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.1 Aset Keuangan (lanjutan)

**2) Nilai Wajar melalui Penghasilan
Komprehensif Lain**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income / FVOCI*), jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi :

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; serta
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

3) Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan awal yang tak terbatalan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset dan liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset dan liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.1 Financial Assets (continued)

**2) Fair Value through Other
Comprehensive Income (FVOCI)**

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI), if the following two conditions are met:

- (a) Financial assets are managed in a business model whose objectives will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and*
- (b) The contractual terms of a financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

**3) Fair Value through Profit or Loss
(FVPL)**

On initial recognition, an Entities may make an initial determination that is not irrevocable for measuring a financial asset at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies (known as an "accounting mismatch") that could arise from measuring the asset and liabilities or the recognition of gains and losses on assets and liabilities on different bases.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.1 Aset Keuangan (lanjutan)

3.8.1 Financial Assets (continued)

3) Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

3) Fair Value through Profit or Loss (FVPL) (continued)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) pada angka 1) sebelumnya atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income / FVOCI*) pada angka 2) sebelumnya. Namun, entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatal pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrument ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless the financial assets are measured at amortized cost in number 1) or fair value through other comprehensive income (FVOCI) in point 2) previous. However, an Entities may make an irrevocable choice at the initial recognition of an investment in certain equity instruments which is generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are reflected in other comprehensive income.

Untuk tujuan penerapan angka 1) butir (b) dan angka 2) butir (b) sebagaimana tersebut, maka:

For the purpose of applying number 1) point (b) and number 2) point (b) as mentioned, then:

(i) **Jumlah pokok** adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal. Selanjutnya, jumlah pokok dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pelunasan jumlah pokok).

(i) **The principal amount** is the fair value of the financial asset at initial recognition. Furthermore, the principal amount may change over the life of the financial asset (for example, if the principal amount is paid off).

(ii) **Bunga** terdiri dari imbalan untuk :

(ii) **Interest** consists of rewards for:

- Nilai waktu atas uang;
- Risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu;
- Risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

- Time value for money;
- Credit risk related to the principal amount owed in a certain period of time;
- Standard borrowing risks and costs, as well as profit margins.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.1 Aset Keuangan (lanjutan)

**3) Nilai Wajar melalui Laba Rugi
 (lanjutan)**

- (ii) **Bunga** terdiri dari imbalan untuk :
 (lanjutan)

Nilai waktu atas uang adalah unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu, dalam hal ini entitas mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode ketika suku bunga ditetapkan. Elemen waktu atas uang dapat dimodifikasi (yaitu tidak sempurna), bilamana suku bunga aset keuangan ditetapkan ulang secara berkala, tetapi frekuensi penetapan ulang tidak cocok dengan tenor suku bunga (misalnya suku bunga ditetapkan ulang setiap bulan dengan suku bunga satu tahun) atau jika suku bunga aset keuangan ini ditetapkan ulang secara berkala dengan rata-rata suku bunga jangka pendek dan jangka panjang tertentu. Dalam hal ini entitas dapat melakukan penilaian kualitatif dari elemen nilai waktu atas uang, sedangkan dalam situasi lain mungkin perlu untuk melakukan penilaian kuantitatif.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Metode suku bunga efektif (*effective interest rate / EIR*) adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)**

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.1 Financial Assets (continued)

**3) Fair Value through Profit of Loss
 (FVPL) (continued)**

- (ii) **Interest** consists of rewards for:
 (continued)

The time value of money is the element of interest that rewards the passage of time, in which case the Entities considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated and the period when the interest rate is fixed. The time element of money can be modified (i.e. imperfect), if the interest rate for the financial asset is reset periodically, but the frequency of the reset does not match the tenor of the interest rate (e.g. the interest rate is reset every month with one year interest rate) or if the interest rate is fixed. These financial assets are reset periodically with certain average short-term and long-term interest rates. In this case the Entities may make a qualitative assessment of the time value element for money, whereas in other situations it may be necessary to make a quantitative assessment.

Impairment of Financial Assets

The effective interest rate (EIR) method is a method used to calculate the amortized cost of a financial instrument and a method of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the interest rate that precisely discounts the estimated future cash receipts over the estimated life of the financial instrument.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.1 Aset Keuangan (lanjutan)

**Penurunan Nilai dari Aset Keuangan
(lanjutan)**

Untuk menerapkan suku bunga efektif pada saat menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang (CKPN) secara individual, maka perusahaan mengamortisasi setiap imbalan (*fee*), komisi yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto lain yang termasuk dalam perhitungan suku bunga efektif selama perkiraan umur instrumen keuangan tersebut.

Reklasifikasi dilakukan jika dan hanya jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan, sehingga mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh dengan 3 (tiga) klasifikasi aset keuangan tersebut diatas sesuai PSAK 71.

Dalam hal ini tidak ada perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan pada Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya, sehingga **tidak direklasifikasi** dan penyajian kembali (*restated*) seluruh aset keuangan yang terpengaruh dengan 3 (tiga) klasifikasi aset keuangan tersebut diatas sesuai PSAK 71.

3.8.2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Namun, sesuai **PSAK 71: Instrumen Keuangan**, bahwa liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*), kecuali:

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.1 Financial Assets (continued)

**Impairment of Financial Assets
(continued)**

To apply the effective interest rate when calculating the allowance for impairment losses on receivables (called "CKPN") individually, the company amortizes any fees, commissions paid or received, transaction costs, and other premiums or discounts included in the calculation of the effective interest rate during the estimated life of the financial instrument.

Reclassification is made if and only if the Entities changes its business model for the management of financial assets, thus reclassifying all affected financial assets with the 3 (three) classifications of financial assets mentioned above in accordance with PSAK 71.

In this case, **there is no change in the business model** for the management of financial assets at Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries, so it is not to reclassify and restated all affected financial assets with the 3 (three) classifications of financial assets mentioned above in accordance with PSAK 71.

3.8.2. Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 can be categorized as financial liabilities measured at fair value through profit or loss, loans and payables, or derivatives designated as hedging instruments in effective hedges, where appropriate. However, according to **PSAK 71: Financial Instruments**, financial liabilities are measured at amortized cost, except:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- 1) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL). Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas.
- 2) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- 3) kontrak jaminan keuangan.
- 4) komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.
- 5) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 : Kombinasi Bisnis diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan, atau kedaluarsa.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dengan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:

- 1) Liabilitas kontraktual:
 - (a) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, seperti utang usaha dan pinjaman yang diterima; atau
 - (b) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut, seperti opsi tertulis;

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.2. Financial Liabilities (continued)

- 1) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL). These liabilities include derivatives which are liabilities.
- 2) financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition is transferred or when the continuing involvement approach is applied.
- 3) financial guarantee contract.
- 4) commitment to providing loans at below market interest rates.
- 5) contingent rewards recognized by the acquirer in the business combination when PSAK 22: Business Combinations is applied. Contingent consideration is subsequently measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss.

Financial liabilities are derecognized if, and only when, they expire, that is, when the obligations specified in the contract are discharged or canceled, or expire.

The difference between the carrying amount of financial liabilities that have been expired or transferred to another party, and the consideration paid, including non-cash assets transferred or liabilities incurred, is recognized in profit or loss.

Financial liabilities are any liabilities in the form of:

- 1) Contractual Liabilities:
 - (a) to transfer cash or other financial assets to another Entities, such as trade payables and loans received; or
 - (b) to exchange a financial asset or financial liability with another Entities on conditions that are potentially unfavorable to that Entities, such as written options;

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa: (lanjutan)

2) Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:

- (a) Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
- (b) Derivatif yang akan diselesaikan selain hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

Tidak ada **reklasifikasi** dan Restated dalam laporan keuangan konsolidasian ini atas saldo liabilitas keuangan sesuai PSAK 71 tersebut diatas.

3.8.3. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

3.8.4. Penentuan Nilai Wajar

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.2. Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities are any liabilities in the form of: (continued)

2) A contract that will or may be settled using equity instruments issued by the Entities and constituting a:

- (a) Non-derivatives to which the Entities is or may be required to deliver a varying number of the Entities's own equity instruments.
- (b) Derivatives to be settled other than simply exchanging a specified amount of cash or other financial assets for a specified number of equity instruments issued by the Entities.

There is **no reclassification** and Restated in these consolidated financial statements of financial liability balances in accordance with PSAK 71 mentioned above.

3.8.3. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position (balance sheets) if, and only if, currently, has the legal entitlement to indemnify the recognized amount and there is an intention to settle the net, or to realize assets and settle their obligations simultaneously.

3.8.4. Determination of Fair Value

In the event that fair value can not be determined reliably using valuation techniques, then investments in equity instruments that do not have quoted prices are stated at cost less after impairment.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.4. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Penyesuaian Risiko Kredit (lanjutan)

Perusahaan Umum (Perum) menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan.

Dalam menentukan nilai wajar posisi kewajiban keuangan, risiko kredit perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

3.8.5. Penurunan Nilai

Sesuai PSAK 71, merupakan penurunan kemampuan suatu aset dalam menghasilkan manfaat ekonomi dari yang diharapkan sebelumnya. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*).

Jika pada **setiap tanggal pelaporan**, risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah **kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.4. Determination of Fair Value (continued)

Credit Risk Adjustment (continued)

Company make a price adjustment in a market that is more profitable to reflect the counterparty credit risk differences between instruments traded in those markets with instruments that assessed for the position of financial assets.

In determining the fair value of financial liability positions, the company's credit risk associated with the instrument must be taken into account.

3.8.5. Impairment Value

In accordance with PSAK 71, it is a decrease in the ability of an asset to generate economic benefits than previously expected. At each reporting date, an Entities measures the allowance for losses on financial instruments at the amount of expected credit losses over its lifetime, if the credit risk for that financial instrument has increased significantly since initial recognition, whether assessed individually or collectively taking into account all reasonable and supportable information, including information, which is forward looking.

If at each reporting date, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Entities shall measure the allowance for losses for the financial instrument at the amount of an expected 12 months credit loss.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.5. Penurunan Nilai (lanjutan)

Jika **pada periode sebelumnya**, mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan keuangan periode ini ditentukan bahwa, persyaratan peningkatan risiko kredit tidak signifikan, maka entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah **kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**.

Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya, sesuai karakteristik usahanya menerapkan **praduga (rebuttable presumption)**, atas penyisihan kerugian aset keuangan (CKPN) sebesar 100% yang dilakukan **untuk pembayaran kontraktual yang telah menunggak untuk periode lebih dari 90 hari tunggakan**. Penerapan pertama kali atas penurunan nilai sesuai PSAK 71 ini secara retrospektif.

Aset keuangan yang diukur dengan (i) biaya perolehan diamortisasi dan (ii) pada nilai melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak, atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai tercatat atau biaya perolehan diamortisasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat dipulihkan / diperoleh kembali. Evaluasi atas apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal laporan keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.5. Impairment Value (continued)

If in the previous period, measuring the allowance for losses on financial assets at the amount of expected credit losses over its lifetime, but at the financial reporting date of the current period it is determined that, the requirements for increasing credit risk are not significant, the Entities measures the allowance for losses for financial instruments at the amount of an expected credit loss of 12 months.

Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries, according to their business characteristics, apply a rebuttable presumption of 100% allowance for financial asset losses (CKPN) made for contractual payments that are in arrears for a period of more than 90 days in arrears. Retrospective application of impairment in accordance with PSAK 71.

Financial assets measured at (i) amortized cost and (ii) at value through other comprehensive income, lease receivables, contract assets, or loan commitments and financial guarantee contracts that impose impairment requirements.

A financial asset or group of financial assets is impaired if the carrying value or amortized cost is higher than its recoverable / recoverable value. An evaluation of whether there is objective evidence of impairment must be carried out at each financial statement date.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.5. Penurunan Nilai (lanjutan)

Bila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai, sebesar selisih nilai tercatat dan nilai yang dapat dipulihkan / diperoleh kembali. Nilai yang dapat dipulihkan / diperoleh kembali aset keuangan diukur dari nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan **suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut, kecuali:**

- (a) Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, sehingga suku bunga efektif disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.
- (b) Aset keuangan yang tidak dibeli atau tidak berasal dari aset keuangan memburuk, tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk, maka suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit sesuai PSAK 71, termasuk data dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- 1) **Kesulitan keuangan signifikan** yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- 2) **Pelanggaran kontrak**, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan (pembayaran pokok atau bunga);
- 3) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau kontraktual (hukum) sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, **memberikan konsesi (keringanan) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;**

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.5. Impairment Value (continued)

*If there is objective evidence of impairment, it is necessary to estimate the recoverable value and recognize the impairment loss, equal to the difference between the carrying value and the recoverable / recoverable value. The recoverable / recoverable amount of a financial asset is measured at the present value of estimated future cash flows, discounted **at the financial asset's original effective interest rate**, except:*

- (a) *Financial assets purchased or derived from financial assets are deteriorating, so that the effective interest rate is adjusted according to credit risk for the amortized cost of the financial assets since initial recognition.*
- (b) *Financial assets that are not purchased or are not derived from a deteriorating financial asset, but subsequently become a deteriorating financial asset, hence the effective interest rate on the amortized cost of the financial asset in the next reporting period.*

That financial assets are impaired in credit value in accordance with PSAK 71, including observable data regarding the following events:

- 1) **Significant financial difficulties** experienced by the issuer or borrower;
- 2) **Breach of contract**, such as an event of default or arrears (payment of principal or interest);
- 3) *The lender, for economic or contractual (legal) reasons in connection with the borrower's financial difficulties, gives concessions (relief) to **the borrower which would not have been possible if the borrower had not experienced such difficulties**;*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.5. Penurunan Nilai (lanjutan)

- 4) Terdapat kemungkinan bahwa, pihak peminjam akan **dinyatakan pailit** atau melakukan **reorganisasi keuangan lainnya**;
- 5) **Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan**; atau
- 6) **Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar** yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, tetapi dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

3.8.6. Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan yang Dimiliki untuk Diperdagangkan

Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, bilamana:

- 1) Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
- 2) Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan tersapat bukti pola actual terkini ambil untung jangka pendek; atau
- 3) Merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrument lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian penurunan nilainya (CKPN).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.5. Impairment Value (continued)

- 4) There is a possibility that, the borrower will enter **bankruptcy** or other financial reorganization;
- 5) **Loss of active market** for financial assets due to financial difficulties; or
- 6) **The purchase or issue of a financial asset at a deep discount** that reflects the credit loss incurred.

It is difficult to identify a single discrete event, but the combined effect of several events can cause a financial asset to be impaired on credit.

3.8.6. Financial Assets or Financial Liabilities Held for Trading

Financial assets or financial liabilities held for trading, when:

- 1) Obtained or owned primarily for the purpose of being sold or repurchased in the near future;
- 2) Initial recognition is part of a certain portfolio of financial instruments that is jointly managed and there is evidence of the current actual short-term profit taking pattern; or
- 3) Is a derivative (except for derivatives that are financial guarantee contracts or are designated and effective hedging instruments).

The gross carrying amount of financial assets is the amortized cost of financial assets, before adjusting for allowance for impairment losses (CKPN).

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.7. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya, pada saat:

- Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- Perusahaan Umum (Perum) tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- Perusahaan Umum (Perum) telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan Umum (Perum) telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan Umum (Perum).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.7. Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial Assets

Financial assets (or more accurately, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay to the third party for the received cash flows in full without material delay based on an agreement, or
- The Company has transferred its right to receive cash flows from the financial asset and (i) has transferred substantially all the risks and benefits of the financial asset, or (ii) substantially neither transferred nor retained all the risks and benefits of the financial asset but has transferred control of the financial assets.

When the Company (Perum Jasa Tirta II) has transferred the right to receive cash flows from a financial asset or has been a party to an agreement, and does not substantially transfer and does not own all the risks and benefits of the asset and still has control over the asset, sustainable with these financial assets. Continuous involvement in the form of guarantees of the transferred asset is measured based on the lowest amount between the value of the transferred asset and the maximum value of the received payment which may be repaid by the Company.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.8. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3.8.7. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substantial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

3.8.9. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.8. Financial Instruments (continued)

3.8.7. Derecognition of Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the liability is terminated or canceled or expired. When an existing financial liability is replaced by another financial liability of the same lender subject to substantially different terms, or substantially modified the terms of an existing liability, such exchange or modification is treated as a termination of initial liability recognition and the recognition of a new liability, and the difference between the carrying amount of each liability is recognized in the statement of income.

3.8.9. Classes of Financial Instruments

The group's classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Instrumen Keuangan/ Financial Instrument	Kategori/ Category	Golongan/ Class	Sub Golongan / Sub Class
Aset Keuangan/ Financial Assets	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang/Loans and Receivables	Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents.	
		Piutang usaha / accounts receivables.	
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/ Other Current Financial Assets	Piutang pegawai / Receivable from employees.
			Piutang Lain-lain/ Other receivables.
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities	Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi/ Financial Liabilities at Amortized Cost	Utang usaha / Trade payables.	
		Beban Akrua / Accrued Expenses	Beban pegawai dan Non-pegawai / Employee and non-employee expenses.
			Beban Pemeliharaan / Maintenance expenses.
			Beban Umum / General expenses.
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short-Term Liability	Beban akrual lainnya / other accrued liabilities.
			Liabilitas sewa jangka pendek dan jangka panjang / Short-term and long-term lease liabilities
			Pendapatan diterima muka / Prepaid income
		Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Long-term Liabilities	Saldo utang atau pinjaman yang diterima dan pinjaman oleh pemegang saham yang tidak dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal / The outstanding debt or loans received and shareholder loan that cannot be settled in the normal operating cycle.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.9. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Penurunan nilai persediaan akibat nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada tahun berjalan.

Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

3.10. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang / jasa / manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode tahun berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang (yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun) disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.9. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position (balance sheets) date.

Decline in the value of inventories due to net realizable value is lower than the cost of acquisition is recognized as a loss in the current year.

Defective/spoilage Inventories, there is no parent/main asset or economically can not be used are presented in the "other non-current assets".

3.10. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses represent expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method. At the end of the reporting period, prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or their equivalent which have not been recognized in the current year. Long-term prepaid expenses (those with a useful life of more than 1 year) are presented as "Other Non-current Assets" in the Statement of Financial Position (balance sheets).

Advances are an amount of cash out or costs incurred by the company for an activity or something that will be accounted for within a specified and predetermined time.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.11. Aset Tetap

Perusahaan dan entitas anak telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perusahaan Umum (Perum) yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima dimuka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode kerjasama operasi.

Aset dan aset KSO dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.11. Fixed Assets

The Company and its subsidiaries have chosen to use the cost model as the accounting policy for the measurement of their fixed assets.

Fixed assets, except land and landrights, are stated at acquisition cost less any accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost includes the cost of replacing part of the fixed asset when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. Further, when a significant inspection is performed, the cost of the inspection is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if it meets the recognition criteria. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

The initial of acquisition cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The joint operation assets are the Company's land used to conduct joint operation activities. The office buildings acquired as compensation in the joint operation and the related earnings in advanced are recognized when the assets are completed and ready for its intended use. Unearned income is recognized during the period of joint operation.

Assets and the joint operation (JO) assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.11. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Biaya kemudian setelah biaya perolehan pertama kali

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

Penyusutan

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Umur / Useful Life (Year)	Group of Assets
	Ekonomis / Economic (Tahun/Year)	
Bangunan	10-50	Building
Sarana	10-20	Facilities
Instalasi & Jaringan	2-20	Installation & Network
Suku Cadang Penyangga	4-10	Supporting Sparepart
Perabotan & Peralatan	4-5	Furniture & Equipment
Alat Angkut & Alat Besar	4-5	Vehicle & Heavy Equipment
Aset Tanaman Konservasi	40	Plant Conservation Assets

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.11. Fixed Assets (continued)

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or no future economic benefit is expected from its use or disposal. Fixed asset sold or disposed of, are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset. Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds, if any, and the carrying amount of fixed assets and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Costs then after the first acquisition costs

The cost of maintenance and repairs is charged as an expense as incurred. Expenditures which extend the useful life of an asset or provide further economic benefits by increasing the capacity or quality of production of the asset, are capitalized and depreciated based on the applicable depreciation rate.

Depreciation

Depreciation is commenced from the beginning or ready to use asset, using the straight-line method based on the estimated useful lives of the economies resulting in an annual percentage of depreciation of the following cost:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.11. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya Pinjaman

Pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut.

Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

Aset Tetap dalam Pelaksanaan (ATdP)

Aset tetap dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan **Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan**; dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan, yang dibuktikan dengan **Berita Acara Serah Terima Pertama**.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.11. Fixed Assets (continued)

Borrowing Costs

The borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount able to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset.

The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans, either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible, are capitalized until construction is completed.

Fixed Assets under Construction (FAuC)

*Fixed assets under construction are stated at acquisition cost based on the percentage of physical work completed in accordance with the **Minutes of Physical Construction in Progress** and presented as part of the fixed assets, which are stated at cost of acquisition price, costs directly attributable, the initial estimate of the cost dismantling and removing the item and restoring the site on fixed assets and the cost of loans used to finance assets during the construction period.*

*The accumulated acquisition cost will be transferred to the respective fixed assets upon completion and ready for use, as evidenced by the **First Handover Official Report**.*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.11. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tanaman Konservasi

Tanaman hidup yang digunakan dalam rangka konservasi; (ii) yang jangka waktu tanamannya lebih dari 1 (satu) periode; dan (iii) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Tanaman konservasi terdiri dari :

- **Tanaman Konservasi – Dewasa**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian tidak memerlukan lagi biaya untuk menunjang pertumbuhan yang bersangkutan. Dengan demikian, segala pengeluaran yang berkenaan dengan Tanaman Konservasi – Dewasa (jika ada) diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan tanaman.
- **Tanaman Konservasi - dalam Pertumbuhan**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian masih memerlukan pembiayaan dalam rangka pertumbuhan biologis sampai dengan tanaman tersebut menjadi dewasa. Biaya yang timbul meliputi biaya perolehan bibit, penyemaian, penanaman, pemupukan, biaya penjagaan / pengamanan, dan biaya pertumbuhan tanaman lainnya sampai dengan tanaman tersebut siap menjadi dewasa (*mature*).

Aset Tidak Produktif / Tidak Berfungsi

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi / usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan / pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif / tidak berfungsi dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.11. Fixed Assets (continued)

Plant Conservation Assets

Live plants used in the context of conservation; (ii) whose plant period is more than 1 (one) period; and (iii) have very rare possibilities to be sold as agricultural products, except for residual sales that are insidental.

Plant Conservation Assets consists of:

- **Conservation Plants - Mature**, that is conservation plants that technically do not require more agricultural costs to support the growth in question. Thus, all expenses relating to Conservation Plants - mature (if any) are classified as plant maintenance expenses.
- **Conservation Plants - in Growth**, namely conservation plants that are technically agricultural still need financing in the framework of biological growth until the plants become adults. Costs incurred include costs for obtaining seedlings, seeding, planting, fertilizing, safeguarding costs, and costs for the growth of other plants until they are ready to mature.

Non Productive / Non Function Assets

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal of assets not classified as productive / not functioning and are presented in groups of other non-current assets.

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non-productive assets created as the application of the accounting impairment.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.11. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tidak Produktif / Tidak Berfungsi (lanjutan)

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010, tentang Tata-cara Penghapusbukuan dan Pemindah-tanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Dewan Pengawas dan atau Pemegang Saham.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

Reviu atas Masa Manfaat Aset dan Nilai Sisa

Perusahaan Umum (Perum) menerapkan besaran nilai residu setiap jenis aset tetapnya yaitu Rp1.000.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direview minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Aset Kelola

Aset Kelola adalah aset berwujud milik negara yang digunakan dalam operasi Perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan, tetapi tidak dicatat sebagai harta Perusahaan sebagai Kebijakan pemerintah. Aset kelola terdiri dari sungai, waduk, bendungan, saluran induk, tanggul, jalan inspeksi, stasiun pompa air - Curug, tower Morning Glory dan mini-hydro PLTA.

3.12. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, sekurang-kurangnya sekali pada akhir tahun buku, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.11. Fixed Assets (continued)

Non Productive / Non Function Assets
 (continued)

The write-off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and alienation of Fixed Assets of State-Owned Company.

Unproductive fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders.

Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group income or other expenses.

Review of Assets Useful Life and Residual Value

The Company applies the residual value of each type of fixed asset at Rp1.000.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least each year end and the effect of any changes in accounting estimate for on a prospective basis.

Managed Assets

Managed assets represent all stated-owned tangible assets that used in company's operating, not intended for sale in company's normal activities, and recorded as company's assets in accordance with government policy. Managed assets are consist of rivers, reservoirs, dams, primary canal, levees, inspection road, Curug pumping station, Morning Glory tower and mini-hydro.

3.12. Impairment of Non-financial Assets

At the end of each reporting period, at least once at the end of the financial year, the Group reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that these assets have been impaired.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.12. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.12. Impairment of Non-financial Assets (continued)

If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.12. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill hanya diuji untuk menentukan adanya penurunan nilai pada setiap akhir tahun pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

3.13. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Sesuai PSAK 73: Sewa, **Aset Hak-Guna (AHG)** adalah aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama jangka waktu tertentu (masa sewa) untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Aset pendasar adalah aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset identifikasi tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa, sedangkan **masa sewa** adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana penyewa memiliki hak untuk menggunakan aset pendasar, bersamaan dengan:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.12. Impairment of Non-financial Assets (continued)

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is only tested for determination of impairment at the end of each reporting year and when there is an indication that the carrying amount has been impaired. The decrease in value for goodwill is determined by determining the carrying amount of each UPK (or UPK group) in which the goodwill is related. If the recovered amount of the UPK is less than the carrying amount, the impairment loss is recognized. Impairment losses on goodwill can not be reversed in the following year.

3.13. Use Rights Assets and Lease Liabilities

*In accordance with PSAK 73: Leases, **Right-to-Use Asset (AHG)** is an asset that represents the right of the lessee to use the underlying asset for a certain period (lease term) to be exchanged for a fee.*

The underlying asset is an asset that is bound to a lease, where the right to use the identified asset has been granted by the lessee to the lessee, while the lease term is the irrevocable period in which the lessee has the right to use the underlying asset, along with:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.13. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

- (a) Periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- (b) Periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Aset Identifikasian merupakan aset yang dapat diidentifikasi dengan disebutkan secara eksplisit dalam kontrak, atau dapat diidentifikasi dengan disebutkan secara implisit pada saat aset tersebut tersedia untuk digunakan oleh penyewa.

Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, jika kontrak tersebut memberikan **hak untuk mengendalikan (right to control)** penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan menurut kontrak, sehingga perusahaan menilai apakah, selama periode penggunaan, memiliki dua hal berikut:

- (a) Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian; dan
- (b) Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Sebaliknya, penyewa tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian **jika pesewa masih tetap memiliki hak substantif** untuk mensubstitusi aset selama periode penggunaan.

Liabilitas sewa atas AHG diakui ketika suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu kontrak. Selanjutnya, penyewa mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban baik dengan garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematis lainnya, yang lebih mempresentasikan pola manfaat penyewa.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.13. Use Rights Assets and Lease Liabilities
 (continued)

- (a) The period covered by the option to extend the lease if the lessee is certain to exercise the option; and
- (b) The period covered by the option to terminate the lease if the lessee is certain enough not to exercise the option.

An Identifying Asset is an asset that can be identified by being explicitly identified in the contract, or identifiable by being implicitly identified when the asset is available for use by the lessee.

A contract is or contains a lease, if the contract provides **the right to use control** of the identified asset for a period of time to be exchanged for a fee under the contract, so the company assesses whether, during the period of use, it has the following two things:

- (a) The right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the identified asset; and
- (b) The right to direct the use of the identifying asset.

Conversely, the lessee does not have the right to use the identifiable asset if the lessee retains substantive rights to substitute the asset during the period of use.

Lease liabilities for AHG are recognized when a contract is, or contains, a lease that gives the right to control over the use of the identified asset over the term of the contract. Furthermore, the lessee recognizes the lease payments related to the lease as an expense either on a straight-line basis over the lease term or on another systematic basis, which better represents the pattern of the lessee's benefits.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.13. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa **tidak mengakui** sebagai "Aset Hak Guna (AHG)" dan "Liabilitas Sewa", jika:

- (a) Sewa jangka pendek (s.d. 1 tahun); dan
- (b) Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah, seperti peralatan dan perlengkapan / furnitur kantor, komputer tablet (laptop), dan sejenisnya.

Pengakuan dan Pengukuran pada Tanggal Permulaan

Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui AHG dan liabilitas sewa. Selanjutnya, biaya perolehan AHG meliputi:

- (a) Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- (b) Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima;
- (c) Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa; dan
- (d) Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Penyusutan AHG

Penyewa menyusutkan AHG dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat AHG atau akhir masa sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan AHG merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa mendepresiasi AHG dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.13. Use Rights Assets and Lease Liabilities
(continued)

The company, as a lessee, does not recognize as "Use Rights Assets (AHG)" and "Lease Liabilities", if:

- (a) Short term lease (up to 1 year); and
- (b) Leases where basic assets are low value, such as office equipment and furniture, tablet computers (laptops), and the like.

Recognition and Measurement on Commencement Date

At the commencement date, the lessee recognizes AHG and a lease liability. Furthermore, AHG costs include:

- (a) The amount of initial measurement of the lease liability;
- (b) Rental payments made on or before the commencement date, less rental incentives received;
- (c) Initial direct costs incurred by the lessee; and
- (d) The estimated costs that will be incurred by the lessee in dismantling and transferring the underlying asset, restoring the place where the asset is located or restoring the underlying asset to the conditions required by the terms and conditions of the lease, unless these costs are incurred to produce inventory.

Depreciation of AHG

The lessee depreciates AHG from the commencement date to the earlier date between the end of AHG's useful life or the end of the lease term.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee at the end of the lease term or if the acquisition cost of AHG means that the lessee will exercise the call option, the lessee depreciates AHG from the start date to the end of the useful life of the underlying asset.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.13. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Penurunan Nilai AHG

Penyewa juga mengevaluasi, apakah AHG telah mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi? Evaluasi ini secara umum dilakukan secara periodik (bulanan); dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu setahun sejak tanggal perolehan ketika masa sewa melebihi 1 (satu) tahun.

Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa pada tanggal permulaan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:

- (a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- (b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- (c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian

3.14. Aset Tak Berwujud, jika ada

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.13. Use Rights Assets and Lease Liabilities
 (continued)

Impairment Value of AHG

The lessee also evaluates, whether AHG has experienced an impairment loss and recorded an identified impairment loss? This evaluation is generally carried out periodically (monthly); and implemented at least once a year from the date of acquisition when the lease period exceeds 1 (one) year.

Lease Liabilities

Lease liabilities at inception date are measured at the present value of any lease payments that have not been paid at that date. Lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease, if the interest rate cannot be determined, the lessee uses the lessee's incremental borrowing rate.

After the commencement date, the lessee measures the lease obligations by:

- (a) Increase the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
- (b) Subtract the carrying amount to reflect rent paid; and
- (c) Remeasuring the carrying amount to reflect a revaluation or modification of a lease or to reflect a substantially revised fixed lease payment

3.14. Intangible Assets, if any

Extensions or permits for land rights as intangible assets. This expense is amortized over, whichever is shorter between the legal age and the economic life of the land. If the burden of management is extended or renewal of land rights is not material, then it is charged to the current period.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.14. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud.

Umur manfaat aset tak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset tak berwujud tersebut.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas.

Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud selama 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.14. Intangible Assets (continued)

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash generating unit level.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Software is amortized using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets of 7 (seven) up to 10 (ten) years.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.14. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi/ perintisan usaha.

3.15. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

3.16. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, bahwa kontrak dengan pelanggan diakui sebagai pendapatan hanya jika seluruh kriteria berikut ini dipenuhi:

- 1) Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- 2) Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
- 3) Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- 4) Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- 5) Kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.14. Intangible Assets (continued)

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected, either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be deferred, including losses arising from the initial operation and cost of preoperative / pioneering effort.

3.15. Received in Advance

Received in advance are money received from other parties in connection with the services of products that will be performed by entities in the future, but the services are not delivered to that party.

3.16. Revenue and Expense Recognition

In accordance with PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, contracts with customers are recognized as revenue only if all of the following criteria are met:

- 1) The parties to the contract have agreed to the contract (in writing, orally or in accordance with general business practice) and are committed to carrying out their respective obligations;*
- 2) The Entities can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred;*
- 3) The Entities can identify the terms of payment for the goods or services to be transferred;*
- 4) The contract has commercial substance (that is, the risk, timing or amount of the Entities's expected future cash flows to change as a result of the contract); and*
- 5) It is probable that the Entities will collect the consideration that it will be entitled to in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer. In evaluating whether collectability of the amount of consideration is likely to occur, the Entities considers only the ability and intention of the customer to pay the amount of consideration when due.*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.16. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan kenaikan aset dan penurunan liabilitas (misalnya kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang / jasa atau penurunan liabilitas yang timbul dari pembebasan utang).

Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.

Dengan terpenuhi **lima kriteria seluruhnya** tersebut diatas, Perusahaan mengakui pendapatan sebagai berikut:

- 1) **Pendapatan listrik** diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan yang menghasilkan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.
- 2) **Pendapatan Air** diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan atau tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.
- 3) **Pendapatan Pariwisata** diakui pada saat jasa tersebut diberikan atau dimanfaatkan oleh pengunjung pariwisata, setelah dikurangi kewajiban pajak dan *service* pelayanan.
- 4) **Pendapatan lainnya**, diakui berdasarkan :
 - (a) Pada saat timbulnya hak atas sewa / diterbitkan tagihan dan sebesar kas diterima sesuai masa sewa periode akuntansi, tidak termasuk pajak.
 - (b) Pada saat diterbitkan tagihan sebesar yang menjadi hak periode yang bersangkutan untuk pendapatan AMDK, jasa giro dan bunga deposito.
 - (c) Pada saat jatuh tempo pendapatan dikaitkan dengan waktu secara periodik sebesar yang menjadi hak periode yang bersangkutan.
 - (d) Pada saat diterima kas sebesar yang menjadi hak periode bersangkutan, tidak termasuk PPN untuk jasa keramba jaring apung.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.16. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue recognition occurs simultaneously with an increase in assets and a decrease in liabilities (for example, a net increase in assets arising from a sale of goods / services or a decrease in a liability arising from a debt relief).

The amount of consideration that the Entities would be entitled to may be less than the price recorded in the contract if the consideration was variable because the Entities could offer a price concession to the customer.

By fulfilling **all five criteria** above, the Company recognizes revenue as follows:

- 1) **Electricity revenue** is recognized when the electricity was made Minutes of Monthly Usage multiplied by a predetermined rate which resulted in the number of bills to be paid by the customer.
- 2) **Water revenue** is recognized when Minutes of Monthly Usage are made multiplied by a predetermined rates or charges to be paid by the customer.
- 3) **Tourism revenue** is recognized when the services are provided or utilized by tourism visitors, net of tax liabilities and service services.
- 4) **Other revenue** is recognized based on :
 - (a) At the time of the emergence of the right to lease / issued bills and received cash for the lease period of the accounting period, excluding tax.
 - (b) At the time of issuing a bill for which the rights of the period for income bottled water, current accounts and deposit.
 - (c) At maturity of revenue associated with periodic time at which the rights of the period.
 - (d) Upon receipt of the amount of cash that is rightfully concerned period, not including VAT for floating fish cages.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.16. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi dengan diskon yang diperbolehkan oleh perusahaan. Imbalan ini biasanya berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah sebesar kas atau setara kas yang diterima.

Beban

Semua pengeluaran untuk memperoleh barang atau jasa yang dipakai habis dalam operasi Perusahaan selama periode pembukuan, diakui sebagai beban pada tahun buku yang bersangkutan.

Rugi Penurunan Nilai dalam Laba-rugi

Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset kontrak yang diakui melebihi:

- 1) Jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset; dikurangi dengan,
- 2) Biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban.

Entitas mengakui dalam laba-rugi terhadap pembalikan (*reverse*) beberapa atau seluruh rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui ketika kondisi penurunan nilai tidak ada lagi atau telah membaik.

3.17. Aset Kontrak dan Liabilitas Kontrak

Aset Kontrak disajikan dalam laporan posisi keuangan (*neraca*), bilamana entitas melaksanakan dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo. Aset kontrak adalah hak imbalan entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.16. Revenue and Expense Recognition (continued)

Income Measurement

Income is measured by the fair value of the consideration received or acceptable less any discount allowed by the company. These rewards are usually in the form of cash or cash equivalents and the amount of revenue is the amount of cash or cash equivalents received.

Expenses

All expenditures for obtaining goods or services that consume during Company's operating period are recognized as expenses in the current period.

Impairment Loss in Profit and Loss

Impairment loss is recognized in profit or loss if the carrying amount of the recognized contract assets exceeds:

- 1) The remaining amount of the consideration that the Entities expects to receive in exchange for goods or services related to assets; reduced by,
- 2) Costs that are directly related to the provision of goods or services and which have not been recognized as an expense.

An Entities recognizes in profit or loss on reversal some or all of the previously recognized impairment losses when the impairment loss no longer exists or has improved.

3.17. Contracted Assets and Contract Liabilities

Contract assets are presented in the statement of financial position (*balance sheets*), when the Entities performs by transferring goods or services to customers before the customer pays compensation or before payment is due. Contracted assets are the Entities's right to benefit in exchange for goods or services transferred to customers.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.17. Aset Kontrak dan Liabilitas Kontrak (lanjutan)

Amortisasi aset kontrak dilakukan secara sistematis dan konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Entitas memutakhirkan amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan dalam waktu yang diperkirakan entitas atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan yang berkaitan dengan aset.

Liabilitas Kontrak disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca), bilamana menerima imbalan dari pelanggan sebelum mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dimana entitas telah menerima imbalan dari pelanggan tersebut.

Ketika (atau selama) **kewajiban pelaksanaan dipenuhi**, maka pendapatan diakui atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan atau mendebet liabilitas kontrak, sedangkan **harga transaksi** adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak lain (misalnya, tagihan pajak). Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya.

3.18. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja - Jangka Pendek

Imbalan kerja - jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.17. Contracted Assets and Contract Liabilities
(continued)

Amortization of contracted assets is carried out systematically and consistently with transfers to customers of goods or services related to assets. An Entities updates amortization to reflect a significant change in the time expected by the Entities for the transfer of goods or services to customers related to the asset.

Contract liabilities are presented in the statement of financial position (balance sheet), when receiving compensation from customers before transferring goods or services to customers. A contractual liability is an Entities's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Entities has received a fee from that customer.

When (or while) the performance obligations are fulfilled, revenue is recognized for the amount of the transaction price allocated to the performance obligation or debiting the contract liability, while the transaction price is the amount of consideration that is expected to be the Entities's right in exchange for transferring the promised goods or services to the customer, not includes amounts billed on behalf of others (for example, tax claims). The rewards promised in contracts with customers can include a fixed amount, a variable amount, or both.

3.18. Employment Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are employee benefits payable in less than one year, including the following salaries, wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and as an expense in the statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.18. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja - Jangka Panjang (lanjutan)

Imbalan kerja - jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

3.18.1. Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit (PUC)* seperti yang diharuskan oleh PSAK 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja. Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuarial yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method*, dengan capaian usia normal.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.18. Employment Benefits (continued)

Long-Term Employment Benefits (continued)

Long-term employee benefits are employee benefits that will be paid / payable after workers retire. The obligation to pay these benefits are recognized at amounts discounted and maturing after one accounting period and are recognized as an expense in the statement of comprehensive income and liabilities.

Part of obligations maturing within one accounting period will be recorded as part of current liabilities and obligations that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

3.18.1. Pension

The Defined Benefit Pension Plan

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the *Projected Unit Credit (PUC)* method as required by PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". For funding purposes, the actuarial method used is *Projected Benefit Cost Method*, with attained normal age.

All remeasurement consists of actuarial gains and losses and proceeds from pension fund assets (excluding net interest) recognized directly through other comprehensive income with the aim that the net pension assets or liabilities are recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the deficit and surplus pension fund. Remeasurement does not reclassify earnings or losses in the following period.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.18. Imbalan Kerja (lanjutan)

3.18.1. Pensiun (lanjutan)

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Beban bunga dan pengambilan aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga – neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti – neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Perusahaan Umum (Perum) juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan/tabungan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan Umum (Perum).

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan Umum (Perum) sehubungan dengan imbalan kerja ini.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.18. Employment Benefits (continued)

3.18.1. Pension (continued)

The entire past service costs are recognized when the first between when the amendment / curtailment occurs or when the cost of restructuring or termination of employment are recognized. As a result, the past service cost not yet vested no longer be deferred and recognized over the vesting period of the future.

Interest expenses and making pension fund assets are expected as used in PSAK No. 24 the previous version was replaced by interest expense - net, which is calculated using the discount rate to measure the defined benefit obligation - net or asset at the beginning of each annual reporting period.

The Company also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company policies.

These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees. No funding has been made to this long-term benefits.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.18. Imbalan Kerja (lanjutan)

3.18.2. Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya Perum Jasa Tirta II memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Perusahaan Umum (Perum) dan disahkan oleh Rapat Pembahasan Bersama Perum Jasa Tirta Tahun 2019, dibukukan sebagai beban (*expense*) tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perusahaan Umum (Perum) memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari). untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut, Perusahaan Umum (Perum) memberikan tunjangan cuti tahunan.

Asuransi Jiwa dan Jamsostek

Perusahaan Umum (Perum) membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perusahaan Umum (Perum) bekerja sama dengan beberapa Perusahaan Umum (Perum) asuransi untuk mendukung program tersebut. Perusahaan Umum (Perum) juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di PT. Jamsostek.

3.19. Provisi

Provisi diakui bila Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak diharuskan menyelesaikan liabilitas serta jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.18. Employment Benefits (continued)

3.18.2. Employee Welfare

For the welfare of their employees Perum Jasa Tirta II has several welfare programs such as:

Bonus

Bonus is calculated by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (so called "RPB"), charged to the income statement of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave (for 12 days per annum) and long leave (for 30 days) for these leaves, the Company also provides leaves allowance.

Life Insurance and Jamsostek

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program, the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products The Company's employees are also entitled to the social security of employee in PT. Jamsostek.

3.19. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company and its subsidiaries will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
 (lanjutan)

3.19. Provisi (lanjutan)

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan Liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

3.20. Pajak Penghasilan

Beban (penghasilan) pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset, dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara *substantive* telah berlaku pada tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (continued)

3.19. Provisions (continued)

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

3.20. Income Taxes

Expenses (income) tax is the combined sum of current tax and deferred tax are taken into account in determining income in the period. The tax is recognized in the income statement, except when the tax related to the transactions or events directly recognized in equity and other comprehensive income.

Current Taxes

Current tax assets and liabilities are recognized, if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period, then the excess is recognized as an asset, and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.20. Income Taxes (continued)

Current Taxes (continued)

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

3.21. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar Keputusan/ Rapat Pembahasan Bersama direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian laba atau dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (*expense*) melainkan sebagai distribusi / pengurang saldo laba.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.20. Income Taxes (continued)

Deferred Taxes (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity, are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

3.21. Use of Retained Earnings Based on Joint Discussion Meetings ("RPB")

The use of retained earnings on the basis of Decisions / Minutes of Joint Discussion Meetings ("RPB") is realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to profit or dividends, employee costs and allowance for retained earnings to general reserves. Profit sharing is not treated as expense but rather as a distribution / deduction of retained earnings.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.21. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) (lanjutan)

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (PKBL - BUMN), pasal 8 ayat (1), bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
- b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

Lihat catatan 24.

3.22. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- b. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- c. Dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.21. Use of Retained Earnings Based on Joint Discussion Meetings ("RPB") continued)

As stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (called "BUMN") No. PER-03/MBU/12/2016, on the Amendment of the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015, concerning the Partnership Program and Community Development Program for State Owned Enterprises, article 8, point (1), that the Fund Partnership Program and Community Development Program sourced from:

- a. Allowance partially net profit of BUMN; and/or
- b. Budgets are calculated as cost in BUMN.

See note 24.

3.22. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies for preparing and presenting the financial statements.

An operating segment is a component of an Entities:

- a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;
- b. Whose operating results are regularly reviewed by the Entities's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;
- c. And for which discrete financial information is available.

For management purposes, the Group's are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance. Additional disclosures on each of the segments, including the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

3.23. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode tahun pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak, seperti yang diungkapkan dalam catatan 3 pada laporan keuangan, manajemen diminta untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi nilai tercatat aset dan liabilitas yang telah disajikan oleh sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode/tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian ini:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

3.23. Events After the Reporting Period

Events occurring after the current reporting year that provide information on the financial position of the Group's at the date of the statement of financial position so that adjustments, if any, are reflected in the financial statements. Events after the balance sheets date (end of year) statement date that does not require adjustment, if the amount of material, has been disclosed in the financial statements.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the implementation of the Company and its subsidiaries accounting policies, which are described in note 3 to the financial statements, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made by the management, which affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The preparation of the company and its subsidiaries's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods/years.

The following judgments are made by management in the process of applying the company and its subsidiaries's accounting policies that have the significant effects on the amounts recognized in these consolidated financial statements:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dan diperbarui dengan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak seperti diungkapkan pada catatan 3.9.9.

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The company and its subsidiaries determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 and updated with PSAK 71 fulfilled. Therefore, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the company and its subsidiaries's accounting policies disclosed in note 3.9.9.

b. Provision for Impairment of Financial Assets

Provision for impairment of loans and receivables is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Company and its subsidiaries assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset have impairment value (uncollectible).

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for doubtful accounts is provided on accounts specifically identified as impaired.

Loans and receivables written-off are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions will be taken. Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the period. Therefore, timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan
 (lanjutan)

Nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lainnya Grup tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020
Kas dan Setara Kas	518.162.003.406
Piutang Usaha	
Pihak Berelasi	172.949.083.333
Pihak Ketiga	53.264.822.395
Aset Keuangan Lancar Lainnya	
Investasi Jangka Pendek	2.388.317.788
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	102.125.227.342

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup memiliki akumulasi rugi fiskal dan mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut. Jika hasil pemeriksaan pajak mungkin berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diestimasi, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan dibawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada diluar kendali Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

b. Provision for Impairment of Financial Assets
 (continued)

The carrying amounts of the Group's cash and cash equivalents, trade receivables and other financial assets as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
597.052.214.312		Cash and Cash Equivalent
106.676.984.227		accounts receivables
46.892.769.722		Related Parties
		Third Parties
1.439.671.233		Others Current Financial Assets
		Short-Term Investments
79.970.190.130		Others Non Current
		Financial Assets

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group's has accumulated fiscal loss and recognized deferred tax asset on those fiscal loss. The final tax outcome of the tax audit is different from the amounts that were initially estimated, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The principal assumptions concerning the estimated future uncertainty and the principal sources of such estimates at the reporting date having significant risks that cause material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities in the following year / book period are disclosed below. The Group's base their assumptions and estimates on the parameters available when the financial statements are prepared. Existing conditions and assumptions about future developments may change due to changes in market situations that are beyond the control of the company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap, Aset Hak Guna (AHG), dan Aset Tak Berwujud

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum. Namun, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas.

Estimasi penurunan masa manfaat aset tetap, AHG dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta menurunkan nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat aset tetap, AHG dan aset tak berwujud selama tahun berjalan.

Estimasi masa manfaat aset tetap, AHG dan aset tak berwujud diungkapkan pada catatan 3.12, 3.14, dan 3.15

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require the measurement of financial assets and certain financial liabilities at their fair value, and this presentation requires the use of accounting estimates and considerations. A significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (such as exchange rate, interest rate), while the moment and amount of change in fair value may be different due to the use of different valuation methods.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment, Use Rights Assets, and Intangible Assets

The Group's estimate the economic useful lives of property, plant and equipment based on the utilization of the expected assets and supported by business plans and strategies and market behavior. Estimates from the useful lives of property, plant and equipment are based on the review of the Group's against industry practice, internal technical evaluation and experience for equivalent assets. The estimated useful lives are reviewed at least at the end of each reporting period and updated if expectations differ from previous estimates due to physical use or physical, technical or commercial obsolescence and legal harassment. However, it is possible that future results from operations may be materially affected by changes in estimates resulting from changes in the factors mentioned above.

Estimated decreases in the useful lives of fixed assets, use rights assets, and intangible assets will increase depreciation and amortization expenses, as well as decrease in the carrying amount of fixed assets and intangible assets.

There were no significant changes in the estimated useful lives of fixed assets, use rights assets, and intangible assets during the year.

Estimated useful lives of fixed assets, use rights assets, and intangible asset described in note 3.12, 3.14, and 3.15

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Penurunan Aset Hak Guna (AHG) dan Nilai Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset hak guna (AHG) dan aset tak berwujud selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Penentuan nilai pakai AHG dan ATB membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut (unit penghasil kas) serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat penurunan AHG dan ATB pada 31 Desember 2020 dan 2019. Nilai tercatat AHG dan ATB, dimana telah diuji penurunan nilai, disajikan dalam catatan 13 dan 14 atas laporan keuangan konsolidasian ini.

d. Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah kewajiban dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan diungkapkan dalam catatan 24 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Perusahaan Umum (Perum) dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi sepanjang masa kerja dan umumnya mempengaruhi beban yang diakui dan kewajiban yang dicatat pada periode mendatang. Walaupun Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan wajar dan dapat diandalkan, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material mempengaruhi jumlah liabilitas imbalan pasti pasca-kerja Grup. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas manfaat pascakerja masing-masing sebesar Rp150.036.722.158 dan Rp72.752.134.718. (Lihat catatan 20)

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

c. Impairment of Use Rights Assets and Intangible Assets

Use rights assets and intangible assets other than goodwill, are reviewed for impairment whenever impairment indicators are present. Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets (cash-generating unit) and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of the Group's operations.

Based on the assessment of management, no impairment on use rights assets and intangible assets in December 31, 2020 and 2019. The carrying values of those assets, on which impairment analysis are applied, were described in note 13 and 14 to the consolidated financial statements.

d. Post Employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts its liabilities and benefit. Those assumptions are described in note 24 and include, among others, discount rate and rate of salary increase.

Actual results that differ from the Group's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of the Group's long term employee benefits liability. As of December 31, 2020 and 2019, post-employment benefits liability amounted to Rp150.036.722.158 and Rp72.752.134.718 (See note 20)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

e. Pajak Penghasilan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi. Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam catatan 9.

f. Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 6.

g. Penurunan Nilai Aset Tetap

Penelaahan penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Penentuan nilai wajar aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan dan pelepasan aset tersebut. Setiap perubahan signifikan pada asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dapat memberikan dampak yang material terhadap penilaian nilai yang terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memberikan dampak terhadap hasil operasi.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp591.363.936.853 dan Rp536.378.028.545.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

e. Income Taxes

In certain circumstances, the Group's may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group's applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset. Income tax is disclosed in note 9.

f. Impairment of Loans and Account Receivables

The Group's assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in notes 6.

g. Impairment of Fixed Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp591.363.936.853 and Rp536.378.028.545.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Proses Perijinan

Pemanfaatan sumber daya air (SDA) oleh pelanggan harus memiliki Surat Ijin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk menggunakan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Undang-undang R.I. No. 17 tahun 2019, tentang Sumber Daya Air, pada pasal 10 dinyatakan, bahwa: Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) bertugas, yang salah satunya sebagaimana tersebut pada huruf-f, yaitu menyelenggarakan progres perijinan penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional. Penerbitan SIPSDA tersebut kepada para pelanggan harus mendapat rekomendasi dari Perum Jasa Tirta II bilamana memanfaatkan aliran sungai Citarum. Dengan belum dimilikinya SIPSDA oleh pelanggan dari Perum Jasa Tirta II, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat ditagihkan bilamana SIPSDA tersebut telah terbit.

Untuk melakukan penjualan listrik, maka Perum Jasa Tirta II seharusnya memiliki Surat Ijin Usaha Pengusahaan Tenaga Listrik (SIUPTL) sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No. 14 tahun 2012, tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan Penjualan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, tentunya dengan rekomendasi dari PT PLN (Persero); dan oleh karena itu salah satu sumber pendapatan perusahaan adalah jasa penjualan listrik, baik ke industri swasta dan PLN.

Bahwa salah satu pendapatan usaha Perum Jasa Tirta II adalah dari penyewaan lahan dimana atas kawasan / wilayah kerja Perum Jasa Tirta II yang disewakan kepada pihak lain, bahwa sebagian belum memiliki legalitas kepemilikan berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Meskipun demikian, beberapa lahan telah dimiliki perusahaan dengan adanya sertifikat HGB.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

f. Licensing Process

The use of water resources (SDA) by customers must have a Water Resources Usage Permit (SIPSDA) to use water resources in accordance with the provisions of the Indonesian Law. No. 17 of 2019, regarding Water Resources, Article 10 states, that: In regulating and managing Water Resources, the Central Government as referred to in article 9 paragraph (1) is in charge, one of which is as referred to in letter-f, namely carrying out progress licensing for the use of water resources in transnational river areas, inter-provincial river areas and nationally strategic river basins. The issuance of the SIPSDA to customers must obtain a recommendation from Perum Jasa Tirta II when utilizing the Citarum river flow. By not having SIPSDA by customers from Perum Jasa Tirta II, it has resulted in a loss of potential revenue that could have been billed if the SIPSDA had been published.

In order to sell electricity, Perum Jasa Tirta II should have an Electricity Concession Business License (SIUPTL) in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia. No. 14 of 2012, concerning the Business Activities of Electricity Supply Article 31 paragraph (3) which states that Sales as mentioned in paragraph (1) must obtain approval from the Minister, Governor or Regent / Mayor in accordance with their authority, of course with a recommendation from PT PLN (Persero) ; and therefore one of the company's revenue sources is electricity sales services, to both private industry and PLN.

Whereas one of Perum Jasa Tirta II's business revenues is from land leasing where the working area / area of Perum Jasa Tirta II is leased to other parties, that some of them do not have legal ownership in the form of Land Management Rights (HPL). However, some of the land has been owned by the company with the HGB certificate.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Proses Perijinan (lanjutan)

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.39/KPTS/1994, tanggal 8 Pebruari 1994, tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan / Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otoritas Jatiluhur, dimana Perum Jasa Tirta II dalam aktivitas usahanya sebagai pengelola barang di kawasan tersebut maka ditunjuk / ditetapkan sebagai Pengurus Barang atas penyerahan barang inventaris sesuai Daftar Barang Inventaris Kekayaan / Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan. Dalam surat keputusan tersebut bahwa status kepemilikan barang inventaris tersebut tetap berada pada Departemen Pekerjaan UMum c.q. Ditjen Pengairan.

Beberapa jenis barang yang masuk dalam Daftar Barang Inventaris Kekayaan / Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan sebagai berikut:

- Tanah persil bangunan gedung: 104.216,865 M2;
- Tanah persil bangunan bukan gedung: 16.342,481898 HA;
- Bangunan gedung tempat kerja:
- Bangunan gedung tempat tinggal: 39 BH.

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut maka, Perum Jasa Tirta II tidak dapat mencatatkan ke dalam buku / daftar aset tetap atau aset lainnya, mengingat hanya sebagai Pengurus Barang. Dilain pihak optimalisasi pemanfaatan aset di kawasan bendungan Jatiluhur, secara fisik tidak dapat dipisahkan dengan aset-aset tersebut diatas dimana Perum Jasa Tirta II sebagai Pengurus Barang, sekaligus memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

HPL bukan merupakan hak atas tanah, dan tidak diatur dalam UU Pokok Agraria, tetapi dalam:

- Peraturan Pemerintah R.I. No. 8 Tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara; dan
- Permen. Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; dan
- Ketentuan – Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

f. Licensing Process (continued)

In accordance with the Decree of the Minister of Public Works No.39 / KPTS / 1994, dated 8 February 1994, concerning the Determination of the Amount and Types of State Property / Property Inventory that are Managed by the Public Company (Perum) of the Jatiluhur Authority, where Perum Jasa Tirta II in its business activities as the goods manager in the area is then appointed / stipulated as the Goods Manager for the delivery of the inventory items in accordance with the State Property / Property Inventory List within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation. The decree states that the ownership status of the inventory items remains with the Department of Public Works c.q. Directorate General of Irrigation.

Several types of goods are included in the Inventory List of Wealth / State Owned Goods within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation as follows:

- *Building parcel land: 104,216,865 M2;*
- *Building parcel land not building: 16,342,481898 HA;*
- *Workplace building:*
- *Residential buildings: 39 BH.*

With the existence of the Decree of the Minister of Public Works, Perum Jasa Tirta II cannot record it in the book / list of fixed assets or other assets, considering that it is only a Goods Manager. On the other hand, optimizing the use of assets in the Jatiluhur dam area, physically it cannot be separated from the assets mentioned above, where Perum Jasa Tirta II as the Goods Manager, while providing legal certainty in accordance with applicable regulations.

HPL is not a right to land, and is not regulated in the Basic Agrarian Law, but in:

- *Government Regulation of the Republic of Indonesia. No. 8 of 1953, concerning Control of State Lands; and*
- *Permen. Agraria / Head of BPN No. 9 of 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights; and*
- *Terms of the Further Policy.*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Proses Perijinan (lanjutan)

HPL tidak mempunyai jangka waktu kepemilikan dan diberikan hanya atas tanah negara yang dikuasai oleh PEMDA, BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk mengontrol zoning dan land use, agar sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

Diatas HPL masih dapat diletakkan Hak atas Tanah, antara lain:

- Hak Guna Bangunan ("HGB"),
- Hak Guna Usaha ("HGU") dan
- Hak Pakai,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40, Tahun 1996 menyatakan bahwa, di atas tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah, yaitu:

- Hak Guna Bangunan ("HGB"); dan
- Hak Pakai ("HP").

HGB atau HP yang berada di atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul (rekomendasi) dari Pemegang HPL kepada calon pemegang HGB / HP.

Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah negara yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan hak menguasai dari negara kepada pemegang haknya.

Dalam Permeneg Agraria / Kepala BPN No. 9 TH.1999, tanggal 24 Oktober 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal-67, dinyatakan bahwa:

- (1) Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :
- a. Instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. PT. Persero;
 - e. Badan Otorita;
 - f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

f. Licensing Process (continued)

HPL does not have a period of ownership and is given only to state land controlled by the local government, state-owned enterprises and local-owned enterprises with the aim of controlling zoning and land use, so that it is in accordance with their spatial planning.

Above the HPL can still be placed the Right to Land, among others:

- Building Use Rights ("HGB")
- Business Use Rights ("HGU") and
- Right of Use,

Based on Government Regulation (PP) No. 40, Year 1996 states that, HPL land can be granted or charged with land rights, namely:

- Building Use Rights ("HGB"); and
- Right to Use ("HP").

HGB or HP that is on HPL land is granted by a decision to grant rights by the Minister or an appointed official based on a recommendation (recommendation) from the HPL Holder to the prospective HGB / HP holder.

Management Rights Land, namely state land controlled with Management Rights, which is the delegation of the exercise of part of the authority over the right to control from the state to the right holders.

In Permeneg Agraria / Head of BPN No. 9 TH.1999, dated 24 October 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights, Article 67, states that:

- (1) Management rights can be granted to:
- a. Government Agencies, including Local Governments;
 - b. State Owned Enterprises (BUMN);
 - c. Regional owned enterprises;
 - d. PT. Persero;
 - e. Authority Agency;
 - f. Other Government legal entities appointed by the government.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Proses Perijinan (lanjutan)

- (2) Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah.

Dengan demikian, Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut Hak Pengelolaan Lahan atau HPL) sesuai ketentuan diatas dapat diurus oleh Perum Jasa Tirta II, atas kawasan Bendungan Jatiluhur dan bantaran sungai Citarum yang tentunya bertujuan menjaga konservasi alam dan lingkungannya.

Kewenangan Subyek HPL, sesuai Pasal 6, Permenag No. 9 Tahun 1999 menjelaskan HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- d. menerima uang pemasukan / ganti rugi dan / atau uang wajib tahunan.

Selanjutnya, sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/1996 bahwa, negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, yang terdiri dari:

- a. Hak individual yang bersifat perdata;
- b. Hak Pengelolaan, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara pada instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaat atasnya;
- c. Tanah wakaf yaitu hak atas tanah yang semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP atau tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk di wakafkan.

4. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

f. Licensing Process (continued)

- (2) Legal entities as referred to in paragraph (1) can be granted Management Rights as long as they are in accordance with their main tasks and functions related to land management.

Thus, the Management Rights (hereinafter referred to as Land Management Rights or HPL) according to the above provisions can be administered by Perum Jasa Tirta II, over the Jatiluhur Dam area and the banks of the Citarum river which of course aims to preserve nature and its environment.

The authority of HPL Subjects, according to Article 6, Permenag No. 9 of 1999 describes HPL as giving authority to its holders to:

- a. planning the allocation and use of the land;
- b. use the land for the purposes of carrying out his duties;
- c. hand over parts of the land to a third party with usufructuary rights for a period of 6 (six) years;
- d. receive income / compensation and / or mandatory annual money.

Furthermore, according to Article 4 jo. Article 16 jo. Article 53 jo. Government Regulation (PP) No. 40/1996 and Government Regulation (PP) No. 41/1996 that, the state grants various types of land rights, which consist of:

- a. Individual rights that are civil in nature;
- b. Management rights, namely special rights granted by the state to certain agencies to be managed and taken advantage of;
- c. Waqf land is the right to land that was originally a primary right (HM, HGB, HGU, HP or girik land) and then waqfed or handed over by the owner to a religious body or other social body to be waqfed.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENT

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Kas dan Bank			Cash and Bank
Induk Perusahaan	32.159.231.938	77.267.949.925	Parent Entity
Anak Perusahaan	6.002.771.468	19.784.264.387	Subsidiaries Entity
Deposito Berjangka			Time Deposits
Induk Perusahaan	480.000.000.000	500.000.000.000	Parent Entity
Jumlah	<u>518.162.003.406</u>	<u>597.052.214.312</u>	Total

Rincian kas dan setara kas sebagai berikut:

The balances of cash and cash equivalent as follows:

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Kas	<u>2.237.968.485</u>	<u>5.157.665.900</u>	Cash
Bank			Bank
<u>Pihak Berelasi:</u>			<u>Related Parties:</u>
Rupiah			Rupiah
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	10.130.564.832	21.084.386.396	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.220.175.943	28.074.159.423	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT. Bank Jawa Barat Banten Tbk	3.596.972.592	5.550.333.329	PT. Bank Jawa Barat Banten Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.591.971.347	20.474.883.336	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	<u>32.539.684.714</u>	<u>75.183.762.484</u>	Sub Total
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Rupiah			Rupiah
Bank CIMB Niaga	834.445.945	11.942.726.946	Bank CIMB Niaga
Bank Index Selindo	2.549.904.262	4.768.058.982	Bank Index Selindo
Sub Jumlah	<u>3.384.350.207</u>	<u>16.710.785.928</u>	Sub Total
Jumlah Bank	<u>35.924.034.921</u>	<u>91.894.548.412</u>	Total Bank
Jumlah Kas dan Bank	<u>38.162.003.406</u>	<u>97.052.214.312</u>	Total Cash & Cash Equivalent
Deposito Berjangka:			Time Deposits:
<u>Pihak Berelasi</u>			<u>Related Parties</u>
Rupiah			Rupiah
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150.000.000.000	150.000.000.000	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT. Bank Jawa Barat Banten Tbk	150.000.000.000	150.000.000.000	PT. Bank Jawa Barat Banten Tbk
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	140.000.000.000	90.000.000.000	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.000.000.000	80.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	-	30.000.000.000	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Jumlah Deposito Berjangka	<u>480.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>	Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>518.162.003.406</u>	<u>597.052.214.312</u>	Total Cash & Cash Equivalent

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka pada
 tanggal laporan posisi keuangan (neraca) sebagai
 berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Rekening Rupiah	3,50% - 6,75%	4,25% - 8,00%
Rekening <i>Dollar</i> Amerika Serikat	0,0%	0,0%

Tidak terdapat kas dan setara kas yang dibatasi
 penggunaannya.

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta
 deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau
 kurang dari tanggal perolehan.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Grup dan tidak
 digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman
 lainnya.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat catatan 33.

5. CASH AND CASH EQUIVALENT (lanjutan)

The annual interest rates of temporary time deposits at
 the balance sheet date as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Rupiah Account	3,50% - 6,75%	4,25% - 8,00%
US Dollar Account	0,0%	0,0%

There are no restricted cash and cash equivalents.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and
 in banks and deposits with original maturities of three
 months or less from date of acquisition.

All cash and cash equivalents are owned by the Group
 and are not used as collateral for liabilities and other
 loans.

Explanations of related parties refer to notes 33.

6. PIUTANG USAHA

Akun ini seluruhnya merupakan piutang usaha kepada
 pihak ketiga dan pihak berelasi yang berasal
 pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Non SDA dan
 optimalisasi aset, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Telah Difakturkan:		
<u>Pihak Berelasi</u>		
BUMN & BUMD	100.821.838.247	85.591.777.075
Sub Jumlah	100.821.838.247	85.591.777.075
<u>Pihak Ketiga</u>		
Entitas Swasta	28.684.563.069	26.604.050.598
Sub Jumlah	28.684.563.069	26.604.050.598
Jumlah Piutang Telah Difakturkan	129.506.401.316	112.195.827.673
Dikurangi:		
Provisi penurunan nilai	(44.926.265.940)	(37.888.849.575)
Piutang Telah Difakturkan, Bersih	84.580.135.376	74.306.978.098
Belum Difakturkan:		
<u>Pihak Berelasi</u>		
Pihak Ketiga	96.182.445.829	39.070.616.283
	45.451.324.523	40.192.159.568
Piutang Belum Difakturkan, Bersih	141.633.770.352	79.262.775.851
Jumlah Piutang Usaha	226.213.905.728	153.569.753.949

Billed:
Related Parties
 BUMN & BUMD
Sub Total

Third Parties
 Private Entities
Sub Total

Total Receivable of Billed

Less:
 Provision for Impairment value
Receivable of Billed, Net

Unbilled:
Related Parties
Third Parties
Receivable of Unbilled, Net
Total Account Receivables

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Seluruh saldo piutang usaha per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dalam mata uang Rupiah.

Piutang yang belum difakturkan merupakan pengakuan pendapatan atas pekerjaan jasa yang telah diberikan kepada pengguna jasa namun belum dapat diterbitkan nota penagihannya, mengingat seluruh pelayanan jasa belum diberikan sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan sesuai dengan jangka waktu permintaan pelayanan jasa. Pengakuan ini merupakan bagian dari prosedur pisah batas transaksi dan pengaitan biaya dan pendapatan yang dilakukan pada akhir tahun.

Rincian piutang usaha telah difakturkan menurut pelanggan sebagai berikut:

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

All outstanding balances of trade receivables as of December 31, 2020 and December 31, 2019 are denominated in Rupiah.

Unearned receivables represent the recognition of revenue for the services that have been provided to the service user but can not yet be issued the billing note, since all services have not been provided until the end of the financial reporting year in accordance with the period of service request. This acknowledgment is part of the cut of date transaction and the matching cost with revenues made at the end of the year.

Details of trade receivables have been billed by customer as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pihak Berelasi:			Related Parties:
BUMN & BUMD:			BUMN & BUMD:
PT Sang Hyang Seri	50.507.433.845	41.727.722.750	PT. Sang Hyang Seri
PT PLN (Persero)	21.395.990.241	5.255.869.788	PT PLN (Persero)
PDAM Kota dan Kab. Bekasi	8.119.445.870	11.101.624.009	PDAM Kota dan Kab. Bekasi
PDAM Kota Bandung	8.041.429.900	7.722.353.800	PDAM Kota Bandung
PDAM Kab. Karawang	3.231.201.114	3.441.311.584	PDAM Kab. Karawang
PDAM Kab. Purwakarta	2.804.063.660	1.784.390.189	PDAM Kab. Purwakarta
PT Kujang Tatar Persada	1.770.418.408	1.437.160.728	PT. Kujang Tatar Persada
PT Kereta Cepat Indonesia China (WIKA)	1.344.944.226	-	PT Kereta Cepat Indonesia China (WIKA)
PDAM Subang	1.154.426.874	232.634.538	PDAM Subang
PT PG Rajawali II Unit PG Subang	554.749.108	1.936.700.820	PT. PG Rajawali II Unit PG Subang
PT Pertamina (Persero)	402.100.408	1.168.429.454	PT. Pertamina (Persero)
PT Waskita Karya	263.959.800	-	PT Waskita Karya
PAM Jaya	-	8.137.477.760	PAM Jaya
PT Pupuk Kujang	-	248.623.600	PT. Pupuk Kujang
Lain-lain (dibawah Rp200 Juta)	1.231.674.793	1.397.478.055	Others (below Rp 200 Million)
Sub Jumlah	100.821.838.247	85.591.777.075	Sub Total
 Dikurangi:			 Less:
Provisi penurunan nilai	(20.871.065.197)	(17.985.409.131)	Provision for Impairment value
Piutang Pihak Berelasi, Bersih	79.950.773.050	67.606.367.944	Related Parties of Receivable, Net

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Pihak Ketiga:		
PT Mutiara Energy	1.967.824.620	1.967.824.620
PT Indograha Samudra - Persada Realty	1.152.324.480	1.152.324.480
PT Archindo Development	1.018.881.000	1.018.881.000
PT Tenang Jaya Sejahtera	985.810.565	725.176.160
PT Lippo Cikarang	923.848.009	683.588.099
PT Hosaindo Sejahtera Abadi	858.360.026	858.360.026
PT Global Cipta Primakarya	391.177.800	-
PT South Pasific Viscose	779.394.588	820.249.500
PT Kurnia Ratu Kencana	769.387.689	610.020.456
PT Daya Cipta Kemasindo	682.457.705	-
PT Tridaya Kreasi	573.278.000	573.278.000
PT Sri Pertiwi Sejati	536.844.436	422.389.665
PT Hebel Indonesia	536.581.873	536.581.873
PT Jababeka Infrastruktur	527.916.700	754.138.054
PT Texmaco	505.908.804	505.908.804
PT Kahatex	480.651.900	310.073.300
PT Karawang Jabar Industrial Estate	446.618.856	476.090.716
PT Mora Telematika Indonesia	391.695.430	-
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.	357.717.530	-
PT Megalopolis Manunggal	338.827.980	340.518.460
PT Hitachi Construction Machinery Indonesia	330.006.000	-
PT White Rose PI	311.033.600	311.033.600
PT Cahaya Pelangi Utama (Hosindo SA)	305.223.630	385.422.120
PT Elegant Textile Industry	279.491.200	-
PT Summarecon Agung	243.533.754	-
PT Surya Cipta Swadaya	243.164.209	235.007.159
PT Hutchison 3 Indonesia	238.700.846	238.700.846
PT Alexandra Citra Pertiwi	233.348.175	222.237.075
Koperasi Purna Bhakti	226.996.200	205.675.286
PT Coca Cola	224.098.891	-
PT Royal Industri Indonesia	221.576.225	191.525.585
PT Surya Tekstil	213.480.526	230.921.900
PT Indosat (Persero) Tbk	209.679.580	411.751.629
PT Rana Global	207.505.571	230.125.111
CV Mitra Muda Manggala	205.917.469	-
Lain-lain (dibawah Rp200 Juta)	10.765.299.202	12.186.247.074
Sub Jumlah	28.684.563.069	26.604.050.598
Dikurangi:		
Provisi penurunan nilai	(24.055.200.743)	(19.903.440.444)
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga	4.629.362.326	6.700.610.154
Jumlah Piutang Usaha, Bersih	84.580.135.376	74.306.978.098

Third Parties:
PT. Mutiara Energy
PT. Indograha Samudra - Persada Realty
PT. Archindo Development
PT. Tenang Jaya Sejahtera
PT. Lippo Cikarang
PT. Hosaindo Sejahtera Abadi
PT Global Cipta Primakarya
PT. South Pasific Viscose
PT. Kurnia Ratu Kencana
PT Daya Cipta Kemasindo
PT. Tridaya Kreasi
PT. Sri Pertiwi Sejati
PT. Hebel Indonesia
PT. Jababeka Infrastruktur
PT. Texmaco
PT Kahatex
PT. Karawang Jabar Industrial Estate
PT Mora Telematika Indonesia
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT. Megalopolis Manunggal
PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia
PT. White Rose PI
PT. Cahaya Pelangi Utama (Hosindo SA)
PT Elegant Textile Industry
PT Summarecon Agung
PT. Surya Cipta Swadaya
PT. Hutchison 3 Indonesia
PT. Alexandra Citra Pertiwi
Koperasi Purna Bhakti
PT. Coca Cola
PT. Royal Industri Indonesia
PT. Surya Tekstil
PT. Indosat (Persero) Tbk
PT. Rana Global
CV Mitra Muda Manggala
Others (below Rp 200 Million)
Sub Total

Less:
 Provision for Impairment value
**Total Third Parties
 Account Receivable**
Total Account Receivable, Net

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha telah difakturkan berdasarkan umur piutang usaha Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Belum Jatuh Tempo	88.082.412.618	60.177.366.183	<i>Before Due Date</i>
0 - 30 hari	3.032.745.212	9.905.115.243	<i>0 - 30 Days</i>
31 - 60 hari	495.944.885	1.041.086.397	<i>31 - 60 Days</i>
61 - 90 hari	262.254.614	1.168.591.869	<i>61 - 90 Days</i>
> 90 hari	37.633.043.987	39.903.667.981	<i>> 90 Days</i>
Jumlah	129.506.401.316	112.195.827.673	Total

Rincian akumulasi penurunan nilai piutang 31 Desember 2020 sebagai berikut :

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Details of trade receivables of billed based on aging of trade receivables in year 2020 and 2019 as follows:

Details of accumulated impairment of receivables December 31, 2020 as follows:

a. Perhitungan Secara Kolektif

Keterangan/ Description	Relasi/ Related	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total
» Unit Wilayah 1	468.566.382	13.382.319.141	13.850.885.522
» Unit Wilayah 2	1.206.230.825	5.941.996.569	7.148.227.394
» Unit Wilayah 3	1.992.907.349	697.968.989	2.690.876.338
» Unit Wilayah 4	10.296.572.798	3.558.763.758	13.855.336.557
» Unit PLTA	4.513.866.203	427.696.352	4.941.562.555
Sub Jumlah / Sub Total	18.478.143.557	24.008.744.809	42.486.888.366

a. Colective Methode Calculation

b. Perhitungan Secara Individual

Keterangan/ Description	Relasi/ Related	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total
» PDAM Bekasi	1.512.950.475	-	1.512.950.475
» PT Sumarecon	-	12.696.072	12.696.072
» Eka Surya M	-	5.772.711	5.772.711
» PT Sri Pertiwi	-	27.987.151	27.987.151
» PT Sang Hyang Seri	711.519.922	-	711.519.922
» PDAM Bekasi IKK Ciampel	6.142.279	-	6.142.279
» PDAM Bekasi Teluk Jambe	22.938.153	-	22.938.153
» PDAM Bekasi Teluk Tarum	1.972.868	-	1.972.868
» PDAM Kabupaten Karawang	67.182.664	-	67.182.664
» PDAM Karawang Cab. Batujaya	7.055.053	-	7.055.053
» PDAM Karawang IKK Pedes	5.135.844	-	5.135.844
» PDAM Karawang Teluk Jambe	1.247.872	-	1.247.872
» PDAM Karawang Cab. Klari	12.686.768	-	12.686.768
» PDAM Karawang Cab. Rengas Denlok	11.724.663	-	11.724.663
» PDAM Karawang Kab. IKK Cibuya	1.820.820	-	1.820.820
» PDAM Karawang Kab. IKK Cilebar	5.373.269	-	5.373.269
» PDAM Karawang Kab. IKK Cipule	4.532.334	-	4.532.334
» PDAM Karawang Kab. IKK Citra Kebun Mas	812.603	-	812.603
» PDAM Karawang Cab Tirta Jaya	8.411.004	-	8.411.004
» PDAM Karawang Cab Cilamaya	2.252.862	-	2.252.862
» PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang (Cilamaya)	2.138.549	-	2.138.549
» PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang (IKK Jatisari)	1.278.590	-	1.278.590
» PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang (Karang Anyar)	950.508	-	950.508
» PDAM Karawang - Cikampek	4.419.090	-	4.419.090
» PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang	375.451	-	375.451
Sub Jumlah / Sub Total	2.392.921.641	46.455.934	2.439.377.574
Jumlah / Total	20.871.065.197	24.055.200.743	44.926.265.940

b. Individual Methode Calculation

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Selanjutnya, rincian akumulasi penurunan nilai piutang
 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Perhitungan Secara Kolektif

	Relasi/ Related	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total	
	-	19.903.440.445	19.903.440.445	
Jumlah	-	19.903.440.445	19.903.440.445	Total

b. Perhitungan Secara Individual

	Relasi/ Related	Pihak Ketiga/ Third Parties	Jumlah/ Total	
	17.985.409.131		17.985.409.131	
Jumlah	17.985.409.131	-	17.985.409.131	Total

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Furthermore, details of accumulated impairment of
 receivables December 31, 2019 as follows:

a. Collective Methode Calculation

b. Individual Methode Calculation

Berkenaan dengan pengujian atas nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) piutang usaha Perum Jasa Tirta II dan entitas anak per 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai kebijakan akuntansi yang telah disesuaikan berdasarkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, bahwa pengujian terhadap sekurang-kurangnya 2 (dua) variabel makro masih akan terus dilakukan telaahan dan analisis secara lebih intensif dan akan dilakukan evaluasi secara periodik (bulanan) sampai diperoleh simpulan adanya suatu model persamaan dimana variabel-variabel ekonomi makro (sebagai independent variable atau variabel bebas) tersebut memiliki pengaruh signifikan (p value <10%) terhadap loss rate berdasarkan segmen pendapatan, baik piutang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi, yang merupakan dependent variable atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang diuji atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas tersebut. Hasil pengujian dengan R square yang semakin besar nilainya, maka akan menunjukkan semakin baik dan relevan model yang digunakan.

With regard to testing the value of allowance for impairment losses (CKPN) on trade receivables of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019 in accordance with the adjusted accounting policies based on PSAK 71: Financial Instruments, that test for at least 2 (two) Macro variables will continue to be studied and analyzed more intensively and will be evaluated periodically (monthly) until a conclusion is obtained that there is an equation model in which the macroeconomic variables (as independent variables) have a significant effect (p value < 10%) for the loss rate based on the income segment, both receivables from third parties and related parties, which are the dependent variable or variables that are influenced or tested or become a result of the existence of these independent variables. The test results with the R square, the greater the value, the better and more relevant the model used is.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Berikut ini kombinasi 2 (dua) variabel dari 3 (tiga) variabel makro sebagai *independent variable* atau variabel bebas yang digunakan sebagai variabel pengujian dengan metode kolektif, yang terdiri dari :

- Model 1: tingkat inflasi dan BI repo rate periode Januari 2019 s.d. Desember 2020;
- Model 2: tingkat BI repo rate dan kurs valuta asing (USD) periode Januari 2019 s.d. Desember 2020; dan
- Model 3: kurs valuta asing (USD) dan tingkat inflasi periode Januari 2019 s.d. Desember 2020.

Kombinasi 2 (dua) variabel tersebut pada dilihat pada masing-masing tabel pembentukan CKPN (huruf a-f) dibawah ini.

Berikut ini hasil perhitungan CKPN dan hasil pengujian pertama kali yang dilakukan oleh perusahaan, atas **loss rate** yang diperoleh dari **metode kolektif** bulanan untuk 2 (dua) tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 2019, per wilayah / unit kerja, serta pihak ketiga dan pihak berelasi:

a. Pembentukan CKPN - Wilayah I

- Piutang kepada Pihak Ketiga

Umur Tunggakan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	47,10%	25,49%	100,00%	25,49%	1.819.083.241	463.631.102
01 - 30 hari / days	69,12%	54,11%	100,00%	54,11%	1.230.274.760	665.693.062
31 - 60 hari / days	78,28%	78,28%	100,00%	78,28%	217.363.849	170.157.819
61 - 90 hari / days	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	34.541.023	34.541.023
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	12.048.296.135	12.048.296.135
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					15.349.559.008	13.382.319.141

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

The following is a combination of 2 (two) variables from 3 (three) macro variables as independent variables or independent variables that are used as testing variables using a collective method, which consists of:

- Model 1: the inflation rate and the BI repo rate for the period January 2019 s.d. December 2020;
- Model 2: BI repo rate and foreign exchange rates (USD) for the period January 2019 to. December 2020; and
- Model 3 foreign exchange rates (USD) and inflation rates for the period January 2019 to. December 2020.

The combination of these 2 (two) variables can be seen in each table for the formation of an allowance for impairment value (AIV) (letters a-f) below.

Following are results of the calculation of **an allowance for impairment value (AIV)** and the first test results conducted by company on the **loss rate** using **collective method** for the year ended December 31, 2020, per work region and consist of third parties and related parties:

a. The Establishment of an AIV – Region I

- Receivables to Third Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,6339	7,3406	0,3395	0,0480	Variabel independen BI Repo Rate lolos / There is an independent variable BI Repo Rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 4,8%.
		BI Repo Rate		-3,4954177	0,5913		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-13,521374	3,5663	0,4108	0,1015	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 10,1%.
		Kurs / Exchange Rate		1,4618	0,1476		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-12,733204	1,3831	0,1446	0,1297	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 12,9%.
		Inflasi / Inflation Rate		5,5481	0,2486		

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

a. Pembentukan CKPN - Wilayah I (lanjutan)

a. The Establishment of an AIV – Region I (continued)

- Piutang kepada Pihak Berelasi

- Receivables to Related Parties

Umur Tunggalan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	47,28%	1,32%	100,00%	1,32%	101.542.940	1.335.377
01 - 30 hari / days	20,45%	2,78%	100,00%	2,78%	5.814.770	161.750
31 - 60 hari / days	39,10%	13,60%	100,00%	13,60%	14.602.835	1.986.236
61 - 90 hari / days	34,78%	34,78%	100,00%	34,78%	26.859.530	9.342.445
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	455.740.574	455.740.574
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					604.560.649	468.566.382

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate BI Repo Rate	-0,3144838	-9,0893613 13,589494	0,2896 0,0708	0,1590	Variabel independen BI Repo Rate lolos / There is an independent variable BI Repo Rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 15,9%.
2	Loss Rate	BI Repo Rate Kurs / Exchange Rate	6,1756816	6,6002823 -0,6660539	0,1981 0,5640	0,1261	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 12,6%.
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate Inflasi / Inflation Rate	10,783082	-1,1188356 2,0605151	0,3314 0,7243	0,0583	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 5,8%.

b. Pembentukan CKPN - Wilayah II

b. The Establishment of an AIV – Region II

- Piutang kepada Pihak Ketiga

- Receivables to Third Parties

Umur Tunggalan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	49,31%	32,62%	100,00%	32,62%	720.206.730	234.907.286
01 - 30 hari / days	80,04%	66,15%	100,00%	66,15%	32.845.300	21.726.229
31 - 60 hari / days	82,64%	82,64%	100,00%	82,64%	31.070.358	25.678.015
61 - 90 hari / days	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	35.277.725	35.277.725
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	5.624.407.313	5.624.407.313
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					6.443.807.426	5.941.996.569

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Pembentukan CKPN - Wilayah II (lanjutan)

- Piutang kepada Pihak Ketiga (lanjutan)

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,6169518	-2,3018792	0,7787	0,0091	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 0,9%.
		BI Repo Rate		2,9907882	0,6692		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-15,712653	4,0782602	0,3680	0,1220	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 12,2%.
		Kurs / Exchange Rate		1,6941499	0,1096		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-13,068555	1,434164	0,1597	0,0921	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 9,2%.
		Inflasi / Inflation Rate		1,8017445	0,7242		

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

b. The Establishment of an AIV – Region II (continued)

- Receivables to Third Parties (continued)

- Piutang kepada Pihak Berelasi

- Receivables to Related Parties

Umur Tunggakan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	85,65%	23,26%	100,00%	23,26%	28.784.200	6.695.779
01 - 30 hari / days	59,87%	27,16%	100,00%	27,16%	141.043.180	38.307.402
31 - 60 hari / days	65,22%	45,37%	100,00%	45,37%	897.303	407.094
61 - 90 hari / days	69,57%	69,57%	100,00%	69,57%	-	-
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	1.160.820.550	1.160.820.550
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					1.331.545.233	1.206.230.825

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,9031	13,588721	0,4702	0,0459	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 4,5%
		BI Repo Rate		-15,816876	0,3273		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	14,9714	-9,1471793	0,4069	0,0374	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 3,7%
		Kurs / Exchange Rate		-1,4679884	0,5590		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	8,0431	-0,7875129	0,7459	0,0053	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 0,5%
		Inflasi / Inflation Rate		-1,4402879	0,9078		

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

c. Pembentukan CKPN - Wilayah III

- Piutang kepada Pihak Ketiga

Umur Tunggakan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	52,68%	30,18%	100,00%	30,18%	72.454.984	21.863.599
01 - 30 hari / days	74,99%	57,28%	100,00%	57,28%	116.782.332	66.887.606
31 - 60 hari / days	79,85%	76,37%	100,00%	76,37%	11.239.231	8.583.837
61 - 90 hari / days	95,65%	95,65%	100,00%	95,65%	-	-
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	600.633.947	600.633.947
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					801.110.494	697.968.989

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

c. The Establishment of an AIV – Region III

- Receivables to Third Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,2175876	-12,914715	0,3540	0,0746	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 7,4%.
		BI Repo Rate		15,100293	0,2082		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-19,629177	9,7910568	0,2266	0,0921	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 9,2%.
		Kurs / Exchange Rate		2,0664095	0,2266		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-12,399321	1,3561908	0,4535	0,0273	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 2,7%.
		Inflasi / Inflation Rate		1,3561908	0,4535		

- Piutang kepada Pihak Berelasi

Umur Tunggakan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	56,52%	41,55%	100,00%	41,55%	150.455.743	62.519.853
01 - 30 hari / days	82,09%	73,52%	100,00%	73,52%	28.776.568	21.157.688
31 - 60 hari / days	89,57%	89,57%	100,00%	89,57%	391.509	350.657
61 - 90 hari / days	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.181.439	8.181.439
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	1.900.697.713	1.900.697.713
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					2.088.502.972	1.992.907.349

- Receivables to Related Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,5804	3,2590	0,7385	0,0358	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 3,5%.
		BI Repo Rate		3,2590	0,7385		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-8,0285718	5,6536	0,3209	0,0527	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 5,2%.
		Kurs / Exchange Rate		5,6536	0,3209		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-5,6447013	0,6545	0,5967	0,0458	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 4,5%.
		Inflasi / Inflation Rate		0,6545	0,5967		

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Pembentukan CKPN - Wilayah IV

- Piutang kepada Pihak Ketiga

Umur Tunggakan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	51,65%	23,14%	100,00%	23,14%	154.257.550	35.690.573
01 - 30 hari / days	64,24%	44,80%	100,00%	44,80%	746.804.100	334.534.167
31 - 60 hari / days	69,73%	69,73%	100,00%	69,73%	86.825.500	60.547.553
61 - 90 hari / days	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	514.800	514.800
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	3.060.355.202	3.060.355.202
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					4.048.757.152	3.491.642.294

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

d. The Establishment of an AIV – Region IV

- Receivables to Third Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpanan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,3702956	8,08197	0,4236	0,0883	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 8,8%.
		BI Repo Rate		8,08197	0,4236		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-14,233879	8,6314	0,1435	0,1161	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 11,6%.
		Kurs / Exchange Rate		8,6314	0,1435		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-11,075704	1,1954	0,3430	0,1268	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 12,6%.
		Inflasi / Inflation Rate		10,1681	0,1220		

- Piutang kepada Pihak Berelasi

Umur Tunggakan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	66,38%	42,43%	100,00%	42,43%	75.300.950	31.948.288
01 - 30 hari / days	76,51%	63,91%	100,00%	63,91%	49.633.600	31.721.629
31 - 60 hari / days	83,53%	83,53%	100,00%	83,53%	120.152.800	100.362.900
61 - 90 hari / days	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	64.682.500	64.682.500
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	10.067.841.142	10.067.841.142
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					10.377.610.992	10.296.556.460

- Receivables to Related Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpanan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,9777231	11,487165	0,3233	0,0570	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 5,7%.
		BI Repo Rate		-10,612191	0,2859		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-8,2341693	-1,6186905	0,8118	0,0286	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 2,8%.
		Kurs / Exchange Rate		0,9464006	0,5443		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-10,744436	1,1921171	0,4237	0,0338	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 3,3%.
		Inflasi / Inflation Rate		3,0926967	0,6836		

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

e. Pembentukan CKPN – PLTA & Energi

- Piutang kepada Pihak Ketiga

Umur Tunggalan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	53,54%	8,40%	100,00%	8,40%	129.884.915	10.914.802
01 - 30 hari / days	58,70%	15,70%	100,00%	15,70%	101.426.590	15.920.220
31 - 60 hari / days	51,25%	26,74%	100,00%	26,74%	-	-
61 - 90 hari / days	52,17%	52,17%	100,00%	52,17%	43.520.976	22.706.596
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	378.154.734	378.154.734
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					652.987.215	427.696.352

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

**e. The Establishment of an AIV – Hydroelectric
Power & New Renewable Energy**

- Receivables to Third Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpanan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	1,7260757	-23,502211	0,1071	0,4827	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 48,2%.
		BI Repo Rate		-15,744439	0,2006		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-7,7863349	-29,635968	0,0024	0,4201	Variabel independen BI Repo Rate yang lolos / There is an independent variable BI Repo Rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 42%.
		Kurs / Exchange Rate		1,003017	0,6159		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-18,334077	2,0467297	0,2663	0,4725	Variabel independen Inflasi yang lolos / There is an independent variable Inflation rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 47,2%.
		Inflasi / Inflation Rate		-35,683384	0,0009		

- Piutang kepada Pihak Berelasi

Umur Tunggalan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	39,13%	9,60%	100,00%	9,60%	21.709.470.152	2.084.598.415
01 - 30 hari / days	65,60%	24,54%	100,00%	24,54%	549.160.762	134.756.308
31 - 60 hari / days	57,35%	37,40%	100,00%	37,40%	-	-
61 - 90 hari / days	65,22%	65,22%	100,00%	65,22%	32.274.371	21.048.503
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	2.273.462.977	2.273.462.977
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					24.564.368.262	4.513.866.203

- Receivables to Related Parties

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpanan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,6227045	20,07194	0,2426	0,0665	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 6,6%.
		BI Repo Rate		-15,219995	0,2976		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	26,441479	-6,1692203	0,5324	0,0673	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 6,7%.
		Kurs / Exchange Rate		-6,1692203	0,2396		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	19,723881	-2,0321309	0,3517	0,0565	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 5,6%.
		Inflasi / Inflation Rate		-2,0321309	0,3517		

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

f. Pembentukan CKPN – Unit Saluran Pengairan Air Minum (SPAM), Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dan Laboratorium (USAL)

f. The Establishment of an AIV – Irrigation Drain Unit for Drinking Water, Bottle Drinking Water, and Laboratory

- Piutang kepada Pihak Ketiga

- Receivables to Third Parties

Umur Tunggalan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	28,36%	0,34%	100,00%	0,34%	-	-
01 - 30 hari / days	20,98%	1,19%	100,00%	1,19%	13.617.250	162.048
31 - 60 hari / days	26,09%	5,67%	100,00%	5,67%	13.401.500	760.009
61 - 90 hari / days	21,74%	21,74%	100,00%	21,74%	16.402.250	3.565.707
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	62.633.700	62.633.700
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					106.054.700	67.121.464

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefisien/ Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	1,1853783	-38,061827	0,0012	0,6325	Variabel independen BI Repo Rate yang lolos / There is an independent variable BI Repo Rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 63,2%.
		BI Repo Rate		-0,945294	0,9140		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	2,0054665	-26,022237	0,0026	0,3856	Variabel independen BI Repo Rate yang lolos / There is an independent variable BI Repo Rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 38,5%.
		Kurs / Exchange Rate		-0,0572918	0,9741		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-4,572543	0,5973259	0,6460	0,6360	Variabel independen Inflasi yang lolos / There is an independent variable Inflation rate passed the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 63,6%.
		Inflasi / Inflation Rate		-38,327396	0,0000		

- Piutang kepada Pihak Berelasi

- Receivables to Related Parties

Umur Tunggalan / Age of Outstanding AR	Rata-rata / Average Outstanding AR (%)	Probability Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan / Impairment Rate of AR (%)	Saldo Piutang / Balance of AR Des./ Dec. 31, 2020	Penyisihan Piutang / Allowance for AR Des. / Dec. 31 2020
Belum Jatuh Tempo / Not yet due	14,26%	0,01%	100,00%	0,01%	-	-
01 - 30 hari / days	17,39%	0,10%	100,00%	0,10%	16.566.000	16.339
31 - 60 hari / days	13,04%	0,57%	100,00%	0,57%	-	-
61 - 90 hari / days	4,35%	4,35%	100,00%	4,35%	-	-
>90 hari / days	100%	100%	100%	100%	-	-
Jumlah yang dihitung dengan metode kolektif / The amount calculated by the collective method					16.566.000	16.339

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

f. Pembentukan CKPN – Unit Saluran Pengairan Air Minum (SPAM), Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dan Laboratorium (USAL) (lanjutan)

- Piutang kepada Pihak Berelasi (lanjutan)

Model	Variabel Dependen / Dependent Variable	Variabel Independen / Independent Variable	Intercept	Koefesien / Coefficient	P Value	R ²	Simpulan / Conclusion
1	Loss Rate	Inflasi / Inflation Rate	0,1986882	-7,635104	0,2835	0,1106	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 11%.
		BI Repo Rate		0,5367178	0,9286		
2	Loss Rate	BI Repo Rate	-1,7018414	-4,1653407	0,3270	0,0613	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 6,1%.
		Kurs / Exchange Rate		0,2025372	0,8331		
3	Loss Rate	Kurs / Exchange Rate	-2,4701585	0,2795519	0,7538	0,1145	Tidak ada variabel independen yang lolos / There are no independent variables that pass the test (P Value < 10%), R Square sebesar / is = 11,4%.
		Inflasi / Inflation Rate		-6,8769035	0,1419		

Dari keenam segmen pendapatan yang digunakan dalam rangka perhitungan nilai CKPN – piutang usaha per 31 Desember 2020 tersebut diatas, masih sedikit sekali variabel ekonomi makro (sebagai independent variable atau variabel bebas) yang seluruhnya dapat teruji dengan baik, yaitu memiliki pengaruh signifikan (p value <10%) terhadap loss rate berdasarkan segmen pendapatan, baik piutang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi, dan R square nilainya besar.

Dengan hasil telaahan / pengujian atas pengukuran nilai ekspektasian (*expected value*) - CKPN piutang usaha yang outstanding untuk sepanjang umurnya pada periode tahun berikutnya, maka masih diperlukan telaahan secara terus-menerus dan analisis secara berkelanjutan untuk mendapatkan model-model formulasi yang lebih baik untuk pengukuran nilai ekspektasian (*expected value*) - CKPN piutang usaha dari masing-masing segmen pendapatan tersebut diatas, sekaligus dalam rangka peningkatan kualitas tata-kelola perusahaan oleh manajemen.

Rincian piutang usaha belum difakturkan menurut pelanggan sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Pihak Berelasi:		
BUMN & BUMD:		
PT PLN (Persero)	81.109.203.058	20.596.778.108
PAM Jaya	13.382.887.300	12.990.086.900
PT Pertamina (Persero)	284.258.150	334.715.711
PT Pupuk Kujang	265.981.805	258.057.200
PT Sang Hyang Seri	231.354.299	408.292.390
PDAM Kota Bandung	204.118.500	243.676.800
PT Kujang Tatar Persada	202.501.604	1.349.261.237
Lain-lain (dibawah Rp200 Juta)	502.141.113	2.889.747.937
	96.182.445.829	39.070.616.283

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

f. The Establishment of an AIV – Irrigation Drain Unit for Drinking Water, Bottle Drinking Water, and Laboratory (continued)

- Receivables to Related Parties (continued)

Based on the six revenue segments which are used in calculating an allowance for impairment value (AIV) of AR as of December 31, 2020 above, there are still very few macroeconomic variables (independent variable) which can all be tested properly, namely those that have a significant effect (p value <10%) on the loss rate based on the revenue segments, for receivables to third parties and related parties, and R square is large.

With the results of the analysis / testing of the measurement of the expected value an allowance for impairment value (AIV) of AR for outstanding accounts receivable for its entire life in the following year period, continuous review and analysis is still needed to obtain better formulation models for measurement. expected value an allowance for impairment value (AIV) of AR for accounts receivable from each revenue segment mentioned above, as well as in order to improve the quality of corporate governance by management.

Details of trade receivables of unbilled by customer as follows:

Related Parties
BUMN & BUMD:
PT PLN (Persero)
PAM Jaya
PT Pertamina (Persero)
PT Pupuk Kujang
PT Sang Hyang Seri
PDAM Kota Bandung
PT Kujang Tatar Persada
Others (below Rp 200 Million)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pihak Ketiga:			Third Parties:
PT. Intama Ferro Alloys	10.923.296.132	6.824.682.813	PT. Indograha Samudra - Persada Realty
PT Elegant Textile Industry	8.842.364.000	8.187.565.218	PT Elegant Textile Industry
PT Bangunperkasa Adhitamasentra	1.529.818.187	507.488.519	PT Bangunperkasa Adhitamasentra
PT Lippo Cikarang	853.423.320	613.155.410	PT Lippo Cikarang
PT Indorama Syntetics Tbk	651.316.092	896.667.816	PT Indorama Syntetics Tbk
PT Jababeka Infrastruktur	518.803.650	518.795.650	PT Jababeka Infrastruktur
PT South Pasific Viscose	483.570.000	494.368.000	PT South Pasific Viscose
PT Indosat (Persero) Tbk	465.425.460	365.681.807	PT. Indosat (Persero) Tbk
PT Global Cipta Primakarya	390.000.000	-	PT Global Cipta Primakarya
PT Fajar Surya Wisesa	373.205.130	370.332.330	PT Fajar Surya Wisesa
PT Indo Bharat Rayon	354.043.900	428.142.500	PT Indo Bharat Rayon
PT Pindodeli Pulp and Paper Mills	278.315.610	480.543.875	PT Pindodeli Pulp and Paper Mills
PT Megalopolis Manunggal Industrial Development	266.965.480	266.961.480	PT Megalopolis Manunggal Industrial Development
Lain-lain (dibawah Rp200 Juta)	19.520.777.562	20.237.774.150	Others (below Rp 200 Million)
	45.451.324.523	40.192.159.568	
Jumlah Piutang belum difakturkan	141.633.770.352	79.262.775.851	Total Receivables of unbilled

Perubahan atas provisi penurunan nilai piutang usaha telah difakturkan sebagai berikut:

The changes in the provision for impairment losses of trade receivables of billed are as follows:

	2020	2019	
Saldo Awal	37.888.849.575	47.447.872.135	Beginning Balance
Penambahan (Pengurangan)			Addition (Subtraction)
Tahun Berjalan	7.037.416.365	(9.559.022.560)	Current Year
Pemulihan atas Provisi			Recovery on Provisions for
Penurunan Nilai	-	-	Impairment Value
Saldo Akhir	44.926.265.940	37.888.849.575	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa, provisi kerugian penurunan nilai yang dicadangkan cukup untuk menutupi kemungkinan atas kerugian akibat tidak tertagihnya piutang usaha.

Managements believes that, the provision for impairment losses which are reserved sufficient to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

Tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

There are no trade receivables that are used as collateral for liabilities and other loans.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat catatan 33.

Explanations of related parties refer to notes 33.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang Belum Difakturkan – PT PLN (Persero)

Berkenaan dengan nilai piutang yang belum difakturkan kepada PT. PLN (Persero), per 31 Des.2020 sebesar Rp81.109.203.058, merupakan pendapatan neto dengan rincian sebagai berikut:

- a. BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda Semester II Tahun 2019 sebesar Rp17,65 miliar dengan produksi 229,94 juta kWh.
- b. BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda Semester I Tahun 2020 sebesar Rp19,51 miliar dengan produksi 251,69 juta kWh.
- c. BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda Semester II Tahun 2020 sebesar Rp29,45 miliar dengan produksi 379,85 juta kWh.
- d. Penyaluran Listrik PLTA Ir. H. Djuanda ke PT. PLN (Persero) bulan Desember 2020 sebesar Rp14,50 miliar dengan produksi 43,94 juta kWh.

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan BJPSDA dan Penyaluran Listrik PLTA Ir. Djuanda kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan :

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda Nomor 1/97/SPU/2004 dan 0189.PJ/063/DIR/2004, tanggal 02 Agustus 2004.
- b. Addendum VI, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda No.1/45/SPU-Add/2018 dan 1466.PJ/DAN.02.04/DIR/2018, tanggal 29 November 2018, yaitu:

- **Pasal 3, ayat 3.1.E.**, Jangka Waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.D diatas, diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022.

- **Apendiks – G**, Perhitungan Pembayaran, bagian III, yaitu:

Rumus Pembayaran:

$$P = E \times Ht \dots\dots\dots (\text{Rupiah})$$

P = Jumlah Pembayaran pada Periode Penagihan, dalam satuan Rupiah.

E = Jumlah Keluaran Energi Neto yang diterima oleh PEMBELI pada periode Penagihan, dalam satuan kWh

Ht = Harga Energi yang berlaku ke t tahun dalam satuan Rp/kWh.

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Accounts Receivable Not Yet Factored - PT PLN (Persero)

With regard to the value of the receivables that have not been factored to PT. PLN (Persero), as of December 31, 2020 amounting to IDR 81,109,203,058, is net income with the following details:

- a. BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda Semester II Year 2019 amounting to IDR 17.65 billion with a production of 229.94 million kWh.
- b. BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda Semester I Year 2020 amounting to IDR 19.51 billion with a production of 251.69 million kWh.
- c. BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda Semester II Year 2020 amounting to Rp.29.45 billion with a production of 379.85 million kWh.
- d. Hydroelectric Power Distribution Ir. H. Djuanda to PT. PLN (Persero) in December 2020 amounting to IDR 14.50 billion with a production of 43.94 million kWh.

Furthermore, it can be explained as follows:

- 1) Recognition of BJPSDA revenue and the Distribution of Hydroelectric Power Ir. Djuanda to PT. PLN (Persero) based on:

- a. Power Purchase Agreement Letter for PLTA Ir. H. Djuanda Number 1/97 / SPU / 2004 and 0189.PJ / 063 / DIR / 2004, dated 02 August 2004.
- b. Addendum VI, Power Purchase Agreement for PLTA Ir. H. Djuanda No.1 / 45 / SPU-Add / 2018 and 1466.PJ / DAN.02.04 / DIR / 2018, dated 29 November 2018, namely:

- **Article 3, paragraph 3.1.E.**, the period as referred to in paragraph 3.1.D above, is extended until 31 December 2022.

- **Appendix - G**, Payment Calculation, part III, namely:

Payment Formulas:

$$P = E \times Ht \dots\dots\dots (\text{Rupiah})$$

P = Payment Amount during Billing Period, in Rupiah.

E = Amount of Net Energy Output received by BUYER in the Billing period, in kWh units

Ht = Energy price applicable to t year in units of Rp / kWh.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang Belum Difakturkan – PT PLN (Persero)
 (lanjutan)

- 1) Pengakuan pendapatan BJPSDA dan Penyaluran Listrik PLTA Ir. Djuanda kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan : (lanjutan)
- b. Addendum VI, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda No.1/45/SPU-Add/2018 dan 1466.PJ/DAN.02.04/DIR/2018, tanggal 29 November 2018, yaitu: (lanjutan)

- **Apendiks – G**, Perhitungan Pembayaran, point IV.

Harga Energi Setiap Tahun, sebagai berikut:

Tahun / Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Harga Energi / Energy price (Rp/kWh)	298,53	315	323	330	338	346

- c. Perjanjian Tambahan Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk PLTA Ir. H. Djuanda No. 1/DIR/46/SPU/2018 dan 1537.PJ/DAN.02.04/DIR/2018, tanggal 28 Desember 2018, sebagai berikut:

- **Pasal 3, Tarif, ayat 1:**

Tarif BJPSDA ditetapkan sebagaimana Keputusan Menteri PUPR No. 935/2017 tanggal 22 November 2017 yakni sebesar Rp.85,28/kWh (delapan puluh lima koma dua puluh delapan rupiah per kilo watt hour).

- **Pasal 4, Perhitungan BJPSDA dan Cara Pembayaran, ayat :**

- 1) Perhitungan BJPSDA dalam perjanjian ini didasarkan pada jumlah penyaluran energi listrik PLTA Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang diterima oleh pihak kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Transaksi Tenaga Listrik yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan mempertimbangkan hasil realisasi program jasa pengelolaan sumber Daya Air ("Program Jasa Pengelolaan SDA").

- 2) Tata Cara pembayaran BJPSDA dalam perjanjian ini dilaksanakan dengan skema reimburse.

- **Pasal 5: Jangka Waktu Perjanjian, ayat :**

- 1) Perjanjian ini berlaku surut (retroaktif) terhitung sejak tanggal 23-11-2017 (Dua Puluh Tiga Bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas).

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Accounts Receivable Not Yet Factored - PT PLN (Persero) (continued)

- 1) *Recognition of BJPSDA revenue and the Distribution of Hydroelectric Power Ir. Djuanda to PT. PLN (Persero) based on: (continued)*

- b. *Addendum VI, Power Purchase Agreement for PLTA Ir. H. Djuanda No.1 / 45 / SPU-Add / 2018 and 1466.PJ / DAN.02.04 / DIR / 2018, dated 29 November 2018, namely: (continued)*

- **Appendix - G**, Payment Calculation, part IV.

Energy Prices Every Year, as follows:

- c. *Additional Agreement for Water Resources Management Services for Hydroelectric Power Plant Ir. H. Djuanda No. 1 / DIR / 46 / SPU / 2018 and 1537.PJ / DAN.02.04 / DIR / 2018, dated December 28, 2018, as follows:*

- **Article 3, Tariff, paragraph 1:**

The BJPSDA rate is determined in accordance with the Minister of PUPR Decree No. 935/2017 dated 22 November 2017, namely IDR 85.28 / kWh (eighty five point twenty eight rupiah per kilo watt hour).

- **Article 4, Calculation of BJPSDA and Method of Payment, paragraph:**

- 1) *The calculation of BJPSDA in this agreement is based on the amount of distribution of electrical energy from PLTA Ir. H. Djuanda Jatiluhur received by the SECOND PARTY as outlined in the Electricity Transaction Minutes signed by the Parties, and taking into account the results of the realization of the Water Resources Management Service Program ("SDA Management Services Program").*

- 2) *The procedure for payment of BJPSDA in this agreement shall be implemented under a reimbursement scheme.*

- **Article 5: Term of Agreement, paragraph:**

- 1) *This agreement is retroactive (retroactive) from 23-11-2017 (Twenty-Three Months November, Two Thousand Seventeen).*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang Belum Difakturkan – PT PLN (Persero)
(lanjutan)

- 1) Pengakuan pendapatan BJPSDA dan Penyaluran Listrik PLTA Ir. Djuanda kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan : (lanjutan)

c. (lanjutan)

- Pasal 5: Jangka Waktu Perjanjian, ayat : (lanjutan)
- 2) Jangka Waktu Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PJBL PLTA Ir. H. Djuanda.

- d. Bahwa sesuai Lampiran 1 pada Perjanjian Tambahan Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk PLTA Ir. H. Djuanda No. 1/DIR/46/SPU/2018 dan 1537.PJ/DAN.02.04/DIR/2018, tanggal 28 Desember 2018, pada bagian IV: Penyusunan Program Jasa Pengelolaan SDA, dinyatakan bahwa:

- Bagian II: Struktur Penagihan, angka 1, yaitu pembayaran BJPSDA dimaksudkan untuk menggambarkan pembayaran atas BJPSDA dengan mengacu pada jumlah Keluaran Energi Neto dari Unit atau Pusat Pembangkit Pembayaran Energi dihitung sesuai dengan ketentuan dalam bagian III : Rumus Pembayaran dan bagian IV : Penyusunan Program Jasa Pengelolaan SDA.
- Bagian IV: Penyusunan Program Jasa Pengelolaan SDA, angka 3, yaitu Kewajiban nilai Program Jasa Pengelolaan SDA dan pekerjaan penunjang yang berdampak langsung pada Pembangkit yang disepakati yakni minimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perkiraan BJPSDA yang menjadi kewajiban pihak kedua;
- Bagian IV: Penyusunan Program Jasa Pengelolaan SDA, angka 6, yaitu, Evaluasi pencapaian penyelesaian Program Jasa Pengelolaan SDA akan dilakukan setiap akhir semester (6 bulan) pada bulan Juli tahun berjalan dan pada bulan Januari tahun berikutnya untuk evaluasi pencapaian 1 tahun. Atas pertimbangan kondisi tertentu dan disepakati oleh para pihak, lingkup pekerjaan Program Jasa Pengelolaan SDA pada semester berikutnya dapat diubah pada saat evaluasi akhir semester dengan tidak merubah total anggaran dalam 1 tahun yang telah disepakati.

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Accounts Receivable Not Yet Factored - PT PLN (Persero) (continued)

- 1) Recognition of BJPSDA revenue and the Distribution of Hydroelectric Power Ir. Djuanda to PT. PLN (Persero) based on: (continued)

c. (continued)

- Article 5: Term of Agreement, paragraph: (continued)
- 2) The term of this agreement will be valid until the end of the Period as regulated in Article 3 PJBL PLTA Ir. H. Djuanda.

- d. Whereas according to Attachment 1 to the Additional Water Resources Management Services Agreement for Hydroelectric Power Plant Ir. H. Djuanda No. 1 / DIR / 46 / SPU / 2018 and 1537.PJ / DAN.02.04 / DIR / 2018, December 28, 2018, at Point IV: Preparation of Natural Resources Management Services Program, states that:

- Part II: Billing Structure, number 1, namely BJPSDA payment is intended to describe the payment for BJPSDA with reference to the amount of Net Energy Output from the Energy Payment Generating Unit or Center calculated in accordance with the provisions in part III: Payment Formulas and part IV: Service Program Arrangement Natural Resources Management.
- Part IV: Preparation of SDA Management Services Program, number 3, namely the obligation to value the SDA Management Services Program and supporting works that have a direct impact on the agreed power plant, namely at least 35% (thirty five percent) of the BJPSDA estimate which is the obligation of the second party;
- Part IV: Preparation of the SDA Management Services Program, number 6, namely, evaluation of the achievement of the completion of the SDA Management Services Program will be carried out at the end of each semester (6 months) in July of the current year and in January of the following year to evaluate the achievement of 1 year. Based on the consideration of certain conditions and agreed upon by the PARTIES, the scope of work of the SDA Management Service Program in the following semester can be changed during the final evaluation of the semester without changing the total budget within the agreed 1

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang Belum Difakturkan – PT PLN (Persero)
(lanjutan)

- 2) *Progress BJPSDA dan Penyaluran Listrik PLTA Ir. H. Djuanda kepada PT. PLN (Persero) atas piutang yang belum difakturkan dan telah diakui sebagai pendapatan usaha pada tahun (masa jasa) yang bersangkutan dimana jasa telah diberikan oleh PJT II, serta upaya penyelesaian tindaklanjutnya sebagai berikut:*
- a. Untuk tagihan BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda semester II 2019 baru dapat dilakukan pembahasan evaluasi dan verifikasi program manfaat langsung antara PJT II dengan PT. PLN (Persero) pada bulan September 2020, mengingat terdapat kondisi Pandemi Covid 19 dan baru dapat disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi pada tanggal 12 Januari 2021 (terlampir). Selanjutnya, mengacu pada Berita Acara tersebut, dilakukan pembahasan mengenai mekanisme pembayaran dan penerbitan invoice dan faktur pajak, dimana informasi yang disampaikan oleh PIHAK PT PLN (Persero) terdapat perubahan organisasi dan mutasi Pejabat terkait kewenangan dalam menindaklanjuti Evaluasi Verifikasi Program Manfaat Langsung. Oleh karena itu, minggu ketiga bulan Maret 2021 akan diterbitkan invoice dan faktur pajak untuk disampaikan kepada PT. PLN (Persero), sebagai dasar PT PLN merealisasikan pembayaran BJPSDA.
 - b. Untuk tagihan BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda semester I tahun 2020, telah dilakukan pembahasan evaluasi dan verifikasi program manfaat langsung antara PJT II dengan PT. PLN (Persero) mulai bulan Januari 2021, dan direncanakan akan dilakukan pembahasan finalisasi Berita Acara Verifikasi pada akhir Maret 2021.
 - c. Sedangkan untuk tagihan BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda semester II tahun 2020 akan mulai dilakukan pembahasan evaluasi dan verifikasi program manfaat langsung antara PJT II dengan PT. PLN (Persero) secara simultan pada akhir Maret 2021.
 - d. Berdasarkan huruf b dan c diatas, kesepakatan evaluasi dan verifikasi program manfaat langsung antara PJT II dengan PT. PLN (Persero) yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, yang akan diikuti dengan penerbitan invoice dan faktur pajak, serta pembayaran atas BJPSDA tahun 2020, akan dapat direalisasikan pada tahun 2021.

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Accounts Receivable Not Yet Factored - PT PLN (Persero) (continued)

- 2) *Progress of BJPSDA and Electricity Distribution of Hydropower Ir. H. Djuanda to PT. PLN (Persero) for receivables that have not been factored and have been recognized as operating income in the year (service period) concerned where the services have been provided by PJT II, as well as efforts to resolve the follow-up as follows:*
- a. *For the bills for BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda semester II 2019 can only discuss the evaluation and verification of direct benefit programs between PJT II and PT. PLN (Persero) in September 2020, considering that there is a condition for the Covid 19 Pandemic and it has only been agreed by the parties as outlined in the Verification Minutes on January 12, 2021 (attached). Furthermore, referring to the Minutes, a discussion is conducted regarding the payment mechanism and the issuance of tax invoices and invoices, in which the information submitted by the PT PLN (Persero) PARTY contains organizational changes and official mutations related to the authority to follow up the Direct Benefit Program Verification Evaluation. Therefore, in the third week of March 2021, invoices and tax invoices will be issued to be submitted to PT. PLN (Persero), as the basis for PT PLN to realize BJPSDA payments.*
 - b. *For the bills for BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda semester I of 2020, a discussion on the evaluation and verification of direct benefit programs between PJT II and PT. PLN (Persero) starting in January 2021, and it is planned to discuss the finalization of the Verification Minutes at the end of March 2021.*
 - c. *As for the PLTA BJPSDA bill, Ir. H. Djuanda semester II of 2020 will begin to discuss the evaluation and verification of direct benefit programs between PJT II and PT. PLN (Persero) simultaneously at the end of March 2021.*
 - d. *Based on letters b and c above, agreement on evaluation and verification of direct benefit programs between PJT II and PT. PLN (Persero) as outlined in the Verification Minutes, which will be followed by the issuance of invoices and tax invoices, as well as payments for the 2020 BJPSDA, will be realized in 2021.*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang Belum Difakturkan – PT PLN (Persero)
 (lanjutan)

- 3) Kendala yang dihadapi karena Pandemi Covid-19 pada proses pembahasan dan rencana *action plan* sebagai berikut:

6. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Accounts Receivable Not Yet Factored - PT PLN (Persero) (continued)

- 3) Constraints faced due to the Covid-19 Pandemic in the discussion process and action plan are as follows:

No	Dampak / Impact	Tindak Lanjut / Action Plan
1.	Kendala jadwal pembahasan karena kebijakan pemerintah dalam pembatasan berskala besar dan pemberlakuan WFH sehingga agenda pembahasan evaluasi dan verifikasi terlambat. / <i>Discussion schedule constraints were due to government policies in large-scale restrictions and the implementation of WFH so that the evaluation and verification discussion agenda was delayed.</i>	Mendorong TIM PT.PLN (Persero) untuk lebih intens dan kooperatif dalam mengagendakan jadwal evaluasi dan verifikasi BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda. / <i>Encouraging the PT PLN (Persero) TEAM to be more intense and cooperative in scheduling the evaluation and verification schedule for BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda.</i>
2.	Kendala kunjungan lapangan oleh pihak Tim PT PLN sebagai bagian dari kegiatan evaluasi dan verifikasi BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda. / <i>Constraints on field visits by the PT PLN Team as part of the evaluation and verification activities of the PLTA BJPSDA Ir. H. Djuanda.</i>	Akan mengoptimalkan media virtual untuk kegiatan kunjungan lapangan. / <i>Will optimize virtual media for field visit activities.</i>
3.	Kendala koordinasi dan komunikasi dengan pihak TIM PT PLN (Persero) menjadi kurang efektif. / <i>Coordination and communication constraints with the PT PLN (Persero) TEAM are less effective.</i>	Mengoptimalkan media virtual meeting untuk melakukan pembahasan evaluasi dan verifikasi secara lebih efektif. / <i>Optimizing virtual media meetings to conduct evaluation and verification discussions more effectively.</i>
3.	Kendala penyampaian evidence dan dokumen pendukung sebagai bahan evaluasi dan verifikasi, karena adanya kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan berskala besar dan WFH. / <i>Constraints in submitting evidence and supporting documents as material for evaluation and verification are due to government policies in imposing large-scale restrictions and WFH.</i>	Mengoptimalkan sarana media on line melalui email dan cloud dalam penyampaian evidence dan dokumen pendukungnya sebelum hard copy disampaikan kepada pihak PT. PLN (Persero). / <i>Optimizing online media facilities via email and cloud in the delivery of evidence and supporting documents before the hard copy is submitted to PT. PLN (Persero).</i>

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

7. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Piutang Karyawan	2.245.384.059	2.486.793.336	Deposit to employee
Piutang Bunga Deposito	2.388.317.788	1.439.671.233	Receivables to Interest
Panitia Panaksir Harga	12.961.154	12.961.154	Land appraisal committee
Entitas Anak:			Subsidiaries Entity:
Law Offices			Law Offices
Feriyawansyah & Associates	500.000.000	500.000.000	Feriyawansyah & Associates
	5.146.663.001	4.439.425.723	
Dikurangi:			Less:
Provisi penurunan nilai	(2.245.384.059)	(2.245.384.059)	Provision for Impairment value
Jumlah	2.901.278.942	2.194.041.664	Total

Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya) merupakan piutang karyawan atas premi awal yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan.

Receivables to Employee (Jiwasraya Insurance) represent receivables in retirement premium which was initially paid by the Company.

Piutang Bunga Deposito merupakan piutang atas bunga deposito di akhir tahun pelaporan.

Interest receivables-deposit represent interest receivables of time deposits at the end of the period.

Provisi penurunan nilai merupakan pencadangan atas Piutang Karyawan yang tidak mungkin tertagih.

Provision for impairment losses represents provision for uncollectible employee receivables.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Spareparts	747.450.000	1.137.077.554	Fuel
Bahan Baku - AMDK	678.227.237	780.520.263	Ship spare parts
Bahan Kimia	438.190.690	318.183.753	Lubricants materials
Bahan & Perlengkapan Lain	112.000.000	514.275.118	Parts of Equipment Port Facility
Bahan Farmasi	198.740.268	86.033.498	Others
Barang Jadi - AMDK	49.352.066	74.310.780	Stationery and printing
Bahan Makanan & Minuman	29.221.219	171.325.171	Vehicle parts
Bahan Perlengkapan Perhotelan	8.262.050	53.793.500	Parts of Installation Port Facility
Bahan Perlengkapan Bar & Restoran	1.528.165	14.925.000	Equipment Spare parts
	2.262.971.695	3.150.444.637	
Dikurangi:			Less:
Provisi penurunan nilai	(189.283.200)	(602.316.472)	Provision for Impairment value
Jumlah Persediaan, Bersih	2.073.688.495	2.548.128.165	Total Inventories, Net

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

There are no inventories used as collateral for liabilities and other loans.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, burglary dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perusahaan Umum (Perum) terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

Penyisihan persediaan merupakan pencadangan atas beban persediaan di Divisi PLTA yang terdiri dari persediaan Bahan Kimia, *Spareparts*, Bahan dan Perlengkapan Lain yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali yang merupakan pengalihan dari gudang kantor pusat tahun 2006 dan persediaan bahan baku AMDK yang tidak dapat pergunakan lagi/rusak.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya dan telah dilakukan penurunan nilai persediaan.

8. INVENTORIES (continued)

Inventories are not insured against fire, burglary and other risks. Management believes that, the company's inventory is located in several locations, so the possibility of a loss in the same time to multiple locations is very small.

provision supplies upon the supplies in the division of hydroelectric power consisting of chemicals, spareparts, materials and other supplies that had not can be used back which is a Diversion from the warehouse headquarters years 2006 and supplies of raw materials amdk that cannot be used again / broken.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed replacement or recovery value of assets and there are no obsolete inventories in current assets component.

Inventory obsolescence the reclassification into other non-current assets and has conducted impairment of inventories.

9. PERPAJAKAN

a. Uang Muka Pajak:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Pasal 28A	53.346.357.139	48.558.292.403
Jumlah	53.346.357.139	48.558.292.403

Over Payment Article 28A
 Corporate Income Tax
Total

b. Utang Pajak:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PPh Pasal 21	4.296.767.968	4.309.416.834
Titipan Pajak Penerangan Jalan	6.483.851.618	6.152.114.889
Titipan PPN	11.584.268.229	8.096.538.479
PPh Final Lahan	1.864.364.418	1.283.427.852
PPh Pasal 23	624.676.615	415.516.419
PPh Final	678.033.632	103.459.848
Pajak Hotel dan Restoran	44.370.650	154.154.391
PPh Pasal 22	409.732.352	131.618.268
Pajak Parkir	1.009.250	2.269.000
PPh Pasal 4 Ayat 2	-	761.795.272
Jumlah	25.987.074.732	21.410.311.252

Article 21 Income Tax
 Income Tax Article 4 and 23
 Income Tax Article 21
 Income Tax Article 29
 Value Added Tax
 Land and Building Tax
 Hotel and Restaurant Taxes
 Article 22 Income Tax
 Parking Tax
Total

9. TAXES

a. Prepaid Taxes:

b. Tax Payables:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak:

Induk saja

Pajak Kini:

Pajak Final

Pajak Penghasilan Badan

Sub Jumlah

Manfaat Pajak Tangguhan

Jumlah Beban Pajak Induk

Entitas Induk saja

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan laba (rugi) fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba Sebelum Pajak	138.567.215.809	190.365.102.694
Dikurangi:		
Laba sebelum Pajak Perusahaan	138.567.215.809	190.365.102.694

Perbedaan Waktu:

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Beban Penurunan Nilai Piutang

Bonus dan Imbalan

Paska Kerja

Beban Penurunan Persediaan

Beban Pegawai yang Masih

Harus dibayar

Realisasi Pembayaran Beban Pegawai

yang Masih Harus dibayar

Imbalan Psca Kerja

Bagian Laba Asosiasi

9. TAXES (continued)

c. Tax Expenses:

Parent only

Current Taxes:

Final Taxes

Corporate Income Tax

Sub Total

Deferred Taxes Benefits

Total Parent Tax Expenses

Parents Only

A reconciliation between income (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) of the Company is as follows:

	2020	2019
Laba Sebelum Pajak	138.567.215.809	190.365.102.694
Dikurangi:		
Laba sebelum Pajak Perusahaan	138.567.215.809	190.365.102.694

Profit (Loss) Before Tax

Less:

Profit before Tax of the Company

Temporary Differences:

Depreciation and

and Amortization Expenses

Impairment Account Receivable

bonuses and post-

retirement benefits

Allowance for Obsolescence

Accrued Employee

Expenses

Actual Payments of

Accrued Employee Expenses

Post-employment Benefit Expenses

- Associated Company Profit Shares

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak: (lanjutan)

	2020	2019
Koreksi Positif (Negatif)		
<u>Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:</u>		
Kesejahteraan Sosial	9.940.854.683	12.529.890.031
Jamuan	2.490.688.943	1.929.038.899
Majalah dan Surat Kabar	218.133.492	204.692.400
Pendapatan Bunga Deposito		
Pajak Final	(26.372.571.230)	(29.676.109.590)
Pendapatan Sewa Lahan Pajak Final	(50.143.261.874)	(54.325.876.692)
Beban Kerugian Lain-lain	17.987.957.981	17.832.524.379
Beban Perawatan	14.127.024.122	10.452.115.672
Beban Promosi dan Pemasaran	5.370.625.562	14.424.155.057
Beban Sewa Lahan Pajak Final	199.995.000	2.079.265.720
Beban Rupa-rupa	1.908.860.608	2.610.870.355
Jumlah Koreksi	(17.019.756.672)	(23.077.955.774)
Penghasilan Kena Pajak	121.547.459.137	167.287.146.920
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	121.547.459.000	167.287.146.000
Pajak Penghasilan Badan Terutang	26.740.440.980	41.821.786.500
<u>Dikurangi pajak dibayar dimuka:</u>		
Pajak Penghasilan Pasal 22	2.711.772.151	4.529.007.557
Pajak Penghasilan Pasal 23	56.735.441	1.483.163.226
Pajak Penghasilan Pasal 25	77.318.290.527	84.367.908.120
Jumlah	80.086.798.119	90.380.078.903
Kurang (Lebih) Bayar Pajak Kini	(53.346.357.139)	(48.558.292.403)

9. TAXES (continued)

c. Tax Expenses: (continued)

Positive (Negative) Corrections

Expenses that are not deductible
for tax purposes:

Social Welfare
 Entertainment
 Magazine and News Paper
 Deposit Interest Revenue
 Subject to Final Tax
 Final Tax Land Lease Revenue
 Other Expense Losses
 Maintenance Expenses
 Promotion and Marketing Expenses
 Final Tax Lease Expense
 Different Expenses

Taxable Income

**Taxable Income
(Rounded)**

Corporate Income Tax Payable

Less prepaid taxes:

Income Tax Article 22
 Income Tax Article 23
 Income Tax Article 25

Total

**Current Tax Under (Over)
Payment**

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi fiskal menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT.) Pajak Penghasilan (PPH) Badan, mengingat dasar perhitungan pajak penghasilan badan pada SPT. PPh Badan menggunakan laporan keuangan yang diaudit.

d. Pajak Tangguhan:

9. TAXES (continued)

Fiscal reconciliation becomes the basis for the filling of the Corporate Income Tax Annual Notification Letter, considering the basis of the corporate income tax calculation on the Annual Income Tax using the audited financial statements.

d. Deferred Taxes:

		2020			
	Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets (Liabilities) Saldo Awal / Beginning Balance	Dibebankan ke Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss) ')		Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets (Liabilities) Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan Umum (Perum):					The Company:
Provisi Penurunan Nilai					Provision for Impairment
Piutang Usaha	10.033.558.409	344.204.592		10.377.763.000	Value of Receivables
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun	18.190.533.680	14.817.545.195		33.008.078.875	Post-employment Benefit Plan and Pension
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	16.724.728.935	(1.702.434.153)		15.022.294.782	Accumulated depreciation and Amortization
Provisi Penurunan Persediaan	150.579.118	(108.936.813)		41.642.304	Provision Inventory Value
Beban Pegawai yang Masih harus dibayar	6.129.735.393	(2.944.805.131)		3.184.930.261	Employee expenses It still has to be paid
Realisasi Pembayaran Beban Pegawai yang Masih harus dibayar	(4.921.432.115)	1.727.264.969		(3.194.167.146)	Realization of Employee Expense Payments that still has to be paid
Bagian Laba Perusahaan Asosiasi	-	-		-	Profit Section Association Company
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	46.307.703.419	12.132.838.657		58.440.542.076	Total Deferred Tax Assets
		2019			
	Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets (Liabilities) Saldo Awal / Beginning Balance	Dibebankan ke Laba (Rugi) / Charged to Profit (Loss) ')		Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets (Liabilities) Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan Umum (Perum):					The Company:
Provisi Penurunan Nilai					Provision for Impairment
Piutang Usaha	12.423.314.049	(2.389.755.641)		10.033.558.408	Value of Receivables
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun	19.850.882.316	(1.660.348.636)		18.190.533.680	Post-employment Benefit Plan and Pension
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	16.422.035.114	302.693.822		16.724.728.935	Accumulated depreciation and Amortization
Provisi Penurunan Persediaan	150.723.493	(144.375)		150.579.118	Provision Inventory Value
Beban Pegawai yang Masih harus dibayar	5.593.791.233	535.944.160		6.129.735.393	Employee expenses It still has to be paid
Realisasi Pembayaran Beban Pegawai yang Masih harus dibayar	(13.300.917.118)	8.379.485.002		(4.921.432.115)	Realization of Employee Expense Payments that still has to be paid
Bagian Laba Perusahaan Asosiasi	(97.866.336)	97.866.336		-	Profit Section Association Company
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	41.041.962.751	5.265.740.668		46.307.703.419	Total Deferred Tax Assets

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
a. Biaya Dibayar Dimuka	8.188.464.044
b. Uang Muka	12.903.776.355
Jumlah	21.092.240.399

a. Biaya Dibayar Dimuka

Merupakan biaya yang telah dibayar terlebih dahulu atas pembayaran asuransi dan sewa, operasional dan biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Personalia	7.046.178.146
Beban Bahan & Perlengkapan	405.308.610
Umum dan Administrasi	624.853.934
Beban Pemeliharaan	112.123.354
Jumlah	8.188.464.044

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu untuk beban personalia, beban umum dan administrasi, beban bahan dan perlengkapan, beban pemeliharaan dan beban sewa yang telah dibayar dan akan menjadi beban tahun berikutnya.

b. Uang Muka

Merupakan pembayaran uang muka atas kegiatan operasi dan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Konsorsium KSO PT Putra Kencana - PT Shiddiq Sarana Mulya	10.468.920.000
PT. Anugerah Bakti Persada	1.447.893.260
PT. Trina Cipta Karya	549.971.620
PT. Indra Karya	289.760.020
PT Duta Rama	79.956.455
PT Tegar Primajaya	67.275.000
PT. Aritra Prima Abadi	-
PT. Hydro Techno Utama	-
PT. Rinvanda Lestari	-
PT. Repayo Mandiri	-
Jumlah	12.903.776.355

Konsorsium KSO PT Putra Kencana - PT Shiddiq Sarana Mulya Rp10.468.920.000

Merupakan pembayaran uang muka kerja kepada konsorsium KSO PT Putra Kencana - PT Shiddiq Sarana Mulya sebesar Rp10.468.920.000 atau 20% dari biaya pekerjaan Rp52.344.600.000, termasuk PPN 10%, dan biaya-biaya lainnya, sehubungan dengan pekerjaan *Engineering Procurement & Construction (EPC)* Pengembangan SPAM Pamanukan – di Unit Usaha Wilayah III, secara turnkey project, dan jangka waktu pekerjaan mulai 15 Oktober 2020 s.d. 8 November 2021.

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
a. Prepaid Expenses	6.046.166.317
b. Advances	3.778.214.330
Total	9.824.380.647

a. Prepaid Expenses

Represents expenses paid in advance for insurance and rent payments, operating and other expenses as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
General Affairs	5.485.731.105
Material and Supplies Expenses	-
General and Administration	552.445.912
Utilities Expenses	7.989.300
Total	6.046.166.317

This amount is the balance of prepaid expenses as of December 31, 2020 and 2019, namely for personnel expenses, general and administrative expenses, material and equipment expenses, maintenance expenses and rental expenses that have been paid and will become expenses for the following year.

b. Advances

Represents expenses paid-in advance for operating and other expenses as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
KSO Consortium PT Putra Kencana - PT Shiddiq Sarana Mulya	-
PT. Anugerah Bakti Persada	-
PT. Trina Cipta Karya	-
PT. Indra Karya	289.760.020
PT Duta Rama	-
PT Tegar Primajaya	-
PT. Aritra Prima Abadi	1.840.060.200
PT. Hydro Techno Utama	1.134.311.860
PT. Rinvanda Lestari	429.990.000
PT. Repayo Mandiri	84.092.250
Total	3.778.214.330

KSO Consortium PT Putra Kencana - PT Shiddiq Sarana Mulya Rp10.468.920.000

An work advance payment to the KSO consortium PT Putra Kencana - PT Shiddiq Sarana Mulya in the amount of Rp10,468,920,000 or 20% of the work cost of Rp52,344,600,000, including 10% VAT, and other costs, in connection with *Engineering Procurement & Construction (EPC)* Pamanukan SPAM Development - in the Business Unit Region III, on a turnkey project basis, and the work period starts from October 15, 2020 to 8 November 2021.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (lanjutan)

b. Uang Muka (lanjutan)

Lainnya

PT. Anugrah Bakti Persada untuk Pekerjaan Motor dan Gear Box Pompa Utama Air Baku Unit 1 di Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pompa, PT. Trina Cipta Karya untuk Pekerjaan Perpanjangan Persetujuan Operasi Waduk Ir H. Djuanda, PT. Duta Rama untuk pekerjaan Pembangunan Pos Sekuriti & Toilet Intake dan PT Tegar Primajaya untuk Deposit Sewa Kavling.

Jumlah tersebut merupakan pembayaran uang muka pekerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 kepada pihak ketiga.

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES (continued)

b. Advance (continued)

Others

PT. Anugrah Bakti Persada for Motor Work and Gear Box Main Pump for Raw Water Unit 1 in Pump Operation and Maintenance Section, PT. Trina Cipta Karya for Reservoir Operation Approval Extension Works Ir H. Djuanda, PT. Duta Rama for the construction of Security Post & Toilet Intake and PT Tegar Primajaya for Plot Rental Deposits.

The amount represents the advance payment of work as of December 31, 2020 and 2019 to third parties.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Penyertaan saham pada entitas asosiasi sebagai berikut:

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES

Investments in shares in associated companies are as follows:

	Persentase/ Percentage (%)	31 Desember 2019 / December 31, 2019	Pemulihan Akumulasi Rugi / Accumulated Loss Recovery	31 Desember 2020 / December 31, 2020
<u>Metode Ekuitas/Equity Method</u>				
PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara (BUMN HL I)	20,54%	391.465.343	-	391.465.343
<u>Metode Biaya/ Cost Methode</u>				
PT. Air Minum Indonesia	10,00%	100.000.000	-	100.000.000
PT. Padi Energi Nusantara	6,9%	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Cadangan Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment		(2.491.465.343)		(2.491.465.343)
Jumlah/Total		-	-	-

Berdasarkan surat dari PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I Nomor SB/A.II/3790/XI/2008 tanggal 3 November 2008, Perusahaan menginvestasikan dananya sebesar Rp1.400.000.000,- atau 20% dari total modal yang disetor. Pada tahun 2011 dan 2012 Perusahaan menambah modal disetor masing-masing sebesar Rp750.000.000,- dan Rp250.000.000,- sehingga total modal disetor sebesar Rp2.400.000.000,- yang telah diaktakan oleh notaris Irma Rahmawati, SH.

Based on the letter from PT. Bakti Usaha planting Archipelago Green sustainable I number SB/A. II/3790/XI/2008 dated 3 November 2008, the company invested its funds amounting to Rp 1,400,000,000 or 20% of the total paid-up capital. In the years 2011 and 2012 the company added a paid-up capital of Rp 750,000,000 and Rp 250,000,000 so the total paid-up capital amounted to Rp 2,400,000,000 which has been notarized by notary Irma Rahmawati, SH.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Berdasarkan Risalah RUPS PT. BUMN Hijau Lestari I tanggal 6 Mei 2013 bahwa PT. BUMN Hijau Lestari II melakukan Merger (Penggabungan Usaha) dengan PT. BUMN Hijau Lestari I, dengan Akta Penggabungan PT. BUMNHL II ke dalam PT. BUMNHL I yang dibuat oleh Notaris Rachmawati Nomor 16 tanggal 6 Juli 2015 yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 0105825 .AH.01.10.Tahun 2015.

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, menyatakan total modal disetor Perum Jasa Tirta II sebanyak 3.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp3.800.000.000 atau 20,54 % dari total saham ditempatkan sebanyak 18.504 lembar saham.

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT. BUMN HL I yang berlaku efektif serta mengikat sejak tanggal 5 Agustus 2015, pemegang saham menyepakati peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp25.500.000.000,- atau sebanyak 25.500 lembar saham. Atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut perusahaan harus menyetorkan sebesar Rp1.437.000.000,-, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, perusahaan belum melakukan setoran atas penambahan modal tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2449637.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Air Minum Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Air Minum Indonesia Nomor : 04 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Putranto Nur Utomo, SH.,M.Kn, menyatakan modal dasar Perseroan sebesar Rp250.000.000.000,- terbagi atas 250.000 lembar saham. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % atau sejumlah 62.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp62.500.000.000,-.

Berdasarkan surat dari PT. Air Minum Indonesia Nomor : 03/AMI/2015 tanggal 7 September 2015, Perusahaan harus menyetor uang setoran awal sebesar Rp100.000.000,- dari modal ditempatkan sebesar Rp6.250.000.000,- atau 10 % dari total saham ditempatkan sebanyak 62.500 lembar saham.

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES (continued)

Based on the Minutes of the AGM of PT. BUMN Hijau Lestari I dated May 6, 2013 that PT. BUMN Hijau Lestari II conducted a Merger (Merger of Business) with PT. BUMN Hijau Lestari I, with the Merger Deed of PT. BUMNHL II into PT. BUMNHL I made by Notary Rachmawati Number 16 dated July 6 2015 which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU - 0105825 .AH.01.10.Tahun 2015.

About the agreement on the amendment of the limited liability company PT. Bakti Usaha planting Nusantara Hijau Lestari I, expressed the total paid-up capital Perum Jasa Tirta II as many as 3,800 shares with a nominal value of Rp 3.800.000.000 or 20.54% of the total shares Placed as many as 18,504 shares.

Based on the decision of the shareholder of PT. BUMN HL I effective and binding since 5 August 2015, shareholders agreed to raise the issued capital and paid up capital to Rp 25.500.000.000,-or as many as 25,500 sheets Stock. For the increase in the capital is placed and the paid up capital of the company must deposit Rp 1.437.000.000, until 31 December 2018, the company has not made a deposit on the addition of the capital.

Based on decree of the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number: AHU-2449637. AH. 01.01. In 2015 about the ratification of the establishment of PT. Air Minum Indonesia Limited Company and the deed of establishment of PT. Air Minum Indonesia Limited Company Number: 04 dated 30 July 2015, made by notary Putranto Nur Utomo, SH., M. Kn, said The company's authorized capital of Rp 250.000.000.000,-divided into 250,000 shares. From the capital has been placed and deposited 25% or a number of 62,500 shares with a nominal value of Rp 62.500.000.000,-.

Based on the letter from PT. Air Minum Indonesia Number: 03/AMI/2015 dated 7 September 2015, the company must deposit the initial deposit amount of Rp 100,000,000,-from the issued capital of Rp 6.250.000.000,-or 10% of the total stake placed as many as 62,500 shares.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Berdasarkan hasil Financial Due Diligence yang dilakukan oleh PT. Saraswati Perdana, nilai ekuitas proforma PT. PEN per 31 Desember 2012 sebesar Rp882 juta yang terbagi atas 29.000 lembar saham atau Rp30.430,00 per lembar saham. Penyertaan saham perusahaan pada PT. PEN adalah 2.000 lembar saham dengan total nominal Rp2.000.000.000,00, sehingga berdasarkan hasil Due Diligence PT. Saraswati Perdana tersebut nilai saham perusahaan menjadi sebesar Rp60.860.000,00.

Karena kondisi, PT. PEN menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperkirakan nilai penyertaan saham perusahaan pada PT. PEN per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (100%). Penurunan nilai tersebut telah dibukukan pada akhir tahun.

Berdasarkan surat Dirjen Cipta Karya Nomor : PR.01-03-DC/374 pada tanggal 04 april 2017 tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan SPAM Jatiluhur untuk penyediaan air minum wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang yang menyatakan bahwa proyek SPAM Regional Jatiluhur I akan dilaksanakan dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) dimana Perum Jasa Tirta II akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan tidak akan tergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pelaksana Proyek. Untuk itu, Perum Jasa Tirta II agar menarik partisipasi dalam PT. AMI dan melepaskan kepemilikan saham pada PT. AMI dan menarik anggota Direksi dan Dewan Dewan Pengawas yang berasal dari Perum Jasa Tirta II.

Berdasarkan surat dari Kementerian BUMN Nomor : S-899/MBU/2008 tentang persetujuan Pendirian PT. PEN tanggal 17 November 2008 Perusahaan melakukan penyertaan sebesar Rp2.000.000.000,- atau 6,9% dari total modal yang disetor pada PT. PEN, yang telah tercatat dalam akta Pendirian PT. PEN Nomor 12 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Neny Saadah, SH. Berdasarkan Financial Due Diligence konsultan PT. Saraswati Perdana, nilai ekuitas proforma PT. PEN per 31 Desember 2012 sebesar Rp882.000.000 yang terbagi atas 29.000 saham atau Rp30.430 per saham. Penyertaan saham Perusahaan pada PT. PEN adalah 2.000 saham dengan total nominal Rp2.000.000.000.

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES (continued)

Based on the results of the Financial Due Diligence conducted by PT. Saraswati Perdana, the value of the proforma equity of PT. PEN per 31 December 2012 amounted to Rp882 million divided into 29,000 shares or Rp 30.430, 00 per share. The inclusion of the company's shares in PT. PEN is 2,000 shares with total nominal Rp 2.000.000.000, 00, so based on the results of Due Diligence of PT. Saraswati Perdana the company's share value becomes Rp 60.860.000, 00.

Because of the condition, PT. PEN showed a big chance about the ability to maintain its survival, estimated the value of the company's shares in PT. PEN as of 31 December 2013 for Rp0,00 or decreased value of RP 2.000.000.000, 00 (100%). The decline in the value has been booked by the end of the year.

Based on letters from the Director of Cipta Karya number: PR.01-03-DC / 374 on the April 04, 2017 about a follow-up cooperation the implementation of the development reservoir will to drinking water supply Jakarta , Bekasi and Karawang said that project junk regional Jatiluhur I will be implemented with scheme KPBU (Government Engagement Business Entity) where Perum Jasa Tirta II will act as responsible for partnership projects (PJPK) and will not joined for the consortium of business entity the project. For it, Perum Jasa Tirta II to draw participation in PT. AMI, and release share in PT. AMI, and interesting board of directors and the council a board of trustees derived from Perum Jasa Tirta II.

Based on Letter of Ministry of SOE No : S-899/MBU/2008 about the Agreement of PT. PEN establishment dated November 17, 2008, the Company invested Rp 2.000.000.000,- or equal to 6,9% of total paid-in capital of PT. PEN as shown in the Deed of Establishment of PT. PEN No. 12 dated December 30, 2008 which issued by notary Neny Saadah, SH. Based on Financial Due Diligence of PT. Saraswati Perdana, fair value of PT. PEN per December, 31 2012 was at amount of Rp882.000.000 which divided into 29.000 shares or Rp30.430 per shares. Investment in PT. PEN was 2.000 shares or equal to Rp2.000.000.000,-.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Sehingga berdasarkan hasil Due Diligence PT. Saraswati Perdana tersebut nilai saham perusahaan menjadi sebesar Rp60.860.000.000. Karena kondisi PT. PEN menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperkirakan nilai penyertaan saham perusahaan pada PT. PEN per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000.000 (100%). Penurunan nilai tersebut telah dibukukan pada akhir tahun 2013.

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES (continued)

Therefore, based on the Due Diligence of PT. Saraswati Perdana, the shares value became Rp60.860.000,00. The objective conditions of PT. PEN indicates a doubt of going concern. Then the fair value of Company investment in PT. PEN per December, 31 2013 expected to decrease to be at amount of Rp0,00. In otherword, it decreased at amount of Rp2.000.000.000 (100%). The impairment loss have been recorded at the end of 2013.

12. ASET TETAP

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan penurunan nilai serta nilai buku aset tetap sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS

Acquisition cost, accumulated depreciation and impairment, and value book value of fixed assets as follows:

2020					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Reklasifikasi Adjustment/ Reclas- sification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:					Acquisition Costs:
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Tanah	16.635.048.380	-	-	16.635.048.380	Land
Sarana	20.013.287.112	-	-	20.013.287.112	Facilities
Bangunan	167.289.285.545	27.699.142.662	-	194.988.428.207	Building
Suku Cadang	1.653.921.500	-	2.174.415.331	3.828.336.831	Spare Part
Instalasi & Jaringan	644.806.000.467	36.184.234.670	-	678.815.819.806	Network & Installation
Alat Angkut & Alat Berat	42.668.500.462	20.418.714.300	-	63.087.214.762	Transportation & Heavy Equipment
Perabot & Peralatan	143.541.319.079	21.594.695.709	-	165.136.014.788	Supplies & Equipments
Aset Tanaman Konservasi	7.510.296.025	-	-	7.510.296.025	Plant Conservation Assets
Sub Jumlah	1.044.117.658.570	105.896.787.341	-	1.150.014.445.911	Sub Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Reklasifikasi Adjustment/ Reclas- sification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan dan Penurunan Nilai					Dep. and Impairment Value:
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Sarana	10.164.723.384	903.786.162	-	-	11.068.509.546 Facilities
Bangunan	64.027.218.979	7.348.646.342	-	-	71.375.865.321 Building
Suku Cadang	1.653.920.500	262.739.174	-	45.227.839	1.961.887.513 Spare Part
Instalasi & Jaringan	276.641.942.309	27.175.349.135	-	(45.227.839)	303.772.063.605 Network & Installation
Alat Angkut & Alat Berat	41.991.304.246	2.161.034.936	-	-	44.152.339.183 Transportation & Heavy Equipment
Perabot & Peralatan	112.723.894.632	12.866.565.884	-	-	125.590.460.516 Supplies & Equipments
Aset Tanaman					Plant Conservation
Konservasi	536.625.973	187.757.401			724.383.375 Assets
Sub Jumlah	507.739.630.024	50.905.879.034	-	-	558.645.509.058 Sub Total
Nilai Buku	536.378.028.546				591.368.936.853 Book Value
Aset Dalam					Assets Under
Konstruksi	4.020.769.720	34.807.263.380	30.503.604.780	-	8.324.428.320 Construction
Aset Tetap, Bersih	540.398.798.266				599.693.365.173 Fixed Assets, Net
2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Reklasifikasi Adjustment/ Reclas- sification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan:					Acquisition Costs:
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Tanah	16.635.050.480	-	2.100	-	16.635.048.380 Land
Sarana	19.092.741.563	920.545.549	-	-	20.013.287.112 Facilities
Bangunan	99.530.721.833	67.759.554.612	990.900	-	167.289.285.545 Building
Suku Cadang	1.653.921.500	-	-	-	1.653.921.500 Spare Part
Instalasi & Jaringan	542.434.014.523	102.371.985.944	-	-	644.806.000.467 Network & Installation
Alat Angkut & Alat Berat	42.668.500.462	-	-	-	42.668.500.462 Transportation & Heavy Equipment
Perabot & Peralatan	124.848.319.125	18.692.999.954	-	-	143.541.319.079 Supplies & Equipments
Aset Tanaman					Plant Conservation
Konservasi	7.510.296.025	-	-	-	7.510.296.025 Assets
Sub Jumlah	854.373.565.511	189.745.086.059	993.000	-	1.044.117.658.570 Sub Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Reklasifikasi Adjustment/ Reclas- sification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan dan Penurunan Nilai:					Dep. and Impairment Value:
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct Ownership</u>
Sarana	9.267.805.042	896.918.342	-	-	10.164.723.384 Facilities
Bangunan	59.544.544.638	4.483.664.241	989.900	-	64.027.218.979 Building
Suku Cadang	1.653.920.500	-	-	-	1.653.920.500 Spare Part
Instalasi & Jaringan	252.096.051.304	24.545.891.005	-	-	276.641.942.309 Installation
Alat Angkut & Alat Berat	40.841.450.697	1.149.853.549	-	-	41.991.304.246 Transportation & Heavy Equipment
Perabot & Peralatan	100.688.216.827	12.035.677.805	-	-	112.723.894.632 Supplies & Equipments
Aset Tanaman					Plant Conservation
Konservasi	348.868.572	187.757.401	-	-	536.625.973 Assets
Sub Jumlah	464.440.857.581	43.299.762.343	989.900	-	507.739.630.025 Sub Total
Nilai Buku	389.932.707.930				536.378.028.545 Book Value
Aset Dalam					Assets Under
Konstruksi	86.118.598.181	46.809.152.260	128.906.980.721	-	4.020.769.720 Construction
Aset Tetap, Bersih	476.051.306.111				540.398.798.265 Fixed Assets, Net

Aset tetap tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya untuk 31 Desember 2020 dan 2019. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada resiko kerugian kebakaran dan resiko lainnya.

Fixed assets are not insured against fire and other risks for 31 December 2020 and 2019. Management believes that there is no risk of fire losses and other risks.

Manajemen menerapkan PSAK 57: Provisi Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi atas tukar menukar tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di kampung Bongas saat ini telah diselesaikan. Sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan. (lihat catatan 25)

Management applies PSAK 57: Provision of Contingent Liabilities and Contingent Assets in exchange for land owned by Perum Jasa Tirta II located in Ciganea with replacement land located in the village of Bongas currently completed. So that the replacement land located in Kampung Bongas was recorded as a Company asset. (see note 25)

Tidak ada pelepasan aset atau aset usul hapus dalam tahun 2020 sampai dengan per tanggal laporan ini diterbitkan.

There will be no disposal of assets or proposed assets for write-offs in 2020 up to the date this report is published.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Tidak ada potensi penurunan nilai pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Beban penyusutan yang disajikan di beban usaha tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp50.905.879.035 dan Rp43.299.762.344, dengan alokasi sebagai berikut:

	2020	2019	
Beban Penyusutan SDA	37.933.168.053	33.140.549.027	SDA Depreciation Expenses
Beban Penyusutan Non SDA	8.685.180.354	5.707.200.291	Non SDA Depr. Expenses
Beban Umum & Adm. - Beban Penyusutan	4.287.530.628	4.452.013.026	G & A Expenses: Depreciation Expenses
Jumlah	50.905.879.035	43.299.762.344	Total

Nilai aset tetap dalam pelaksanaan (ATDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.324.428.320 secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

There is no potential for impairment at the statement of financial position (balance sheet) date. Depreciation expense presented in operating expenses for 2020 and 2019 amounted to Rp50.905.879.035 and Rp43.299.762.344 respectively, with the following allocations:

Fixed assets - construction in progress as of December 31, 2020 the amount of Rp8.324.428.320 in detail can be explained as follows:

No.	Uraian / Description	Nomor & Tanggal Kontrak / Agreement Number & Date	Nilai Kontrak / Agreement Value	Nomor & Tanggal BAST / Number & Date of Minutes of Project Handover	Nilai Aset Tetap Dalam Pelaksanaan (ATDP) / Fixed Asset Value In Implementation (ATDP)	Nilai Aset Tetap Dalam Pelaksanaan (ATDP) / Fixed Assets - Construction in Progress Value	Estimasi Penyelesaian / Estimated Completion
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga / Procurement of household appliances.				3.828.286.000	Progress Pekerjaan tersebut sesuai BAST mencapai / Working progress according to Minutes of Project Handover reaches: 80%	28 Feb. 2020
2	ATDP Perencanaan Rehabilitasi Kantor Perwakilan dan Kantor Balai UJW II / Planning for the Rehabilitation of Representative Office & Balai Office in UJW II.	11/DIR/04/SPU-JKONS/2018, Tanggal / Dated 25 Apr. 2018 Addendum : 11/DIR/01/ADD-SPU.JKONS/2018, Tanggal / Dated 20 Jul. 2018	1.870.165.000	11/DIR/33/BAST.Kons/2018 Tanggal / Dated 26 Okt. / Oct. 2018	1.870.165.000	Pekerjaan tersebut Selesai / Work done (Progress 100%)	Masih dalam proses kapitalisasi / Still in the process of capitalization.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

No.	Uraian / Description	Nomor & Tanggal Kontrak / Contract Number & Date	Nilai Kontrak / Contract Value	Nomor & Tanggal BAST / BAST Number & Date	Nilai Aset Tetap Dalam Pelaksanaan (ATDP) / Fixed Asset Value In Implementation (ATDP)	Progress Pelaksanaan Pekerjaan Per 31 Des. 2020 / Progress of Work Implementation as of December 31. 2020	Estimasi Penyelesaian / Estimated Completion
3	ATDP Infrastruktur Sistem IT (Penyusunan IT Masterplan dan Implementasi Sistem Integrasi (Enterprise Resource Planning) / IT System Infrastructure (IT Masterplan & Integrated System Implementation (ERP) - Perum Jasa Tirta II.	10/DII/01/SPU.JKONS/2018, Tanggal / Dated 7 Mei / May 2018	1.955.129.000	TP-ITMP - ERP/01/BA-STHP/2018, Tanggal / Dated 13 Agt./Aug 2018	782.051.600	Menunggu Pelaksanaan ERP sesuai RKAP 2021 / Waiting for the ERP implementation according to Workplan & Budget 2021	Menunggu Pelaksanaan ERP sesuai RKAP 2021 / Waiting for the ERP implementation according to Workplan & Budget 2021
4	Sertifikasi Lahan Kantor Seksi Cipamingkis, Lahan Kalimati Bekasi dan Lahan Kantor Seksi STB Bekasi / Land Certification for the Section Office in Cipamingkis, Land of Kalimati in Bekasi, and the Section Office Area at STB Bekasi.	SPU.Jkons-02/IPA.DKS/12/2019, Tanggal / Dated 18 Des. 2019	2.000.577.500	BA.ST-24/ALP.DKS/11/2020, Tanggal / Dated 02 Nov. 2020	600.173.250	Progress Pekerjaan tersebut sesuai BAST mencapai / Working progress according to Minutes of Project Handover reaches: 30%	13 Apr. 2021
5	ATDP Persiapan Lahan dan Lingkungan kerja SPAM Curug / Land Preparation & Work Environment at SPAM in Curug.	-	490.524.320	11/DIR/01/BA.S TP/2017, Tanggal / Dated 27 Feb.2017	490.524.320	Pekerjaan tersebut Selesai / Work done (Progress 100%)	Masih dalam proses kapitalisasi / Still in the process of capitalization.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

No.	Uraian / Description	Nomor & Tanggal Kontrak / Contract Number & Date	Nilai Kontrak / Contract Value	Nomor & Tanggal BAST / BAST Number & Date	Nilai Aset Tetap Dalam Pelaksanaan (ATDP) / Fixed Asset Value In Implementation (ATDP)	Progress Pelaksanaan Pekerjaan Per 31 Des. 2020 / Progress of Work Implementation as of December 31. 2020	Estimasi Penyelesaian / Estimated Completion
6	Sertifikasi Lahan Pasir Banteng / Banteng Pasir Land Certification	SPU.Jkons-01/IPA.DKS/12/2019, Tanggal / Dated 18 Des. 2019 Addendum : SPU.Jkons-4/ADD/ALP.DKS/08/2020, Tanggal / Dated 06 Agt / Aug. 2020	1.552.908.000	BA.ST-22/ALP.DKS/11/2020, Tanggal / Dated 2 Nov. 2020	465.872.400	Progress Pekerjaan tersebut sesuai BAST mencapai / Working progress according to BAST reaches: 30%	13 Agt. / Aug. 2021
7	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan SPAM Pamanukan / Work of Supervisory Consulting Service on The Development of SPAM in Pamanukan.	SPU.Jkons-09/PU.DPU/10/2020, Tanggal / Dated 15 Okt./Oct. 2020	679.580.000	BA.ST-56/PU.DPU/12/2020 Tanggal / Dated 14 Des./Dec. 2020	203.874.000	Progress Pekerjaan tersebut sesuai BAST mencapai / Working progress according to BAST reaches: 30%	21 Jun. 2021
8	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Instalasi PLTA / Work of Supervisory Consulting Services of Hydropower Installation.	SP.UPBJ-41/GMPLTA.DPU/10/2020, Tanggal / Dated 12 Okt./Oct. 2020	556.545.000	BA.STHP.SP-07/GMPLTA.DOP/12/2020, Tanggal / Dated Des./Dec. 2020	83.481.750	Progress Pekerjaan tersebut sesuai BAST mencapai / Working progress according to BAST reaches: 15%	06 Okt. / Oct. 2021
9	ATDP Rehabilitasi Instalasi WTP & Conveyor AMDK / Rehabilitation of WTP Installation & Conveyor AMDK	11/DIR/13/SPU-JK/2018, Tanggal / Dated 18 Jul. 2018	1.756.057.600	BA.ST-339/PP.DIR/11/2019 Tanggal / Dated 29 Nov. 2019	-	Progress Pekerjaan tersebut sesuai BAST mencapai / Working progress according to BAST reaches: 81,27%	Telah dikapitalisasi pada akhir tahun 2020 / Has been capitalized as fixed assets at the end of year 2020.
Jumlah / Total					8.324.428.320		

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET HAK GUNA (AHG)

13. USED RIGHT ASSETS

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Biaya Perolehan	4.144.111.316	-	Cost of Acquisition
Amortisasi dan Penurunan Nilai	(1.770.313.418)	-	Amortization and Impairment Value
Nilai Buku	2.373.797.898	-	Book Value

Biaya perolehan AHG Rp.4.144.111.316 serta akumulasi amortisasi dan penurunan nilai Rp.1.770.313.418 merupakan pengakuan atas biaya sewa aset yang sebelumnya diakui sebagai beban sewa, yang terdiri dari:

- a. Sewa Menyewa Kavling PT Tegar Mandiri Cemerlang (Anak Perusahaan PT Jasa Tirta Luhur) kepada PT Tegar Primajaya, dengan perjanjian senilai Rp4.036.500.000 berdasarkan "Perjanjian Sewa Menyewa Kavling" nomor: 031/TP-LGL/ADD-1/IX/2020, tanggal 8 September 2020, jangka waktu 5 tahun berdasarkan masa penggunaan objek sewa tersebut.

Nilai Perjanjian tersebut berdasarkan perhitungan PSAK 73 tentang "Aset Hak Guna" setelah dihitung dengan tingkat bunga rata-rata 4%, menjadi Nilai Aset Hak Guna sebesar Rp3.259.156.400

Amortisasi Aset Hak Guna Rp1.249.343.287 merupakan dampak atas masa penggunaan Aset Hak Guna tersebut sampai dengan per 31 Desember 2020.

- b. Sewa menyewa kendaraan PT Jasa Tirta Luhur (Induk Perusahaan) kepada PT Adi Sarana Armada, dengan perjanjian senilai Rp661.090.896 berdasarkan "Perjanjian Sewa Kendaraan" nomor: 1200008719/LEG/XI/18, tanggal 28 November 2018, jangka waktu 36 bulan berdasarkan masa penggunaan objek sewa tersebut.

Nilai Perjanjian tersebut berdasarkan perhitungan PSAK 73 tentang "Aset Hak Guna" setelah dihitung dengan tingkat bunga 6,5% per 1 Agustus 2019 (pada saat awal pemakaian), menjadi Nilai Aset Hak Guna sebesar Rp884.954.915.

Amortisasi Aset Hak Guna Rp520.970.131 merupakan dampak atas masa penggunaan Aset Hak Guna tersebut sampai dengan per 31 Desember 2020.

Tidak ada penurunan nilai atas aset hak guna per 31 Desember 2020.

Right to Use Assets Rp. 4,144,111,316 and accumulated amortization and impairment value of Rp. 1,770,313,418 are recognition of asset rental costs which were previously recognized as rental expenses, which consisted of:

- a. Lease to lease a Plot of PT Tegar Mandiri Cemerlang (a subsidiary of PT Jasa Tirta Luhur) to PT Tegar Primajaya, with an agreement worth Rp4.036.500.000 based on the "Plot Leasing Agreement" number: 031 / TP-LGL / ADD-1 / IX / 2020, dated September 8, 2020, a period of 5 Years based on the period of use of the object for lease.

The value of the Agreement is based on the calculation of PSAK 73 concerning "Right to Use Assets" after being calculated with an average interest rate of 4%, to become a Use Rights Asset Value of Rp3,259,156,400.

Amortization of Use Rights Assets Rp1.249.343.287 is the impact of the use period of the Use Rights Assets up to 31 December 2020.

- b. PT Jasa Tirta Luhur (Parent Company) vehicle lease to PT Adi Sarana Armada, with an agreement worth Rp.661,090,896 based on the "Vehicle Rental Agreement" number: 1200008719 / LEG / XI / 18, November 28, 2018, period of 36 months based on the period the use of the object for lease.

The value of the Agreement is based on the calculation of PSAK 73 concerning "Right to Use Assets" after being calculated at an interest rate of 6.5% as of August 1, 2019 (at the time of initial use), to become a Use Rights Asset Value of Rp.884,954,915.

Amortization of Use Rights Assets Rp520,970,131 is the impact of the use period until 31 December 2020.

There is no impairment of use rights assets as of December 31, 2020.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian aset tidak lancar lainnya sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Biaya Perolehan:	
Kelebihan Bayar Pajak (PPh Pasal 28A)	101.904.649.542
Keanggotaan Pengembangan Pariwisata	213.500.000
Barang Usang / Besi Tua	6.379.400
Aset Tidak Produktif	698.400
Jumlah	102.125.227.342

Kelebihan Bayar Pajak PPh pasal 28A

Saldo PPh pasal 28A per 31 Desember 2020 sebesar Rp101.904.649.542 terdiri dari Taksiran Klaim Kelebihan Pembayaran Pajak tahun 2019 sebesar Rp48.558.292.403 dan dari tahun 2020 sebesar Rp53.346.357.139. Sedangkan saldo PPh pasal 28A per 31 Desember 2019 sebesar Rp79.749.612.330 terdiri dari Taksiran Klaim Kelebihan Pembayaran Pajak tahun 2018 sebesar Rp31.191.319.927 dan tahun 2019 Rp48.558.292.403.

Sesuai surat panggilan No: S-198/WPJ.19/KP.03/2021, tanggal 18 Januari 2021, pihak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Tiga Besar meminta klarifikasi atas PPh pasal 28A tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 belum ada tindak lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Keanggotaan Pengembangan Pariwisata

Keanggotaan pengembangan pariwisata di PT. Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya Golf & Country Club Bogor) adalah sebesar USD 90.000.00 dengan kurs 1 USD = Rp5.800,- yang didasarkan pada SK Direksi No.1/334/KPT.S/2001 tanggal 14 September 2001 dan Karawang Bukit Golf sebesar Rp253.000.000,- berdasar SK Direksi nomor : 1/236.2/KPT.S/2001 tanggal 26 Juni 2011 dalam rangka pengembangan Kepariwisataaan Jatiluhur.

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Details of other non-current assets as follows:

31 Desember 2019/ December 31, 2019
79.970.190.130

Acquisition Costs:
 Tax Overpayment
 (Income Tax Art. 28)
 Tourism Development
 Membership
 Obsolescence
 Nonproductive Assets
Total

Overpayment of Income Tax Article 28A

The balance of Income Tax Article 28A as of December 31, 2020, amounting to Rp101.904.649.542 consists of the 2019 Tax Overpayment Claims of IDR 48.558.292.403 and from 2020 IDR 53.346.357.139. Meanwhile, the balance of Income Tax Article 28A as of December 31, 2019 was IDR 79.749.612.330, consisting of the estimated Tax Overpayment Claims in 2018 amounting to IDR 31.191.319.927 and in 2019 IDR 48.558.292.403.

In accordance with summons No: S-198 / WPJ.19 / KP.03 / 2021, dated 18 January 2021, The Kantor Pelayanan Pajak Wajib Tiga Besar asking for clarification of the 2019 Income Tax Article 28A, while for 2020 there has been no follow-up from the Kantor Pelayanan Pajak (Tax Service Office) concerned.

Tourism Development Membership

Tourism membership in PT. Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya Golf & Country Club Bogor) is at USD 90,000,- at the exchange rate 1 USD = Rp5.800,- as shown in Directors Decree No.1/334/KPT.S/2001 dated September 14, 2001 and Karawang Bukit Golf at Rp253.000.000,- as shown in Directors Decree No. 1/236.2/KPT.S/2001 dated June 26 2011. It was for Jatiluhur Tourism development.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Keanggotaan Pengembangan Pariwisata (lanjutan)

Sesuai Laporan Tim Klarifikasi dan Evaluasi Keikutsertaan Perusahaan di Keanggotaan Rancamaya, Sedana Golf & Club tanggal 15 Maret 2007, didasarkan pada Surat Penugasan Direksi PJT II nomor : 01/39/SPN/2007, diperoleh kesimpulan bahwa nilai jual/nilai pasar keanggotaan Rancamaya, Sedana Golf & Country Club adalah sebesar Rp213.500.000,- Sampai dengan tahun 2014 belum ada Klarifikasi dan Evaluasi Keikutsertaan Perusahaan di Keanggotaan Rancamaya, Sedana Golf & Country Club. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai jual/nilai pasar keanggotaan belum ada perubahan.

Barang Usang / Besi Tua

Saldo Barang Usang/Besi Tua merupakan reklasifikasi dari akun Persediaan.

Aset Tidak Produktif

Aset tidak produktif merupakan saldo aset tanah milik Perusahaan Ciganea yang digunakan untuk jalan Tol Cipularang. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan lahan pengganti yang terletak di kampung Bongas Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan luas 40.230 m2 melalui pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tingkat II Purwakarta.

Direksi telah mengirim surat ke Kementerian BUMN Cq.Deputi Bidang Usaha Industri Primer tanggal 28 November 2013 perihal Laporan Perkembangan Penyelesaian Permasalahan dan Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Milik Perusahaan dengan Mekanisme Tukar Menukar.

Tukar menukar tanah milik Perusahaan yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di kampung Bongas saat ini telah diselesaikan. Sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan namun untuk tanah Ciganea sampai saat ini belum dapat dikeluarkan dari daftar aset perusahaan. Hal ini disebabkan karena harus menunggu persetujuan Kementerian untuk dilakukan penghapusan. (lihat catatan 12)

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Tourism Development Membership (continued)

Based on the report of Clarification and Evaluation Team, the membership of the Company in Rancamaya, Sedana Golf & Club dated March 15, 2007, based on Assignment Letter of Directors of the Company No. 01/39/SPN/2007, obtained a conclusion that Rancamaya Membership, Sedana Gold & Country Club's market value was at Rp213.500.000,- . There's no further Clarification and Evaluation of the Company Participation in Rancamaya Membership, Sedana Golf & Country Club. Management believes that the market value of membership is at the same amount.

Obsolescence

The obsolescence balance represents reclassification from inventories.

Nonproductive Assets

Non-productive assets represent land owned by the Company in Ciganea that built for Cipularang Toll road. The Ministry of Public Works has prepared a replacement land that located in Bongas village, Sindangkasih, Purwakarta, Purwakarta District with an area of 40.230 m2 through discussion conducted by The Land Procurement of Purwakarta District Level II Committee.

The Directors had sent a letter to Ministry of Stated Owned Enterprises (SOE) in which case the Deputy of Primary Industry dated November 28, 2013 regarding The Progress Report of Solving Problems and The Write-off the Company's Fixed Assets Proposed in an exchange scheme.

The Company's land exchange scheme located in Ciganea with the replacement land which is located in Bongas village, has not been resolved yet. So the replacement land located in Bongas village has not been recorded as Company's assets. Land in Ciganea may not be removed out of the company's assets list. (see note 12)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA

Merupakan utang kepada rekanan/pemborong yang timbul dari pembelian barang, penerimaan jasa dan pemborongan pekerjaan dalam rangka kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum), terdiri dari:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pihak Berelasi	13.884.569.985
Pihak Ketiga	32.657.367.179
Jumlah	46.541.937.164

Rincian utang usaha berdasarkan supplier sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pihak Berelasi:	
PT. Raharja Putra Perkasa	6.491.354.101
PT. Pilar Jati Persada	1.948.301.300
Koperasi Karya Bakti Raharja	1.380.075.400
PT. Sucofindo Advisory Utama	942.734.100
PT. Industri Nuklir Indonesia (Persero)	743.933.300
PT. Sucofindo (Persero)	719.348.900
PT. Indra Karya (Persero)	690.954.000
PT. Surveyor Indonesia	502.417.300
PT. Bahana Kapital Investa	-
Lain-lain (dibawah Rp500 Juta)	465.451.584
Sub Jumlah	13.884.569.985

Pihak Ketiga:

PT. Prima Pesona Adi Kreasi	3.182.554.100
PT. Jiona Sejati	2.858.689.900
PT. Rama Kasih Sempurna	2.767.943.767
PT. Duta Rama	1.708.247.514
PT. Basuki Ramanta Putra	1.696.418.900
Kantor Hukum Fazar Agung & Partner Law Firm	1.385.200.000
CV. Tri Putri Dewi	978.183.800
PT. Prima Shina Cahaya	972.505.600
PT. Seliacipta Bestari Lima	904.750.000
PT. Altha Dyanusa Consulting	884.903.580
PT. CV. Orindo	681.775.380
KAP Djoko Sidik & Indra	637.237.480
PT. Modern Widya Technical	619.490.476
PT. Wahana Pengembangan Usaha	612.523.175
CV. Aji Purwa Pratama	598.545.200
PT. Sirara Agung Jaya	572.660.000
PT. Ribka Putri Sejati	562.728.100
PT. Adi Sarana Armada	548.110.200
PT. Ivibi Teruna Persada	538.573.200
Lain-lain (dibawah Rp500 Juta)	9.946.326.807
Sub Jumlah	32.657.367.179

15. ACCOUNT PAYABLES

Represents debt to the counterparty / contractor arising from the purchase of goods, receipt of services and employment in the framework of the Company's business activities, consisting of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Pihak Berelasi	9.775.612.926
Pihak Ketiga	29.844.654.145
Total	39.620.267.071

Details of trade payables based on supplier as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Related Parties:	
PT. Raharja Putra Perkasa	4.882.442.946
PT. Pilar Jati Persada	-
Koperasi Karya Bakti Raharja	-
PT. Sucofindo Advisory Utama	-
PT. Industri Nuklir Indonesia (Persero)	-
PT. Sucofindo (Persero)	-
PT. Indra Karya (Persero)	-
PT. Surveyor Indonesia	1.659.541.180
PT. Bahana Kapital Investa	1.155.000.000
Others (below than Rp500 Million)	2.078.628.800
Sub Total	9.775.612.926

Third Parties:

PT. Prima Pesona Adi Kreasi	-
PT. Jiona Sejati	-
PT. Rama Kasih Sempurna	-
PT. Duta Rama	1.699.127.273
PT. Basuki Ramanta Putra	-
Kantor Hukum Fazar Agung & Partner Law Firm	-
CV. Tri Putri Dewi	1.340.433.600
PT. Prima Shina Cahaya	-
PT. Seliacipta Bestari Lima	-
PT. Altha Dyanusa Consulting	-
PT. CV. Orindo	-
KAP Djoko Sidik & Indra	-
PT. Modern Widya Technical	-
PT. Wahana Pengembangan Usaha	-
CV. Aji Purwa Pratama	-
PT. Sirara Agung Jaya	-
PT. Ribka Putri Sejati	-
PT. Adi Sarana Armada	898.880.400
PT. Ivibi Teruna Persada	-
Others (below than Rp100 Million)	25.906.212.872
Sub Total	29.844.654.145

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan biaya yang belum dibayar pada akhir tahun, tetapi jasanya telah diberikan sesuai progress fisik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Beban Pegawai	14.476.955.733	24.518.941.573
Beban Non Pegawai	6.901.701.138	8.752.486.833
Sub Jumlah	21.378.656.871	33.271.428.406

Rincian Beban Akrua Pegawai:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Beban Jasa Produksi	-	10.712.045.472
Beban Pegawai Lainnya	4.476.955.733	1.306.896.101
Sub Jumlah	4.476.955.733	12.018.941.573
Tantiem	10.000.000.000	12.500.000.000
Jumlah	14.476.955.733	24.518.941.573

16. ACCRUED EXPENSES

This account represents unpaid expenses at the end of the year, but his service have been granted in accordance with on the basis of physical progress and/or applicable term of regulation, with details as follows:

Employee Expenses	
Non Employee Expenses	
Sub Total	

Details of Employee Accrual Expenses:

Services Production Expenses	
Other Expenses	
Sub Total	
Tantiem	
Total	

17. LIABILITAS SEWA JANGKA PENDEK

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	355.757.131	-
Jumlah	355.757.131	-

Liabilitas Sewa Jangka Pendek Rp355.757.131 terdiri dari:

- a. Rp325.375.313 yang merupakan Liabilitas Sewa Jangka Pendek atas sewa menyewa Kavling PT Tegar Mandiri Cemerlang (Anak Perusahaan PT Jasa Tirta Luhur) kepada PT Tegar Primajaya, dengan perjanjian senilai Rp4.036.500.000 berdasarkan "Perjanjian Sewa Menyewa Kavling" nomor: 031/TP-LGL/ADD-1/IX/2020, tanggal 8 September 2020, jangka waktu 5 Tahun berdasarkan masa penggunaan objek sewa tersebut. (Lihat Catatan 12)

Liabilitas Sewa Jangka Pendek Rp325.375.313 merupakan kewajiban perusahaan yang akan di selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, dari keseluruhan kewajiban perusahaan atas perjanjian sewa menyewa kavling sebesar Rp3.609.154.614, yang saat ini nilai per 31 Desember 2020 sudah menjadi 1.797.122.635. Lihat Catatan 19.

17. SHORT TERM LEASE LIABILITIES

Short-term lease liabilities Rp355.757.131 consist of:

- a. Rp325.375.313 which represents Short Term Lease Liability for the lease of Plot of PT Tegar Mandiri Cemerlang (a subsidiary of PT Jasa Tirta Luhur) to PT Tegar Primajaya, with an agreement worth Rp4.036.500.000 based on "Plot Leasing Agreement" number: 031 / TP-LGL / ADD-1 / IX / 2020, September 8, 2020, a period of 5 Years based on the period of use of the object for rent. (See Note 12)

Short-term lease liability of Rp.325.375.313 represents the company's obligation that will be settled within the next 1 year, of the company's total liabilities for the lease agreement amounting to Rp3.609.154.614, of which the current value as of December 31, 2020 has become 1.797.122.635. See Note 19.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. LIABILITAS SEWA JANGKA PENDEK (lanjutan)

- b. Rp30.381.818 yang merupakan Liabilitas Sewa Jangka Pendek atas sewa menyewa Kendaraan PT Jasa Tirta Luhur (Induk Perusahaan) kepada PT Adi Sarana Armada, dengan perjanjian senilai Rp661.090.896 berdasarkan "Perjanjian Sewa Kendaraan" nomor: 1200008719/LEG/XI/18, tanggal 28 November 2018, jangka waktu 36 bulan berdasarkan masa penggunaan objek sewa tersebut. (Lihat Catatan 13)

Liabilitas Sewa Jangka Pendek Rp30.381.818 merupakan kewajiban perusahaan yang akan di selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, dari keseluruhan kewajiban perusahaan atas perjanjian sewa menyewa kavling sebesar Rp373.209.198, yang saat ini nilai per 31 Desember 2020 sudah menjadi Rp356.755.292. (Lihat Catatan 19)

17. SHORT TERM LEASE LIABILITIES (continued)

- b. Rp30,381,818 which is a Short Term Lease Liability for the lease of PT Jasa Tirta Luhur (Parent Company) Vehicle to PT Adi Sarana Armada, with an agreement worth Rp.661,090,896 based on the "Vehicle Rental Agreement" number: 1200008719 / LEG / XI / 18, dated November 28, 2018, a period of 36 months based on the period of use of the object for lease. (See Note 13)

Short-term lease liability of Rp.30,381,818 is the company's obligation that will be settled within the next 1 year, of the company's total liabilities for the lease agreement amounting to Rp.373,209,198, which currently the value as of December 31, 2020 has become Rp. (See Note 19)

18. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

18. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
a. Utang Lain-Lain	18.356.010.080	16.830.531.810
b. Pendapatan Diterima Dimuka	33.160.839.519	30.206.250.717
Jumlah	51.516.849.599	47.036.782.527

a. Utang Lain-Lain

Merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Kontribusi kepada Pemda	10.241.148.752	10.241.148.752
Lain-lain*)	6.026.699.714	4.888.354.278
Uang Jaminan Rekanan	527.439.012	526.113.012
Titipan Angsuran Rumah Dinas	529.544.418	428.134.233
BPJS	291.035.539	314.536.144
Asuransi	620.993.846	256.963.627
Jasa Pelayanan Tamu (Service)	37.924.356	94.057.321
Dana Sosial dan Pendidikan	72.586.943	72.586.943
Titipan Angsuran Kendaraan	8.637.500	8.637.500
Jumlah	18.356.010.080	16.830.531.810

Kontribusi Kepada Pemda Jabar dan Pemda Kabupaten Bandung merupakan saldo utang atas retribusi pendapatan penjualan air sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Perum Jasa Tirta II dikarenakan kontrak dengan Pemda Jabar masih dalam proses.

- a. Other Payables
 b. Prepaid Income
Total

a. Other Payables

Is a deposit of funds received from the other party to be calculated according to the purpose, comprising of:

Contribution To Local Government
 (*Others
 Associated Deposit
 Home Officer Installment Deposit
 BPJS
 Insurance
 Services Taxes
 Social and Education Fund
 Automobile installment Deposit

Total

Contributed Deposit to West Java and Bandung Local Governments is Payable from Water Sales Revenue Retribution with applied condition, up to this date have not been paid by Perum Jasa Tirta II because Contract with West Java Local Governments still in process.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA
 (lanjutan)

a. Utang Lain-Lain (lanjutan)

Uang Jaminan Rekanan merupakan titipan rekanan
 untuk keperluan pemenuhan kontrak kerja dengan
 Perum Jasa Tirta II.

* Lain-lain merupakan penerimaan dari pihak lain
 yang masih perlu dilakukan identifikasi.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Pihak Berelasi:		
PT. Perusahaan Gas Negara Tbk	5.000.920.225	5.965.403.365
PT. Pertamina (Persero)	4.600.810.177	6.267.814.418
PT. Waskita Karya	225.631.750	484.615.917
PDAM Kab. Indramayu	116.059.832	-
PT. Waskita Modern Realty	104.332.250	-
Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	494.367.873	788.281.858
Sub Jumlah	10.542.122.107	13.506.115.558
Pihak Ketiga:		
PT. Cikarang Listrindo	5.698.460.884	6.775.417.483
PT. Triguna Internusa	3.554.447.867	-
PT. High Speed Railway Contractor	1.149.508.150	1.149.508.150
PT. Daya CiPT.a Kemasindo	936.086.250	192.196.300
PT Mora Telemática Indonesia	829.275.653	-
PT. Arjuna Kesatria Sejati	425.478.890	575.647.910
PT. Hutchison 3 Indonesia	407.291.667	602.791.667
PT. Karawang Tatabina Industrial Estate	378.844.172	378.844.172
PT Indosat	333.343.800	-
PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia	329.712.667	329.712.667
PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia	285.000.000	-
PT. Bumi Tirta Jaya	226.288.330	-
PT. Sinde Budi Sentosa	223.911.667	296.531.667
PT Mitra Asri Propetindo	223.766.667	-
Abdullah Bin Djafar	222.310.000	222.310.000
PT. Elegant Textile Industry	211.726.667	-
PT. South Pacific Viscose	194.330.000	-
PT. Pindodeli	193.887.234	-
PT. YKK Zipco Indonesia	191.342.367	191.342.367
PT. Air Liquide Indonesia	186.749.520	311.249.200
PT. Hijau Baru	175.738.300	-
DP Hotel	166.294.041	151.149.868
PT. Mutiara Luhur	166.028.495	166.028.495
Edi Setiono	138.000.000	138.000.000
PT PGAS Telekomunikasi Indonesia	135.297.983	-
PT. Bayu Buana Gemilang	132.171.900	123.546.650
PT. Jababeka Infrastruktur	122.444.099	-
PT. Surya Cipta Swadaya	122.328.517	98.154.000
PT. Tam Property Jaya	117.887.917	-
Jumlah Dipindahkan	17.477.953.704	11.702.430.596

18. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES
 (continued)

a. Other Payables (continued)

Deposit money from partners return to purpose of
 fulfillment contractual partners with Perum Jasa Tirta
 II.

* The others that received from others part which
 still needed to identifying.

b. Prepaid Income

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
			Related Parties:
			PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
			PT. Pertamina (Persero)
			PT. Waskita Karya
			PDAM Kab. Indramayu
			PT. Waskita Modern Realty
			Others (below than Rp100 Million)
			Sub Total
			Third Parties:
			PT. Cikarang Listrindo
			PT. Triguna Internusa
			PT. High Speed Railway Contractor
			PT. Daya CiPT.a Kemasindo
			PT Mora Telemática Indonesia
			PT. Arjuna Kesatria Sejati
			PT. Hutchison 3 Indonesia
			PT. Karawang Tatabina Industrial Estate
			PT Indosat
			PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia
			PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia
			PT. Bumi Tirta Jaya
			PT. Sinde Budi Sentosa
			PT Mitra Asri Propetindo
			Abdullah Bin Djafar
			PT. Elegant Textile Industry
			PT. South Pacific Viscose
			PT. Pindodeli
			PT. YKK Zipco Indonesia
			PT. Air Liquide Indonesia
			PT. Hijau Baru
			DP Hotel
			PT. Mutiara Luhur
			Edi Setiono
			PT PGAS Telekomunikasi Indonesia
			PT. Bayu Buana Gemilang
			PT. Jababeka Infrastruktur
			PT. Surya Cipta Swadaya
			PT. Tam Property Jaya
			Moved Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA
 (lanjutan)

b. Pendapatan Diterima Dimuka (lanjutan)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Jumlah Pindahkan	17.477.953.704	11.702.430.596
PT. Jaya Perkasa Auto	107.599.950	143.466.600
PT Leburre Baghraf Indonesia	105.226.150	-
PT. Tenang Jaya Sejahtera	105.223.800	-
PT. Link Net	-	176.468.945
PT. Lotte Shopping Indonesia	-	163.523.550
PT Inti Utama Dharma Real Estate	-	120.271.958
PT. DIC Graphics	-	118.992.242
PT. Roda Prima Lancar	-	114.360.525
PT. Lippo Cikarang Tbk	-	109.702.208
PT. Subang Terus Membangun	-	104.044.637
PT. Summarecon Agung	-	100.631.300
Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	4.822.713.808	3.846.242.598
Sub Jumlah	22.618.717.412	16.700.135.159
Jumlah	33.160.839.519	30.206.250.717

Rincian Pendapatan diterima dimuka dengan pendekatan per Unit Usaha Wilayah:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Unit Wilayah I	22.679.277.619	21.518.829.101
Unit Wilayah II	5.855.836.260	4.781.121.410
Unit Wilayah III	2.038.291.688	1.973.020.595
Unit Wilayah IV	2.407.165.244	1.771.355.076
Unit Pariwisata & Hotel	166.294.041	151.149.868
Unit PLTA	13.974.667	10.774.667
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	33.160.839.519	30.206.250.717

Tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang memiliki saldo negatif.

Jumlah Saldo Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan lahan, hotel dan peralatan yang diterima Perusahaan pada periode yang bersangkutan tetapi merupakan pendapatan untuk periode mendatang.

18. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES
 (continued)

b. Prepaid Income (continued)

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Movement Total		
PT. Jaya Perkasa Auto		
PT Leburre Baghraf Indonesia		
PT. Tenang Jaya Sejahtera		
PT. Link Net		
PT. Lotte Shopping Indonesia		
PT Inti Utama Dharma Real Estate		
PT. DIC Graphics		
PT. Roda Prima Lancar		
PT. Lippo Cikarang Tbk		
PT. Subang Terus Membangun		
PT. Summarecon Agung		
Others (below than Rp100 Million)		
Sub Total		
Total		

Details of unearned revenues with the approach per Regional Business Unit:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Unit Wilayah I	22.679.277.619	21.518.829.101
Unit Wilayah II	5.855.836.260	4.781.121.410
Unit Wilayah III	2.038.291.688	1.973.020.595
Unit Wilayah IV	2.407.165.244	1.771.355.076
Unit Pariwisata & Hotel	166.294.041	151.149.868
Unit PLTA	13.974.667	10.774.667
Total Unearned Revenues	33.160.839.519	30.206.250.717

There is no Acceptance Received Upfront which has a negative balance.

The amount of the balance of income received in advance represents land, hotel and equipment income received by the company in the period concerned but represents income for future periods.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS SEWA JANGKA PANJANG

19. LONG TERM LEASE LIABILITIES

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	2.153.877.927	-	Long Term Lease Liabilities
Jumlah	<u>2.153.877.927</u>	<u>-</u>	Total

Liabilitas Sewa Jangka Panjang Rp2.153.877.927 terdiri dari:

Long-term lease liabilities of Rp2,153,877,927 consist of:

- Rp1.791.122.635 yang merupakan Liabilitas Sewa Jangka Panjang per 31 Desember 2020 atas sewa menyewa Kavling PT Tegar Mandiri Cemerlang (Anak Perusahaan PT Jasa Tirta Luhur) kepada PT Tegar Primajaya, dengan perjanjian senilai Rp4.036.500.000 berdasarkan "Perjanjian Sewa Menyewa Kavling" nomor: 031/TP-LGL/ADD-1/IX/2020, tanggal 8 September 2020, jangka waktu 5 Tahun berdasarkan masa penggunaan objek sewa tersebut. (Lihat Catatan 13)
- Rp356.755.292 yang merupakan Liabilitas Sewa Jangka Panjang Per 31 Desember 2020 atas sewa menyewa kendaraan PT Jasa Tirta Luhur (Induk Perusahaan) kepada PT Adi Sarana Armada, dengan perjanjian senilai Rp661.090.896 berdasarkan "Perjanjian Sewa Kendaraan" nomor: 1200008719/LEG/XI/18, tanggal 28 November 2018, jangka waktu 36 bulan berdasarkan masa penggunaan objek sewa tersebut. (Lihat Catatan 13)

- Rp1.791.122.635 which represents Long-term Lease Liabilities as of December 31, 2020 for the lease of the Plot of PT Tegar Mandiri Cemerlang (a subsidiary of PT Jasa Tirta Luhur) to PT Tegar Primajaya, with an agreement worth Rp4.036.500.000 based on the "Plot Leasing Agreement" number : 031 / TP-LGL / ADD-1 / IX / 2020, dated September 8, 2020, a period of 5 Years based on the period of use of the object for lease. (See Note 13)

- Rp356.755.292 which is a Long-Term Lease Liability as of December 31, 2020 for the rental of PT Jasa Tirta Luhur (Parent Company) vehicle to PT Adi Sarana Armada, with an agreement worth Rp.661.090.896 based on the "Vehicle Rental Agreement" number: 1200008719 / LEG / XI / 18, November 28, 2018, a period of 36 months based on the period of use of the object for lease. (See Note 13)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & PENSIUN

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS LIABILITIES

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
a. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	91.421.207.659	71.668.261.672	a. Liabilities of Post-employee Benefits
b. Kewajiban Manfaat Pensiun	58.615.514.500	1.093.873.046	b. Liabilities of Pension Benefits
Bagian Jangka Panjang	<u>150.036.722.159</u>	<u>72.762.134.718</u>	Long Term Portion

Perusahaan memiliki 2 (dua) program, yaitu manfaat pensiun dari Dana Pensiun Jasa Tirta II, dan kewajiban diestimasi imbalan pasca kerja karyawan, yang keduanya telah sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013), Penyesuaian 2018, tentang Imbalan Kerja, UU No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, dan untuk program dana pensiun telah disesuaikan juga dengan Peraturan Dana Pensiun Jasa Tirta II.

The company has 2 (two) programs, namely pension benefits from the Jasa Tirta II Pension Fund, and the obligation to estimate employee benefits, both of which are in accordance with PSAK 24 (Revised 2013), 2018 Adjustments, on Employee Benefits, Law No.13 of 2003, on Manpower, and for the pension fund program, it has also been adjusted to the Regulation of the Jasa Tirta II Pension Fund.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & PENSIUN
 (lanjutan)

Perusahaan Umum (Perum) memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/ 2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja yang dihitung oleh aktuaris independen per tanggal 31 Desember 2020 dan berdasarkan laporan aktuarial untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan berdasarkan laporan aktuarial No. 081/SPS/R-I/II/2021 dan No. 082/SPS/R-I/II/2021, tanggal 31 Desember 2020 Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

• **Asumsi Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Aktuarial**

	2020	2019
▫ Tingkat Bunga aktuarial	6,89%	7,74%
▫ Tingkat Kenaikan Upah	10,00%	10,00%
▫ Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011 / Indonesian Mortality Table in 2011	
▫ Tingkat Kecacatan	10% dari tingkat kematian / 10% from death rate	
▫ Tingkat Pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal / 1% at age 20 years and decreases linearly until the normal retirement age	
▫ Metode Penghitungan Aktuarial	Projected Unit Credit	

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS
 LIABILITIES (continued)

Public Companies (Perum) provide long-term employment benefits to employees in accordance with the benefits based on Labor Law No. 13/2003 (Law No.13 / 2003). These benefits are not funded. The following table presents the components of the net benefit expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the amount recognized in the statement of financial position for the estimated liability for post-employment benefits calculated by independent actuaries as of December 31, 2020 and based on actuarial statements for the year ended. on that date, and based on actuarial report No. 081 / SPS / R-I / II / 2021 and No. 082 / SPS / R-I / II / 2021, December 31, 2020 The actuarial calculation uses the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

• **The Actuarial Post-employee Benefit Liability Assumption**

	2020	2019
▫ Tingkat Bunga aktuarial	6,89%	7,74%
▫ Tingkat Kenaikan Upah	10,00%	10,00%
▫ Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011 / Indonesian Mortality Table in 2011	
▫ Tingkat Kecacatan	10% dari tingkat kematian / 10% from death rate	
▫ Tingkat Pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal / 1% at age 20 years and decreases linearly until the normal retirement age	
▫ Metode Penghitungan Aktuarial	Projected Unit Credit	

• **Asumsi Manfaat Pensiun Aktuarial**

	2020	2019
▫ Tingkat Bunga aktuarial	6,89%	7,74%
▫ Tingkat Kenaikan Upah	6,00%	6,00%
▫ Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011 / Indonesian Mortality Table in 2011	
▫ Tingkat Kecacatan	10% dari tingkat kematian / 10% from death rate	
▫ Tingkat Pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal / 1% at age 20 years and decreases linearly until the normal retirement age	
▫ Metode Penghitungan Aktuarial	Projected Unit Credit	

• **The Actuarial Pension Benefit Liability Assumption**

	2020	2019
▫ Tingkat Bunga aktuarial	6,89%	7,74%
▫ Tingkat Kenaikan Upah	6,00%	6,00%
▫ Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011 / Indonesian Mortality Table in 2011	
▫ Tingkat Kecacatan	10% dari tingkat kematian / 10% from death rate	
▫ Tingkat Pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal / 1% at age 20 years and decreases linearly until the normal retirement age	
▫ Metode Penghitungan Aktuarial	Projected Unit Credit	

Actuarial Interest rate ▫
 Average salary increase ▫
 Mortality Rate ▫
 Disability Rate ▫
 Resignation Rate ▫
 Actuary valuation method ▫

Pension Benefit Liability
 Actuarial Interest rate ▫
 Average salary increase ▫
 Mortality Rate ▫
 Disability Rate ▫
 Resignation Rate ▫
 Actuary valuation method ▫

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & PENSIUN
(lanjutan)

Selanjutnya, nilai kewajiban imbalan pasca kerja aktuarial dan manfaat pensiun aktuarial, serta penghasilan komprehensif lain (lihat catatan 25), telah memperhitungkan realisasi kenaikan gaji pokok sampai dengan 25% pada tahun 2020 yang mempengaruhi langsung besarnya PhDP tahun 2020, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- Sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 – 2021 antara Perum Jasa Tirta II dengan Serikat Pekerja - Perum Jasa Tirta II, bahwa perusahaan memberikan kenaikan gaji pokok setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung mulai bulan Januari tahun 2020;
- Penyesuaian besaran gaji pokok telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Menteri BUMN No. S-870/MBU/11/2019, tanggal 28 November 2019, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jasa Tirta II Tahun 2020;
- Untuk meningkatkan motivasi karyawan mengingat selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015 belum ada kenaikan gaji pokok;
- Usulan kenaikan gaji pokok tersebut telah dibahas dalam Rapat *Board of Director (BOD)* pada tanggal 6 Februari 2020 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas pada tanggal 4 Maret 2020;
- Kenaikan gaji pokok tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direksi No. PRD-06/DIR/03/2020, tanggal 5 Maret 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direksi No. 1/DIR/05/PRT/2017, tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II.

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS
LIABILITIES (continued)

Furthermore, the value of the actuarial post-employee benefits liabilities and actuarial pension benefits liabilities as well as other comprehensive income (see note 25) shows an increase of about 15% on December 31, 2020 compared to December 31, 2019, because there is a realization of an increase in basic salary up to 25% in 2020 as described below which directly affects the amount of PhDP in 2020 as follows:

- In accordance with the Collective Labor Agreement (PKB) for the period 2019 - 2021 between Perum Jasa Tirta II and the Workers Union - Perum Jasa Tirta II, that the company provides an increase in basic salary every 2 (two) years starting in January 2020;
- Adjustments to the amount of basic salary have been included in the 2020 Work Plan and Company Budget as stipulated in the Letter of the Minister of BUMN No. S-870 / MBU / 11/2019, dated 28 November 2019, concerning the Ratification of the Company Work Plan and Budget (RKAP) of Perum Jasa Tirta II Year 2020;
- To increase employee motivation, considering that during the last 5 (five) years from 2015 there has been no increase in basic salary;
- The proposal for an increase in basic salary was discussed at the Board of Directors (BOD) Meeting on February 6, 2020 and received approval from the Supervisory Board on March 4, 2020;
- The increase in basic salary is in accordance with the Directors Regulation No. PRD-06 / DIR / 03/2020, dated March 5, 2020, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Board of Directors No. 1 / DIR / 05 / PRT / 2017, concerning Guidelines for Managing Human Resources in the Environment of Perum Jasa Tirta II.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & Pensiun
 (lanjutan)

a. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember
 2020 dan 2019 mendasar kepada asumsi diatas atau
 pada halaman sebelumnya, sebagai berikut:

	2020	2019
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja:		
Nilai Kini Kewajiban - Awal Tahun	71.668.261.672	79.403.529.263
Biaya Bunga	5.547.123.453	6.638.135.046
Biaya Jasa Kini	5.901.171.684	4.494.614.749
Pembayaran Imbalan	(8.206.688.785)	-
Sub Jumlah	74.909.868.024	90.536.279.058
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto:		
Manfaat/Kerugian dari		
Perubahan Asumsi Keuangan	(9.590.227.493)	9.814.010.070
Penyesuaian atas Pengalaman	26.101.567.128	(28.682.027.456)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	91.421.207.659	71.668.261.672

Rincian Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial dalam
 laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian
 sebagai berikut:

	2020	2019
Penghasilan Komprehensif Lain - Awal Tahun	(71.635.951.805)	(52.767.934.419)
Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto Keuntungan dan Kerugian		
Perubahan Asumsi Aktuarial	(9.590.227.493)	9.814.010.070
Penyesuaian atas Pengalaman	26.101.567.128	(28.682.027.456)
Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Tahun	(55.124.612.170)	(71.635.951.805)

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS
 LIABILITIES (continued)

a. Liabilities of Post-employee Benefits

The liabilities for employee benefits as of December
 31, 2020 and 2019 are based on the assumptions
 above or on the previous page, as follows:

	2020	2019
Long-Term Post-Employment Benefits:		
Past Service Liabilities (PSL) DP4		
Severance (Post Employment)		
Current Service Cost		
Benefit Payments		
Sub Total		
Remeasurement of Net Definite Liabilities (Assets):		
Advantages / Disadvantages of Changing Financial Assumptions		
Adjusted List with Experience		
Present Value of Liabilities - End of Year		

List of Severance (post employment) on consolidated
 statements of financial position (balance sheets) as
 follows:

	2020	2019
Other Comprehensive Income at Beginning Year		
Gain/Loss Actuarial of Net Defined Benefit Liabilities		
Change In Assumption		
Adjustment for Experience		
Other Comprehensive Income - End of Year		

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & Pensiun
 (lanjutan)

a. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Rincian beban yang diakui dalam laporan posisi
 keuangan (neraca) konsolidasian sebagai berikut :

	2020	2019
Biaya Jasa Kini	5.901.171.684	4.494.614.749
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	5.547.123.453	6.638.135.046
Penyelesaian Program	-	7.172.475.728
Beban yang diakui	11.448.295.137	18.305.225.523

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/
 (aset) neto di laporan posisi keuangan (neraca)
 konsolidasian sebagai berikut :

	2020	2019
Jumlah Pengukuran Kembali - Awal Tahun	71.668.261.672	79.403.529.263
Beban tahun Berjalan	11.448.295.137	18.305.225.523
Penghasilan Komprehensif Lain (Manfaat) Kerugian Aktuaria atas Pembayaran Imbalan	16.511.339.635 (8.206.688.785)	(18.868.017.386) (7.172.475.728)
Akumulasi Pengukuran Kembali	91.421.207.659	71.668.261.672

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi
 keuangan (neraca) konsolidasian sebagai berikut :

	2020	2019
Liabilitas Bersih Awal Tahun	71.668.261.672	79.403.529.263
Termasuk kedalam keuntungan - atau kerugian:		
Beban Tahun Berjalan	5.901.171.684	4.494.614.749
Bunga atas Liabilitas	5.547.123.453	6.638.135.046
Penyelesaian Program	-	7.172.475.728
Penyesuaian atas Pengalaman	26.101.567.128	(28.682.027.456)
Asumsi Keuangan	(9.590.227.493)	9.814.010.070
Lainnya		
Pembayaran Imbalan Kerja oleh Perusahaan	(8.206.688.785)	(7.172.475.728)
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	91.421.207.659	71.668.261.672

Jumlah periode saat ini dan periode tahun-tahun
 sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti,
 nilai wajar aset program dan defisit pada program
 penyesuaian yang timbul pada liabilitas program dan
 aset program dinyatakan sebagai jumlah pada akhir
 periode pelaporan sebagai berikut :

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS
 LIABILITIES (continued)

a. Liabilities of Post-employee Benefits (continued)

The details of expenses recognized in the
 consolidated statements of financial position (balance
 sheets) as follows:

	2020	2019
Current Service Cost	5.901.171.684	4.494.614.749
Net Interest of Liability (Assets)	5.547.123.453	6.638.135.046
Program completion	-	7.172.475.728
Recognized Expenses	11.448.295.137	18.305.225.523

Reconciliation of re-measurement balances of
 liabilities / (assets) - net in the consolidated
 statements of financial position (balance sheets) as
 follows:

	2020	2019
Amount of Re-Measurement Beginning Year	71.668.261.672	79.403.529.263
Current Expenses	11.448.295.137	18.305.225.523
Other Comprehensive Income (Benefit) Actuarial Loss on Compensation Payment	16.511.339.635 (8.206.688.785)	(18.868.017.386) (7.172.475.728)
Accumulated Remeasurement	91.421.207.659	71.668.261.672

Change of liability is recognized in the consolidated
 statements of financial position (balance sheets) as
 follows:

	2020	2019
Net Liabilities Beginning of the Year	71.668.261.672	79.403.529.263
Included in Gain or loss:		
Current Year Expenses	5.901.171.684	4.494.614.749
Interest of Liabilities	5.547.123.453	6.638.135.046
Program Completion	-	7.172.475.728
Adjustments for Experience	26.101.567.128	(28.682.027.456)
Financial Assumptions	(9.590.227.493)	9.814.010.070
Others		
Benefit Payments by Company	(8.206.688.785)	(7.172.475.728)
Net Liabilities - End of Year	91.421.207.659	71.668.261.672

Total amount of current period and previous period of
 previous years from present value of defined benefit
 liabilities, fair value of plan assets and possible
 deficit in adjustment plan on liabilities and assets
 plan, stated as an amount at the end of reporting
 period as follows :

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & Pensiun
 (lanjutan)

b. Kewajiban Manfaat Pensiun (Dapen)

Liabilitas Manfaat Pensiun (Dapen) merupakan kewajiban manfaat pensiun dari Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II berdasarkan perhitungan aktuarial oleh PT. Sigma Prima Solusindo, mendasar kepada asumsi diatas atau pada halaman sebelumnya dengan perincian sebagai berikut :

	2020	2019
Nilai Kini Liabilitas - Saldo Awal	1.093.873.046	-
Biaya Jasa Kini	8.056.017.249	5.382.387.166
Biaya Bunga	18.633.733.981	18.504.312.590
Pembayaran Iuran	(13.035.669.690)	(13.713.877.875)
Saldo Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	14.747.954.586	10.172.821.881

Pengukuran Kembali Liabilitas
 (Aset) Imbalan Pasti Neto

Manfaat/Kerugian dari Perubahan Asumsi	61.477.951.376	9.849.533.181
Imbal hasil ekspektasi	(17.610.391.463)	(18.928.482.016)

Nilai Kini Liabilitas (Aset) - Saldo Akhir	58.615.514.500	1.093.873.046

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir atas Aset Program sebagai berikut :

	2020	2019
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	239.652.044.026	228.792.299.586
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto	17.610.391.463	18.928.482.016
Pembayaran Iuran - Pemberi Kerja	13.035.669.690	13.713.877.875
Pembayaran Iuran - Peserta Program	-	2.047.853.756
Pembayaran Manfaat Pensiun	(21.493.163.200)	(22.187.845.826)
Kerugian Aktuarial	(15.194.245.386)	(1.642.623.381)
Nilai Wajar Aset Program - Saldo Awal Tahun (Aktual)	233.610.696.593	239.652.044.026

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS
 LIABILITIES (continued)

b. Liabilities of Pension Benefits (Dapen)

Pension Benefit Liabilities (Dapen) is a pension benefit obligation from Perum Jasa Tirta II Pension Fund based on actuarial calculations by PT. Sigma Prima Solusindo, based on the assumptions above or on the previous page with the following details:

PV of Liabilities-Beginning Balance
 Current Service Cost
 Interest Expenses
 Contribution Payments

PV of Liabilities - End of Balance (Expectation)

Remeasurement of Net Defined Benefit Liabilities (Assets)

Gain/ Loss from Changes in Assumptions
 Expected Benefit Return

PV Liabilities (Assets) - End of Balance

Reconciliation of beginning and ending balances of Program Assets is as follows:

Fair Value of Plan Assets Beginning Year
 Net Defined Benefit Liabilities (Assets) Remeasurement Contributions Payments - Employer
 Contributions Payments - Plan Participants
 Benefit Pension Payments
 Actuarial Loss

FV of Plan Assets - End of Balance (Actual)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA & PENSIUN
 (lanjutan)

b. Kewajiban Manfaat Pensiun (Dapen) (lanjutan)

Rincian Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial dalam
 laporan posisi keuangan sebagai berikut :

	2020	2019
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto		
- Perubahan Asumsi Keuangan	(23.481.788.575)	(17.464.000.994)
- Penyesuaian atas Pengalaman	66.859.718.259	25.670.910.794
Imbal Hasil atas Aset Program	18.100.021.692	1.642.623.381
Penghasilan Komprehensif Lain - Saldo Akhir	61.477.951.375	9.849.533.181

Rincian beban yang diakui dalam laporan posisi
 keuangan adalah berikut :

	2020	2019
Biaya Jasa Kini	8.056.017.249	5.382.387.166
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	18.633.733.981	18.504.312.590
Imbal Hasil Ekspektasian	(17.610.391.463)	(18.928.482.016)
Beban yang Diakui	9.079.359.767	4.958.217.740

Rekonsiliasi Saldo Pengukuran Kembali atas
 Liabilitas/ (Aset) Neto di laporan posisi keuangan
 sebagai berikut :

	2020	2019
Saldo Liabilitas Bersih Awal Tahun	1.093.873.046	-
Beban Tahun Berjalan	9.079.359.767	4.958.217.740
Pembayaran Iuran	(13.035.669.690)	(13.713.877.875)
Jumlah yang Diakui pada OCI	61.477.951.375	9.849.533.181
Jumlah Liabilitas Bersih	58.615.514.500	1.093.873.046

Jumlah periode saat ini dan periode tahun-tahun
 sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti,
 nilai wajar aset program dan defisit pada program
 penyesuaian yang timbul pada liabilitas program dan
 aset program dinyatakan sebagai jumlah pada akhir
 periode pelaporan sebagai berikut :

	2020	2019
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti	(233.610.696.593)	240.745.917.072
Nilai Wajar Aset Program	292.226.211.093	(239.652.044.026)
Posisi Pendanaan	58.615.514.500	1.093.873.046

20. POST-EMPLOYMENT & PENSION BENEFITS
 LIABILITIES (continued)

b. Liabilities of Pension Benefits (Dapen) (continued)

Details of actuarial gain / (loss) in statement of
 financial position as follows :

	2020	2019
Net Defined Benefit Liabilities (Assets) Remeasurement		
- Change in Assumptions	(23.481.788.575)	(17.464.000.994)
- Adjustments for Experience	66.859.718.259	25.670.910.794
Benefit Return of Plan Assets	18.100.021.692	1.642.623.381
Other Comprehensive Income - End of Balance	61.477.951.375	9.849.533.181

Details of recognized expenses in statement of
 financial position as follows :

	2020	2019
Current Service Cost	8.056.017.249	5.382.387.166
Net Interest of Liabilities (Assets)	18.633.733.981	18.504.312.590
Expected Benefit Return	(17.610.391.463)	(18.928.482.016)
Recognized Expenses	9.079.359.767	4.958.217.740

Reconciliation of net remeasurement balance of
 liabilities (assets) reported in financial position as
 follows :

	2020	2019
Net Liabilities Beginning of Year	1.093.873.046	-
Current Period Expenses	9.079.359.767	4.958.217.740
Contribution Payments	(13.035.669.690)	(13.713.877.875)
Recognized Amount in OCI	61.477.951.375	9.849.533.181
Total Net Liabilities	58.615.514.500	1.093.873.046

Total amount of current period and previous years
 period of present value of defined benefit liabilities, fair
 value of plan assets, and possible deficit in adjustment
 plan on liabilities and assets, stated as an amount at
 the end of reporting period as follows :

	2020	2019
PV of Defined Benefit Plan	(233.610.696.593)	240.745.917.072
Fair Value of Plan Assets	292.226.211.093	(239.652.044.026)
Funding Position	58.615.514.500	1.093.873.046

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
PT. Marunda Mandiri International	11.134.937.500	3.000.000.000
PT. Bandung Management Economic Center	1.660.692.000	1.660.692.000
PT. Dua Ribu Satu Pangripta	1.469.437.200	1.469.437.200
PT. Global Citra Primakarya	-	16.000.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	14.265.066.700	22.130.129.200

Saldo akun Liabilitas Jangka Panjang Lainnya merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang tidak dapat diselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal

Berdasarkan surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 021/GBL-TMC/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 PT. Global Citra Primakarya memberikan pinjaman sebesar Rp16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah), dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran penyelesaian proyek SPAM Marunda kepada kontraktor dan modal kerja operasional SPAM Marunda.

PT. Marunda Mandiri Internasional memberikan pinjaman *Shareholder Loan* sebesar Rp11.134.937.500.

21. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

*PT. Marunda Mandiri International
 PT. Bandung Management
 Economic Center
 PT. Dua Ribu Satu Pangripta
 PT. Global Citra Primakarya
 Other Long Term
 Liabilities Total*

Other Long-term Liability account balances are reclassified balances of trade debt balances that cannot be settled and settled in the normal operating cycle

Based on the letter of the loan agreement number: 021/GBL-TMC/XII/2019 dated 17 December 2019 PT. Global Citra Primakarya Loans amounting to Rp 16.000.000.000,-(sixteen billion Rupiah), where the money will be used for the completion of payment of Project SPAM Marunda to the contractor and operational working capital of SPAM Marunda.

PT. Marunda Mandiri International provides loan Shareholder Loan of Rp11.134.937.500.

22. MODAL PEMERINTAH R.I

Akun ini merupakan modal yang terdiri dari:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Modal Dasar 1)	46.000.000.000	46.000.000.000
Penambahan Modal Pemerintah 2)	118.547.635.935	118.547.635.935
Jumlah	164.547.635.935	164.547.635.935
1) Penetapan Modal Perusahaan, tanggal 1 Januari 1991 berdasarkan SK Menteri Keuangan No.202/KMK.13/1992 tanggal 5 Februari 1992.	46.000.000.000	
2) Penambahan Modal Negara berupa Instalasi & Jaringan berdasarkan PP No.78 tahun 1998 tanggal 22 Oktober 1998.	60.287.829.310	
3) Penambahan Modal Negara Berupa lahan ex Departemen PU Divisi I PJT II berdasarkan PP No.90 tahun 2000.	18.439.506.625	
4) Penambahan Modal Negara berupa Rehabilitasi/up-rating PLTA IR. H. Djuanda berdasarkan PP No. 4 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009	39.820.300.000	
Jumlah	164.547.635.935	

Capital account details is as follows:

*Capital 1)
 Addition of Government Capital 2)*

Total

Company's Capital dated January 1, 1991 based on Ministry of Finance Decree No. 202/KMK.13/1992 dated February 5, 1992.

Additional Government Capital consisting of installation and network based on Government Regulation No.78 of 1998 dated October 22, 1998.

Additional State Capital consisting of ex-Department PU's land Division I PJT II based on Government Regulation No.90 of 2000.

Additional Government Capital consisting of PLTA IR. H. Djuanda rehabilitation/ up-rating based on Government Regulation No. 4 of 2009 dated January 16, 2009.

Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. CADANGAN UMUM

Jumlah ini merupakan Cadangan Umum Perusahaan per
 31 Desember 2020 dan 2019 didapat dari hasil
 pembagian laba tahun 1986/1987 sampai dengan tahun
 2005, sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo Awal	13.943.023.591	13.943.023.591
Penambahan	-	-
Saldo Akhir	13.943.023.591	13.943.023.591

23. RESERVES

The amount represents general reserves of the
 Company as of December 31, 2020 and 2019 obtained
 from profit allocation from 1986/1987 to 2005, as follows:

	2020	2019	
Beginning Balance	13.943.023.591	13.943.023.591	
Additional	-	-	
Ending Balance	13.943.023.591	13.943.023.591	

24. CADANGAN BERTUJUAN DAN SALDO LABA

	2020	2019
Cadangan Bertujuan:		
Saldo Awal	893.921.585.756	760.306.186.552
Pembagian Laba	153.843.749.220	175.264.330.544
Penggunaan Dana Cadangan	(20.764.222.676)	(41.648.931.340)
Saldo Akhir	1.027.001.112.300	893.921.585.756
Saldo Laba :		
- Saldo Awal	162.512.354.404	175.264.330.544
- Pembagian Laba*)	(8.668.605.184)	-
- Peningkatan Cadangan	20.764.222.676	(124.946.794.020)
- Pembayaran Dividen	(20.764.222.676)	(41.648.931.340)
- Laba tahun Berjalan	124.003.429.661	153.843.749.220
Saldo Akhir	277.847.178.881	162.512.354.404

: Appropriated Reserved
 Beginning Balance
 Shared Profit
 Used of Appropriated Reserves
Ending Balance

Retained Earnings:
Beginning Balance -
 (*Shared Profit) -
 Appropriation for Reserve -
 Dividends Declaired -
 Profit Current Year -
Ending Balance

*) Sesuai dengan Persetujuan Laporan Tahunan dan
 Pengesahaan Laporan Keuangan Perusahaan Umum
 (Perum) Jasa Tirta II Tahun Buku 2019, Nomor: S-
 431/MBU/06/2020 Nomor 1 Poin B Laporan
 keuangan per 31 Desember 2017 disajikan kembali
 dengan nilai ekuitas sebesar Rp860.597 juta, per 31
 Desember 2018 dengan nilai ekuitas Rp1.074.455
 juta, dan per 31 Desember 2019 dengan nilai ekuitas
 Rp1.195.634 juta, sudah termasuk dengan saldo laba
 sebesar Rp8.668 miliar yang ditempatkan sebagai
 cadangan.

*) In accordance with the Approval of the Annual Report
 and the Endorsement of Perum Jasa Tirta II Financial
 Statements year 2019, Number: S-431 / MBU /
 06/2020 Number 1 Point B The financial statements
 as of December 31, 2017 were restated with an
 equity value of Rp860.597 million, as of 31 December
 2018 with an equity value of Rp1.074.455 million, and
 as of 31 December 2019 with an equity value of
 Rp1.195.634 million, including a retained earnings of
 Rp8.668 billion which were placed as reserves.

Selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Laporan
 Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan
 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tahun Buku
 2019 diatas halaman 3 Nomor 2, menyetujui penetapan
 penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang
 Diatribusikan kepada Entitas Induk Perum Jasa Tirta II
 Tahun Buku 2019 sebesar Rp153.809.056.862, dengan
 rincian yaitu:

Furthermore, based on the Annual Report Approval
 Letter and the Endorsement of Perum Jasa Tirta II
 Financial Statements year 2019 above page 3 Number
 2, approves the determination of the use of Consolidated
 Net Profits Attributable to the Parent Entity Perum Jasa
 Tirta II for Financial Year 2019 amounting to
 Rp153.809.056.862. as follows :

- a) Dividen sebesar Rp20.764.222.676,- atau 13,5%
- b) Cadangan sebesar Rp133.044.834.185,- atau 86,5%

- a) Dividend of Rp 20.764.222.676. - or 13.5%
- b) Reserves amounting to Rp133.044.834.185. - or 86.5%

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. CADANGAN BERTUJUAN DAN SALDO LABA (lanjutan) 24. APPROPRIATED-RESERVES AND RETAINED EARNINGS (continued)

Sesuai dengan Surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. S-293/MBU/05/2019 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2019. Penggunaan laba bersih tahun buku 2018, sebagai berikut:

- a) Dividen sebesar Rp41.648.931.340,- atau 25%
- b) Cadangan sebesar Rp124.946.794.020,- atau 75%

In accordance with the Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. S-293/MBU/05/2019 concerning Approval of Annual Report and the Ratification of Financial Statement for Perum Jasa Tirta II in 2018, dated May 7, 2019. The use of net profit for year 2018, as follow :

- a) Dividend of Rp41.648.931.340.- or 25%
- b) Reserves amounting to Rp124.946.794.020,- or 75%

25. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

25. OTHER EQUITY COMPONENT

This account consists of:

	2020	2019	
(Keuntungan) / Kerugian			(Gain)/Losses of
Aktuarial atas Manfaat Pensiun	173.895.147.086	112.417.195.710	Actuarial on Pension Benefits
(Keuntungan) / Kerugian atas			(Gain) / Losses of
Imbalan Pasca Kerja	(55.124.612.170)	(71.635.951.805)	Post-employee Benefits
Pertukaran Tanah di Ciganea dan			The Exchange Land in Ciganea and
Penggantinya di Kampung Bongas	(656.117.000)	(656.117.000)	its Substitute in Kampung Bongas
Selisih atas Transaksi Entitas			Difference in Transactions under
Sepengendali	462.153.761	462.153.761	Common Control
Jumlah	118.576.571.677	40.587.280.666	Total

Pengukuran kembali oleh aktuaris independen sebagaimana tersebut diatas, terhadap liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang mempengaruhi dan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari: (lihat catatan 20)

- keuntungan (kerugian) aktuarial;
- imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- setiap perubahan batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Perusahaan memiliki 2 (dua) program, yaitu manfaat pensiun dari Dana Pensiun Jasa Tirta II, dan kewajiban diestimasi imbalan kerja karyawan, yang keduanya telah sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013), Penyesuaian 2018, tentang Imbalan Kerja, UU No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, dan untuk program dana pensiun telah disesuaikan juga dengan Peraturan Dana Pensiun Jasa Tirta II.

Remeasurement by the independent actuary as mentioned above, of the net defined benefit liability (asset), which affects and is recognized as other comprehensive income, consists of: (see note 20)

- actuarial gain (loss);
- return on plan assets, excluding the amount included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and
- any changes in the asset ceiling, excluding the amount included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

The company has 2 (two) programs, namely pension benefits from the Jasa Tirta II Pension Fund, and the obligation to estimate employee benefits, both of which are in accordance with PSAK 24 (Revised 2013), 2018 Adjustments, on Employee Benefits, Law No.13 of 2003, on Manpower, and for the pension fund program, it has also been adjusted to the Regulation of the Jasa Tirta II Pension Fund.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

(Keuntungan) / Kerugian Aktuarial atas Manfaat Pensiun dari Program Dana Pensiun

(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial atas Manfaat Pensiun dari program dana pensiun tahun 2020 sebesar Rp173.895.147.086 merupakan penambahan kerugian penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020 sebesar Rp61.477.951.376 dan jumlah kumulatif atas saldo-saldo penghasilan komprehensif lain tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp112.417.195.710.

Sebelumnya, (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial atas Manfaat Pensiun dari program dana pensiun tahun 2019 sebesar Rp112.417.195.710 merupakan penambahan kerugian penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 sebesar Rp9.849.533.181 dan jumlah kumulatif atas saldo-saldo penghasilan komprehensif lain tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp102.567.662.529.

(Keuntungan) / Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja

(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial atas imbalan kerja tahun 2020 sebesar (Rp55.124.612.170) merupakan penambahan kerugian penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020 sebesar Rp 16.511.339.635 dan jumlah kumulatif atas saldo-saldo penghasilan komprehensif lain tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp71.635.951.805).

Sebelumnya, (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial atas imbalan kerja tahun 2019 sebesar (Rp71.635.951.805) merupakan penambahan manfaat penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 sebesar (Rp18.868.017.386) dan jumlah kumulatif atas saldo-saldo penghasilan komprehensif lain tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp52.767.934.419).

Pertukaran antara Tanah di Ciganea dan Penggantinya di Kampung Bongas

Manajemen menerapkan PSAK 57: Provisi Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi atas tukar menukar tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di kampung Bongas saat ini telah diselesaikan, sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan. (lihat catatan 12)

25. OTHER EQUITY COMPONENT (continued)

Actuarial (Gains) / Loss on Pension Benefits from the Pension Fund Program

Actuarial (Gains) / Loss on Pension Benefits from the 2020 pension fund program amounting to Rp173,895,147,086 is an additional loss of other comprehensive income in 2020 amounting to Rp61,477,951,376 and the cumulative amount of other comprehensive income balances in 2019 and year - Previous year amounting to Rp112,417,195,710.

Previously, (Gain) / Loss Actuarial on Pension Benefits from the pension fund program in 2019 amounting to Rp112,417,195,710 represents the addition of other comprehensive income losses in 2019 amounting to Rp9,849,533,181 and the cumulative amount of balances of other comprehensive income in 2018 and previous years amounting to Rp102,567,662,529.

Actuarial (Gains) / Loss on Employee Benefits

Actuarial (Gains) / Loss on employee benefits in 2020 amounting to (Rp55,124,612,170) represents additional loss of other comprehensive income in 2020 amounting to Rp. 16,511,339,635 and the cumulative amount of balances of other comprehensive income in 2018 and previous years amounting to (Rp71,635,951,805).

Previously, Actuarial (Gains) / Loss on employee benefits in 2019 amounting to (Rp71,635,951,805) represents the addition of other comprehensive income benefits in 2019 amounting to (Rp18,868,017,386) and the cumulative amount of balances of other comprehensive income in 2018 and in previous years (Rp. 52,767,934,419).

The Exchange between Land in Ciganea and its Substitute in Kampung Bongas

Management applies PSAK 57: Provision of Contingent Liabilities and Contingent Assets in exchange for land owned by Perum Jasa Tirta II located in Ciganea with replacement land located in the village of Bongas currently completed so that the replacement land located in Kampung Bongas was recorded as a Company asset. (see note 12)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA

26. OPERATING REVENUES

a. Pendapatan Sumber Daya Air

a. Water Resources Revenue

	2020	2019
a.1 Pendapatan Listrik	449.955.743.358	433.456.165.381
a.2 Pendapatan Air Baku	286.323.910.327	294.159.193.175
a.3 Pendapatan Air Bersih	8.941.622.910	4.653.841.950
Jumlah	745.221.276.595	732.269.200.506

a.1 Electricity Revenues
a.2 Raw Water Revenues
a.3 Water Revenues

Total

a.1.1 Listrik PLN

a.1.1 PLN Electrical

PLN	208.408.452.450	150.715.989.310
Sub Jumlah	208.408.452.450	150.715.989.310

PLN

Sub Total

a.1.2 Listrik Industri

a.1.2 Electrical Industry

Pihak Berelasi

Related Parties

PT. Kujang Tatar Persada	6.587.342.560	14.176.594.423
PDAM Purwakarta	1.202.595.262	1.346.983.956
Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	72.485.578	464.599.280
Sub Jumlah	7.862.423.400	15.988.177.665

PT. Kujang Tatar Persada
PDAM Purwakarta
Others (below than
Rp100 Million)

Sub Total

Pihak Ketiga

Third Parties

PT. Indotama Ferro Alloys	114.222.709.456	118.854.869.966
PT. Elegant Textile Industry	88.616.688.009	111.024.634.417
PT. Bangunperkasa Adhitama	11.921.624.403	13.499.389.813
PT. Indorama Syntetics	6.034.594.188	11.544.550.938
PT. Indosat	5.146.361.609	3.903.201.241
PT. Urase Prima	1.570.097.348	1.460.578.643
PT. Indachi Prima	1.455.287.076	1.666.412.824
Kereta Cepat Indonesia China	1.344.938.226	-
PT. Kurnia Ratu Kencana	682.481.262	2.536.946.081
PT. Adhi Indoteknik	587.782.425	-
PT. Win Textile	429.346.968	451.397.378
CV Mitra Muda Manggala	304.599.885	435.496.156
Koperasi Purna Bakti AD	267.260.034	220.781.456
Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	37.490.167	46.331.560
Sub Jumlah	232.621.261.056	265.644.590.473

PT. Indotama Ferro Alloys
PT. Elegant Textile Industry
PT. Bangunperkasa
Adhitama
PT. Indorama Syntetics
PT. Indosat
PT. Urase Prima
PT. Indachi Prima
Kereta Cepat Indonesia
China
PT. Kurnia Ratu Kencana
PT. Adhi Indoteknik
PT. Win Textile
CV Mitra Muda Manggala
Koperasi Purna Bakti AD
Others (below than
Rp100 Million)

Sub Total

a.1.3 Listrik Penduduk

a.1.3 Listrik Penduduk

Penduduk	1.063.606.452	1.107.407.933
Sub Jumlah	1.063.606.452	1.107.407.933

Penduduk

Sub Total

Jumlah Pendapatan Listrik	449.955.743.358	433.456.165.381

Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

26. OPERATING REVENUES (continued)

a. Pendapatan Sumber Daya Air (lanjutan)

a. Water Resources Revenue (continued)

	2020	2019
a.2.1 Air Baku PAM Jaya:		
PAM Jaya	143.524.770.000	136.034.572.200
PDAM	11.968.634.260	34.784.459.890
Sub Jumlah	155.493.404.260	170.819.032.090

a.2.1 PAM Jaya Raw Water

PAM Jaya
 PDAM

Sub Total

a.2.2 Air Baku Industri:

a.2.2 Industrial Raw Water:

Pihak Berelasi

Related Parties

PT. PLN	48.961.633.127	35.913.372.217
PT. Sang Hyang Seri	8.890.083.500	8.308.722.920
PT. Pertamina (Persero)	3.197.935.210	3.026.825.750
PT. Pupuk Kujang	2.864.693.370	2.479.883.000
PT. PG Rajawali II Unit		
PG Subang	311.743.440	176.179.500
PT. Kujang Tirta Sarana	-	301.567.180
Balai Besar Penelitian		
Tanaman Padi	-	180.000.000
Lain-lain (dibawah		
Rp100 Juta)	232.280.230	476.513.460

PT. PLN	
PT. Sang Hyang Seri	
PT. Pertamina (Persero)	
PT. Pupuk Kujang	
PT. PG Rajawali II Unit	
PG Subang	
PT. Kujang Tirta Sarana	
Balai Besar Penelitian	
Tanaman Padi	
Others (below than	
Rp100 Million)	

Sub Jumlah

64.458.368.877

50.863.064.027

Sub Total

Pihak Ketiga

Third Parties

PT. Lippo Cikarang Tbk.	9.117.655.320	6.250.949.700
PT. Jababeka Infrastruktur	5.659.458.000	5.385.692.200
PT. Pindodeli Pulp And		
Paper Mills	5.645.756.800	5.017.713.050
PT. South Pacific Viscose	4.888.703.000	5.258.363.000
PT. Indo Bharat Rayon	4.107.538.000	4.350.454.000
PT. Fajar Surya		
Wisesa Tbk.	3.856.928.000	3.337.258.700
PT. Megalopolis Manunggal	2.912.241.600	2.818.001.800
PT. Surya CiPT.a Swadaya	1.888.238.900	1.704.255.100
PT. Indorama Synthetic	1.701.499.000	1.751.710.000
PT. Cikarang Listrindo	1.519.491.300	3.426.230.700
PT. Bukit Indah Tirta Alam	1.429.155.600	1.275.279.700
PT. Karawang Jabar		
Industrial Estate -	1.076.366.400	1.024.299.200
PT. Kahatex	1.073.396.000	1.025.740.000
PT. Mitra Karawang Jaya	994.341.900	742.606.700
PT. Pembangunan		
Delta Mas	915.517.400	1.376.815.900
PT. Win Textile	909.826.000	882.392.000
PT. East Jakarta		
Industrial Park	849.210.000	808.131.000
PT. Maligi Permata		
Industrial Estate	825.135.600	787.939.000
PT. Karawang Tata		
Bina Industrial Estate	728.060.400	705.357.900
PT. Bukit Muria Jaya	706.867.100	543.248.900
PT. Bintang		
Puspita Dwikarya	642.671.200	790.998.900

PT. Lippo Cikarang Tbk.	
PT. Jababeka Infrastruktur	
PT. Pindodeli Pulp And	
Paper Mills	
PT. South Pacific Viscose	
PT. Indo Bharat Rayon	
PT. Fajar Surya	
Wisesa Tbk.	
PT. Megalopolis Manunggal	
PT. Surya CiPT.a Swadaya	
PT. Indorama Synthetic	
PT. Cikarang Listrindo	
PT. Bukit Indah Tirta Alam	
PT. Karawang Jabar	
Industrial Estate -	
PT. Kahatex	
PT. Mitra Karawang Jaya	
PT. Pembangunan	
Delta Mas	
PT. Win Textile	
PT. East Jakarta	
Industrial Park	
PT. Maligi Permata	
Industrial Estate	
PT. Karawang Tata	
Bina Industrial Estate	
PT. Bukit Muria Jaya	
PT. Bintang	
Puspita Dwikarya	

Jumlah Dipindahkan

51.448.057.520

49.263.437.450

Moved Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

26. OPERATING REVENUES (continued)

a. Pendapatan Sumber Daya Air (lanjutan)

a. Water Resources Revenue (continued)

	2020	2019	
Jumlah Pindahkan	51.448.057.520	49.263.437.450	Movement Total
PT. Harapan Anang Bakri & Son's PT. Asietex Sinar Indopratama PT. Daliatex Kusuma PT. Asia Pasific Fiber PT. Pasific Bumi Nusa PT. Coca Cola Bottling Indonesia PT Watertech Estate Cikarang PT. Indocement Tunggal Perkasa PT Watertech Estate Cikarang Lain-lain (dibawah Rp500 Juta)	630.986.400 603.885.700 599.305.000 563.844.800 559.150.800 538.346.400 - 506.712.600 504.927.260 504.912.000 9.912.008.710	606.900.600 922.120.200 617.770.000 664.526.550 - - - 523.271.150 - 19.879.071.108	PT. Harapan Anang Bakri & Son's PT. Asietex Sinar Indopratama PT. Daliatex Kusuma PT. Asia Pasific Fiber PT. Pasific Bumi Nusa PT. Coca Cola Bottling Indonesia PT Watertech Estate Cikarang PT. Indocement Tunggal Perkasa PT Watertech Estate Cikarang Others (below than Rp500 Million)
Sub Jumlah	66.372.137.190	72.477.097.058	Total
Jumlah	286.323.910.327	294.159.193.175	Sub Total

a.3.1 Air Bersih Industri

a.3.1 Industrial Clear Water

Pihak Berelasi			Related Parties
PT. Waskita Precast Beton Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	353.896.000 52.518.250	441.568.000 30.405.000	PT. Waskita Precast Beton Others (below than Rp100 Million)
Sub Jumlah	406.414.250	471.973.000	Total

Pihak Ketiga

Third Parties

PT. Global Citra Prima Karya PT. Indosat Tbk (Stasiun Bumi) Non Relasi Koperasi Purna Bhakti cq JOL PT. Sarana Beton Indonesia Lain-lain (dibawah Rp100 Juta)	4.037.921.160 160.697.000 110.466.500 - 812.882.800	- 179.196.000 112.425.250 - 453.838.500	PT. Global Citra Prima Karya PT. Indosat Tbk (Stasiun Bumi) Non Relasi Koperasi Purna Bhakti cq JOL PT. Sarana Beton Indonesia Others (below than Rp100 Million)
Sub Jumlah	5.121.967.460	745.459.750	Total

a.3.2 Air Bersih Penduduk

a.3.2 Civilian Clear Water

Penduduk	3.413.241.200	3.436.409.200	Civilian
Sub Jumlah	3.413.241.200	3.436.409.200	Sub Total
Jumlah	8.941.622.910	4.653.841.950	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

a. Pendapatan Sumber Daya Air (lanjutan)

Pendapatan Listrik

Tarif jual tenaga listrik tahun 2020 ke PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp330/kWh berdasarkan Addendum VI No : 1/45/SPU-Add/2018 dan No. 1466.PJ/DAN.02.04/DIR/2018 tanggal 29 November 2018 atas Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda antara Perum Jasa Tirta II dan PT. PLN (Persero) No. 1/97/SPU/2004 dan No. 0189.PJ/063/DIR/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang berlaku sejak 1 Januari 2017.

Tarif Jual tenaga listrik ke PT. PLN (Persero) sebesar Rp315 kWh. berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda antara Perum Jasa Tirta II dan PT. PLN (Persero) dengan No. : 1/97/SPU-Add/2018 dan No. : 1466.PJ/DAN.02.04/DIR/2018 tanggal 28 November 2018. Tarif pemakaian jasa fasilitas tenaga listrik PLTA Ir. H. Djuanda bagi pelanggan Non-PLN ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor 1/3/PRT/2015 tanggal 30 Januari 2015 untuk semua golongan tarif sebesar 80% dari Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pendapatan Air Baku

Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk penggunaan sumber daya air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar Rp262,00/m³ sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : 530/KPT.S/M/2019 tanggal 17 Juni 2019.

Tarif BJPSDA penggunaan sumber daya air oleh PDAM di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp122,29/m³, bagi Industri di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II di Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp208,60/m³. Industri yang mengambil langsung air dari waduk Jatiluhur dikenakan tarif tambahan sebesar Rp235,69/m³, terhitung mulai tanggal 4 April 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 216/KPT.S/M/2017 tanggal 4 April 2017. Dasar pengenaan tarif BJPSDA di Perum Jasa Tirta II pada tahun 2018 masih mengikuti SK tersebut diatas.

26. OPERATING REVENUES (continued)

a. Water Resources Revenue (continued)

Electricity Revenues

Electric power supply tariff year 2019 to PT. Electricity State Company (Persero) amounting to Rp323/kWh based on Addendum VI No : 1/45/SPU-ADD/2018 and No. 1466. PJ/DAN. 02.04/DIR/2018 dated 29 November 2018 on the letter of purchase of electrical power supply of PLTA Ir. H. Djuanda between Jasa Tirta II and PT. PLN (Persero) No. 1/97/SPU/2004 and No. 0189. PJ/063/DIR/2004 dated August 2, 2004 which is valid since 1 July 2017.

The selling price of electricity to PT. PLN (Persero) are Rp315 kWh. based on the Electricity Sales and Purchases Agreement in Hydroelectric Ir. H. Juanda between Perum Jasa Tirta II and PT. PLN (Persero) No. : 1/97/SPU-Add/2018 dan No. : 1466.PJ/DAN.02.04/DIR/2018 dated November 28, 2018. Th selling price of electricity of PLTA Ir. H. Djuanda for Non PLN customers determined by the Board of Directors Regulation No. 1/3/PRT/2015 dated January 30, 2015 for all group of customers are 80 % of Electric Power Rate determined by the Government.

Raw Water Revenues

Tarif fee for water resource Management Services (BJPSDA) for the use of water resources for regional water supply (PDAM) Jakarta Special Capital Region stipulated for the year 2019 for Rp262,00/M³ in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and housing No.: 530/KPT.S/M/2019 dated 17 June 2019.

BJPSDA rate for water usage for PDAM in the area of Perum Jasa Tirta II in West Java Province is stated at Rp 122,29/m³. It was stated at Rp208,60/m³, for industry in West Java. And there is additional charge for industry taken water directly from Jatiluhur reservoir at RpRp235,69/m³, since April, 4 2017 based on Decree of Ministry of Public Works No. 216/KPT.S/M/2017 dated April, 4 2017, The basis of BJPSDA tariff at Perum Jasa Tirta II in 2018 still follow the DECREE above.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

a. Pendapatan Sumber Daya Air (lanjutan)

Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Ir. H. Djuanda sebesar Rp85,28/kWh, Saguling sebesar Rp14,01/kWh dan Cirata sebesar Rp45,69/kWh terhitung mulai tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : 935/KPT.S/M/2017.

Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi PDAM di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp130,81/m3, bagi Industri di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp224,71/m3 dan bagi Industri yang mengambil air langsung dari Waduk Jatiluhur sebesar Rp251,80/m3 terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. : 765/KPT.S/M/2019.

26. OPERATING REVENUES (continued)

a. Water Resources Revenue (continued)

BJPSDA Tarif for the utilization of water resources for hydroelectric power (PLTA) in Ir. H. Djuanda Reservoir of Rp85, 28/kWh, Saguling of Rp14,01/kWh and Cirata amounting to Rp45,69/kWh calculated from 22 November 2017 according to the decree of the Minister of Public Works and housing No.: 935/KPT.S/M/2017.

BJPSDA Tariff for the utilization of water resources for PDAM in West Java province for Rp130,81/m3, for industries in West Java province of Rp224,71/m3 and for industries that take water directly from Jatiluhur Reservoir of Rp251,80/M3 from 23 August 2019 according to the decree of the Minister of Public Works and people's housing No.: 765/KPT.S/M/2019.

b. Pendapatan Non Sumber Daya Air

	2020
b.4 Pemanfaatan Lahan	50.143.261.874
b.5 Pariwisata	9.102.081.748
b.6 Air Dalam Kemasan (AMDK)	3.685.240.039
b.7 Laboratorium	6.057.207.000
b.8 Usaha Lainnya	1.417.595.887
Jumlah	70.405.386.548

b. Non Water Resources Revenue

	2019
b.4 Pemanfaatan Lahan	54.325.876.692
b.5 Pariwisata	15.076.052.465
b.6 Air Dalam Kemasan (AMDK)	5.551.451.170
b.7 Laboratorium	5.125.980.000
b.8 Usaha Lainnya	532.590.368
Total	80.611.950.695

Land Utilization b.4
 Tourism b.5
 Bottled Drinking Water (AMDK) b.6
 Laboratory b.7
 Others b.8

b.4 Sewa Lahan

Sewa	
Lahan Petani	2.955.031.779
Sewa Lahan	
Non Petani	47.188.230.095
Sub Jumlah	50.143.261.874

b.4 Land Lease
 Land Lease
 Farmers Revenues
 Land Lease
 Non Farmers Revenues
Total

b.5 Pariwisata

Pendapatan Rekreasi	3.512.530.186
Pendapatan Hotel & Bungalow	2.548.091.073
Pendapatan Water World	233.045.150
Pendapatan Food & Beverages	2.749.411.262
Pendapatan Room Convention	58.966.927
Pendapatan Pariwisata Lain	37.150
Jumlah	9.102.081.748

b.5 Tourism
 Recreation Revenues
 Hotel and Bungalow Revenues
 Water World Revenues
 Food & Beverages Revenues
 Room Convention Revenues
 Other Tourism Revenues
Total

b.6 AMDK

AMDK	3.685.240.039
Jumlah	3.685.240.039

b.6 AMDK
 AMDK
Total

b.7 Laboratorium

Laboratorium	6.057.207.000
Jumlah	6.057.207.000

b.7 Laboratory
 Laboratory
Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

b. Pendapatan Non Sumber Daya Air (lanjutan)

b.8 Usaha Lainnya

	2020	2019
Sewa Alat Besar	87.850.000	29.020.000
Sewa Peralatan Listrik	-	39.599.833
Pendapatan Lain-lain	1.329.745.887	463.970.535
Pendapatan KJA	-	-
Jumlah	1.417.595.887	532.590.368

Pendapatan bersih per sifat dan hubungan transaksi,
 sebagai berikut:

	2020	2019
a. Pihak Ketiga	436.629.063.237	338.867.147.281
b. Pihak Berelasi	452.979.448.443	388.858.236.092
Jumlah	889.608.511.680	727.725.383.373

Tidak terdapat pelanggan dengan nilai penjualan di atas
 10% per jenis pendapatan untuk tahun yang berakhir
 tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

26. OPERATING REVENUES* (continued)

b. Non Water Resources Revenue (continued)

b.8 Other Business

Large Equipment Rental
Rent electric equipment
Other Revenues
KJA Revenues
Total

*Nature of relationships and transactions of net revenues,
 as follows:*

	2020	2019
a. Third Parties	436.629.063.237	338.867.147.281
b. Related Parties	452.979.448.443	388.858.236.092
Total	889.608.511.680	727.725.383.373

*There are no customers whose more than 10% of
 Company's sales for each of types of sales for the year
 ended December 31, 2020 and 2019.*

27. BEBAN USAHA

BEBAN SUMBER DAYA AIR

	2020	2019
a. Beban Listrik	101.633.949.799	96.429.707.942
b. Beban Air Baku	337.820.873.373	309.817.481.095
c. Beban Air Bersih	25.354.149.243	15.618.891.301
Jumlah	464.808.972.415	421.866.080.338

27. OPERATING EXPENSES

WATER RESOURCES EXPENSES

	2020	2019
a. Electricity Expenses	101.633.949.799	96.429.707.942
b. Raw Water Expenses	337.820.873.373	309.817.481.095
c. Water Expenses	25.354.149.243	15.618.891.301
Total	464.808.972.415	421.866.080.338

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

a. Beban Listrik

a. Electricity Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	12.733.304.918	11.183.486.941	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	3.972.635.528	5.825.710.668	Special Allowance
Honor, Piket & Lembur	1.754.916.988	1.113.338.562	Honorarium, Overtime
BPJS	1.197.349.436	1.077.287.504	BPJS
Pesangon	121.159.077	1.323.404.611	Employee Severance
Biaya Rumah Sakit	1.179.851.483	1.098.206.351	Medical Treatment
Past & Coming			Benefit of Pension Plan
Service (Dapen)	650.942.998	118.683.664	Expenses (Dapen)
Beban Personalia dan			Personalization and
Rupa-rupa	136.300.000	125.300.000	Miscellaneous Expenses
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Beban Umum	1.382.933.041	785.032.000	General Expenses
Beban Sewa	270.336.000	256.608.000	Rental Expenses
Beban Kantor	1.534.601.392	1.070.091.000	Office Expenses
Beban Bahan			Material Expenses
Bahan Bakar & Pelumas	861.975.000	882.510.000	Lubricant Oil
Bahan Kimia	947.516.500	864.674.500	Chemical
Bahan Farmasi	9.000.000	12.000.000	Pharmaceuticals
Spareparts	2.014.368.075	3.294.140.850	Spareparts
Bahan dan Perlengkapan K3	296.931.000	560.838.550	(K3) Material & Supplies
Bahan & Perlengkapan Lain-lain	1.186.688.850	1.226.231.050	Other Material & Supplies
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban P&P Sarana	-	476.383.600	Means P&P Expenses
Beban P&P Bangunan	-	357.239.950	Building P&P Expenses
Beban P&P Instalasi			Installation and
& Jaringan	24.790.339.567	15.271.552.870	Network Expenses
Beban P&P Alat Angkut			Conveyance and
dan Alat Besar	123.719.000	207.214.000	Heavy Tools Expenses
Beban P&P Perabot			Utility and Supplies
dan Peralatan	60.213.345	32.000.000	P&P Expenses
Beban Perencanaan	-	133.375.000	Planning Expenses
Beban Pemantaun, Evaluasi dan			Burden of allowance,
Pemberdayaan Masyarakat	-	39.583.137	evaluation and empowerment
Pelaksanaan Konservasi	397.799.600	396.301.400	Conservation Implementation
Overhead	46.011.068.001	48.698.513.734	Overhead
Jumlah	101.633.949.799	96.429.707.942	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

b. Beban Air Baku

b. Raw Water Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	43.845.730.659	39.174.376.026	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	14.523.375.311	21.268.970.592	Special Allowance
Honor, Piket & Lembur	1.856.515.397	1.168.026.825	Honorarium, Overtime
BPJS	4.177.101.583	3.701.758.752	BPJS
Pesangon	5.110.059.179	9.859.887.683	Employee Severance
Biaya Rumah Sakit	3.780.412.342	3.699.950.348	Medical Treatment
Past & Coming			Benefit of Pension Plan
Service (Dapen)	2.251.236.418	139.884.871	Expenses (Dapen)
Beban Personalia			Personalization and
dan Rupa-rupa	520.880.000	428.130.000	Miscellaneous Expenses
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Beban Umum	29.327.256.239	29.727.772.183	General Expenses
Beban Sewa	777.964.000	769.824.000	Office Expenses
Beban Kantor	7.619.381.027	5.587.438.237	Office Expenses
Beban Kesejahteraan Sosial	33.610.000	33.990.000	Office Expenses
Beban Operasi SDA	16.660.785.001	16.941.747.160	Operating Expenses SDA
Beban Bahan			Material Expenses
Bahan Bakar & Pelumas	1.650.547.650	1.208.855.100	Lubricant Oil
Bahan Kimia	1.201.835.410	1.177.017.870	Chemical
Spareparts	719.145.968	851.051.350	Spareparts
Bahan dan Perlengkapan K3	658.491.500	907.006.300	(K3) Material & Supplies
Bahan & Perlengkapan Lain-lain	1.671.793.300	1.821.402.950	Other Material & Supplies
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban Pengamanan Tanah	-	19.968.700	Land Security Expenses
Beban P&P Sarana	691.941.650	1.395.866.360	Facilities P&P Expenses
Beban P&P Bangunan	38.873.257.271	46.133.975.204	Building P&P Expenses
Beban P&P Instalasi			Installation and
& Jaringan	3.835.224.235	4.400.154.350	Network Expenses
Beban P&P Alat Angkut			Conveyance and
dan Alat Besar	274.006.175	190.104.900	Heavy Tools Expenses
Beban P&P Perabot			Utility and Supplies
dan Peralatan	135.840.200	354.134.263	P&P Expenses
Beban Aktiva Lain-lain	1.449.299.325	1.503.754.950	Other Asset Expenses
Beban Sistem Informasi	583.873.125	429.170.163	Information Systems Expenses
Beban Perencanaan	959.284.850	496.621.500	Planning Expenses
Pemantauan Evaluasi &			Monitoring, Evaluating, and
Pemberdayaan Masyarakat			Empowering Society
Beban Monev dan Pemberdayaan	251.807.800	727.829.700	Monev & Empowering Expenses
Beban Perjalanan Dinas	349.575.000	275.170.000	Official Travel Expenses
Pelaksanaan Konservasi	14.390.364.784	12.425.628.775	Conservation Implementation
Overhead	139.640.277.974	102.998.011.983	Overhead
Jumlah	337.820.873.373	309.817.481.095	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

c. Beban Air Bersih

c. Clean Water Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	3.616.998.555	3.759.832.526	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	771.916.401	823.940.532	Special Allowance
Honor, Piket & Lembur	600.306.856	179.258.833	Honorarium, Overtime
BPJS	285.522.271	253.091.523	BPJS
Pesangon	150.549.277	-	Employee Severance
Biaya Rumah Sakit	118.046.516	186.005.339	Medical Treatment
Past & Coming			Benefit of Pension Plan
Service (Dapen)	134.225.949	13.950.488	Expenses (Dapen)
Beban Personalia			Personalization and
dan Rupa-rupa	26.317.500	27.647.411	Miscellaneous Expenses
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Beban Umum	1.061.169.538	992.441.917	General Expenses
Beban Administrasi	156.300	-	Administration Expenses
Beban Sewa	183.356.529	1.263.069.699	Rental Expenses
Beban Kantor	390.221.945	305.028.772	Office Expenses
Beban Kesejahteraan Sosial	21.202.887	19.878.300	Office Expenses
Beban Bahan			Material Expenses
Bahan Bakar & Pelumas	46.314.000	61.480.000	Lubricant Oil
Bahan Kimia	1.583.074.105	1.597.057.440	Chemical
Spareparts	99.760.000	99.548.000	Spareparts
Bahan dan Perlengkapan K3	18.808.158	20.577.800	(K3) Material & Supplies
Beban Bahan & Perlengkapan	99.643.000	164.726.450	Material & Supplies
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban P&P Bangunan	1.788.715.595	476.806.200	Building P&P Expenses
Beban P&P Instalasi			Installation and
& Jaringan	1.218.139.798	1.960.856.051	Network Expenses
Beban P&P Alat Angkut dan Alat			Conveyance and Heavy Tools
Besar	14.940.000	-	Expenses
Beban P&P Perabot			Utility and Supplies
dan Peralatan	295.682.800	349.519.550	P&P Expenses
Beban Aktiva Lain-lain	62.843.306	-	Others Asset Expenses
Beban Sistem Informasi	36.359.919	36.764.700	Information Systems Expenses
Beban Perencanaan	268.768.030	22.500.000	Planning Expenses
Pemantauan, Evaluasi dan			Monitoring, Evaluating, and
Pemberdayaan Masyarakat	18.944.107	15.829.838	Empowering Society
Pelaksanaan Konservasi	1.896.473.488	726.820.696	Conservation Implementation
Overhead	10.545.692.413	2.262.259.236	Overhead
Jumlah	25.354.149.243	15.618.891.301	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

BEBAN NON SUMBER DAYA AIR

NON WATER RESOURCES EXPENSE

	2020	2019	
a. Beban Pariwisata	23.146.913.933	24.693.622.906	a. Tourism Expenses
b. Beban Pemanfaatan Lahan	6.941.899.404	7.565.316.684	b. Land Utilization Expenses
c. Beban Laboratorium	6.668.745.923	5.383.847.503	c. Laboratory Expenses
d. Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	6.655.031.880	8.365.725.521	d. Bottled Drinking Water (AMDK) Expenses
e. Beban Usaha Lainnya	632.117.938	680.284.141	e. Other Operating Expenses
Jumlah	44.044.709.078	46.688.796.755	Total

a. Beban Pariwisata

a. Tourism Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	937.779.450	427.757.097	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	304.014.346	168.490.690	Special Allowance
Honor, Piket & Lembur	24.265.708	-	Honorarium, Overtime
BPJS	75.571.360	37.736.539	BPJS
Pesangon	-	18.085.695	Employee Severance
Biaya Rumah Sakit	56.991.428	67.996.310	Medical Treatment
Past & Coming Service (Dapen)	38.600.629	9.251.388	Cost of Pension Plan Expenses (Dapen)
Beban Personalia dan Rupa-rupa	7.490.000	4.140.000	Personalization and Miscellaneous Expenses
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Beban Umum	5.595.908.976	6.695.361.181	General Expenses
Beban Administrasi	126.251.584	150.000.000	Administration Expenses
Beban Sewa	37.339.156	42.768.000	Rent Expenses
Beban Kantor	274.088.151	122.517.983	Office Expenses
Beban Bahan			Material Expenses
Persediaan Pariwisata	1.991.595.443	2.091.830.415	Tourism Inventory
Bahan Bakar & Pelumas	22.582.159	18.969.000	Lubricant Oil
Bahan Kimia	54.715.845	111.113.765	Chemical
Bahan dan Perlengkapan K3	4.191.700	12.840.000	Medical Equipment Expenses
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban P&P Sarana	598.480.000	667.365.900	Facilities P&P Expenses
Beban P&P Bangunan	468.396.040	1.301.693.350	Building P&P Expenses
Beban P&P Instalasi & Jaringan	279.706.850	115.722.900	Installation and Network Expenses
Beban P&P Alat Angkut dan Alat Besar	287.496.900	24.045.862	Conveyance and Heavy Tools Expenses
Beban P&P Perabot dan Peralatan	435.833.637	3.227.132.089	Utility and Supplies P&P Expenses
Beban Sistem Informasi	177.050.109	287.312.675	Information Systems Expenses
Pelaksanaan Konservasi	540.453.700	116.716.700	Conservation Implementation
Overhead	10.808.110.762	8.974.775.367	Overhead
Jumlah	23.146.913.933	24.693.622.906	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

b. Beban Pemanfaatan Lahan

b. Land Utilization Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	3.809.250.563	3.367.009.642	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	276.427.095	559.869.159	Special Allowance
BPJS	451.826.039	415.277.999	BPJS
Pesangon	-	492.332.796	Employee Severance
Past & Coming			Benefit of Pension Plan
Service (Dapen)	242.367.731	16.570.671	Expenses (Dapen)
Beban Personalia Rupa-rupa	41.230.000	47.020.000	Miscellaneous
Beban Umum & Administrasi	1.481.248	149.409.338	General & Administration Expenses
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban Pengamanan Tanah	50.000.000	99.707.300	Land Security
Beban Perencanaan	-	14.989.000	Planning Expenses
Overhead	2.069.316.728	2.403.130.779	Overhead
Jumlah	6.941.899.404	7.565.316.684	Total

c. Beban Laboratorium

c. Laboratory Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	1.780.642.489	1.401.112.983	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	570.876.200	527.651.606	Special Allowance
BPJS	171.115.443	139.478.731	BPJS
Pesangon	209.473.597	11.851.638	Employee Severance
Biaya Rumah Sakit	120.099.764	162.643.277	Medical Treatment
Past & Coming			Benefit of Pension Plan
Service (Dapen)	85.036.464	2.051.771	Expenses (Dapen)
Beban Personalia Rupa-rupa	15.600.000	15.200.000	Miscellaneous
Beban Administrasi			Administration Expenses
Beban Umum	707.140.123	508.821.884	General Expenses
Beban Sewa	70.941.957	44.484.000	Rent Expenses
Beban Kantor	262.479.519	136.385.204	Office Expenses
Beban Bahan			Material Expenses
Bahan Kimia	1.157.100.464	1.108.460.281	Chemical
Bahan perlengkapan & K3	15.950.000	13.400.000	Medical Equipment Expenses
Bahan & Perlengkapan Lain-lain	30.000.000	19.998.000	Other Material & Supplies
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban P&P Bangunan	49.947.800	24.966.000	Building P&P Expenses
Beban P&P Alat Angkut dan Alat Besar	5.250.000	5.300.000	Conveyance and Heavy Tools Expenses
Beban P&P Perabot & Peralatan	145.332.250	82.347.759	Utility & Supplies P&P Expenses
Beban Sistem Informasi	7.600.000	5.350.000	Information Systems Expenses
Beban Perencanaan	59.996.000	50.000.000	Planning Expenses
Pemantauan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	84.844.400	220.078.433	Monitoring, Evaluating, and Empowering Society
Pelaksanaan Konservasi	163.500.000	203.999.200	Conservation Implementation
Overhead	955.819.453	700.266.736	Overhead
Jumlah	6.668.745.923	5.383.847.503	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN USAHA (lanjutan)

27. OPERATING EXPENSES (continued)

d. Beban Air Minum Dalam Kemasan

d. Bottled Drinking Water (AMDK) Expenses

	2020	2019	
Beban Operasi & Pemeliharaan			Operation & Maintenance Expenses
Beban Personalia			General Affairs Expenses
Beban Gaji	390.008.909	794.930.035	Salaries Expenses
Tunjangan Khusus	114.325.411	372.768.412	Special Allowance
BPJS	43.912.457	76.885.118	BPJS
Pesangon	-	70.333.283	Employee Severance
Biaya Rumah Sakit	12.463.826	258.856.714	Medical Treatment
Past & Coming			Benefit of Pension Plan
Service (Dapen)	24.576.024	13.644.039	Expenses (Dapen)
Beban Personalia dan Rupa-rupa	4.500.000	9.400.000	ation and Miscellaneous Expenses
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Beban Umum	2.008.567.423	2.124.530.539	General Expenses
Beban Sewa	193.171.000	206.844.000	Rent Expenses
Beban Kantor	42.978.324	21.842.900	Office Expenses
Beban Bahan			Material Expenses
Bahan Kimia	19.990.900	29.493.800	Chemical
Persediaan Spareparts	2.100.000	-	Spareparts Supplies
Persediaan AMDK	1.578.168.015	3.326.237.304	AMDK Inventory
Bahan dan Perlengkapan K3	20.001.400	21.141.100	(K3) Material & Supplies
Bahan & Perlengkapan Lain-lain	61.460.780	83.537.172	Other Material & Supplies
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenses
Beban P&P Bangunan	24.761.800	33.575.000	Building P&P Expenses
Beban P&P Instalasi			Installation and Network
& Jaringan	58.755.750	16.248.500	Expenses
Beban P&P Alat Angkut dan Alat			Conveyance and Heavy Tools
Besar	62.675.000	168.177.000	Expenses
Beban P&P Perabot			Utility and Supplies P&P
dan Peralatan	115.651.942	111.372.480	Expenses
Beban Sistem Informasi	6.366.500	355.000	Information Systems Expenses
Beban Perencanaan	5.500.000	-	Planning Expenses
Pemantauan, Evaluasi dan			Monitoring, Evaluating, and
Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000	20.000.000	Empowering Society
Pelaksanaan Konservasi	25.723.000	64.406.012	Conservation Implementation
Overhead	1.819.373.419	541.147.113	Overhead
Jumlah	6.655.031.880	8.365.725.521	Total

e. Beban Usaha Lainnya

e. Other Operating Expenses

	2020	2019	
Bahan Farmasi	206.116.788	275.805.141	Pharmaceuticals Expenses
Bahan dan Perlengkapan K3	251.990.000	364.479.000	(K3) Material & Supplies
Beban Perencanaan	115.000.000	-	Planing Expense
Bahan & Perlengkapan	59.011.150	40.000.000	Material & Supplies
Jumlah	632.117.938	680.284.141	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN PEMASARAN

28. MARKETING EXPENSES

	2020	2019	
Beban Promosi dan Reklame	3.679.592.600	11.997.638.479	Marketing and Advertising Expenses
Beban Jamuan	1.691.032.962	2.426.516.578	Entertainment Expenses
Jumlah	5.370.625.562	14.424.155.057	Total

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020	2019	
Beban Personalia	65.495.660.993	74.425.856.694	Employees Expenses
Beban Umum dan Administrasi	10.665.206.876	9.109.595.437	General and Administration Expenses
Beban Pemeliharaan	64.576.459.618	56.563.778.867	Maintenance Expenses
Beban Sistem Informasi	6.742.532.675	3.739.589.232	Information Systems Expenses
Beban Perencanaan	9.580.755.537	11.868.787.306	Planning Expenses
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1.917.811.691	6.419.727.546	Monitoring, Evaluating and Empowering Society
Beban Pelaksanaan Konservasi	1.029.978.000	1.219.941.250	Conservation Implementation
Beban Penyusutan (Catatan 12)	4.287.530.628	4.452.013.026	Depreciation Expenses (Note 12)
Jumlah	164.295.936.020	167.799.289.358	Total

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

30. NON OPERATING INCOME (EXPENSE)

a. Pendapatan Non Usaha:

a. Non Operating Income:

	2020	2019	
Pendapatan Bunga Deposito	25.025.707.018	27.857.639.131	Interest of time deposits
Pendapatan Denda	1.670.319.633	5.837.482.018	Penalty Charge
Pengalihan Hak Atas Aset (lihat catatan 12)	-	215.764.480	Gain on Transfer of Assets Right (see note 12)
Pendapatan Jasa Giro	1.346.864.212	1.638.745.245	Interest of current account
Pendapatan Reschedul Piutang (lihat catatan 31.a)	-	12.242.909.453	Income on Receivable Rescheduling (see note 31.a)
Pendapatan Lainnya	201.112.699	903.712.473	Other Revenues
Adm Kontrak Pendapatan	600.000	2.100.000	Revenue Contracts Adm.
Pendapatan Poliklinik	1.197.120	3.309.992	Polyclinic Revenue
Jumlah	28.245.800.682	48.701.662.792	Total

b. Beban Non Usaha:

b. Other Expenses:

	2020	2019	
Beban Koreksi Pajak	17.989.457.981	17.832.524.379	Tax Correction
Penurunan Nilai Piutang	7.037.416.365	2.786.590.626	Impairment Receivables
Beban Lain	1.758.130.595	-	Other Expenses
Jumlah	26.785.004.941	20.619.115.005	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA (lanjutan)

Beban koreksi pajak tahun 2020 sebesar
 Rp17.989.457.981 terdiri dari:

	2020
- Koreksi atas Restitusi Pajak Tahun 2018	14.140.503.291
- Sanksi Administrasi (Bunga)	
PPN Dalam Negeri Tahun 2015	3.770.689.089
- Lainnya	78.265.601
	17.989.457.981

Beban koreksi pajak tahun 2019 sebesar
 Rp17.852.484.379 terdiri dari:

	2019
- Koreksi atas Restitusi Pajak Tahun 2017	12.635.432.525
- Sanksi Administrasi (Bunga)	
PPN Dalam Negeri Tahun 2015	3.126.874.067
- Kurang Bayar PPN atas	
BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda	2.018.297.400
- Lainnya	51.920.387
	17.832.524.379

30. NON OPERATING INCOME (EXPENSE) (continued)

Tax correction expenses in year 2020 Rp17.989.457.981
 consist of:

Corection of Tax Restitution in Year 2018 -
 Administration Pinalty (interest) -
 VAT in Year 2015
 Others -

Tax correction expenses in year 2019 Rp17.852.484.379
 consist of:

Corection of Tax Restitution in Year 2018 -
 Administration Pinalty (interest) -
 VAT in Year 2015
 VAT Underpayment as BJPSDA -
 PLTA Ir. H. Djuanda
 Others -

31. INFORMASI PENTING LAINNYA

Kesepakatan Penyelesaian Piutang

a. PT Sang Hyang Seri

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-3/DIR/02/2020, tanggal 21 Februari 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Sang Hyang Seri sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp42.136.015.150,- (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta lima belas ribu rupiah).
- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur 5 (lima) kali angsuran yang di bayarkan setiap tahun, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION

Settlement of Receivables Agreement

a. PT Sang Hyang Seri

As "News events receivables Settlement agreement " Number: BA-3/DIR/02/2020, dated 21 February 2020, that the FIRST PARTY in this case the service of Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT Sang Hyang Seri agreed to bind themselves to re-scheduling (process) The SECOND PARTY's payment of BJPSADA to the FIRST PARTY, with the following provisions:

- 1) The FIRST PARTY gives the SECOND PARTY the opportunity to reschedule the SECOND PARTY's debt payment obligation to the FIRST party, so that the SECOND PARTY can promptly complete its obligations.
- 2) The amount of SECOND-PARTY obligations based on SPU is Rp 42.136.015.150,-(forty two billion one hundred thirty six million fifteen thousand Rupiahs).
- 3) Payments that have not been settled by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above shall be settled by the SECOND PARTY by means of 5 (five) installments paid annually, on the 31st (thirty-first) of December (for Hereinafter referred to as the due date) as specified in the following table:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

a. PT Sang Hyang Seri (lanjutan)

3) (lanjutan)

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Jumlah Saldo Piutang / Outstanding AR	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
1	31 Desember 2020	42.136.015.150	1.044.876.000	41.091.139.150
2	31 Desember 2021	41.091.139.150	2.000.000.000	39.091.139.150
3	31 Desember 2022	39.091.139.150	6.000.000.000	33.091.139.150
4	31 Desember 2023	33.091.139.150	10.000.000.000	23.091.139.150
5	31 Desember 2024	23.091.139.150	23.091.139.150	-
Jumlah / Total			42.136.015.150	136.364.556.600

4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.

5) Masa *rescheduling* Pinjaman berlaku terhitung sejak tanggal Tiga puluh satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas (31-12-2019) dan berakhir sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024).

6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) maka PT Sang Hyang Seri (Persero) bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

Dengan adanya kesepakatan penyelesaian/ *Rescheduling* piutang, maka berdampak kepada penurunan nilai piutang Sang Hyang Seri dari sebelumnya sebesar Rp30.938.251.827 menjadi sebesar Rp9.479.092.840 dimana sebesar Rp9.217.797.645 mengurangi beban penurunan nilai periode berjalan dengan tingkat bunga wajar per 31 Desember 2019 6,25%.

Selanjutnya sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-01/DIR/02/2021, tanggal 25 Februari 2021, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Sang Hyang Seri sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

a. PT Sang Hyang Seri (continued)

3) (continued)

4) The FIRST PARTY shall deliver a written notice to the SECOND PARTY regarding the due date of the payment to be submitted since 3 (three) months prior to the payment due date and will be sent monthly until Expiration of the due date in the year of payment.

5) The loan *rescheduling* period is valid from the Thirty-first December Two Thousand Nineteen (31-12-2019) and ends until the Thirty-First December Two Thousand Twenty-Four (31-12-2024).

6) If the payment is not carried out by PT Sang Hyang Seri (Persero) then PT Sang Hyang Seri (Persero) is willing to be settled with a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

By the agreement of the settlement/process receivables, it affected the decrease in the value of receivables Sang Hyang Seri from the previous amount of Rp30.938.251.827 to be amounting to Rp9.479.092.840 Where amounting to Rp 9.217.797.645 reduce the burden of impairment of walking period with a reasonable interest rate per 31 December 2019 6.25%.

Next, As "News events receivables Settlement agreement " Number: BA-01 / DIR / 02/2021, February 25, 2021, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT Sang Hyang Seri agree to mutually bind themselves to reschedule the SECOND PARTY's BJPSDA payment to the FIRST PARTY, with the following conditions:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

a. PT Sang Hyang Seri (lanjutan)

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA tahun 2020 adalah sebesar Rp9.647.648.998,- (Sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang di bayarkan setiap triwulan (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) terhitung mulai tanggal tiga puluh bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu (30/06/2021) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Jumlah Saldo Piutang / Outstanding AR	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
1	30 Juni 2021	9.647.648.998	500.000.000	9.147.648.998
2	30 September 2021	9.147.648.998	750.000.000	8.397.648.998
3	31 Desember 2021	8.397.648.998	1.000.000.000	7.397.648.998
4	31 Maret 2022	7.397.648.998	1.500.000.000	5.897.648.998
5	30 Juni 2022	5.897.648.998	2.000.000.000	3.897.648.998
6	30 September 2022	3.897.648.998	3.897.648.998	-
Jumlah / Total			9.647.648.998	-

- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.
- 5) Masa *rescheduling* Piutang berlaku terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-02-2021) dan berakhir sampai dengan tanggal Tiga puluh September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-09-2022).
- 6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri maka PT. Sang Hyang Seri bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

a. PT Sang Hyang Seri (continued)

- 1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY the opportunity to reschedule the debt repayment obligations of the SECOND PARTY BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.
 - 2) The amount of the SECOND PARTY's obligations in 2020 is IDR 9,647,648,998 (nine billion six hundred forty-seven million six hundred forty-eight thousand nine hundred and ninety-eight rupiah).
 - 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in 6 (six) installments paid quarterly (here in after referred to as the due date) starting on the Thirty of June Two Thousand Twenty One (30/06/2021) as specified in the following table:
- | NO | Tanggal Jatuh Tempo /
Maturity date | Jumlah Saldo Piutang /
Outstanding AR | Angsuran /
Installment | Sisa Tagihan Setelah
Cicilan / Outstanding AR
After Installment |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---|
| 1 | 30 Juni 2021 | 9.647.648.998 | 500.000.000 | 9.147.648.998 |
| 2 | 30 September 2021 | 9.147.648.998 | 750.000.000 | 8.397.648.998 |
| 3 | 31 Desember 2021 | 8.397.648.998 | 1.000.000.000 | 7.397.648.998 |
| 4 | 31 Maret 2022 | 7.397.648.998 | 1.500.000.000 | 5.897.648.998 |
| 5 | 30 Juni 2022 | 5.897.648.998 | 2.000.000.000 | 3.897.648.998 |
| 6 | 30 September 2022 | 3.897.648.998 | 3.897.648.998 | - |
| Jumlah / Total | | | 9.647.648.998 | - |
- 4) The FIRST PARTY will deliver a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted from 3 (three) months before the due date of payment and will be sent every month until the expiration date of the payment due date.
 - 5) The period of rescheduling of Accounts Receivable starts from the Twenty-five February year Two Thousand Twenty One (25-02-2021) and ends until the Thirty September Year Two Thousand Twenty Two (30-09-2022).
 - 6) If the payment is not made by PT Sang Hyang Seri, PT. Sang Hyang Seri agreed to settle it with a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

b. PT. Sri Pertiwi Sejati

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-03/GM1.DOP/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT. Sri Pertiwi Sejati sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp234.220.060,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu enam puluh rupiah) yang terdiri dari piutang air.
- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang di bayarkan setiap bulan, pada tanggal dua puluh lima bulan Maret dua ribu dua satu (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Jumlah Saldo Piutang / Outstanding AR	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
1	25 Maret 2021	234.220.060	36.719.600	197.500.460
2	25 April 2021	-	39.280.620	158.219.840
3	25 Mei 2021	-	39.554.960	118.664.880
4	25 Juni 2021	-	39.554.960	79.109.920
5	25 Juli 2021	-	39.554.960	39.554.960
6	25 Agustus 2021	-	39.554.960	-
Jumlah / Total			234.220.060	-

- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

b. PT. Sri Pertiwi Sejati

as "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" Number: BA-03 / GM1.DOP / 12/2020, dated December 30, 2020, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT. Sri Pertiwi Sejati agreed to mutually commit themselves to rescheduling the SECOND PARTY's BJPSDA payments to the FIRST PARTY, with the following provisions:

- 1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to reschedule the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.
- 2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on the SPU is IDR 234,220,060 (two hundred thirty-four million two hundred twenty thousand sixty rupiah) which consists of water
- 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in 6 (six) monthly installments, on the twenty-fifth of March two thousand and two one (hereinafter referred to as the date maturity) as specified in the following table:

- 4) The FIRST PARTY will submit a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted every month before the due date of payment and will be sent monthly until the expiry date of the due date in the payment year.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

b. PT. Sri Pertiwi Sejati (lanjutan)

- 5) Masa *rescheduling* Piutang berlaku terhitung sejak tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020) dan berakhir sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-08-2021).
- 6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Sri Pertiwi Sejati maka PT. Sri Pertiwi Sejati bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

Selanjutnya sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-05/GM1.DOP/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT. Sri Pertiwi Sejati sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp424.151.440,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu enam puluh rupiah) yang terdiri dari piutang lahan.
- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur selama 3 (tiga) kali angsuran yang di bayarkan setiap bulan, pada tanggal dua puluh lima bulan Februari dua ribu dua puluh satu (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

b. PT. Sri Pertiwi Sejati (continued)

- 5) The *rescheduling* period for Accounts Receivable starts from the Thirty of December in Two Thousand Twenty (30-12-2020) and ends until the twenty-fifth of August, Year Two Thousand Twenty One (25-08-2021).

- 6) If the payment is not made by PT. Sri Pertiwi Sejati, PT. Sri Pertiwi Sejati is willing to settle a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

The Next as "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" Number: BA-05 / GM1.DOP / 12/2020, dated December 30, 2020, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT. Sri Pertiwi Sejati agreed to mutually commit themselves to *rescheduling* the SECOND PARTY's BJPSDA payments to the FIRST PARTY, with the following provisions:

- 1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to *reschedule* the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.
- 2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on the SPU is IDR 424,151,440 (two hundred thirty-four million two hundred twenty thousand sixty rupiah) which consists of land receivables.
- 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in 3 (three) monthly installments, on the twenty-fifth of February two thousand and twenty one (hereinafter referred to as the due date) as specified in the following table:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

b. PT. Sri Pertiwi Sejati (lanjutan)

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Jumlah Saldo Piutang / Outstanding AR	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
1	25 Februari 2021	424.151.440	176.575.470	247.575.970
2	25 Maret 2021	-	71.000.500	176.575.470
3	25 Juni 2021	-	176.575.470	-
Jumlah / Total			424.151.440	-

4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.

5) Masa *rescheduling* Piutang berlaku terhitung sejak tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020) dan berakhir sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-06-2021).

6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Sri Pertiwi Sejati maka PT. Sri Pertiwi Sejati bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-02/GM1.DOP/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

b. PT. Sri Pertiwi Sejati (continued)

4) The FIRST PARTY will submit a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted every month before the due date of payment and will be sent monthly until the expiry date of the due date in the payment year.

5) The *rescheduling* period for Accounts Receivable starts from the Thirty of December in Two Thousand Twenty (30-12-2020) and ends until the twenty-fifth of June, Year Two Thousand Twenty One (25-06-2021).

6) If the payment is not made by PT. Sri Pertiwi Sejati, PT. Sri Pertiwi Sejati is willing to settle a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi

As with the "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" Number: BA-02 / GM1.DOP / 12/2020, dated December 30, 2020, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT. The main rainbow light ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi agreed to mutually commit themselves to *rescheduling* the SECOND PARTY's BJPSDA payments to the FIRST PARTY, with the following provisions:

1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to *reschedule* the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi (lanjutan)

- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp759.241.374,28,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari piutang air dan Rp66.520.200,00 (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari piutang lahan.
- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur selama 79 (tujuh puluh sembilan) kali angsuran yang di bayarkan setiap bulan, pada tanggal lima bulan April 2021 (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi (continued)

- 2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on SPU is IDR 759,241,374.28, - (seven hundred and fifty-nine million two hundred forty-one thousand three hundred seventy-four point twenty eight rupiahs) consisting of water receivables and IDR 66,520,200.00 (sixty-six million five hundred twenty thousand two hundred baikh) consisting of land receivables.
- 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in installments for 79 (seventy nine) installments paid every month, on the fifth of April, 2021 (hereinafter referred to as the due date) as specified in the following table:

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
			825.761.574,28
1	05-Apr-21	42.000.000	783.761.574
2	05 Mei 2021	10.000.000	773.761.574
3	05 Juni 2021	10.000.000	763.761.574
4	05 Juli 2021	10.000.000	753.761.574
5	05 Agustus 2021	10.000.000	743.761.574
6	05-Sep-21	10.000.000	733.761.574
7	05 Oktober 2021	10.000.000	723.761.574
8	05 Nopember 2021	10.000.000	713.761.574
9	05 Desember 2021	10.000.000	703.761.574
10	05 Januari 2022	10.000.000	693.761.574
11	05 Februari 2022	10.000.000	683.761.574
12	05 Ma ret 2022	10.000.000	673.761.574
13	05-Apr-22	10.000.000	663.761.574
14	05 Mei 2022	10.000.000	653.761.574
15	05 Juni 2022	10.000.000	643.761.574
16	05 Juli 2022	10.000.000	633.761.574
17	05 Agustus 2022	10.000.000	623.761.574
18	05-Sep-22	10.000.000	613.761.574
19	05 Oktober 2022	10.000.000	603.761.574
20	05 Nopember 2022	10.000.000	593.761.574
21	05 Desember 2022	10.000.000	583.761.574
22	05 Januari 2023	10.000.000	573.761.574
23	05 Februari 2023	10.000.000	563.761.574
24	05 Ma ret 2023	10.000.000	553.761.574
25	05-Apr-23	10.000.000	543.761.574
26	05 Mei 2023	10.000.000	533.761.574
27	05 Juni 2023	10.000.000	523.761.574
28	05 Juli 2023	10.000.000	513.761.574
29	05 Agustus 2023	10.000.000	503.761.574
30	05-Sep-23	10.000.000	493.761.574

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

**c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo
Sejahtera Abadi (lanjutan)**

3) (lanjutan)

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

**c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo
Sejahtera Abadi (continued)**

3) (continued)

No	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
31	05 Oktober 2023	10.000.000	483.761.574
32	05 Nopember 2023	10.000.000	473.761.574
33	05 Desember 2023	10.000.000	463.761.574
34	05 Januari 2024	10.000.000	453.761.574
35	05 Februari 2024	10.000.000	443.761.574
36	05 Maret 2024	10.000.000	433.761.574
37	05-Apr-24	10.000.000	423.761.574
38	05 Mei 2024	10.000.000	413.761.574
39	05 Juni 2024	10.000.000	403.761.574
40	05 Juli 2024	10.000.000	393.761.574
41	05 Agustus 2024	10.000.000	383.761.574
42	05-Sep-24	10.000.000	373.761.574
43	05 Oktober 2024	10.000.000	363.761.574
44	05 Nopember 2024	10.000.000	353.761.574
45	05 Desember 2024	10.000.000	343.761.574
46	05 Januari 2025	10.000.000	333.761.574
47	05 Februari 2025	10.000.000	323.761.574
48	05 Maret 2025	10.000.000	313.761.574
49	05-Apr-25	10.000.000	303.761.574
50	05 Mei 2025	10.000.000	293.761.574
51	05 Juni 2025	10.000.000	283.761.574
52	05 Juli 2025	10.000.000	273.761.574
53	05 Agustus 2025	10.000.000	263.761.574
54	05-Sep-25	10.000.000	253.761.574
55	05 Oktober 2025	10.000.000	243.761.574
56	05 Nopember 2025	10.000.000	233.761.574
57	05 Desember 2025	10.000.000	223.761.574
58	05 Januari 2026	10.000.000	213.761.574
59	05 Februari 2026	10.000.000	203.761.574
60	05 Maret 2026	10.000.000	193.761.574
61	05-Apr-26	10.000.000	183.761.574
62	05 Mei 2026	10.000.000	173.761.574
63	05 Juni 2026	10.000.000	163.761.574
64	05 Juli 2026	10.000.000	153.761.574
65	05 Agustus 2026	10.000.000	143.761.574
66	05-Sep-26	10.000.000	133.761.574
67	05 Oktober 2026	10.000.000	123.761.574
68	05 Nopember 2026	10.000.000	113.761.574
69	05 Desember 2026	10.000.000	103.761.574
70	05 Januari 2027	10.000.000	93.761.574
71	05 Februari 2027	10.000.000	83.761.574
72	05 Maret 2027	10.000.000	73.761.574
73	05-Apr-27	10.000.000	63.761.574
74	05 Mei 2027	10.000.000	53.761.574
75	05 Juni 2027	10.000.000	43.761.574
76	05 Juli 2027	10.000.000	33.761.574
77	05 Agustus 2027	10.000.000	23.761.574
78	05-Sep-27	10.000.000	13.761.574
79	05 Oktober 2027	13.761.574	-
Jumlah / Total			31.103.402.794

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi (lanjutan)

- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.
- 5) Masa *rescheduling* Piutang berlaku terhitung sejak tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020) dan berakhir sampai dengan tanggal lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (05-10-2027).
- 6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Cahaya Pelangi Utama ex PT. Hosaindo Sejahtera Abadi maka PT. Cahaya Pelangi Utama ex PT. Hosaindo Sejahtera Abadi bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

d. PT. Eka Suryamustika

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-06/GM1.DOP/11/2029, tanggal 30 Desember 2019, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT. Eka Suryamustika sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp138.876.100,- (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri dari piutang lahan.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

c. PT. Cahaya Pelangi Utama ex. PT. Hosaindo Sejahtera Abadi (continued)

- 4) The FIRST PARTY will submit a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted every month before the due date of payment and will be sent monthly until the expiry date of the due date in the payment year.
- 5) The *rescheduling* period for Accounts Receivable starts from the thirtieth month of December in Two Thousand Twenty (30-12-2020) and ends until the fifth day of August, Year Two Thousand Twenty Seven (05-10-2027).
- 6) If the payment is not made by PT. Cahaya Pelangi Utama ex PT. Hosaindo Sejahtera Abadi, PT. Cahaya Pelangi Utama ex PT. Hosaindo Sejahtera Abadi is willing to settle it with a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

d. PT. Eka Suryamustika

As with the "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" Number: BA-06 / GM1.DOP / 11/2029, dated December 30, 2019, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT. Eka Suryamustika agreed to mutually commit himself to *rescheduling* the SECOND PARTY's BJPSDA payment to the FIRST PARTY, with the following provisions:

- 1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to *reschedule* the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.
- 2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on the SPU is IDR 138,876,100 (one hundred and thirty-eight million eight hundred seventy-six thousand and one hundred rupiah), which consists of land receivables.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

d. PT. Eka Suryamustika (lanjutan)

- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur selama 1 (satu) kali angsuran yang di bayarkan pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
1	26 Februari 2021	132.876.100	132.876.100
Jumlah / Total			132.876.100

- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.
- 5) Masa rescheduling Piutang berlaku terhitung sejak tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020) dan berakhir sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (26-02-2021).
- 6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Eka Suryamustika maka PT. Eka Suryamustika bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

e. PT Summarecon Agung Tbk

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-04/GM1.DOP/12/2020, tanggal 29 April 2019, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT. Summarecon Agung Tbk sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

d. PT. Eka Suryamustika (continued)

- 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in 1 (one) installments paid on the Twenty-sixth of February of the year Two Thousand Twenty One (hereinafter referred to as the date maturity) as specified in the following table:

- 4) The FIRST PARTY will submit a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted every month before the due date of payment and will be sent monthly until the expiry date of the due date in the payment year.
- 5) Accounts receivable rescheduling period starts from the thirtieth month of December of the year Two Thousand Twenty (30-12-2020) and ends until the twenty-sixth of February of the year two thousand and twenty one (26-02-2021).
- 6) If the payment is not made by PT. Eka Suryamustika, PT. Eka Suryamustika is willing to settle it with a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

e. PT Summarecon Agung Tbk

As with the "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" Number: BA-04 / GM1.DOP / 12/2020, April 29 2019, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT. Summarecon Agung Tbk agreed to mutually commit itself to rescheduling the SECOND PARTY's BJPSDA payments to the FIRST PARTY, with the following provisions:

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

e. PT Summarecon Agung Tbk (lanjutan)

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp365.297.630,- (Tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari piutang lahan.
- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur selama 1 (satu) kali angsuran yang di bayarkan pada tanggal 31 Maret (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

NO	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
1	31 Maret 2021	365.297.630	365.297.630
Total			365.297.630

- 4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.
- 5) Masa rescheduling Piutang berlaku terhitung sejak tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-12-2020) dan berakhir sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (31-03-2021).
- 6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Summarecon Agung Tbk maka PT. Summarecon Agung Tbk bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perum Jasa Tirta II.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

e. PT Summarecon Agung Tbk (continued)

- 1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to reschedule the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.
- 2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on the SPU is IDR 365,297,630 (Three hundred sixty-five million two hundred ninety-seven thousand six hundred and thirty rupiah) which consists of land receivables.
- 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in 1 (one) installments paid on March 31 (hereinafter referred to as the due date) as specified in the following table:

- 4) The FIRST PARTY will submit a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted every month before the due date of payment and will be sent monthly until the expiry date of the due date in the payment year.
- 5) Accounts receivable rescheduling period starts from the thirtieth month of December in Two Thousand Twenty (30-12-2020) and ends until the thirty-first day of March, two thousand and twenty-one (31-03-2021).
- 6) If the payment is not made by PT. Summarecon Agung Tbk, PT. Summarecon Agung Tbk is willing to settle it with a new agreement together with Perum Jasa Tirta II.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

f. PDAM Kabupaten Karawang

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: BA-09/DIR/12/2020, tanggal 07 Desember 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT. Summarecon Agung Tbk sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp3.344.540.589,- (Tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian / Description	Jumlah Piutang / Total Receivable	Keterangan / Information
1	Unit Wilayah / Region Units I	633.391.583	-
2	Unit Wilayah / Region Units II	2.600.626.744	-
3	Unit Wilayah / Region Units III	110.522.262	-
Jumlah / Total		3.344.540.589	

- 3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara :
 - a. Tagihan sebesar Rp 210.132.479,- adalah tagihan pemakaian air dan lahan di wilayah 1 dan 2 akan dibarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.
 - b. Tagihan sebesar Rp 2.832.591.297,- adalah tagihan pemakaian air dan lahan di wilayah 1,2, dan 3 terhadap tagihan ini pihak kedua menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - c. Tagihan sebesar Rp 293.132.592,- adalah tagihan pemakaian air dan lahan di wilayah 1,2 dan 3 tahun 2004 sampai dengan 2014 dan tagihan denda sebesar Rp 8.684.230,-

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

f. PDAM Kabupaten Karawang

As with the "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" Number: BA-09 / DIR / 12/2020, dated December 7, 2020, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PT. Summarecon Agung Tbk agreed to mutually commit itself to rescheduling the SECOND PARTY's BJPSDA payments to the FIRST PARTY, with the following provisions:

- 1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to reschedule the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.
- 2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on SPU is IDR 3,344,540,589 (Three billion three hundred forty-four million five hundred forty thousand five hundred eight and ninety rupiah), with the following details:

- 3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY by:
 - a. Bill of Rp. 210,132,479, - is a bill for water and land use in regions 1 and 2 that will be paid no later than December 31, 2020.
 - b. The bill of Rp 2,832,591,297 is a bill for water and land use in regions 1,2 and 3 against this bill the second party is awaiting a court ruling with permanent legal force.
 - c. Bill of Rp. 293,132,592, - is a bill for water and land use in regions 1,2 and 3 from 2004 to 2014 and a bill for a fine of Rp. 8,684,230.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

f. PDAM Kabupaten Karawang (lanjutan)

- 4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disetorkan melalui Rekening BRI Cabang Purwakarta :
 - a. Wilayah 1 dengan nomor rekening BRI 020601000101307
 - b. Wilayah 2 dengan nomor rekening BRI 007501000880300
 - c. Wilayah 3 dengan nomor rekening BRI 012301000034302
- 5) Masa rescheduling Piutang berlaku terhitung sejak tanggal 07 Desember 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 6) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian pada Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

g. PDAM Bhagasasi Bekasi

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" Nomor: 01/GM1.DOP/01/2020, tanggal 14 Januari 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perum Jasa Tirta II, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PDAM Bhagasasi Bekasi bersama-sama telah melakukan pembahasan atas piutang pemakaian air berdasarkan Surat Nomor : SD-1489/GM1.DOP/KU/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal : Konfirmasi Pembayaran Air Baku sebesar Rp 11.400.049.180,- (Sebelas milyar empat ratus juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) atas dasar kepentingan bersama yang dilandasi azas musyawarah untuk mufakat dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pembahasan pembayaran untuk pemakaian tagihan (*reschedulling*) PDAM Bekasi untuk pemakaian air periode Desember 2018 s.d November 2019 dengan total tagihan sebesar Rp 11.400.049.180,- (Sebelas milyar Empat ratus juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 25 s.d 30 di setiap bulannya dengan cicilan $\pm$ 38 (tiga puluh delapan) bulan minimal pembayaran Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan rencana pembayaran yang disepakati. Pembayaran dilakukan mulai bulan Januari 2020.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

f. PDAM Kabupaten Karawang (continued)

- 4) Payment as referred to in number 3 is deposited through the BRI Purwakarta Branch Account:
 - a. Region 1 with BRI account number 020601000101307
 - b. Region 2 with BRI account number 007501000880300
 - c. Region 3 with BRI account number 012301000034302
- 5) Accounts receivable rescheduling period starts from December 7, 2020 and ends until December 31, 2021.
- 6) If the dispute cannot be resolved by deliberation, the PARTIES agree to hand over the settlement to the Purwakarta District Court Office.

g. PDAM Bhagasasi Bekasi

As with the "Accounts Receivable Settlement Agreement Minutes" Number: 01 / GM1.DOP / 01/2020, dated January 14, 2020, that the FIRST PARTY in this case Perum Jasa Tirta II, and the SECOND PARTY in this case PDAM Bhagasasi Bekasi have jointly conducted discussion of water usage receivables based on Letter Number: SD-1489 / GM1.DOP / KU / 12/2019 dated 17 December 2019 Subject: Confirmation of Raw Water Payment of IDR 11,400,049,180, - (Eleven billion four hundred million forty nine thousand one hundred eighty rupiahs) on the basis of mutual interest based on the principle of deliberation to reach a consensus with the following results:

- 1) Based on the results of the discussion of payments for the use of PDAM Bekasi bills for water use for the period December 2018 to November 2019 with a total bill of IDR 11,400,049,180, - (Eleven billion Four hundred million forty-nine thousand one hundred and eighty rupiahs) will be paid on the date 25 to 30 in each month with $\pm$ 38 (thirty eight) months of installments with a minimum payment of IDR 300,000,000 (three hundred million rupiah) in accordance with the agreed payment plan. Payments are made starting in January 2020.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Kesepakatan Penyelesaian Piutang (lanjutan)

g. PDAM Bhagasasi Bekasi (lanjutan)

- 2) PDAM Bekasi sepakat untuk pemakaian air bulan berjalan akan dibayarkan setiap tanggal 15 di bulan berikutnya yang akan dimulai untuk tagihan pemakaian Desember 2019.
- 3) Berdasarkan pasal 5 ayat (5) point (a & b) setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sebagaimana pada pasal 5 ayat 6 adapun perhitungan terhadap tagihan sebesar Rp 11.400.049.180,- (Sebelas milyar empat ratus juta empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) adalah sebesar Rp 504.545.235,- (Lima ratus empat juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) akan dibayarkan pada 25 s.d 30 disetiap bulannya dengan rincian dibawah ini :

Rencana Penjadwalan Pembayaran Tagihan Pemakaian Air PDAM Bhagasasi:

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

Settlement of Receivables Agreement (continued)

g. PDAM Bhagasasi Bekasi (continued)

- 2) PDAM Bekasi agreed that the current month's water usage will be paid every 15th of the following month which will start for the December 2019 usage bill.

Based on article 5 paragraph (5) point (a & b), any late payment will be subject to a fine, as in the market 5 paragraph 6, the calculation of the bill is Rp. 11,400,049,180, - (Eleven billion four hundred million forty nine thousand one hundred and eighty rupiah) is IDR 504,545,235 (five hundred four million five hundred forty-five thousand two hundred and thirty-five rupiah) to be paid on 25 to 30 each month with the following details:

Rencana Penjadwalan Pembayaran Tagihan Pemakaian Air PDAM Bhagasasi:

Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
SALDO PEMBAYARAN / PAYMENT BALANCES		11.400.049.180,00
PEMBAYARAN / PAYMENT 1	300.000.000	11.100.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 2	300.000.000	10.800.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 3	300.000.000	10.500.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 4	300.000.000	10.200.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 5	300.000.000	9.900.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 6	300.000.000	9.600.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 7	300.000.000	9.300.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 8	300.000.000	9.000.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 9	300.000.000	8.700.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 10	300.000.000	8.400.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 11	300.000.000	8.100.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 12	300.000.000	7.800.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 13	300.000.000	7.500.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 14	300.000.000	7.200.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 15	300.000.000	6.900.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 16	300.000.000	6.600.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 17	300.000.000	6.300.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 18	300.000.000	6.000.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 19	300.000.000	5.700.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 20	300.000.000	5.400.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 21	300.000.000	5.100.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 22	300.000.000	4.800.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 23	300.000.000	4.500.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 24	300.000.000	4.200.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 25	300.000.000	3.900.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 26	300.000.000	3.600.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 27	300.000.000	3.300.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 28	300.000.000	3.000.049.180

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

g. PDAM Bhagasasi Bekasi (lanjutan)

Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date	Angsuran / Installment	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / Outstanding AR After Installment
PEMBAYARAN / PAYMENT 29	300.000.000	2.700.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 30	300.000.000	2.400.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 31	300.000.000	2.100.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 32	300.000.000	1.800.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 33	300.000.000	1.500.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 34	300.000.000	1.200.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 35	300.000.000	900.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 36	300.000.000	600.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 37	300.000.000	300.049.180
PEMBAYARAN / PAYMENT 38	300.049.180	-

h. Pendapatan BJPSDA

Penerapan BJPSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan;
- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1981, tentang luran Pembayaran Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;

Sebagaimana representasi Direksi Perum Jasa Tirta II, sesuai surat dari Direktur Keuangan dan SDM nomor SD-72/DIR/KU/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang menyatakan adanya beberapa hal penting yang kemudian menjadi pertimbangan untuk tidak mengakui pendapatan BJPSDA dalam tahun 2019, antara lain:

- (1) Sesuai laporan Tim BJPSDA nomor ND-01/Tim BJPSDA/03/2020, tanggal 4 Maret 2020 dan nomor ND-02/Tim BJPSDA/03/2020, tanggal 17 Maret 2020, PT IP dan PT PJB menyatakan bahwa, "pembayaran BJPSDA prospektif ke depan mulai tahun 2020" sesuai dengan Risalah Rapat Tim BJPSDA dengan PT PLN, PT IP dan PT PJB di Kantor Pusat PT PLN (Persero) Jakarta tanggal 3 Maret 2020 dan Risalah Rapat dengan PT PJB di Kantor Pusat PT PJB Surabaya tanggal 13 Maret 2020. Hal tersebut tidak sesuai dengan temuan dan rekomendasi BPK R.I. yang menjadi dasar penagihan BJPSDA oleh PJT II kepada PT PLN (Persero), PT IP dan PT PJB.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

g. PDAM Bhagasasi Bekasi (continued)

h. Revenue of BJPSDA

The application of BJPSDA is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, consist of:

- Law Number 11 of 1974, concerning Irrigation;
- Law Number 17 Year 2019 concerning Water Resources;
- Government Regulation number 6 of 1981, concerning Exploitation and Maintenance of Irrigation Infrastructure Payment Contribution;

As the representation of the Directors of Perum Jasa Tirta II, according to a letter from the Director of Finance and HR number SD-72 /DIR/KU/03/2020, dated March 18, 2020, which stated that there were some important things which later became a consideration for not recognizing BJPSDA revenue in the year 2019, including:

- (1) According to the BJPSDA Team report number ND-01/Tim BJPSDA/03/2020, March 4 2020 and number ND-02/Tim BJPSDA/03/2020, March 17 2020, PT IP and PT PJB stated that, "prospective BJPSDA payment going forward from 2020" in accordance with the Minutes of the BJPSDA Team Meeting with PT PLN, PT IP and PT PJB at PT PLN (Persero) Jakarta Headquarters on March 3, 2020 and Minutes of Meeting with PT PJB at PT PJB Surabaya Head Office dated March 13, 2020. This is not in accordance with the findings and recommendations of BPK R.I. which is the basis for BJPSDA billing by PJT II to PT PLN (Persero), PT IP and PT PJB.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

h. Pendapatan BJPSDA (lanjutan)

- (2) PT PLN (Persero) belum melaksanakan kewajiban pembayaran BJPSDA yang telah disepakati dalam Rapat antara PT PLN dengan PJT II pada Senin, 9 Desember 2019, di Ruang Rapat Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan agenda: Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) kepada Perum Jasa Tirta II (PJT II). Di dalam Risalah Rapat pada angka 2 huruf d dinyatakan bahwa, "PT PLN akan Menyelesaikan Pembayaran BJPSDA periode 14 Februari 2013 s.d. 22 November 2017 sepanjang terdapat Perjanjian antara PT PLN dengan PJT II".
- (3) PT PLN (Persero) belum melaksanakan kesepakatan sebagaimana Berita Acara Rapat antara PJT II dengan PT PLN, PT IP, PT PJB, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Tim JPN DATUN di Kementerian BUMN tanggal 30 Desember 2019 dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, dan PT PJB kepada PJT II. Di dalam Berita Acara Rapat pada angka 1 dan 2 dinyatakan bahwa, "PT PLN, PT IP dan PT PJB sepakat bahwa BJPSDA tetap menjadi kewajiban pembayaran kepada PJT II dan sepakat akan membuat perjanjian sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mulai tahun 2013".

Sampai surat ini dibuat PT IP dan PT PJB belum melaksanakan temuan dan rekomendasi BPK RI serta beberapa kesepakatan:

- (1) Risalah Rapat antara PT PLN dengan PJT II pada Senin, 9 Desember 2019, di Ruang Rapat Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan agenda : Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) kepada Perum Jasa Tirta II (PJT II). Di dalam Risalah Rapat pada angka 2 huruf e dinyatakan bahwa, "PT IP dan PT PJB telah mendapatkan manfaat dari sumber daya air, maka PT IP dan PT PJB dapat membayar BJPSDA".

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

h. Revenue of BJPSDA (continued)

- (2) PT PLN (Persero) has not carried out the BJPSDA payment obligations agreed at the Meeting between PT PLN and PJT II on Monday, December 9, 2019, in the Meeting Room of the President Director of PT PLN (Persero) with the agenda: Discussion on Settling Payment of Management Services Costs Water Resources (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to Perum Jasa Tirta II (PJT II). In the Minutes of the Meeting in item 2 letter d states that, "PT PLN will complete the payment of BJPSDA for the period of February 14, 2013 to 22 November 2017 as long as there is an Agreement between PT PLN and PJT II".
- (3) PT PLN (Persero) has not yet implemented an agreement as Minutes of Meeting between PJT II and PT PLN, PT IP, PT PJB, the Ministry of SOEs, the Ministry of PUPR, and the JPN DATUN Team at the Ministry of BUMN on 30 December 2019 with the Payment Settlement Discussion Agenda BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, and PT PJB to PJT II. In the Minutes of the Meeting in numbers 1 and 2 stated that, "PT PLN, PT IP and PT PJB agreed that BJPSDA remains a payment obligation to PJT II and agreed to make an agreement according to the rates set by the Government and starting in 2013".

Until this letter was made, PT IP and PT PJB had not carried out BPK R.I.'s findings and recommendations as well as several agreements:

- (1) Minutes of Meeting between PT PLN and PJT II on Monday, 9 December 2019, in the Meeting Room of the President Director of PT PLN (Persero) with the agenda: Discussion on Payment of Water Resources Management Services (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to Perum Jasa Tirta II (PJT II). In the Minutes of Meeting in item 2 letter e states that, "PT IP and PT PJB have benefited from water resources, then PT IP and PT PJB can pay BJPSDA".

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

h. Pendapatan BJPSDA (lanjutan)

- (2) Berita Acara Rapat antara PJT II dan PT PLN, PT IP, PT PJB, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Tim JPN DATUN di Kementerian BUMN tanggal 30 Desember 2019 dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, dan PT PJB kepada PJT II, menyatakan bahwa "PT PLN, PT IP dan PT PJB sepakat bahwa BJPSDA tetap menjadi kewajiban pembayaran kepada PJT II sesuai dengan Berita Acara Rapat pada angka 1 dan sepakat akan membuat perjanjian sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mulai tahun 2013" sesuai dengan Berita Acara Rapat pada angka 2."

Mendasar kepada beberapa pertimbangan penting diatas, maka kami memutuskan untuk tidak membukukan pendapatan BJPSDA tahun 2020 dan 2019 dari PT IP dan PT PJB sampai diperolehnya kesepakatan dan pemenuhan kewajiban pembayaran BJPSDA oleh PT IP dan PJB sesuai temuan dan rekomendasi BPK R.I.

31. OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)

h. Revenue of BJPSDA (continued)

- (2) Minutes of the Meeting between PJT II and PT PLN, PT IP, PT PJB, the Ministry of SOEs, the Ministry of PUPR, and the JPN DATUN Team at the Ministry of SOEs on December 30, 2019 with the Agenda for Discussion on Settlement of BJPSDA Payment of PT PLN (Persero), PT IP, and PT PJB to PJT II, stated that "PT PLN, PT IP and PT PJB agreed that BJPSDA remains a payment obligation to PJT II in accordance with the Minutes of Meeting in number 1 and agreed to make an agreement according to the tariff set by the Government and start 2013" in accordance with the Minutes of Meeting in number 2."

Based on several important considerations above, we decided not to record BJPSDA revenue in 2020 and 2019 from PT IP and PT PJB until an agreement was reached and fulfillment of BJPSDA payment obligations by PT IP and PJB according to the findings and recommendations of BPK R.I.

32. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan Umum (Perum) untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan Umum (Perum) beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK

a. Objectives and Financial Risk Management Policy

Objectives and policies of the company's financial risk management to ensure that adequate financial resources available for operations and business development, and to manage foreign currency risk, interest rate, credit and liquidity risk. The company operates with the guidelines set by Directors.

The risk of loss related to potential deviations result from transactions and financial instruments (interest rates, exchange rates, commodity and equity) as well as of financial management (liquidity, accounting, credit and loans and equities, debt and taxes) are caused by internal factors and by external factors.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Bisnis Perusahaan Umum (Perum) mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan Umum (Perum) adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

Tujuan Perusahaan Umum (Perum) dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan Umum (Perum).

"Pengelolaan Risiko Usaha". khususnya dalam rangka untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi Perusahaan Umum (Perum) telah melaksanakan beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan Umum (Perum), antara lain:

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Perusahaan Umum (Perum) dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Dewan Pengawas.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Perusahaan Umum (Perum) menghadapi resiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan Umum (Perum) gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Perusahaan Umum (Perum).

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan Umum (Perum) tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK (continued)

a. Objectives and Financial Risk Management Policy (continued)

The company business includes risk-taking activities with specific target with professional management. The main function of corporate risk management is to identify all key risks, quantify these risks and manage risk positions.

The company goal is to manage the financial risks to achieve an appropriate balance between risk and return and minimize the potential effects of the deteriorating financial performance.

"Business Risk Management". especially in order to effectively manage financial risks, Directors of the Company has implemented several strategies for managing financial risk, which is in line with corporate objectives, among others:

- *Minimize the interest rate, currency and market risks for all types of transactions.*
- *The Company may invest in shares or similar instruments only in the event of excess liquidity is temporary, and the transaction must be approved by the Board of Commissioners.*

In running the operating, investing, and financing, the company faced financial risks, namely credit risk, liquidity risk and market risk and define the risks as follows:

Credit Risk

Credit risk is the risk of financial losses incurred if the customer fails to meet the Company's contractual obligations to the Company.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the company could not meet obligations as they fall due.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Pada saat ini Perusahaan Umum (Perum) dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan Umum (Perum) memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, Perusahaan Umum (Perum) berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah resiko dimana arus kas masa depan dari satu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan Umum (Perum) memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perusahaan Umum (Perum) akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan Umum (Perum) akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

Pada saat ini, Perusahaan Umum (Perum) tidak mempersiapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat suku bunga untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan risiko arus kas yang terkait dengan kewajiban tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tidak ada risiko signifikan atas pengelolaan risiko usaha, kecuali upaya Perum Jasa Tirta II untuk membantu pelanggan dalam mendapatkan SIPSDA nya.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrumen keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diakrual secara andal.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL
INFORMATION RISK (continued)

a. Objectives and Financial Risk Management Policy
(continued)

Liquidity Risk (continued)

At this time the company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short-term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the cash flow of future cash flows of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates.

The Company has short-term loans and long-term floating rate. The Company will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the company will negotiate interest rates with lenders.

At this time, the Company did not prepare a specific policy or regulation to manage interest rate risk to reduce the risks associated with the fair value of cash flow risk associated with floating rate liabilities. There is no interest rate hedging activities on December 31, 2020 and 2019.

There is no significant risk for business risk management, except for the efforts of Perum Jasa Tirta II to assist customers in obtaining SIPSDA.

b. Fair Value of Financial Instruments

Financial instruments are presented in the statement of financial position are stated at fair value or at amortized cost. Moreover, financial instruments are stated at carrying amounts either because the amount is less than fair value or because of their fair value can not be reliably accrued.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INSTRUMEN KEUANGAN: INFORMASI RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2020	Catatan/ Note
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	518.162.003.406	5
Piutang Usaha	226.213.905.728	6
Aset Keuangan		
Tidak Lancar Lainnya	2.901.278.942	7
Jumlah	747.277.188.076	
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	46.541.937.164	14
Beban Akrua	21.378.656.871	15
Liabilitas Keuangan		
Jk. Pendek Lain	51.516.849.599	16
Jumlah	119.437.443.634	

Nilai wajar mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Analisis Sensitivitas

Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki sebagai berikut:

31 Desember/December 2020				
Kurang dari 3 Bulan / Less than 3 Months	3 s.d 1 tahun / 3 to 1 year	Lebih dari 1 Tahun / Over 1 Year	Jumlah / Total	
Utang Usaha	46.541.937.164	-	46.541.937.164	Accounts Payable
Beban Akrua	21.378.656.871	-	21.378.656.871	Accrual Expenses
67.920.594.035	-	-	67.920.594.035	

Tidak ada risiko likuiditas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS: FINANCIAL INFORMATION RISK (continued)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/ December 31, 2019	
Financial Assets:		
Cash and Cash Equivalent	597.052.214.312	
Trade Receivable	153.569.753.949	
Others Non Current		
Financial Assets	2.194.041.664	
Total	752.816.009.925	
Financial Liabilities:		
Trade Payables	39.620.267.071	
Accrued Expenses	33.271.428.406	
Other Short-term		
Financial Liabilities	47.036.782.527	
Total	119.928.478.004	

The fair value is close to or equal to its carrying value, due to the impact of the discount is not significant or will be due in the short term.

Sensitivity Analysis

Likuiditas

Liquidity risk is the risk of loss arising because the Group does not have sufficient cash flow to meet its liability.

In managing liquidity risk, management monitors and maintains the amount of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the operations of the Company and its Subsidiaries to overcome the impact of periodic evaluations of actual cash flow and cash flow projections, including debt maturity schedules, and continuous funding sources optimal.

Details of the maturity of the financial liabilities held are as follows:

There is no significant liquidity risk as of December 31, 2020 and 2019.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

33. BALANCES OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	Persentase (%) (Terhadap Jumlah Aset / Percentage of Total Assets)	
			2020	2019
Bank				
Rupiah	32.539.684.714	75.183.762.484	2,12%	5,25%
Jumlah Setara Kas	32.539.684.714	75.183.762.484	2,12%	5,25%
Deposito				
Rupiah Catatan 5	480.000.000.000	500.000.000.000	31,31%	34,92%
Jumlah Deposito	480.000.000.000	500.000.000.000	31,31%	34,92%
Jumlah	512.539.684.714	575.183.762.484	33,43%	40,17%
Piutang Usaha				
BUMN & BUMD:				
PT. PLN	50.507.433.845	41.727.722.750	3,29%	2,91%
PT. Sang Hyang Seri	21.395.990.241	5.255.869.788	1,40%	0,37%
PAM JAYA	8.041.429.900	-	0,52%	0,00%
PDAM Kota dan Kab.Bekasi	8.119.445.870	11.101.624.009	0,53%	0,78%
PT. Kujang Tatar Persada	3.231.201.114	3.441.311.584	0,21%	0,24%
PDAM Kota Bandung	2.804.063.660	1.784.390.189	0,18%	0,12%
PDAM Kab. Karawang	1.770.418.408	1.437.160.728	0,12%	0,10%
PT. PG Rajawali II	-	-	-	-
Unit PG Subang	1.344.944.226	-	0,09%	0,00%
PT. Pertamina (Persero)	1.154.426.874	232.634.538	0,08%	0,02%
PT. Perusahaan Gas	-	-	-	-
Negara (Persero)	554.749.108	1.936.700.820	0,04%	0,14%
PDAM Kab. Purwakarta	402.100.408	1.168.429.454	0,03%	0,08%
PT. Pupuk Kujang	-	8.137.477.760	0,00%	0,57%
PDAM Tirta Rangga	-	-	-	-
Kab. Subang	263.959.800	-	0,02%	0,00%
PDAM Kab. Bandung	-	248.623.600	0,00%	0,02%
PDAM Bogor	1.231.674.793	1.397.478.055	0,08%	0,10%
Jumlah	100.821.838.247	77.869.423.275	0,07	5,44%
Piutang Usaha Belum difakturkan				
BUMN & BUMD:				
PAM Jaya	81.109.203.058	20.596.778.108	5,29%	1,44%
PDAM Bekasi	284.258.150	334.715.711	0,02%	0,02%
PAM Jaya	13.382.887.300	12.990.086.900	0,87%	0,91%
PT Pupuk Kujang	265.981.805	258.057.200	0,02%	0,02%
PDAM Cab. Karawang	231.354.299	408.292.390	0,02%	0,03%
PDAM Kota Bandung	204.118.500	243.676.800	0,01%	0,02%
PDAM Kab. Bandung	202.501.604	1.349.261.237	0,01%	0,09%
Lain-lain (dibawah Rp200 Juta)	502.141.113	2.889.747.937	0,03%	0,20%
Jumlah	96.182.445.829	39.070.616.283	0,06	2,73%
Utang Usaha:				
PT. Raharja Putra Perkasa	6.491.354.101	4.882.442.946	0,42%	0,34%
Indonesia (Persero)	743.933.300	-	0,05%	0,00%
PT. Indra Karya (Persero)	690.954.000	-	0,05%	0,00%
PT. Sucofindo Advisory Utama	942.734.100	-	0,06%	0,00%
PT. Surveyor Indonesia	502.417.300	1.659.541.180	-	-
PT. Bahana Kapital Investa	-	1.155.000.000	0,00%	0,08%
Koperasi Karya Bakti Raharja	1.380.075.400	-	0,09%	0,00%
Lain-lain	465.451.584	2.078.628.800	0,03%	0,15%
Jumlah	13.884.569.985	9.775.612.926	0,91%	0,68%

Bank	
Rupiah	
Cash Equivalent Total	
Deposito	
Rupiah Note 5	
Deposito Total	
Total	
Accounts Receivables	
BUMN & BUMD:	
PT. PLN	
PT. Sang Hyang Seri	
PAM JAYA	
PDAM Kota dan Kab.Bekasi	
PT. Kujang Tatar Persada	
PDAM Kota Bandung	
PDAM Kab. Karawang	
PT. PG Rajawali II	
Unit PG Subang	
PT. Pertamina (Persero)	
PT. Perusahaan Gas	
Negara (Persero)	
PDAM Kab. Purwakarta	
PT. Pupuk Kujang	
PDAM Tirta Rangga	
Kab. Subang	
PDAM Kab. Bandung	
PDAM Bogor	
Total	
Accounts Receivables Unbilled	
BUMN & BUMD:	
PAM Jaya	
PDAM Bekasi	
PAM Jaya	
PT Pupuk Kujang	
PDAM Cab. Karawang	
PDAM Kota Bandung	
PDAM Kab. Bandung	
Lain-lain (dibawah Rp200 Juta)	
Total	
Trade Accounts Payable:	
PT. Raharja Putra Perkasa	
Indonesia (Persero)	
PT. Indra Karya (Persero)	
PT. Sucofindo Advisory Utama	
PT. Surveyor Indonesia	
PT. Bahana Kapital Investa	
Koperasi Karya Bakti Raharja	
Lain-lain	
Total	

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
 (lanjutan)

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan
 pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

33. BALANCES OF RELATED PARTY TRANSACTIONS
 (continued)

Nature of relationships and material transactions with
 related parties are as follows:

No.	Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Type of Relationship	Transaksi / Transaction
1.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan pemerintah R.I./ Financial institution controlled by The Government R. I	Giro/Bank Account
2.	PT. Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan pemerintah R.I./ Financial institution controlled by The Government R. I	Giro/Bank Account
3.	PT. Bank BNI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan pemerintah R.I./ Financial institution controlled by The Government R. I	Giro/Bank Account
4.	PT. Bank BTN (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan pemerintah R.I./ Financial institution controlled by The Government R. I	Giro/Bank Account
5.	PT. PLN (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha/ Account Receivable
6.	PDAM	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R. I	Piutang Usaha/ Account Receivable
7.	PT. Kujang Tatar Persada	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
8.	PT. Pertamina (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
9.	PT. Sang Hyang Sri (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
10.	PT. Indosat (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
Lainnya Dibawah 200 Juta untuk Piutang Usaha / Others Bellow Rp200 Milion For Account Receivable			
11.	PT PG Rajawali II Unit PG Subang	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
12.	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
13.	PT Pertamina (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
14.	PT Waskita Precast Beton	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
15.	Balai Penelitian Permuliaan Ikan Sukamandi	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
16.	PT Telkom Indonesia	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
17.	PT Cikampek Tirta Manunggal	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
18.	Perum Peruri	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
19.	PT Dahana (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
20.	BUMD Mulyasejati	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah./ Other entities controlled by the Government of the Region	Piutang Usaha/ Account Receivable

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI 33. BALANCES OF RELATED PARTY TRANSACTIONS
 (lanjutan) (continued)

No.	Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Type of Relationship	Transaksi / Transaction
21.	PT Perkebunan Nusantara VIII	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
22.	PT Kuku Tangguh Sandang Mills	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
23.	PT Kertas Padalarang	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
24.	PT Kimia Farma	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
25.	Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin & Lele	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
26.	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
27.	PT Sinkona Indonesia Lestari	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
28.	PT Mitra Rajawali Banjaran	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
29.	Koperasi Karya Bhakti Raharja	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
30.	PT Waskita Karya	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Piutang Usaha/ Account Receivable
31.	Indonesia (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
32.	PT. BUMN Hijau Lestari	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
33.	PT. Raharja Putra Perkasa	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
34.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
35.	Pilar Jati Persada	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
36.	Hotel Indonesia Group	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
37.	Indra Karya	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
38.	Koperasi Karya Bakti Raharja	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
39.	PT INDAH KARYA (PERSERO)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
40.	PT. Surveyor Indonesia	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable
41.	PT. Sucofindo	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah R.I./ Other entities controlled by the Government of the R.I.	Utang Usaha/ Accounts Payable

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
 KEBERLANGSUNGAN USAHA (Tidak Diaudit)**

Berikut ini dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan di tahun 2020, terutama terhadap pendapatan dan beban, investasi, likuiditas dan arus kas Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya:

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan

- a. Realisasi produksi (pemakaian) listrik (KWh) tahun 2020 dibanding tahun 2019 untuk penyaluran ke PLN dan pemakaian sendiri mengalami kenaikan, sedangkan ke non PT PLN / swasta mengalami penurunan. (lihat tabel dibawah ini)

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (Unaudited)

The following is the impact of the Covid-19 pandemic on financial performance in 2020, especially on income and expenses, investment, liquidity and cash flow of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries:

1) Impact on Production and Income

- a. The realization of electricity production (use) (KWh) in 2020 compared to 2019 for distribution to PLN and its own use has increased, while non-PT PLN / private sector has decreased. (see table below)

**PERBANDINGAN REALISASI PRODUKSI LISTRIK TAHUN 2020
 DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019 /
 COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF ELECTRICITY PRODUCTION IN 2020
 WITH THE WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019**

(dalam/lin kWh)

Uraian / Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
				RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
Ke PT PLN	631.540.765	647.473.283	466.612.970	97,54	135,35
Ke Non PT PLN/Swasta	295.302.156	309.344.151	347.174.655	95,46	85,06
Pemakaian Sendiri / Own use	47.423.079	42.266.769	30.928.375	112,2	153,33
Jumlah / Total	974.266.000	999.084.203	844.716.000	97,52	115,34

Dari aspek pendapatan sumber daya air (SDA) –
 pendapatan listrik tahun 2020 dibanding 2019
 sebagai berikut:

From the aspect of water resources revenue
 (SDA) - electricity revenue in 2020 compared to
 2019 as follows:

	2020	2019	
Listrik PLN	208.408.452.450	150.715.989.310	PLN Electricity
Listrik Industri	240.483.684.456	281.632.768.138	Industrial Electricity
Listrik Penduduk	1.063.606.452	1.107.407.933	Population Electricity
Jumlah	449.955.743.358	433.456.165.381	Total

Dengan memperhatikan kinerja produksi dan pendapatan SDA - listrik tahun 2020 dibanding tahun 2019 diatas dapat diketahui bahwa, dengan adanya pandemi Covid-19 maka berdampak pada menurunnya konsumsi listrik oleh pihak non PLN / swasta, dilain pihak berdampak kepada meningkatnya serapan konsumsi listrik oleh PT PLN maupun kepada beban pemakaian sendiri.

By paying attention to the performance of SDA - electricity production and income in 2020 compared to 2019 above, it can be seen that, with the Covid-19 pandemic, it has an impact on reducing electricity consumption by non-PLN / private parties, on the other hand it has an impact on increasing electricity consumption absorption by PT PLN and to his own usage load.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (Tidak Diaudit)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

- b. Realisasi produksi (penyaluran) air baku tahun 2020 dibanding tahun 2019 untuk penyaluran ke PAM Jaya, PDAM Kabupaten / Kota, dan Industri mengalami penurunan, sedangkan ke PT Sang Hyang Seri (Persero) mengalami kenaikan tipis. (lihat tabel dibawah ini)

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (Unaudited) (continued)

1) Impact on Production and Income (continued)

- b. The realization of raw water production (distribution) in 2020 compared to 2019 for distribution to PAM Jaya, District / City PDAMs, and Industry has decreased, while to PT Sang Hyang Seri (Persero) has experienced a slight increase. (see table below)

PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN AIR BAKU TAHUN 2020
DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF RAW WATER DISTRIBUTION IN 2020
WITH THE WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

(dalam jutaan / in millions m³)

Uraian / Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
				RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
PAM Jaya	526,70	528,95	530,19	99,57	99,34
PDAM Kabupaten/ Kota	173,30	142,35	188,80	121,74	91,80
Industri / Industry	262,06	244,16	273,99	107,33	95,65
PT. Sang Hyang Seri	39,56	43,62	38,79	90,70	101,98
Jumlah / Total	1.001,62	959,08	1.031,77	104,44	97,08

Dari aspek pendapatan sumber daya air (SDA) – pendapatan air tahun 2020 dibanding 2019 sebagai berikut:

From the aspect of water resources revenue (SDA) - water revenue in 2020 compared to 2019 as follows:

	2020	2019	
Air Baku PAM Jaya	143.524.770.000	136.034.572.200	PAM Jaya Raw Water
Air Baku PDAM Kabupaten/Kota	12.037.309.510	34.784.459.890	Regency / City PDAM Raw Water
Air Baku Industri	130.761.830.817	123.340.161.085	Industry Raw Water
Jumlah	286.323.910.327	294.159.193.175	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (Tidak Diaudit)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

b. (lanjutan)

Menurut pendapatan SDA - air baku kepada PAM Jaya dan Industri tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan SDA - air baku kepada PDAM Kabupaten / Kota mengalami penurunan akibat belum terbitnya Surat Ijin Pemanfaatan – Sumber Daya Air (SIP-SDA) untuk beberapa PDAM Kabupaten / Kota yang berdampak ke menurunnya nilai pendapatan yang berasal dari produksi (penyaluran) air baku secara signifikan, sebagai akibat hilangnya potensi pendapatan dari pelanggan atas SDA - air baku di tahun 2020, sedangkan untuk pendapatan SDA - air baku kepada Industri, meskipun mengalami kenaikan di tahun 2020 dibanding tahun 2019, tetapi juga mengalami hal yang sama berupa hilangnya potensi pendapatan dari pelanggan atas SDA – air baku kepada industri, sebagai akibat belum terbitnya SIP-SDA.

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (Unaudited) (continued)

1) Impact on Production and Income (continued)

b. (continued)

According to SDA revenue - raw water to PAM Jaya and Industry in 2020 compared to 2019 has increased, while SDA revenue - raw water to Regency / City PDAM has decreased due to the not issuing Permits for Utilization - Water Resources (SIP-SDA) for several PDAM. Districts / Cities that have an impact on decreasing the value of income from the production (distribution) of raw water significantly, as a result of the loss of potential revenue from customers for SDA - raw water in 2020, while for SDA revenue - raw water to Industry, even though it has increased in 2020 compared to 2019, but also experiencing the same thing in the form of a loss of potential revenue from customers for SDA - raw water to industry, as a result of the absence of SIP-SDA.

REKAPITULASI POTENSI HILANGNYA PENDAPATAN DARI DISTRIBUSI AIR BAKU PADA PERUM JASA TIRTA II DI TAHUN 2020 SEBAGAI AKIBAT BELUM ADANYA SIP-SDA OLEH PELANGGAN / RECAPITULATION OF POTENTIAL LOSS OF REVENUE FROM THE DISTRIBUTION OF RAW WATER AT PERUM JASA TIRTA II IN 2020, BECAUSE THE SIP-SDA HAS NOT BEEN PUBLISHED

No.	Uraian / Description	Nilai Potensi Hilangnya Pendapatan dari Distribusi Air Baku / The Potential Loss of Revenue from The Distribution of Raw Water	Keterangan / Notes
1	UNIT WILAYAH / REGION I a. PDAM / Local Water Co. b. Industri / Industry	12.678.944.529,12 10.200.275.464,67 2.478.669.064,44	Mulai April 2020 s.d. Desember 2020 / From April 2020 to December 2020
2	UNIT WILAYAH / REGION II a. PDAM / Local Water Co. b. Industri / Industry	1.498.920.113,47 1.212.927.876,40 285.992.237,07	Mulai Juli 2020 s.d. Desember 2020 / From July 2020 to December 2020
3	UNIT WILAYAH / REGION III a. PDAM / Local Water Co. b. Industri / Industry	1.117.043.029,76 547.834.456,68 569.208.573,09	Mulai September 2020 s.d. Desember 2020 / From September 2020 to December 2020
4	UNIT WILAYAH / REGION IV a. PDAM / Local Water Co. b. Industri / Industry	3.501.662.717,64 2.848.609.998,81 653.052.718,83	Mulai Juli 2020 s.d. Desember 2020 / From July 2020 to December 2020
Jumlah / Total		18.796.570.389,99	

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (Tidak Diaudit)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

b. (lanjutan)

Selain itu, dalam tahun 2020 terdapat pendapatan SDA - air baku kepada PDAM Kabupaten / Kota dan Industri yang belum terbitnya SIP-SDA-nya, tetapi sudah ditagihkan oleh Perum Jasa Tirta II dan atas hal tersebut berpotensi tidak tertagih nantinya, sebagai berikut:

REKAPITULASI PENERBITAN FAKTUR ATAS PENDAPATAN DARI DISTIRBUSI AIR BAKU PADA PERUM JASA TIRTA II DI TAHUN 2020, TETAPI BELUM ADA SIP-SDA /
RECAPITULATION OF INVOICE ISSUANCE FOR INCOME FROM RAW WATER DISTRIBUTION AT PERUM JASA TIRTA II, BUT THE SIP-SDA HAS NOT BEEN PUBLISHED

No.	Uraian / Description	Nilai Potensi Hilangnya Pendapatan dari Distribusi Air Baku / The Potential Loss of Revenue from The Distribution of Raw Water	Keterangan / Notes
1	UNIT WILAYAH / REGION I	26.959.838,53	Mulai Januari 2020 s.d. Maret 2020 /
	a. PDAM Kabupaten / Kota / Local Water Co. - District / City	24.206.845,26	From January 2020 to March 2020
	b. Industri / Industry	2.752.993,27	
2	UNIT WILAYAH / REGION II	10.841.446,00	Mulai Januari 2020 s.d. Juni 2020 /
	a. PDAM Kabupaten / Kota / Local Water Co. - District / City	9.658.962,00	From January 2020 to June 2020
	b. Industri / Industry	1.182.484,00	
3	UNIT WILAYAH / REGION III	40.748.822,20	Mulai Januari 2020 s.d. Agustus 2020 /
	a. PDAM Kabupaten / Kota / Local Water Co. - District / City	8.006.296,74	From January 2020 to August 2020
	b. Industri / Industry	32.742.525,46	
4	UNIT WILAYAH / REGION IV	26.577.344,99	Mulai Januari 2020 s.d. Juni 2020 /
	a. PDAM Kabupaten / Kota / Local Water Co. - District / City	23.091.978,59	From January 2020 to June 2020
	b. Industri / Industry	3.485.366,40	
	Jumlah / Total	105.127.451,72	

Dengan demikian, dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan SDA - air baku sulit diukur. Namun, yang lebih nyata digambarkan adalah menurunnya kinerja pendapatan dan produksi SDA - air baku dalam tahun 2020 sebagai akibat hilangnya potensi pendapatan dari pelanggan atas SDA - air baku, karena pelanggan yang bersangkutan belum memiliki SIP-SDA, serta dalam tahun 2020 juga terdapat pendapatan SDA - air baku kepada PDAM Kabupaten / Kota dan Industri yang belum terbitnya SIP-SDA-nya, tetapi sudah ditagihkan oleh Perum Jasa Tirta II sehingga berpotensi tidak tertagih nantinya sebagaimana dinyatakan pada tabel tersebut diatas.

1) Impact on Production and Income (continued)

b. (continued)

In addition, in 2020 there will be SDA revenue - raw water to Regency / City and Industry PDAMs whose SIP-SDA has not been published, but which has been billed by Perum Jasa Tirta II and for this it is potentially uncollectible later, as follows:

Thus, the impact of the Covid-19 pandemic on natural resource revenues - raw water is difficult to measure. However, what is more clearly illustrated is the decline in the performance of SDA revenue and production - raw water in 2020 as a result of the loss of potential revenue from customers for SDA - raw water, because the customer concerned does not yet have SIP-SDA, and in 2020 there is also SDA revenue. - Raw water to Regency / City and Industry PDAMs for which the SIP-SDA has not been published, but has been billed by Perum Jasa Tirta II so that it is potentially uncollectible later as stated in the table above.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

c. Realisasi produksi (penyaluran) air bersih tahun 2020 dibanding tahun 2019 untuk penyaluran ke Industri, Pemakaian Sendiri, dan Penduduk mengalami penurunan, sedangkan untuk produksi Air Bersih Curah mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebagai dampak optimalisasi produksi di SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Marunda - Jakarta Utara di tahun 2020 yang efektif beroperasi mulai Agustus 2019. (lihat tabel dibawah ini)

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

1) Impact on Production and Income (continued)

c. The realization of clean water production (distribution) in 2020 compared to 2019 for distribution to Industry, Own Use, and Population has decreased, while the production of Bulk Clean Water has increased very significantly as a result of the optimization of production in SPAM (Drinking Water Treatment System) in Marunda - North Jakarta in 2020 which will be effective starting August 2019. (see table below)

PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN AIR BERSIH TAHUN 2020
DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF CLEAN WATER DISTRIBUTION IN 2020 WITH THE
WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

(dalam jutaan / in millions m³)

Uraian / Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
				RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
Industri / Industry	143.720	86.781	155.964	165,61	92,15
Pemakaian Sendiri / Own use	655.816	772.740	680.799	84,87	96,33
Penduduk / Population	1.041.102	1.003.332	1.047.383	103,76	99,4
Air Bersih Curah / Bulk Clean Water	675.631	545.946	24.697	123,75	2.735,68
Jumlah / Total	2.516.269	2.408.799	1.908.843	104,46	131,82

Namun, dari sisi pendapatan SDA - air bersih kepada Industri dan Penduduk di tahun 2020 dibanding tahun 2019, maka keduanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang diakibatkan adanya kenaikan tarif air bersih pada tahun 2020 sebagai berikut:

However, in terms of SDA revenue - clean water to Industry and Population in 2020 compared to 2019, both of them experienced a significant increase due to the increase in clean water rates in 2020 as follows:

	2020	2019	
Air Bersih Industri	5.528.381.710	1.217.432.750	Industrial Clean Water Clean Water for the People
Air Bersih Penduduk	3.413.241.200	1.217.432.750	
Jumlah	8.941.622.910	4.653.841.950	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

- d. Realisasi produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2020 dibanding tahun 2019 dalam berbagai jenis produksi mengalami penurunan. (lihat tabel dibawah ini)

PERBANDINGAN REALISASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) TAHUN 2020
DENGAN RKAP 2020 DAN REALISASI 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF BOTTLED DRINKING WATER IN 2020 WITH THE
WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

Uraian / Description		Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
					RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1		2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
Galon / Gallon 19 liter	galon / gallon	158.732	188.519	185.629	84,2	85,51
Botol / Bottle 600 ml	botol / bottle	239.136	338.746	329.677	70,59	72,54
Botol / Bottle 330 ml	botol / bottle	982.344	1.852.286	2.099.486	53,03	46,79
Gelas / Glass 240 ml	gelas / glass	1.073.328	1.664.723	1.876.208	64,47	57,21

Hal yang sama dengan menurunnya produksi AMDK juga berdampak ke pendapatan AMDK yang cukup signifikan di tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebagai berikut:

The same thing with the decline in AMDK production also has an impact on AMDK revenue which is quite significant in 2020 compared to 2019 as follows:

	2020	2019	
Pendapatan AMDK	3.573.579.584	5.551.451.170	AMDK revenue
Jumlah	3.573.579.584	5.551.451.170	Total

- e. Realisasi produksi Pariwisata tahun 2020 dibanding tahun 2019, hampir seluruhnya mengalami penurunan, kecuali produksi pariwisata dari Hotel & Pesanggrahan yang pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 karena kegiatan operasi hotel sepenuhnya baru terlaksana di tahun 2020 ini (BAST Pekerjaan Pembangunan Hotel Pesanggrahan dan Rehabilitasi Gedung Grha Vidya, sesuai BA.ST-293/PP.DIR/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019), tetapi jika dibandingkan dengan angka RKAP tahun 2020 maka realisasinya sangat rendah capaiannya sebagai dampak pandemi Covid-19 tersebut. (lihat tabel dibawah ini)

- e. The realization of tourism production in 2020 compared to 2019, almost entirely has decreased, except for tourism production from Hotels & Pesanggrahan which in 2020 has increased compared to 2019 because hotel operation activities have only been fully implemented in 2020 (BAST Construction of Hotel Pesanggrahan and Building Rehabilitation Grha Vidya, according to BA.ST-293 / PP.DIR / 10/2019, dated 11 October 2019), but when compared to the 2020 RKAP figures, the realization is very low as a result of the Covid-19 pandemic. (see table below)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN 34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT) SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

e. (lanjutan)

1) Impact on Production and Income (continued)

e. (continued)

PERBANDINGAN REALISASI PRODUKSI PARIWISATA TAHUN 2020
DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF TOURISM PRODUCTION IN 2020 WITH THE WORKPLAN
& BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

Uraian / Description	Satuan / Unit	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
					RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5	6 = 3 : 4	7 = 3 : 5
Hotel & Bungalow						
- Hotel Pesanggrahan	kamar / room	2.622	6.661	1.620	39,36	161,85
- Hotel Istora & Bungalow	kamar / room	1.336	2.655	4.472	50,32	29,87
Rekreasi / Recreation						
- Kapal Motor / Motor Boat	trip	191	122	145	156,56	131,72
- Ticketing	orang / person	101.516	88.614	211.361	114,56	48,03
Water World						
- Ticketing	orang / person	6.956	20.455	27.619	34,01	25,19
Bar & Restaurant						
- Room Service (FB)	porsi / portion	25	1.723	2.510	1,45	1
- Restoran (Pool Side Bar)	porsi / portion	19.155	25.889	56.995	73,99	33,61
- Food & Beverage (Banquet)	porsi / portion	2.583	16.938	44.147	15,25	5,85
Gedung Konvensi / Convention Hall						
- Room Rental	kali / time	11	11	123	100	8,94

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

e. (lanjutan)

Berikut ini realisasi pengunjung pariwisata tahun 2020 yang cukup signifikan penurunannya dibanding tahun 2019 yang hanya bersandar kepada wisatawan nusantara, sedangkan kunjungan wisatawan asing tidak ada sama sekali.

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

1) Impact on Production and Income (continued)

e. (continued)

The following is the realization of tourism visitors in 2020 which is quite a significant decline compared to 2019 which only relies on domestic tourists, while there are no foreign tourist visits at all.

REALISASI PENGUNJUNG PARIWISATA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF TOURISM VISITORS IN 2020
WITH THE REALIZATION IN 2019

Bulan / Months	Wisatawan / Tourism		Jumlah / Total	
	Nusantara / Domestic	Manca Negara / Foreign Countries	Tahun / Year 2020	Tahun / Year 2019
1	2	3	4	5
Januari / January	13.042	-	13.042	15.459
Februari / February	7.026	-	7.026	8.885
Maret / March	4.347	-	4.347	13.397
April / April	-	-	-	16.525
Mei / May	-	-	-	6.275
Juni / June	5.617	-	5.617	40.236
Juli / July	12.547	-	12.547	10.520
Agustus / August	18.987	-	18.987	8.264
September / September	9.406	-	9.406	7.558
Oktober / October	13.215	-	13.215	8.512
November / November	9.925	-	9.925	10.116
Desember / Desember	7.404	-	7.404	17.304
Jumlah / Total	101.516	-	101.516	163.051

Selanjutnya, atas pendapatan pariwisata tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak pandemi Covid- 19 sebagai berikut:

Furthermore, tourism income in 2020 compared to 2019 has decreased quite significantly as a result of the Covid-19 pandemic as follows:

	2020	2019	
Pariwisata	9.102.081.748	15.076.052.465	Tourism
Jumlah	9.102.081.748	15.076.052.465	Total

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN 34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT) SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)
 (lanjutan)

1) Dampak ke Produksi dan Pendapatan (lanjutan)

f. Berikut ini pengeluaran yang menjadi beban pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang bersumber dari beberapa mata anggaran.

1) Impact on Production and Income (continued)

f. The following are the expenditures that will be borne by the Covid-19 pandemic in 2020, sourced from several budget lines.

Mata Anggaran / Budget Accounts	Uraian Biaya / Description of Costs	Jumlah / Total
7171	Biaya Rumah Sakit (Covid 19) / Hospital Costs (Covid 19)	Rp 1.466.804.238
7244	Beban Rumah Tangga Kantor (Covid 19) / Office Household Expenses (Covid 19)	Rp 9.394.816.530
	Terdiri dari / Consists of :	
	- Pengadaan APD dll Pencegahan Covid-19 / Procurement of PPE etc. Prevention of Covid-19	Rp 5.190.526.968
	- Pembelian Alat Infra Red, Ventilator, Masker, Hand Sanitizer, dan Perlengkapan Lainnya / Purchasing Infra Red Equipment, Ventilators, Masks, Hand Sanitizers, and Other Equipment	Rp 1.056.643.090
	- Pembelian Extrafooding / Extrafooding Purchase	Rp 1.055.030.000
	- Penyemprotan Disinfektan / Disinfectant spraying	Rp 1.039.100.000
	- Pembelian Suplemen & Vitamin C / Purchase Supplements & Vitamin C	Rp 549.968.472
	- Bantuan Individu Terkonfirmasi Positif & Negatif Covid-19 dan Uang Duka Keluarga Terdampak Covid-19 / Individual Assistance with Confirmed Positive & Negative Covid-19 and Grief for Families	Rp 453.805.000
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test / Rapid Test Examination Fee	Rp 49.743.000
7251	Beban Sumbangan, yaitu Donasi Kemanusiaan Penanggulangan Covid-19 / Contribution Burden, namely the Covid-19 Countermeasures Humanitarian Donation	Rp 320.800.000
7252	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), yaitu Bantuan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 / Corporate Social Responsibility (CSR), namely Assistance to Prevent the Spread of Covid-19	Rp 1.084.797.549
7433	Beban P&P Bangunan Gedung Tempat Kerja, yaitu Pekerjaan Penataan Ruang Kantor Pusat untuk memenuhi tata ruang SOTK baru dan untuk terpenuhinya standar protokol kesehatan (Covid 19), sesuai BA.ST-54/UP.DKS/12/2020, tanggal 29 Desember 2020 / P&P Load for Workplace Building, namely Head Office Spatial Planning Work to meet the new SOTK layout and to fulfill health protocol standards (Covid 19), according to BA.ST-54 / UP.DKS / 12/2020, December 29, 2020	Rp 3.182.554.100
	Jumlah / Total	Rp 15.499.515.417

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

2) Dampak ke Realisasi Investasi

Secara umum, tidak ada dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi investasi pada Perum Jasa Tirta II di tahun 2020 ini.

3) Dampak ke Likuiditas dan Arus Kas

Secara umum, tidak ada dampak pandemi Covid-19 terhadap likuiditas pada Perum Jasa Tirta II di tahun 2020 ini. Namun, dari aspek arus kas operasional terjadi peningkatan atas piutang usaha yang belum difakturkan (pendapatan yang masih harus diterima) s.d. per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.132.109.897, sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp79.262.775.851.

Hal tersebut disebabkan adanya BJSDA PLN triwulan I s.d. IV tahun 2020, juga dari BJSDA PLN semester II tahun 2019, beberapa PDAM di wilayah Jawa Barat dan PT Pupuk Kujang yang seluruhnya berjumlah Rp67.148.483.499.

4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan RKAP - revisi tahun 2020

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

2) Impact on Investment Realization

In general, there is no impact of the Covid-19 pandemic on investment realization in Perum Jasa Tirta II in 2020.

3) Impact on Liquidity and Cash Flow

In general, there is no impact of the Covid-19 pandemic on the liquidity of Perum Jasa Tirta II in 2020. However, from the aspect of operational cash flow, there was an increase in trade receivables that have not been factored (accrued income) up to d. as of December 31, 2020, it was IDR 141,132,109,897, while in 2019 it was IDR 79,262,775,851.

This is due to the existence of the PLN BJSDA in the first quarter to IV in 2020, also from BJSDA PLN semester II of 2019, several PDAMs in the West Java region and PT Pupuk Kujang totaling Rp67.148.483.499.

4) Comparison between the realization of the 2020 performance compared to the RKAP - the revised 2020

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2020
DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF REVENUES IN 2020
WITH THE WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

(dalam jutaan / in millions rupiah)

Uraian Pendapatan / Revenues Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
				RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
A. Pendapatan Usaha / Operating Revenues					
Pendapatan Sumber Daya Air / Water Resources Revenues					
a. Pendapatan Listrik / Electricity Revenues	449.955,74	468.973,88	433.456,17	95,94	103,81
b. Pendapatan Air Baku / Raw Water Revenues	286.323,91	389.331,37	294.159,19	73,54	97,34
c. Pendapatan Air Bersih / Clean Water Revenues	8.941,62	7.423,47	4.653,84	120,45	192,13
	745.221,27	865.728,72	732.269,20	86,08	101,77

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS
SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun
 2020 dibandingkan RKAP - revisi tahun 2020
 (lanjutan)

4) Comparison between the realization of the 2020
 performance compared to the RKAP - the
 revised 2020 (continued)

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2020
DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019 /
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF REVENUES IN 2020
WITH THE WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

(dalam jutaan / in millions rupiah)

Uraian Pendapatan / Revenues Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
				RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
Pendapatan Non Sumber Daya Air / Non Water Resources Revenues					
a. Pendapatan Pariwisata / Tourism Revenues	9.102,08	12.661,97	15.076,05	71,89	60,37
b. Pendapatan Sewa Lahan / Land Lease Revenues	50.143,26	54.402,31	54.325,88	92,17	92,3
c. Pendapatan Laboratorium / Laboratory Revenues	6.057,21	5.015,40	5.125,98	120,77	118,17
d. Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan / Bottled Drinking Water Revenues	3.685,24	5.398,88	5.551,45	68,26	66,38
e. Pendapatan Usaha Lainnya / Other Operating Revenues	1.417,60	686,36	532,59	206,54	266,17
	70.405,39	78.164,92	80.611,95	90,07	87,34
	28.245,80	27.384,00	48.881,39	103,15	57,78
Jumlah / Total	843.872,46	971.277,64	861.762,54	86,88	97,92

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS
SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun
 2020 dibandingkan RKAP - revisi tahun 2020
 (lanjutan)

4) Comparison between the realization of the 2020
 performance compared to the RKAP - the
 revised 2020 (continued)

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN RENCANA BEBAN TAHUN 2020
DENGAN RKAP TAHUN 2020 DAN REALISASI TAHUN 2019
COMPARISON BETWEEN THE REALIZATION OF EXPENSES IN 2020
WITH THE WORKPLAN & BUDGET – 2020 AND THE REALIZATION IN 2019

(dalam jutaan / in millions rupiah)

Uraian Beban / Expenses Description	Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	RKAP Tahun 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi Tahun 2019 / Realization in 2019	% Realisasi terhadap / Realization to	
				RKAP 2020 / The Workplan & Budget 2020	Realisasi 2019 / Realization 2019
1	2	3	4	5 = 2 : 3	6 = 2 : 4
A. Beban Usaha / Operating Expenses					
Beban Sumber Daya Air / Water Resources Expenses					
a. Beban Listrik / Electrical Expenses	101,633.95	92,938.09	96,429.71	109.36	105.40
b. Beban Air Baku / Raw Water Expenses	337,820.87	401,331.37	309,817.48	84.18	109.04
c. Beban Air Bersih / Clean Water Expenses	25,354.15	12,023.70	15,618.89	210.87	162.33
	464,808.97	506,293.16	421,866.08	91.81	110.18
Beban Non Sumber Daya Air / Non Water Resources Expenses					
a. Beban Pariwisata / Tourism Expenses	23,146.91	18,200.00	24,693.62	127.18	93.74
b. Beban Sewa Lahan / Land Lease Expenses	6,941.90	7,569.01	7,565.32	91.71	91.76
c. Beban Laboratorium / Laboratory Expenses	6,668.75	5,014.65	5,383.85	132.99	123.87
d. Beban Air Minum Dalam Kemasan / Bottled Drinking Water Expenses	6,655.03	7,021.39	8,365.73	94.78	79.55
e. Beban Usaha Lainnya / Other Operating Expenses	632.12	1,194.38	680.28	52.92	92.92
	44,044.71	38,999.43	46,688.80	112.94	94.34
B. Beban Promosi dan Pemasaran / Promotional and Marketing Expenses	5,370.63	7,000.00	14,424.16	76.72	37.23
C. Beban Administrasi dan Umum / General and Administrative Expenses	164,295.94	165,383.65	167,799.29	99.34	97.91
D. Beban Lain-lain / Other Expenses	26,785.00	19,000.00	20,619.11	140.97	129.90
Total Beban / Total Expenses	705,305.25	736,676.24	671,397.44	95.74	105.05

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN 34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT) SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (lanjutan) (continued)

5) Capaian Kinerja Perusahaan secara Konsolidasian dan Rasio Keuangan Penting			5) Achievement of Consolidated Company Performance and Important Financial Ratios	
Keterangan	2020	2019	Deviasi (%)	Description
1	2	3	4=(2-3)/3	1
Kas dan Setara Kas (KS)	518.162.003.406	597.052.214.312	(13,21)	Cash and Cash Equivalent (KS)
Piutang Usaha (PU)	226.213.905.728	153.569.753.949	47,30	Trade Receivables (PU)
Persediaan (SD)	2.073.688.495	2.548.128.165	(18,62)	Inventory (SD)
Aset Lancar (AL)	770.443.116.970	765.188.518.737	0,69	Current Assets (AL)
Penyusutan dan Amortisasi (PA)	50.905.879.034	43.298.772.443	17,57	Depreciation and Amortization (PA)
Jumlah Aset (JA)	1.533.076.049.459	1.431.865.210.551	7,07	Total Assets (JA)
Liabilitas Jk. Pendek (KL)	145.780.275.497	141.338.939.256	3,14	Short-Term Liabilities (KL)
Liabilitas Jk. Panjang (KJP)	166.455.666.786	94.892.263.918	75,42	Long-Term Liabilities (KJP)
Jumlah Liabilitas (JK)	312.235.942.283	236.231.203.174	32,17	Total Liabilities (JK)
Modal Kerja Bersih (MKB) = (AL - KL)	624.662.841.473	623.849.579.481	0,13	Net Working Capital (MKB)=(AL)-(KL)
Akumulasi Saldo Laba (RE)*)	1.151.004.541.961	1.047.765.334.976	9,85	Retained Earnings (RE)*)
Ekuitas (EK)	1.210.918.629.810	1.185.668.713.836	2,13	Equity (EK)
Labas Bersih (LRB)	123.959.613.486	153.809.056.862	(19,41)	Net Profit (LRB)
Labas Bersih (LRB1)	45.970.322.474	162.827.541.067	(71,77)	Net Profit (LRB1)
Modal Sendiri (MS) = (EK - LRB - ATDP)	1.078.634.588.004	1.027.838.887.255	4,94	Own Capital (MS)=(EK-LRB)
Pajak Penghasilan (PJ)	(14.607.602.323)	(36.556.045.832)	(60,04)	Income Tax (PJ)
Jumlah Pendapatan Usaha (JPU)	815.626.663.143	812.881.151.201	0,34	Total Op. Revenue (JPU)
Total Pendapatan (TP)	843.872.463.825	861.762.539.207	(2,08)	Total Revenue (TP)
Labas Kotor (LK)	306.772.981.650	344.326.274.108	(10,91)	Gross Profit (LK)
Biaya Bunga (BB)	-	-	-	Interest Cost (BB)
Capital Employed (CE)	1.524.751.621.139	1.427.844.440.832	6,79	Capital Employee (CE)
EBIT=(LRB+BB+PJ)	138.567.215.809	190.365.102.694	(27,21)	EBIT=(LRB+BB+PJ)
EBITDA=(EBIT + PA)	189.473.094.843	233.663.875.137	(18,91)	EBITDA=(EBIT + PA)

*) Termasuk Cadangan Bertujuan

*) Included Appropriate Reserves

I. Rasio Likuiditas

Rasio Lancar (AL/KL)	%	5,28	5,41	(2,38)
Rasio Cepat (KS + PU) / KL	%	5,11	5,31	(3,85)
Rasio Kas (KS / KL)	%	3,55	4,22	(15,86)

I. Liquidity Ratio

Current Ratio (AL/KL)	
Quick Ratio (KS + PU) / KL	
Cash Ratio (KS / KL)	

II. Rasio Leverage

Rasio Kewajiban atas Aset (JK/JA)	%	0,20	0,16	23,45
Rasio Kewajiban atas Ekuitas (JK/EK)	%	0,26	0,20	29,42
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas (KJP/EK)	%	0,14	0,08	71,76

II. Leverage Ratio

Debt to Assets Ratio (JK/JA)	
Debt to Equity Ratio (JK/EK)	
Long-Term Debt to to Equity (KJP/EK)	

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

5) Capaian Kinerja Perusahaan secara
Konsolidasian dan Rasio Keuangan Penting
 (lanjutan)

Keterangan	Sat	2020
a	b	c
III. Rasio Aktivitas		
Rasio Perputaran Persediaan (SD/JPU)x365	hari	0,93
Rasio Perputaran Aset (TP/CE)	hari	0,55
Rasio Penagihan Rata2 (PU/JPU)x365	hari	101,23
IV. Rasio Profitabilitas		
Imbalan terhadap Ekuitas (LRB1/MS)	%	0,04
Imbalan terhadap Investasi (EBIT + PA) / CE	%	0,12
Marjin Laba Kotor atas Penjl. (LK / JPU)	%	0,38
Marjin Laba Bersih atas Penjl. (LRB / TP)	%	0,15
Rasio EBITDA atas Aset	%	0,12

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Perusahaan dalam posisi likuiditas mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, rasio lancar mengalami penurunan dari 5,41% menjadi 5,28%; rasio cepat dari 5,31% menjadi 5,11%; dan rasio kas dari 4,22% menjadi 3,55%

Penurunan capaian rasio likuiditas dipengaruhi penurunan rasio kas 15,85%, penurunan rasio cepat 3,85% dan penurunan rasio lancar 2,38%. Penurunan aset lancar dipengaruhi oleh:

- Peningkatan piutang usaha 47,30% dari Rp226.213.905.728 menjadi Rp153.569.753.949.
- Penurunan persediaan 18,62% dari Rp2.073.688.495 menjadi Rp2.548.518.737.
- Penurunan kas dan 13,21% dari Rp597.052.214.312 menjadi Rp518.162.003.406.

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

5) Achievement of Consolidated Company Performance and Important Financial Ratios (continued)

2019	Deviasi	DescriptiPT.ion
d	e=(c-d)/d	a
III. Activity Ratio		
		Inventory Turnover Ratio (SD/JPU)
	(18,89)	Assets Turnover Ratio (TP/CE)
	(8,30)	Average Collectible Ratio (PU/JPU)x365
IV. Rasio Profitabilitas		
		Return on Equity (LRB1/MS)
	(73,10)	Return on Investment (EBIT + PA) / CE
	(24,07)	Gross Profit Margin on Sales (LK / JPU)
	(11,21)	Net Profit Margin on Sales (LRB / TP)
	(17,70)	EBITDA on Assets Ratio
	(24,27)	

Liquidity Ratio

Liquidity ratio is a measurement to calculate the company's ability to meet its short term liabilities.

The company's liquidity position decreased in 2020 compared to 2019, the current ratio decreased from 5.41% to 5.28%; quick ratio from 5.31% to 5.11%; and the ratio of cash from 4.22% to 3.55%.

Decrease performance is affected cash ratio 15,85%, decrease quick ratio 3,85 and decrease in current ratio 2.38%. The increase in current assets was influenced by:

- The increase in trade receivables 47.30% of Rp226.213.905.728 to Rp153.569.753.949.
- The increase in inventories 18,62% of Rp2.073.688.495 be Rp2.548.518.737.
- The decrease in Cas and Cash 13,21% of Rp597.052.214.312 be Rp518.162.003.406.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
(lanjutan)

5) Capaian Kinerja Perusahaan secara
Konsolidasian dan Rasio Keuangan Penting
(lanjutan)

Sedangkan kenaikan liabilitas jangka pendek dipengaruhi oleh:

- Kenaikan kewajiban utang usaha 17% dari Rp39.620.267.071 menjadi Rp46.541.937.164.
- Kenaikan utang pajak 21% dari Rp21.410.461.252 menjadi Rp25.987.074.732.
- Kenaikan kewajiban jangka pendek lainnya 10% dari Rp47.036.782.527 menjadi Rp51.516.849.599.

Rasio Leverage

Rasio Leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Rasio Leverage pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 disebabkan karena meningkatnya Rasio Kewajiban Atas Aset 23,45%, meningkatnya Rasio Kewajiban atas Ekuitas 29,42% dan meningkatnya Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas 71,76%.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

Dibandingkan dengan tahun 2020, tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya relatif mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini tercermin dari rasio perputaran persediaan dari 1,14 hari menjadi 0,93 hari, rasio perputaran aset dari 0,55 hari menjadi 0,60 hari dan rasio penagihan rata-rata dari 68,96 hari menjadi 101,23 hari.

Peningkatan rasio aktivitas dipengaruhi oleh:

Peningkatan rasio perputaran persediaan dan rasio perputaran aset, sedangkan penurunan disebabkan rasio rata-rata penagihan piutang.

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas atau rasio kemampuan perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS
SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

5) Achievement of Consolidated Company
Performance and Important Financial Ratios
(continued)

While the decline in short-term liabilities is influenced by:

- Increased of Liabilities account payable 17% of Rp39.620.267.071 be Rp46.541.937.164.
- Increased of tax payable 21% of Rp21.410.461.252 be Rp25.987.074.732.
- Decrease in accrued expenses 10% of Rp47.036.782.527 be Rp51.516.849.599.

Leverage Ratio

Leverage ratio is a measurement to calculate the company's ability to meet all current liabilities if the company liquidated.

The Leverage Ratio in 2020 has increased compared to 2019 due to an increase in the Liability to Assets Ratio of 23.45%, an increase in the Liability to Equity Ratio of 29.42% and an increase in the Long-Term Liability Ratio to Equity of 71.76%.

Activity Ratio

Activity ratio is a measure used to calculate the effectiveness of the company in utilizing all available resources in its control.

Compared to 2020, the level of effectiveness of the company in utilizing resources has decreased and increased, this is reflected in the inventory turnover ratio from 1.14 days to 0.93 days, the asset turnover ratio from 0.55 days to 0.60 days and average billing ratio from 68.96 days to 101.23 days.

The decline in the activity ratio is influenced by:

The increase in the inventory turnover ratio and the asset turnover ratio, while the decrease was due to the average accounts receivable collection ratio.

Profitability Ratio

Profitability ratios or the ratio is a measure of corporate kemampuan used to calculate the net outcome of various policy and management decisions that will provide a final answer about the effectiveness of management in managing the company.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

5) Capaian Kinerja Perusahaan secara Konsolidasian dan Rasio Keuangan Penting
 (lanjutan)

Rasio Profitabilitas (lanjutan)

Pada tahun 2016, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya mengalami penurunan, hal ini terlihat dari hasil imbalan (return) terhadap ekuitas mengalami penurunan dari 0,14% menjadi 0,09%, margin laba kotor dari 0,80% menjadi 0,79%, rasio EBITDA dari 0,11% menjadi 0,10%, rasio imbalan terhadap investasi naik dari 0,14% menjadi 0,16% dan margin laba bersih yang mengalami penurunan dari 0,15% menjadi 0,12%.

Penurunan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya dipengaruhi oleh:

- Peningkatan *capital employee* 15% dari Rp3.894.175.024.845 menjadi Rp4.478.325.201.280.
- Peningkatan beban usaha 10% dari Rp1.497.747.894.564 menjadi Rp1.642.092.280.881.
- Peningkatan pendapatan usaha bersih 0,4% dari Rp2.0110.370.356.607 menjadi Rp2.018.060.034.918.

Dari hasil analisis model indikator (Z-score model) untuk menilai asumsi kelangsungan usaha perusahaan, sebagai berikut:

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

$$Z - Score = \frac{6,56 \times \text{Modal Kerja Neto} / \text{Modal Kerja Neto}}{\text{Jumlah aset} / \text{Total Assets}} + \frac{3,26 \times \text{Akm.Saldo Laba} / \text{Retained Earnings}}{\text{Jumlah aset} / \text{Total Assets}} + \frac{1,05 \times \text{Nilai Pasar Terhadap Ekuitas} / \text{Market Value of Equity}}{\text{Jumlah Kewajiban} / \text{Total Liabilities}} + \frac{6,72 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak} / \text{Earnings Before Interest \& Taxes}}{\text{Jumlah Aset} / \text{Total Asset}}$$

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	138.567.215.809	190.365.102.694	Profit before Interest and tax
Laba Sebelum Pajak	138.567.215.809	190.365.102.694	Profit before tax
Dikurangi: Pendapatan Bunga	26.372.571.230	29.496.384.376	Reduced: Interest Income
Modal Kerja Neto	624.662.841.473	623.849.579.481	NET Working capital
Ditambah: Beban Bunga	-	-	Additional: Interest Expense
Jumlah Aset	1.533.076.049.459	1.431.865.210.551	Total Assets
Akm. Saldo Laba	1.151.004.541.961	1.047.765.334.976	Retained Earning
Modal Pemerintah	164.547.635.935	164.547.635.935	Government Capital
Saldo Ekuitas	1.210.918.629.810	1.185.668.713.836	Total Equity
Jumlah Liabilitas	312.235.942.283	236.231.203.174	Total Liabilities

Catatan:

- Jika hasilnya, $Z > 2,9$ zona "aman".
- Jika hasilnya, $1,22 < Z < 2,9$ zona "abu-abu".
- Jika hasilnya, $Z < 1,22$ zona "distress".

34. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC AND BUSINESS SUSTAINABILITY (UNAUDITED) (continued)

5) Achievement of Consolidated Company Performance and Important Financial Ratios (continued)

Profitability Ratio (continued)

In 2016, the level of effectiveness of resource use has decreased, it is seen from the results in yield (return) to equity ratio decreased from 0.14% to 0.09%, the gross profit margin of 0.80% to 0.79%, EBITDA ratio of 0.11% to 0.10%, the ratio of reward to investment rose from 0.14% to 0.16% and the net profit margin decreased from 0.15% to 0.12%.

A decrease in the level of effectiveness of resource use is influenced by:

- Increased employee 15% of the capital Rp3.894.175.024.845 be Rp4.478.325.201.280.
- The increase in operating expenses of 10% of Rp1.497.747.894.564 be Rp1.642.092.280.881.
- The increase in net revenues of 0,4% of Rp2.0110.370.356.607 be Rp2.018.060.034.918.

From the results of model analysis indicators (Z-score model) to assess the company's going concern assumption, as follows:

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

Notes:

- If result $Z < 2.9$ "Safety" Zone.
- If result $1.23 < Z < 2.90$ "Gray" Zone.
- If result $Z < 1.23$ "Distress" Zone.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. DAMPAK PENDEMI COVID-19 DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA (TIDAK DIAUDIT)
 (lanjutan)

5) Capaian Kinerja Perusahaan secara
Konsolidasian dan Rasio Keuangan Penting
 (lanjutan)

Perhitungan Z-score tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Z - Score} &= \frac{6,56 \times 624.662.841.473}{1.533.076.049.459} + \frac{3,26 \times 1.151.004.541.961}{1.533.076.049.459} \\
 &+ \frac{1,05 \times 164.547.635.935}{312.235.942.283} + \frac{6,72 \times 138.567.215.809}{1.533.076.049.459} \\
 &= \frac{4.097.788.240.062}{1.533.076.049.459} + \frac{3.752.274.806.794}{1.533.076.049.459} \\
 &+ \frac{172.775.017.732}{312.235.942.283} + \frac{931.171.690.235}{1.533.076.049.459} \\
 &= 2,67 + 2,45 + 0,55 + 0,61 \\
 &= \underline{\underline{6,28}}
 \end{aligned}$$

Perhitungan Z-score tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Z - Score} &= \frac{6,56 \times 623.849.579.481}{1.431.865.210.551} + \frac{3,26 \times 1.047.765.334.976}{1.431.865.210.551} \\
 &+ \frac{1,05 \times 164.547.635.935}{236.231.203.174} + \frac{6,72 \times 190.365.102.694}{1.431.865.210.551} \\
 &= \frac{4.092.453.241.395}{1.431.865.210.551} + \frac{3.415.714.992.022}{1.431.865.210.551} \\
 &+ \frac{172.775.017.732}{236.231.203.174} + \frac{1.279.253.490.104}{1.431.865.210.551} \\
 &= 2,86 + 2,39 + 0,73 + 0,89 \\
 &= \underline{\underline{6,87}}
 \end{aligned}$$

Z - Score	
2020	2019
6,28	6,87

Dari hasil perhitungan Z-score model tahun 2020, mengalami peningkatan dibanding nilai Z-score tahun 2019 sebesar 6,28, posisi Perusahaan Umum (Perum) pada posisi Zona "aman" atau sehat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sehingga *going concern*/kelangsungan hidupnya masih terjaga dalam kondisi yang sangat baik.

From the results of calculation of Z-score model of the year 2020, has increased compared to the value of the Z-score of the year 2019 of 6,28, general corporate (Perum) on the position of safety zone or healthy in managing resources. So the *going concern*/sustainability is still maintained in best condition.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
 and for the Year Then Ended
 (With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
 for the Year Then Ended)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Berdasarkan surat hasil pemeriksaan Pajak dari KPP LTO 3 nomor: SPHP 00696/WPJ.19/KP.03.05/RIK.SIS/ 2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan nomor SPHP 00707/ WPJ.19/KP.03.05/RIK.SIS/2013 tanggal 03 surat Desember 2013 tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan yang harus dipungut sendiri yang merupakan penyerahan jasa pengelolaan air yang belum dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak. Atas jasa ini tidak termasuk dalam jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga menurut pemeriksa merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN, atas jasa pengelolaan air juga tidak termasuk dalam kategori BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, karena bukan merupakan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa melainkan penyerahan jasa pengelolaan air, sehingga menurut Pemeriksa merupakan penyerahan JKP terutang PPN.

(Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 2000, Pasal 4A UU PPN tahun 2000, KMK No 155/KMK.03/2001 stdd No 371/KMK.03.2003).

Sisa tunggakan 2005
 Sisa tunggakan 2006

10.817.096.572
 15.062.765.148

Total

25.879.861.720

Perum Jasa Tirta telah melakukan sanggahan dengan surat nomor 1/528/2013 dan 1/529/2013 tanggal 2 Desember 2013 atas hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanggal 19 Desember 2013, maka KPP LTO 3 mengirim surat teguran atas tunggakan SKPKB dan SPT. PPN tanggal 3 Februari 2014 agar wajib pajak segera melakukan pembayaran. Pihak manajemen telah melunasi tunggakan tersebut sesuai dengan SKPKB dan SPT. PPN, serta manajemen melakukan banding atas permasalahan tersebut.

- 1) Sidang Pertama tanggal 1 SePT.ember 2014 dengan materi pemeriksaan data.
- 2) Sidang kedua tanggal 22 SePT.ember 2014 dengan materi memberikan uraian alasan mengajukan sengketa banding.

35. ADDITIONAL INFORMATION

- a. Based on tax review from KPP LTO 3 No. SPHP 00696/WPJ.19/KP.03.04/RIK.SIS/ 2013 dated December, 2 2013 about review results notification, and the review results No. SPHP 00707/WPJ.19/KP.03.05/RIK.SIS/2013 dated December, 3 2013 about the review results notification.

Corrections of referral required to self-levied which is water management services referral have not been reported in the Annual Tax Return (SPT) of Taxpayer. These service revenues are not categorised as a non taxable VAT. Therefore, it is a taxable VAT according to the tax reviewer. Water management services are also not included in a strategic taxable goods category exempted from VAT. These were not water referral that flowed through pipelines but the referral of water management services. So according to the reviewer, it was included in Taxable Services referral that subject to VAT.

(Art. 4 Letter c UU PPN of 2000, Art 4A UU PPN of 2000, KMK No. 155/KMK.03/2001 sttd No. 371/KMK.03.2003).

Remaining arrears 2005
 Remaining arrears 2006

Total

Perum Jasa Tirta has made a rebuttal with letter No. 1/528/2013 and 1/529/2013 dated December, 2 2013 of the review result. Based on minutes of final discussion of review result dated December, 19 2013, so that KPP LTO 3 sent a reprimand letter of underpayment arrears (SKPKB) and SPT. VAT dated February, 3 2014 that the taxpayer pay immediately. The management has paid the arrears in accordance with SKPKB and SPT. VAT, and management take an appeal to those problems.

- 1) The first session, on SePT.ember, 1 2014 reviewed data
- 2) The second session, on SePT.ember, 22 2014 described the reasons held dispute appeal.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. (lanjutan)

- 3) Sidang ketiga tanggal 13 Oktober 2014 dengan materi memberikan penjelasan bahwa PPN dikenakan kepada konsumen akhir dan tarif BJPSDA telah ditentukan oleh Menteri Teknis dimana Perum Jasa Tirta II tidak berwenang menetapkan tarif dan Perum Jasa Tirta II tidak ada *profit oriented* dalam BJPSDA.

- 4) Keempat tanggal 30 November 2014 dengan materi penjelasan Saksi Ahli atas persamaan fungsi dari Perum Jasa Tirta II dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dikarenakan BBWS tidak dikenakan PPN, sedangkan Perum Jasa Tirta II mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda yaitu dikenakan PPN dan BJPSDA, sehingga Perum Jasa Tirta II meminta penegasan dari saksi ahli tentang apakah adanya perubahan substansial dari IPEP ke BJPSDA.

Menolak untuk diberlakukannya PMK No.82/PMK.03/2012 kepada Perum Jasa Tirta atas kasus 2011 dikarenakan peraturan tersebut tidak berlaku surut.

- 5) Sidang kelima tanggal 24 November 2014 dengan materi Pemohon Banding memberikan penjelasan bahwa BJPSDA bukanlah obyek PPN.

Terbanding memberikan penjelasan BJPSDA adalah obyek PPN, dan menjadwalkan di dalam sidang berikutnya untuk menghadirkan Saksi Ahli yang independen dan kompeten di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk meng-*counter* pendapat Terbanding yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

- 6) Sidang keenam tanggal 8 Desember 2014 dengan materi menghadirkan Saksi Ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perusahaan kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) melalui surat nomor 1/245/SD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 atas penolakan putusan banding No. Put.61036/PP/M.VIIB/16/2015 tanggal 27 April 2015 Berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi dengan pihak pengacara pajak, maka manajemen berkeyakinan bahwa proses PK tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim peradilan pajak. Namun per 1 Januari 2016, Perusahaan sudah memungut PPN berdasarkan penolakan keberatan tersebut.

35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

a. (continued)

- 3) The third session, on October, 13 2014 explained that VAT was charged into end consumer and BJPSDA rate was determined by the Technical Minister where Perum Jasa Tirta have no authorization to set the rate. Finally, Perum Jasa Tirta II is not a profit oriented in BJPSDA.

- 4) The fourth session, on November, 30 2014 was explanatory from expert witnesses about equality function of Perum Jasa Tirta II and Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) where BBWS was not subject to VAT, while Perum Jasa Tirta II received different tax treatment that subject to VAT and BJPSDA, so Perum Jasa Tirta II requested explanation from expert witness whether any substantial changes from IPEP to BJPSDA.

The company refused to enactment of PMK No. PMK.03/2012 to Perum Jasa Tirta II because the regulation did not apply retroactively.

- 5) The fifth session, on November, 24 2014 was explanatory of the Appellant that explained BJPSDA was not subject to VAT.

Appellee explained that BJPSDA was subject to VAT and scheduled in the next session to present the independent and competent expert witness in Non-Tax Revenue (PNBP), for countering the Appellee's opinion, namely Directorate General of Taxation.

- 6) The sixth session, dated December 8 2014 presented the expert witness from Ministry of Public Works and Public Housing.

The Company filed a second judicial review (PK) as it shown on a letter number 1/245/SD/2015 dated August 11, 2015 due to rejection of the appeal No. Put.61036/PP/M.VIIB/16/2015 dated 27 April 2015 Based on the evaluation and consultation with the tax lawyer, management believes that the process of PK will be accepted by the tax court. However, started from per January 1, 2016, the Company had a VAT levy based on the rejection of the appeal.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

b. Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya)

Pada tahun 2009 Perum Jasa Tirta II (PJT II) melakukan kerja sama dengan Asuransi Jiwasraya untuk program *Past Service Liabilities* bagi Karyawan PJT II. Program ini merupakan pembayaran Premi Awal Asuransi Jiwasraya atas Pegawai PJT II yang diakui sebagai beban pada tahun 2009.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan teknis dengan kementerian BUMN tentang Laporan Audit Independen PJT II tahun 2009 tanggal 21 Mei 2010, "Bahwa beban pegawai untuk asuransi jiwasraya tidak boleh menjadi beban Perusahaan melainkan beban masing-masing karyawan, sehingga perlu diadakan koreksi dan penyesuaian atas kelebihan beban tersebut." Direksi PJT II mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 1/606/KPT.S/2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang pengalihan beban *Past Service Liabilities* Asuransi Jiwasraya dari Perusahaan kepada Pegawai yang menjadi peserta Asuransi Jiwasraya.

Melalui surat Direksi PJT II Nomor: 1/149/2010 tanggal 25 Mei 2010, tentang hasil pembahasan teknis dengan kementerian BUMN atas Laporan Keuangan tahun buku 2009, agar dilakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan *Unaudited* tahun buku 2009 yang berakibat penurunan beban pegawai sebesar Rp4.608.301.256,-, yang berasal dari penurunan beban Asuransi Jiwasraya Rp11.644.694.314,- dan kenaikan beban insentif sebesar Rp7.036.393.058,- sehingga diperoleh kenaikan Laba bersih sebesar Rp3.317.976.976,- dan penurunan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.317.976.976,-.

Pada awal tahun 2010 berdasarkan koreksi tersebut, maka timbul piutang karyawan (Asuransi Jiwasraya) sebesar Rp6.333.195.276,-. Selama tahun 2010 terjadi pembayaran atas piutang pegawai tersebut, sehingga saldo piutang karyawan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp5.551.297.894,-, yang terdiri dari piutang pegawai yang masih aktif sebesar Rp3.307.010.964,- dan piutang pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia sebesar Rp2.244.286.930,-.

Berdasarkan hal di atas, manajemen berkeyakinan bahwa piutang karyawan yang telah pensiun dan meninggal dunia tidak dapat ditagih, maka Direksi PJT II mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 1/569/SKPT.S/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Cadangan Piutang Pegawai PJT II, yang isinya menetapkan cadangan piutang pegawai PJT II sebesar Rp2.244.286.930,- menjadi beban perusahaan.

35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

b. Employee Receivables (Jiwasraya Insurance)

In 2009, Perum Jasa Tirta II held cooperation with Jiwasraya Insurance for *Past Service Liabilities* program for employees of PJT II. The program was an initial premium payment of Jiwasraya Insurance of employees that recognized as expenses in 2009.

Based on technical discussion meeting result with Ministry of State Owned Enterprises about Independent Audit Report of PJT II of 2009 dated Mei, 21 2010, that "personnel expenses for Jiwasraya Insurance should not be Company's expenses, but the expenses of each employee, so there should be a correction and adjustment of excess from those expenses." Board of Directors of PJT II issued the Directors Decree No. 1/606/KPT.S/2009 dated December, 31 2009, about the transfer of *Past Service Liabilities* expenses of Jiwasraya Insurance from Company to employees who participated in Jiwasraya Insurance.

By Letter of Directors of PJT II No. 1/149/2010 dated May, 25 2010 about technical discussion result with Ministry of State Owned Enterprises of Financial Statements for the year 2009 that held adjustment for Financial Statements (*Unaudit*) of 2009 which affected the decreasing of employees expenses as amount Rp4.608.310.256,- from decrease of Jiwasraya Insurance for Rp11.644.694.314,- and increase of incentives expenses for Rp7.036.393.058,- so obtained the increasing of net income for Rp3.317.976.976,- and decreasing of Short-term Liabilities for Rp3.317.976.976,-.

At beginning of 2010, based on correction then procured employees receivables (Jiwasraya Insurance) for Rp6.333.195.276,-. During 2010 occurred payments of those receivables, so the employees receivables of Jiwasraya Insurance for Rp5.551.297.894,- which consists of active employees receivable for Rp3.307.010.964,- and pension and passed away employees receivables for Rp2.244.286.930,-.

Based on above, management believes that pension and passed away employees receivables can not be collected, so Directors of PJT II issued the Letter of Decree of Directors No. 1/569/SKPT.S/2010 dated December, 30 2010 about the allowance for doubtful account of the personnel receivable of PJT II, whose contents about the allowance of personnel receivables of PJT II for Rp2.244.286.930,- became the Company's expenses.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

b. Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya) (lanjutan)

Pada tahun 2016 terjadi penambahan cadangan piutang pegawai tersebut sebesar Rp 1.097.129,- sehingga jumlah cadangan piutang pegawai sebesar Rp2.245.384.059,-.

c. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018.

35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

b. Employee Receivables (Jiwasraya Insurance) (continued)

In 2016, the amount of allowance for doubtful account of the personnel receivable increased by Rp1.097.129. Therefore the amount of the allowance become Rp2.245.384.059.

c. Based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 9 of 2018 concerning the Preparation of Government Regulation Year 2018 on 03 May 2018.

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI

a. Gugatan Perdata Tunggul Panjaitan No.505/Pdt.G/2014/PN.Bks.

Sengketa berupa tanah yang terletak di Betulan Sempdan Kali Sadang, Kp. Sukadanau, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2016, amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI : - Menolak Provisi Penggugat ;
DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bidang tanah lahan kelola milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi dibentulan Sempadan Kali Sadang seluas 1.050m² terletak di Kampung Sukadanau, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dimanfaatkan atau digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No. 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014 sebagai Tanah Negara ;

3. Menyatakan Penggugat yang memanfaatkan atau menggunakan lahan kelola atau milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Sukadanau, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No.11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014 adalah sah ;

36. LITIGATION CASES

a. Tunggul Panjaitan Civil Law No.505 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks.

Disputes in the form of land located at Betulan Sempdan Kali Sadang, Kp. Sukadanau, Sukadanau Village, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi covers $\pm 1,050 \text{ m}^2$

The Bekasi District Court's decision dated March 23, 2016, is in full as follows:

*IN PROVISION: - Reject the Plaintiff's Provision;
IN EXEPTION: - Rejecting the Exception of Co-Defendant I*

IN THE MAIN OF CASE:

1. Partially granted the Plaintiff's claim;

2. State the plots of land under management of Perum Jasa Tirta II which are located in the 1,050m² border of the Kali Sadang, located in Sukadanau Village, Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Regency which the Plaintiff uses or uses based on the Temporary Land Use Agreement (SPPLS) No. 11.3 / DIR / 1255 / SPPLS / 2014 dated 30 September 2014 as State Land;

3. Stating that the Plaintiff used or used the managed land or owned by Perum Jasa Tirta II which is located in the Sempadan Kali Sadang with an area of $\pm 1,050 \text{ m}^2$ located in Sukadanau Village, Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Regency based on the Temporary Land Use Agreement (SPPLS) No. 11.3 / DIR / 1255 / SPPLS / 2014 dated 30 September 2014 is valid;

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

a. Gugatan Perdata Tunggul Panjaitan
No.505/Pdt.G/2014/PN.Bks. (lanjutan)

4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik No. 1323 / Desa Sukadanau atas nama Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Sertipikat penggantian sepanjang letak lokasinya menunjuk pada tanah Negara milik Perum Jasa Tirta II yang dimanfaatkan atau digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No. 11.3 /DIR /1255 /SPPLS /2014 tanggal 30 September 2014 ;
5. Menyatakan Tergugat IV Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pemagaran dengan menutup akses keluar masuk Penggugat dari bidang tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan, Kali Sadang, seluas 1.050 m2 terletak di Kampung Sukadanau, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap Putusan ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.401.000,- (delapan juta empat ratus seribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 April 2017, amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2016, Nomor. 505/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

36. LITIGATION CASES (continued)

a. *Tunggul Panjaitan Civil Law No.505 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks. (continued)*

4. *Declare that it is not legally enforceable to bind Freehold Certificate No. 1323 / Desa Sukadanau on behalf of Defendant II or Defendant III or Defendant IV or successor certificates as long as the location refers to the State land owned by Perum Jasa Tirta II which is used or used by the Plaintiff based on the Temporary Land Use Agreement (SPPLS) No. 11.3 / DIR / 1255 / SPPLS / 2014 dated 30 September 2014;*
5. *Stating that Defendant IV committed unlawful acts for fencing by closing the Plaintiff's access and exit from the plot of land belonging to Perum Jasa Tirta II which is located in bentulan Sempadan, Kali Sadang, covering an area of 1,050 m2 located in Sukadanau Village, Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Regency ;*
6. *Order Co-Defendant I and Co-Defendant II to submit to and comply with the Decision;*
7. *Reject the Plaintiff's claim other than and the rest;*
8. *Sentenced the Defendants to pay the costs incurred in this case amounting to Rp. 8,401,000, - (eight million four hundred and one thousand rupiah);*

The Bandung High Court's decision dated April 26, 2017, is as follows:

- *Receiving an appeal from COMPARATIVE I, Defendant IV and Defendant II were originally Co-Defendant I;*
- *Strengthening the Bekasi District Court decision dated March 23, 2016, Number. 505 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks for which the appeal was filed;*
- *To sentence COMPARATIVE I originally, Defendant IV and COMPARATIVE II, were originally Co-Defendants to pay the court fee in both levels of court, which at the appeal level was IDR 150,000 (one hundred and fifty thousand rupiah)*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- a. Gugatan Perdata Tunggul Panjaitan
No.505/Pdt.G/2014/PN.Bks. (lanjutan)

Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara tingkat
Peninjauan Kembali dengan register perkara nomor
587 PK/Pdt/2018, menyatakan :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali Dr. LYNDA DINI
GUNAWAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali
sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah)

- b. Gugatan Perdata Lahan Pangkalan Bambu Bekasi
No.514/Pdt.G/2015/PN.Bks

Obyek sengketa berupa tanah negara yang telah
menjadi milik PJT II sebagai bentuk Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada PJT II berdasarkan PP
No. 90 Tahun 2000 seluas 33.740 m2 yang terletak di
Kampung Pangkalan Bambu, Kel. Margajaya, Kec.
Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:
423/Pdt.G/2017/PN.Bks Tanggal 20 Juni 2018
memutuskan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
(*niet onvankelijke veerklard*) Perum Jasa Tirta II
dinyatakan kalah. Atas putusan Pengadilan Negeri
Bekasi. Mengadili:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp7.737.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada
perkembangan atas perkara tersebut.

- c. Gugatan Roswinawaty S, No.
33/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.

Obyek sengketa berupa tanah milik Negara
Kementerian Pekerjaan Umum yang diserahkan
operasian kepada PJT II yang terletak di Jalan
Tarum Barat Pangkalan Jati Kelurahan Cipinang
Melayu Jakarta Timur seluas 216 m2 yang terkena
pembebasan tanah untuk rencana pembuatan tol
Becakayu.

36. LITIGATION CASES (continued)

- a. *Tunggul Panjaitan Civil Law No.505 / Pdt.G / 2014 /
PN.Bks. (continued)*

*The decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia in Case Review level with case register
number 587 PK / Pdt / 2018, stated:*

1. *Rejecting the request for reconsideration from the
Petitioner for Reconsideration, Dr. LYNDA DINI
GUNAWAN;*
2. *Sentencing the Petitioner for Reconsideration to
pay the cost of the case at all levels of the
judiciary, which in the level of review is Rp.
2,500,000.00 (two million five hundred thousand
rupiah)*

- b. *Bekasi Pangkalan Bambu Land Civil Claim No.514 /
Pdt.G / 2015 / PN.Bks*

*The object of the dispute in the form of state land that
has become the property of PJT II as a form of State
Capital Participation (PMN) in PJT II based on PP
No. 90 of 2000 covering an area of 33,740 m2
located in Kampung Pangkalan Bambu, Kel.
Margajaya, Kec. South Bekasi, Bekasi City.*

*Decision of Bekasi District Court Number 423 / Pdt.G
/ 2017 / PN.Bks On 20 June 2018 decides that the
claim is not accePT.able (niet onvankelijke veerklard)
Perum Jasa Tirta II was declared defeated. Upon the
decision of the Bekasi District Court. Judge:*

1. *Be granted the Defendant II's excePT.ion.*
2. *Stating that the Bekasi Class 1A District Court is
not authorized to examine and try this case;*
3. *Sentencing the plaintiff to pay all costs incurred in
this case amounting to Rp.7,737,000 (seven
million seven hundred thirty seven rupiahs).*

*As of December 31, 2020 there has been no
progress on this case.*

- c. *Lawsuits Roswinawaty S, No. 33 / Pdt.G / 2017 /
PN.Jkt.Tim.*

*The object of the dispute in the form of state-owned
land of the Ministry of Public Works which was
handed over to PJT II is located on West Tarum
Road, Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, East
Jakarta, covering an area of 216 m2 which was land
acquisition for the planned construction of the
Becakayu toll road.*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- c. Gugatan Roswinawaty S, No.
33/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. (lanjutan)

PJT II sedang menghadapi adanya gugatan dari kuasa hukum sdr. Roswinawaty sitompul atas lahan milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum yang diserahkan operasikan kepada PJT II yang terletak di Jalan Tarum Barat Pangkalan Jati Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur seluas 216 m2 terkena pembebasan tanah untuk rencana pembuatan tol becakayu.

Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengadili dalam Provisi menolak gugatan dari para penggugat dan dalam eksepsi mengabulkan Tergugat 1 serta dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

- d. Gugatan Hidayat Bin H. Cecep Wisnu Affandi, No.
108/Pdt.G/2017/PN.Bks

Obyek sengketa berupa tanah milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum yang diserahkan operasikan kepada PJT II berdasarkan Pemen PUPR No. 28/ M/ PRT/ 2015 yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun, Kab. Bekasi seluas ±500 m2.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Bks Tanggal 9 April 2018 memutuskan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*) Perum Jasa Tirta II dinyatakan Menang. Atas putusan tersebut penggugat mengajukan banding.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

- e. Gugatan Yanbih Bin Tjio Tjoan Hoat,
No.423/Pdt.G/2018/PN.Bks

Obyek sengketa berupa tanah negara milik Kementerian Pekerjaan Umum yang diserahkan operasikan kepada PJT II yang terletak di Kampung Pangkalan Bambu, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat seluas ±13.220 m².

36. LITIGATION CASES (continued)

- c. *Lawsuits Roswinawaty S, No. 33 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Tim. (continued)*

"PJT II is facing a lawsuit from the attorney of the law, Roswinawaty Sitompul on land owned by the State Ministry of Public Works which was handed over to PJT II, which is located on Jalan Tarum Barat Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, East Jakarta, covering an area of 216 m2, for land acquisition for the planned toll road construction. "

Based on the results of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, hearing in the Provision of rejecting a claim from the plaintiffs and in the excePT.ion granting the Defendant 1 and in the principal case the claim that the Plaintiff's claim was unacceptable.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

- d. *Hidayat Bin H. Cecep Wisnu Affandi's Claim, No. 108 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks*

The object of the dispute in the form of land owned by the State Ministry of Public Works which was handed over to PJT II based on the PUPR No. No. 28 / M / PRT / 2015 located in Sumber Jaya Village, Kec. Tambun, Kab. Bekasi covering ± 500 m2.

Based on the Decision of the Bekasi District Court Number 108 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks April 9, 2018 decides that the Claim is declared unaccePT.able (niet onvankelijke veerklaard) Perum Jasatirta II is declared Winning. Upon the decision the plaintiff filed an appeal.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

- e. *Yanbih Bin Tjio Tjoan Hoat's lawsuit, No.423 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks*

The object of the dispute is the state land owned by the Ministry of Public Works which is operated by PJT II which is located in Pangkalan Bambu Village, Jalan General Ahmad Yani, Marga Jaya Village, South Bekasi District, Bekasi City, West Java covering an area of ± 13,220 m².

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- e. Gugatan Yanbih Bin Tjio Tjoan Hoat,
No.423/Pdt.G/2018/PN.Bks (lanjutan)

Berdasarkan Hasil Keputusan Pengadilan, mengadili:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.737.000,-

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

- f. Gugatan H. Goman, No.268/Pdt.G/2017/PN.Bks

Obyek sengketa berupa tanah negara milik Kementerian Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada PJT II yang terletak di Kampung Pangkalan Bambu, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan MargaJaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II.;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard)

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.011.000,- (lima juta sebelas ribu rupiah)

36. LITIGATION CASES (continued)

- e. Yanbih Bin Tjio Tjoan Hoat's lawsuit, No.423 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks (continued)

The hearing was adjourned with the cloud meeting and the summons of the Parties.

1. *Affordable Defendant II's excePT.ion.*
2. *Declare the Bekasi Class IA District Court is not authorized to examine and try this case;*
3. *To prosecute the Plaintiff to pay all costs incurred in this case amounting to Rp.7,737,000*

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

- f. *Lawsuit H. Goman, No.268 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks*

"The object of the dispute is in the form of state land owned by the Ministry of Public Works which is operated by PJT II located in Kampung Pangkalan Bambu, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan MargaJaya, District of South Bekasi, City of Bekasi, West Java covering an area $\pm 2,600 \text{ m}^2$. "

Bekasi District Court Decision:

Dalam Eksepsi:

Granted the exceptions of Defendants I and II .;

In the Subject:

Declare that the Plaintiff's claim is unacceptable (Niet Ontvankelijke verklaard);

In the Reconvension:

Declare the Reconvension Plaintiff's claim unacceptable (Niet Onvenkelijk verklaard)

In Conventions & Conventions:

Sentencing the Plaintiffs at the Conference / Defendant Reconvension to pay court fees amounting to Rp. 5,011,000, - (five million eleven thousand rupiah)

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

g. Gugatan Sonny Nugroho, No.514/Pdt.G/2017/PN.Bks

Obyek sengketa berupa tanah negara milik Kementerian Pekerjaan Umum yang diserahkan kepada PJT II yang terletak di Desa Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat seluas 857 m².

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

h. Gugatan Perdata No. 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Obyek sengketa Adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Blok Rawa Belut Kampung Tangsi Patikoro RT 003 RW 06 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi Seluas ± 77.500M2 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus meter bujur sangkar)

PJT II dinyatakan menang N.O kurangnya pihak yang harus di gugat oleh Penggugat.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

i. Gugatan Perdata No. 103/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat Seluas 9.885M2 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi).

PJT II dinyatakan kalah sebagian dalam pokok perkara.

Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung telah memeriksa dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 103/Pdt.G/ 2019/PN Ckr, tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Saat ini dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI.

36. LITIGATION CASES (continued)

g. Sonny Nugroho's lawsuit, No.514 / Pdt.G / 2017 / PN. Bks

Object of dispute in the form of state land owned by the Ministry of Public Works which is operated by PJT II located in Setia Mekar Village, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, West Java Province covering 857 m².

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

h. Civil Law No. 51 / Pdt.G / 2019 / PN.Ckr

Object of the dispute There is another party that recognizes and controls the land owned by PJT II which is located in Rawa Belut Block, Kampung Tangsi Patikoro RT 003 RW 06 Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Seluas ± 77,500M2 (seventy seven thousand five hundred square

PJT II was declared to have won N.O the lack of parties to be sued by the Plaintiff.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

i. Civil Law No. 103 / Pdt.G / 2019 / PN.Ckr.

The object of the dispute is the existence of other parties who recognize and control the land owned by PJT II located in Cibuntu Village, Cibitung District, Bekasi Regency - West Java Province as Wide as 9.885M2 (nine thousand eight hundred eighty-five square meters).

PJT II was declared partially defeated in the subject matter.

On Tuesday, July 7 2020, the Panel of Judges at the Bandung High Court examined and decided the case as follows:

- Receiving the appeal from the original Appellant, Defendant I;
- Strengthening the Cikarang District Court Decision, Number 103 / Pdt.G / 2019 / PN Ckr, dated January 16, 2020, which the appeal was requested for;
- Initially, Defendant I sentenced Appellant to pay court fees in both levels of court, which in the appeal level was set at Rp. 150,000.00 (one hundred and fifty thousand rupiahs);

Currently in the process of Cassation at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

j. Gugatan Perdata No. 285/Pdt.G/2019/PN.Bks.

Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan masing-masing Seluas 21.493M2 (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan 3.931M2 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 285/PDT.G/2019/PN.BKS tertanggal 13 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah bekas milik adat yang terletak di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, identitas Girik Letter C 753 Persil 15 yang masih tercatat atas nama almarhum Gayan Utut, dengan batas – batas :
3. Menyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah bekas milik adat yang terletak di Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, identitas Girik Letter C 753 Persil 15 yang masih tercatat atas nama almarhum Gayan Utut, dengan batas – batas :

Bidang tanah seluas 21.493 M2, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Gedung Graha Girsang
Sebelah Timur	: Tanah milik Perum Pondok Mitra Lestari
Sebelah Selatan	: Masjid
Sebelah Barat	: Jalan Perumahan Pondok Mitra Lestari

Bidang tanah seluas 3.931 M2, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: I Kali Bekasi
Sebelah Timur	: Tanah Milik PT. Wahana Dimensi Serasi
Sebelah Selatan	: Tanah milik PT. Wahana
Sebelah Barat	: Gedung Girsang

36. LITIGATION CASES (continued)

j. Civil Law No. 285 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks.

The object of the dispute is that there are other parties who recognize and control land owned by PJT II located in Jatirasa Sub-District, Jatiasih District, Bekasi City with an area of 21,493M2 (twenty one thousand four hundred ninety three square meters) and 3,931M2 (three thousand nine hundred thirty one square meters).

Bekasi District Court Decision Number: 285 / PDT.G / 2019 / PN.BKS dated February 13, 2020, which reads as follows:

In Exception:

Rejecting the exceptions filed by Defendant I and Defendant II in their entirety;

In the Subject:

1. Partially granted the Plaintiff's claim;
2. Stating that the land subject to the dispute is former customary land located in Jatirasa Subdistrict, Jatiasih Subdistrict, Bekasi City, the identity of Girik Letter C 753 Persil 15 which is still registered under the name of the late Gayan Utut, with the following boundaries:
3. Stating that the land subject to the dispute is former customary land located in Jatirasa Subdistrict, Jatiasih Subdistrict, Bekasi City, the identity of Girik Letter C 753 Persil 15 which is still registered under the name of the late Gayan Utut, with the following boundaries:

Land area of 21,493 M2, with the following boundaries:

North Side	: Gedung Graha Girsang
East Side	: Tanah milik Perum Pondok Mitra Lestari
South side	: Masjid
West Side	: Jalan Perumahan Pondok Mitra Lestari

Land area of 3,931 M2, with the following boundaries:

North Side	: I Kali Bekasi
East Side	: Tanah Milik PT. Wahana Dimensi Serasi
South side	: Tanah milik PT. Wahana
West Side	: Gedung Girsang

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

j. Gugatan Perdata No. 285/Pdt.G/2019/PN.Bks.
(lanjutan)

4. Menyatakan sah dan berharga surat – surat yang dimiliki Penggugat berhubungan dengan tanah obyek sengketa yaitu :

- Surat Girik Letter C No. 753 Persil 15 tercatat atas nama Gayan Bin Utut;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009 s.d 2014 atas nama Gayan Bin Utut;
- Surat Keterangan Waris tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Para Turut Tergugat I, diketahui oleh Turut Tergugat III (Lurah Kelurahan Jatirasa) dan diketahui oleh Turut Tergugat II (Camat Kecamatan Jatiasih);
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadic), tanggal 21 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Turut Tergugat I, diketahui oleh Turut Tergugat III (Lurah Kelurahan Jatirasa) dan diketahui oleh Turut Tergugat II (Camat Kecamatan Jatiasih);

5. Menyatakan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa dari Para Turut Tergugat I selaku pemiliknya semula kepada Penggugat selaku penerima penyerahan hak sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta nomor : 001/590Ag/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, seluas 21.493 M2 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta nomor : 002/590Ag/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat II (Camat Kecamatan Jatiasih) dan disaksikan oleh Turut Tergugat II (Lurah Kelurahan Jatirasa) adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya berkekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai satu – satunya yang berhak menguasai tanah obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan pelepasan hak dari Para Turut Tergugat I selaku pemiliknya semula dan oleh karenanya merupakan satu – satunya yang paling berhak untuk memperoleh status hak yang baru atasnya serta ijin lokasi dari pihak berwenang sesuai peruntukan maupun tujuan pengadaannya sebagai lahan pembangunan perumahan;

36. LITIGATION CASES (continued)

j. Civil Law No. 285 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks.
(continued)

4. Declare that the documents held by the Plaintiff are valid and valuable in relation to the land object of the dispute, namely:

- Girik Letter C No. 753 Persil 15 is registered in the name of Gayan Bin Utut;
- Tax Returns Payable and Receipt of Deposit for 2009 to 2014 in the name of Gayan Bin Utut;
- Inheritance Certificate dated February 21, 2013, which was made and signed by Co-Defendant I, was acknowledged by Co-Defendant III (Head of the Jatirasa Family Village) and acknowledged by Co-Defendant II (Head of Jatiasih District);
- Letter of Sporadic Mastery of Land (Sporadic), dated February 21, 2013 which was made and signed by Co-Defendant I, recognized by Co-Defendant III (Head of Jatirasa Family Village) and acknowledged by Co-Defendant II (Head of Jatiasih Subdistrict);

5. Declare the relinquishment of rights over the disputed land object from the Co-Defendant I as the original owner to the Plaintiff as the recipient of the transfer of rights as explained in the Declaration of the Release of Rights to Land for private interests number: 001 / 590Ag / VI / 2013, June 7, 2013, covering an area of 21,493 M2 and Declaration of Release of Land Rights for private interests number: 002 / 590Ag / VI / 2013, dated June 7, 2013 which was drawn up and signed before Co-Defendant II (Head of Jatiasih Sub-District) and witnessed by Co-Defendant II (Head of Jatirasa) is lawful according to law and therefore legally binding;

6. To declare that the Plaintiff is legal according to law as the only one who has the right to control the land object of the dispute which was obtained based on the relinquishment of rights from the Co-Defendants I as the original owner and therefore is the only one most entitled to obtain new rights status on it as well as location permits from the competent authority according to the designation and purpose of its procurement as land for housing development;

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

j. Gugatan Perdata No. 285/Pdt.G/2019/PN.Bks.
(lanjutan)

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mendaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan yang mengakibatkan Penggugat terhalang mendapatkan hak penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut selaku penerima pelepasan hak yang sah dari Para Tergugat I selaku pemiliknya semula adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menjustifikasi klaim sepihak Tergugat I dan Tergugat II yang mendaku tanah obyek sengketa sebagai miliknya meskipun tanpa alas hak yang sah dan yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapat pelayanan penerbitan status hak yang baru atas tanah obyek sengketa sesuai dengan undang – undang maupun tujuan pengadaannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi hak Penggugat selaku Pemegang Hak berkuasa yang sah atas dan untuk mengelola tanah obyek sengketa sesuai tujuan pengadaannya sebagai lahan pembangunan perumahan;
10. Menyatakan surat – surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Mendapatkan Izin Lokasi tanggal 14 November 2014 atas nama Penggugat selaku pemohon (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat III dan dengan status “disetujui bersyarat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 6.499.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

36. LITIGATION CASES (continued)

j. Civil Law No. 285 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks.
(continued)

7. Stating that the actions of Defendant I and Defendant II, which claimed to be the owner of the land object of dispute and which prevented the Plaintiff from obtaining control over the land object of the dispute, as the recipient of the legal rights relinquishment from Defendant I as the original owner, constituted an act against the law;
8. Declare the actions of Defendant III which justify the unilateral claims of Defendant I and Defendant II claiming the disputed land as their own even though it is without legal rights grounds and which resulted in the Defendant not receiving services for issuing new rights status over the disputed land in accordance with the law and the purpose of its procurement is an act against the law;
9. To order Defendant I and Defendant II not to obstruct the rights of the Plaintiff as the rightful right holder over and to manage the land object of dispute in accordance with the purpose of its procurement as land for housing development;
10. Declare that the documents owned by Defendant I and Defendant II or anyone who gets rights thereof as long as the land object of dispute is related is not legally enforceable;
11. State the Minutes of Land Technical Considerations to Obtain a Location Permit dated November 14, 2014 on behalf of the Plaintiff as the applicant (Plaintiff) issued by Defendant III and with the status of "conditionally approved" has no binding legal force;
12. To order Co-Defendant I, Co-Defendant II and Co-Defendant III to comply with this decision;
13. To order Defendant I, Defendant II and Defendant III to pay jointly and severally the costs incurred in this case amounting to Rp 6,499,000, - (six million four hundred and ninety nine rupiahs);
14. Reject the Plaintiff's claim for other than and the rest;

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- j. Gugatan Perdata No. 285/Pdt.G/2019/PN.Bks.
(lanjutan)

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara tingkat Banding Nomor 423/PDT/2020/PT.Bdg telah memeriksa dan memutus pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan amar berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 285/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 13 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Saat ini Perum Jasa Tirta II bersama-sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sedang mengajukan upaya hukum KASasi melalui Mahkamah Agung RI.

- k. Gugatan Perdata No. 248/Pdt.G/2019/PN.Bks.

Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Seluas 500M2 (lima ratus meter persegi).

PJT II dinyatakan kalah gugatan PJT II ditolak oleh Majelis Hakim.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

- l. Gugatan Perdata No. 250/Pdt.G/2019/PN.Bks.

Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Seluas 893M2 (delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

PJT II dinyatakan kalah N.O kurangnya pihak yang harus digugat oleh PJT II dalam gugatan.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

36. LITIGATION CASES (continued)

- j. Civil Law No. 285 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks.
(continued)

The panel of judges at the Bandung High Court in the case at the Appeal level Number 423 / PDT / 2020 / PT.Bdg has examined and decided on October 23, 2020 with the following rules:

1. *Receiving an appeal from Appellant I, Defendant II, and Defendant II, initially, Defendant I:*
2. *Strengthening the decision of the Bekasi District Court Number 285 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks dated February 13, 2020 for which the appeal was filed:*
3. *To order Appellate I originally, Defendant II and Appeal II, Defendant I, to pay court fees at both court levels, which for the appeal level was IDR 150,000 (one hundred and fifty thousand rupiahs).*

Currently Perum Jasa Tirta II together with the Ministry of Public Works and Public Housing (Kemen PUPR) are filing a legal action for the KASasi through the Indonesian Supreme Court.

- k. Civil Law No. 248 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks.

The object of the dispute is that there is another party that recognizes and controls the land owned by PJT II, which is located in Sepanjangjaya Village, Rawalumbu District, Bekasi City in an area of 500M2 (five hundred square meters).

PJT II was declared defeated by PJT II, being rejected by the Panel of Judges.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

- l. Civil Law No. 250 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks.

The object of the dispute is the presence of other parties who recognize and control the land owned by PJT II located in Sepanjangjaya Village, Rawalumbu District, Bekasi City covering an area of 893M2 (eight hundred ninety-three square meters).

PJT II was declared defeated by N.O. The lack of parties to be sued by PJT II in the lawsuit.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

m Gugatan Perdata No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks

Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Seluas 418M2 (empat ratus delapan belas meter persegi).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atas perkara tersebut belum mendapatkan update atas penyelesaian perkara tersebut.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks., pada hari KAMIS tanggal 06 OKTOBER 2020 telah memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:
Menolak Gugatan eksepsi tersebut

Dalam pokok perkara:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi sebagai pemilik sah satu-satunya atas bidang tanah seluas 11.674M2 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terdiri dari:
 - Bidang tanah seluas 7.100M2 (tujuh ribu seratus meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1266/Margajaya Gambar Situasi Nomor : 4191/1986 tanggal 16 Juli 1986 dan ;
 - Bidang tanah seluas 4.574M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) bukti Hak Girik C 250 Persil 23 Kelas II dengan dasar Akta Jual Beli Nomor : 246/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Memerintahkan Tergugat II dalam Rekonsensi/Turut Tergugat II dalam Konpersi untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah seluas 4.574M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpersi ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi selain dan selebihnya;

36. LITIGATION CASES (continued)

m. Civil Law No. 371 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks

The object of the dispute is that there is another party that recognizes and controls the land owned by PJT II located in Margajaya Village, South Bekasi District, Bekasi City covering 418M2 (four hundred eighteen square meters).

As of December 31, 2019, the case has not yet been updated.

Bekasi District Court which examined and adjudicated Case No. 371 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks., On THURSDAY 06 OCTOBER 2020 decided with Amar as follows:

In Exception:
Refuse the Expression Suit

In the subject matter:
Refused the Plaintiff's claim in its entirety

In reconnaissance:

- *Partially granted the Plaintiff's lawsuit in reconsideration*
- *Declare that the Plaintiff in the Conference is the sole legal owner of a land parcel of 11,674M2 (eleven thousand six hundred and seventy-four square meters) consisting of:*
 - *Land parcel of 7,100M2 (seven thousand and one hundred square meters) as described in the Freehold Certificate Number: 1266 / Margajaya Picture Situation Number: 4191/1986 dated 16 July 1986 and;*
 - *A land parcel of 4,574M2 (four thousand five hundred and seventy four square meters) proof of Hak Girik C 250 Persil 23 Class II based on the Sale and Purchase Deed Number: 246/2016 dated December 30, 2016;*
- *Ordered Defendant II in the Conference / Co-Defendant II in the Conference to issue a Certificate of Ownership of a land parcel of 4,574M2 (four thousand five hundred and seventy-four square meters) as filed by the Plaintiff in the Conference / Defendant at the Conference;*
- *Reject the Plaintiff's claim in the Countries other than and the rest;*

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

m. Gugatan Perdata No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
(lanjutan)

Dalam Intervensi:

Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dan Termohon Intervensi I/Penggugat asal secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah sebesar Rp.2.099.000,00 (dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perum Jasa Tirta II mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Banding No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo.No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

n. Gugatan Perdata No. 212/Pdt.G/2019/PN.Jakarta Timur.

Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Cipinang Melayu, Cawang, Jakarta Timur seluas ± 500M2 (lima ratus meter persegi).

Keputusan sela diterima, kompetensi absolut dari Kementerian PUPR diterima oleh Majelis Hakim bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk mengadili perkara ini.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

o. Gugatan Perdata No. 212/Pdt.G/2019/PN.Jakarta Timur.

Adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik PJT II yang terletak di Pangkalan Jati, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur seluas 644M2 (enam ratus empat puluh empat meter persegi).

PJT II dinyatakan menang dalam pokok perkara.

Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada perkembangan atas perkara tersebut.

36. LITIGATION CASES (continued)

m. Civil Law No. 371 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks (continued)

Dalam Intervensi:

To punish the Plaintiff in the Conference / Defendant in the Conference and the original Intervention Respondent / Plaintiff jointly and severally to pay the court fee which up to now amounts to Rp. 2,099,000.00 (two million and ninety nine thousand rupiah);

Perum Jasa Tirta II filed an Application for Appeal at the Registrar's Office of the Bekasi District Court on January 7, 2021 as evidenced by the Letter of Appeal No. 371 / Pdt.G / 2019 / PN.Bks. Jono. 1 / Bdg / 2021 / PN.Bks.

n. Civil Law No. 212 / Pdt.G / 2019 / PN.Jakarta Timur.

The object of the dispute is that there is another party who recognizes and controls the land owned by PJT II, located in Cipinang Melayu, Cawang, East Jakarta, in an area of ± 500M2 (five hundred square meters).

Intermediate decisions are accepted, absolute competence from the Ministry of PUPR is accepted by the Panel of Judges that the State Administrative Court is entitled to hear this case.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

o. Civil Law No. 212 / Pdt.G / 2019 / PN.Jakarta Timur.

There are other parties who recognize and control the land owned by PJT II, located in Pangkalan Jati, Cipinang Melayu Village, Makassar District, East Jakarta covering an area of 644M2 (six hundred forty four square meters).

PJT II was declared victorious in the subject matter.

As of December 31, 2020 there has been no progress on this case.

PERUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM JASA TIRTA II
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

*As of December 31, 2020 and
and for the Year Then Ended
(With Comparative Figures as of December 31, 2019 and
for the Year Then Ended)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

37. EVENTS AFTER THE DATE OF THE FINANCIAL POSITION REPORT

There are no significant events / events after the date of the statement of consolidated financial position (balance sheets) that have a significant effect on overall the financial statements.

38. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2021.

38. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries dated December 31, 2020 and for the year then ended is the responsibility of management, and has been approved by the Board of Directors to be published 05 March, 2021.

INFORMASI TAMBAHAN /
ADDITIONAL INFORMATION

INFORMASI TAMBAHAN :**PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA**

Tanggal 31 Desember 2020

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2019)

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

ADDITIONAL INFORMATION :**PERUM JASA TIRTA II
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ONLY**

As of Desember 31, 2020

(With Comparative As of December 31, 2019)

(Expressed in Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	512.159.231.938	577.267.949.925	Cash and Cash Equivalent
Investasi Jangka Pendek			Short-Term Investments
Piutang Usaha			Trade Receivables
Pihak Berelasi	176.133.218.879	106.676.984.227	Related Parties
Pihak Ketiga	49.299.509.049	46.854.516.722	Third Parties
Aset Keuangan Lancar Lainnya	13.458.078.942	12.750.841.664	Other Current Financial Assets
Persediaan	2.073.688.495	2.548.128.165	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	19.693.128.009	9.599.010.898	Advances and Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	772.816.855.312	755.697.431.601	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Anak	11.983.839.031	16.365.456.574	Subsidiaries Entities Investment
Aset Tetap	561.960.951.317	501.585.996.438	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	58.440.542.076	46.307.703.419	Deferred tax Asset
Aset Tidak Lancar Lainnya	102.125.227.342	79.970.190.130	Other Non-current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	734.510.559.766	644.229.346.561	Total Non Current Asset
JUMLAH ASET	1.507.327.415.078	1.399.926.778.162	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			SHORT-TERM LIABILITIES
Utang Usaha	44.821.615.282	37.738.639.798	Trade Payables
Beban Akrua	21.359.511.723	33.271.428.406	Accrued Expenses
Utang Pajak	25.918.238.785	20.648.515.980	Tax Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	51.184.988.308	46.705.820.236	Other Short-term Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	143.284.354.098	138.364.404.420	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG-TERM LAIBILITIES
Liabilitas Keuangan			Other Long-term
Jangka Panjang Lain	3.130.129.200	3.130.129.200	Financial Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	150.036.722.159	72.762.134.718	Post Retirement Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	153.166.851.359	75.892.263.918	Total Long-Term Laibilities
Jumlah Liabilitas	296.451.205.457	214.256.668.338	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Modal Pemerintah	164.547.635.935	164.547.635.935	Government Capital
Cadangan Umum	13.943.023.591	13.943.023.591	General Reserves
Cadangan Bertujuan	1.027.001.112.300	885.252.980.572	Aiming Reserve
Komponen Ekuitas Lainnya	(118.576.571.677)	(40.587.280.666)	Other Equity Component
Saldo Laba	123.961.009.472	162.513.750.391	Current year profit
Jumlah Ekuitas	1.210.876.209.621	1.185.670.109.823	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.507.327.415.078	1.399.926.778.162	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI TAMBAHAN :**PERUM JASA TIRTA II
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAINNYA - INDUK SAJA**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang berakhir
31 Desember 2019)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

ADDITIONAL INFORMATION :**PERUM JASA TIRTA II
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ONLY**

For the Year Ended December 31, 2020
With Comparative for The Year Ended
December 31, 2019)
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
PENDAPATAN			REVENUES
Pendapatan Usaha	811.099.236.983	812.806.520.201	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(501.546.974.072)	(464.831.285.094)	Cost of Revenues
LABA KOTOR	309.552.262.911	347.975.235.107	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA			OPERATING (EXPENSES) AND NON
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA			OPERATING REVENUES (EXPENSES)
Beban Pemasaran	(5.370.625.562)	(14.424.155.057)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(164.295.936.020)	(167.799.289.358)	General and Administration Expenses
Pendapatan Non Usaha	28.120.061.745	48.701.662.792	Non Operating Revenues
Beban Non Usaha	(29.438.547.266)	(24.053.658.431)	NonOperating Expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	138.567.215.808	190.399.795.053	PROFIT BEFORE TAXES
Penghasilan (Beban) Pajak:			Tax Income (Expenses):
Kini	(26.740.440.980)	(41.821.786.500)	Current Tax
Tangguhan	12.132.838.657	5.265.740.668	Deferred Tax
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak	(14.607.602.323)	(36.556.045.832)	Total Tax Income (Expense)
LABA TAHUN BERJALAN	123.959.613.485	153.843.749.221	NET INCOME FOR CURRENT YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain			Other Comprehensive Income
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi :			Items that will not be reclassified to profit or loss :
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(77.989.291.011)	9.018.484.205	post-employment benefits
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi.	-	-	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Jumlah	(77.989.291.011)	9.018.484.205	Total
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :			Items that will be reclassified to profit or loss :
Aset keuangan tersedia dijual	-	-	Financial assets available for sale
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
Jumlah	-	-	Total
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	(77.989.291.011)	9.018.484.205	Other Comprehensive Income for Current Year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	45.970.322.474	162.862.233.426	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR CURRENT YEAR

INFORMASI TAMBAHAN :**PERUM JASA TIRTA II****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019)

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

ADDITIONAL INFORMATION :**PERUM JASA TIRTA II AND ITS SUBSIDIARIES****CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ONLY**

For the Year Ended December 31, 2020

With Comparative for The Year Ended December 31, 2019)

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Modal/Equity Attributable to Owner of The Owner's Capital							
Uraian	Modal Pemerintah R.I / Government Capital R.I	Cadangan Umum / Reserves	Cadangan Bertujuan / Reserved Appriated	Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	Saldo Laba Ditahan / Retained Earning	Jumlah / Total	Description
Saldo 1 Januari 2019 / 31 Desember 2018	164.547.635.935	13.943.023.591	760.306.186.552	(49.605.764.871)	175.265.726.530	1.064.456.807.737	Balance as of January 1, 2019 December 31, 2018
Peningkatan Cadangan	-	-	124.946.794.020	-	(124.946.794.020)	-	Reserve Increased
Keuntungan Aktuaria	-	-	-	9.018.484.205	-	9.018.484.205	Actuarial Gains
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	(41.648.931.340)	(41.648.931.340)	Dividends Declaired
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	153.843.749.221	153.843.749.221	Profit for the year
Saldo 31 Desember 2019	164.547.635.935	13.943.023.591	885.252.980.572	(40.587.280.666)	162.513.750.391	1.185.670.109.823	Balance as of December 31, 2019
Peningkatan Cadangan	-	-	141.748.131.728	-	(141.748.131.728)	-	Reserve Increased
Keuntungan Aktuaria	-	-	-	(77.989.291.011)	-	(77.989.291.011)	Actuarial Gains
Pembayaran Dividen	-	-	-	-	(20.764.222.676)	(20.764.222.676)	Dividends Declaired
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	123.959.613.485	123.959.613.485	Profit for the year
Saldo 31 Desember 2020	164.547.635.935	13.943.023.591	1.027.001.112.300	(118.576.571.677)	123.961.009.472	1.210.876.209.621	Balance as of December 31, 2020

INFORMASI TAMBAHAN :**PERUM JASA TIRTA II****LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019)

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

ADDITIONAL INFORMATION :**PERUM JASA TIRTA II****STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ONLY**

For the Years Ended December 31, 2020

With Comparative for The Year Ended December 31, 2019)

(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari:			Receipts for:
Pelanggan	736.410.255.443	978.828.832.316	Customer
Pembayaran Kas kepada :			Cash Payment to:
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	(131.134.424.403)	(171.089.489.359)	Suppliers and Other Third Parties
Direksi dan Karyawan	(252.760.452.194)	(245.583.160.891)	Directors and Employees
Pembayaran Beban	(240.599.186.222)	(231.435.283.999)	Expenses Payment
Jumlah dari			Total from
Hasil Aktivitas Operasional	111.916.192.624	330.720.898.067	Operating Activities
Penghasilan Bunga	24.497.206.564	28.734.287.070	Interest Received
Pembayaran Pajak	(70.807.401.759)	(86.085.316.351)	Tax Payment
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	65.605.997.428	273.369.868.786	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTMENT ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	(109.950.492.739)	(69.082.285.225)	Acquisition of Fixed Asset
Penjualan Aset Tetap	-	215.767.580	Sales of Fixed Assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(109.950.492.739)	(68.866.517.645)	Net Cash Flows Used in Investment Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran:			Payments:
Pembayaran Dividen	(20.764.222.676)	(41.648.931.340)	Dividend Payment
Penyertaan Investasi	-	-	Investment Participation
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(20.764.222.676)	(41.648.931.340)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(65.108.717.987)	162.854.419.801	NET DECREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	577.267.949.925	414.413.530.124	CASH & CASH EQUIVALENTS - BEGINNING BALANCE
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	512.159.231.938	577.267.949.925	CASH & CASH EQUIVALENTS - ENDING BALANCE



KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD

CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD

CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
I Umum General			
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The annual report is presented in proper and correct Bahasa Indonesia and is recommended to be presented in English as well		√
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report is printed in fine quality, with easy-to-read font types and sizes.		√
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report presents clear identity of the company.		√
4	Nama perusahaan dan tahun <i>Annual Report</i> . Company's name and the year of Annual Report.	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: Company's name and the year of Annual Report are shown in: 1. Sampul muka; Front cover; 2. Samping; Side margin; 3. Sampul belakang; dan Back cover; and 4. Setiap halaman. Every page.	√
5	Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan. The annual report is available on the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. Includes the current annual report and at the very least the last 4 years.	√
II Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlights			
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's operational results with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. The information contains, among others: 1. Sales/revenues; 2. Profit (loss): a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; 3. Comprehensive income for the period: a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; and 4. Profit (loss) per share. Remark: If the company does not have any subsidiary, the company presents profit (loss) and comprehensive income for the period in total.	14

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's financial position with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. The information contains, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	14
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in the form of comparisons throughout 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. The information encloses 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.	15
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Information on stock price in tables and charts.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. Number of outstanding shares; 2. The information in tables covers: a. Market capitalization based on the Stock Exchange price where the shares were listed; b. The highest, lowest, and closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and c. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed. 3. Information in charts contains at least: a. The closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and b. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed for every quarter in the last 2 (two) years. Remark: if the company does not have market capitalization, information on shares price, and share trading volume, explanation shall be given.	16

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
 CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds of the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2018 dan 2020. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. The information covers: 1. Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Interest rate/yield; 3. Maturity date; and 4. Bonds/sukuk rating in 2018 and 2020. Remark: if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, explanation shall be given.	97
III Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Reports of the Board of Commissioners and Board of Directors			
1	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Assessment on the Board of Directors' performance on the company's management and the basis for the assessment; 2. Perspective on the company's business prospects set by Board of Directors and its basic consideration; 3. Assessment on the whistleblowing system (WBS) implementation/management in the company, and the Board of Commissioners' role in the WBS; and 4. Changes in the Board of Commissioners' composition and the reason behind the change (if any).	26
2	Laporan Direksi Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	42

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
		Contains the following: 1. Analysis of the company's performance, which among others covers: a. Strategic policies; b. Comparisons between realizations and targets; and c. Challenges faced by the company, and the steps for solving them; 2. Analysis of business prospects; 3. Development of good corporate governance implementation on the fiscal year; and 4. Changes in Board of Directors' composition and the reason behind the change (if any).	
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of members of Board Of Commissioners and Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Contains the following: 1. Signatures are given on separate sheets; 2. Statement on full accountability by the Board of Commissioners and Board of Directors on the truthfulness of the Annual Report's contents; 3. Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors by stating names and positions; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that a member of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or written explanation in separate letter from the other member(s) in the event that the person(s) concerned fails to provide a written explanation.	324
IV Profil Perusahaan Company Profile			
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and complete address of the company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, <i>email</i>, dan <i>website</i>. The information contains, among others: name and address, postcode, telephone number, facsimile number, email, and website.	60
2	Riwayat singkat perusahaan Company's brief history	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Includes, among others: date/year of establishment, name, changes in the company's name and the effective date of changes on the company's name (if any). Remark: explanation shall be given in the event that the entity has never conducted name changes	64

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
3	Bidang usaha Business sector	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of, among others: 1. Company's business activities in accordance with the updated Articles of Association; 2. Business activities conducted; and 3. The outcome of products and/or services.	72
4	Struktur Organisasi Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. In the form of chart, consists of names and positions, at least until the position reporting directly to the Board of Directors.	76
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Includes: 1. Corporate vision; 2. Corporate mission; 3. Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners in the fiscal year; and 4. Statement on the Company's corporate culture.	67 - 69
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief CV of members of Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Commissioners in the Company since first appointed.	78

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and brief CV of members of the Board of Directors	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information contains, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Directors in the Company since first appointed.	82
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. Total number of employees (2 years' comparison) and description of competency development which reflects the opportunity for each level of organization.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. The information contains, among others: 1. Number of employees on each organizational level; 2. Number of employees on each educational level; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of employee competence development conducted on the fiscal year, which includes the employee (position) attended training, type of training, and the purposes of training; and 5. Incurred costs for employee competency development on the fiscal year.	107

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
 CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
9	Komposisi Pemegang Saham. Shareholders Composition.	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Detailed name of shareholders comprises of 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Name of shareholders with 5% or more percent of shares; and b. Community shareholding groups with their respective shareholding of less than 5%. 3. Name of Director and Commissioner as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. Remark: if Director and Commissioner do not have direct and indirect share, explanation shall be given.	96
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. List of subsidiaries and/or associates.	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). In the form of table, covers information: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Shareholding percentage; 3. Explanation on the subsidiaries and/or associates' field of business; and 4. Explanation of the operational status of the subsidiaries and/or associates (in operation or has not yet operate).	96
11	Struktur grup perusahaan. Company's group structure.	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV). Company's group structure in the form of chart, describing the parent entity, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	97

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of shares issuance (including private placement) and/or listing of shares from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatitkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, and shares price for each corporate action; 2. Shares number listed after each corporate action; and 3. Name of stock exchange where the shares are listed. Remark: if the company does not have share listing chronologies, explanation shall be given.	97
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of issuance and/or listing of other securities from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatitkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Name of other securities, year of other securities issuance, interest rate/exchange for other securities, and other securities maturity date; 2. Offer value of other securities; 3. Name of stock exchange where the other securities are listed; and 4. Other securities rating. Remark: if the company does not have other securities issuance and listing chronologies, explanation shall be given.	97
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Names and addresses of supporting institutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. The information contains, among others: 1. Name and address of Securities Administration Bureau (BAE)/parties administrating company's securities; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of rating agency.	99
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Awards received in the current fiscal year and/or certification that is still valid in the current fiscal year, both national and international scale.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). The information contains, among others: 1. Name of the award and/or certification; 2. Year of the achievement of awards and/or certification; 3. The agency appreciator and/or certificates; and 4. Validity period (for certification).	22

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address for subsidiaries and/or branch offices or representative office (if any).	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. The information encloses, among others: 1. Names and addresses of subsidiaries; and 2. Names and addresses of branch/representative offices. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any subsidiaries/branches/representatives.	96
17	Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan. Information on the Company's Website.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Covers at least: 1. Information on Shareholders to last individual owner; 2. Code of Conducts; 3. Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS; 4. Separate annual financial statements (the last 5 years); 5. Board Of Commissioners and Board of Directors' Profile; and 6. Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	60

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Education and/or training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal, yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covers at least information (type and party relevant in attending): 1. Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Education and/or training for the Board of Directors; 3. Education and/or training for Audit Committee; 4. Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for other Committee; 6. Education and/or training for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for Internal Audit Unit, attended on the fiscal year. Remark: if there is no education and/or training on the fiscal year, explanation shall be given.	101
V Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis of Company's Performance			
1	Tinjauan operasi per segmen usaha. Operational review per business segment.	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains descriptions of: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: a. Productions; b. Increase/decrease in productions capacity; c. Sales/revenues; and d. Profitability.	131
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description of the company's financial performance.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	153

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
		Analysis of financial performance containing comparisons between current financial performance and previous year's financial performance and causes for the increase/decrease (in narration and tables), among others concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive incomes, and total comprehensive profit of the current period; and 5. Cash flow.	
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the company's solvency and liquidity by presenting ratios that are relevant to the company's industry.	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation on: 1. Solvency for short-term and long-term debts; and 2. Collectability Level of Receivables.	157
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>). Discussion on capital structure and capital structure policy.	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. Explanation on: 1. Capital structure, consists of interest/sukuk-based debt and equity; and 2. Management policy on capital structure policies; and 3. The management basis for the capital structure policy chosen.	160 & 167
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital investments (not funding investment) in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Explanation on: 1. Name of the party involved in the commitments; 2. The purpose of the commitments; 3. Sources of funds expected to meet these commitments; 4. Currency used; and 5. Planned measures to protect the company from risks arising from relevant currency. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any commitments relating to capital investments in the current fiscal year.	167

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital expenditures realized in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purposes of the capital expenditures; and 3. Investment value of capital expenditures spent in the current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there were no capital expenditures realizations.	168
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparisons between the fiscal year's targets and realizations, and expected targets or projection for the coming year relating to revenue, profit, capital structure, and other matters considered important to the company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. The information contains, among others: 1. Comparisons between the fiscal year's targets and realizations; and 2. Expected targets or projection for the coming year.	171
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Material fact and information after the accounting reporting date.	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Material information and facts occurring after the date of the accountant's report and its impact on future performance and business risks. Remark: explanation shall be given in the event that there were no significant events after	178
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description of company's business prospect.	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description of business prospect related to the industry and economy in general, followed by quantitative supporting data from reliable sources.	169 & 172
10	Uraian tentang aspek pemasaran. Description of marketing aspects.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description of marketing aspect on company products and/or services, among other marketing strategies and market share.	174

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividend policy and amount of cash dividends per share and amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i>; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Contains descriptions of: 1. Policy on distribution of dividends; 2. Total dividends distributed; 3. Amount of cash dividends per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. Remark: explanation shall be given in the event that any distribution of dividends is nonexistent.	176
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. Employee and/or Management Stock Ownership Plan (ESOP/MSOP) carried out by the company until the fiscal year.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga <i>exercise</i>. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees and/or management; and 4. Exercise price. Remark: explanation shall be given in the event that there is no program concerned.	177
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization).	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPU atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMS/GMB approval on changes in the use of proceeds (if any). Remark: If there is no information on realization of the use of proceeds from public offering, explanation shall be given.	177

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with affiliated or related parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Name of affiliates and the nature of affiliation; 2. Explanation of the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the current fiscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. Remark: explanation shall be given in the event that there is no transaction concerned.	178
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of regulatory changes having significant impact on the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Name of the law changed; and 2. Its impacts (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact was not significant. Remark: explanation shall be given in the event that there was no regulatory change on the current fiscal year.	180
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of changes in accounting policies applied by the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Amendment to accountancy policy; 2. The reasons for the amendment; and 3. Its impact quantitatively towards financial statement. Remark: explanation shall be given in the event that there are no changes in accounting policies.	180

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17	Informasi kelangsungan usaha. Business continuity information.	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Disclosure of information includes: 1. Potential matters that may significantly affect the business continuity on the current fiscal year; 2. Management assessment on matters in point 1; and 3. Management assumption in carrying out the assessment. Remark: if there were no issues that would affect Company's business continuity in the current fiscal year, the Management's assumption as the base to ensure that there were no potential issues that would significantly affect the business continuity on the current fiscal year shall be disclosed.	181
VI. Good Corporate Governance			
1	Uraian Dewan Komisaris. Board of Commissioners' description.	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). The descriptions contain, among others: 1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners; 2. Assessment on performance of each committee reporting directly to the Board of Commissioners and the basis of assessment; and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of the Board of Commissioners).	198
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Independent Commissioners (the number is minimum 30% from the total of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Includes, among others: 1. The criteria of Independent Commissioner appointment; and 2. Statement of independence from each Independent Commissioner.	206

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
3	Uraian Direksi. Board of Directors' descriptions.	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). The descriptions contain, among others: 1. Scopes of work and responsibilities of each Board of Directors' member; 2. Assessment on performance of committees reporting directly to the Board of Directors (if available); and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of Board of Directors).	212
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment on GCG Implementation for the fiscal year of 2020 consisting of the very least aspects on the Board of Commissioners and Directors.	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. The criteria utilized in assessment; 2. Assessing party; 3. Assessment score on each criterion; 4. Assessment result recommendation; and 5. Reasons on why recommendations are not/have not yet implemented. Remark: If there is no assessment on GCG implementation for the fiscal year of 2020, it shall be disclosed.	194

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Description of remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors.	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Commissioners; 2. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Directors; 3. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Commissioners' member; 4. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Directors' member; 5. Disclosure of indicators for the determination of Board of Directors' remuneration; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member (if available). Remark: If there is no performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member, it shall be disclosed.	226
6	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). Frequency and Meeting Attendance Rate that is attended by the majority of members on Board of Commissioners' meeting (at least once in two months), Board of Directors' meeting (at least once in a month), and Joint Meeting between Board of Commissioners and Directors (at least once in four months).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. The information contains, among others: 1. Meeting Date; 2. Meeting Participants; and 3. Meeting Agenda. for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and Joint Meetings.	205

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major and controlling shareholders, both directly and indirectly, to individual holders.	Informasi dimuat dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan Pemegang Saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Informal education must be disclosed in the form of a scheme or diagram that separates major Shareholders from controlling shareholders. Remark: what referred to as major shareholders are the party that, both directly and indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting right from the total of shares that are published by a company, but is not the controlling shareholders.	258
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Major and/or Controlling Shareholders.	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Affiliate relationship between fellow members of the Board of Directors; 2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliation between fellow members of Board of Commissioners; and 5. Affiliation between fellow members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders. Remark: If there is no aforementioned affiliation, it shall be disclosed.	223

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
9	Komite Audit. Audit Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Includes, among others: 1. The name, position, and work period of audit committee members; 2. Education history (field of study and education institution) and work experience (position, institution, and work period) of audit committee members; 3. Independence of audit committee members; 4. Description of duties and responsibilities; 5. Description of audit committee activities implementation on the fiscal year; and 6. Meeting frequency and attendance of audit committee.	231
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Nomination and/or Remuneration Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of nomination and/or remuneration committee members; 2. Independence of nomination and/or remuneration committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of nomination and/or remuneration committee activities implementation on the fiscal year; 5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee; 6. Statements about the existence of guidelines for nomination and/or remuneration committee; and 7. Policy relating to the board of directors' succession.	237

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Perusahaan. Other committees reporting directly to the Board of Commissioners that are owned by Company.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of other committee members; 2. Independence of other committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of other committee activities implementation on the fiscal year; and 5. Meeting frequency and attendance of others committee.	238
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of duties and functions of Corporate Secretary.	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Includes, among others: 1. Name, and brief CV of corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description of corporate secretary's duties implementation on the fiscal year.	240
13	Uraian mengenai unit audit internal. Description of internal audit unit.	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. Includes, among others: 1. Name of head of internal audit unit; 2. The number of employee (internal auditor) on internal audit unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. The position of internal audit unit within organizational structure; 5. Description of internal audit unit activities implementation on the fiscal year; and 6. Parties appointing and discharging head of internal audit unit.	246

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
14	Akuntan Publik. Public Accountant.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. The name and year of public accountant that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 2. The name and year of Public Accountants Firm that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 3. The amount of fee for each type of service that is provided by Public Accountants Firm on the last fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountants Firm and public accountant other than auditing service on annual financial statement on the current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there is no service aforementioned.	255
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description of the company's risk management.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Includes, among others: 1. Explanation of risk management system implemented by the company; 2. Explanation of review result carried out over risk management system on the fiscal year; 3. Explanation of risks experienced by the company; and 4. Efforts implemented in managing those risks.	260
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Description of internal control system.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. Includes, among others: 1. Brief explanation of internal control system, among them are financial and operational control. 2. Explanation of compliance between applied internal control system and regulated framework that is acknowledged internationally (COSO-internal control framework); and 3. Explanation of review result carried out over internal control system implementation on the fiscal year.	256

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Description of corporate social responsibility that is related to social responsibilities.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial. 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan. 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan. 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban. 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i>. 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijaankan. 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. Includes information on: 1. Information on commitment to social responsibility 2. Information on methods and scope of due diligence on social, economic, and environmental impacts of the company activities 3. Information on important stakeholders affected or influenced by the impact of company activities 4. Information on important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities 5. Information on the scope of corporate social responsibility that is both an obligation or more than obligation 6. Information on the company's strategies and work programs in handling social, economic, and environmental issues in stakeholders' engagement, and increasing value for stakeholders and shareholders 7. Information on various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business implementation 8. Information about financing and budgets of social responsibility	290

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
18	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia. 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Azasi Manusia. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in Human Rights 4. Information on the CSR initiatives implementation in Human Rights 5. Information on the CSR awards and achievement in Human Rights	300
19	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil. Description of corporate social responsibility related to the core subject, i.e. fair operations	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil. 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in fair operations 4. Information on the CSR initiatives implementation in fair operations 5. Information on the CSR awards and achievement in fair operations	302

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
20.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. Description of corporate social responsibility related to environment.	Mencakup antara lain: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan. 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen. 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup. 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Includes, among others: 1. Information on environmental commitments and policies 2. Information on important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company 3. Information about the target/plan of activities in 2020 set forth by management; 4. Information about activities carried out in relation to the environmental programs related to the company's operational activities 5. Information on CSR initiatives related to environment 6. Information related to the quantitative impacts of such programs; and material utilization that is environment-friendly and recyclable, company's waste processing system, environmental issues complaint mechanism, considerations on credit grants to customer related to environmental aspects, etc. 7. Certification acquired in the environmental field.	304

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
21	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Description of corporate social responsibility that is related to employment, health, and work safety	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck ketenagakerjaan. 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan. 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan <i>gender</i> dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Corporate social responsibility commitment and policies related to employment 2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment 3. Information about the target/plan of activities in 2020 set forth by management; and 4. Activities that have been carried out and quantitative effects out of those activities 5. Information related to employment, occupational health, and safety practices, such as gender equality and equal work opportunity, occupational facilities and safety, employee turnover rate, workplace accidents, remuneration, whistleblowing mechanism on employment, etc.	310
22	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Description of corporate social responsibility that is related to responsibilities to consumers.	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2020 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Goals/activity plan in the year 2020 that was established by management; and 2. Activities that have been carried out and effects from those activities 3. Related to product responsibility, such as consumer's health and safety, product information, facilities, number and response on customers' complaints, etc.	321

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
23	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Description of corporate social responsibility that is related to social and community development	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan. 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan. 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen. 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan. 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi, pelatihan mengenai anti-korupsi, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Core corporate social responsibility policies and commitments, the core subject of social and community development 2. Information on social issues that are relevant to the company 3. Information about social risks managed by the company 4. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development 5. Goals/activity plan in the year 2020 that was established by management; 6. Activities that have been carried out and effects from those activities; and 7. Expenditure 8. Related to social and community development, such as the use of local workforce, empowerment of surrounding communities, reparation of social facilities and infrastructure, other forms of donations, dissemination on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, etc.	316

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Significant cases currently faced by the company, subsidiaries, Board of Directors and/or Board of Commissioners member(s) serving during the period of the annual report	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Principle case/lawsuit; 2. Dispute/lawsuit settlement status; 3. Risks faced by the company and nominal value of dispute/ lawsuit; and 4. Administrative sanctions imposed to Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members, by relevant authorities (capital market, banking, and others) on the current fiscal year (or statement confirming no imposition of administrative sanction exists). Remark: explanation shall be given in the event that the company, subsidiaries, or member of the Board of Commissioners and Board of Directors do not have any disputes.	270
25	Akses informasi dan data perusahaan. Access to information and corporate data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i>, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description of the availability of company information and data to the public, such as through website (in Bahasa Indonesia and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.	244
26	Bahasan mengenai kode etik. Discussion on code of ethics.	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Code of ethics basis; 2. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of organization; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanctions on each type of violations that are regulated on the code of ethics (normative); and 5. Number of code of ethics violation with the sanctions given on current fiscal year. Remark: explanation shall be given in the event that there is no code of ethics violation in the current fiscal year.	271

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
27	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> . Disclosure on whistleblowing system.	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Consists of the description of whistleblowing system, i.e.: 1. Submission of violation reports; 2. Whistleblower protection; 3. Handling of complaints; 4. Parties handling the complaints; and 5. Number of complaints received and processed in the current fiscal year; and 6. Sanctions/follow up on the complaints when the process is finished on fiscal year. Remark: Explanation shall be given in the event that there are no complaints received and processed until finish on the current fiscal year.	277
28	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of Company's policy on composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors by education (field of study), work experience, age, and gender. Remark: explanation and consideration shall be given in the event that concerned policy is nonexistent.	207
VII Informasi Keuangan Financial Information			
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Statements from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Accountability of Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations on the Accountability of Financial Statements.	327 - 329
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on financial statements.		331
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Independent auditor's description of the opinion.	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik. The description consists of: 1. Names and signatures; 2. Dates of audit report; and 3. Public Accountants Firm's and Public Accountant's license numbers.	331 - 335

KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
4	Laporan keuangan yang lengkap. Comprehensive Financial Statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Consists comprehensively of elements of financial statements: 1. Statements of financial position; 2. Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash flows; 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information regarding previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of comparative period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes statements of post-financial statements, or when an entity reclassifies posts in the financial statements (if relevant).	336
5	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability level.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of performance/profit (loss) between current year and previous year.	335 - 336
6	Laporan Arus Kas. Statements of Cash Flow.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Fulfills the following regulations: 1. Classification in three categories of activity: operation, investment, and funding; 2. The use of direct method in cash flow reporting from operational activities; 3. Separation of presentation between cash receipts and/ or cash expenses for the current year in operation, investment, and funding activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the financial statements.	338

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Accountancy Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Consists at least: 1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK); 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements; 3. Income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments.	358 & 363
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of transactions with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Matters to be disclosed are as follows: 1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties; 2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and 3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities related.	368
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure of matters relating to taxation.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Matters to be disclosed: 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income) and accounting profit; 3. Statement acknowledging that Taxable Profits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax's Annual Tax Returns (SPT) year 2020; 4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the financial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax disputes.	444

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure of matters relating to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Matters to be disclosed: 1. Depreciation method used; 2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model; 3. Methods and significant assumptions used to estimate fixed assets' fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets' fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassification.	391
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosure of matters relating to operational segment.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Matters to be disclosed: 1. General information covering the factors used to identify unreported segment; 2. Information regarding profit and loss, assets, and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and material elements of the other segments against relevant amount in the entity; and 4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customer.	412

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosure related to financial instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters to be disclosed: 1. Details on financial instruments that are owned along with the classifications; 2. Fair value of each group of financial instruments; 3. Explanation on risks related to financial instruments; market risk, credit risk, and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis relating to financial instruments.	506
13	Penerbitan laporan keuangan. Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Matters to be disclosed are as follows: 1. Authorization date of publication of the financial statements; and 2. Party responsible for authorizing financial statements.	329

🏠 www.jasatirta2.co.id



KANTOR PUSAT

Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur,
Purwakarta, Jawa Barat 41152

☎ (0264) 201 972

📠 (0264) 201 971

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

Jl. H. Agus Salim No. 69
Jakarta Pusat

☎ (021) 3193 1606